WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

(2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.

(3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

(1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

(2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;

e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;

f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;

g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;

h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;

i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;

k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;

l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;

n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;

o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;

p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;

q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;

r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;

s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;

t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;

u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;

v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;

w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;

z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;

aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;

cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan

dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025 disusun dengan prinsip–prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana untuk tahun 2025;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

23. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar bagian maupun bagian dengan perangkat daerah lainnya.

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025;
- Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025; serta
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025, dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 serta prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Tahun 2025 dan rencana tindak lanjut LKj IP Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Sub Bab ini disajikan Review atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2023) dan perkiraan pencapaian realisasi Rencana Kerja pada tahun berjalan (2024) sesuai dengan APBD Tahun 2024. Berkenaan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah didasarkan pada realisasi atas Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Adapun Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2 Tahun Rencana) dan 2024 (n-1 Tahun Rencana) relatif sama, namun dalam sub kegiatan atau aktivitasnya dimungkinkan ada perbedaan. Program yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	BAGIAN PEMERINTAHAN									
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3538) Nilai	Sedang (3,06) Nilai	Sangat Tinggi (3,3532) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,12	Sangat Tinggi (3,3534) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,11
	Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	100 %	47,62 %	57,14 %	90,48 %	158,35 -	71,43 %	71,43 %	71,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.04.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	21 kelurahan	21 kelurahan	18 kelurahan	21 kelurahan	116,67	19 kelurahan	19 kelurahan	90,48
2.13.04.02.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	-	21 dokumen	21 dokumen	100,00	21 dokumen	21 dokumen	100,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
	Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,25 indeks	84,88 indeks	84,89 Indeks	85,15 Indeks	100,31	83,85 Indeks	85,15 Indeks	101,55
	Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	24 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	100,00	6 Rumusan Kebijakan	18 Rumusan Kebijakan	75,00
4.01.02.02.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 Dokumen	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00	25 Dokumen	50 Dokumen	50,00
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3536) Nilai	Sedang (3,06) Nilai	Sangat Tinggi (3,3532) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,12	Sangat Tinggi (3,3534) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,11
	Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	66,67 %	83,33 %	83,33 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %	66,67 %	83,33 %	83,33 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	40 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	20 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.02.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	10 Dokumen	50,00
4.01.02.02.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	16 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	8 Dokumen	50,00
4.01.02.02.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 %	83,33 %	83,33 %	83,33 %	100,00	83,33 %	83,33 %	100,00
4.01.02.02.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	32 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	16 Dokumen	50,00
	BAGIAN HUKUM									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	112,86 %	100 %	122,86 %	122,86	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	131,23 %	100 %	134,01 %	134,01	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1280 Dokumen	-	320 Dokumen	438 Dokumen	136,88	320 Dokumen	758 Dokumen	59,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.02.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	16 Kasus	-	4 Kasus	4 Kasus	100,00	4 Kasus	4 Kasus	50,00
4.01.02.02.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	280 Dokumen	-	70 Dokumen	86 Dokumen	122,86	70 Dokumen	156 Dokumen	55,71
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	18 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	100,00	4 rumusan kebijakan	12 rumusan kebijakan	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.02.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.02.02.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.03.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	24 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	100,00	6 rumusan kebijakan	18 rumusan kebijakan	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.03.02.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.03.02.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Laporan	50,00
4.01.03.02.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	16 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	8 Dokumen	50,00
4.01.03.02.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	90 %	0 %	82,5 %	84 %	101,82	-	84 %	93,33
4.01.03.02.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*	90 %	31,4 %	50 %	25 %	50,00	63,33 %	50,33 %	55,92
4.01.03.02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	40 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	100,00	10 bahan kebijakan	30 bahan kebijakan	75,00
4.01.03.02.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00
4.01.03.02.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	54 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100,00	16 Laporan	32 Laporan	59,26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.03.02.02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAIK (84,00) Nilai	BAIK (82,84) Nilai	BAIK (82) Nilai	BAIK (85,99) Nilai	104,87	BAIK (82,5) Nilai	BAIK (86) Nilai	102,38
		Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	9/9 Nilai	4/9 Nilai	5/9 Nilai	8/9 Nilai	160,00	6/9 Nilai	9/9 Nilai	100,00
4.01.03.02.02.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	320 Dokumen	-	80 Dokumen	40 Dokumen	50,00	80 Dokumen	120 Dokumen	37,50
4.01.03.02.02.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.03.02.02.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200 Orang	-	300 Orang	300 Orang	100,00	300 Orang	600 Orang	50,00
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	BB (75,50) Nilai	BB (73,73) Nilai	BB (73,74) Nilai	BB (74,79) Nilai	101,42	BB (74,00) Nilai	BB (75,00) Nilai	99,34
		3. Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan *"Good Governance"*	66,67 %	-	-	-	-	33,33 %	33,33 %	49,99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100 %	76,67 %	76,67 %	80,00 %	104,34	76,77 %	80,00 %	80,00
	BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100 %	76,67 %	65,52 %	80 %	122,10	75,86 %	80,00 %	80,00
4.01.03.02.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	23 OPD	22 OPD	24 OPD	109,09	24 OPD	24 OPD	80,00
4.01.01.02.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00
4.01.01.02.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	6 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
	Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87,00) Nilai	Baik (84,50) Nilai	Baik (84,50) Nilai	Baik (85,60) Nilai	101,30	Baik (84,00) Nilai	Baik (86,86) Nilai	99,84
		2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	50 %	-	-	-	-	25 %	25 %	50,00
	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100 %	100 %	27,59 %	30,00 %	108,74	100 %	100 %	100,00
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25 %	-	-	-	-	25 %	25 %	50,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	48,28 %	24,14 %	27,59 %	13,33 %	48,31	34,48 %	30 %	62,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	23 OPD	22 OPD	24 OPD	109,09	24 OPD	24 OPD	80,00
4.01.01.02.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	10 Laporan	50,00
4.01.01.02.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	6 Dokumen	50,00
		3. Nilai rata-rata SKM Setda	Sangat Baik (90,00) Nilai	Sangat Baik (91,69) Nilai	Baik (87,00) Nilai	Baik (86,02) Nilai	98,87	Sangat Baik (88,32) Nilai	Sangat Baik (89,00) Nilai	98,89
	BAGIAN UMUM									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.01.02.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Laporan	50,00
4.01.01.02.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00
4.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	32 Unit	-	29 Unit	29 Unit	100,00	-	29 Unit	90,63
4.01.01.02.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	210 Unit	-	26 Unit	26 Unit	100,00	1 Unit	27 Unit	12,86
4.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	75,00
4.01.01.02.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	-	48 Laporan	48 Laporan	100,00	48 Laporan	96 Laporan	50,00
4.01.01.02.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100,00	6 Laporan	12 Laporan	50,00
4.01.01.02.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	100,00	13 Laporan	26 Laporan	50,00
4.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara seuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	4 Unit	50,00
4.01.01.02.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	260 Unit	-	65 Unit	65 Unit	100,00	65 Unit	130 Unit	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	-	40 Unit	40 Unit	100,00	118 Unit	158 Unit	52,67
4.01.01.02.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00	-	1 Unit	33,33
4.01.01.02.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	8 Unit	50,00
4.01.01.02.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ bulan	-	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100,00	2 Orang/ bulan	4 Orang/ bulan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	92 Paket	-	23 Paket	23 Paket	100,00	23 Paket	46 Paket	50,00
4.01.01.02.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	-	2 Orang	2 Orang	100,00	2 Orang	4 Orang	50,00
4.01.01.02.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ bulan	-	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100,00	2 Orang/ bulan	4 Orang/ bulan	50,00
4.01.01.02.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	8 Paket	50,00
4.01.01.02.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	8 Paket	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	24 Paket	50,00
4.01.01.02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	80 %	80 %	80 %	100,00	80 %	80 %	100,00
4.01.01.02.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	132 Laporan	-	33 Laporan	31 Laporan	93,94	33 Laporan	64 Laporan	48,48
4.01.01.02.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1600 Laporan	-	400 Laporan	439 Laporan	109,75	400 Laporan	839 Laporan	52,44
4.01.01.02.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12220 Laporan	-	3055 Laporan	2624 Laporan	85,89	3055 Laporan	5679 Laporan	46,47
4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai (90,00)	A Nilai (85,29)	A Nilai (87,00)	A Nilai (85,55)	98,33	A Nilai (88,00)	A Nilai (86,00)	95,56
	Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai (90,00)	A Nilai (85,29)	A Nilai (87,00)	A Nilai (85,55)	98,33	A Nilai (88,00)	A Nilai (86,00)	95,56
	BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK Nilai (90,00)	SANGAT BAIK Nilai (91,69)	BAIK Nilai (87,00)	BAIK Nilai (86,02)	98,87	BAIK Nilai (88,32)	BAIK Nilai (89,00)	98,89
4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	20 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00
4.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	12 Paket	50,00
4.01.01.02.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	336 Orang	-	84 Orang	84 Orang	100,00	84 Orang	168 Orang	50,00
	BAGIAN UMUM									
4.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00	1 Paket	3 Paket	60,00
4.01.01.02.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	-	7 Paket	7 Paket	100,00	7 Paket	14 Paket	50,00
4.01.01.02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	6 Paket	50,00
4.01.01.02.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	680 Paket	-	170 Paket	177 Paket	104,12	170 Paket	347 Paket	51,03
4.01.01.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	4 Paket	50,00
4.01.01.02.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	24 Dokumen	48 Dokumen	50,00
4.01.01.02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 Laporan	-	130 Laporan	130 Laporan	100,00	130 Laporan	260 Laporan	50,00
4.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang / bulan	-	84 Orang/ bulan	84 Orang / bulan	100,00	84 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	50,00
4.01.01.02.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	50,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Jika disandingkan dengan pencapaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023 maka dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.1.2
Ketercapaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Urusan / Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	URUSAN PENUNJANG/ SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	104,57%	8	104,25%	100,31%
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	83,33%	6	111,20%	74,94%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4	87,89%	14	100,31%	87,61%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	277,08%	1	116,67%	237,49%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2023, yang tercapai sesuai target atau melebihi target ada 2 (dua) Program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Administrasi Pemerintahan Desa. Sedangkan yang kurang dari target ada 2 (dua) program, yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian masing-masing sebesar 83,33% dan 87,89%, dengan permasalahan-permasalahan antara lain:
   a. Program Perekonomian dan Pembangunan
      - Belum/rendahnya kontribusi BUMD dalam memberikan pendapatan daerah
      - Aplikasi dari LKPP sering error (SIRUP, LPSE, Katalog dan SIKAP) sehingga menghambat proses PBJ
      - Pada paket pekerjaan konstruksi, perencanaan juga dilaksanakan pada tahun berjalan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lambat menunggu perencanaan selesai
      - Revisi Dokumen perencanaan PBJ yang telah direviu oleh UKPBJ lambat dikembalikan oleh PD
      - Adanya kebijakan peningkatan transaksi PBJ melalui katalog lokal sehingga PBJ melalui tender / tender cepat / seleksi berkurang paketnya dan beralih ke katalog lokal

   b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
      - Belum adanya reward and punishmet terhadap penerapan RB
      - Adanya mekanisme penerapan RB yang berbeda di tahun 2023 (RB general dan RB Tematik) yang disertai regulasi yang berubah-ubah dalam implementasinya
      - Keterbatasan pemahaman PD tentang perlunya reviu SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
      - Penyusunan SKM PD belum sepenuhnya berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
      - Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah
      - Adanya kebijakan perubahan nama jabatan yang tidak diikuti dengan Anjab, ABK, SKJ dan Evjab
      - Pemahaman tentang budaya kerja BerAKHLAK kurang massif dilakukan diseluruh perangkat daerah
      - Waktu penyelesaian pelayanan surat menyurat tergantung pada agenda pimpinan
      - Banyaknya permintaan pelayanan dari PD yang tidak sesuai standar dan tidak masuk dalam perencanaan
      - Sarana dan prasarana fasilitasi keprotokolan belum sesuai standar baik jumlah maupun jenisnya
      - Indikator survey kepuasan masyarakat yang perlu ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan di Sekretariat Daerah yaitu persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan dan kompetensi pelaksana

Melihat berbagai permasalahan-permasalahan diatas, maka pada tahun 2025 perlu dilakukan langkah perbaikan atau strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan
   - ✓ Mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar

- ✓ Menetapkan perjanjian kinerja dan memonev secara berkala atas capaian kinerja BUMD
- ✓ Mengintensifkan klinik konsultasi pada BLP agar hambatan-hambatan dalam permasalahan PBJ dan implementasi kebijakan dari pusat segera dapat dicarikan solusi

Sedangkan kebijakan pencapaian target kinerja penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan difokuskan pada:

1. Restrukturisasi organisasi BUMD
2. Penetapan *Roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
3. Penetapan kebijakan penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa baik dari sisi pelaku usaha, pelaku pengadaan barjas, Pejabat PBJ, kebijakan LPSE, dan SIRUP
4. Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

b. Strategi meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

- ✓ Pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas (SAKIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja
- ✓ Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
- ✓ Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
- ✓ Pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

Sedangkan kebijakan pencapaian target kinerja penyelenggaraan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada:

1. Kebijakan pemberian *reward and punishmet* terhadap penerapan RB
2. Perubahan kebijakan penerapan SAKIP dan RB menyesuaikan dengan kebijakan diatasnya
3. Kebijakan pelaksanaan reviu SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Laporan SKM Perangkat Daerah berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
5. Kebijakan menciptakan inovasi perangkat Daerah 1 atau 2 inovasi setiap tahun

2. Dari total 22 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2023 semuanya mencapai target atau melebihi target kegiatan. Kedepan tetap perlu dilakukan langkah membuat perencanaan anggaran dan kinerja lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Terdapat 5 Kegiatan yang capaiannya melebihi target yakni:
   1. Kegiatan Pembiayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      Capaian kegiatan pembiayaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa sebesar 116,67% dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam mewujudkan administrasi pemerintah desa yang baik.
   2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Capaian kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum sebesar 134,01% dipengaruhi komitmen personil pelaksana yang sangat baik, adanya penambahan personil dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi, dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin dengan stakeholder terkait, serta adanya digitalisasi pengusulan produk hukum dari masing-masing perangkat daerah sehingga mempercepat proses penyusunan produk hukum.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   Capaian kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 104,87% disebabkan tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, responsif terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar PD intensif dilaksanakan, dan percepatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan melaksanakan pendampingan kepada PD.
4. Kegiatan Penataan Organisasi
   Capaian kegiatan penataan organisasi sebesar 109,09% dikarenakan koordinasi yang baik dengan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta lintas PD, Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, kolaborasi antar PD dan lintas sektor untuk pencapaian kinerja instansi pemerintah, serta integrasi aplikasi manajemen kinerja

3. Dari total 62 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah rata-rata mampu memenuhi target yang ditetapkan meskipun ada 2 yang tidak terpenuhi, yaitu Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan capaian sebesar 85,89% dan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan capaian sebesar 93,94% karena belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda, belum termanfaatkannya sukma-e Jatim secara maksimal oleh pengguna layanan, serta kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan.
   Melihat dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah perbaikan diantaranya sosialisasi lebih intensif kepada pengguna layanan untuk menggunakan sukma-e jatim sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait, serta optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan PD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan selain mempunyai indikator kinerja utama dalam mencapai kinerja organisasi maka berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah/RPJMD Kota Blitar					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	IKK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	IKK	1,13%	1,15%	1,17%	1,19%	1,20%	0,80%	49,40%	76,41 %	52,02 %	50,82%	- Realisasi persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami perubahan kebijakan penghitungan dimana pada tahun 2022 data pengadaan yang dihitung metode kompetitif meliputi: tender, seleksi dan tender cepat, sedangkan mulai tahun 2023 data pengadaan yang dihitung metode kompetitif meliputi: tender, seleksi, tender cepat, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan dikecualikan - Proyeksi penurunan realisasi tahun 2025 dan 2026 dari tahun 2024 disebabkan adanya kebijakan konsolidasi paket pengadaan yang sejenis

No	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah/RPJMD Kota Blitar					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	IKK	98,80 %	98,85 %	98,90 %	98,95%	99,00%	87,39%	90,99%	87,50%	89,00 %	92,00%	Ketidaktercapaian target 100% disebabkan Perangkat Daerah kurang tertib mencatatkan/upload bukti dukung relisasi PBJ di LPSE
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	IKK	95,00 %	61,00 %	83,00 %	85,00%	86,00%	94,11%	94,50%	67,00 %	78,00 %	81,00%	Alat ukur yang digunakan untuk menghitung capaian PDN yaitu aplikasi p3dn.sipd mulai bulan Oktober 2023 sudah tidak bisa diakses sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk menghitung secara pasti realisasi PDN di tahun selanjutnya
5	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	IKU	55.17 %	65.52 %	76,77 %	86,21 %	100%	76.67%	80,00 %	80,00%	80,00%	80,00%	Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi mengamanatkan bahwa evaluasi RB terdiri dari RB General dan RB Tematik sehingga fokus evaluasi tidak sama dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun untuk mengatasi hal tersebut, fokus perhitungan capaian indikator PD Kota Blitar diperoleh dari PD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB General dan Tematik tahun 2024, sejumlah 24 PD dari total 30 PD yang ada.

No	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah/RPJMD Kota Blitar					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari target rumusan kebijakan pemerintahan sebanyak 2 (dua) rumusan/menyesuaian setiap tahunnya ditambah dengan 6 (enam) rumusan kebijakan perekonomian rutin setiap tahunnya dan 4 (empat) rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat rutin setiap tahunnya akan diupayakan selalu diimplementasikan keseluruhan sesuai target yang ditetapkan
7	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari target rumusan kebijakan administrasi pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) rumusan rutin setiap tahunnya akan diupayakan selalu diimplementasikan keseluruhan sesuai target yang ditetapkan

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Dari indikator kinerja tersebut diatas, berdasarkan penetapan kinerja utama perangkat daerah sesuai RPJMD Kota Blitar 2021-2026 ada 3 (tiga) indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Sekretariat Daerah mendukung *Misi ke 1* "Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan", *Tujuan ke 1* "Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis", *Sasaran ke 1* "Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama" dan *Misi ke 5* "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi", *Tujuan* "Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi ", *Sasaran ke 1* "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah". Dimana jika target kinerja pada Sekretariat Daerah tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar yaitu Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Status EKPPD serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu–isu strategis dimaksud antara lain :

a. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan dan keagamaan
   a) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan produk hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *up to date*.
   b) Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
   c) Belum optimalnya implementasi dan monev pelaksanaan program RT Keren
   d) Belum tersedianya road map penanganan kemiskinan yang selaras dengan program perlindungan sosial
   e) Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama

b. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
   1. Belum tersedianya roadmap kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
   2. Belum/rendahnya kontribusi BUMD dalam memberikan pendapatan daerah
   3. Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa
   4. Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

c. Isu terkait penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
   1. Belum terinternalisasinya reformasi birokrasi dan SAKIP secara menyeluruh
   2. Manajemen kinerja belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung budaya kerja ASN ber-AKHLAK

d. Isu terkait peningkatan kualitas pelayanan publik
   1. Belum optimalnya pemberian pelayanan sesuai standar
   2. Perlunya adaptasi peningkatan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI guna mendukung digitalisasi tata kelola arsip pemerintahan
   3. Budaya menciptakan inovasi guna efisiensi pelayanan

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu upaya:
   a) Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren serta melaksanakan monev dampak program RT Keren secara berkala oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota
   b) Menyusun database bidang kesejahtaraan sosial dan masyarakat yang sistematis dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan
   c) Peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi, pendampingan dan monev penyusunan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah sehingga bisa mengarah ke penerapan Undang-Undang Cipta Kerja
   d) Menyusun road map penanganan kemiskinan yang selaras dengan program perlindungan sosial

2. Dalam mewujudkan penyelenggaraan perekonomian, administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik maka perlu dilakukan:
   a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta Kebijakan Daerah
   b. Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: Rebranding Tata Kelola BUMD, Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 serta Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
   c. Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar serta Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar
   d. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP
   e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE
   f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan PD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN

3. Dalam meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya:
   a) Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas (SAKIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja
   b) Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis

4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah maka perlu dilakukan:
   a. Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
   b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
   c. Perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi;
3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing;
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup;
5. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital;

6. Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi, maka Sekretariat Daerah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BAGIAN PEMERINTAHAN				1.821.570.658	BAGIAN PEMERINTAHAN				2.555.555.870	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				108.146.500	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				196.636.270	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				108.146.500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				196.636.270	
I	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 %	108.146.500	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 %	196.636.270	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	20 kelurahan	108.146.500	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	20 kelurahan	196.636.270	
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	108.146.500	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	196.636.270	Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk fasilitasi lomba kelurahan
II	UNSUR PENDUKUNG				1.713.424.158	UNSUR PENDUKUNG				2.358.919.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN PEMERINTAHAN					
A	SEKRETARIAT DAERAH				1.713.424.158	SEKRETARIAT DAERAH				2.358.919.600	
I.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	1.713.424.158	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	2.358.919.600	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	1.051.112.658	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	2.358.919.600	
			Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %		
			Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan	100 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			umum yang terfasilitasi					umum yang terfasilitasi			
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %		
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	252.794.200	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	562.638.900	- Penyesuaian pagu untuk fasilitasi dan koordinasi lintas sektor - Perlunya anggaran jasa konsultansi penyusunan kebijakan rupabumi
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	643.624.958	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	858.664.700	- Terdapat pengalihan anggaran perjalanan dinas Sub Kegiatan Evdeskel - Terdapat anggaran program prioritas RT Keren berupa

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pendampingan, monev dan RT Keren Award
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	154.693.500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	704.007.300	- Terdapat pengalihan anggaran perjalanan dinas Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	662.311.500	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	233.608.700	
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	662.311.500	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	233.608.700	
	BAGIAN HUKUM				765.139.900	BAGIAN HUKUM				660.139.700	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				765.139.900	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				660.139.700	
	SEKRETARIAT DAERAH				765.139.900	SEKRETARIAT DAERAH				660.139.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	765.139.900	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	660.139.700	
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	765.139.900	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	660.139.700	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	312.338.600	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	221.168.200	
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	271.810.700	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	190.013.500	
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	180.990.600	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	248.958.000	Perlu adanya penganggaran updating JDIH guna meningkatkan kualitas Pendokumentasian Produk Hukum dan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pengelolaan Informasi Hukum
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.647.673.520	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10.014.621.767	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				9.647.673.520	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				10.014.621.767	
	SEKRETARIAT DAERAH				9.647.673.520	SEKRETARIAT DAERAH				10.014.621.767	
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	8.749.278.500	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	9.196.827.200	
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Kebijakan	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	8.749.278.500	Pelaksanaan Kebijakan	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	9.196.827.200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesejahteraan Rakyat		kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti			Kesejahteraan Rakyat		kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti			
			Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan				Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan		
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	8.531.039.500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	8.979.252.900	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan priotitas kebutuhan
1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	2 Dokumen	114.023.300	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	2 Dokumen	122.240.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	104.215.700	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, PerpustakaaN, Kearsipan,	2 Dokumen	95.333.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Trantibum Linmas			
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	898.395.020	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	817.794.567	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	631.438.400	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	617.794.567	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	219.376.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	215.867.767	
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	220.108.200	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	218.140.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	191.954.200	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	183.786.800	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	266.956.620	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	200.000.000	
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	266.956.620	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	200.000.000	
	BAGIAN UMUM				26.170.548.770	BAGIAN UMUM				25.844.539.541	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				26.170.548.770	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				25.844.539.541	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				26.170.548.770	SEKRETARIAT DAERAH				25.844.539.541	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	26.170.548.770	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	25.844.539.541	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	11.158.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.100.000	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	11.158.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.100.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	12.540.692.028	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	13.974.748.327	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	12.531.347.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	13.970.898.327	Menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan gaji, tunjangan dan adanya penambahan gaji tenaga P3K
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se	4 Laporan	9.345.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4 Laporan	3.850.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			mesteran SKPD					Semesteran SKPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	9.450.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	4.950.000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.210.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.750.000	
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD tidak diambil pada Renja 2025
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.240.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.200.000	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	1.060.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	700.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.060.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	700.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.684.822.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.436.416.400	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.986.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.912.200	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	204.170.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	108.346.900	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	40.479.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	31.781.900	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	818.806.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	773.355.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.643.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.698.700	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	64.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	48.600.000	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	407.937.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	382.721.700	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	90.239.428	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	22.205.800	
6.1	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tidak diambil pada Renja 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	90.239.428	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	22.205.800	
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak diambil pada Renja 2025
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4.338.604.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4.068.456.000	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	437.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	441.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	1.049.261.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	864.885.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Air dan Listrik yang Disediakan					Air dan Listrik yang Disediakan			
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	30.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12.000.000	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.258.306.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.191.130.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.646.655.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.461.992.800	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	455.630.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	455.618.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	503.228.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	495.752.600	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak diambil pada Renja 2025
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 unit	237.929.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 unit	163.157.500	
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud tidak diambil pada Renja 2025
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	449.868.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	347.464.000	Target menyesuaikan dengan kebutuhan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak diambil pada Renja 2025
8.8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Sub Kegitan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak diambil pada Renja 2025
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	923.716.314	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	923.673.914	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178.952.314	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178.952.314	
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	138.764.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	138.721.600	
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6.000.000	
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	3.193.549.400	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	3.093.126.500	
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.564.818.400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.514.704.900	
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.332.649.100	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.282.342.400	
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	296.081.900	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	296.079.200	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	1.730.600.600	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	857.168.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	1.459.152.300	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	717.500.000	
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	77.384.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	66.471.000	
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	194.064.300	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	73.197.800	
	BAGIAN ORGANISASI				840.298.873	BAGIAN ORGANISASI				880.299.400	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				840.298.873	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				880.299.400	
	SEKRETARIAT DAERAH				840.298.873	SEKRETARIAT DAERAH				880.299.400	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai	840.298.873	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai	880.299.400	
			Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	41,38 %				Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	41,38 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	86,21 %				Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	86,21 %		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	15.272.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	15.554.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.119.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.054.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.153.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	151.462.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	118.180.000	
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	65.932.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	29.865.400	
2.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	85.530.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	88.314.600	
3	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	673.563.673	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	746.565.400	
3.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	172.976.300	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	182.878.800	
3.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	5 Laporan	248.642.540	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	5 Laporan	334.013.100	- Perlu penyusunan hasil SKM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan	Publik dan Tata Laksana				Semua Kelurahan	Publik dan Tata Laksana			Tingkat Pemda semesteran - Perlu fasilitasi ISO bagi PD lokus penilaian Ombudsman
3.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	221.689.500	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	199.571.500	
3.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	18.555.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	16.794.000	
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	11.700.333	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	13.308.000	
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				618.969.100	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				638.969.100	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				618.969.100	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				638.969.100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				618.969.100	SEKRETARIAT DAERAH				638.969.100	
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,67 %	618.969.100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,67 %	638.969.100	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	159.849.100	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	149.597.800	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	36.413.400	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	46.413.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	123.435.700	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	103.184.400	
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	7 nilai	459.120.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	7 nilai	489.371.300	
			SKM Layanan UKPBJ	83 nilai				SKM Layanan UKPBJ	83 nilai		
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	459.120.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	238.765.100	
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	59.892.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	111.942.200	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan prioritas
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	300 Orang	138.756.600	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	300 Orang	138.664.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Barang dan Jasa					Barang dan Jasa			

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang masuk adalah berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025 di 3 (tiga) Kecamatan dimana terdapat beberapa usulan kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) tersebut sebagian sudah terwadahi dalam program dan kegiatan yang ada pada RENJA 2025 ini sehingga tidak diperlukan lagi penambahan program dan kegiatan baru. Sedangkan usulan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, telah disampaikan/diteruskan kepada PD teknis.

Disamping DSP dari masing-masing Kecamatan se-Kota Blitar, masih terdapat usulan kegiatan masyarakat yang tergabung dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Blitar. Berdasarkan usulan yang masuk, tidak ada yang harus diakomodir oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2025 ini, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui:
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
      - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
      - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
      - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
      - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
      - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
      - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
      - ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
      - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
      - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu

(1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
   a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
   b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
   c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
   d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

(2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
   a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
   c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
   d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
   e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
   f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja

(3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
   a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
   b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
   c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
   d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
   e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu

(1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
   a. Penguatan industri dasar
   b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
   c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
   d. Pengembangan industri medium-high technology
   e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
   f. Produktivitas UMKM dan koperasi
   g. Pengembangan ekonomi biru
   h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
   i. Peningkatan produktivitas BUMN
   j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
   k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
   l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
   m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian

(2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
   a. Percepatan transisi energi
   b. Ekonomi sirkular industri
   c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
   d. Pengelolaan hutan lestari

(3) Transformasi digital, melalui:
   a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
   b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
   c. Pemerintah digital
   d. Penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
   a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
   b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
   c. Perkuatan system logistic nasional
   d. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
   e. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
   a. Wilayah metropolitan
   b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
   c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
   a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
   b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
   a. Digitalisasi pelayanan publik
   b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
   c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
   d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
   a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
   b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
   c. Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
   a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
   b. Penguatan tata kelola ASN
   c. Penggajian tunggal ASN
   d. Reformasi sistem pensiun
   e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
   a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
   b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
   c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
   d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
   e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
   f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
   g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
   h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
   a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
   b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
      a. Pembangunan bidang hukum
      b. Pembangunan bidang keamanan
      c. Pembangunan bidang demokrasi
   (2) Stabilitas ekonomi makro
      a. Optimalisasi pendapatan negara
      b. Peningkatan kualitas belanja negara
      c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
   (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
      a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
      b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
   (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
      a. Penguatan ketahanan keluarga
      b. Peningkatan kesetaraan gender
      c. Perwujudan masyarakat inklusif
   (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
      a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
      d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
   (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
      a. Kemandirian pangan
      b. Peningkatan ketahanan air nasional
      c. Ketahanan energi
   (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
      a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
      b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Mengacu pada prioritas nasional tahun 2025 yang diampu oleh Sekretariat Daerah yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik” serta melihat isu strategis dan capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tribulan II tahun 2024, maka kebijakan dan strategi pembangunan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah meliputi:

1. Transformasi Sosial
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap peningkatan akses kesehatan untuk semua, peningkatan akses pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi Ekonomi
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap pelaksanaan inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi ekonomi digital, integrasi ekonomi domestik, serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap penguatan tata kelola regulasi, pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga, digitalisasi pelayanan publik, perluasan akses pelayanan publik, pemantauan pelayanan publik pemerintah, penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah, penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional, transformasi budaya kerja ASN, penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap pembangunan bidang hukum dan bidang demokrasi
5. Ketahanan Sosial Budaya
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif, penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan serta perwujudan masyarakat inklusif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana dalam *Tabel 3.2* di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
(Renstra Tahun 2025 – 2026)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	TUJUAN:							
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1) Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2) Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya.	84,89	85,15	85,15	85,20	85,25

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			3) Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4) Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya					
	SASARAN:							
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
	TUJUAN:							
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja	BB (73,74)	BB (74,79)	BB (74,795)	BB (74,80)	BB (75,50)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD					
		Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan "*Good Governance*"	"*Good governance*" atau tata kelola yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara	-	-	33,33%	66,67%	66,67%
	SASARAN:							
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata	76,67%	80,00%	80,00%	86,21%	100%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
		penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik					
	TUJUAN:							
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sangat Tinggi (3,3532)	Tinggi (3,4243)	Tinggi (3,4243)	Tinggi (3,4250)	Tinggi (3,4260)
	SASARAN:							
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
	TUJUAN:							
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan	Baik (84,50)	Baik (85,60)	Baik (86,86)	BAIK (86,00)	BAIK (87,00)
		Persentase PD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara	-	-	25%	35%	50%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			langsung maupun tidak langsung					
	SASARAN:							
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	27,59%	30,00%	100%	100%	100%
		Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah	Baik (87,00)	Baik (86,02)	Sangat Baik (89,00)	SANGAT BAIK (89,00)	SANGAT BAIK (90,00)
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna	-	-	25%	25%	25%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.					
	TUJUAN:							
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (87,00)	A (85,55)	A (86,00)	A (89,00)	A (90,00)
	SASARAN:							
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja	A (87,00)	A (85,55)	A (86,00)	A (89,00)	A (90,00)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD					

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Mendukung Misi Walikota
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB (Inflasi)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Mendukung RB General, RB Tematik serta Penerapan SAKIP Pemda dan PD
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Mendukung RB General, RB Tematik serta Penerapan SAKIP Pemda dan PD
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Mendukung RB General dan RB Tematik (P3DN)
		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Mendukung RB General dan RB Tematik (P3DN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		SKM Layanan UKPBJ	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mendukung RB General dan RB Tematik serta pencapaian IKK
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mendukung RB General dan RB Tematik serta pencapaian IKK
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mendukung pencapaian Tupoksi

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
   Perumusan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar.
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi
3. Tahun 2025 adalah tahun Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dengan didukung Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi dengan tema: *"Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi"*. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada peningkatan pelayanan berbasis digital guna mendukung kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
4. Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap permasalahan atau kekurang berhasilan pencapaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun 2023

   Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung tercapainya tema pembangunan 2025, menyusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 40.919.124.378,00 (empat puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang berasal dari APBD Kota Blitar.

5. Adapun secara garis besar uraian mengenai rencana tindak lanjut perbaikan terhadap permasalahan atau kekurang berhasilan pencapaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun 2023 serta rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta proyeksi tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2023
pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui: • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. Dan Perikanan
		Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: • Rebranding Tata Kelola BUMD • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: • Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan *Economy Branding* Kota Blitar • Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan bimtek dan pendampingan/desk penyusunan RUP kepada PD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Monitoring kepada OPD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog lokal	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa kepada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan pelaku pengadaan lainnya baik daring maupun luring	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan PD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Mengintensifkan rapat koordinasi Tim TEPRA untuk melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan guna menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3	Melaksanakan percepatan internalisasi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi” mengingat adanya perubahan kebijakan implementasi RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis	
		Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun	
		Standar sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh PD menganggarkan untuk perbaikan layanan	
5	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber: LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar 2023, diolah

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BAGIAN PEMERINTAHAN				2.555.555.870				1.831.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				196.636.270				110.000.000
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				196.636.270	APBD			110.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Kota Blitar	90,48 %	196.636.270	APBD		100 %	110.000.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Kota Blitar	21 kelurahan	196.636.270	APBD		21 kelurahan	110.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Dokumen	196.636.270	APBD	Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk fasilitasi lomba kelurahan	21 Dokumen	110.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.358.919.600				1.721.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.358.919.600				1.721.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Kota Blitar	100 %	2.358.919.600	APBD		100 %	1.721.000.000
						Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Kota Blitar	100 %	2.358.919.600	APBD		100 %	1.721.000.000
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi		100 %				100 %	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						daerah yang terfasilitasi							
						Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 %				100 %	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan		100 %				100 %	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	562.638.900	APBD	- Penyesuaian pagu untuk fasilitasi dan koordinasi lintas sektor - Perlunya anggaran jasa konsultansi penyusunan kebijakan rupabumi	10 Dokumen	255.000.000
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	5 Dokumen	858.664.700	APBD	- Terdapat pengalihan anggaran	5 Dokumen	645.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Administrasi Kewilayahan	Semua Kelurahan				perjalanan dinas Sub Kegiatan Evdeskel - Terdapat anggaran program prioritas RT Keren berupa pendampingan, monev dan RT Keren Award		
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	704.007.300	APBD	Terdapat pengalihan anggaran perjalanan dinas Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	156.000.000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.33 %	233.608.700	APBD		83.33 %	665.000.000
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	8 Dokumen	233.608.700	APBD		8 Dokumen	665.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sama Dalam Negeri	Semua Kelurahan						
					BAGIAN HUKUM				660.139.700				775.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				660.139.700	APBD			775.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				660.139.700	APBD			775.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Kota Blitar	100 %	660.139.700	APBD		100%	775.000.000
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Kota Blitar	100 %	660.139.700	APBD		100%	775.000.000
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320 Dokumen	221.168.200	APBD		320 Dokumen	315.000.000
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kasus	190.013.500	APBD		4 Kasus	275.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Dokumen	248.958.000	APBD	Perlu adanya penganggaran updating JDIH guna meningkatkan kualitas Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	70 Dokumen	185.000.000
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10.014.621.767				10.140.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				10.014.621.767				10.140.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				10.014.621.767				10.140.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	9.196.827.200	APBD		100 %	9.220.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	9.196.827.200	APBD		6 Rumusan Kebijakan	9.220.000.000
						Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		4 Rumusan Kebijakan				4 Rumusan Kebijakan	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	8.979.252.900	APBD	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan	25 Dokumen	9.000.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bina Mental Spiritual					priotitas kebutuhan		
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	122.240.900	APBD		2 Dokumen	115.000.000
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	95.333.400	APBD		2 Dokumen	105.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	817.794.567	APBD		100 %	920.000.000
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	617.794.567	APBD		6 Rumusan Kebijakan	640.000.000
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	215.867.767	APBD		2 Dokumen	220.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						BUMD dan BLUD							
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	218.140.000	APBD		2 Laporan	225.000.000
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	183.786.800	APBD		4 Dokumen	195.000.000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	280.000.000
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	280.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
					BAGIAN UMUM				26.169.538.541				26.796.550.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				26.169.538.541				26.796.550.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				26.169.538.541				26.796.550.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	100 %	26.169.538.541	APBD		100 %	26.796.550.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Sangat Baik (89,00) Nilai				Sangat Baik (90,00) Nilai	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	1.100.000	APBD		100 %	12.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.100.000	APBD		1 Laporan	12.000.000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	14.299.748.327	APBD		100 %	13.009.500.000
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang/ bulan	14.295.898.327	APBD	Menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan gaji, tunjangan dan adanya penambahan gaji tenaga P3K	84 Orang/ bulan	13.000.000.000
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	3.850.000	APBD		4 Laporan	9.500.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Kota Blitar	100 %	4.950.000	APBD		100 %	10.000.000
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.750.000	APBD		2 Dokumen	5.500.000
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2.200.000	APBD		2 Laporan	4.500.000
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Kota Blitar	100 %	700.000	APBD		100 %	1.100.000
4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700.000	APBD		1 Dokumen	1.100.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kota Blitar	100 %	1.436.416.400	APBD		100 %	1.690.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						perangkat daerah sesuai standar							
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	47.912.200	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	1 Paket	75.000.000
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	108.346.900	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	7 Paket	205.000.000
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	31.781.900	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	3 Paket	41.000.000
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 Paket	773.355.000	APBD	Target diubah sesuai jumlah aktivitas	170 Paket	819.000.000
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	43.698.700	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	2 Paket	75.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	48.600.000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	24 Dokumen	65.000.000
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Laporan	382.721.700	APBD	Target sesuai dengan jumlah aktivitas	130 Laporan	410.000.000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	22.205.800	APBD	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan priotitas kebutuhan	100 %	90.500.000
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	22.205.800	APBD		1 Unit	90.500.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	4.068.456.000	APBD		100 %	4.431.450.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	441.000	APBD		1 Laporan	450.000
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	864.885.000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	48 Laporan	1.100.000
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	12.000.000	APBD		6 Laporan	31.000.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	3.191.130.000	APBD	Target sesuai dengan jumlah laporan penyediaan jasa perbulan dikali 13 bulan	13 Laporan	3.300.000.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik	Kota Blitar	100 %	1.461.992.800	APBD		100 %	1.648.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpelihara sesuai standar							
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	455.618.700	APBD		2 Unit	456.000.000
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	495.752.600	APBD		65 Unit	504.000.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 Unit	163.157.500	APBD		40 Unit	238.000.000
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	347.464.000	APBD	Target menyesuaikan dengan kebutuhan	4 Unit	450.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	100 %	923.673.914	APBD		100 %	936.000.000
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	178.952.314	APBD		2 Orang/ Bulan	180.000.000
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Paket	138.721.600	APBD		23 Paket	140.000.000
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	6.000.000	APBD		2 Orang	6.000.000
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	600.000.000	APBD		2 Orang/ Bulan	610.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Kota Blitar	100 %	3.093.126.500	APBD		100 %	3.235.000.000
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.514.704.900	APBD		4 Paket	1.600.000.000
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.282.342.400	APBD		4 Paket	1.335.000.000
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	296.079.200	APBD		12 Paket	300.000.000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Kota Blitar	80 %	857.168.800	APBD		80 %	1.733.000.000
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Laporan	717.500.000	APBD		33 Laporan	1.460.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Laporan	66.471.000	APBD		400 Laporan	78.000.000
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3055 Laporan	73.197.800	APBD		3055 Laporan	195.000.000
					BAGIAN ORGANISASI				880.299.400				858.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				880.299.400				858.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				880.299.400				858.000.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	Sangat Baik (89) Nilai	880.299.400	APBD		Sangat Baik (90) Nilai	858.000.000
						Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		41,38 %				48,28 %	
						Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		86,21 %				100 %	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	15.554.000	APBD		100 %	21.000.000
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	10.054.000	APBD		10 Dokumen	15.000.000
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	5.500.000	APBD		6 Laporan	6.000.000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Kota Blitar	100 %	118.180.000	APBD		100 %	152.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	29.865.400	APBD	Target menyesuaikan dengan kebutuhan	6 Paket	66.000.000
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang	88.314.600	APBD	Anggaran menyesuaiakan dengan kebutuhan	84 Orang	86.000.000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar	26 OPD	746.565.400	APBD		30 OPD	685.000.000
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	182.878.800	APBD		6 Dokumen	175.000.000
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	334.013.100	APBD	- Perlu penyusunan hasil SKM Tingkat Pemda semesteran - Perlu fasilitasi ISO bagi PD lokus penilaian	5 Laporan	250.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Ombudsman		
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	199.571.500	APBD		3 Dokumen	225.000.000
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	16.794.000	APBD		3 Dokumen	20.000.000
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	13.308.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
					BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				638.969.100				628.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				638.969.100				628.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				638.969.100				628.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa	Kota Blitar	76,67 %	638.969.100	APBD		90,00 %	628.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						melalui E-Procurement							
						Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	10 bahan kebijakan	149.597.800	APBD		10 bahan kebijakan	163.000.000
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	46.413.400	APBD		6 dokumen	38.000.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	103.184.400	APBD		16 Laporan	125.000.000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Kota Blitar	7 nilai	489.371.300	APBD		9 nilai	465.000.000
						SKM Layanan UKPBJ		83,00 nilai				84,00 nilai	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Dokumen	238.765.100	APBD		80 Dokumen	265.000.000
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	111.942.200	APBD	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan prioritas	2 Dokumen	60.000.000
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	138.664.000	APBD		300 Orang	140.000.000

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar, difokuskan pada pencapaian target-target indikator sasaran strategis melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan:
   a. Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama

2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan:
   a) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan produk hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *up to date*.
   b) Mengoptimalkan ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
   c) Mengoptimalkan implementasi dan monev pelaksanaan program RT Keren
   d) Menyusun, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* penanganan kemiskinan
   e) Menyusun, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
   f) Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan memonev secara berkala atas kinerja BUMD

3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan:
   a) Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa baik dari sisi pelaku usaha, pelaku pengadaan barjas, Pejabat PBJ, kebijakan LPSE, dan SIRUP
   b) Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

4. Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik):
   a. Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas (SAKIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja

5. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM:
   a. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah
   b. Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah
   c. Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis
   d. Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah

6. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik:
   Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun

7. Nilai rata - rata SKM Setda:
   - ✓ Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
   - ✓ Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
   - ✓ Perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
   a. Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan
   b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dimana didalamnya juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai sifat yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, kegiatan dalam satu instansi dan kegiatan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun. Upaya optimalisasi kinerja di Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaran pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus dapat mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas peningkatan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaran pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berkembang dan guna menjawab

tantangan pengguna layanan dan stakeholder terkait, Sekretariat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan produk hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *up to date*.
   - ✓ Mengoptimalkan ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
   - ✓ Mengoptimalkan implementasi dan monev pelaksanaan program RT Keren
   - ✓ Merumuskan, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* penanganan kemiskinan

2) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perekonomian maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Merumuskan, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
   - ✓ Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan memonev secara berkala atas kinerja BUMD

3) Dalam mewujudkan administrasi pembangunan yang baik maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa baik dari sisi pelaku usaha, pelaku pengadaan barjas, Pejabat PBJ, kebijakan LPSE, dan SIRUP
   - ✓ Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

4) Dalam meningkatkan internalisasi kinerja organisasi maka perlu adanya:
   - ✓ pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja

5) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
   - ✓ Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
   - ✓ pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya

diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* dan meningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara herarki Rencana Kerja berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daaerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada :

- Renstra Perangkat Daerah,
- Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu,
- Hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 hasil review yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta Perkiraan Maju pendanaan;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;

3. Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahun 2024.

1.1.1 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan rencana kerja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar juga berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar. Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar

penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 harus berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 hasil review.

1.1.3 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Sekretariat DPR RI serta DPRD Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Rencana Kerja Sekretariat DPR RI dan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Program DPR RI dan DPRD provinsi Jawa Timur yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Rencana Kerja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 serta disusun dan mengacu pada RKPD Tahun 2025, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu. Berisikan tentang :

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar,

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

2.5. Penelaahan Usulan program, kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.
Menguraikan mengenai :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

3.3. Program dan Kegiatan
Pada Sub Bab ini menyajikan Tabel Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V : Penutup

Menguraikan tentang :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan dan
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar disajikan sebagai salah satu fungsi untuk peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar di tahun yang direncanakan dengan mengacu pada hasil kinerja tahun lalu guna mengetahui :

1. Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. Implikasi atau suatu akibat yang timbul terhadap capaian target program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut pada poin 5.

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar serta hambatan dan permasalahan yang harus dihadapi sekaligus pengambilan sikap sebagai tindakan solusinya.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD kota Blitar tahun lalu (2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPRD Kota Blitar berdasarkan realisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun – tahun sebelumnya.

Adapun program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
        2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
        2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
        6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
        7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        2. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
    3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
    1. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
        1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
        2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
        3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
        4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
        5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
    2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
        1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

2. Sub Kegiatan Pembahan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
   2. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
   1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
   2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
   3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
   4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
   5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
   1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

6. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
   1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
   2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sedang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungana Tamu
    7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

    2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
    3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
    1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
        1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
        2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
        3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
        4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau naskah akademik
        5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
    2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
        1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
        2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
        3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
        4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
        5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
    3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
        1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
        2. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
    4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
        1. Pendalaman Tugas DPRD
        2. Sub Kegiatan Orientasi DPRD
        3. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
        4. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
        5. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
        6. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
    5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
        1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
    6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sebagai fasilitator Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD maka Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Renstra 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD”.
Dari Tujuan yang telah ditetapkan maka Sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun lalu (tahun 2022) dan tahun berjalan (tahun 2023) serta tahun yang direncanakan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Blitar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02	Sekretariat DPRD		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026							
	Tujuan : Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82	80	80,5	90,125	112%	81	251,125	306,25%
	Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	82	80	80,5	90,25	112%	81	251,25	306,40%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02.2.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	-	5	5	100%	5	10	50,00%
4.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	-	10	10	100%	10	20	50,00%
4.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	4	-	1	1	100%	1	2	50,00%
4.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang disusun	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	80,74%	100%	97%	97%	100%	277,74%	277,74%
4.02.02.2.04.01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1	-	0	0	0%	1	1	100,00%
4.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	24	-	6	6	100%	6	12	50,00%
4.02.02.2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	28	-	7	7	100%	7	14	50,00%
4.02.02.2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	16	-	4	4	100%	4	8	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02.2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	4	-	1	1	100%	1	2	50,00%
4.02.02.2.04.08	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen untuk publikasi dan dokumentasi program/kegiatan DPRD dalam 1 tahun	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.08.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.02.2.08.02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4	-	1	1	100%	1	2	50,00%
4	Unsur pendukung urusan pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
	Tujuan : Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretaraiat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82	80	80,5	90,25	112%	81	251,25	306,40%
	Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	82	80	80,5	90,01	112%	81	251,01	306,11%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
4.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.03.07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.02.2.03.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	-	2	2	100%	2	4	50,00%
4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	275	-	75	75	100%	50	125	45,45%
4	Unsur pendukung urusan pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
	Tujuan ; Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82	-	80,5	90,25	112%	81	171	208,84%
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86,5)	-	A(85)	A(82,39)	96,92%	A (85,5)	A	95,24%
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	-	80,5	90,1	112%	81	171	208,66%
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	98,36%	100%	100%	100%	100%	298,36%	298,36%
4.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	35	-	7	7	100%	14	21	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	95,13%	100%	100%	100%	100%	295,13%	295,13%
4.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	-	25	23	92%	25	48	48,00%
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	-	25	23	92%	25	48	48,00%
4.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	-	25	25	100%	25	50	50,00%
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	90%	100%	100%	100%	100%	290%	290,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88	-	22	22	100%	22	44	50,00%
4.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	212	-	53	53	100%	53	106	50,00%
4.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	156	-	39	39	100%	39	78	50,00%
4.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	40	-	10	10	100%	10	20	50,00%
4.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	192	-	48	48	100%	48	96	50,00%
4.02.01.2.06.08	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	97,51%	100%	96%	96%	100%	294%	293,51%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5	-	0	0	0%	2	2	40,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	263	-	218	1	0%	0	1	0,38%
4.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	96	-	24	12	50%	24	36	37,50%
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30	-	0	0	0%	0	0	0,00%
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	-	12	12	100%	12	24	50,00%
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	116	-	29	29	100%	29	58	50,00%
4.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	356	-	89	89	100%	89	178	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan / Sasaran Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	52	-	13	9	69%	13	22	42,31%
4.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	304	-	76	76	100%	76	152	50,00%
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	75%	100%	100%	100%	100%	275%	275,00%
4.02.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100	-	25	25	100%	25	50	50,00%
4.02.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	56	-	14	14	100%	14	28	50,00%
4.02.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	100	-	25	25	100%	25	50	50,00%

Keterangan:

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Blitar di atas, terdapat penjabaran mengenai:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, terdiri atas:
    a) Sub Kegiatan Orientasi DPRD
    b) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    c) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    d) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, terdiri atas:
    1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
    2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
    3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
    4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
    5) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
    6) Sub Kegiatan Pendalaman tugas DPRD
    7) Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
    8) Sub Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi
    9) Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD
    10) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan
    11) Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
    12) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
    13) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
    14) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    15) Sub Kegiatan Pembahasan APBD

16) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
17) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
18) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
19) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
20) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
21) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22) Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
24) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
25) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
27) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
29) Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu
30) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
31) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
33) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
34) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
36) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

37) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

38) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

3. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah:

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target pada tahun 2023 sebesar 80,5 dengan realisasi sebesar 90,1 diperoleh dari nilai rata-rata e-sukma 3 bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, dan Bagian Pengawasan dan Penganggaran.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, dan atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut:

   a) Sub Kegiatan Orientasi DPRD.
      Disebabkan karena tidak ada Orientasi DPRD pada tahun 2023.

   b) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      Disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah ASN berkurang dari 25 menjadi 23.

   c) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
      Disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah ASN berkurang dari 25 menjadi 23.

   d) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
      Disebabkan karena pada tahun 2023 untuk efisiensi anggaran, pengadaan hanya 1 item yaitu sofa di ruang pimpinan DPRD.

   e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
      Disebabkan karena efisiensi anggaran pada tahun 2023 target yaitu 24 unit, realisasi sebesar 12 unit.

   f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
      Disebabkan karena realisasi target sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2023.

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian target Program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

   Keberhasilan capaian Program dan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota akan mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD Kota Blitar. IKM Sekretariat DPRD merupakan nilai rata-rata dari 3 Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, dan Bagian Pengawasan dan Penganggaran. Sedangkan untuk tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu " Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD" dan "Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah" akan mendukung Indeks Kinerja Utama (IKU) dari Sekretariat DPRD Kota Blitar.

   Kebijakan untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dalam menjawab permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025, antara lain :

1. Mengawal dan menjaga konsistensi rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan agar pelaksanannya tepat waktu.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan peran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tercantum dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2022, yaitu:

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar antara lain adalah :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dilihat dari fungsi Sekretariat DPRD maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Sekretariat DPRD terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD,
2. Fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD terhadap dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yaitu : Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi diatas Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator tugas dan fungsi dewan, maka keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Untuk itu sebagai bahan evaluasi dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar, maka ditetapkan target tingkat capaian kinerja pelayanan yang dijadikan tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian pelayanan kinerja secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Blitar Tahun 2022-2026

NO	INDIKATOR	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	DIISI INDIKATOR IKU/IKK/SPM SESUAI PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026 TABEL 4.1 DAN TABEL 4.2	TULIS KETERANGAN SESUAI KATEGORI INDIKATOR	DIISI TARGET TAHUN 2022 SESUAI TABEL 4.1 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2023 SESUAI TABEL 4.1 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2024 SESUAI TABEL 4.2 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2025 SESUAI TABEL 4.2 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI TARGET TAHUN 2026 SESUAI TABEL 4.2 PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026	DIISI REALISASI TAHUN 2022	DIISI REALISASI TAHUN 20203	DIISI REALISASI TB TAHUN 2024/ PROYEKSI REALISASI TAHUN 2024	DIISI PROYEKSI REALISASI TAHUN 2025	DIISI PROYEKSI REALISASI TAHUN 2025	LAKUKAN ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD diukur dari kualitas pelayanan terhadap unsu-unsur sebagai berikut : - Fasilitasi Pembahasan Raperda merupakan fasilitasi pembahasan Raperda yang berasal dari prakarsa DPRD atau prakarsa eksekutif sesuai Propemperda - Peningkatan Kapasitas DPRD merupakan fasilitasi bimbingan teknis yang diikuti oleh anggota DPRD dalam satu tahun - Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD diperoleh dari hasil survey pengawasan penggunaan anggaran (rapat dengar pendapat umum/monev /rapat Alat Kelengkapan DPRD, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan pelaksanaan reses - Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari survey pada pembahasan Pertanggungjawaban APBD, KUA-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Perubahan APBD dan Pembahasan APBD	80	80,5	81	81,5	82	80	90,125	81	81,5	82	Antara target dan realisasi rata-rata sama kecuali pada tahun 2023 dimana survey dilakukan menggunakan aplikasi e-sukma dengan realisasi melebihi target, meskipun melebihi target tetapi target berikutnya tidak dinaiikan hal tersebut dikarenakan survey akan dilakukan pada anggota DPRD yang baru

NO	INDIKATOR	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	Indikator yang mengukur kepuasan masyarakat/ pihak penerima layanan (anggota DPRD) terhadap kualitas layanan/fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	80,5	81	81,5	82	80	90,25	81	81,5	82	
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	80	80,5	81	81,5	82	80	90	81	81,5	82	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (85,06)	A (82,39)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	Realisasi Nilai SAKIP rata-rata juga hampir sama dengan target

Pada Tabel 2.2. diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dapat dikatakan berhasil, bahkan dari hasil survey e-sukma perolehan Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD jauh melebihi target. Akan tetapi meskipun telah melampaui target tidak merubah target yang ada di Renstra hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 akan dilantik anggota DPRD yang baru untuk masa periode 2024-2029. Dalam hal ini kedepan Sekretariat DPRD Kota Blitar akan tetap meningkatkan kinerjanya agar tercapai target yang lebih baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar

Capaian kinerja sampai dengan Tri bulan I (Bulan Januari sampai dengan Maret 2024) secara keseluruhan telah terealisasi anggaran sebesar 19,41% dan untuk capaian kinerja sebesar 19,47 %. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sampai dengan Tribulan I Tahun 2024 (Januari s/d April) adalah :

1. Tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah sebagai fasilitator yang melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD. Konsistensi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPRD sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja.
2. Ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada Tribulan II sampai dengan tribulan IV.

Adapun Isu – isu strategis yang digunakan sebagai catatan dalam menentukan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu " Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD" dan "Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah" adalah :

a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
b. Belum adanya kesepahaman persepsi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD utama dalam menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan.
c. Pengelolaan sistem informasi dengan berbasis teknologi belum dapat dilakukan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Dalam proses rancangan perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, ada beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang

telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan jumlah anggaran untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 9.167.032.534	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 8.631.529.554	Menyesuaikan Pagu Anggaran yang ada
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	Rp 3.148.290.900	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	Rp 2.126.152.000	
4.02.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Rp 170.422.300	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	Rp 156.224.200	
4.02.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan	10	Rp 2.427.416.600	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan	10	Rp 1.483.178.800	
4.02.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	Rp 120.600.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	Rp 120.394.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	Rp 75.000.000	
4.02.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	Rp 354.852.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	Rp 291.355.000	
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.056.011.634	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.441.313.654	
4.02.02.1.04.0002	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	Rp 1.829.784.000	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	Rp 2.036.912.654	
4.02.02.1.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	Rp 648.956.200	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	Rp 828.573.500	
4.02.02.1.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	Rp 209.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	Rp 163.100.000	
4.02.02.1.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	Rp 299.347.934	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	Rp 342.000.000	
4.02.02.1.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	Rp 68.923.500	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	Rp 70.727.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02.1.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	Rp 2.962.730.000	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	Rp 3.064.063.900	
4.02.02.1.08.0001	Sub Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	Rp 2.862.730.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	Rp 2.964.063.900	
4.02.02.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	Rp 100.000.000	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.385.696.305	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.719.193.000	Reses pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 kali
4.02.02.1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	Rp 2.735.396.200	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	Rp 2.754.980.300	
4.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp 484.730.600	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp 481.944.700	
4.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Rp 483.255.900	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Rp 480.010.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	Rp 586.932.900	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	Rp 614.026.200	
4.02.02.1.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	Rp 570.171.300	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	Rp 575.880.700	
4.02.02.1.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	Rp 610.305.500	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	Rp 603.118.400	
4.02.02.1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	Rp 762.677.800	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	Rp 664.872.700	
4.02.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	Rp 282.657.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	Rp 144.320.500	
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	Rp 480.020.800	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	Rp 520.552.200	
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	Rp 887.622.305	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	Rp 1.299.340.000	
4.02.02.1.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	Rp 887.622.305	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	Rp 1.299.340.000	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 20.534.270.196	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 19.353.431.189	Menyesuaikan Pagu Anggaran yang ada

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp 32.882.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp 20.140.000	
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Rp 14.321.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Rp 6.202.800	
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	Rp 18.561.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	Rp 13.937.200	
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 2.915.088.981	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 3.319.039.781	
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp 2.915.088.981	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp 3.319.039.781	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp 438.083.100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Rp 254.231.200	
4.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	Rp 58.905.300	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	Rp 55.584.000	
4.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundang an		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Rp 379.177.800	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Rp 198.647.200	
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 712.121.620	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Rp 732.169.700	
4.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	Rp 40.125.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	Rp 40.894.300	
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	58	Rp 95.944.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	58	Rp 92.155.500	
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	Rp 40.434.920	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	Rp 45.015.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Rp 126.425.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Rp 34.541.000	
4.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	Rp 28.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	Rp 28.800.000	
4.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp 196.422.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp 306.774.200	
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp 183.969.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Rp 183.989.000	
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	Rp 782.190.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	Rp -	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	0	
4.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan	25	Rp 163.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24	Rp 464.992.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10	Rp 154.198.000	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp 1.047.000.502	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daaerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Rp 1.122.963.580	
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp 174.567.102	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp 196.996.080	
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp 872.433.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Rp 925.967.500	
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	Rp 1.179.789.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	Rp 718.488.100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	Rp 395.753.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	Rp 395.611.100	
4.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	Rp 181.376.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	Rp 182.417.000	
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	13	Rp 572.660.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	13	Rp 125.460.000	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanator atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabi litasi dalam 1 tahun	7	Rp 30.000.000	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanator atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabil itasi dalam 1 tahun	5	Rp 15.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Rp 13.427.113.993	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Rp 13.186.398.828	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	Rp 12.946.917.993	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	Rp 12.721.821.328	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DIISI SESUAI RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					DIISI SESUAI DENGAN TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025					APABILA ADA PERBEDAAN ANTARA RANCANGAN AWAL DENGAN KEBUTUHAN, TAMBAHKAN CATATAN PENTING / LATAR BELAKANG PERUBAHAN TERSEBUT
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	Rp 405.196.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	Rp 389.577.500	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	Rp 75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	Rp 75.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya, pada Sekretariat DPRD Kota Blitar tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD Kota Blitar, hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2022 bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Sekretariat DPRD Kota Blitar

No.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DIISI USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI PEMETAAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (APABILA DIAKOMODIR)	DIISI USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI INDIKATOR KINERJA OUTPUT ATAS USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI TARGET INDIKATOR KINERJA OUTPUT ATAS USULAN POKPIR / MUSRENBANG	DIISI KETERANGAN DIAKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR
		N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2025 ini mengangkat Tema Pembangunan : *Pemantapan Kesejahteraan melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Berbasis Digital*.

Berdasarkan arah kebijakan nasional tahun 2025 dan guna mewujudkan Misi Kota Blitar dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar berkewajiban melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan dirumuskannya tujuan, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar memiliki arah untuk melaksanakan rencana kerja dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya, sumber dana (anggaran) dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar utama dalam pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022-2026 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Untuk lebih jelasnya disajikan Tujuan dan Sasaran serta target capaian kinerja pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2025

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Restra	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tujuan: Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	80	80.5	81	81,5	82	82
	Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	80	80.5	81	81,5	82	82
	Sasaran : Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	80	80.5	81	81,5	82	82
	Tujuan: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (86,5)
	Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85)	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (86,5)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Sekretariat DPRD tahun 2025 relatif sama dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) kecuali terkait orientasi anggota DPRD yang hanya dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun 2024.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025, yaitu :

a. RPJMD dan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
b. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.
c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2024 adalah 2 program, 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Berikut uraian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 8 (delapan) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdapat 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Selanjutnya, dari program dan kegiatan – kegiatan diatas dapat diuraikan beserta sub kegiatan sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Tabel Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	
4.02.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	
4.02.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan	10	
4.02.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	
4.02.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2	
4.02.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2	
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	
4.02.02.1.04.0002	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	
4.02.02.1.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12	
4.02.02.1.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7	
4.02.02.1.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	
4.02.02.1.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1	
4.02.02.1.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	
4.02.02.1.08.0001	Sub Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12	
4.02.02.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	
4.02.02.1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	
4.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	
4.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	
4.02.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	
4.02.02.1.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2	
4.02.02.1.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	
4.02.02.1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	
4.02.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2	
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	
4.02.02.1.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencana an, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	
4.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	
4.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22	
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	58	
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39	
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	
4.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48	
4.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3	
4.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	25	
4.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24	
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10	
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daaerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	
4.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89	
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja Th. 2025	KETERANGAN
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanator atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun	5	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun	25	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun	14	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun	25	

Sumber pendanaan pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Blitar dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dirinci menjadi 2 Program dengan 3 indikator dengan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 3.3.1 Tabel Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaannya

Kode	Program	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 8.631.529.554	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%	Rp 4.719.193.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Rp 19.528.431.189	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL PAGU INDIKATIF				Rp 32.879.153.743	Dana Alokasi Umum (DAU)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah.

A. Tabel Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitasi DPRD	Melaksanakan Penyusunan rencana kerja DPRD sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	√		√
2	Meningkatkan kualitas kompetensi seluruh ASN guna meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme ASN serta peningkatan kapasitas DPRD	Melaksanakan dan meningkatkan kompetensi ASN dan DPRD dalam kegiatan Workshop, bimtek maupun capacity building	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	√		√
		Melaksanakan dan meningkatkan kompetensi DPRD dalam kegiatan workshop, bimtek	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	√		√
	Meningkatkan dukungan tenaga ahli/pakar dalam fasilitasi pembentukan peraturan daerah	Melaksanakan kerjasama dengan tenaga ahli/pakar hukum atau akademisi dalam pendampingan pembahasan pembentukan peraturan daerah	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD - Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	√		√
		Melaksanakan pendampingan dengan tenaga ahli/pakar hukum atau akademisi dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	√		√
	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melaksanakan dan memanfaatkan informasi dan data	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	pengelolaan produk hukum daerah	produk hukum daerah dalam aplikasi JDIH	- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan			
	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dan DPRD dalam fasilitasi kordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Melaksanakan dan menjalin komunikasi yang baik antara DPRD dan Sekretariat DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	√	√	√
	Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara sekretariat DPRD dengan DPRD serta mitra kerja OPD	Melaksanakan fasilitasi dan kordinasi dengan mitra kerja OPD	- Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	√		√
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD	Melaksanakan peningkatan sarana prasarana kantor dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	√	√	√

B. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2025 adalah 2 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Taju Tahun 2026
Sekretariat DPRD Kota Blitar

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar		Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD		Rp32.879.153.743	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar		Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD		Rp32.704.153.743
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	Rp 8.631.529.554	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	Rp 12.759.442.755
4.02.02.1.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar		100%	Rp 2.126.152.000	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar		100%	3.619.940.000,00
4.02.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5	Rp 156.224.200	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5	196.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan		10	Rp 1.483.178.800	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan		10	2.791.000.000,00
4.02.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		1	Rp 120.394.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		1	138.690.000,00
4.02.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		2	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		2	86.250.000,00
4.02.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun		2	Rp 291.355.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun		2	408.000.000,00
4.02.02.1.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar		100%	Rp 3.441.313.654	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar		100%	3.432.363.255,00
4.02.02.1.04.0002	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6	Rp 2.036.912.654	Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6	2.104.251.600,00
4.02.02.1.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD		12	Rp 828.573.500	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD		12	746.299.630,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02.1.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		7	Rp 163.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		7	240.350.000,00
4.02.02.1.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD		4	Rp 342.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD		4	262.200.000,00
4.02.02.1.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		1	Rp 70.727.500	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD		1	79.262.025,00
4.02.02.1.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar		100%	Rp 3.064.063.900	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar		100%	5.707.139.500,00
4.02.02.1.08.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		12	Rp 2.964.063.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		12	5.592.139.500,00
4.02.02.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun		1	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun		1	115.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan		100%	Rp 4.719.193.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan		100%	Rp 5.043.550.751
4.02.02.1.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar		100%	Rp 2.754.980.300	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar		100%	3.145.705.630,00
4.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		2	Rp 481.944.700	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		2	557.440.190,00
4.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	Rp 480.010.300	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	555.744.285,00
4.02.02.1.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		2	Rp 614.026.200	Sub Kegiatan Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		2	1.020.765.651,00
4.02.02.1.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan		2	Rp 575.880.700	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan		2	655.696.995,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.02.1.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		2	Rp 603.118.400	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD		2	701.851.325,00
4.02.02.1.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar		100%	Rp 664.872.700	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar		100%	877.079.470,00
4.02.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		12	Rp 144.320.500	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		12	325.055.550,00
4.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah		2	Rp 520.552.200	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah		2	552.023.920,00
4.02.02.1.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100%	Rp 1.299.340.000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100%	1.020.765.651,00
4.02.02.1.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses		75	Rp 1.299.340.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses		75	1.020.765.651,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,5	Rp 19.528.431.189	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,5	Rp 25.162.039.094
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	Rp 20.140.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	37.850.000,00
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7	Rp 6.202.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7	16.500.000,00
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		12	Rp 13.937.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		12	21.350.000,00
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	Rp 3.494.039.781	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	3.350.000.000,00
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	Rp 3.494.039.781	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	3.350.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	Rp 254.231.200	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	503.750.000,00
4.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		25	Rp 55.584.000	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		25	67.750.000,00
4.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		25	Rp 198.647.200	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		25	436.000.000,00
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	Rp 732.169.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	818.705.000,00
4.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		22	Rp 40.894.300	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		22	46.000.000,00
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		58	Rp 92.155.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		58	110.350.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		39	Rp 45.015.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		39	46.500.000,00
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		10	Rp 34.541.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		10	145.350.000,00
4.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan		48	Rp 28.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan		48	33.120.000,00
4.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12	Rp 306.774.200	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12	225.885.000,00
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	Rp 183.989.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	211.500.000,00
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan		0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan		100%	2.449.744.500,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan		0		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan		3	1.555.976.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan		0		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan		25	181.700.000,00
4.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		24	534.740.800,00
4.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		0	0	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		10	177.327.700,00
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daaerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	Rp 1.122.963.580	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daaerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	1.204.050.577,00
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	Rp 196.996.080	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	200.752.167,00
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	Rp 925.967.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	1.003.298.410,00
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		100%	Rp 718.488.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		100%	1.356.757.925,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		29	Rp 395.611.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		29	455.116.525,00
4.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		89	Rp 182.417.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		89	208.582.400,00
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		13	Rp 125.460.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		13	658.559.000,00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanator atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun		5	Rp 15.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanator atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dalam 1 tahun		5	34.500.000,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	Rp 13.186.398.828	Kegaiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	15.441.181.092,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun		25	Rp 12.721.821.328	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD dalam 1 tahun		25	14.888.955.692,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2025	PAGU 2025 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2026	PAGU 2026 (Rp.)
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun		14	Rp 389.577.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia dalam 1 tahun		14	465.975.400,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun		25	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang difasilitasi Medical Check Up dalam 1 tahun		25	86.250.000,00

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan hasil perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar akan dilaksanakan secara terpadu dan sinkron antar kegiatan dengan kegiatan lain dalam satu program maupun kegiatan antar kegiatan pada program lain dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD Kota Blitar

Apabila dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja

Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran maka Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya akan dilakukan pengendaliaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya kegiatan.
3. Dilaksanakan Pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks, maka perlu adanya rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kota Blitar.
2. Sebagai fasilitastor maka Sekretariat DPRD akan mengintensifkan koordinasi dengan DPRD untuk menciptakan kesepahaman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga tercipta harmonisasi antara Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar dalam mendukung dan menfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Rencana Kerja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan tetap berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Setelah ditetapkan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan progam dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025, dan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga terwujud peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

3. RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan , baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuj Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.

Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang di *breakdown* dari Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja (Renja) juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dalam menyusun perencanaan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan untuk penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Oleh karena itu RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan Daerah dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja)

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, pogram dan kegiatan pembangunan. RKPD Kota Blitar Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen yang terintegrasi, karena RKPD menjadi pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Mengingat sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, maka RKPD Kota Blitar Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan rencana penganggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Tabel 1
Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar
Dengan RPJMD Pemerintah Kota Blitar

RPJMD			RENSTRA		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis
MISI KE 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) dipergunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya, dan dipergunakan juga sebagai *"Service Agreement"* atau Komitmen Kinerja serta *"Performance Agreement"* atau Pengukuran Kinerja. Serta sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan dan tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Blitar pada akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor … Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi Penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

2. Tujuan

   Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Evaluasi kinerja tahun 2023 didasarkan pada rencana kerja tahun 2023 yang tertuang dalam LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, Realisasi atas anggaran tahun 2023 sebesar Rp 9.989.614.180,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 9.882.814.180,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 106.800.000,00 sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 97,83%.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
Belanja Operasi	10.099.875.241,00	9.882.814.180,00	97,85%
Belanja Modal	111.504.334,00	106.800.000,00	95,78%
TOTAL	10.211.379.575,00	9.989.614.180,00	97,83%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kota Blitar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
					Inspektorat Daerah									
					Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,96)	A (84,97)	A (85,60)	100,74	A (86,69)	A (85,60)	100,71
					Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,96)	A (84,97)	A (85,60)	100,74	A (86,69)	A (85,60)	100,71
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	B(85. Indeks 50)	83.93	84.00	84.38	100,45	84.38	84.38	98,69

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	26.00	9.00	9.00	100	9.00	44.00	122,22
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	35.00	7.00	7.00	100	7.00	49.00	175
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	37.00	37.00	37.00	100	37.00	37.00	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1000	Dokumen	-	250	321	128,40	250	571	57,10
6	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	72	Laporan	-	18.00	18.00	100	18.00	36.00	50
6	1	1	2 . 1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2 . 1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	2.00	2.00	2.00	100	2.00	6.00	75
6	1	1	2 . 1	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47	Orang	-	47.00	47.00	100	46.00	47.00	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2.1	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	-	37.00	38.00	102,70	37.00	37.00	100
6	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.00	1.00	1.00	100	1.00	9.00	225
6	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.00	3.00	3.00	100	4.00	11.00	91,67

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	24.00	4.00	4.00	100	4.00	32.00	266,67
6	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	1.00	12.00	20.00	166,67	12.00	33.00	68,75
6	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	6.00	1.00	1.00	100	2.00	9.00	225
6	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Dokumen	1.00	24.00	24.00	100	12.00	37.00	38,54

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	20.00	30.00	39.00	130	20.00	79.00	119,70
6	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	1 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	-
6	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	2.00	2.00	100	-	2.00	10
6	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	-	17.00	23.00	135,29	5.00	28.00	33.33
6	1	1	2.1	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	4 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	4 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	-
6	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	3.00	26.00	26.00	100	24.00	53.00	36,81
6	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	-	13.00	13.00	100	13.00	26.00	50
6	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	-	100%	100%	100	100%	100%	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	-	18.00	18.00	100	18.00	18.00	105,88
6	1	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	-	-	-	0.00%	3.00	3.00	15
6	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	-	-	-	0.00%	84	84.00	105
6	1	1	2.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	0
6	1	1	2.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	-	-	-	0.00%	1	1.00	12,5
6	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	-	2.00	2.00	100	1.00	3.00	37,5

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2.1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104 Unit	-	151 unit	151 unit	100	1.00 unit	152 unit	146,15
6	1	3			PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 PD	29.00	29.00	30.00	103,45	30.00	30.00	103,45
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 PD	1.00	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	16 PD	5.00	4.00	4.00	100	1.00	4.00	25
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	-	30.00	30.00	100	30.00	30.00	100
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	1.00	10.00	10.00	100	10.00	10.00	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64	Kegiatan	-	16.00	17.00	106,25	16.00	33.00	51,56
6	1	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	Perangkat Daerah	7.00	6.00	6.00	100	6.00	19.00	79,17
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	16	Dokumen	13.00	4.00	4.00	100	4.00	21.00	131,25

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16 Rekomendasi	13.00	4.00	4.00	100	4.00	21.00	131,25
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16 Rekomendasi	-	4.00	4.00	100	4.00	8.00	50
6C	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85 %	76.71	75.00	83.07	110,76	80.00	83.07	97,73
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85 %	76.71	75.00	83.07	110,76	80.00	83.07	97,73
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	92.5 %	96.00	87.00	92.00	105,75	89.00	92.00	99,46

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	92.5 %	96.00	87.00	92.00	105,75	89.00	92.00	99,46
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100 %	100%	90.00	100%	100	90.00	100%	100
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90 %	95.00	90.00	92.00	102,22	90.00	92.00	102,22
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.5 %	87.96	87.50	88.55	101,20	87,5	88.55	101,20
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70 %	70.00	70.00	100	142,86	70.00	100	142,86

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 %	11.00	10.00	10.00	100	10.00	31.00	310
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120 Laporan	160	30.00	33.00	110	30.00	223	185,83
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan	53.00	40.00	42.00	105	40.00	135	84,38
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	50.00	11.00	90.00	818,18	30.00	170	141,67
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200 Laporan	56.00	50.00	76.00	152	50.00	182	91
6	1	2	2	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	3.00	3.00	3.00	100	3.00	9.00	75

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	Dokumen	-	4.00	4.00	100	4.00	8.00	50
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100	%	100	100	100	100	100	100	100
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8	Laporan	2.00	2.00	2.00	100	2.00	6.00	75
6	1	2	2	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38	Laporan	5.00	2.00	8.00	400	4.00	17.00	44,74

Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 secara keseluruhan capaian indikator dari 3 (tiga) Program yang ada adalah 100% dan beberapa indikator telah melampaui target atau melebihi 100%. Meskipun rata-rata capaian kinerja pada tiap indikator kinerja program telah melampaui target, namun terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut, antara lain :

a. Perlunya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
b. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
c. Belum optimalnya penguatan croscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanan dan penganggaran.
d. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
e. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

Terhadap permasalahan yang menghambat capaian kinerja tersebut dan guna mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk evaluasi, sebagai berikut:

a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
b. Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas.
c. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
d. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
e. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
f. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.

g. Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline.
h. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.
i. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluawarsa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada tabel di bawah ini disajikan target capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun target IKU dan IKK Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator	IKK/IKU/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	IKU	81%	82%	83%	84%	85%	81%	85,05%	85,05%	84%	85%	Realisasi tahun 2023 di atas target dengan tingkat capaian 103,72 %
2	Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori nilai SAKIP Minimal memuaskan (A)	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tingkat capaian tahun 2023 sebesar 100 %
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	A	A(84,97)	A(86,69)	A(86,69)	A(86,69)	A(84,96)	A(85,60)	A(86,69)	A(86,69)	A(86,80)	Realisasi tahun 2023 di atas target dengan tingkat capaian 100,74 %
4	Maturitas SPIP	IKK	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Maturitas SPIP tahun 2023 berada pada Level 3 sama dengan target yang telah ditetapkan
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	IKK	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Kapabilitas APIP tahun 2023 berada pada Level 3 sama dengan target yang telah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
2. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
3. Belum optimalnya penguatan croscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanan dan penganggaran.
4. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
5. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.
6. Tata cara pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit masih menggunakan sistem desk tiap tribulan, sehingga tidak efektif dan menyebabkan penumpukan rekomendasi

Beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Memaksimalkan Aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi APIP dan BPK
		Perubahan Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline
		Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan

		Pembuatan Prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan OPD yang dievaluasi Zona Integritas
		Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Zona Integritas dan SPIP secara berkelanjutan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 Jam

Selain hal tersebut, berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan OPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Blitar berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Daerah Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala OPD, namun persentase atas rekomendasi tindak lanjut ditingkat internal masih belum maksimal karena kurangnya komitmen OPD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
   a Belum tercapainya Bimbingan teknis minimal 120 Jam dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya APIP;
   b Perlunya integrasi antar aplikasi perencanaan dan keuangan dari level OPD sampai dengan level Kota .
3. Tantangan dan peluang dalam meingkatkan pelayanan
   a. Tantangan

      Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas

namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Blitara dalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar. Dengan demikian peluang Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.

2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi kumunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan ternologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Daerah Kota Blitartelah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk

tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN dan pungutan liar.

5. Pengukuran kinerja secara periodik, sistem pengukuran kinerja belum optimal, sistem whistle blowing dan penanganan kepentingan
6. Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi.
7. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi.
8. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil musrenbang Inspektorat yang disusun pada awal tahun berjalan 2023. Terjadi beberapa perbedaan indikator dari level sasaran, program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan pada saat awal penyusunan musrenbang, seiring dengan proses penyusunan renstra yang masih dalam bentuk draft. Untuk besar anggaran juga terjadi perubahan dari rancangan awal RKPD dengan rencana kerja dikarenakan pada saat penyusunan musrenbang tidak ada batas pagu anggaran, sedangkan pada saat penyusunan rencana kerja sudah ditetapkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari pemerintah Kota Blitar. Analisa terhadap rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Inspektorat Daerah Kota Blitar

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat*	85 Indeks	7.338.470.456,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat*	85 Indeks	7.590.926.264,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart*	100 %	53.414.100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart*	100 %	44.124.600,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	9 Dokumen	6,357,700.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	9 Dokumen	6,127,900,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	7 Laporan	47,056,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7 Laporan	37.996.700,00	SSH untuk IPAK belum ada

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Realisasi Kinerja SKPD								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	5.971.286.706,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	6.165.496.964,00	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/bulan	5.965.456.706,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	34 Orang/bulan	6,159,809,364.00	Kenaikan gaji pegawai
2.2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	250 Dokumen	1,590,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	250 Dokumen	1,650,000.00	Penyesuaian dengan SSH baru
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana*	18 Laporan	4,240,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	18 Laporan	4,037.600.00	Penyesuaian dengan SSH baru

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n/Semesteran SKPD								
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100%	422.486.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100%	444.535.900,00	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	49,739,800.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	54,040,500.00	Penyesuaian dengan SSH baru
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	47 Orang	148.309.200,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	46 Orang	165.970.800.00	Penambahan 1 paket
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	37 Orang	224.437.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	37 Orang	224,524,600.00	Penyesuaian dengan SSH baru
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	297.839.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	297.176.900,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4,489,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4,763,200.00	Penyesuaian dengan SSH baru
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	27.679.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	26,591,400.00	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	20.126.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	20,249,600.00	Penyesuaian dengan SSH baru
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	19.842.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	19,840,000.00	
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	15.936.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	15,938,500.00	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	2.700.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	2,700,000.00	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	207.066.100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	207,094,200.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pengadaan BMD penunjang*	100 %	13,977,900.00	Pengadaan Barang Milik Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pengadaan BMD*	100 %	20.845.400,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*urusan sesuai kebutuhan*			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*penunjang urusan sesuai kebutuhan*			
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	21 Unit	12.977.900,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	10.845.400.00	Penambahan belanja modal
5.2	Pengadaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	5 Unit	1.000.000,00	Pengadaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	10.000.000.00	Penambahan belanja modal
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100%	412.774.950,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100%	439.336.200,00	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	103.689.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	103,689,600.00	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	309.085.350,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	335.646.600.00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100 %	166.691.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100 %	179.410.300,00	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan*	17 Unit	81.528.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	18 Unit	91.849.300.00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pajak dan Perizinannya								
7.2	Pemeliharaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	5 Unit	3.681.000,00	Pemeliharaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	6 Unit	3,681,000.00	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	32.971.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	58 Unit	35,160,000.00	
7.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	1 Unit	25,000,000.00	
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	13.510.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	13,720,000.00	
7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	104 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	10,000,000.00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1*	82,5%	2.002.241.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1*	82,5%	2.012.160.200,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	82,5%				*Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2*	82,5%		
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	90%				*Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1*	90%		
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	90%				*Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2*	90%		
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100%				*Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)*	100%		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu*	70%	1.974.871.900,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu*	70%	1.984.791.100,00	
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.50%				*Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti*	87.50%		
			Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90%				*Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti*	90%		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD				*Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya*	10 PD		
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	30 Laporan	88.693.700,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	30 Laporan	88,693,700.00	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	40 Laporan	55.426.800,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	40 Laporan	55,426,800.00	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	30 Laporan	209.442.600,00	Reviu Laporan Kinerja	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	30 Laporan	209,442.600.00	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	50 Laporan	88.484.500,00	Reviu Laporan Keuangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	50 Laporan	88,484,500.00	
1.5	Kerja Sama Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*	3 Kesepakatan	1.522.699.300,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*	3 Kesepakatan	1,532,618,500.00	
1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil*	4 Dokumen	10.125.000,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	4 Dokumen	10,125,000.00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeriksaan APIP								
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)*	100 %	27.369.100,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)*	100 %	27,369,100.00	
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	2 Laporan	7,420,000.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	2 Laporan	7,420,000.00	
2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	12 Laporan	19.949.100,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	12 Laporan	19,949,100.00	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti*	100%	609.650.700,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti*	100%	609.650.700,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 PD				*Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)*	1 PD		
			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 PD				*Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)*	29 PD		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan*	4 dokumen	34.322.700,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan*	4 dokumen	34.322.700.00	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	4 Rekomendasi	8,710,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	4 Rekomend asi	8,710,000.00	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*	4 Rekomendasi	25.612.700,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*	4 Rekomend asi	25.612.700,00	
2	Pendampingan dan Asistensi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan*	100%	575.328.000,00	Pendampingan dan Asistensi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan*	100%	575,328,00.00	
			Persentase Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP	100%				*Persentase Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP*	100%		
			Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4 PD				*Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal*	4 PD		
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan*	30 perangkat daerah	8.098.200,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan*	30 perangkat daerah	8,098,200.00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan Daerah					*Pemerintahan Daerah*			
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	10 perangkat daerah	258.743.600,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	10 perangkat daerah	258,743,600.00	
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	16 Kegiatan	86.915.200,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	16 Kegiatan	86,915,200.00	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	6 perangkat daerah	221.571.000,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	6 perangkat daerah	221,571,000.00	
JUMLAH					9.950.362.156,00	JUMLAH					10,212,737,164.00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Blitar tidak didapati program/kegiatan yang mengarah kepada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar. Adapun hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat pada program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel 2.6
Usulan Progam dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselenggarakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
    2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
    3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
    4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
    5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
    2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
    3) penyediaan air untuk pertanian;
    4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
    5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
    6) pengembangan waduk multiguna.
c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
    2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industry terutama di luar Jawa;

3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) pengembangan industri halal.

g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) pengelolaan impor;
4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. pengentasan kemiskinan; dan
g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
    1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;

2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
4) pemaduan dan sinkronisasikebijakan pengendalian penduduk.

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) sistem jaminan sosial nasional;
2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
3) kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3) peningkatan pengendalian penyakit;
4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
4) penjaminan mutu pendidikan; dan
5) peningkatan tata kelola pendidikan.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
3) kualitas pemuda.

f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
3) reforma agraria; dan
4) perhutanan sosial.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
   2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
   3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
   4) prestasi olahraga.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
   2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
   3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
   4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
   5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
   3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
   4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
   5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
   2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
   3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
   4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
   5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan budaya literasi;
   2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
    2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
    3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
    4) keselamatan dan keamanan transportasi;
    5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
    6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) konektivitas jalan;
    2) konektivitas kereta api;
    3) konektivitas laut;
    4) konektivitas udara; dan
    5) konektivitas darat.
c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) transportasi perkotaan; dan
    2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
    2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan

3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
   2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
   3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
   4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penanggulangan bencana; dan
   2) peningkatan ketahanan iklim.
c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pembangunan energi berkelanjutan;
   2) pemulihan lahan berkelanjutan; danpengem
   3) bangan industry hijau

7. memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan public

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
    2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
    3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
b. optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
    2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) penguatan implementasi manajemen ASN;
    2) transformasi pelayanan publik;
    3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
    4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) penguatan keamanan dalam negeri;
2) penguatan keamanan laut; dan
3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ditujukan untuk:

a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Kota Blitar; dan
c. Meningkatkan penjaminan mutu *(quality inssurance)* atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2023 berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah .

Sehubungan dengan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Blitar tidak terdapat program dan kegiatan yang berkaitan atau dititipkan pada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar karena program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langung kepada masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Blitar di tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	82%	85,05%	83 %	84 %	85 %
		Nilai Maturitas SPIP	Quality Assurance oleh BPKP	Level 3 (3,331)	Level 3 (3,199)	Level 3 (3,332)	Level 3 (3,333)	Level 3 (3,334)
	Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB	72,25 (BB)	74,79 (BB)	(74,795) BB	(74,80) BB	(75,50) BB
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Tujuan : Meningatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat	A(84,97)	A(85,60)	A(86,69)	A (86,69)	A (86,80)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat	A(84,97)	A(85,60)	A(86,69)	A (86,69)	A (86,80)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	1				INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
6	01	01	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
6	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
6	01	03			PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	Mendukung Pencapaian tupoksi
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	
6C66:G78	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	Mendukung Pencapaian tupoksi
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu membina dan mengawasi pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Blitar mendukung Prioritas Pembangunan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi. Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berorientasi Masyarakat, dan berbasis Teknologi Informasi	Blitar Melayani	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pengawasan Pemerintah Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan, Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Asistensi dan Pendampingan

Sumber : Inspektorat Kota Blitar Tahun 2022

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa;

2. Memaksimalkan Aplikasi SIPTLHP dan SIPTL untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK;
3. Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline;
4. Pembentukan agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas;
5. Mengembangkan Inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata khususnya kepada masyarakat luas;
6. Mengembangkan klinik konsultansi pengawasan;
7. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas;
8. Mengoptimalkan peran pembinaan dan konsultansi;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 pada Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Melakukan Pendampingan OPD yang diusulkan zona integritas	▪ Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 pada unit kerja yang diusulkan ▪ Mengawasi progress dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

		pembangunan Zona Integritas ▪ Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM	
2.	Memaksimalkan aplikasi SIPATRIAWAS untuk menyelesaian rekomendasi APIP dan BPK	▪ Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SIPATRIAWAS ▪ Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3.	Penguatan Kapabilitas APIP	Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
4.	Melakukan pembinaan SPIP secara berkelanjutan	▪ Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi ▪ Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP	Program Penyelenggaran Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Inpektorat Kota Blitar tahun 2025 adalah 3 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Inspektorat				10.212.737.164,00				10.447.480.263,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.212.737.164,00				10.447.480.263,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				10.212.737.164,00				10.447.480.263,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat		85 Indeks	7.590.926.264,00			85,5 Indeks	7.704.993.978,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 %	44.124.600,00			100 %	56.084.805,00
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	9 Dokumen	6.127.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Dokumen	6.675.585,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	7 Laporan	37.996.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	49.409.220,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	6.165.496.964,00			100 %	6.269.851.041,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	34 Orang/bulan	6.159.809.364,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34 Orang/bulan	6.263.729.541,00
6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	250 Dokumen	1.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250 Dokumen	1.669.500,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	18 Laporan	4.037.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	4.452.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	444.535.900,00			100 %	443.160.300,00
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	2 Paket	54.040.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	52.226.790,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	46 Orang	165.970.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		47 Orang	155.274.660,00
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	37 Orang	224.524.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37 Orang	235.658.850,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar		100 %	297.176.900,00			100 %	312.731.475,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Paket	4.763.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	4.713.450,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	3 Paket	26.591.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	29.063.055,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	3 Paket	20.249.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	21.132.825,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	12 Paket	19.840.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	20.834.940,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Paket	15.938.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	16.732.800,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	12 Dokumen	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	2.835.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	20 Laporan	207.094.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Laporan	217.419.405,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	20.845.400,00			100 %	14.726.795,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	5 Unit	10.845.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	1.050.000,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21 Unit	13.676.795,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar		100 %	439.336.200,00			100 %	433.413.697,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	36 Laporan	103.689.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Laporan	108.874.080,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	13 Laporan	335.646.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	324.539.617,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	179.410.300,00			100 %	175.025.865,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	18 Unit	91.849.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Unit	85.605.240,00
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	6 Unit	3.681.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	3.865.050,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	58 Unit	35.160.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	34.620.075,00
6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	26.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	13.720.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	14.185.500,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)		82,5 % 90 % 82,5 % 90 % 100 %	2.012.160.200,00			85 % 92,5 % 85 % 92,5% 100 %	2.102.353.050,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti		10 PD 70 % 87,5 % 90 %	1.984.791.100,00			10 PD 70 % 87,5 % 90 %	2.073.615.495,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	30 Laporan	88.693.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	93.128.385,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	40 Laporan	55.426.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Laporan	58.198.140,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	209.442.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	219.914.730,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	50 Laporan	88.484.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	92.908.725,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	3 Kesepakatan	1.532.618.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Kesepakatan	1.598.834.265,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	4 Dokumen	10.125.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	10.631.250,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)		100 %	27.369.100,00			100 %	28.737.555,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	2 Laporan	7.420.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	7.791.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	12 Laporan	19.949.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	20.946.555,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A) Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)		100 % 30 PD 1 PD	609.650.700,00			100 % 29 PD 1 PD	640.133.235,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan		4 Dokumen	34.322.700,00			4 Dokumen	36.038.835,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	4 Rekomendasi	8.710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Rekomendasi	9.145.500,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	4 Rekomendasi	25.612.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Rekomendasi	26.893.335,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP		4 PD 100 % 100 %	575.328.000,00			4 PD 100 % 100 %	604.094.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	30 perangkat daerah	8.098.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 perangkat daerah	8.503.110,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	10 perangkat daerah	258.743.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 perangkat daerah	271.680.780,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	16 Kegiatan	86.915.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Kegiatan	91.260.960,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	6 perangkat daerah	221.571.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 perangkat daerah	232.649.550,00
J U M L A H									**10.212.737.164,00**				**10.447.480.263,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Inspektorat Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa;
2. Memaksimalkan Aplikasi SIPTLHP dan SIPTL untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK;
3. Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline;
4. Pembentukan agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas;
5. Mengembangkan Inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata khususnya kepada masyarakat luas;
6. Mengembangkan klinik konsultansi pengawasan;
7. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas;
8. Mengoptimalkan peran pembinaan dan konsultansi;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep dasar pembangunan yang diterapkan di Kota Blitar adalah pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan yang partisipatif. Penerapan strategi pembangunan daerah ini dilaksanakan secara holistik dan sistemik yang bermuara pada perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Pembangunan di Kota Blitar sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai harapan tersebut, maka dalam prosesnya harus dilaksanakan secara sistemik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Kondisi ini dapat terbangun dengan diawali dari sebuah ketetapan dan kepastian terhadap perencanaan pembangunan yang baik maka akan diperoleh hasil yang optimal.

Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang di dalamnya memuat perencanaan, pelaksanaan pengendalian, dan penilaian atas pelaksanaannya, dalam perumusan kebijakan tersebut harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Strategis Kota Blitar, Rencana Strategis Pemerintah Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan

3. tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Pendidikan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan;
4. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025;
5. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a) menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Pendidikan Kota Blitar
   a) instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
   b) instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka, dipandang perlu untuk menyusun dokumen perencanaan yang memuat tentang langkah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2025 dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025 ini berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto

    – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1419);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1687);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020 - 2024);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
41. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74
42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi, kedudukan tugas fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat subbab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu, memuat subbab sebagai berikut:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
- 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

Bab III Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi :

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran

3.3 Program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya

  tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(Outcome)* program Perangkat Daerah.

- Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai

  prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

- Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

  kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi.

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

  menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas

  pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur

  pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

- Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau

  jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

- Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

  dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pelaksanaan program /kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar pada tahun 2024, sampai Tribulan I dari sisi keuangan dengan pagu total (Dinas pendidikan dan UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 - 9) sebesar 213.694.954.214 dapat terealisasi Rp. 10.771.494.062 dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 202.923.460.152 atau 15,26%

Evaluasi pelaksanaan kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Blitar

A. Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 Nilai				101,31	83.90 Nilai	85.00	101,31	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00	33,33	6 Dokumen	2.00	33,33	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	9 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				8.94	8,94	100%	8.94	8,94	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3500.00	100	3500 Orang/bulan	3500.00	100	
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0.00	0	3 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0.00	0	2 Dokumen	0.00	0	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00	0	74 Orang	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				10.67	10,67	100%	10.67	10,67	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	10 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	5 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	5 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00	33,33	3 Paket	1.00	33,33	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	4 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0.00	0	2 Dokumen	0.00	0	
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.00	20	100 Laporan	20.00	20	
1	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0.00	0	1500 Dokumen	0.00	0	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai				0.00	0	100%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah	kebutuhan									
1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00	0	3 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				16.65	16,65	100%	16.65	16,65	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00	33,33	3 Laporan	1.00	33,33	
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00	50	2 Laporan	1.00	50	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				7.48	7,48	100%	7.48	7,48	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	0	21 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	3 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	100%				0	100.00 %	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	84.62 %				105,73	84.62 %	89.47	105,73	
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	95.86 %				99,35	95.86 %	95.24	99,35	
						Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%				0	100%	0.00	0	
						Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100%				0	100%	0.00	0	
						Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	100%				0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	33.49 %				176,17	33.49 %	59.00	176,17	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim keamanan SD				79.29	100,7	78.74 nilai	79.29	100,7	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Iklim Kebhinekaan SD				79.23	105,19	75.32 nilai	79.23	105,19	
						Iklim Inklusivitas SD				60.89	99,75	61.04 Nilai	60.89	99,75	
						Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional				0.00	0	10.00 %	0.00	0	
						Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana				0.00	0	3.00 satuan pedidikan	0.00	0	
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0.00	0	1 Ruang	0.00	0	
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100.00	20	500.00 peserta didik	100.00	20	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen				0.00	0	63.00 satuan pendidikan	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						sekolah									
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				63.00	100	63.00 satuan pendidikan	63.00	100	
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0.00	0	126 Orang	0.00	0	
1	1	2	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0.00	0	63.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.01	41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0.00	0	1.00 komunitas	0.00	0	
1	1	2	2.01	43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0.00	0	1.00 kegiatan	0.00	0	
1	1	2	2.01	45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	2.00 buku	0.00	0	
1	1	2	2.01	46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0.00	0	7.00 paket	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0.00	0	10.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				63.00	100	63.00 satuan pendidikan	63.00	100	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim keamanan SMP				80.62	99,01	81.43 Nilai	80.62	99,01	
						Iklim Kebhinekaan SMP				81.29	107,34	75.73 Nilai	81.29	107,34	
						Iklim Inklusivitas SMP				69.43	104,12	66.68 Nilai	69.43	104,12	
						Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional				0.00	0	10.00 %	0.00	0	
						Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana				0.00	0	3.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.0	1	Pembangunan Unit	Jumlah Sekolah Baru yang Telah				0.00	0	1 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2		Sekolah Baru (USB)	Dibangun									
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0.00	0	2 Ruang	0.00	0	
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0.00	0	21.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				21.00	100	21.00 satuan pendidikan	21.00	100	
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0.00	0	42 Orang	0.00	0	
1	1	2	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0.00	0	10.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitas				0.00	0	1.00 komunitas	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0.00	0	1.00 kegiatan	0.00	0	
1	1	2	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				63.00	100	63.00 satuan pendidikan	63.00	100	
1	1	2	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0.00	0	21.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	4.00 buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0.00	0	7.00 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana				0.00	0	2.00 Satuan Pendidikan	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0.00	0	3.00 unit	0.00	0	
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0.00	0	1.00 unit	0.00	0	
1	1	2	2.03	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	3 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0.00	0	7 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0.00	0	172.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				172.00	100	172.00 satuan pendidikan	172.00	100	
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				0.00	0	172 Orang	0.00	0	
1	1	2	2.03	22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0.00	0	10.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0.00	0	1.00 komunitas	0.00	0	
1	1	2	2.03	34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.03	37	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0.00	0	1.00 kegiatan	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					intoleransi										
1	1	2	2.03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0.00	0	172.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.03	41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0.00	0	7.00 paket	0.00	0	
1	1	2	2.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	3.00 unit	0.00	0	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga PKBM Aktif				100.00	100	100.00 %	100.00	100	
						Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana				0.00	0	1.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				0.00	0	1.00 paket	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0.00	0	5.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				10.00	100	10.00 orang	10.00	100	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0.00	0	5.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				5.00	100	5.00 satuan pendidikan	5.00	100	
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0.00	0	10 Orang	0.00	0	
1	1	2	2.04	31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0.00	0	1.00 kegiatan	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					intoleransi										
1	1	2	2.04	35	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0.00	0	500.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	2	2.04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0.00	0	1.00 unit	0.00	0	
1	1	2	2.04	42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0.00	0	5.00 orang	0.00	0	
1	1	2	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0.00	0	100.00 peserta didik	0.00	0	
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	30%				0	100%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	100.00 %				0	30%	0.00	0	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang ditetapkan				0.00	0	1 muatan lokal	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0.25	25	1 Dokumen	0.25	25	
1	1	3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				0.00	0	1 Buku	0.00	0	
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100.00	100	100 Orang	100.00	100	
1	1	3	2.01	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0.00	0	1.00 dokumen	0.00	0	
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang Ditetapkan				0.00	0	1 muatan lokal	0.00	0	
1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				0.00	0	1 Dokumen	0.00	0	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				0.00	0	1 Dokumen	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Nonformal										
1	1	3	2.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				0.00	0	750 Buku	0.00	0	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	31.60 %				0	31,60%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	88.89 %				0	88.89 %	0.00	0	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak				0.00	0	6.58 %	0.00	0	
						Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1				98.41	100,16	98.25 %	98.41	100,16	
						Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM				0.00	0	94.47 %	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan				0.45	52,33	0.86 nilai	0.45	52,33	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.00	33,33	3 Dokumen	1.00	33,33	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.00	33,33	3 Laporan	1.00	33,33	
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	76.83 %				0	100.00 %	0.00	0	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit				0.00	0	1 jenis	0.00	0	
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0.00	0	1 Dokumen	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Masyarakat										
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0.00	0	1 Dokumen	0.00	0	

B. UPT SP SMPN 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 nilai				101,31	83.90 nilai	85.00	101,31	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00	33,33	3 Laporan	1.00	33,33	
1	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang				0.00	0	100%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5		Perangkat Daerah	sesuai standar									
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2 Paket	1.00	50	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00	50	60 Orang	30.00	50	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	4 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	5 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00	33,33	3 Dokumen	1.00	33,33	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	1 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9.00	25	36 Laporan	9.00	25	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				0.00	0	-	0.00	0	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0.00	0	1 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jabatan										
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00	25	4 Unit	1.00	25	
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00	50	2 Unit	1.00	50	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/MTS	100%				0	100%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%				105,73	84,62%	89.47	105,73	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan				0.00	0	100.00 %	0.00	0	
						Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana				0.00	0	1.00 satuan pendidikan	0.00	0	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0.00	0	1 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/ Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	13 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	250 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	6 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	838 Peserta Didik	0.00	0	

C. UPT SP SMPN 2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output) /Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 %				103,89	81,82%	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2.00 paket	1.00	50	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output) /Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00	47,62	63 Orang	30.00	47,62	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00	25	48 Dokumen	12.00	25	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin				0.00	0	4 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output) /Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7		dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan									
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	1 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9.00	25	36 Laporan	9.00	25	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	25 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00	0	10 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Angka Kelulusan	100%				0	100%	0.00	0	Dinas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output) /Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					PENDIDIKAN	SMP/MTs									Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%				105,73	84,62%	89.47	105,73	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah				0.00	0	98,06%	0.00	0	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	21 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	340 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	8 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	800 Peserta Didik	0.00	0	

D UPT SP SMPN 3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82				103,89	81.82	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	3 Laporan	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2 Paket	1.00	50	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00	0	64 Orang	0.00	0	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0.00	0	2 Dokumen	0.00	0	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	50 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00	33,33	3 Laporan	1.00	33,33	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah(BMD) yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100 persen				0	100 persen	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal	100 persen				105,73	84,62 persen	89.47	105,73	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						B(akreditasi SMP/MTs)									
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah pendidikan menengah				0.00	0	98,06 persen	0.00	0	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	8 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	3 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	6 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	260 Peserta Didik	0.00	0	

E UPT SP SMPN 4

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indek kepuasan masyarakat (IKM)	81.82 persen				103,89	81.82 persen	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	3 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100 persen	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	33,33	3 Paket	1.00	33,33	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00	0	8 unit/buah Orang	0.00	0	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00	25	4 Paket	1.00	25	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00	33,33	3 Paket	1.00	33,33	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00	8,33	12 Dokumen	1.00	8,33	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan mesin lainnya yang disediakan				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00	0	42 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00	100	1 Laporan	1.00	100	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9.00	25	36 Laporan	9.00	25	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara sesuai standart				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1.00	50	2 Unit	1.00	50	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	36 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi maksimal B(akreditasi SMP/MTS)	100 persen				0	84.82 persen	0.00	0	Dinas Pendidikan
						persentase angka kelulusan SMP/MTS	100 persen				89,47	100 persen	89.47	89,47	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah menengah				0.00	0	98,06 persen	0.00	0	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1.00	100	1.00 paket	1.00	100	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	4 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	400 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	6 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.0	3	Pengadaan Alat	Jumlah Alat Praktik dan Peraga				0.00	0	2 Paket	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2	5	Praktik dan Peraga Siswa	Siswa yang Tersedia									
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	275 Peserta Didik	0.00	0	

F. UPT SP SMPN 5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 persen				103,89	81.82 persen	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	33,33	3 Paket	1.00	33,33	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00	0	54 Orang	0.00	0	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9.00	25	36 Dokumen	9.00	25	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00	0	4 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	1 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9.00	25	36 Laporan	9.00	25	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	0	2 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Lapangan										
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	42 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00	0	6 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%				0	100%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%				105,73	84,62%	89.47	105,73	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu sesuai standar				0.00	0	98,06%	0.00	0	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	7 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	320 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.0	3	Perlengkapan Dasar	Jumlah Buku Teks yang				0.00	0	6 Buku	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2	3	Buku Teks Peserta Didik	Diterima Peserta Didik									
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	395 Peserta Didik	0.00	0	

G. UPT SP SMPN 6

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 Persen				103,89	81,82 Persen	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2 Paket	1.00	50	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00	0	55 Orang	0.00	0	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00	66,67	3 Paket	2.00	66,67	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00	0	3 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	1 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00	33,33	3 Laporan	1.00	33,33	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100 Persen	0.00	0	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	13 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Angka Kelulusan	100 Persen				0	100 Persen	0.00	0	Dinas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					PENDIDIKAN	SMP/MTs									Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100 Persen				105,73	84,62 Persen	89.47	105,73	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah				0.00	0	98,06 Persen	0.00	0	
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0.00	0	4 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	7 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	140 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	6 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	250 Peserta Didik	0.00	0	
1	1	2	2.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1.00	16,67	6.00 Buku	1.00	16,67	

H. UPT SP SMPN 7

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 %				103,89	81.82 %	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi keuangan				0.00	0	100%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5		Perangkat Daerah	perangkat daerah sesuai standar									
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2 Paket	1.00	50	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00	50	60 Orang	30.00	50	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6												
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00	18,75	64 Dokumen	12.00	18,75	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	1 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9.00	25	36 Laporan	9.00	25	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				1.00	50	2 Unit	1.00	50	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya									
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	86 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%				0	84,62%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%				89,47	100%	89.47	89,47	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Cakupan Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0.00	0	98.06 %	0.00	0	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	22 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	7 Unit	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/subkegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	250 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	6 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				100.00	23,81	420.00 satuan pendidikan	100.00	23,81	

I UPT SP SMPN 8

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 indeks				103,89	81.82 indeks	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				0.00	0	-	0.00	0	
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2 Paket	1.00	50	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00	0	60 Orang	0.00	0	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	17 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				9.00	25	36 Dokumen	9.00	25	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan									
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00	100	1 Laporan	1.00	100	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00	33,33	36 Laporan	12.00	33,33	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase BMD yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	4 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%				0	84,62%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						persentase angka kelulusan SMP/MTs	100%				89,47	100%	89.47	89,47	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah				0.00	0	98.06 %	0.00	0	
						Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah				0.00	0	98.06 %	0.00	0	
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1.00	100	1 Paket	1.00	100	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1.00	100	1 Paket	1.00	100	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	4 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	8 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	3 Peserta Didik	0.00	0	

J UPT SP SMPN 9

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 %				103,89	81.82 %	85.00	103,89	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.00	0	2 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00	50	2 Paket	1.00	50	
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00	46,15	65 Orang	30.00	46,15	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00	0	4 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00	0	1 Paket	0.00	0	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.00	25	12 Dokumen	3.00	25	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pemerintahan Daerah										
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00	0	1 Laporan	0.00	0	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9.00	25	36 Laporan	9.00	25	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				0.00	0	100%	0.00	0	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0.00	0	1 Unit	0.00	0	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00	0	19 Unit	0.00	0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%				0	100%	0.00	0	Dinas Pendidikan
						Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%				105,73	84,62%	89.47	105,73	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah pertama				0.00	0	98,04%	0.00	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)/Subkegiatan(suboutput)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir tahun periode RPJMD)	Relaisasi Target kinerja hasil program , keluaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan s/d tahun 2022(tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program , keluaran kegiatan dan keluaran subkegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berjalan(tahun n-1) 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2022(tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022(tahun n n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program,kegiatan dan subkegiatan s/d Triwulan I dalam tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target s/d Triwulan I tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0.00	0	2 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0.00	0	2 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0.00	0	3 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0.00	0	18 Paket	0.00	0	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0.00	0	7 Unit	0.00	0	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				0.00	0	8 Buku	0.00	0	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0.00	0	690 Peserta Didik	0.00	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antar bidang dan antar lintas sectoral yang terjalin dengan baik mampu mendorong pelaksanaan kegiatan.
b. Mekanisme kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pendidikan Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pendidikan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2.Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan penelitian serta pengkajian pendidikan.
b. Belum optimalnya kepatuhan atas pelaksanaan jadwal kegiatan.
c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pencairan kegiatan sesuai dengan peraturan yang terbaru sehingga mengalami keterlambatan.
d. Belum optimalnya suatu system kerja dan kinerja yang sistematis terstruktur.
e. Penyesuaian jadwal dengan pusat

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahun sebelumnya . Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kota Blitar

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2424	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
1	Persentase Warga Negara usia 5-6tahun yangberpartisipasi dalamPendidikan PAUD	✓		100	100	100	100	100	100		100	100	
	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahunyang berpartisipasidalam PAUD		✓	96.31	96.40	96.45	96.50	97.43	100		100	100	
2.	Persentase Warga Negara usia 7-15tahun yangberpartisipasi dalamPendidikan Dasar(SD/ MI, SMP/ MTs)	✓		100	100	100	100	100	100		100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7– 12 tahun yangberpartisipasi dalamPendidikan dasar		✓	98.94	98.95	98.96	98.97	99.38			99.38	99.38	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalamPendidikan dasar		✓	97.29	97.31	97.32	97.33	98.71	100		100	100	
	KemampuanLiterasi :	✓											

	• SD • SMP			65,42 76.62	67.71 81,66	70,94 85.55		64.49 77.77	83.91* 91.85*		70,94 85.55	70,94 85.55	
	Kemampuan Numerasi: • SD • SMP	✓		44.97 75.22	48.92 80.88		50.80 83.99		47.04 77.77	53.39* 75.21*	50.80 83.99	50.80 83.99	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	✓		93.84	90.86		90.89		90.83	90.86*	90.89	90.89	
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	✓		91.78	90.53		91.63	Menunggu dari kemendikb ud	89.53	98.57*	91.63	91.63	
	Iklim Keamanan: • SD • SMP	✓		78.64 76.26	82.18 83.07		85.72 86.41	Menunggu dari kemendikb ud	78.64 79.73	78.64 * 79.73 *	85.72 86.41	85.72 86.41	
	Iklim Inklusivitas • SD • SMP	✓		57.11 58.01	64.17 67.48		62.27 70.58	Menunggu dari kemendikb ud	61.07 64.38	61.07* 64.38*	62.27 70.58	62.27 70.58	
	Iklim Kebhinekaan • SD • SMP	✓		64.01 63.72	77.82 76.05		80.31 78.26	Menunggu dari kemendikbud	75.33 73,84	75.33* 73,84*	80.31 78.26	80.31 78.26	

Sumber data: Data Raport Pendidikan kemdikbud dan Data Pokok Pendidikan Terpilah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 195/M/2023 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Minimal Pendidikan maka diperoleh indicator guna pengukuraan capaian Indeks SPM.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis Dinas pendidikan tidak terlepas dari kewenangan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan, yaitu;

1. Kualitas pembelajaran dan pengajaran masih perlu ditingkatkan dengan pelaksanaan workshop/bimtek penilaian kinerja guru berbasis komunitas, fasilitasi guru pengerak dan penyusunan rencana kegiatan satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu mendapat perhatian untuk pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan
3. Penguatan Pendidikan Non Formal perlu ditingkatkan melalui Pendidikan kecakapan kerja dan publikasi kepada masyarakat untuk pedidikan paket A, B dan C
4. Penguatan transformasi digital di satuan Pendidikan perlu ditingkatkan melalui bimbingan/pelatihan It bagi tenaga pendidik dan penguatan jaringan internet.
5. Peningkatan Akses Pendidikan yang merata dan berkeadilan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih optimal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :1). Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2). Pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital; 3) Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 4). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi; 5). Peningkatan nilai-nilai religius, nasionalis, setara gender, berbudaya, kondusif, dan demokratis; dan 6) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, dan ketahanan bencana.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas akses dan aksesibilitas sektor pendidikan, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian. sebagaimana dalam tabel dibawa

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kota Blitar

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Dinas Pendidikan				Rp203.257.443.868		Dinas Pendidikan				209.000.334.699	Penambahan pagu anggaran untuk kebutuhan anggaran Gaji dan dana Hibah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp203.257.443.868		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			209.000.334.699	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp203.257.443.868		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			209.000.334.699	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,10 nilai	Rp129.385.333.110		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,10 nilai	145.867.809.642	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp385.689.500		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	414.035.900	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp281.809.400		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	280.343.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Rp103.880.100		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	133.692.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	142.244.692.352	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	Rp125.841.517.430		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	142.215.597.852	Penambahan gaji P3K dan TPG Tamsil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Rp29.097.800		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	29.094.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	277.680.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp80.458.600		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	83.966.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Rp154.298.300		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	106.718.800	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	Rp81.024.700		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	86.995.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	562.137.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp35.286.800		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.286.800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp29.661.600		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.659.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp34.076.400		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.076.400	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp109.163.800		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.163.800	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp31.152.600		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.151.100	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Rp21.625.800		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	21.570.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp250.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	254.557.400	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	Rp46.673.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	46.673.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		154.678.100	
Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp100.809.800		Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	63.750.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp90.267.600		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	90.928.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.732.665.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp5.704.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.700.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp809.541.180		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	809.541.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp867.131.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	917.424.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	481.920.390	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Rp107.579.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	107.567.000	
Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Rp24.896.700		Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	24.807.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Rp49.766.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	49.639.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp49.910.500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.907.390	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100%	Rp31.406.560.100		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100%	29.565.826.600	
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	95,87% %					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	95,87% %		
		Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	100%					Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	100%		
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	84,62					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	84,62		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%		
		Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	33,52%					Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	33,52%		
		Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	100%					Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Iklim Inklusivitas SD	61,04 nilai			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Iklim Inklusivitas SD	61,04 nilai	Rp25.040.148.757	
		Iklim keamanan SD	78,74 nilai					Iklim keamanan SD	78,74 nilai		
		Iklim Kebhinekaan SD	75,32 nilai					Iklim Kebhinekaan SD	75,32 nilai		
		Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	3 Satuan Pendidikan					Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	3 Satuan Pendidikan		
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	10%					Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	10%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	100%					Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	100%		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Rp1.965.041.000		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.840.041.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	Rp25.000.000		Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	25.000.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Rp467.959.200		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	518.036.500	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	Rp35.483.000		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	35.482.400	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	Rp11.734.300.000		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	11.734.300.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120 Orang	Rp38.863.000		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120 Orang	38.871.500	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	63 Orang	Rp55.713.000		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	63 Orang	55.712.700	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	Rp15.900.000		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	15.900.000	
Penyediaan infrastruktur TIK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	12 Paket	Rp2.280.000.000		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	67.689.900	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Rp94.042.000		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2 Buku	267.990.000	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2 Buku	Rp267.990.000		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket	3.475.626.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	17 Paket	Rp3.699.675.700		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	1.461.134.700	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	Rp4.400.000.000		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	63 Orang	10.600.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	63 Orang	Rp10.600.000		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	481.552.800	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	Rp481.553.200		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	3.060.219.757	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Rp4.000.000.000		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2360 Peserta Didik	1.851.991.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2360 Peserta Didik	Rp1.834.440.000		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Iklim Inklusivitas SMP	66,68 nilai			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Iklim Inklusivitas SMP	66,68 nilai	Rp17.008.254.150	
		Iklim keamanan SMP	81,43 nilai					Iklim keamanan SMP	81,43 nilai		
		Iklim Kebhinekaan SMP	75,73 nilai					Iklim Kebhinekaan SMP	75,73 nilai		
		Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	3 Satuan Pendidikan					Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	3 Satuan Pendidikan		
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	10%					Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	10%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	100%					Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	100%		
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Rp2.500.000.000		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	2.481.276.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Rp1.500.982.000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Rp-		Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	300.982.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	409 Peserta Didik	Rp387.500.000		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	409 Peserta Didik	499.700.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Rp430.348.500		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	516.021.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	19 Satuan Pendidikan	Rp-		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	19 Satuan Pendidikan	27.617.600	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	19 Satuan Pendidikan	Rp9.924.600.000		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	19 Satuan Pendidikan	9.924.600.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38 Orang	Rp45.775.000		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38 Orang	45.764.700	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19 Orang	Rp36.290.000		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19 Orang	36.288.900	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Rp10.600.000		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	10.600.000	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Rp64.400.000		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	65.816.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan	Rp51.873.600		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19 Satuan Pendidikan	51.873.600	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Rp3.827.439.800							Refocusing untuk penambahan anggaran gaji

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	19 Orang	Rp41.100.800		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	19 Orang	41.100.600	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	Rp1.748.471.000		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	1.806.613.750	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Rp-		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	200.000.000	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	2 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	2 Satuan Pendidikan	Rp10.261.150.213	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	100%					Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Rp417.457.000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	267.457.000	
Pengadaan Mebel PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	Rp51.712.000		Pengadaan Mebel PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	60.527.745	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	Rp-		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	50.051.343	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3575 Peserta Didik	Rp2.026.600.000		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3575 Peserta Didik	2.133.787.500	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	Rp79.329.753		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	79.672.600	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan	Rp3.460.200.000		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan	3.460.200.000	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	160 Orang	Rp24.970.000		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	160 Orang	24.960.000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	160 Orang	Rp27.910.000		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	160 Orang	27.916.000	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	Rp12.432.000		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	12.500.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Rp-		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	240.680.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta didik	Rp289.398.900		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta didik	304.000.725	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Rp85.303.000		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	85.300.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	Rp12.788.400		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	12.760.000	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Rp1.000.000.000		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.500.000.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	Rp1.078.262.700		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	1.017.773.400	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Rp-		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	50.150.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	Rp275.000.600		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	79.726.500	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	Rp150.000.000		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	36.050.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	160 Satuan Pendidikan	Rp125.920.400		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	160 Satuan Pendidikan	125.920.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Rp300.000.000		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	106.250.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Rp220.614.809		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	585.467.000	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	Rp2.984.031.606	
		Persentase Lembaga PKBM Aktif	100%					Persentase Lembaga PKBM Aktif	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik	Rp1.396.930.000		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik	103.000.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	Rp651.770.000		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	656.770.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	Rp24.641.700		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	24.641.700	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	Rp1.159.800.000		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	1.159.800.000	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	Rp25.009.300		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	25.009.300	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Rp5.158.000		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	5.125.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	Rp219.696.500		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	267.003.100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Rp235.046.169		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	235.046.169	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Rp17.400.000		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	17.400.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik	Rp66.684.000		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik	66.684.000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	Rp423.552.337		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	423.552.337	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	40%	Rp559.798.790		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	40%	780.389.700	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	100%					Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	100%		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan	1 muatan lokal			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan	1 muatan lokal	703.986.600	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Rp20.575.000		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	29.565.300	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	500 Buku	Rp30.256.800		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	500 Buku	30.256.200	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	63 Orang	Rp451.727.900		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	63 Orang	519.292.800	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	Rp25.000.000		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	24.999.500	
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Rp32.239.090		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	99.872.800	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapkan	1 muatan lokal			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapkan	1 muatan lokal	76.403.100	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Rp13.118.000		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	13.065.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	750 Buku	Rp17.335.200		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	750 Buku	17.335.200	
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	Rp25.000.000		Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	24.999.100	
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Rp21.000.000		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	21.003.800	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	90%	Rp7.376.169.500		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	90%	Rp7.038.401.800	
		persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	31,70%					persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	31,70%		
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan	0,86 dan 0.7 indeks			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan	0,86 dan 0.7 indeks	7.038.401.800	
		Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1	98,25%					Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1	98,25%		
		Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM	94,47%					Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM	94,47%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	100%					Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	100%		
		Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak	6,58%					Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak	6,58%		
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	Rp7.029.592.200		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	6.541.824.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	Rp346.577.300		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	496.577.300	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	100%	Rp20.160.900		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	100%	20.148.831	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit	1 jenis			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit	1 jenis	20.148.831	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Rp10.057.100		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.046.721	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Rp10.103.800		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.102.110	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp1.135.621.900		UPT Satuan Pendidikan SMPN 1				1.065.677.273	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			Rp1.135.621.900		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			1.065.677.273	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			Rp365.998.500		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			1.065.677.273	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.500.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	357.845.373	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.475.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.475.600	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	70.158.300	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp33.700.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32.250.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp37.292.200		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	37.908.300	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	84.186.573	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp6.990.600		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.946.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp34.871.400		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.799.800	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp20.261.700		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.380.773	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp1.800.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.800.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp7.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp11.760.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	11.760.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	30.587.400	
Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp10.000.000		Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.576.200	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp25.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.011.200	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	73.390.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp1.150.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.150.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp75.762.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	72.240.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	98.047.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp2.612.600		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.601.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp23.998.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	23.646.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp71.800.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.800.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	100%	Rp769.623.400		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	100%	707.831.900	
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	707.831.900	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Rp35.000.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	34.988.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Rp30.000.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	30.080.000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Rp73.000.000		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	35.509.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	280 Unit	Rp21.000.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	280 Unit	21.000.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Rp74.158.800		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	73.386.600	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp188.680.600		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	177.271.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp272.784.000		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	260.716.800	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Rp75.000.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	74.880.000	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 2				Rp1.180.341.460		UPT Satuan Pendidikan SMPN 2				1.248.164.340	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			Rp1.180.341.460		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			1.248.164.340	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			Rp381.519.460		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			#REF!	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.500.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		480.918.340	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		1.500.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		80.369.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp50.400.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.500.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	Rp34.869.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	34.869.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	92.109.040	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp22.458.100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.456.700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp26.175.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.175.300	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp25.075.600		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.067.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp3.600.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.600.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp5.691.040		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.690.040	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp9.120.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	9.120.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	153.387.000	
Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp11.530.000		Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	19.376.600	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Rp105.940.900		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	134.010.400	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	68.575.200	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp625.920		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	620.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp67.955.200		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	67.955.200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			84.978.100	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp1.652.800		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.646.100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Rp14.925.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	23.367.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.965.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp798.822.000		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp767.246.000	
		persentase angka kelulusan SMP/MTs	100%					persentase angka kelulusan SMP/MTs	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	767.246.000	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%						100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%						100%		
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	342 Unit	Rp290.500.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	342 Unit	290.360.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Rp63.582.000		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	59.538.000	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp178.196.000		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	167.420.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp266.544.000		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	249.928.000	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 3				Rp1.020.352.145		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3				1.020.402.406	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp1.020.352.145		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung			1.020.402.406	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp366.292.958		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung			#REF!	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.920.330		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	#REF!	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.857.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.920.330		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.857.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	104.727.200	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp25.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	46.520.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	Rp37.033.300		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	58.207.200	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	#REF!	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp9.993.700		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.492.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp20.195.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp18.718.400	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp36.022.800		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp6.874.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp2.610.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp2.610.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp6.582.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp6.431.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Rp3.360.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Rp3.360.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp79.796.328		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp30.265.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp575.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp86.580.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp91.224.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	2.065.300	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp2.123.600		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp2.065.300	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp5.117.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp54.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp54.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp654.059.187		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	685.159.606	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	685.159.606	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "	100%		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Rp128.451.552		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	171.470.106	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250 Unit	Rp40.506.438		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250 Unit	40.516.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Rp54.016.785		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	67.017.000	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp159.278.700		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	158.662.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp258.805.712		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	234.380.000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Rp13.000.000		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	13.114.500	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 4				Rp1.147.205.380		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4				Rp1.147.205.380	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			Rp1.147.205.380		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			Rp1.147.205.380	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			Rp455.824.790		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			1.147.205.380	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp4.840.347		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	460.582.980	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.721.180	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp4.840.347		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.721.180	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	116.578.800	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp49.600.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	55.800.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp33.851.500		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60.778.800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100.662.800	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp10.795.200		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp10.342.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp29.958.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.901.600	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp21.717.100		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.808.400	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp10.225.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.905.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp16.514.245		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.005.300	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp2.700.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	169.973.100	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	Rp208.574.300		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	169.973.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	54.487.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp1.150.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.150.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp48.848.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	53.337.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	17.160.100	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp4.542.598		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.625.100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	Rp9.108.500		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	9.135.000	
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp3.400.000		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.400.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	Rp691.380.590		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	686.622.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidika n			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidika n	686.622.400	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Rp55.295.102		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	47.428.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	400 Unit	Rp125.390.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	400 Unit	125.250.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidika n	Rp56.992.000		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidika n	53.321.500	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp177.509.000		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	166.775.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp251.275.188		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	244.842.000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Rp24.919.300		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	49.005.500	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 5				Rp1.435.279.5 83		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5				1.435.279.583	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu			Rp1.435.279.583		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu			1.435.279.583	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu			Rp708.079.025		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu			1.435.279.583	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.807.239		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	769.625.625	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.807.239	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.807.239		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.807.239	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	86.689.600	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp42.824.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	48.689.600	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	Rp39.531.700		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	38.000.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	122.777.500	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp18.509.100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.509.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp35.649.100		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.646.700	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp32.244.100		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	32.243.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp4.100.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.200.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp27.318.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.318.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Rp4.860.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.860.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp20.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	71.841.340	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp1.564.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.560.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp70.281.340		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	70.281.340	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	466.509.946	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp8.869.800		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	8.869.800	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Rp94.453.500		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	29.893.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp306.067.146		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	427.747.146	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp727.200.558		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	665.653.958	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	Rp665.653.958	
		% Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					% Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		% peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					% peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Rp52.650.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	136.247.858	
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Rp102.400.000		Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	143.032.000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Rp25.000.000		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	49.032.200	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	320 Unit	Rp45.441.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	320 Unit	45.510.000	
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Rp38.400.000		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	38.160.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Rp30.214.600		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	31.906.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp149.882.000		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	87.291.300	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp283.212.958		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	134.474.600	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 6				Rp1.191.662.725		UPT Satuan Pendidikan SMPN 6				1.221.662.700	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			Rp1.191.662.725		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			1.221.662.700	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			Rp496.980.725		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit			1.221.662.700	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.035.200		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	625.859.200	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.035.200		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	127.857.200	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp34.800.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.800.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Rp82.314.400		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	85.057.200	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	81.628.400	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp11.009.200		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.902.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp25.977.600		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.662.200	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp17.420.600		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	28.577.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp5.947.500		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.826.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp6.660.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.660.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit			60.701.100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp59.088.650		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	60.701.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	116.520.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp575.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp91.946.075		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	115.920.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	238.152.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp5.573.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	5.823.000	Penamba han pagu anggaran untuk kebutuha n Gedung Baru

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Rp4.633.500		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	7.329.500	
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp150.000.000		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp694.682.000		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Persentase angka kelulusan SMP/MTS	100%	Rp595.803.500	
		Persentase angka kelulusan SMP/MTS	100%					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidika n			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidika n	Rp595.803.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Rp129.500.000		Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	119.076.000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Rp150.000.000		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	168.116.900	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	140 Unit	Rp14.560.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	140 Unit	15.400.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidika n	Rp22.636.000		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidika n	21.168.500	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp67.547.500		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	66.262.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp110.438.500		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	107.782.000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Rp100.000.000		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	97.998.100	
Penyediaan infrastruktur TIK	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	Rp100.000.000							dialihkan untuk penamba han anggaran listrik di gedung baru
UPT Satuan Pendidikan SMPN 7				Rp1.020.508.1 00		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7				Rp1.020.508.1 00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenki dul, Kepanjenlo r			Rp1.020.508.1 00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Kepanjenki dul, Kepanjenlo r			Rp1.020.508.1 00	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor			Rp276.745.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor			Rp1.020.508.100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.944.200		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	520.845.100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.944.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.944.200		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.944.200	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	98.714.400	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp40.300.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.300.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp53.107.200		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	53.414.400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	312.723.700	
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp7.986.500		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.854.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp28.958.400		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	267.262.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp16.352.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.347.900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp3.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp14.402.500		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.478.900	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen	Rp3.780.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen	3.780.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	71.936.400	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp598.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp71.336.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	71.336.400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	35.526.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp9.479.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	9.278.400	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	Rp25.501.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	26.248.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	Rp743.763.100		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	Rp499.663.000	
		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	Rp499.663.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah "	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah "	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "	100%		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Rp85.000.000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	50.000.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	Rp192.625.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	113.508.000	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	151 Unit	Rp56.250.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	151 Unit	22.350.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Rp39.121.000		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	37.944.000	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp194.232.800		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	109.339.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp176.534.300		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	166.522.000	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 8				Rp1.108.466.300		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8				1.107.999.100	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep			Rp1.108.466.300		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep			1.107.999.100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep			Rp308.958.600		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep			1.107.999.100	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp6.018.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	330.365.800	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	5.997.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp6.018.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.997.600	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	121.064.400	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp36.800.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.800.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp70.714.400		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	78.264.400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	94.588.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp10.281.900		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.185.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp22.738.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.669.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp21.839.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.730.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp13.118.400		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.065.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp20.547.500		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.519.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Rp5.220.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	6.420.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	93.036.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp958.700		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	966.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp84.795.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	92.070.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	15.679.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp6.000.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6.075.800	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp9.926.600		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9.604.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp799.507.700		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp777.633.300	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidika n			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidika n	Rp777.633.300	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Rp227.996.500		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	227.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Rp101.813.200		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	111.538.300	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	400 Unit	Rp30.000.000		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	400 Unit	30.000.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidika n	Rp67.288.000		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidika n	62.836.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp145.643.000		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	136.835.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp226.767.000		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sananweta n, Plosokerep	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	209.424.000	
UPT Satuan Pendidikan SMPN 9				Rp1.129.602.7 53		UPT Satuan Pendidikan SMPN 9				Rp1.129.602.7 53	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden			Rp1.129.602.7 53		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden			Rp1.129.602.7 53	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden			Rp236.222.260		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden			Rp260.690.203	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	Rp1.941.300		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.10 nilai	260.690.203	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Rp1.941.300		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.807.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp1.941.300		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.807.200	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	84.254.153	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp26.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.646.953	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	Rp39.253.660		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	41.607.200	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	89.750.350	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp11.340.900		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.163.300	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp25.790.100		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp25.405.350	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp20.970.400		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp20.322.900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp15.070.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp15.070.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp12.424.200		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp12.388.800	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp5.400.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp5.400.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	68.808.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp600.300		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp600.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp62.273.400		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp68.208.000	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	16.070.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp5.566.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp5.629.500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Rp9.592.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Rp10.441.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp893.380.493		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100%	Rp868.912.550	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	100%		

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	1 Satuan Pendidikan	Rp868.912.550	
		Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%					Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	100%		
		Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%					Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	100%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Rp124.111.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	135.400.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Rp163.757.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	158.280.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Rp38.784.000		Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	40.662.800	

Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Rp70.002.300		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	60.301.750	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	300 Unit	Rp71.191.500		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	300 Unit	71.068.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	Rp53.186.514		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	49.828.000	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	Rp152.904.000		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5 Buku	143.658.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	Rp219.444.179		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	209.714.000	
TOTAL PAGU				Rp213.626.484.214						219.396.836.334,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun OPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang diusulkan oleh masyarakat dalam hal ini melalui musrenbang tingkat kelurahan dan kemudian di tingkat kecamatan dan juga pokok pikiran DPRD yang diusulkan dalam perencanaan untuk tahun anggaran 2025 adalah NIHIL sebagai berikut:

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Blitar

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				NIHIL		

Adapun Dinas Pendidikan menerima usulan dari lembaga satuan pendidikan swasta terkait program sekolah gratis dan mitra kerja terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Lembaga swasta Tahun 2025 Kota Blitar

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI TAPD
1	DEWAN PENDIDIKAN KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) Kurangnya Dukungan Terhadap Lembaga Yang Bergerak di Bidang Pendidikan	Kurangnya Bantuan Operasional Untuk Dewan Pendidikan Kota Blitar	150.000.000
2	PGRI KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) Kurangnya Dukungan Terhadap Lembaga Yang Bergerak di Bidang Pendidikan	Kurangnya Bantuan Operasional untuk lembaga PGRI Kota Blitar	150.000.000
3	HIMPAUDI KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) Kurangnya Dukungan Terhadap Lembaga Yang Bergerak di Bidang Pendidikan	Masih kurangnya fisilitas untuk mendukung kegiatan HIMPAUDI Kota Blitar	50.000.000
4	IGTKI-PGRI KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) Kurangnya Dukungan Terhadap Lembaga Yang Bergerak di	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk operasional kegiatan IGTKI Kota	50.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI TAPD
		Bidang Pendidikan	Blitar	
5	BMPS	(UNTUK HIBAH) Kurangnya Dukungan Terhadap Lembaga Yang Bergerak di Bidang Pendidikan	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk operasional kegiatanBMPS Kota Blitar	25.000.000

Usulan tersebut merupakan usulan dari lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan capaian kinerja Bidang Pendidikan.

Adapun usulan atas pelaksanaan program sekolah gratis yang telah melalui mekanisme hibah dan tahapan verifikasi oleh Tim Verifikator , dan mendapatkan persetujuan dari Tim TAPD, kemudian memasukan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang terpetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.3

Usulan Program dan Kegiatan Sekolah Gratis dari Lembaga swasta Tahun 2025 Kota Blitar

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
1	KB ABA II	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.800.000
2	KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.200.000
3	KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.800.000
4	KB AL HIDAYAH SUKOREJO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	16.600.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
5	KB AL MUKARROMAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.487.500
6	KB AL-AZHAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.200.000
7	KB AL-KAUTSAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.600.000
8	KB AR ROHMAH V WAHID HASYIM	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	15.000.000
9	KB AR ROHMAH XV	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.800.000
10	KB ARROHMAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	22.400.000
11	KB AR-ROHMAH IX DIMORO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.400.000
12	KB ARROHMAH MELATI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.000.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
13	KB AR-ROHMAH VII	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.600.000
14	KB AR-ROHMAH XII	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	8.600.000
15	KB Asyiyah Bustanul Athfal III	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.600.000
16	KB BINA INSANI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.400.000
17	KB BINTANG FAJAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.200.000
18	KB BIYUNG EMBAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	18.800.000
19	KB CERAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.600.000
20	KB DARUSSALAM	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	6.800.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
21	KB DHARMA WANITA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.600.000
22	KB HARAPAN BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.200.000
23	KB HARAPAN BUNDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.800.000
24	KB HIDAYATULLAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	29.200.000
25	KB ISLAM BEN TAQWA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.800.000
26	KB ISTIQOMATURROHMAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	21.800.000
27	KB KARTIKA IV-43 CERIA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	19.200.000
28	KB KRISTEN HARMONI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	8.800.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
29	KB LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	20.800.000
30	KB LITTLE ANGEL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	21.600.000
31	KB MAL AABUS SIBYAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.600.000
32	KB MEKAR BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.200.000
33	KB PAUD ALAM AL GHIFARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	32.600.000
34	KB QURROTA AYUN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	6.600.000
35	KB RAHAYU	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.200.000
36	KB SABILA MANDIRI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	26.200.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
37	KB SAINT HANNA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	29.400.000
38	KB SANTA MARIA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.800.000
39	KB SAYANG BUNDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	25.000.000
40	KB SURYA AGUNG	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.000.000
41	KB TAAM AL IKHLAS	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.800.000
42	KB TAAM AL-HUDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.800.000
43	KB TAB SYUHADA' HAJI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	79.400.000
44	KB TIARA BUNDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	8.800.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
45	KB TUNAS BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.800.000
46	KB YAA BUNAYYA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.800.000
47	KB YOS SUDARSO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.800.000
48	KBNURUL HUDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	15.600.000
49	SPS ARYO BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	22.400.000
50	SPS ASPARAGA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	20.400.000
51	SPS DELIMA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.600.000
52	SPS HARAPAN KITA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.800.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
53	SPS Kelud	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.200.000
54	SPS KENANGA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.000.000
55	SPS KERANTIL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.000.000
56	SPS KUSUMA BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.000.000
57	SPS LEO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	15.400.000
58	SPS MANGGAR INDAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.400.000
59	SPS MAWAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.600.000
60	SPS MELATI BENDO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.000.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
61	SPS MELATI I	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.800.000
62	SPS MELATI IV	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.600.000
63	SPS PELANGI BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.600.000
64	SPS PERMATA BUNDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.000.000
65	SPS POS PAUD ARIES	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.800.000
66	SPS POS PAUD ASAHAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	15.000.000
67	SPS POS PAUD MUSTOKOWENI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.800.000
68	SPS PUSPASARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.200.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
69	SPS RAJAWALI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.200.000
70	SPS SARTIKA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.200.000
71	SPS TP BLIMBING	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.400.000
72	Taman Posyandu Flamboyan	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	8.000.000
73	TP Dewi Setyowati	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	25.200.000
74	TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.000.000
75	TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	20.000.000
76	TPA ALAM AL GHIFARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	6.800.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
77	TPA BUAH HATI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	21.000.000
78	TPA DINAR NASYIAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.800.000
79	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.750.000
80	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	20.000.000
81	TK Aisyiyah Bustanul Athfal III	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.250.000
82	TK AL - HIDAYAH XXII BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	24.500.000
83	TK AL HIDAYAH 17 TANJUNGSARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.250.000
84	TK AL HIDAYAH BENDO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	16.250.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
85	TK AL HIDAYAH CABEAN 1	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	6.750.000
86	TK AL HIDAYAH CABEAN 2	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	4.250.000
87	TK AL HIDAYAH DARUSSALAM 2	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.000.000
88	TK AL HIDAYAH DAWUHAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.500.000
89	TK AL HIDAYAH GEDOG 2	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	18.500.000
90	TK AL HIDAYAH IV GEDOG I	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.500.000
91	TK AL HIDAYAH IX KARANGTENGAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.000.000
92	TK Al Hidayah Karangsari	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.750.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
93	TK AL HIDAYAH KAUMAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	54.250.000
94	TK AL HIDAYAH KLAMPOK	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	22.500.000
95	TK AL HIDAYAH KLAMPOK 2	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	23.000.000
96	TK AL HIDAYAH PENGKOL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.000.000
97	TK AL HIDAYAH SUKOREJO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	33.750.000
98	TK AL HIDAYAH TANGGUNG	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	33.000.000
99	TK AL HIDAYAH TLUMPU	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	34.000.000
100	TK AL HIDAYAH VI WAHID HASYIM	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	15.500.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
101	TK AL HIDAYAH VIII DARUSSALAM	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	44.500.000
102	TK AL HIDAYAH XII SANANWETAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.500.000
103	TK AL HIDAYAH XV NGADIREJO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	16.500.000
104	TK AL HIDAYAH XXI JAUSENAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.250.000
105	TK AL HIDAYAH XXIV SENTUL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.750.000
106	TK AL HIDAYAH XXVIII SANANWETAN 2	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	26.750.000
107	TK ALAM AL GHIFARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	42.500.000
108	TK AL-HIDAYAH XI BENDOGERIT	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	27.750.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
109	TK AL-HIDAYAH XXV AL HIKMAH DIMORO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.000.000
110	TK AL-KAUTSAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.750.000
111	TK BUDI UTOMO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.500.000
112	TK DHARMA WANITA 2 TANGGUNG	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.250.000
113	TK DHARMA WANITA TANJUNGSARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.250.000
114	TK HARAPAN BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	18.750.000
115	TK HIDAYATURROHMAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	30.500.000
116	TK IDHATA KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	2.000.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
117	TK ISLAM BEN TAQWA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.750.000
118	TK K YOS SUDARSO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	6.750.000
119	TK KARTIKA IV - 43	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.000.000
120	TK KATOLIK SANTA MARIA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	26.750.000
121	TK KEMALA BHAYANGKARI 44	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.000.000
122	TK KRISTEN HARMONI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.000.000
123	TK KUNCUP MELATI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	14.500.000
124	TK LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	25.250.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
125	TK LITTLE ANGEL SCHOOL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	30.250.000
126	TK MEKAR BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	12.500.000
127	TK PANCASILA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.500.000
128	TK PERTIWI KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	7.500.000
129	TK PKK 1 BENDOGERIT	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.000.000
130	TK PKK 1 Sentul	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.750.000
131	TK PKK 1 SUKOREJO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	4.750.000
132	TK PKK 2 NGADIREJO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.250.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
133	TK PKK 2 SENTUL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.250.000
134	TK PKK 2 SUKOREJO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.750.000
135	TK PKK KELURAHAN TURI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.750.000
136	TK SAINT HANNA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	34.000.000
137	TK TRISULA 1	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	6.250.000
138	TK TRISULA 2	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	1.000.000
139	TK TRISULA VII	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.000.000
140	TK.AL-HIDAYAH II PLOSOKEREP	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	42.250.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
141	SD ALAM AL GHIFARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	131.400.000
142	SD ISLAM KARDINA MASSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	83.700.000
143	SD ISLAM KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	204.750.000
144	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	38.700.000
145	SD Islam Sukorejo	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	73.800.000
146	SD Islam Tanjungsari	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	129.091.000
147	SD ISLAM TARBIYATUL FALLAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	28.800.000
148	SD KATOLIK SANTA MARIA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	175.500.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
149	SD KATOLIK YOS SUDARSO BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	67.500.000
150	SD KRISTEN EAGLE NATIONAL ACADEMY	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	20.250.000
151	SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	64.800.000
152	SD LITTLE ANGEL SCHOOL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.550.000
153	SD MUHAMMADIYAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	77.400.000
154	SDI MAMBA UL HISAN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	3.150.000
155	MADRASAH IBTIDAIYAH PERWANIDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	154.200.000
156	MI DARUSSALAM	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	158.400.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
157	MI HARAPAN BANGSA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	22.200.000
158	MI ULUMUL FADHOL	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	18.000.000
159	MI NURUL HUDA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	50.100.000
160	MI PESANTREN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	98.400.000
161	MI SUNAN GIRI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	13.200.000
162	MIN KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	124.800.000
163	MIS DIPONEGORO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.800.000
164	MIS HIDAYATULLAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	85.500.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
165	MTs Diponegoro	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	1.500.000
166	MTs Hidayatullah	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.400.000
167	MTs MA'ARIF NU BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	20.100.000
168	MTs Nurul Huda	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	2.100.000
169	MTsN 1 Kota Blitar	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	127.200.000
170	MTsN 2 KOta Blitar	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	104.400.000
171	SMP AL MUHAFIZHOH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	17.000.000
172	SMP ALAM AL GHIFARI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	25.000.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
173	SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	19.000.000
174	SMP Katolik Yohanes Gabriel	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	44.500.000
175	SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.000.000
176	SMP MUHAMMADIYAH 1 BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	8.000.000
177	SMP MUHAMMADIYAH2 BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	5.000.000
178	SMP TAMANSISWA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	9.000.000
179	SMP TARBIYATUL FALAH	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	16.000.000
180	SMPK 3 YOS SOEDARSO BLITAR	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	84.500.000

NO URUT	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	FINAL TAPD
181	PKBM BAHTERA DUA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	27.500.000
182	PKBM RASIO	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	54.000.000
183	PKBM TUNAS PERTIWI	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	11.000.000
184	PKBM TUNAS PRATAMA	(UNTUK HIBAH) kurangnya bantuan operasional siswa dan sekolah	Masih ada siswa kota Blitar yang kurang mampu	10.500.000

Usulan di atas telah diakomodir dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
   a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
      - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (untuk usulan Lembaga swasta jenjang sekolah dasar)
   b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
      - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (untuk usulan lembaga swasta jenjang SMP)
   c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
      - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (untuk usulan Lembaga PAUD)
   d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
      - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (untuk usulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
   a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
      - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Dasar (untuk usulan PGRi dan Dewan Pendidikan)

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (untuk usulan IGTKI dan HIMPAUDI)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 disusun sebagai panduan dalam mewujudkan tujuan bernegara dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Nasional, 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Isu strategis yang diusung dalam rancangan akhir RPJPN 2025 - 2045 yaitu;

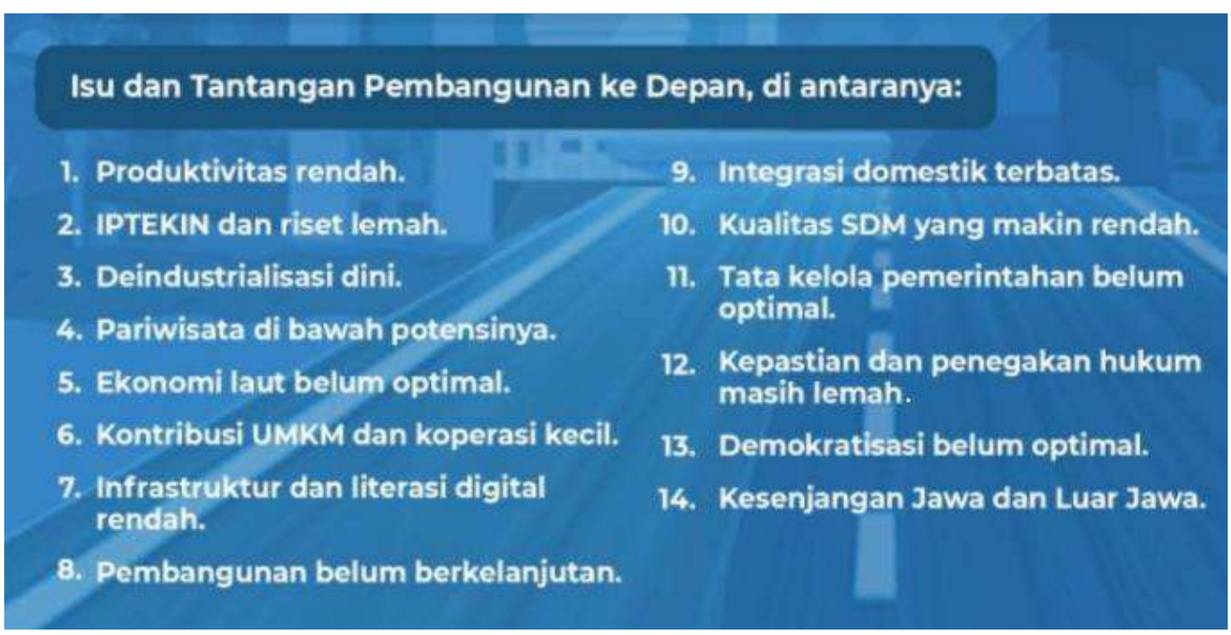

Bidang Pendidikan untuk mengatasi isu dan tantangan pembangunan masuk dalam sasaran Visi ke 4 yaitu “”Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat””Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreatifitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Scor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73.

Adapun untuk mencapai sasaran visi telah disusun 8 (delapan) Agenda pembangunan yang terbagi menjadi:

1. Mewujudkan transformasi Sosial adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan hohesif.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi adalah meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah,pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatiif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN.
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola adalah menciptakan lingkungan yang dapat menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia adalah memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan nasional serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan budaya.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam , serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas adalah Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan adalah diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

Selanjutnya 8 (delapan) arah pembangunan dijabarkan ke dalam misi.

Penerjemahan 45 (Empat Puluh Lima) Indikator Utama Pembangunan Nasional ke Daerah

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
	Misi /Arah Pembangunan/ Indikator Utama	**Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama**
IE2	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**
5.	Hasil Pembelajaran:	5. Hasil Pembelajaran:
	a) Rata-rata Nilai PISA	a) Rata-Rata Nilai PISA - Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) Literasi Membaca b) Numerasi - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
	a-i Membaca	
	a-ii Matematika	
	a-iii Sains	
		a) Literasi Membaca b) Numerasi
	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
	c) Harapan Lama Sekolah	c) Harapan Lama Sekolah
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
7.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025 didasarkan pada identifikasi faktor faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pendidikan menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,735	0,735	0,74
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84

Tabel 3.2.1 Sasaran

Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
		Data Awal		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2019	2020						
Meningkatnya pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang berkesetaraan gender	SPM Bidang pendidikan :								
	1) Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2) Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/ MI, SMP/ MTs)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3). Persentase Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
		Data Awal		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2019	2020						
	pendidikan kesetaraan.								
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Literasi						SD 70,94 SMP 85, 55	SD 70,95 SMP 85, 56	SD 70,96 SMP 85, 56
	Indeks Numerasi						SD 50,80 SMP 83,99	SD 50,81 SMP 84	SD 50,82 SMP 84
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	B	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84	A/84

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas maka dirumuskan strategi yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Peningkatan tata kelola pendidikan

b. Peningkatan kualitas pendidikan

c. Peningkatan akses pendidikan

Dengan penjabaran antara lain;

1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut;

- ✓ Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- ✓ Optimalisasi pengelolaan data
- ✓ Penanaman nilai kebhinneka tunggal ikaan, religiusitas dan

nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP

- ✓ Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- ✓ Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
- ✓ Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
- ✓ Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- ✓ Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
- ✓ Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan
- ✓ Peningkatan sekolah inklusif
- ✓ Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
- ✓ Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- ✓ Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam rangka pencapaian tujuan arah kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka tindakan yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Pemerataan Sarana dan Prasarana PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal

   Kebijakan Pemerataan Sarana dan Prasarana tersebut diambil untuk mencapai tujuan :

   1) Meningkatkan capaian akses siswa melihat capaian APK masing - masing jenjang.
   2) Mempertahankan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar.
   3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada jalur yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik.

b. Peningkatan Mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing

   Kebijakan Peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan serta mampu mewujudkan pendidikan karakter bangsa dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang terdiri dari :

   1) Meningkatkan rata-rata prosentase kelulusan.
   2) Meningkatkan capaian assesmen Kompetensi Minimum (AKM)
   3) Menumbuhkembangkan ide-ide kreatif dan inovatif para pelaku pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan pada khususnya untuk menggali potensi yang terdapat pada lembaga dan peserta didik guna menyongsong industri kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, olah rasa/seni, dan olah pikir.

c. Pemerataan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

d. Peningkatan Kurikulum Muatan Lokal

e. Peningkatan Proses Pembelajaran

f. Peningkatan jumlah guru layak di semua jenjang pendidikan:

Untuk memenuhi hal tersebut perlu adanya kebijakan:

1) Menyekolahkan guru hingga minimal sarjana S1 atau setara S1, bagi yang belum layak.
2) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
3) Meningkatkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4) Meningkatkan pemahaman Pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap 8 SNP
5) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025 sesuai dengan hasil pemetaan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
					Dinas Pendidikan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SD/MI Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI) Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	Pendukung SPM
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Lembaga PKBM Aktif Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan	Pendukung SPM
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Pendukung SPM
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Pendukung SPM
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Pendukung SPM
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Pendukung SPM
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapkan	Pendukung SPM
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Pendukung SPM
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Pendukung SPM
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Pendukung SPM
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1 Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak	Pendukung SPM
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendukung SPM
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendukung SPM
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	Pendukung SPM
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit	Pendukung SPM
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendukung SPM
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 1		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 2		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) persentase angka kelulusan SMP/MTs	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 3		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 4		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 5		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana % Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah % peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 6		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/MTS Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Pendukung SPM

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 7		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah " Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 8		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM
					UPT Satuan Pendidikan SMPN 9		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Tugas pokok dan fungsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang Tugas pokok dan fungsi
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	Pendukung SPM
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Pendukung SPM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pendukung SPM

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota Blitar

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Perumusan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi “Kota Blitar Keren, unggul , Makmur dan Bermartabat dan pencapaian misi kedua Wali Kota Blitar “mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Keren (Keberagaman, Religius dan Nasionalis) yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pendidikan akan sejalan dengan visi dan misi dimaksud.

2. Pencapaian Tujuan dan sasaran , strategi serta arah kebijakan dalam RPJMD

   Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2021 - 2026 di sebutkan sebagai berikut:

Misi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani - Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan dalam RPJMD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan dan daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Peningkatan Tata kelola pendidikan	Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Non Formal(PNF)
			Optimalisasi pengelolaan data

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Penanaman nilai kebhinekaan tunggal ika religius dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
			Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
		Peningkatan Kualitas pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
			Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
			Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
			Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
			Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan
			Peningkatan sekolah inklusif
			Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
			Peningkatan ketersediaan tenagapendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kompetensi tenagapendidik dan tenaga kependidikan

Adapun Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota Blitar digambarkan pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukug Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
Urusan wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Program Blitar Cerdas	Penerapan pelayanan dasar (standar pelayanan minimal/SPM).	1. Blitar Cerdas berupaya mempercepat peningkatan potensi SDM dalam rangka mewujudkan generasi muda unggul dan berkarakter Keren (kebhinekaan, religius, dan nasionalis) di Kota Blitar	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			2. Blitar cerdas antara lain berupa pendidikan gratis yang bermutu dan berkualitas dengan ditunjang bantuan peralatan/sarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan juga didasarkan atas pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal, sesuai dengan peraturan tersebut Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada (1) pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia

7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dengan memfokuskan dan menitikberatkan pada pencapaian pelaksanaan indicator SPM, yakni :

Pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat capaian kinerja yang belum maksimal dan di dalam laporan pelaksanaan kinerja (LKjIP) tahun 2023 terdapat permasalahan yang memerlukan tindak lanjut di perencanaan tahun berikutnya. Pelaksanaan rencana tindaklanjut tersebut tertuang pada table 4.2.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Pedidikan
Tahun 2023 Pada Renja Dinas Pendidikan
Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Keterjangkauan akses pendidikan	a. Memperluas sebaran satuan pendidikan	■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah pertama/Sub keg. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Pembangunan SMPN 6)	√		√
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/ Sub keg. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Pembagunan TK Karangtengah)			√
		b. Ketersediaan sarana prasarana	■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar/ Sub Keg. Pembangunan Ruang Kelas Baru	√		√
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar/Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		Jaminan biaya pendidikan berkesinambungan	■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar/Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	√		√
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah pertama	√		√
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini/Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Anak usia Dini			
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan/Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Kesetaraan	√		√
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar/Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	√		√
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			√
			■ Program	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Anak usia Dini/Pengelolaan Dana BOP PAUD			
			■ Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan/Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	√ √ √		√ √ √
		Pemenuhan Tenaga Pendidik dan kependidikan	Program pendidik dan tenaga kependidikan/ Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
2	Peningkatan Mutu pendidik	Pelaksanaan bimtek/ workshop/seminar	■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	√		√
			■ PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√		√
			■ PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	√		√
			■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
			■ PENGELOLAAN PENDIDIKAN/	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ■ PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan ■ Program pendidik dan tenaga kependidikan/ Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	√ √ √		√ √ √

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
c	Penguatan Karakter Peserta didik	Pelaksanaan lomba - lomba bagi peserta didik dan sosialisasi pengembangan mental spiritual	■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	√		√
			■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	√		√
			■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	√		√
			■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama/Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	√		
			■ PROGRAM PENGELOLAAN			√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini/Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
			■ PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini/Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	√		√
				√		√

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 di bawah ini, berisi program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar dan RPJMD Kota Blitar.

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dinas Pendidikan				209.000.334.699				201.406.212.834,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				209.000.334.699				200.556.194.595,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				209.000.334.699				200.556.194.595,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,10 nilai	145.867.809.642			83,11 nilai	141.419.590.427,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	414.035.900		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	373.473.975,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	280.343.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	6 Dokumen	264.399.870,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	133.692.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	9 Laporan	109.074.105,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	142.244.692.352		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	130.638.859.292,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500 Orang/bulan	142.215.597.852	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Kantor Dinas Pendidikan	3500 Orang/bulan	130.608.306.602,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	29.094.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	3 Laporan	30.552.690,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	277.680.400		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	279.070.680,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	83.966.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	3 Paket	84.481.530,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	106.718.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Dokumen	109.513.215,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang	86.995.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	74 Orang	85.075.935,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	562.137.500		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	585.522.000,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	35.286.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	10 Paket	37.051.140,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	29.659.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	5 Paket	31.144.680,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	34.076.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	1 Paket	35.780.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	109.163.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	1 Paket	114.621.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	31.151.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Paket	32.710.230,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	21.570.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	24 Dokumen	22.707.090,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	254.557.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	100 Laporan	262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Dokumen	46.673.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	1500 Dokumen	49.006.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	154.678.100		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	135.531.270,00	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	63.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Unit	40.750.290,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	90.928.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Unit	94.780.980,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	1.732.665.000		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	9.110.873.190,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	1 Laporan	5.989.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	809.541.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	36 Laporan	850.018.239,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	917.424.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	12 Laporan	9.104.883.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	481.920.390		Kantor Dinas Pendidikan	100 %	296.260.020,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	107.567.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	21 Unit	112.958.160,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	24.807.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Unit	26.141.535,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	49.639.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	3 Unit	52.254.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	149.907.390	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Unit	52.406.025,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kantor Dinas Pendidikan	2 Unit	52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SD/MI Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI) Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi		100 % 95,87% % 100 %	55.293.584.726			100 % 95,87% % 100 %	50.702.392.748,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik		61,04 nilai 78,74 nilai 75,32 nilai 3 Satuan Pendidikan 100 % 10 % 100 % 100 %	25.040.148.757		Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	61,04 nilai 78,74 nilai 75,32 nilai 3 Satuan Pendidikan 100 % 10 % 100 % 100 %	23.140.628.098,00	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.840.041.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3 Ruang	1.965.041.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	25.000.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2 Paket	26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Peserta Didik	518.036.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500 Peserta Didik	281.357.160,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Satuan Pendidikan	35.482.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	37.257.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Satuan Pendidikan	11.734.300.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	11.734.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	38.871.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	120 Orang	40.806.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Orang	55.712.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Orang	58.498.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Komunitas	15.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3 Komunitas	16.695.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	67.689.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Kegiatan	56.744.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Buku	267.990.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2 Buku	281.389.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	3.475.626.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9 Paket	3.884.659.485,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	1.461.134.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15 Unit	806.429.043,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Orang	10.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Orang	11.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Satuan Pendidikan	481.552.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	505.630.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Ruang	3.060.219.757	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14 Ruang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2360 Peserta Didik	1.851.991.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2360 Peserta Didik	1.834.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100.000.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik		66,68 nilai 81,43 nilai 75,73 nilai 3 Satuan Pendidikan 100 % 10 % 100 % 100 %	17.008.254.150		Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66,68 nilai 81,43 nilai 75,73 nilai 3 Satuan Pendidikan 100 % 10 % 100 % 100 %	14.780.515.645,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.481.276.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.000.000.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	1.500.982.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	300.982.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Paket	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409 Peserta Didik	499.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	409 Peserta Didik	387.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	500 Peserta Didik	516.021.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	500 Peserta Didik	241.865.925,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Akademik	Kel/Desa			ALOKASI UMUM	Pertama			
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Satuan Pendidikan	27.617.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19 Satuan Pendidikan	27.631.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Satuan Pendidikan	9.924.600.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19 Satuan Pendidikan	9.924.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang	45.764.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38 Orang	48.063.750,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Orang	36.288.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19 Orang	38.104.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Komunitas	10.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Komunitas	11.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	65.816.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Kegiatan	57.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Satuan Pendidikan	51.873.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19 Satuan Pendidikan	54.467.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Orang	41.100.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19 Orang	43.155.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	1.806.613.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Paket	1.835.894.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	200.000.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik		2 Satuan Pendidikan 100 % 100 % 100 %	10.261.150.213		Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2 Satuan Pendidikan 100 % 100 % 100 %	8.692.613.099,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	267.457.000	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Unit	267.457.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	60.527.745	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2 Paket	54.297.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.051.343	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3575 Peserta Didik	2.133.787.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	3575 Peserta Didik	2.026.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Satuan Pendidikan	79.672.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	160 Satuan Pendidikan	26.256.930,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Satuan Pendidikan	3.460.200.000	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	160 Satuan Pendidikan	3.460.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD									
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	24.960.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	160 Orang	26.218.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	27.916.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	160 Orang	29.305.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	2 Komunitas	12.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2 Komunitas	13.053.600,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kel/Desa			UMUM				
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	240.680.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Ruang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Peserta didik	304.000.725	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	250 Peserta didik	198.868.845,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	85.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Kegiatan	47.568.150,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	12.760.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	160 Orang	13.427.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	1.017.773.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	7 Paket	1.132.175.835,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	50.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	4 Unit	56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	79.726.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	4 Unit	78.750.630,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	36.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2 Paket	157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Satuan Pendidikan	125.920.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	160 Satuan Pendidikan	132.216.420,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	106.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Ruang	301.070.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	585.467.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2 Ruang	21.645.549,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Lembaga PKBM Aktif Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	2.984.031.606		Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	4.088.635.906,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207 Peserta Didik	103.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	207 Peserta Didik	1.396.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	656.770.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	10 Orang	684.358.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Satuan Pendidikan	24.641.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	5 Satuan Pendidikan	25.873.785,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Satuan Pendidikan	1.159.800.000	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	5 Satuan Pendidikan	1.159.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	25.009.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	10 Orang	26.259.765,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	5.125.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	1 Kegiatan	5.415.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Peserta Didik	267.003.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	30 Peserta Didik	115.181.325,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	235.046.169	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	1 Unit	141.798.477,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	17.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	10 Orang	18.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Peserta Didik	66.684.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	300 Peserta Didik	70.018.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	423.552.337	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	2 Paket	444.729.954,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi		100 % 40 %	780.389.700			100 % 40 %	668.064.590,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan		1 muatan lokal	703.986.600		Tenaga pendidik dan kependidikan	1 muatan lokal	587.788.730,00	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	29.565.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Tenaga pendidik dan kependidikan	1 Dokumen	21.603.750,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kel/Desa			ALOKASI UMUM				
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Buku	30.256.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	500 Buku	31.769.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Orang	519.292.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	63 Orang	474.314.295,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar									
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.999.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	1 Dokumen	26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	99.872.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	1 Dokumen	33.851.045,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal Yang Ditetapkan		1 muatan lokal	76.403.100		Tenaga pendidik dan kependidikan	1 muatan lokal	80.275.860,00	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.065.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	1 Dokumen	13.773.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nonformal									
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750 Buku	17.335.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	750 Buku	18.201.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.999.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	1 Dokumen	26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.003.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	1 Dokumen	22.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik		90 % 31,70 %	7.038.401.800			90 % 31,70 %	7.744.977.975,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1 Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak		0,86 dan 0.7 indeks 98,25 % 94,47 % 100 % 6,58 %	7.038.401.800		Tenaga pendidik dan kependidikan	0,86 dan 0.7 indeks 98,25 % 94,47 % 100 % 6,58 %	7.744.977.975,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6.541.824.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	3 Dokumen	7.381.071.810,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	496.577.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Tenaga pendidik dan kependidikan	3 Laporan	363.906.165,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku		100 %	20.148.831			100 %	21.168.855,00	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit		1 jenis	20.148.831		Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	1 jenis	21.168.855,00	
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.046.721	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	1 Dokumen	10.559.955,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.102.110	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	1 Dokumen	10.608.900,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 1				1.065.677.273				1.498.650.985,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.065.677.273				1.498.650.985,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.065.677.273				1.498.650.985,00	
6	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	357.845.373			83.10 nilai	415.248.885,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.475.600		UPT SP SMPN 1	100 %	1.575.000,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.475.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	3 Laporan	1.575.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	70.158.300		UPT SP SMPN 1	100 %	92.217.300,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	32.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	2 Paket	35.385.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	60 Orang	37.908.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	60 Orang	56.832.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	84.186.573		UPT SP SMPN 1	100 %	86.967.885,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.946.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Paket	7.340.130,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	34.799.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	4 Paket	36.614.970,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	21.380.773	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Paket	21.274.785,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Paket	1.890.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Paket	7.500.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	11.760.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	48 Dokumen	12.348.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	30.587.400		UPT SP SMPN 1	100 %	57.750.000,00	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	2 Unit	8.576.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	2 Unit	31.500.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	2 Unit	22.011.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	2 Unit	26.250.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	73.390.000		UPT SP SMPN 1	100 %	73.407.600,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Laporan	1.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Laporan	1.207.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenki	36 Laporan	72.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 1	36 Laporan	72.200.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Disediakan	dul			UMUM				1
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	98.047.500		UPT SP SMPN 1	100 %	103.331.100,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Unit	2.601.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Unit	2.743.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	4 Unit	23.646.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	4 Unit	25.197.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Unit	71.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Unit	75.390.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
7	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		100 % 100 %	707.831.900			100 % 100 %	1.083.402.100,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	707.831.900		UPT SP SMPN 1	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	1.083.402.100,00	
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula									
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Ruang	34.988.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Ruang	105.000.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Unit	30.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Unit	84.000.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	3 Paket	35.509.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	3 Paket	152.447.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	280 Unit	21.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	280 Unit	22.050.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenki	1 Satuan Pendidikan	73.386.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 1	1 Satuan Pendidikan	77.866.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dul			UMUM				1
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	5 Buku	177.271.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	5 Buku	198.114.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	14 Paket	260.716.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	14 Paket	286.423.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Ruang	74.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 1	1 Ruang	157.500.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 2				1.248.164.340				1.299.638.100,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.248.164.340				1.299.638.100,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.248.164.340				1.299.638.100,00	
8	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	480.918.340			83.10 nilai	460.775.000,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.500.000		UPT SP SMPN 2	100 %	1.575.000,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	3 Laporan	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	3 Laporan	1.575.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	80.369.000		UPT SP SMPN 2	100 %	89.532.300,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	2 Paket	45.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	2 Paket	52.920.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	70 Orang	34.869.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	70 Orang	36.612.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	92.109.040		UPT SP SMPN 2	100 %	96.726.600,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Paket	22.456.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Paket	23.581.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	3 Paket	26.175.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	3 Paket	27.484.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Paket	25.067.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Paket	26.329.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Paket	3.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Paket	3.780.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Paket	5.690.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Paket	5.975.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	48 Dokumen	9.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	48 Dokumen	9.576.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	153.387.000		UPT SP SMPN 2	100 %	123.344.400,00	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Unit	19.376.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Unit	12.106.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	30 Unit	134.010.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	30 Unit	111.237.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	68.575.200		UPT SP SMPN 2	100 %	72.190.100,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Laporan	620.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Laporan	657.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	36 Laporan	67.955.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	36 Laporan	71.532.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	84.978.100		UPT SP SMPN 2	100 %	77.406.600,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Unit	1.646.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Unit	1.735.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	35 Unit	23.367.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	35 Unit	15.671.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Unit	59.965.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Unit	60.000.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) persentase angka kelulusan SMP/MTs		100 % 100 %	767.246.000			100 % 100 %	838.863.100,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	767.246.000		UPT SP SMPN 2	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	838.863.100,00	
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	342 Unit	290.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	342 Unit	305.125.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	1 Satuan Pendidikan	59.538.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	1 Satuan Pendidikan	66.761.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	5 Buku	167.420.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	5 Buku	187.105.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	14 Paket	249.928.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 2	14 Paket	279.871.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 3				1.020.402.406				976.369.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.020.402.406				976.369.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.020.402.406				976.369.000,00	
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	335.242.800			83.10 nilai	289.607.100,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.857.500		UPT SP SMPN 3	100 %	2.016.300,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	3 Laporan	1.857.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	3 Laporan	2.016.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	104.727.200		UPT SP SMPN 3	100 %	65.659.900,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	2 Paket	46.520.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	2 Paket	26.775.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	64 Orang	58.207.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	64 Orang	38.884.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	45.486.300		UPT SP SMPN 3	100 %	82.702.400,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Paket	7.492.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Paket	10.493.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	3 Paket	18.718.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	3 Paket	21.205.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Paket	6.874.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Paket	37.823.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Paket	2.610.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Paket	2.740.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Paket	6.431.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Paket	6.911.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	24 Dokumen	3.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	24 Dokumen	3.528.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	30.265.000		UPT SP SMPN 3	100 %	31.286.100,00	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	30.265.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	15 Unit	31.286.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	91.724.000		UPT SP SMPN 3	100 %	91.512.700,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Laporan	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Laporan	603.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	36 Laporan	91.224.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	36 Laporan	90.909.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	61.182.800		UPT SP SMPN 3	100 %	16.429.700,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Unit	2.065.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Unit	2.229.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.117.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Unit	10.000.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Unit	54.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Unit	4.200.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs		100 % 100 %	685.159.606			100 % 100 %	686.761.900,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	685.159.606		UPT SP SMPN 3	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	686.761.900,00	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Unit	171.470.106	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 3	1 Unit	134.874.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											UMUM				3
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	250 Unit	40.516.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	250 Unit	42.531.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Satuan Pendidikan	67.017.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Satuan Pendidikan	56.717.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	5 Buku	158.662.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	5 Buku	167.242.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	14 Paket	234.380.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	14 Paket	271.745.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	1 Paket	13.114.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 3	1 Paket	13.650.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 4				1.147.205.380				1.204.564.200,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.147.205.380				1.204.564.200,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.147.205.380				1.204.564.200,00	
12	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	460.582.980			83.10 nilai	478.615.600,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.721.180		UPT SP SMPN 4	100 %	5.082.300,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	3 Laporan	1.721.180	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	3 Laporan	5.082.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	116.578.800		UPT SP SMPN 4	100 %	87.624.000,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	3 Paket	55.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	3 Paket	52.080.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	60 Orang	60.778.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	60 Orang	35.544.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	100.662.800		UPT SP SMPN 4	100 %	96.504.800,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	10.342.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Paket	11.334.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	4 Paket	29.901.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	4 Paket	31.455.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	20.808.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Paket	22.802.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	15.905.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Paket	10.736.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	21.005.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Paket	17.339.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	12 Dokumen	2.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	12 Dokumen	2.835.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	169.973.100		UPT SP SMPN 4	100 %	219.003.000,00	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	42 Unit	169.973.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	42 Unit	219.003.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	54.487.000		UPT SP SMPN 4	100 %	52.497.900,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Laporan	1.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Laporan	1.207.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	36 Laporan	53.337.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	36 Laporan	51.290.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 nilai	17.160.100		UPT SP SMPN 4	100 nilai	17.903.600,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	2 Unit	4.625.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	2 Unit	4.769.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	36 Unit	9.135.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	36 Unit	9.563.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Unit	3.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Unit	3.570.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		100 % 100 %	686.622.400			100 % 100 %	725.948.600,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	686.622.400		UPT SP SMPN 4	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	725.948.600,00	
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	47.428.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Paket	58.059.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	400 Unit	125.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	400 Unit	131.659.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Satuan Pendidikan	53.321.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	1 Satuan Pendidikan	59.841.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	5 Buku	166.775.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	5 Buku	186.384.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	14 Paket	244.842.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	14 Paket	263.838.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	2 Paket	49.005.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 4	2 Paket	26.165.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 5				1.435.279.583				1.506.774.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.435.279.583				1.506.774.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.435.279.583				1.506.774.000,00	
14	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	769.625.625			83.10 nilai	743.483.600,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.807.239		UPT SP SMPN 5	100 %	1.897.600,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	3 Laporan	1.807.239	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	3 Laporan	1.897.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	86.689.600		UPT SP SMPN 5	100 %	86.473.500,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	3 Paket	48.689.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	3 Paket	44.965.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	54 Orang	38.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 5	54 Orang	41.508.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											UMUM				
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	122.777.500		UPT SP SMPN 5	100 %	128.814.200,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	1 Paket	18.509.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	1 Paket	19.434.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	35.646.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	3 Paket	37.431.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	3 Paket	32.243.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA	UPT SP SMPN 5	3 Paket	33.856.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ALOKASI UMUM				5
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	1 Paket	4.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	1 Paket	4.305.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	1 Paket	27.318.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	1 Paket	28.683.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	36 Dokumen	4.860.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	36 Dokumen	5.103.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	20.000.000		UPT SP SMPN 5	100 %	21.000.000,00	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	2 Unit	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	2 Unit	21.000.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	71.841.340		UPT SP SMPN 5	100 %	75.437.800,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	1 Laporan	1.560.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	1 Laporan	1.642.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	36 Laporan	70.281.340	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	36 Laporan	73.795.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	466.509.946		UPT SP SMPN 5	100 %	429.860.500,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	2 Unit	8.869.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	2 Unit	9.313.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	42 Unit	29.893.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	42 Unit	99.176.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	6 Unit	427.747.146	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	6 Unit	321.370.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
15	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		100 % 100 %	665.653.958			100 % 100 %	763.290.400,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana % Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah % peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	665.653.958		UPT SP SMPN 5	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	763.290.400,00	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	2 Unit	136.247.858	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	2 Unit	55.282.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	2 Paket	143.032.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	2 Paket	107.250.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	3 Paket	49.032.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	3 Paket	26.250.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	320 Unit	45.510.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	320 Unit	47.713.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	2 Unit	38.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	2 Unit	40.320.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	1 Satuan Pendidikan	31.906.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	1 Satuan Pendidikan	31.725.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	5 Buku	87.291.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	5 Buku	157.376.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	14 Paket	134.474.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 5	14 Paket	297.373.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 6				1.221.662.700				1.041.245.420,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.221.662.700				1.041.245.420,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PELAYANAN DASAR									
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.221.662.700				1.041.245.420,00	
16	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	625.859.200			83.10 nilai	416.829.320,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.000.000		UPT SP SMPN 6	100 %	1.086.900,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	3 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	3 Laporan	1.086.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	127.857.200		UPT SP SMPN 6	100 %	122.970.120,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	2 Paket	42.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	2 Paket	36.540.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	55 Orang	85.057.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	55 Orang	86.430.120,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	81.628.400		UPT SP SMPN 6	100 %	70.365.400,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	12.902.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	1 Paket	11.559.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	3 Paket	25.662.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	3 Paket	27.276.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	28.577.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	1 Paket	18.291.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Paket	7.826.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	1 Paket	6.244.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	48 Dokumen	6.660.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	48 Dokumen	6.993.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	60.701.100		UPT SP SMPN 6	100 %	62.043.000,00	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	6 Unit	60.701.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	6 Unit	62.043.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	116.520.000		UPT SP SMPN 6	100 %	97.147.000,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Laporan	600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 6	1 Laporan	603.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											UMUM				6
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	36 Laporan	115.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	36 Laporan	96.543.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	238.152.500		UPT SP SMPN 6	100 %	63.216.900,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	2 Unit	5.823.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	2 Unit	5.851.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	13 Unit	7.329.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	13 Unit	4.865.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Unit	225.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	1 Unit	52.500.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase angka kelulusan SMP/MTS Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		100 % 100 %	595.803.500			100 % 100 %	624.416.100,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	595.803.500		UPT SP SMPN 6	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	624.416.100,00	
	1	0	0	2.0	002	Pengadaan Mebel									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	2	5	Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	2 Paket	119.076.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	2 Paket	135.975.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	3 Paket	168.116.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	3 Paket	157.500.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	140 Unit	15.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	140 Unit	15.288.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	1 Satuan Pendidikan	21.168.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	1 Satuan Pendidikan	23.767.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	5 Buku	66.262.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	5 Buku	70.924.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	14 Paket	107.782.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	14 Paket	115.960.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	2 Paket	97.998.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 6	2 Paket	105.000.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 7				1.020.508.100				1.071.523.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				1.020.508.100				1.071.523.000,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PELAYANAN DASAR									
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.020.508.100				1.071.523.000,00	
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	520.845.100			83.10 nilai	290.581.900,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.944.200		UPT SP SMPN 7	100 %	2.041.400,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	3 Laporan	1.944.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	3 Laporan	2.041.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	98.714.400		UPT SP SMPN 7	100 %	98.077.500,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	2 Paket	45.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	2 Paket	42.315.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	60 Orang	53.414.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	60 Orang	55.762.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	312.723.700		UPT SP SMPN 7	100 %	78.203.200,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Paket	7.854.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Paket	8.385.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	3 Paket	267.262.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	3 Paket	30.406.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Paket	16.347.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Paket	17.169.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Paket	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Paket	3.150.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Paket	14.478.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Paket	15.122.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	64 Dokumen	3.780.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	64 Dokumen	3.969.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	71.936.400		UPT SP SMPN 7	100 %	75.530.700,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Laporan	600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Laporan	627.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	36 Laporan	71.336.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	36 Laporan	74.902.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	35.526.400		UPT SP SMPN 7	100 %	36.729.100,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	9.278.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	2 Unit	9.953.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	86 Unit	26.248.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 7	86 Unit	26.776.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											UMUM				
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		100 % 100 %	499.663.000			100 % 100 %	780.941.100,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah " Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan "		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	499.663.000		UPT SP SMPN 7	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	780.941.100,00	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Unit	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Unit	89.250.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	7 Unit	113.508.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	7 Unit	202.256.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	151 Unit	22.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	151 Unit	59.052.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	1 Satuan Pendidikan	37.944.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	1 Satuan Pendidikan	41.077.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	5 Buku	109.339.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	5 Buku	203.944.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	14 Paket	166.522.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 7	14 Paket	185.361.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 8				1.107.999.100				900.417.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.107.999.100				900.417.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.107.999.100				900.417.000,00	
20	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	330.365.800			83.10 nilai	324.423.100,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	5.997.600		UPT SP SMPN 8	100 %	6.318.900,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	3 Laporan	5.997.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	3 Laporan	6.318.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	121.064.400		UPT SP SMPN 8	100 %	112.890.100,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	2 Paket	42.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	2 Paket	38.640.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	60 Orang	78.264.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 8	60 Orang	74.250.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											UMUM				
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	94.588.000		UPT SP SMPN 8	100 %	98.429.700,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Paket	10.185.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Paket	10.795.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	3 Paket	22.669.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	3 Paket	23.875.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Paket	21.730.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Paket	22.930.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Paket	13.065.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Paket	13.774.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Paket	20.519.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Paket	21.571.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	36 Dokumen	6.420.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	36 Dokumen	5.481.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	93.036.000		UPT SP SMPN 8	100 %	90.041.300,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Laporan	966.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Laporan	1.006.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	36 Laporan	92.070.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	36 Laporan	89.034.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	15.679.800		UPT SP SMPN 8	100 %	16.743.100,00	
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	2 Unit	6.075.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	2 Unit	6.300.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	4 Unit	9.604.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	4 Unit	10.442.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
21	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		100 % 100 %	777.633.300			100 % 100 %	575.993.900,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	777.633.300		UPT SP SMPN 8	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	575.993.900,00	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Unit	227.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Unit	68.394.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Paket	111.538.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	1 Paket	14.416.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	400 Unit	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	400 Unit	31.500.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	1 Satuan Pendidikan	62.836.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	UPT SP SMPN 8	1 Satuan Pendidikan	70.652.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											UMUM				8
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	5 Buku	136.835.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	5 Buku	152.925.100,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	14 Paket	209.424.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 8	14 Paket	238.105.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 9				1.129.602.753				1.425.467.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.129.602.753				1.425.467.800,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.129.602.753				1.425.467.800,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83.10 nilai	260.690.203			83.10 nilai	248.033.100,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.807.200		UPT SP SMPN 9	100 %	2.038.300,00	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	3 Laporan	1.807.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	3 Laporan	2.038.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	84.254.153		UPT SP SMPN 9	100 %	68.516.300,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	2 Paket	42.646.953	DANA TRANSFER UMUM-DANA	UPT SP SMPN 9	2 Paket	27.300.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ALOKASI UMUM				9
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	65 Orang	41.607.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	65 Orang	41.216.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	89.750.350		UPT SP SMPN 9	100 %	95.545.300,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Paket	11.163.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Paket	11.907.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	3 Paket	25.405.350	DANA TRANSFER UMUM-DANA	UPT SP SMPN 9	3 Paket	27.079.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ALOKASI UMUM				9
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Paket	20.322.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Paket	22.018.900,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Paket	15.070.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Paket	15.823.500,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Paket	12.388.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Paket	13.045.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	12 Dokumen	5.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	12 Dokumen	5.670.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	68.808.000		UPT SP SMPN 9	100 %	66.017.300,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Laporan	600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Laporan	630.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	36 Laporan	68.208.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	36 Laporan	65.387.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	16.070.500		UPT SP SMPN 9	100 %	15.915.900,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah									
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Unit	5.629.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Unit	5.844.300,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	19 Unit	10.441.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	19 Unit	10.071.600,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs		100 % 100 %	868.912.550			100 % 100 %	1.177.434.700,00	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan		1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	868.912.550		UPT SP SMPN 9	1 Satuan Pendidikan 100 % 100 %	1.177.434.700,00	
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Ruang	135.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Ruang	108.944.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Ruang	158.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Ruang	108.944.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	2 Paket	40.662.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA	UPT SP SMPN 9	2 Paket	40.723.200,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ALOKASI UMUM				9
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	3 Paket	60.301.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	3 Paket	73.502.400,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	300 Unit	71.068.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	300 Unit	74.751.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	1 Satuan Pendidikan	49.828.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	1 Satuan Pendidikan	55.845.800,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	5 Buku	143.658.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	5 Buku	260.956.000,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	14 Paket	209.714.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	UPT SP SMPN 9	14 Paket	453.766.700,00	UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 9
										219.396.836.334				201.406.212.834,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dari Dinas Pendidikan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pendidikandan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025 Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikandi dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

   Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

   a. Dinas Pendidikan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;

   b. Dinas Pendidikan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Pendidikan tahun 2025 ;

   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas PendidikanTahun 2025 wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

   d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

3. Rencana Tindak Lanjut

   Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas PendidikanTahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien, dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa *failing to plan is planning to fail;* gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berdasarkan pasal 126:

1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra PD, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;

3. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran;
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;
5. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan;

1.1.1 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/ Lembaga dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Renja Kementerian Kesehatan RI dan Renja Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun demikian, harus terjadi keselarasan dalam mendukung tujuan dan sasaran Renja Kementerian Kesehatan RI dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025. RKA Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD

Kota Blitar. Oleh karena itu, Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);

25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan; dengan rincian sub bab sebagai berikut;

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematikan Penulisan

BAB II : Evaluasi Hasil Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun Lalu

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renja Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat; dengan rincian sub bab sebagai berikut;

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah; dengan rincian sub bab sebagai berikut;

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indicator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat rencana kerja dan rencana pendanaan, pada program pembangunan daerah (program strategis

daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD;

BAB V : Penutup

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2023 dan perkiraan capaiannya tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan terkait program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target, mencapai maupun yang tidak tercapai sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian telah melampaui target dengan presentase tingkat realisasi 100,48% pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat indikator yang telah melampaui target, mencapai target dan indikator yang tidak mencapai target.
   Adapun indikator yang sudah melampaui target meliputi :
   a. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (SPM) 123,57%.
   b. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 103,5%.
   c. Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 102,8%.
   d. Presentase penderita penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 105,5%
   e. Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 104,77%
   f. Presentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM) dengan tingkat realisasi 141,4%
   g. Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) dengan tingkat realisasi 142,5%
   h. Presentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization) dengan tingkat realisasi 105,04%
   i. Presentase lingkungan yang memenuhi standar Kesehatan dengan tingkat realisasi 110,83%
   j. Presentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina dengan tingkat realisasi 177,5%

   Adapun indikator yang sudah mencapai target meliputi :
   a. Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan dengan capaian tingkat realisasi 100%.
   b. Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dengan capaian tingkat realisasi 100%.

c. Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani 100%.
d. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian tingkat realisasi 100%.

Sedangkan indikator yang tidak mencapai mencapai target meliputi:
a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)) dengan capaian tingkat realisasi 98,17%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan masih ada ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC (*Antenatal Care*) sesuai jadwal. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melakukan penjaringan/pendataan ibu hamil melalui kelas ibu hamil, pendamoingan ibu hamil risti (risiko tinggi) dan *sweeping* ibu hamil oleh kader kesehatan.
b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 98,78%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan masih adanya kasus *maternal abortus* (keguguran). Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan pendampingan oleh tim ahli (Sp.OG) dalam Pelayanan KIA (kesehatan ibu dan anak, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan, Pendampingan buml risti, bulin dan bufas oleh kader pendamping serta melaksanakan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring skirning layak hamil dan ANC.
c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 99,7%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan alat kesehatan pertolongan kegawatdaruratan pada Bayi Baru lahir (BBL) dan masih adanya kasus abortus (keguguran) dan lahir mati. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah Melaksanakan sosialisasi alat skrining penyakit jantung bawaan (PJB), monev pelayanan MTBM dan MTBS di Puskesmas serta mengadakan PSR(*Pediatrician Social Responbility*)/Pendampingan Tim Ahli (Sp.A) dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Perinatal.
d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 93%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan belum rutinnya pelaporan dari lembaga PAUD dan TK/RA. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan pendampingan dan pembinaan rutin pelaporan pada lembaga PAUD dan TK/RA.
e. Presentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) dengan capaian tingkat realisasi 97,7%. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan data pelayanan kesehatan lansia masih belum termasuk layanan di klinik dan praktik dokter mandiri. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kerjasama dengan klinik dan praktik dokter mandiri untuk mengakses data layanan kesehatan lansia.

3. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan target telah tercapai dengan presentase tingkat realisasi 100% pada indikator Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar.
4. Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdapat indikator yang telah melampaui target dan

mencapai target. Target telah tercapai dengan presentase tingkat realisasi 100% pada indikator Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standart dan target telah terlampaui dengan tingkat realisasi 109,02% pada indikator Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan.

5. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan target telah tercapai dengan presentase tingkat realisasi 100% pada indikator Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 dan perkiraaan capaiannya sampai dengan tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar s.d. Tahun 2024

Nama PD: Dinas Kesehatan Kota Blitar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dinas Kesehatan									
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
						Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3 Tahun	74, 26 Tahun	74,26 Tahun	74,97 Tahun	100,96	74,27 Tahun	74,97 Tahun	100,90
						Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per 100.000 kelahiran hidup	500 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	190,46	98,14 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	102,83
							Angka kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1000 kelahiran hidup	9,19 per 1.000 kelahiran hidup	9,93 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	151,96	9,09 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	143,94
							Prevalensi balita stunting	6,8 persen	5,26 persen	7 persen	7,64 persen	90,85	6,95 persen	6,95 persen	97,79
							Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30 persen	34,62 persen	15,2 persen	30,9 persen	203,29	28 persen	30,9 persen	103
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100 persen	26,19 persen	65 persen	77,27 persen	118,88	75 persen	77,27 persen	77,27
							IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,35 (skala)	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33	0,70 (skala)	0,70 (skala)	82,35
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	86 indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	84 indeks	84 indeks	97,67
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100 persen	85,73 persen	100 persen	98,17 persen	98,17	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100 persen	81,92 persen	100 persen	98,78 persen	98,78	100 persen	100 persen	100
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100 persen	81,16 persen	100 persen	99,7 persen	99,7	100 persen	100 persen	100
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100 persen	58,81 persen	100 persen	93 persen	93	100 persen	100 persen	100
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	99,16 persen	100 persen	123,57 persen	123,57	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	101,22 persen	100 persen	103,5 persen	103,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	93,48 persen	100 persen	97,7 persen	97,7	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	79,69 persen	100 persen	102,8 persen	102,8	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	104,41 persen	100 persen	105,5 persen	105,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100 persen	87,5 persen	100 persen	104,7 persen	104,77	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	100 persen	93,87 persen	100 persen	141,4 persen	141,4	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							sesuai standar (SPM)								
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100 persen	118,63 persen	100 persen	142,5 persen	142,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2 persen	38,09 persen	95,2 persen	100 persen	105,04	95,2 persen	100 persen	105,04
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73 persen	59,23 persen	63 persen	69,82 persen	110,83	65 persen	69,82 persen	95,64
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29 persen	22 persen	26 persen	46,15 persen	177,5	27 persen	46,15 persen	159,14
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	76,86 persen	76,86	100 persen	100 persen	100
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Unit	0	0
1	02	02	2	01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat	7 Unit	N/A	2 unit	2 unit	100	4 Unit	6 Unit	85,71

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							kesehatan dan SDM agar sesuai standar								
1	0 2	0 2	2	0 1	000 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	3 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit	33,3
1	0 2	0 2	2	0 1	001 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Unit	N/A	4 unit	4 unit	100	0 Unit	4 Unit	400
1	0 2	0 2	2	0 1	001 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	214 Unit	N/A	124 unit	124 unit	100	30 Unit	154 Unit	71,96
1	0 2	0 2	2	0 1	002 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1138 Unit	N/A	260 unit	170 unit	65,38	278 Unit	448 Unit	39,37
1	0 2	0 2	2	0 1	002 3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19 Paket	N/A	5 paket	5 paket	100	5 paket	10 paket	52,63
1	0 2	0 2	2	0 1	002 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	16580 Keluarga	N/A	8056 keluarga	1580 keluarga	19,61	2841 Keluarga	4421 keluarga	26,66
1	0 2	0 2	2	0 1	002 6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan	Jumlah distribusi Alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	36 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	12 paket	12 Paket	33,33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan								
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	100	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3 persen	99,6 persen	14,3 persen	14,3 persen	100	14,3 persen	14,3 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100 persen	81,52 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100 persen	75 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100 persen	99,6 persen	100 persen	100,83 persen	100,83	100 persen	100 persen	100
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,5 persen	81,52 persen	90,3 persen	90,3 persen	100	90,4 persen	90,4 persen	98,80
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70 persen	66 persen	67 persen	68,12 persen	101,67	68 persen	68,12 persen	97,31
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79 persen	75 persen	78,3 persen	93,71 persen	119,68	78,5 persen	93,71 persen	118,62
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67 persen	44,88 persen	52,38 persen	47,62 persen	90,91	57,14 persen	57,14 persen	85,71

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100
							Persentae program prioritas yang dipromosikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Jumlah Pos UKK yang terbina	12 Pos UKK	8 pos UKK	9 Pos UKK	9 Pos UKK	100	10 pos UKK	10 pos UKK	100
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55 persen	33,3 persen	45 persen	67 persen	148,89	50 persen	67 persen	121,82
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20 persen	10 persen	13 persen	8,16 persen	62,77	15 persen	15 persen	75
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase penyehat tradisional yang berizin	5 persen	2,3 persen	4 persen	7,51 persen	187,75	4 persen	7,51 persen	150,2
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8893 Orang	N/A	2235 orang	2185 orang	97,76	2228 orang	4413 orang	49,62
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8488 Orang	N/A	2134 orang	2097 orang	98,27	2126 orang	4223 orang	49,75
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8084 Orang	N/A	2032 orang	2023 orang	99,56	2025 orang	4048 orang	50,07
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32930 Orang	N/A	8252 orang	7640 orang	92,58	8239 orang	15879 orang	48,22
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70285 Orang	N/A	17600 orang	21749 orang	123,57	17552 orang	39301 orang	55,92

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	370607 Orang	N/A	92692 orang	92692 orang	100	92696 orang	185388 orang	50,02
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96494 Orang	N/A	22826 orang	22826 orang	100	23683 orang	46509 orang	48,20
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	190093 Orang	N/A	47016 orang	46075 orang	98,00	47366 orang	93441 orang	49,16
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17281 Orang	N/A	3847 orang	3847 orang	100	4306 orang	8153 orang	47,18
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1528 Orang	N/A	277 orang	287 orang	103,61	381 orang	668 orang	43,72
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	11400 Orang	N/A	2887 orang	3353 orang	116,14	2854 orang	6207 orang	54,45
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13691 Orang	N/A	3389 orang	4744 orang	139,98	3410 orang	8154 orang	59,56
1	02	02	2	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	4 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0014	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	4 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar								
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	20 Dokumen	N/A	5 dokumen	5 dokumen	100	5 Dokumen	10 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	9 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	6 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 Dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	12 Dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	28 Dokumen	N/A	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	14 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40 Orang	N/A	10 orang	10 orang	100	10 orang	20 orang	50
1	02	02	2	02	0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	78 Dokumen	N/A	24 dokumen	13 dokumen	54,17	18 Dokumen	21 Dokumen	26,92
1	02	02	2	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	2020 paket	N/A	400 paket	156 paket	39	790 paket	946 paket	46,83
1	02	02	2	02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	37 Dokumen	N/A	8 dokumen	8 dokumen	100	9 Dokumen	17 Dokumen	45,95
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	192 Dokumen	N/A	48 dokumen	48 dokumen	100	48 Dokumen	96 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	29 Dokumen	N/A	6 dokumen	6 dokumen	100	7 dokumen	13 Dokumen	44,83
1	02	02	2	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	52 Unit	N/A	13 unit	18 unit	138,46	13 Unit	31 Unit	59,62
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	N/A	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	12 laporan	50
1	02	02	2	02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	4 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50
1	02	02	2	02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem	4 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Darurat Terpadu (SPGDT)	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
1	0 2	0 2	2	0 2	004 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayann kesehatan Malaria	36 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Orang	12 Orang	33,33
1	0 2	0 2	2	0 2	004 6	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	50
1	0 2	0 2	2	0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	0 2	0 2	2	0 3	000 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12 Dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 Dokumen	50
1	0 2	0 2	2	0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	0 2	0 2	2	0 4	000 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit	N/A	1 unit	1 unit	100	1 Unit	2 Unit	50
1	0 2	0 2	2	0 4	000 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	8 Dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 Dokumen	50
1	0 2	0 3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	0 2	0 3	2	0 1		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Wilayah Kabupaten/Kota									
1	02	03	2	01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1770 Dokumen	N/A	270 dokumen	270 dokumen	100	400 dokumen	670 Dokumen	37,85
1	02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	1500 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	400 orang	400 orang	26,67
1	02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	10 Dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
1	02	03	2	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	21 persen	16 persen	14 persen	16,37 persen	116,93	18 persen	18 persen	85,71
1	02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	224 Orang	N/A	82 orang	94 orang	114,63	68 orang	162 orang	72,32

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	90 persen	75,38 persen	85 persen	92,67 persen	109,02	87 persen	92,67 persen	102,97
1	02	04	2	01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	20 Dokumen	N/A	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	10 Dokumen	50
1	02	04	2	01	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Sarana	N/A	30 Sarana	30 Sarana	100	0 sarana	30 Sarana	100
1	02	04	2	02		Pemberian Sertifikat Produksi	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan	100 persen	100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina								
1	02	04	2	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	2 Dokumen	50
1	02	04	2	03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	95 persen	85,4 persen	92 persen	92,67 persen	100,73	93 persen	93 persen	97,89
1	02	04	2	03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk	8 Dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 Dokumen	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga								
1	02	04	2	04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	81 persen	0 persen	N/A	N/A	N/A	79 persen	79 persen	97,53
1	02	04	2	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
1	02	04	2	05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	83 persen	79 persen	N/A	N/A	N/A	81 persen	81 persen	97,59

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	04	2	05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
1	02	04	2	06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	95 persen	74 persen	92 persen	92,67 persen	100,73	93 persen	93 persen	97,89
1	02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	190 unit	N/A	40 unit	40 unit	100	45 unit	85 Unit	44,74
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71 persen	85,71 persen	61,9 persen	85,71 persen	138,47	85,71 persen	85,71 persen	100
1	02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	56 persen	52 persen	53 persen	60,2 persen	113,58	54 persen	60,2 persen	107,5
							Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	95,8 persen	94,61 persen	94,61 persen	100 persen	105,70	94,64 persen	100 persen	104,38

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	60 persen	53 persen	54 persen	100 persen	185,19	55 persen	100 persen	166,67
							Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM	2 kelompok UKBM	2 kelompok UKBM	2 kelompok UKBM	100	3 kelompok UKBM	3 kelompok UKBM	100
1	02	05	2	01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	32 Dokumen	N/A	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	16 dokumen	50
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8 Dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 Dokumen	50
						Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	87,00 Nilai	86,61 Nilai	87,00 Nilai	85,08 Nilai	97,79	85,72 Nilai	85,72 Nilai	98,53
						Sasaran: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	87,00 Nilai	86, 61 Nilai	87,00 Nilai	85,08 Nilai	97,79	85,72 Nilai	85,72 Nilai	98,53
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,10 Indeks	80,5 Indeks	82,9 indeks	83,3 indeks	100,48	82,95 indeks	83,3 indeks	100,24

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						KABUPATEN/ KOTA									
1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	52 Dokumen	N/A	13 dokumen	13 dokumen	100	13 dokumen	26 dokumen	50
1	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	44 Laporan	N/A	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	22 laporan	50
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	97,68 persen	97,68	100 persen	100 persen	100
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	984 Orang/bulan	N/A	246 orang/bulan	231 orang/bulan	93,90	246 orang/bulan	477 orang/bulan	48,48
1	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 Laporan	50
1	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 Paket	N/A	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	50
1	02	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	8 Dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	260 Orang	N/A	65 orang	65 orang	100	65 orang	130 orang	50
1	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	N/A	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	100
1	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Paket	N/A	4 paket	4 paket	100	4 paket	8 paket	50
1	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Paket	N/A	5 paket	5 paket	100	5 paket	10 paket	50
1	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	96 Paket	N/A	24 paket	24 paket	100	24 paket	48 paket	50
1	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket	N/A	2 paket	2 paket	100	2 paket	4 paket	50
1	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	192 Dokumen	N/A	48 dokumen	48 dokumen	100	48 dokumen	96 Dokumen	50
1	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800 Laporan	N/A	200 laporan	200 laporan	100	200 laporan	400 laporan	50
1	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50
1	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	80 persen	100 persen	80 persen	100 persen	125	80 persen	100 persen	125

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	73 Unit	N/A	2 unit	2 unit	100	0 Unit	2 Unit	2,74
1	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 Unit	N/A	46 unit	46 unit	100	3 Unit	49 Unit	89,09
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108 laporan	N/A	36 laporan	36 laporan	100	36 laporan	72 laporan	66,67
1	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	52 laporan	N/A	13 laporan	13 laporan	100	13 laporan	26 laporan	50
1	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	92 Unit	N/A	23 unit	23 unit	100	23 unit	46 Unit	50
1	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	488 Unit	N/A	122 unit	122 unit	100	122 unit	244 Unit	50
1	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	N/A	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 Unit	50

Nama Unit: Puskesmas Kepanjenkidul

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dinas Kesehatan									
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
						Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3 Tahun	74, 26 Tahun	74,26 Tahun	74,97 Tahun	100,96	74,27 Tahun	74,97 Tahun	100,90
						Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per 100.000 kelahiran hidup	500 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	190,46	98,14 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	102,83
							Angka kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1000 kelahiran hidup	9,19 per 1.000 kelahiran hidup	9,93 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	151,96	9,09 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	143,94
							Prevalensi balita stunting	6,8 persen	5,26 persen	7 persen	7,64 persen	90,85	6,95 persen	6,95 persen	97,79
							Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30 persen	34,62 persen	15,2 persen	30,9 persen	203,29	28 persen	30,9 persen	103
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100 persen	26,19 persen	65 persen	77,27 persen	118,88	75 persen	77,27 persen	77,27
							IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,35 (skala)	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33	0,70 (skala)	0,70 (skala)	82,35
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	86 indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	84 indeks	84 indeks	97,67
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100 persen	85,73 persen	100 persen	98,17 persen	98,17	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100 persen	81,92 persen	100 persen	98,78 persen	98,78	100 persen	100 persen	100
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100 persen	81,16 persen	100 persen	99,7 persen	99,7	100 persen	100 persen	100
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100 persen	58,81 persen	100 persen	93 persen	93	100 persen	100 persen	100
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	99,16 persen	100 persen	123,57 persen	123,57	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	101,22 persen	100 persen	103,5 persen	103,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	93,48 persen	100 persen	97,7 persen	97,7	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	79,69 persen	100 persen	102,8 persen	102,8	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	104,41 persen	100 persen	105,5 persen	105,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100 persen	87,5 persen	100 persen	104,7 persen	104,77	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100 persen	93,87 persen	100 persen	141,4 persen	141,4	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100 persen	118,63 persen	100 persen	142,5 persen	142,5	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2 persen	38,09 persen	95,2 persen	100 persen	105,04	95,2 persen	100 persen	105,04
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73 persen	59,23 persen	63 persen	69,82 persen	110,83	65 persen	69,82 persen	95,64
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29 persen	22 persen	26 persen	46,15 persen	177,5	27 persen	46,15 persen	159,14
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	76,86 persen	76,86	100 persen	100 persen	100
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	314 Unit	N/A	286 Unit	286 Unit	100	60 Unit	346 Unit	110,19
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	88 Unit	N/A	54 unit	54 unit	100	10 Unit	64 Unit	72,73
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	22 Paket	N/A	7 paket	7 paket	100	5 paket	12 paket	54,55

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
1	02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	222 Keluarga	N/A	50 keluarga	50 keluarga	100	55 keluarga	105 keluarga	47,30
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	100	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3 persen	99,6 persen	14,3 persen	14,3 persen	100	14,3 persen	14,3 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100 persen	81,52 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100 persen	75 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100 persen	99,6 persen	100 persen	100,83 persen	100,83	100 persen	100 persen	100
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,5 persen	81,52 persen	90,3 persen	90,3 persen	100	90,4 persen	90,4 persen	98,80
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70 persen	66 persen	67 persen	68,12 persen	101,67	68 persen	68,12 persen	97,31
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79 persen	75 persen	78,3 persen	93,71 persen	119,68	78,5 persen	93,71 persen	118,62
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67 persen	44,88 persen	52,38 persen	47,62 persen	90,91	57,14 persen	57,14 persen	85,71
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100
							Persentae program prioritas yang dipromosikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Pos UKK yang terbina	12 Pos UKK	8 pos UKK	9 Pos UKK	9 Pos UKK	100	10 pos UKK	10 pos UKK	100
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55 persen	33,3 persen	45 persen	67 persen	148,89	50 persen	67 persen	121,82
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20 persen	10 persen	13 persen	8,16 persen	62,77	15 persen	15 persen	75
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase penyehat tradisional yang berizin	5 persen	2,3 persen	4 persen	7,51 persen	187,75	4 persen	7,51 persen	150,2
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2560 Orang	N/A	642 orang	718 orang	111,84	640 orang	1358 orang	53,05
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2444 Orang	N/A	613 orang	624 orang	101,79	611 orang	1235 orang	50,53
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2319 Orang	N/A	582 orang	620 orang	106,53	580 orang	1200 orang	51,75
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11944 Orang	N/A	2999 orang	2355 orang	78,53	2979 orang	5334 orang	44,66
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20138 Orang	N/A	5038 orang	4346 orang	86,26	5025 orang	9371 orang	46,53
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106132 Orang	N/A	26542 orang	26999 orang	101,72	26543 orang	53542 orang	50,45

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27621 Orang	N/A	6538 orang	7097 orang	108,55	6782 orang	13879 orang	50,25
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54436 Orang	N/A	13463 orang	20014 orang	148,66	13563 orang	33577 orang	61,68
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4947 Orang	N/A	1224 orang	6574 orang	537,09	1233 orang	7807 orang	157,81
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	438 Orang	N/A	108 orang	81 orang	75,00	109 orang	190 orang	43,38
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4598 Orang	N/A	1163 orang	937 orang	80,57	1150 orang	2087 orang	45,39
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3919 Orang	N/A	970 orang	1527 orang	157,42	976 orang	2503 orang	63,87
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	34 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	70,59
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 Dokumen	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	37 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	12 dokumen	13 Dokumen	35,14
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 Dokumen	24 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	50
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71 persen	85,71 persen	61,9 persen	85,71 persen	138,47	85,71 persen	85,71 persen	100
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 Dokumen	50

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

Nama Unit : Puskesmas Sukorejo

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dinas Kesehatan									
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3 Tahun	74, 26 Tahun	74,26 Tahun	74,97 Tahun	100,96	74,27 Tahun	74,97 Tahun	100,90
						Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per 100.000 kelahiran hidup	500 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	190,46	98,14 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	102,83
							Angka kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1000 kelahiran hidup	9,19 per 1.000 kelahiran hidup	9,93 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	151,96	9,09 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	143,94
							Prevalensi balita stunting	6,8 persen	5,26 persen	7 persen	7,64 persen	90,85	6,95 persen	6,95 persen	97,79
							Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30 persen	34,62 persen	15,2 persen	30,9 persen	203,29	28 persen	30,9 persen	103
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100 persen	26,19 persen	65 persen	77,27 persen	118,88	75 persen	77,27 persen	77,27
							IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,35 (skala)	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33	0,70 (skala)	0,70 (skala)	82,35
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	86 indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	84 indeks	84 indeks	97,67
0 1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100 persen	85,73 persen	100 persen	98,17 persen	98,17	100 persen	100 persen	100
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100 persen	81,92 persen	100 persen	98,78 persen	98,78	100 persen	100 persen	100
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100 persen	81,16 persen	100 persen	99,7 persen	99,7	100 persen	100 persen	100
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100 persen	58,81 persen	100 persen	93 persen	93	100 persen	100 persen	100
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	99,16 persen	100 persen	123,57 persen	123,57	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	101,22 persen	100 persen	103,5 persen	103,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	93,48 persen	100 persen	97,7 persen	97,7	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	79,69 persen	100 persen	102,8 persen	102,8	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	104,41 persen	100 persen	105,5 persen	105,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100 persen	87,5 persen	100 persen	104,7 persen	104,77	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100 persen	93,87 persen	100 persen	141,4 persen	141,4	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100 persen	118,63 persen	100 persen	142,5 persen	142,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2 persen	38,09 persen	95,2 persen	100 persen	105,04	95,2 persen	100 persen	105,04
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73 persen	59,23 persen	63 persen	69,82 persen	110,83	65 persen	69,82 persen	95,64

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29 persen	22 persen	26 persen	46,15 persen	177,5	27 persen	46,15 persen	159,14
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	76,86 persen	76,86	100 persen	100 persen	100
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	170 Unit	N/A	300 Unit	250 Unit	83,33	50 Unit	270 Unit	146,18
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	12 Unit	N/A	75 unit	75 unit	100	3 Unit	78 Unit	650,00
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	16 Paket	N/A	4 paket	4 paket	100	4 paket	8 paket	50,00
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	100	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3 persen	99,6 persen	14,3 persen	14,3 persen	100	14,3 persen	14,3 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100 persen	81,52 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100 persen	75 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100 persen	99,6 persen	100 persen	100,83 persen	100,83	100 persen	100 persen	100
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,5 persen	81,52 persen	90,3 persen	90,3 persen	100	90,4 persen	90,4 persen	98,80
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70 persen	66 persen	67 persen	68,12 persen	101,67	68 persen	68,12 persen	97,31
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79 persen	75 persen	78,3 persen	93,71 persen	119,68	78,5 persen	93,71 persen	118,62
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67 persen	44,88 persen	52,38 persen	47,62 persen	90,91	57,14 persen	57,14 persen	85,71
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100
							Persentae program prioritas yang dipromosikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Jumlah Pos UKK yang terbina	12 Pos UKK	8 pos UKK	9 Pos UKK	9 Pos UKK	100	10 pos UKK	10 pos UKK	100
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55 persen	33,3 persen	45 persen	67 persen	148,89	50 persen	67 persen	121,82
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20 persen	10 persen	13 persen	8,16 persen	62,77	15 persen	15 persen	75
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase penyehat tradisional yang berizin	5 persen	2,3 persen	4 persen	7,51 persen	187,75	4 persen	7,51 persen	150,2

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3018 Orang	N/A	758 orang	698 orang	92,08	756 orang	1454 orang	48,18
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2878 Orang	N/A	724 orang	0 orang	0,00	721 orang	721 orang	25,05
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2758 Orang	N/A	694 orang	0 orang	0,00	691 orang	691 orang	26,80
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14235 Orang	N/A	3578 orang	2372 orang	66,29	3563 orang	5935 orang	41,69
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24002 Orang	N/A	6010 orang	6389 orang	106,31	5994 orang	12383 orang	51,59
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	126526 Orang	N/A	31645 orang	31169 orang	98,50	31646 orang	62815 orang	49,65
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32932 Orang	N/A	7789 orang	7301 orang	93,73	8083 orang	15384 orang	46,71
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64894 Orang	N/A	16050 orang	15890 orang	99,00	16170 orang	32060 orang	49,40
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5900 Orang	N/A	1459 orang	1404 orang	96,23	1470 orang	2874 orang	48,71
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	522 Orang	N/A	129 orang	99 orang	76,74	130 orang	229 orang	43,87

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dengan Gangguan Jiwa Berat									
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3729 Orang	N/A	780 orang	820 orang	105,13	934 orang	1754 orang	47,04
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4674 Orang	N/A	960 orang	1090 orang	113,54	1164 orang	2254 orang	48,22
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	11 dokumen	91,67	12 Dokumen	23 Dokumen	47,92
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	11 dokumen	91,67	12 Dokumen	23 Dokumen	47,92
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	11 dokumen	91,67	12 dokumen	23 Dokumen	47,92
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	37 Dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100	12 dokumen	13 Dokumen	35,14
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	11 dokumen	91,67	12 Dokumen	23 Dokumen	47,92
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	52 Dokumen	N/A	12 dokumen	11 dokumen	91,67	12 Dokumen	23 Dokumen	44,23

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Menjumlahkan penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	43 orang	43 orang	100,00
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71 persen	85,71 persen	61,9 persen	85,71 persen	138,47	85,71 persen	85,71 persen	100
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	11 dokumen	91,67	12 dokumen	23 Dokumen	47,92

Nama Unit : Puskesmas Sananwetan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dinas Kesehatan									
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
						Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3 Tahun	74, 26 Tahun	74,26 Tahun	74,97 Tahun	100,96	74,27 Tahun	74,97 Tahun	100,90
						Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per 100.000 kelahiran hidup	500 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	190,46	98,14 per 100.000 kelahiran hidup	47,68 per 100.000 kelahiran hidup	102,83
							Angka kematian Bayi (AKB)	8,51 per-1000 kelahiran hidup	9,19 per 1.000 kelahiran hidup	9,93 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	151,96	9,09 per 1000 kelahiran hidup	4,77 per 1000 kelahiran hidup	143,94
							Prevalensi balita stunting	6,8 persen	5,26 persen	7 persen	7,64 persen	90,85	6,95 persen	6,95 persen	97,79
							Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	30 persen	34,62 persen	15,2 persen	30,9 persen	203,29	28 persen	30,9 persen	103
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100 persen	26,19 persen	65 persen	77,27 persen	118,88	75 persen	77,27 persen	77,27
							IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,35 (skala)	0,60 (skala)	0,41 (skala)	68,33	0,70 (skala)	0,70 (skala)	82,35
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	86 indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	84 indeks	84 indeks	97,67
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	100 persen	85,73 persen	100 persen	98,17 persen	98,17	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)								
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100 persen	81,92 persen	100 persen	98,78 persen	98,78	100 persen	100 persen	100
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100 persen	81,16 persen	100 persen	99,7 persen	99,7	100 persen	100 persen	100
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100 persen	58,81 persen	100 persen	93 persen	93	100 persen	100 persen	100
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	99,16 persen	100 persen	123,57 persen	123,57	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	101,22 persen	100 persen	103,5 persen	103,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	93,48 persen	100 persen	97,7 persen	97,7	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	79,69 persen	100 persen	102,8 persen	102,8	100 persen	100 persen	100
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen	104,41 persen	100 persen	105,5 persen	105,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100 persen	87,5 persen	100 persen	104,7 persen	104,77	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100 persen	93,87 persen	100 persen	141,4 persen	141,4	100 persen	100 persen	100
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100 persen	118,63 persen	100 persen	142,5 persen	142,5	100 persen	100 persen	100
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2 persen	38,09 persen	95,2 persen	100 persen	105,04	95,2 persen	100 persen	105,04
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73 persen	59,23 persen	63 persen	69,82 persen	110,83	65 persen	69,82 persen	95,64
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29 persen	22 persen	26 persen	46,15 persen	177,5	27 persen	46,15 persen	159,14
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	76,86 persen	76,86	100 persen	100 persen	100
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	113 Unit	N/A	81 Unit	40 Unit	49,38	35 Unit	75 Unit	66,37

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	104 Unit	N/A	58 unit	26 unit	44,83	26 Unit	52 Unit	50,00
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	40 Paket	N/A	10 paket	10 paket	100	10 paket	20 paket	50,00
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 Persen	100 Persen	100
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	100	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3 persen	99,6 persen	14,3 persen	14,3 persen	100	14,3 persen	14,3 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100 persen	81,52 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100 persen	75 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100 persen	99,6 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100 persen	99,6 persen	100 persen	100,83 persen	100,83	100 persen	100 persen	100
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,5 persen	81,52 persen	90,3 persen	90,3 persen	100	90,4 persen	90,4 persen	98,80
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100 persen	66 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70 persen	66 persen	67 persen	68,12 persen	101,67	68 persen	68,12 persen	97,31

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79 persen	75 persen	78,3 persen	93,71 persen	119,68	78,5 persen	93,71 persen	118,62
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67 persen	44,88 persen	52,38 persen	47,62 persen	90,91	57,14 persen	57,14 persen	85,71
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	100
							Persentae program prioritas yang dipromosikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Jumlah Pos UKK yang terbina	12 Pos UKK	8 pos UKK	9 Pos UKK	9 Pos UKK	100	10 pos UKK	10 pos UKK	100
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55 persen	33,3 persen	45 persen	67 persen	148,89	50 persen	67 persen	121,82
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20 persen	10 persen	13 persen	8,16 persen	62,77	15 persen	15 persen	75
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
							Persentase penyehat tradisional yang berizin	5 persen	2,3 persen	4 persen	7,51 persen	187,75	4 persen	7,51 persen	150,2
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3320 Orang	N/A	835 orang	539 orang	64,55	832 orang	1371 orang	41,30
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3170 Orang	N/A	797 orang	558 orang	70,01	794 orang	1352 orang	42,65
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3010 Orang	N/A	756 orang	524 orang	69,31	754 orang	1278 orang	42,46

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12255 Orang	N/A	3071 orang	1880 orang	61,22	3067 orang	4947 orang	40,37
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26162 Orang	N/A	6552 orang	6511 orang	99,37	6533 orang	13044 orang	49,86
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	137960 Orang	N/A	34505 orang	28429 orang	82,39	34507 orang	62936 orang	45,62
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35928 Orang	N/A	8499 orang	6260 orang	73,66	8818 orang	15078 orang	41,97
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70766 Orang	N/A	17503 orang	10055 orang	57,45	17633 orang	27688 orang	39,13
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6434 Orang	N/A	1591 orang	1620 orang	101,82	1603 orang	3223 orang	50,09
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	568 Orang	N/A	141 orang	164 orang	116,31	142 orang	306 orang	53,87
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3072 Orang	N/A	776 orang	992 orang	127,84	770 orang	1762 orang	57,36
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5096 Orang	N/A	1262 orang	270 orang	21,39	1269 orang	1539 orang	30,20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dengan Risiko Terinfeksi HIV									
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	39 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75	12 Dokumen	21 Dokumen	53,85
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75	12 Dokumen	21 Dokumen	43,75
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	-	12 dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75	12 dokumen	21 Dokumen	43,75
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75	12 dokumen	21 Dokumen	43,75
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75	12 Dokumen	21 Dokumen	43,75
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75	12 Dokumen	21 Dokumen	43,75
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	33,33
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Menjumlahkan penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	80 orang	80 orang	100,00
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	33,33
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71 persen	85,71 persen	61,9 persen	85,71 persen	138,47	85,71 persen	85,71 persen	100
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100	1 Kelompok UKBM	1 Kelompok UKBM	100
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 Dokumen	N/A	12 dokumen	9 dokumen	100	12 dokumen	21 Dokumen	43,75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup (AHH), yang merupakan komponen dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia)/ Human *Development Index (HDI).* Berikut capaian Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kota Blitar:

Grafik 2.1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2023 Kota Blitar

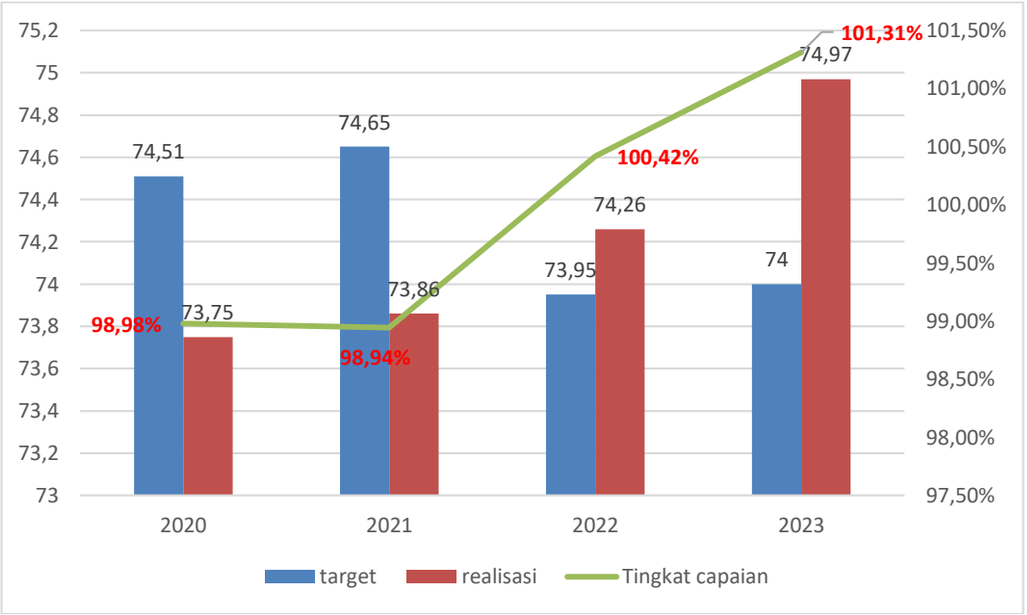

Dari grafik yang disajikan diatas, Angka Usia Harapan Hidup di Kota Blitar, dari tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 sebesar 73,75 tahun dari target 74,51 tahun (tingkat capaian 98,98%), tahun 2021 sebesar 73,86 tahun dari target 74,65 tahun (tingkat capaian 98,94%), tahun 2022 sebesar 74,26 tahun dari target 73,95 tahun (tingkat capaian 100,42%) dan tahun tahun 2023 sebesar 74,97 tahun dari target 74 tahun (tingkat capaian 101,31%).

Sedangkan target akhir (tahun 2026), adalah 74,3 tahun, jadi sampai dengan tahun 2023, tingkat capaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Blitar 100,90%, dengan kategori *Sangat Berhasil* atau telah melampaui target kinerja.

Sampai dengan tahun 2023 Angka Usia Harapan Hidup Kota Blitar menduduki peringkat ke-5 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Sasaran

a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

Indikator:

Dari 6 indikator sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, ada 3 (tiga) indikator merupakan indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diantaranya Angka Kematian

Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKB) per-1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi Balita sunting.

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 Kelahiran Hidup;
Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup, seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 Kelahiran Hidup Kota Blitar Tahun 2020-2023

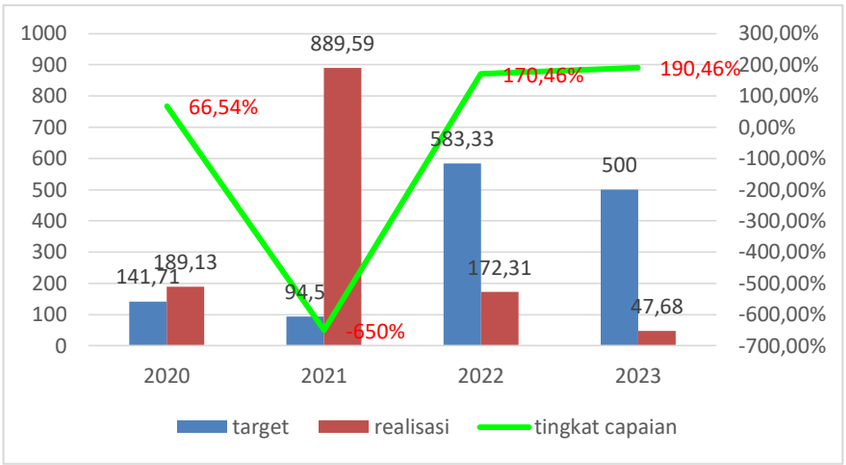

Angka Kematian Ibu merupakan jumlah kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun dikalikan 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per-100.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 1 kasus dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 2.097 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2023 sebesar 47,68 per-100.000 kelahiran hidup telah memenuhi target daerah sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 190,46%.

Kematian ibu sebanyak 1 kasus disebabkan oleh eklampsia. Kematian oleh karena eklampsia dikarenakan beberapa faktor antara lain ibu hamil dalam kondisi 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak), ibu disertai penyakit penyerta, dan adanya faktor medis dan non medis terkait (diagnosis, tatalaksana serta koordinasi antar tenaga kesehatan). Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian ibu Kota Blitar antara lain:

- Koordinasi terkait pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC.
- Pendampingan oleh kader pendamping ibu hamil risti (risiko tinggi), ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

- Pendampingan oleh Tim Ahli (Sp.OG) ke Puskesmas dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal.
- Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan.

2) Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup;

Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 kelahiran hidup merupakan jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun dikalikan 1.000 kelahiran hidup. Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 kelahiran hidup, seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.3 Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup Kota Blitar Tahun 2020-2023

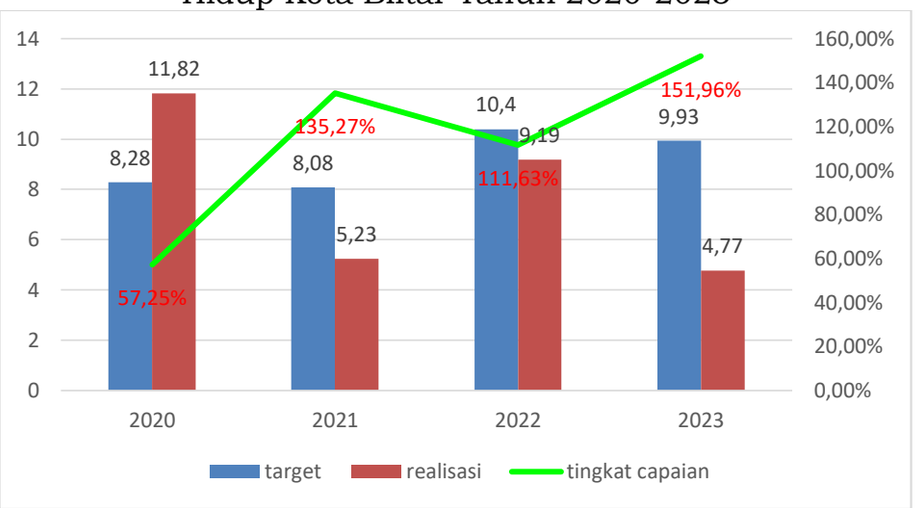

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyak kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 10 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 2.097. Maka AKB Kota Blitar tahun 2023 sebesar 4,77 per-1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 9,93 per-1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 151,96%.

Kasus kematian bayi di Kota Blitar disebabkan karena gagal nafas sebanyak 1 kasus, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebnayak 3 kasus, pneumonia 1 kasus, asfiksia sebanyak 1 kasus, sepsis 1 kasus, dan 10 kasus karena kelainan kongenital.

Status gizi dan penyakit penyerta ibu hamil dapat menjadi faktor risiko kematian pada bayi. Selain itu pemanfaatan alat kesehatan pertolongan kegawatdaruratan pada Bati Baru Lahir (BBL) dan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan BBL yang belum optimal juga mempengaruhi peningkatan kasus kematian bayi. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian bayi Kota Blitar antara lain:

- PSR (Pediatrician Social Responsibility) atau pendampingan tim ahli ke Puskesmas dalam pelayanan Kesehatan ibu dan anak (KIA), kegawatdaruratan dan sistem rujukan perinatal.

- Distribusi dan sosialisasi alat untuk skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) Kritis di seluruh Puskesmas.
- Monev Pelaksanaan Inovasi KATA SINONA (Kota Blitar Sigap Layani Neonatal).
- Skrining hipertiroid kongenital (SHK) pada seluruh bayi baru lahir, monev pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas.
- Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak per 3 bulanan bersama tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) tingkat Kota.

3) Prevalensi Balita Stunting

Balita Stunting adalan kondisi gagal pertumbuhan pada anak Balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek/perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Prevalensi Balita stunting merupakan hasil dari jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh Balita, capaian prevalensi Balita stunting Kota Blitar, seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.4 Prevalensi Stunting Kota Blitar Tahun 2020-2023

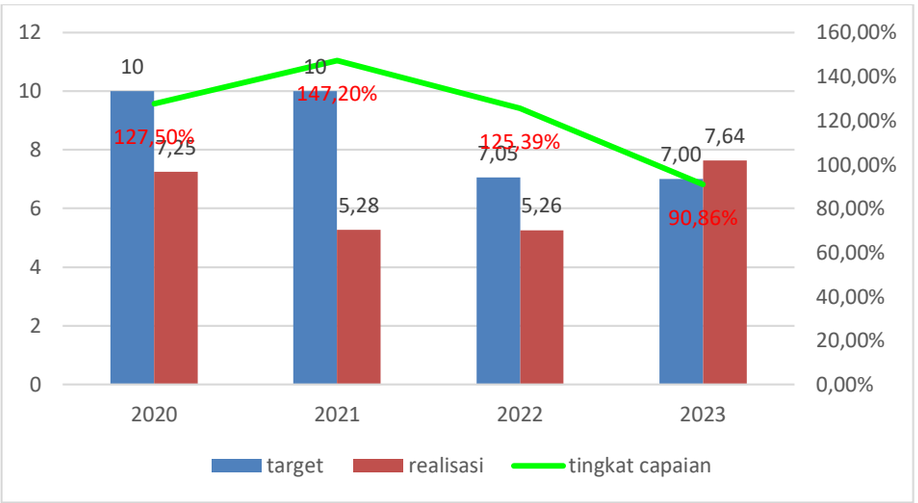

Prevalensi balita stunting dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%. Dalam capaian prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementrian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Indikator tersebut tercapai 90,86% yang berasal dari perhitungan target 7% dengan realisasi 7,64%.

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, eknonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari

tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

Tingkat pendidikan, ekonomi, keadaan sosial, sanitasi, dan keterjangkauan pangan mempengaruhi status gizi keluarga yang pada kahirnya akan mempengaruhi kejadian kasus stunting pada balita. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan prevalensi balita stunting Kota Blitar dibutuhkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas OPD melalui rapat koordinasi terkait pencegahan dan penanganan stunting, serta pertemuan evaluasi Intervensi Spesifik Stunting dan pendampingan balita stunting.

4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perhitungan jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung dalam tahun yang sama.

Jumlah kunjungan baru di fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam dan luar gedung sebanyak 49.373 orang terhadap 159.781 orang penduduk Kota Blitar. Jadi cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebesar 30,9% dari target 15,2%.

Grafik 2.5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Blitar Tahun 2022-2023

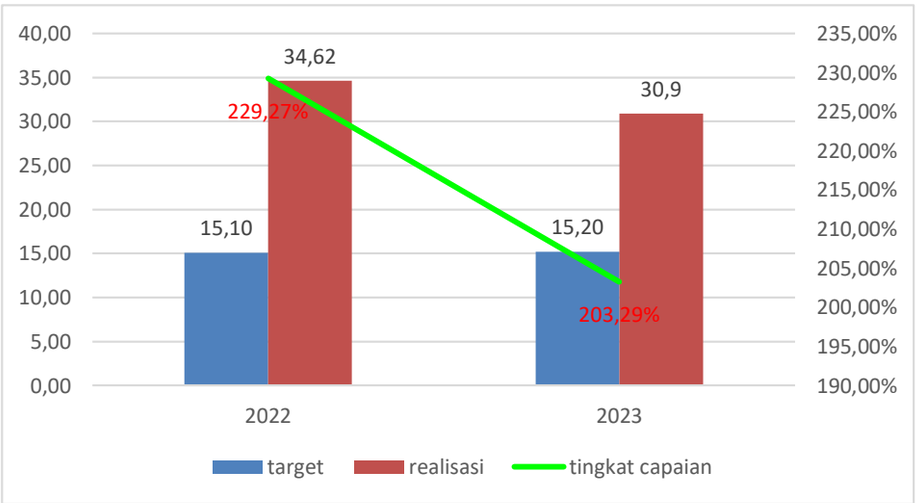

Secara target, capaian cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2023 sudah mencapai 203,29% namun indikator ini mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 229,27%. Hal tersebut dikarenakan cakupan pelayanan yang dihitung belum termasuk kunjungan dari jejaring (klinik dan praktik dokter mandiri). Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan jejaring terkait pengiriman data jumlah kunjungan dan mengupayakan semua faskes sudah ber-RME (Rekam Medik Elektronik) tahun 2024.

5) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam pelayanan harus mengedepankan kualitas mutu pelayanan bagi masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan sesuai standar bagi masyarakat. Standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan dinilai melalui penilaian akreditasi Fasyankes.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan, yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pembinaan dan penilaian akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Blitar dilaksanakan pada 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 12 Klinik, dan 7 Laboratorium Kesehatan. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 77,27%% terdiri dari 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 7 Klinik, dan 1 Laboratorium Kesehatan yang sudah memiliki sertifikat akreditasi. Capaian tersebut sudah melampaui target indikator sebesar 65%.

Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakredasi akan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinkes kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mengikuti penilaian akreditasi..

6) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Klasifikasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, adalah:

Nilai indeks > 0,800 : Keluarga Sehat
Nilai Indeks 0,500-0,800 : Pra-Sehat
Nilai Indeks < 0,500 : Tidak Sehat

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2023 adalah 0,41 (skala)/*tidak sehat* dari target 0,60 (skala) dengan tingkat capaian 68,33%, masuk pada kategori *cukup berhasil.* Pada tahun 2022 merupakan proses intervensi keluarga sehat, berikut gambar 12 (dua belas) Indikator PIS-PK:

Gambar 2.1 Paket Informasi Kesehatan Keluarga 12 (Dua Belas) Indikator PIS-PK

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan data per-31 Desember 2023 sebesar 0,41 masih kurang dari target daerah 0,60, yaitu dengan capaian 68,33% termasuk dalam kategori "cukup berhasil". Kota Blitar termasuk dalam kategori "keluarga tidak sehat" dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar.

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2023 naik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,13. Permasalahan pada capaian IKS adalah Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebesar 39,72%; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 64,65%; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 54,83%; Anggota keluarga tidak ada yang merokok 61,42%; dan Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan 65,15%.

Dalam pelaporan survei IKS Kota Blitar mengalami beberapa kendala antara lain data intervensi tahun 2023 belum optimal terlapor pada aplikasi PIS-PK, sehingga diperlukan back up pendataan dengan tetap memberikan intervensi kepada masyarakat dengan tingkat capaian indikator IKS yang masih rendah.

b. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 adalah 85,08 termasuk dalam kategori A dari target A (87) maka capaiannya sebesar 97,79%.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah:

1. Melakukan pemenuhan bukti tindak lanjut atas monitoring pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan dengan serta mengungkapkan hasil evaluasi secara spesifik.

2. Melakukan pemenuhan bukti tindak lanjut atas pengukuran kinerja secara periodik yang melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*).
3. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
4. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
5. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
6. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
7. Memanfaatkan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian Kinerja pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan hingga tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik 2.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Blitar Tahun 2020-2023

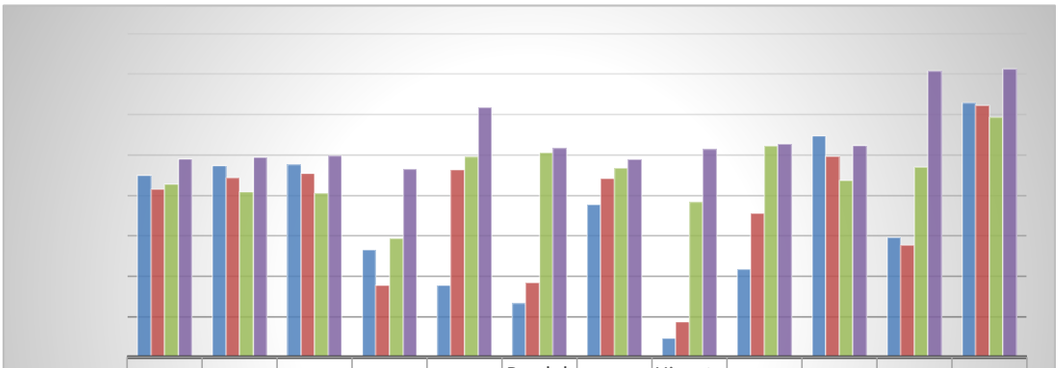

	Bumil	Bulin	Bayi	Balita	Dasar	Produktif	USILA	Hipertensi	DM	ODGJ	TBC	HIV
2020	89,94	94,73	95,17	53,17	35,63	26,78	75,53	9,31	43,45	109,59	59,17	125,63
2021	82,96	88,63	90,95	35,6	92,85	36,86	88,37	17,58	71,15	99,25	55,27	124,38
2022	85,73	81,92	81,16	58,81	99,16	101,22	93,48	76,69	104,41	87,5	93,87	118,63
2023	98,17	98,78	99,7	93	123,57	103,5	97,7	102,8	105,5	104,7	141,4	142,5

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Blitar

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	INDIKATOR TUJUAN												
	Angka Harapan Hidup (AHH)		73,95 tahun	74 tahun	74,27 Tahun	74,29 Tahun	74,30 Tahun	74,26 Tahun	74,97 Tahun	74,97 Tahun	74,97 Tahun	74,97 Tahun	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi AHH tahun 2023 yakni 74,97 tahun.
	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar		A (87)	A (87)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)	A (87)	A (85,08)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)	Tidak Tercapai
II	INDIKATOR SASARAN												
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	IKU	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	500 per-100.000 kelahiran hidup	98,14 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	49,07 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	47,68 per-100.000 kelahiran hidup	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													realisasi AKI tahun 2023 yakni 47,68 per 100.000 kelahiran hidup.
2	Angka kematian Bayi (AKB)	IKU	10,4 per-1.000 kelahiran hidup	9,93 per-1.000 kelahiran hidup	9,09 per-1.000 kelahiran hidup	8,98 per-1.000 kelahiran hidup	8,51 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	4,77 per-1.000 kelahiran hidup	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi AKB tahun 2023 yakni 4,77 per 1000 kelahiran hidup.
3	Prevalensi balita stunting	IKU	7,05%	7%	6,95%	6,90%	6,80%	5,26%	7,64%	6,95%	6,90%	6,80%	Tidak Tercapai
4	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	IKU	15,10%	15,20%	28%	29%	30%	34,62%	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Cakupan pelayanan Kesehatan tahun 2023 yakni 30,90%.
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	IKU	45%	65%	75%	85%	100%	26,19%	77,27%	77,27%	85%	100%	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, didasarkan pada realisasi Presentase fasyankes yang terakreditasi tahun 2023 yakni 77,27%.
6	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	IKU	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,35	0,41	0,7	0,8	0,85	Tidak Tercapai
7	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar		A (87)	A (87)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)	A (86,61)	A (85,08)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)	Tidak Tercapai
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		N/A	N/A	84	85	86	N/A	N/A	84	85	86	N/A
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
1	Persentase ibu hamil mendapatkan	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	85,73%	98,17%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pelayanan kesehatan ibu hamil												
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	81,92%	98,78%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	81,16%	99,70%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	58,81%	93%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	99,16%	123,57%	100%	100%	100%	Melampaui
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	101,22%	103,50%	100%	100%	100%	Melampaui
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	93,48%	97,70%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	76,69%	102,80%	100%	100%	100%	Melampaui
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	104,41%	105,50%	100%	100%	100%	Melampaui
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	104,70%	100%	100%	100%	Melampaui
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	93,87%	141,40%	100%	100%	100%	Melampaui
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	118,63%	142,50%	100%	100%	100%	Melampaui

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	deteksi dini HIV sesuai standar												
III	INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,85	82,9	82,95	83	83,10	82,65	83,3	83,3	83,3	83,3	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi IKM tahun 2023 yakni 83,3.
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	85,73%	98,17%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	81,92%	98,78%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
3	Presentase bayi baru lahir	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	81,16%	99,70%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)												
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	58,81%	93%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
5	Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	99,16%	123,57%	100%	100%	100%	Melampaui
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	101,22%	103,57%	100%	100%	100%	Melampaui
8	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	93,48%	97,70%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	skrining kesehatan sesuai standar (SPM)												
9	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	79,69%	102,80%	100%	100%	100%	Melampaui
10	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	104,41%	105,50%	100%	100%	100%	Melampaui
11	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	104,70%	100%	100%	100%	Melampaui
12	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	93,87%	141,40%	100%	100%	100%	Melampaui

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	sesuai standar (SPM)												
13	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	118,63%	142,50%	100%	100%	100%	Melampaui
14	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
15	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		95,20%	95,20%	95,20%	95,20%	95,20%	38,09%	100%	100%	100%	100%	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi UCI tahun 2023 yakni 100%.
16	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani												
17	Persentase lingkungan yang memenuhi standar Kesehatan		60%	63%	65%	70%	73%	59,23%	69,82%	69,82%	70%	73%	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target tahun 2024, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, didasarkan pada realisasi Presentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan tahun 2023 yakni 69,82%.
18	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		25%	26%	27%	28%	29%	22%	46,15%	46,15%	46,15%	46,15%	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi akhir renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi presentase penyelenggaraan

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													K3 tahun 2023 yakni 46,15%.
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
1	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman												
1	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan		83%	85%	87%	88%	90%	75,38%	92,67%	92,67%	92,67%	92,67%	Realisasi pada tahun 2023 telah melampaui target kondisi renstra pada tahun 2026, sehingga proyeksi realisasi pada tahun 2024, 2025, 2026 didasarkan pada realisasi presentase

No	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan tahun 2023 yakni 92,67%.
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan												
1	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		57,14%	61,90%	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%	Melampaui

Dari 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar, ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan, diantaranya:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

   Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar.

   Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang tidak mencapai target yang diharapkan ada 3, yaitu:

   a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
      1) Prevalensi Balita stunting (tingkat capaian 90,86%)
         Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan adanya Tingkat pendidikan, ekonomi, keadaan sosial, sanitasi, dan keterjangkauan pangan yang mempengaruhi status gizi keluarga. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan rakor linsek lintas OPD terkait pencegahan dan penanganan stunting, pertemuan evaluasi Intervensi Spesifik Stunting dan pendampingan balita stunting
      2) Indeks Keluarga Sehat (IKS) (tingkat capaian 68,33%)
         Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan masih adanya beberapa indikator di PIS-PK yang masih rendah dan belum optimalnya aplikasi PIS-PK. Adapun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah melakukan *back-up data* dengan tetap memberikan intervensi kepada masyarakat dengan tingkat capaian indicator IKS yang masih rendah.

2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

   Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota merupakan salah satu indikator sasaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Tingkat capaian indikator ini 99,79%. Indikator ini tidak tercapai karena belum optimalnya tata kelola dan kinerja Dinas Perangkat Daerah utamanya dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang tidak mencapai target yang diharapkan, yaitu:
   a. Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (98,17%)
      Indikator ini tidak tercapai dikarenakan masih ada ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC (Antenatal Care) sesuai jadwal. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melakukan penjaringan/pendataan ibu hamil melalui kelas ibu hamil, pendamoingan ibu hamil risti (risiko tinggi) dan sweeping ibu hamil oleh kader kesehatan.
   b. Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (98,78%)
      Indikator ini tidak tercapai dikarenakan masih adanya kasus maternal abortus (keguguran). Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan pendampingan oleh tim ahli (Sp.OG) dalam Pelayanan KIA (kesehatan ibu dan anak, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan, Pendampingan buml risti, bulin dan bufas oleh kader pendamping serta melaksanakan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring skirning layak hamil dan ANC.
   c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (99,70%)

Indikator ini tidak tercapai dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan alat kesehatan pertolongan kegawatdaruratan pada Bayi Baru lahir (BBL) dan masih adanya kasus abortus (keguguran) dan lahir mati. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah Melaksanakan sosialisasi alat skrining penyakit jantung bawaan (PJB), monev pelayanan MTBM dan MTBS di Puskesmas serta mengadakan PSR(Pediatrician Social Responbility)/Pendampingan Tim Ahli (Sp.A) dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Perinatal.

d. Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita sesuai standar (93%)
   Indikator ini tidak tercapai dikarenakan belum rutinnya pelaporan dari lembaga PAUD dan TK/RA. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan pendampingan dan pembinaan rutin pelaporan pada lembaga PAUD dan TK/RA.
e. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (97,70%)
   Indikator ini tidak tercapai dikarenakan data pelayanan kesehatan lansia masih belum termasuk layanan di klinik dan praktik dokter mandiri. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kerjasama dengan klinik dan praktik dokter mandiri untuk mengakses data layanan kesehatan lansia.

Pada Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan juga terdapat indikator yang mengalami penurunan kinerja, yaitu:

a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
   1) Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat (30,90%)
   Indikator ini mengalami penurunan kinerja karena cakupan pelayanan yang didata belum termasuk kunjungan dari jejaring (klinik dan praktik dokter mandiri). Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksankan koordinasi dengan jejaring terkait pengiriman data jumlah kunjungan dan mengupayakan semua faskes sudah ber-RME (Rekam Medik Elektronik) tahun 2024.

Berdasarkan pada tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan diatas juga terlihat bahwa terdapat beberapa indikator yang telah melampaui target kondisi akhir renstra tahun 2026 berdasarkan capaian realisasi tahun 2023, yakni :

1. IKU (Indikator Kinerja Utama)
   a. Angka Harapan Hidup (AHH)
      Target Angka Harapan Hidup (AHH) berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 74,3 tahun, sedangkan realisasi capaian AHH pada tahun 2023 telah mencapai 74,97 tahun.
   b. Angka Kematian Ibu (AKI)
      Target Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 49,07 per-100.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi capaian AKI pada tahun 2023 telah mencapai 47,68 per 100.000 kelahiran hidup.
   c. Angka Kematian Bayi (AKB)
      Target Angka Kematian Bayi (AKI) berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 8,51 per-1.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi capaian AKB pada tahun 2023 telah mencapai 4,77 per 1.000 kelahiran hidup
   d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Target Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 30%, sedangkan realisasi capaian cakupan pelayanan Kesehatan masyarakat tahun 2023 telah mencapai 30,90%.

2. Indikator Program
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

         Target Nilai IKM berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 83,10, sedangkan realisasi capaian Nilai IKM tahun 2023 telah mencapai 83,3.
   b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
      1. Presentase Kelurahan UCI (*Universal Child Imunization*)

         Target Presentase Kelurahan UCI berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 95,2% sedangkan realisasi capaian presentase keluarahan UCI tahun 2023 telah mencapai 100%.

      2. Presentase Penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada sektor formal dan informal yang dibina

         Target presentase penyelenggaraan Kesehatan dan keselamatan kerja pada sector formal dan informal yang dibina berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 29%, sedangkan realisasi capaian presentase penyelenggaraan Kesehatan dan keselamatan kerja pada sector formal dan informal yang dibina tahun 2023 telah mencapai 46,15%.
   c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
      1. Presentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat Kesehatan

         Target presentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat Kesehatan berdasarkan kondisi akhir renstra tahun 2026 adalah 90%, sedangkan realisasi capaian presentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat Kesehatan tahun 2023 telah mencapai 92,67%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yaitu:

1. Belum optimalnya layanan SPM Bidang Kesehatan untuk layanan skrinning kesehatan sesuai standar bagi warga usia 60 tahun ke atas, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar, pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, pelayanan kesehatan balita sesuai standar
2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Blitar utamanya layanan keluarga sehat yaitu pada Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); Anggota keluarga tidak ada yang merokok; dan Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan; serta peningkatan prevalensi stunting di Kota Blitar
3. Belum optimalnya tata kelola dan kinerja Dinas Perangkat Daerah utamanya dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Selain itu untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah tahun 2025 pada penguatan sistem

kesehatan di Kota Blitar, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar, juga dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   - Perlunya peningkatan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar
2. Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standart
   - Perlunya peningkatan upaya pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standart
   - Perlunya peningkatan upaya untuk mewujudkan tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   - Perlunya peningkatan upaya untuk mewujudkan kelurahan siaga aktif purnama mandiri
4. Integrasi Layanan Primer
   - Integrasi Layanan Primer atau ILP berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan dan padukuhan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat
5. Stunting
   - Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan Balita dan pengoptimalan fasilitasi peningkatan kapasitas layanan gizi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah menentukan 6 (enam)) Prioritas Pembangunan Daerah dengan tema ”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan Yang Berbasis Digital Menuju kemandirian Ekonomi Daerah”, yaitu:

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan

Berdasarkan enam (6) prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas Kesehatan mendukung prioritas pembangunan ke 3, yakni Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Adapun program Dinas kesehatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program, dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Blitar

Nama PD: Dinas Kesehatan Kota Blitar

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Dinas Kesehatan				84.612.089.415	Dinas Kesehatan				91.709.114.346	
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	50.740.418.117	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	52.634.365.541	
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%		
								Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%		
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%		
								Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%		
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
								Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	100%				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatan sesuai standar (SPM)					kesehatan sesuai standar (SPM)			
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%		
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2%				Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100%		Perubahan target
			Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%		

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%				Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%		
								Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	28%				Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%		Perubahan target
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	6.246.441.432	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	6.004.664.629	
								Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%				Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%		
1	02	02	2	01	00 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit	3.374.199.138	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit	550.000.000	rasionalisasi
1	02	02	2	01	00 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	1 Unit	1.194.717.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	5 Unit	2.913.333.000	Penyesuaian kebutuhan belanja dan perubahan target
1	02	02	2	01	00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	30 Unit	3.619.800	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 Unit	246.364.373	Penyesuaian kebutuhan belanja dan perubahan target

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	300 Unit	139.570.864	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	300 Unit	596.268.500	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	1.519.397.299	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	1.685.821.256	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	2841 Keluarga	1.060.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	2841 Keluarga	5.677.500	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	13.877.331	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	7.200.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	44.435.990.499	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	46.348.153.042	
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan	100%				Persentase standar baku pelayanan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana					kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%		
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%				Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%		
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi				Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi		
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%				Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			terduga TBC yang terlaksana					terduga TBC yang terlaksana			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%		
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%				Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%				Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%				Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%		
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%				Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%		
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%				Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,6%				Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	93,71%		Perubahan target
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%				Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%		
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan				Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan		
			Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%				Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%		
			Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK				Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK		
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan	53%				Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan	67%		Perubahan target

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								pengukuran kebugaran jasmani					pengukuran kebugaran jasmani			
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	17%				Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	17%		
								Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%				Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%		
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%				Persentase penyehat tradisional yang berizin	7,51%		Perubahan target
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%				Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2219 Orang	146.703.869	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2219 Orang	99.151.800	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2118 Orang	34.992.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2118 Orang	177.050.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2017 Orang	9.950.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2017 Orang	168.570.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8226 Orang	31.941.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8226 Orang	48.526.000	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kel/Desa					Kel/Desa				
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17573 Orang	28.153.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17573 Orang	49.527.965	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92626 Orang	27.561.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92626 Orang	213.089.860	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24540 Orang	6.091.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24540 Orang	59.133.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47686 Orang	10.017.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47686 Orang	14.816.600	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4335 Orang	300.833.327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4335 Orang	340.547.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	383 Orang	33.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	383 Orang	70.747.900	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kel/Desa					Kel/Desa				
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2835 Orang	423.336.651	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2835 Orang	649.705.084	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3434 Orang	90.231.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3434 Orang	213.542.850	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	43.439.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	10.019.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 Dokumen	2.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 Dokumen	3.710.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 Dokumen	132.242.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 Dokumen	152.887.400	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	3 Dokumen	28.890.363	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	3 Dokumen	45.585.900	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							an, Semua Kel/Desa					an, Semua Kel/Desa				
1	0 2	0 2	2	0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	2 Dokumen	138.309.971	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	2 Dokumen	575.713.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 Dokumen	276.419.462	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 Dokumen	379.593.740	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	3 Dokumen	2.864.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	3 Dokumen	9.425.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 Dokumen	49.392.600	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 Dokumen	89.066.100	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10 Orang	21.187.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10 Orang	28.308.800	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	681.344.068	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	746.135.846	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Menular dan Tidak Menular	an, Semua Kel/Desa				Menular dan Tidak Menular	an, Semua Kel/Desa				
1	02	02	2	02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18 Dokumen	29.886.124.513	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18 Dokumen	30.121.662.479	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	540 Paket	64.300.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	540 Paket	52.076.200	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	47.998.949	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	309.446.300	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	9.092.320.218	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	8.400.000.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	8 Dokumen	247.011.438	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	8 Dokumen	478.941.180	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	157.586.516	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	142.360.000	rasionalisasi

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kesehatan di Kabupaten/Kota	an, Semua Kel/Desa				Kesehatan di Kabupaten/Kota	an, Semua Kel/Desa				
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	29.003.800	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	65.116.800	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Dokumen	12.733.500	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Dokumen	23.972.700	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	2.364.026.500	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	2.454.627.500	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayann kesehatan Malaria	12 Orang	15.382.854	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayann kesehatan Malaria	12 Orang	21.896.238	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0046						Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	133.200.800	Pemetaan BOK, penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	26.536.816	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	249.020.500	

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						secara Terintegrasi					secara Terintegrasi					
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3 Dokumen	26.536.816	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3 Dokumen	249.020.500	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	31.449.370	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	32.527.370	
1	02	02	2	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	29.654.370	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	17.693.370	rasionalisasi
1	02	02	2	04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 Dokumen	1.795.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 Dokumen	14.834.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	713.604.100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	1.009.898.740	
1	02	03	2	01		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	22.573.100	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	23.097.900	
1	02	03	2	01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik	Kota Blitar, Semua	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan	500 Dokumen	22.573.100	Pengendalian Perizinan Praktik	Kota Blitar, Semua	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan	500 Dokumen	23.097.900	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tenaga Kesehatan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	praktik tenaga kesehatan			Tenaga Kesehatan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	praktik tenaga kesehatan			
1	02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	187.079.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	372.611.300	
1	02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	19.399.500	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	146.220.300	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 Dokumen	167.679.500	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 Dokumen	226.391.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	03	2	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	19%	503.952.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	19%	614.189.540	
1	02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	68 Orang	503.952.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	68 Orang	614.189.540	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT		Persentase pengelolaan fasilitas layanan	100%	406.407.045	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT		Persentase pengelolaan fasilitas layanan	100%	523.170.600	

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN		kefarmasian yang sesuai standar			KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN		kefarmasian yang sesuai standar			
								Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	88%				Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	92,67%		Perubahan target
1	02	04	2	01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	25.770.237	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	32.388.100	
1	02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	5 Dokumen	25.770.237	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	5 Dokumen	32.388.100	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	04	2	02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100%	6.500.536	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100%	6.340.000	
1	02	04	2	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan	1 Dokumen	6.500.536	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan	1 Dokumen	6.340.000	rasionalisasi

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kel/Desa	PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga			Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kel/Desa	PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga			
1	02	04	2	03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	94%	158.237.900	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	94%	179.867.875	
1	02	04	2	03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	2 Dokumen	158.237.900	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	2 Dokumen	179.867.875	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	04	2	04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran		Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	80%	636.659	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran		Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	80%	43.768.000	

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Depot Air Minum (DAM)					dan Depot Air Minum (DAM)					
1	02	04	2	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	1 Dokumen	636.659	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	1 Dokumen	43.768.000	rasionalisasi
1	02	04	2	05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	82%	598.613	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	82%	20.617.750	
1	02	04	2	05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	598.613	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	20.617.750	rasionalisasi
1	02	04	2	06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	94%	214.663.100	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	94%	240.188.875	
1	02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk	Kota Blitar, Semua	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman	50 Unit	214.663.100	Pemeriksaan Post Market pada Produk	Kota Blitar, Semua	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman	50 Unit	240.188.875	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan			Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan			
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	76,19%	2.738.902.871	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	2.659.993.600	Perubahan target
1	02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga sehat	55%	2.599.138.096	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga sehat	60,2%	2.471.034.300	Perubahan target
								Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	95%				Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	100%		Perubahan target
								Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	56%				Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	100%		Perubahan target
								Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM				Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM		
1	02	05	2	01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 Dokumen	2.599.138.096	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 Dokumen	2.471.034.300	rasionalisasi
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	139.764.775	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	188.959.300	

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	139.764.775	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	188.959.300	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Indeks	30.012.757.282	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,3 Indeks	34.881.685.865	Perubahan target
1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	39.345.494	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	76.819.290	
1	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 Dokumen	19.516.094	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 Dokumen	20.306.600	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Laporan	19.829.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Laporan	56.512.690	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	26.513.955.410	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	29.931.358.500	
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	246 Orang/bulan	26.502.123.410	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	246 Orang/bulan	29.926.958.500	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kel/Desa					Kel/Desa				
1	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan	11.832.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan	4.400.000	rasionalisasi
1	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	292.652.529	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	284.574.200	
1	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	84.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	57.076.000	rasionalisasi
1	02	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	10.660.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	10.660.000	sesuai
1	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 Orang	197.192.529	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 Orang	216.838.200	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	449.158.158	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	645.244.100	
1	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	11.068.554	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10.194.400	rasionalisasi

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Bangunan Kantor	Semua Kel/Desa				Bangunan Kantor	Semua Kel/Desa				
1	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	33.762.566	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	65.762.600	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	18.539.648	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	27.645.700	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 Paket	38.358.008	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 Paket	58.850.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	61.509.475	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	62.022.500	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	9.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	9.180.000	sesuai
1	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	216.739.907	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	224.680.000	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
1	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	60.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	186.908.900	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	80%	77.661.290	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	797.815.710	Perubahan target
1	02	01	2	07	0005						Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	112 Unit	274.294.400	Mendukung Tupoksi, Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	77.661.290	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	85 Unit	523.521.310	Penyesuaian kebutuhan belanja dan perubahan target
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	2.205.309.501	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	2.590.481.665	
1	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	300.571.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	466.253.665	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 Laporan	1.904.738.401	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 Laporan	2.124.228.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	434.674.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	555.392.400	
1	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	240.598.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	276.097.900	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	122 Unit	44.076.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	208 Unit	109.294.500	Penyesuaian kebutuhan belanja dan perubahan target
1	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	170.000.000	Penyesuaian kebutuhan belanja

Nama Unit: UPT Puskesmas Kepanjenkidul

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Puskesmas Kepanjenkidul				1.369.810.369	Puskesmas Kepanjenkidul				2.141.871.400	
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	1.319.810.369	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	2.102.827.800	
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%		
								Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%		
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%		
								Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%		
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sesuai standar (SPM)					kesehatan sesuai standar (SPM)			
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi	100%				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi	100%		

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								dini HIV sesuai standar (SPM)					dini HIV sesuai standar (SPM)			
								Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%		
								Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2%				Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100%		Perubahan target
								Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%		
								Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%				Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%		
								Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	28%				Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%		Perubahan target
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	381.500.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	468.661.000	
								Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%				Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%		
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Kota Blitar,	Jumlah alat kesehatan/alat	60 Unit	40.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Kota Blitar,	Jumlah alat kesehatan/alat	33 Unit	114.913.000	Penyesuaian kebutuhan

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			belanja dan perubahan target
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	13 Unit	27.200.000	Rasionalisasi dan perubahan target
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	300.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	323.044.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	57 Keluarga	1.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	57 Keluarga	3.504.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	938.310.369	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	1.634.166.800	
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan	100%				Persentase standar baku pelayanan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatan balita yang terlaksana					kesehatan balita yang terlaksana			
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%				Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%		
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi				Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi		
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%				Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%		
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%				Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%				Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%				Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%		
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%				Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%		
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%				Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,6%				Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	93,71%		Perubahan target
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%				Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%		

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan				Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan		
								Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%				Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%		
								Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK				Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK		
								Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	53%				Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	67%		Perubahan target
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	17%				Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	17%		
								Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%				Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%		
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%				Persentase penyehat tradisional yang berizin	7,51%		Perubahan target
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%				Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	638 Orang	12.325.123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	638 Orang	21.180.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 Orang	24.157.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 Orang	4.550.000	rasionalisasi

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577 Orang	1.050.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577 Orang	600.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2979 Orang	1.050.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2979 Orang	5.535.400	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5031 Orang	6.960.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5031 Orang	13.108.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26523 Orang	2.636.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26523 Orang	12.550.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7028 Orang	700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7028 Orang	5.600.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13655 Orang	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13655 Orang	2.156.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1241 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1241 Orang	45.750.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	110 Orang	21.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan	110 Orang	32.674.800	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
													jiwa berat sesuai standar			
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1145 Orang	11.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1145 Orang	74.370.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	983 Orang	7.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	983 Orang	22.200.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 Dokumen	219.061.810	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 Dokumen	287.556.200	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	770.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	9.812.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	820.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	89.943.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	572.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	66.745.200	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	45.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	2.114.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kota Blitar, Kepanjenkidul,	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit	12 Dokumen	105.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kota Blitar, Kepanjenkidul,	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit	12 Dokumen	126.046.800	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Tidak Menular	Semua Kel/Desa	menular dan tidak menular			dan Tidak Menular	Semua Kel/Desa	menular dan tidak menular			
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	372.171.036	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	791.683.800	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0034						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 Dokumen	15.440.000	Pemetaan BOK, penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	35.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.555.000	rasionalisasi
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.537.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	996.600	rasionalisasi
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	76,19%	50.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	39.043.600	Perubahan target
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	50.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	39.043.600	
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	50.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	39.043.600	rasionalisasi

Nama Unit: UPT Puskesmas Sukorejo

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Puskesmas Sukorejo				1.528.181.182	Puskesmas Sukorejo				2.213.278.800	
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	1.437.268.582	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	2.176.310.200	
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%		
								Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%		
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%		
								Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang	100%				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mendapatkan perawatan					mendapatkan perawatan			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang dengan Gangguan	100%				Persentase Orang dengan Gangguan	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)					Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%		
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2%				Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100%		Perubahan target
			Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%		

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%				Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%		
								Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	28%				Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%		Perubahan target
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
1	0 2	0 2	2	0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	470.344.700	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	322.105.000	
								Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%				Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%		
1	0 2	0 2	2	0 1	001 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	50 Unit	39.547.700	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	80 Unit	34.105.000	Rasionalisasi dan perubahan target
1	0 2	0 2	2	0 1	002 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang	3 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang	4 Unit	18.000.000	Rasionalisasi dan penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelayanan Kesehatan		terpelihara sesuai standar			Pelayanan Kesehatan		terpelihara sesuai standar			
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	420.797.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	270.000.000	Rasionalisasi
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	966.923.882	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	1.854.205.200	
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%		
								Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%				Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%		
								Jumlah fasilitasi	3 Fasilitasi				Jumlah fasilitasi	3 Fasilitasi		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			intervensi gizi sensitif					intervensi gizi sensitif			
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%				Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku	100%				Persentase standar baku	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana					pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%		
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%				Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%				Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%				Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%		
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%				Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%		
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%				Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,6%				Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	93,71%		Perubahan target
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%				Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%		
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan				Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan		
			Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%				Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%		
			Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK				Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK		
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	53%				Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	67%		Perubahan target
			Persentase instansi pemerintah	17%				Persentase instansi pemerintah	17%		

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								yang melaksanakan K3 Perkantoran					yang melaksanakan K3 Perkantoran			
								Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%				Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%		
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%				Persentase penyehat tradisional yang berizin	7,51%		Perubahan target
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%				Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	753 Orang	15.318.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	753 Orang	28.978.900	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	718 Orang	61.950.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	718 Orang	10.288.900	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	688 Orang	5.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	688 Orang	7.500.000	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3553 Orang	50.360.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3553 Orang	25.070.700	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6001 Orang	6.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6001 Orang	64.925.900	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31646 Orang	2.119.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31623 Orang	64.706.700	Perubahan target dan penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8375 Orang	8.341.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8375 Orang	28.580.600	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16170 Orang	4.119.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16279 Orang	7.118.900	Perubahan target dan penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1480 Orang	23.295.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1480 Orang	40.485.650	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	131 Orang	14.444.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	131 Orang	74.519.300	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	925 Orang	45.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	925 Orang	20.225.000	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1172 Orang	2.671.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1172 Orang	19.700.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	188.817.828	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	138.003.500	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	5.211.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	14.838.400	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	8.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	38.047.000	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan	Kota Blitar, Sukore	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	10.961.500	Pengelolaan Pelayanan	Kota Blitar, Sukore	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	41.766.600	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Promosi Kesehatan	jo, Semua Kel/Desa	pelayanan promosi kesehatan			Promosi Kesehatan	jo, Semua Kel/Desa	pelayanan promosi kesehatan			
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	26.126.673	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	35.418.900	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	126.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	110.376.600	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	322.652.381	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	968.496.950	Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0034						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 Dokumen	18.057.800	Pemetaan BOK, Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0040						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43 Orang	61.000.000	Pemetaan BOK, Penyesuaian kebutuhan belanja
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	39.831.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	32.240.000	Rasionalisasi

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	02	2	02	0046						Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	3.858.900	Pemetaan BOK, Penyesuaian Kebutuhan belanja
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	76,19%	90.912.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	36.968.600	Perubahan target
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	90.912.600	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	36.968.600	
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	90.912.600	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM	12 Dokumen	36.968.600	Rasionalisasi

Nama Unit: UPT Puskesmas Sananwetan

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Puskesmas Sananwetan				1.572.095.549	Puskesmas Sananwetan				2.342.620.800	
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	1.535.721.749	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	2.332.120.800	
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%		
								Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%		
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%		
								Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang	100%				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mendapatkan perawatan					mendapatkan perawatan			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%		
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%		
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2%				Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100%		Perubahan target
			Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala	100%				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala	100%		

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kota Blitar yang tertangani					Kota Blitar yang tertangani			
								Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%				Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	70%		
								Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	28%				Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	46,15%		Perubahan target
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
1	0 2	0 2	2	0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	578.387.800	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	371.851.000	
								Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%				Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%		
1	0 2	0 2	2	0 1	00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	35 Unit	38.771.658	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	49 Unit	9.121.700	Rasionalisasi dan perubahan target
1	0 2	0 2	2	0 1	00 20						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	Kota Blitar, Sananwet	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang	24 Unit	24.000.000	Pemetaan BOK dan penyesuaian kebutuhan belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	an, Semua Kel/Desa	medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	539.616.142	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	338.729.300	Rasionalisasi
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	957.333.949	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	1.960.269.800	
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%		
								Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%		
								Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK	100%				Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mendapatkan intervensi gizi spesifik					mendapatkan intervensi gizi spesifik			
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi				Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 Fasilitasi		
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%				Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Diabetes Melitus yang terlaksana					Diabetes Melitus yang terlaksana			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%				Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%		
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%				Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%				Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%				Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91%		
			Cakupan kelurahan yang mengalami	100%				Cakupan kelurahan yang mengalami	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam					KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam			
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%		
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%				Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	69%		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,6%				Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	93,71%		Perubahan target
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%				Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	61,90%		
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan				Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 tatanan		
			Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%				Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%		
			Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK				Jumlah Pos UKK yang terbina	11 Pos UKK		
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran	53%				Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran	67%		Perubahan target

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								kebugaran jasmani					kebugaran jasmani			
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	17%				Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	17%		
								Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%				Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%		
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%				Persentase penyehat tradisional yang berizin	7,51%		Perubahan target
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%				Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	828 Orang	2.784.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	828 Orang	78.070.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	791 Orang	25.547.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	791 Orang	10.250.000	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan	Kota Blitar,	Jumlah bayi baru lahir	751 Orang	2.479.000	Pengelolaan Pelayanan	Kota Blitar,	Jumlah bayi baru lahir	751 Orang	22.100.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sananwetan, Semua Kel/Desa	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sananwetan, Semua Kel/Desa	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3061 Orang	120.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3061 Orang	116.921.200	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6541 Orang	80.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6541 Orang	76.464.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34480 Orang	120.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34480 Orang	150.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9137 Orang	240.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9137 Orang	55.865.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17752 Orang	120.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17752 Orang	69.778.800	Penyesuaian Kebutuhan Belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								sesuai standar					sesuai standar			
1	0 2	0 2	2	0 2	00 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1614 Orang	120.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1614 Orang	14.373.800	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	142 Orang	80.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	142 Orang	5.150.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	764 Orang	46.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	764 Orang	68.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1278 Orang	580.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1278 Orang	27.500.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	279.687.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	585.688.500	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Sananwetan,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	2.784.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Blitar, Sananwetan,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	39.020.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Semua Kel/Desa	pelayanan kesehatan kerja dan olahraga				Semua Kel/Desa	pelayanan kesehatan kerja dan olahraga			
1	0 2	0 2	2	0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	8.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	27.382.200	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	120.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	16.097.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	101.652.900	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	49.657.200	Rasionalisasi
1	0 2	0 2	2	0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	68.210.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	138.856.600	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	375.252.749	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	510.518.700	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 34						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12 Dokumen	11.000.000	Pemetaan BOK, Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	0 2	0 2	2	0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	80 Orang	1.250.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	80 Orang	15.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Belanja

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dengan Tuberkulosis	Semua Kel/Desa	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			dengan Tuberkulosis	Semua Kel/Desa	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	40.921.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	21.400.000	Rasionalisasi
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	986.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.026.800	Penyesuaian Kebutuhan Belanja
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	76,19%	36.373.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	10.500.000	Perubahan Target
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	36.373.800	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	10.500.000	
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	36.373.800	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	10.500.000	Rasionalisasi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil telaah atas usulan hibah, Musrenbang, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Pada penyusunan Renja 2025, tidak ada usulan dari Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kota Blitar

No.	Usulan	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Kurangnya informasi/kapasitas masyarakat terkait hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Forum Blitar Kota Sehat (FBKS)	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	Diakomodir
2	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan/operasional kepalangmerahan di Kota Blitar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PMI KOTA BLITAR	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Fasilitas Kesehatan	Diakomodir

Dari 2 (dua) usulan masyarakat melalui hibah di Kota Blitar, semua diakomodir pada Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energy
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
      - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
      - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
      - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
      - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
      - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
      - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
      - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
      - ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
      - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
      - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial
   Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu
   (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
      a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
      b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
      c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
      d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
   (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
      a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
      b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
      c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
      d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
      e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
      f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja
   (3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
      a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
      b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
      c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
      d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
      e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Transformasi Ekonomi
   Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu
   (1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
      a. Penguatan industri dasar
      b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
      c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
      d. Pengembangan industri medium-high technology
      e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
      f. Produktivitas UMKM dan koperasi
      g. Pengembangan ekonomi biru
      h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
      i. Peningkatan produktivitas BUMN
      j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
      k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
      l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
      m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
   (2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
      a. Percepatan transisi energi
      b. Ekonomi sirkular industri
      c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
      d. Pengelolaan hutan lestari

(3) Transformasi digital, melalui:
   a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
   b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
   c. Pemerintah digital
   d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital
(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
   a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
   b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
   c. Perkuatan system logistic nasional
   d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
   e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
   a. Wilayah metropolitan
   b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
   c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
   a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
   b. Penguatan tata kelola regulasi
(2) Pelayanan public, melalui:
   a. Digitalisasi pelayanan publik
   b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
   c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
   d. Perluasan akses pelayanan publik
(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
   a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
   b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
   c. Harmonisasi dan kolaborasi keweangan dan keuangan pusat dan daerah
(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
   a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
   b. Penguatan tata kelola ASN
   c. Penggajian tunggal ASN
   d. Reformasi system pension
   e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material
(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
   a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
   b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
   c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan public pemerintah
   d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
   e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
   f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah

g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
(1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
a. Pembangunan bidang hukum
b. Pembangunan bidang keamanan
c. Pembangunan bidang demokrasi
(2) Stabilitas ekonomi makro
a. Optimalisasi pendapatan negara
b. Peningkatan kualitas belanja negara
c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
(3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
(1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
(2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
a. Penguatan ketahanan keluarga
b. Peningkatan kesetaraan gender
c. Perwujudan masyarakat inklusif
(3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
(4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
a. Kemandirian pangan
b. Peningkatan ketahanan air nasional
c. Ketahanan energi
(5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Periode tahun 2020-2024 merupakan

tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan capaian-capaian pembangunan kesehatan dan Rancangan Awal RKP Tahun 2025, diperlukan penguatan sistem kesehatan mencakup pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Adapun potensi dan tantangannya antara lain

1. Perkembangan Pembangunan Kesehatan
2. Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak
3. *Triple Burden* Malnutrisi
4. Transisi Epidemiologi terhadap Beban Penyakit
5. Pembudayaan GERMAS
6. Potensi, Tantangan Sistem, dan Pelayanan Kesehatan
7. Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer
8. Perlunya Peningkatan Akses dan Penguatan Kualitas Layanan Rujukan
9. Ketahanan Sektor Farmasi dan Alat Kesehatan
10. Memperkuat Ketahanan Kesehatan dan Tanggap Darurat Krisis Kesehatan
11. Sistem Pembiayaan Kesehatan
12. Ketersediaan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan
13. Penguatan Teknologi Kesehatan, Tatakelola, dan Pengembangan Kebijakan Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pemerintah Kota Blitar, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 80,79, maka ditetapkan sasaran strategis Kota Blitar adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Tujuan Dinas Kesehatan Kota Blitar, adalah *meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,* dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Blitar, yang merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur, dengan target tahun 2025 adalah 74,97 tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar, merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan Kota Blitar. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
						Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan:									
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	74	74,97	74,97	74,975	74,980
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah nilai dari rangkaian sistematik dari berbagai kativitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kota Blitar	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai	A (87)	A (85,08)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
						Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Sasaran:									
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan kehamilan, bersalin, dan nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	per-100.000 kelahiran hidup	500	47,68	47,68	47,68	47,68
		Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di Kota Blitar dibagi jumlah kelahiran hidup dikali konstanta (1.000) bayi lahir hidup	per-1.000 kelahiran hidup	9,93	4,77	4,77	4,77	4,77

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
						Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi							
		Prevalensi Balita Stunting	Persentase Balita yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya pada suatu wilayah. Balita stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD	Jumlah Balita stunting pada tahun tertentu di Kota Blitar dibagi jumlah balita yang diukur di Kota Blitar pada tahun yang sama dikali 100%	%	7	7,64	6,95	6,90	6,80
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di Fasyankes (luar dan dalam gedung). Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung pada tahun yang sama berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Elektronik (SIMPUSTRONIK)	Jumlah kunjungan baru di Fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	%	15,2	30,90	30,90	30,9	30,9
		Persentase fasilitas	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan	%	65	77,27	77,27	85	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
						Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pelayanan kesehatan yang terakreditasi	atau telah memenuhi standar mutu pelayanan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	yang terakreditasi dibagi jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%						
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Skala	0,6	0,41	0,7	0,8	0,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Nilaio rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Blitar	Indeks	N/A	N/A	84,0	85,0	86,0
2.2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah nilai dari rangkaian sistematik dari berbagai kativitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai	A (87)	A (85,08)	A (85,72)	A (86,36)	A (87)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
						Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kota Blitar.							

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2025 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan, SPM bidang kesehatan, tindaklanjut LKJIP, dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 sesuai Tabel 3.2

Tabel 3.2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standa	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Mendukung

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					Kantor		Tupoksi
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Mendukung Tupoksi
						Jumlah paket mebel yang disediakan	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Mendukung Tupoksi
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM) Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM) Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization) Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana prasarana dan alat	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kesehatan yang sesuai standar Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas		Mendukung IKU
						Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Usulan Masyarakat (Hibah)
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Kegiatan Prioritas Daerah
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	
1	02	02	2.01	0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Mendukung IKU
						Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Mendukung IKU
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Mendukung IKU
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Mendukung IKU
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Mendukung IKU
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Mendukung IKU
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana Persentase bayi balita, Ibu hamil	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana Persentase standar baku Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat Kesehatan Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina Persentae program prioritas yang dipromosikan Jumlah Pos UKK yang terbina	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar Persentase penyehat tradisional yang berizin Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • RB Stunting • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
							• Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					Berat		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosi		
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	• SPM Bidang Kesehatan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		• Tindak Lanjut LKJIP • RB Tematik Stunting • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Mendukung IKU

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						Kesehatan Kerja dan Olahraga	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		• RB Kemiskinan • Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah • Kebijakan Nasional
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Usulan Masyarakat (Hibah)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	• Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
						Jumlah Dokumen Hasil	Mendukung

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	IKU
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	• Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayann kesehatan Malaria	Mendukung IKU
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Mendukung IKU
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Mendukung IKU
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Mendukung IKU
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Mendukung IKU
1	02	03	2.01		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehata	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Mendukung IKU
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Mendukung IKU
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Mendukung IKU
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Mendukung IKU
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Mendukung IKU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	02	04	2.01	0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Mendukung IKU
						Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Mendukung IKU
						Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman		Mendukung IKU

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Mendukung IKU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Mendukung IKU
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Mendukung IKU
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri Persentase rumah tangga Sehat Persentase TTU	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						(Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Mendukung IKU
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		• Prioritas Daerah • Prioritas Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026, telaahan kebijakan nasional, hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2024, telahaan usulan kegiatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Kegiatan prioritas daerah tahun 2025 yang menjadi prioritas perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Blitar Sehat	Jaminan Kesehatan *(Universal Health Coverage)*	• Fasilitasi pembayaran iuran dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Fasilitasi pembayaran klaim dengan surat rekomendasi • Kegiatan pendukung pembiayaan JKN • Konsultasi dan koordinasi luar wilayah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Jemput bola layanan masyarakat yang sakit (home care)	Jemput bola pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sub Kegiatan Pengelolaan

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
				Pelayanan Kesehatan Balita Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Publik Safety Center (PSC) 119	• Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan krisis bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
			• Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada even daerah/nasional	DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Penurunan stunting	• Pelayanan kesehatan Balita • Fasilitasi peningkatan kapasitas layanan gizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Integrasi pelayanan kesehatan primer	• Pembinaan Integrasi Layanan Primer (ILP) Puskesmas • Pembinaan Posyandu siklus hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
				Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, diolah

Selain itu, penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 pada Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
1	Menurunkan prevalensi balita stunting	Rakor linsek lintas OPD terkait pencegahan dan penanganan stunting, pertemuan evaluasi Intervensi Intervensi Spesifik Stunting, pendampingan balita stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
			Sub kegiatan Pengeloaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat

Rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 di bawah ini, berisi program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar dan RPJMD Kota Blitar. Jumlah seluruh program dan kegiatan oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program dan 1 (satu) program penunjang. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 98,406,885,346.00 (*Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam juta tiga ratus empat puluh enam rupiah*). Rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel. 4.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Blitar

Nama PD: Dinas Kesehatan Kota Blitar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Dinas Kesehatan				91.709.114.346				97.690.390.041
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		100%	52.634.365.541			100%	62.310.981.256
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		100%				100%	
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan		100%				100%	
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		100%				100%	
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani		100%				100%	
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan		70%				73%	
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		46,15%				46,15%	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
1	0 2	0 2	2	0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar		100%	6.004.664.629			100%	5.686.645.904
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia		100%				100%	
1	0 2	0 2	2	0 1	000 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	842.482.388

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	2.913.333.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit	1.008.628.473
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	246.364.373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	1.518.788.163
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Unit	596.268.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		300 Unit	340.597.660
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	1.685.821.256	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	1.868.742.096
1	02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2841 Keluarga	5.677.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2842 Keluarga	25.452.169
1	02	02	2	01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	7.200.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		12 Paket	81.954.955
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana		100%	46.348.153.042			100%	56.145.837.960

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik		100%				100%	
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif		3 Fasilitasi				3 Fasilitasi	
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih		14,3%				14,3%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional		100%				100%	
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani		100%				100%	
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		91%				91,5%	
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam		100%				100%	
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia		100%				100%	
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang		69%				70%	
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		93,71%				93,71%	
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina		61,90%				66,67%	
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina		9 tatanan				9 tatanan	
							Persentae program prioritas yang dipromosikan		100%				100%	
							Jumlah Pos UKK yang terbina		11 Pos UKK				12 Pos UKK	
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani		67%				67%	
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran		17%				20%	
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar		100%				100%	
							Persentase penyehat tradisional yang berizin		7,51%				7,51%	
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2219 Orang	99.151.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2211 Orang	128.079.131
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2118 Orang	177.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2110 Orang	192.843.722
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2017 Orang	168.570.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2010 Orang	45.379.735
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8226 Orang	48.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8213 Orang	72.281.945
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17573 Orang	49.527.965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17560 Orang	265.488.669
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92626 Orang	213.089.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92593 Orang	207.298.979
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24540 Orang	59.133.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25445 Orang	563.490.081
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47686 Orang	14.816.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48025 Orang	43.186.203
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	4335 Orang	340.547.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		4366 Orang	4.051.950

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Semua Kel/Desa			Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			
1	0 2	0 2	2	0 2	001 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383 Orang	70.747.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		385 Orang	143.376.826
1	0 2	0 2	2	0 2	001 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2835 Orang	649.705.084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2824 Orang	163.874.022
1	0 2	0 2	2	0 2	001 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3434 Orang	213.542.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3458 Orang	489.550.838
1	0 2	0 2	2	0 2	001 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.019.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.295.893.311
1	0 2	0 2	2	0 2	001 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.189.794.081
1	0 2	0 2	2	0 2	001 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	152.887.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		5 Dokumen	671.518.116
1	0 2	0 2	2	0 2	001 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	45.585.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	133.098.486

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	575.713.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2 Dokumen	178.262.711
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	379.593.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		3 Dokumen	244.655.395
1	02	02	2	02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	9.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	36.074.055
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	89.066.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		7 Dokumen	3.520.713.927
1	02	02	2	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	28.308.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		10 Orang	65.421.780
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	746.135.846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		12 Dokumen	579.294.136

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	30.121.662.479	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pembayaran Iuran JKN		18 Dokumen	31.969.240.142
1	02	02	2	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540 Paket	52.076.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		290 Paket	991.939.136
1	02	02	2	02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	309.446.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	219.565.492
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	8.400.000.000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP		48 Dokumen	8.659.078.002
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	478.941.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		8 Dokumen	649.151.665
1	02	02	2	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	142.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	202.178.292
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	65.116.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	317.181.374

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pemberian Obat Massal)								
1	02	02	2	02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	23.972.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	542.995.177
1	02	02	2	02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.454.627.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit	345.691.544
1	02	02	2	02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayann kesehatan Malaria	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	21.896.238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		12 Orang	15.189.037
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	133.200.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			
1	02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi		100%	249.020.500			100%	74.863.162
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	249.020.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	74.863.162
1	02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina		100%	32.527.370			100%	403.634.230

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.693.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	242.866.398
1	02	02	2	04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	14.834.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	160.767.832
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar		100%	1.009.898.740			100%	1.356.625.500
1	02	03	2	01		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan		100%	23.097.900			100%	150.000.000
1	02	03	2	01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Dokumen	23.097.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Dokumen	150.000.000
1	02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina		100%	372.611.300			100%	777.805.600
1	02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	146.220.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Orang	455.711.600
1	02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan		2 Dokumen	226.391.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2 Dokumen	322.094.000
1	02	03	2	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		19%	614.189.540			21%	428.819.900

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 Orang	614.189.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		68 Orang	428.819.900
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar		100%	523.170.600			100%	457.261.600
							Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan		92,67%				92,67%	
1	02	04	2	01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina		100%	32.388.100			100%	172.547.700
1	02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	32.388.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	172.547.700
1	02	04	2	02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina		100%	6.340.000			100%	30.447.400

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	04	2	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.447.400
1	02	04	2	03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin		94%	179.867.875			95%	125.336.000
1	02	04	2	03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	179.867.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan		2 Dokumen	125.336.000
1	02	04	2	04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan		80%	43.768.000			81%	3.042.000
1	02	04	2	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	43.768.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.042.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Semua Kel/Desa						
1	02	04	2	05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan		82%	20.617.750			83%	2.860.100
1	02	04	2	05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.617.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.860.100
1	02	04	2	06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi		94%	240.188.875			95%	123.028.400
1	02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	240.188.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan		55 Unit	123.028.400
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		85,71%	2.659.993.600			85,71%	2.709.800.535
1	02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	Persentase rumah tangga sehat		60,2%	2.471.034.300			60,2%	2.654.877.138

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri		100%				100%	
							Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS		100%				100%	
							Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina		3 kelompok UKBM				3 kelompok UKBM	
1	02	05	2	01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	2.471.034.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	2.654.877.138
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya		1 Kelompok UKBM	188.959.300			1 Kelompok UKBM	54.923.397
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	188.959.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2 Dokumen	54.923.397
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,3 Indeks	34.881.685.865			83,3 Indeks	30.855.721.150
1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	76.819.290			100%	177.012.300
1	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	20.306.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	136.512.300

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	56.512.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Laporan	40.500.000
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	29.931.358.500			100%	24.103.563.510
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246 Orang/bulan	29.926.958.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		246 Orang/bulan	24.084.463.510
1	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	19.100.000
1	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	284.574.200			100%	135.771.350
1	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	57.076.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000
1	02	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	13.771.350
1	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Orang	216.838.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Orang	72.000.000
1	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	645.244.100			100%	986.332.600
1	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	1 Paket	10.194.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan	Semua Kel/Desa						
1	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	65.762.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	50.000.000
1	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	27.645.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	18.500.000
1	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket	58.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Paket	35.500.000
1	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	62.022.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	60.000.000
1	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	9.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Dokumen	7.332.600
1	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	224.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Laporan	700.000.000
1	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	186.908.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000
1	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		100%	797.815.710			100%	400.449.390
1	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Unit	274.294.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Unit	78.381.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Unit	523.521.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	322.068.390
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	2.590.481.665			100%	2.953.700.000
1	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	466.253.665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	421.700.000
1	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	2.124.228.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	2.532.000.000
1	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100%	555.392.400			100%	2.098.892.000
1	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Unit	276.097.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	532.000.000
1	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208 Unit	109.294.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		122 Unit	65.900.000
1	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.500.992.000

Nama Unit: UPT Puskesmas Kepanjenkidul

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Puskesmas Kepanjenkidul				2.141.871.400				4.197.939.006
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		100%	2.102.827.800			100%	4.132.624.788
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							bayi baru lahir sesuai standar (SPM)							
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		100%				100%	
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan		100%				100%	
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		100%				95,2%	
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani		100%				100%	
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan		70%				73%	
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		46,15%				46,15%	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar		100%	468.661.000			100%	408.889.426
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia		100%				100%	
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	33 Unit	114.913.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Unit	94.577.033

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	13 Unit	27.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	3.162.371
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	5 Paket	323.044.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		5 Paket	294.252.681
1	02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	57 Keluarga	3.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		60 Keluarga	16.897.341
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana		100%	1.634.166.800			100%	3.723.735.362
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik		100%				100%	
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif		3 Fasilitasi				3 Fasilitasi	
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan		14,3%				14,3%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Bayi dan Anak) yang terlatih							
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani		100%				100%	
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		91%				91,5%	
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam		100%				100%	
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia		100%				100%	
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang		69%				70%	
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		93,71%				93,71%	
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina		61,90%				66,67%	
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina		9 tatanan				9 tatanan	
							Persentae program prioritas yang dipromosikan		100%				100%	
							Jumlah Pos UKK yang terbina		11 Pos UKK				12 Pos UKK	
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani		67%				67%	
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran		17%				20%	
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							kesehatan lainnya Yang sesuai standar							
							Persentase penyehat tradisional yang berizin		7,51%				7,51%	
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan		100%				100%	
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	638 Orang	21.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		640 Orang	122.995.308
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	609 Orang	4.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		611 Orang	17.755.597
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	577 Orang	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		580 Orang	9.097.807
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	2979 Orang	5.535.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		2987 Orang	426.033.255
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	5031 Orang	13.108.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		5044 Orang	26.281.226
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	26523 Orang	12.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		26524 Orang	177.999.826
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	7028 Orang	5.600.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		7273 Orang	47.156.205

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	13655 Orang	2.156.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		13755 Orang	13.853.136
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	1241 Orang	45.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		1249 Orang	3.568.986
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	110 Orang	32.674.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		111 Orang	121.471.546
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	1145 Orang	74.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		1140 Orang	153.655.262
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	983 Orang	22.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		990 Orang	75.057.806
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	287.556.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	256.056.317
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	9.812.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	12.698.439
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	89.943.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		12 Dokumen	978.253

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											Dana BOK-BOK Puskesmas			
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	66.745.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	112.199.931
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.114.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	41.095.405
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	126.046.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	171.217.601
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	791.683.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		2 Dokumen	1.823.736.221
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	55.838.744
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	36.139.083
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	996.600	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	18.849.408
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		85,71%	39.043.600			85,71%	65.314.218
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Kelompok UKBM	39.043.600			1 Kelompok UKBM	65.314.218

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang terfasilitasi pengembangannya							
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	39.043.600	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	65.314.218

Nama Unit: UPT Puskesmas Sukorejo

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Puskesmas Sukorejo				2.213.278.800				4.001.421.721
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		100%	2.176.310.200			100%	3.937.398.714
							Persentase ibu bersalin mendapatkan		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)							
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		100%				100%	
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan		100%				100%	
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		100%				100%	
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani		100%				100%	
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan		70%				73%	
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		46,15%				46,15%	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
1	0 2	0 2	2	0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar		100%	322.105.000			100%	745.147.270
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	80 Unit	34.105.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		50 Unit	224.148.231
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	4 Unit	18.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3 Unit	37.290.984
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	4 Paket	270.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		4 Paket	483.708.055
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana		100%	1.854.205.200			100%	3.192.251.444
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik		100%				100%	
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif		3 Fasilitasi				3 Fasilitasi	
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan		14,3%				14,3%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Bayi dan Anak) yang terlatih							
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani		100%				100%	
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		91%				91,5%	
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam		100%				100%	
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia		100%				100%	
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang		69%				70%	
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		93,71%				93,71%	
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina		61,90%				66,67%	
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina		9 tatanan				9 tatanan	
							Persentae program prioritas yang dipromosikan		100%				100%	
							Jumlah Pos UKK yang terbina		11 Pos UKK				12 Pos UKK	
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani		67%				67%	
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran		17%				20%	
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							kesehatan lainnya Yang sesuai standar							
							Persentase penyehat tradisional yang berizin		7,51%				7,51%	
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan		100%				100%	
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	753 Orang	28.978.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		751 Orang	87.405.825
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	718 Orang	10.288.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		715 Orang	82.360.476
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	688 Orang	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		685 Orang	78.156.021
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	3553 Orang	25.070.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		3541 Orang	80.781.171
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	6001 Orang	64.925.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		5997 Orang	24.608.562
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	31623 Orang	64.706.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		31612 Orang	138.710.041

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	8375 Orang	28.580.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		8685 Orang	96.608.248
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	16279 Orang	7.118.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		16395 Orang	83.603.665
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	1480 Orang	40.485.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1491 Orang	103.173.112
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	131 Orang	74.519.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		132 Orang	196.943.522
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	925 Orang	20.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		922 Orang	101.941.714
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	1172 Orang	19.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		1181 Orang	64.110.802
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	138.003.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	393.915.941
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	14.838.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		12 Dokumen	6.714.280

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											Dana BOK-BOK Puskesmas			
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	38.047.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	14.689.440
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	41.766.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	208.674.384
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	35.418.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	5.845.768
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	110.376.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	230.558.065
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	968.496.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	919.070.948
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	18.057.800	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	67.845.729
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	43 Orang	61.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		43 Orang	45.904.500
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	32.240.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	154.750.496

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.858.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	5.878.734
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		85,71%	36.968.600			85,71%	64.023.007
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya		1 Kelompok UKBM	36.968.600			1 Kelompok UKBM	64.023.007
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	36.968.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	64.023.007

Nama Unit: UPT Puskesmas Sananwetan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Puskesmas Sananwetan				2.342.620.800				4.813.820.761
1						Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		100%	2.332.120.800			100%	4.694.990.422
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		100%				100%	
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)							
							Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		100%				100%	
							Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan		100%				100%	
							Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		100%				100%	
							Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani		100%				100%	
							Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan		70%				73%	
							Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		46,15%				46,15%	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar		100%	371.851.000			100%	519.990.104
							Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia		100%				100%	
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	49 Unit	9.121.700	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		35 Unit	54.940.627
1	02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	24 Unit	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Unit	42.897.322
1	02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	10 Paket	338.729.300	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		10 Paket	422.152.155
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana		100%	1.960.269.800			100%	4.175.000.318
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							mendapatkan intervensi gizi spesifik							
							Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif		3 Fasilitasi				3 Fasilitasi	
							Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih		14,3%				14,3%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana		100%				100%	
							Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional		100%				100%	
							Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani		100%				100%	
							Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		91%				91,5%	
							Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam		100%				100%	
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia		100%				100%	
							Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang		69%				70%	
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan		93,71%				93,71%	
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina		61,90%				66,67%	
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina		9 tatanan				9 tatanan	
							Persentae program prioritas yang dipromosikan		100%				100%	
							Jumlah Pos UKK yang terbina		11 Pos UKK				12 Pos UKK	
							Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani		67%				67%	
							Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran		17%				20%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar		100%				100%	
							Persentase penyehat tradisional yang berizin		7,51%				7,51%	
							Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan		100%				100%	
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	828 Orang	78.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		825 Orang	55.188.646
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	791 Orang	10.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		788 Orang	9.408.944
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	751 Orang	22.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		749 Orang	15.090.896
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	3061 Orang	116.921.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		3056 Orang	413.113.803
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	6541 Orang	76.464.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6536 Orang	84.709.273
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	34480 Orang	150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34468 Orang	89.264.745

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	9137 Orang	55.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		9474 Orang	140.428.007
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	17752 Orang	69.778.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17878 Orang	42.372.012
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	1614 Orang	14.373.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1626 Orang	37.991.915
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	142 Orang	5.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		143 Orang	48.752.870
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	764 Orang	68.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		762 Orang	248.331.464
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	1278 Orang	27.500.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		1287 Orang	78.978.711
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	585.688.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	342.078.082
1	02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	39.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	9.278.622

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	27.382.200	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	14.689.440
1	02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	16.097.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	121.291.448
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	49.657.200	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	12.824.262
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	138.856.600	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	189.657.868
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	510.518.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	2.005.097.296
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	82.012.831
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	80 Orang	15.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		80 Orang	15.301.500
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21.400.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	76.947.367
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.026.800	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	42.190.316
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		85,71%	10.500.000			85,71%	118.830.339
1	02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya		1 Kelompok UKBM	10.500.000			1 Kelompok UKBM	118.830.339

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.500.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		12 Dokumen	118.830.339

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah–Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kesehatab Tahun 2025 disusun mengacu pada rancangan awal RKP Tahun 2025, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar Tahun 2025
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 berdasarkan peran sertanya dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
5. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap Renja Dinas Kesehatan juga akan dilaksanakan jika terdapat

peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap renja ini.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, Dinas Kesehatan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka mengoptimalkan layanan SPM Bidang Kesehatan, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif dan kualitas pelayanan lebih ditingkatkan.
b. Dalam rangka mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Blitar, kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.
c. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola dan kinerja Dinas kesehatan, koordinasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal harus dilaksanakan secara intensif.
d. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola dan kinerja Dinas kesehatan, koordinasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal harus dilaksanakan secara intensif.
e. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan perlu adanya peningkatan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standart.
f. Dalam rangka peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar perlu adanya peningkatan upaya pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standart dan peningkatan upaya untuk mewujudkan tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan.
g. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan perlu adanya peningkatan upaya untuk mewujudkan kelurahan siaga aktif purnama mandiri.
h. Dalam rangka penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) perlu adanya fokus terhadap siklus hidup sebagai fokus integrase pelayanan, perluasan layanan kesehatan terhadap jejaring serta mmeperkuat pemantauan wilayah setempat.
i. Dalam rangka penurunan prevalensi stunting perlu adanya peningkatan pelayanan kesetan terhadap Balita dan pengoptimalan fasilitasi peningkatan kapasitas layanan gizi.
j. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

6. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang mem3.3uat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA PD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA PD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Oleh karenanya, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada dokumen RPJMD dan Renstra yang telah disusun.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah "*Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi*", dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan.

Dokumen RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam RENSTRA Tahun 2021-2026. Dokumen RENJA Tahun 2025 juga disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Blitar No. 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen

perencanaan tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;
b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
c) Sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, *review* terhadap rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 yang disertai dengan prakiraan maju Tahun 2026.

BAB V Penutup, menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun Lalu serta Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam periode dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta pada tahun 2022, program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan indikator capaian target yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Selain itu, pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021- 2026, tahun 2024 ada beberapa kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja yang mengalami perubahan pemutakhiran nomenklatur. Hal ini dikarenakan adanya pemutakhiran nomenklatur yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pada Bab II ini akan disajikan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya hal ini akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan hasil dari evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penyelenggaraan jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan
11. Program Penatagunaan tanah

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

-

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataamn Ruang dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2024

Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1	3				Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
					Tujuan : Meningkatkan kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	88	Indeks	87,08	86,77	88,53	102,03	87,18	86,77	98,60
					Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Insfrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastruktur Bina Marga	77	Indeks	77,1	76,4	79,05	103,47	79,10	79,05	102,66
0 1	0 3	1 0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	100	%	99,2	99,4	99,5	100,51	99,6	99,5	99,50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						Persentase jembatan dalam kondisi baik	100	%	99,6	99,7	119,6	120,81	99,8	99,7	99,70
			02.01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	5,09	%	3,2	5,09	14,62	292,4	5,09	14,62	287,23
						Persentase jembatan yang dibangun	100	%	0	50	0	0	100	100	100
						Persentase jalan yang dibangun	100	%	100	0	0	0	100	100	100
						Persentase jembatan yang dipelihara	6,12	%	4,08	6,12	12,02	200,33	6,12	12,2	199,35
				0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Tekhnis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan tekhnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12	dokumen	0	3	7	233,33	3	10	83,33
				0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1	KM	0	0	0	0	0	0	0
				0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8	KM	0	2	3,83	191,5	2	5,83	72,88
				0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	1600	Jembatan	0	400	400	100	80	80	5,00
				0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	12	Jembatan	0	3	5,71	190,33	3	8,71	72,58

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	80	Jembatan	0	20 m	0	0	20	20	25,00
				0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilita	4	KM	0	1	4,67	467	1	5,67	141,75
				0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	4	KM	0	1	2,03	203	1	3,03	75,75
					Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	100	Indeks	97	97,75	98,42	100,69	98,5	98,42	98,42
01	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	100	%	60	97	98,42	101,46	98	98,42	98,42
01	03	02	02.02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	21,89	%	0,96	10,39	13,92	139,2	14,22	13,92	63,59

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 2	02.0 2	003 5	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	12	dokumen	0	3	3	100	3	6	50
0 1	0 3	0 2	02.0 2	000 2	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	1,38	KM	0	0,53	0,88	166,04	0,346	1,226	88,84
0 1	0 3	0 2	02.0 2	000 8	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	6,972	KM	0	1,74	2,65	265	1,743	4,393	63,01
0 1	0 3	0 2	02.0 2	001 4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	7,500	KM	0	0	0	0	2,500	2,5	33,33
0 1	0 3	0 2	02.0 2	002 1	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	12,21 6	KM	0	3,49	4,1	136,67	3,054	7,154	58,56
					Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standart	100	%	94,6	94,7	94,8	100,11	94,85	94,8	94,80
0 1	0 3	0 8			PROGRAM PENATAANBANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	100	%	83,33	87,5	100	114,94	91,67	100	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
						Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	100	%	82,61	86,96	100	116,28	91,3	100	100,00
01	03	08	02,01		Kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung diWilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100	%	2	100	100	100	100	100	100
01	03	08	02,01	0019	Sub Kegaiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	3	Dokumen	0	0	0	0,00	1	1	33,33
01	03	08	02,01	0020	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	23	Bantuan Tekhnis	0	0	0	0	5	5	21,74
01	03	08	02,01	0021	Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8	Dokumen	0	2	2	100	2	4	50,00

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 8	02,0 1	002 3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tekhnis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tekhnis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20	Dokumen	0	5	5	100	5	10	50
					Sasaran 4 : Meningkatnya Kompetensi jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	60,87	%	71,6	47,83	57,7	120,6	57,75	57,7	94,79
0 1	0 3	1 1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
0 1	0 3	1 1	02,0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100	%	68,2	77,02	77,02	100,03	100	77,02	77,02

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	1 1	02,0 1	001 0	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Tekhnisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	400	Orang	0	100	100	100	100	200	50
0 1	0 3	1 1	02,0 1	001 1	Sub Pembinaan Peningkatan Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1000	Orang	0	250	250	100	250	500	50
0 1	0 3	1 1	02,0 1		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	100	%	0	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	1 1	02,0 1	000 6	Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk	3	lembaga	0	0	0	0	1	1	33,33
0 1	0 3	1 1	02,0 1	000 8	Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	8	dokumen	0	2	1,6	80	2	3,6	45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
01	03	11	02,02		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	100	%	0	40	40	100	60	40	40
01	03	11	02,02	0012	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	8	Peramgkat Pendukung	0	2	2	100	2	4	50
01	03	11	02,02	0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa KonstruksiCakupan Kabupaten / Kota yang disediakan	16	dokumen	0	4	4	100	4	8	50
					Tujuan : Meningkatnya Ketersediaann dan Kualitas Prasarana, sarana dan Utilitasdi Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100	%	98,27	97	98,7	101,8	98	98,7	98,70
					Sasaran 5 : Meningkatnya Akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10,56	%	0,27	9,45	9,36	99,0	9,82	9,36	88,64
01	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	86	%	82	83	92,3	111,20	84	92,3	107,33

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 5	02.0 1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	100	%	57,89	68,42	92,3	135,74	78,95	92,3	92,30
0 1	0 3	0 5	02.0 1	001 9	Sub Kegiatan Optimalisas Instalasi Pengolaha Lumpur Tinja (IPLT	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	80	unit	0	20	20	100,00	20	40	50
0 1	0 3	0 5	02.0 1	002 2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	40	M³/Hari	0	50	50	100,00	10	60	150
0 1	0 3	0 5	02.0 1	003 2	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	200	MÂ³/Hari	0	10	10	100,00	50	60	30
0 1	0 3	0 5	02.0 1	003 3	Sub Penyediaan Penyedotan Tinja	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Penyedotan Tinja	144	rumah tangga	0	36	577	1602,78	200	777	539,58
0 1	0 3	0 5	02.0 1	003 8	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	8	unit	0	2	0	0,0	2	2	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 5	02.0 1	003 9	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	100	Rumah tangga	0	25	25	100,00	25	50	50
0 1	0 3	0 5	02.0 1	004 0	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30	orang	0	10	10	100,00	10	20	66,67
0 1	0 3	0 5	02.0 1	004 1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang disusun	4	dokumen	0	1	1	100,0	1	2	50
0 1	0 3	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	100	%	98	98,5	98,5	100,51	99	98,5	98,50
0 1	0 3	0 6	02.0 1		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	2,21	%	1,06	1,35	1,35	100,00	1,64	1,35	61,09

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
01	03	06	02.01	0026	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	7	unit	0	1	1	100	2	3	42,86
01	03	06	02.01	0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	30	Sistem Drainase perkotaan	0	250	250	100	10	10	33,33
01	03	06	02.01	0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	47	Sistem Drainase perkotaan	0	1500	1500	100	15	15	31,91
01	03	06	02.01	0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	3	dokumen	0	1	1	100	1	2	66,67
01	03	06	02.01	0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	9	Sistem Drainase perkotaan	0	400	400	100,00	3	3	33,33
					Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di Kawasan pemukiman	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100	%	98,38	94	98,4	104,7	96	98,4	98,40
					Sasaran 6 : Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak melalui SPAM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM	3,44	%	0,25	2,7	3,13	115,9	3,18	3,13	90,99

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
01	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	90,2	%	88,8	88,9	91,7	103,02	90	91,7	101,66
01	03	03	02.01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	100	%	57,89	68,42	68,42	100,00	78,95	68,42	68,42
01	03	03	02.01	0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	4	dokumen	0	1	1	100,00	1	2	50
01	03	03	02.01	0026	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	60	Liter / detik	0	15	15	100,00	15	30	50
01	03	03	02.01	0028	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	45	Liter / detik	0	0	0	0,00	15	15	33,33

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 3	02.0 1	002 9	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	8	unit	0	2	0	0,00	2	2	25
					Tujuan : Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,55	%	0	95,4	95,66	100,3	95,45	95,66	100
					Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	58,21	%	57,33	44,63	52,83	118,37	52,88	52,83	90,76
0 1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	100	%	93	81,58	100	122,46	86,84	100	100
0 1	0 3	1 2	02.0 1		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	100	%	100	100	80	80	100	80	80
0 1	0 3	1 2	02.0 1	000 3	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6	dokumen	0	0	0	0	1	1	16,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	1 2	02.0 1	000 5	Sub Kegaiatan Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten / Kota	4	dokumen	0	0	0	0	1	1	25
0 1	0 3	1 2	02.0 1	000 6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	6	dokumen	0	0	0	0	4	4	66,67
0 1	0 3	1 2	02.0 1	001 2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3	orang	0	0	0	0	1	1	33,33
0 1	0 3	1 2	02.0 2		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100	%	0	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	1 2	02.0 2	000 7	Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RTRW kabupaten/kota	8	dokumen	0	2	2	100	2	4	50
0 1	0 3	1 2	02.0 3		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	100	%	100	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	1 2	02.0 3	000 4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1000	layanan	0	0	0	0	500	500	50

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	1 2	02.0 3	000 5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	48	dokumen	0	12	12	100	12	24	50
0 1	0 3	1 2	02.0 3	000 6	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	4	dokumen	0	1	1	100	1	2	50
0 1	0 3	1 2	02.0 4		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketidaksesuaian Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	100	%	4,78	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	1 2	02.0 4	000 4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	14	dokumen	0	5	3	60	3	6	42,86
0 1	0 3	1 2	02.0 4	000 8	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	3	dokumen	0	0	0	0	1	1	33,33
0 1	0 3	1 2	02.0 4	000 9	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	36	laporan	0	0	0	0	12	12	33,33
0 1	0 3	1 2	02.0 4	001 2	Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	12	dokumen	0	0	0	0	4	4	33,33

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
01	03	12	02.04	0015	Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal	3	berita Acara	0	0	0	0	1	1	33,33
					Tujuan : Tercapainya indeks nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	86	Nilai	84,21	85	85,48	100,56	85,5	85,48	99,40
					Sasaran : Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah										
01	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Nilai	94,93	82,7	83,13	101,38	82,8	83,13	100,16
01	03	01	02.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	99,9	100	100	100	100	100	100

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 1	02.0 1	000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	40	dokumen	0	10	11	110	10	21	52,50
0 1	0 3	0 1	02.0 1	000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	Laporan	0	1	1	100	1	2	50
0 1	0 3	0 1	02.0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	95	100	100	100	100	295	295
0 1	0 3	0 1	02.0 2	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	144	orang / bulan	0	36	36	100	36	72	50
0 1	0 3	0 1	02.0 2	000 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD	20	laporan	0	5	5	100	5	10	50
0 1	0 3	0 1	02.0 5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	300	300

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 1	02.0 5	000 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12	paket	0	3	4	133,33	3	7	58,33
0 1	0 3	0 1	02.0 5	001 0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	240	orang / bulan	0	60	70	116,67	60	130	54,17
0 1	0 3	0 1	02.0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah esuai standar	100	%	75	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	paket	0	5	5	100	5	10	50
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	44	paket	0	11	11	100	11	22	50
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	48	paket	0	12	11	91,67	12	23	47,92
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	16	paket	0	4	4	100	4	8	50
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 5	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	paket	0	2	2	100	2	4	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 6	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	96	dokumen	0	24	24	100	24	48	50
0 1	0 3	0 1	02.0 6	000 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320	laporan	0	80	114	142,50	80	194	60,63
0 1	0 3	0 1	02.0 6	001 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400	dokumen	0	100	100	100	100	200	50
0 1	0 3	0 1	02.0 7		Kegiatan Pengadaanbarang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusansesuai kebutuhan	100	%	0	100	100	100	100	200	200
0 1	0 3	0 1	02.0 7	000 5	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	128	unit	0	32	32	100	32	64	50
0 1	0 3	0 1	02.0 7	000 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	unit	0	8	12	150	8	20	62,50
0 1	0 3	0 1	02.0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	75	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	0 1	02.0 8	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	16	laporan	0	4	4	100	4	8	50

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 1	02.0 8	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yangdisediakan	416	laporan	0	104	103,8	99,81	104	207,8	49,95
0 1	0 3	0 1	02.0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	79	100	100	100	100	100	100
0 1	0 3	0 1	02.0 9	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	112	unit	0	28	28	100	28	56	50
0 1	0 3	0 1	02.0 9	000 5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	156	unit	0	39	39	100	39	78	50
0 1	0 3	0 1	02.0 9	000 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80	unit	0	20	20	100	20	40	50
0 1	0 3	0 1	02.0 9	000 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	12	unit	0	3	3	100	3	6	50

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 1	0 3	0 1	02.0 9	001 1	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12	unit	0	3	3	100	3	6	50
					Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaiatan dengan pelayanan dasar										
					Urusan pemerintahan Bidang pertanahan										
0 2	1 0	0 4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100	100
0 2	1 0	0 4	02.0 1		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
0 2	1 0	0 4	02.0 1	000 4	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	4	berita acara	0	1	1	120	1	2	50
0 2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	100	%	96	97	93,1	95,98	98	95,98	95,98

-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan/sasaran/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target KinerjaTujuan / sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20222	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tujuan/ sasaran / Program,/ Kegiatan /, Sub-Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
0 2	1 0	1 0	02.0 1		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Pertanahan yang Tersusun	100	%	96	100	100	100	98	100	100
0 2	1 0	1 0	02.0 1	000 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanahdalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota	4	Laporan	0	1	1	100	1	2	50
0 2	1 0	1 0	02.0 1	000 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenKoordinasi dan SinkronisasiPelaksanaanKonsolidasi TanahKewenangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	0	1	1,4	140	1	2,4	60

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2023, diperoleh pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
   a. Realisasi program/kegiatan yang *melebihi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota sebesar 100,51% dari target renja sebesar 99,4 % dengan realisasi sebesar 99,5%
   b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
   c. Faktor – faktor penyebab realisasi melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
      - Karena adanya factor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten, Sarana dan prasarana yang memadai serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid
      - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik
      - Waktu pelaksanaan kegiatan / pekerjaan selalu terkontrol / diawasi dengan baik
   d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan peningkatan kondisi jalan yang berada di wilayah Kota Blitar dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
   e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan diantaranya adalah menyelaraskan data kondisi jalan dengan kondisi lapangan, efisiensi jalur koordinasi, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   a. Realisasi program/kegiatan yang *melebihi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota sebesar 100,69% dari target renja sebesar 97,75 % dengan realisasi sebesar 98,42%
   b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
   c. Faktor – faktor penyebab realisasi melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
      - Karena adanya factor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten, Sarana dan prasarana yang memadai serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid
      - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik
      - Waktu pelaksanaan kegiatan / pekerjaan selalu terkontrol / diawasi dengan baik
      - Penerapan tekhnologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja
   d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan daerah irigasi dalam kondisi yang baik
   e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan diantaranya adalah menyelaraskan data survey melalui e-paksi, efisiensi jalur

koordinasi, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas

3. Program Penataan Bangunan Gedung

   a. Realisasi program/kegiatan yang *memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebesar 114,94% dari target renja sebesar 87,5 % dengan realisasi sebesar 100 % ;

   b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada ;

   c. Faktor – faktor penyebab realisasi memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :

      - Karena adanya faktor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten,
      - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid,
      - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik,
      - Waktu pelaksanaan kegiatan / pekerjaan selalu terkontrol / diawasi dengan baik,
      - Penyusunan standarisasi bangunan Gedung negara yang didukung dengan anggaran yang memadai,

   d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan bangunan gedung pemerintahan yang sesuai standar ;

   e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan diantaranya adalah efisiensi jalur koordinasi dalam tahap pra-pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

   a. Realisasi program/kegiatan yang *memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
      - Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
      - Kegiatan pengawasan tertib usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
      - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa Konstruksi Cakupan daerah Kabupaten / Kota

      sebesar 100% dari target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% ;

   b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

   c. Faktor – faktor penyebab realisasi memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :

      - Karena adanya faktor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten,
      - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid
      - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya

- Para pelaku jasa konstruksi tertib perijinan dan tertib administrasi

d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan pelaku jasa konstruksi yang memiliki kemampuan teknis mumpuni serta taat aturan yang berlaku ;
e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan diantaranya adalah pemberian workshop teknis pelaku jasa konstruksi secara berkala, evaluasi dengan metode *reward & punishment* pada kegiatan yang sedang dilaksanakan, serta pemberian pelatihan untuk penerbitan sertfikasi kompetensi dengan biaya yang terjangkau / gratis.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Realisasi program/kegiatan yang *melebihi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah domestic dalam daerah Kabupaten / Kota sebesar 111,20% dari target renja sebesar 83% dengan realisasi sebesar 92,3%
b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Faktor – faktor penyebab realiasasi melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
    - Karena adanya factor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten,
    - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid
    - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya
d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan peningkatan jumlah kepala keluarga serta perusahaan dengan akses fasilitas pengolahan air limbah yang sesuai standar ;
e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan efisiensi jalur koordinasi dalam tahap pra-pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas.

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Realisasi program/kegiatan yang *memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Subngai dalam daerah Kabupaten / Kota sebesar 100,51% dari target renja sebesar 98% dengan realisasi sebesar 98,5%
b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan realiasasi melebihi dari target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Faktor – faktor penyebab realisasi melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
    - Karena adanya factor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten,
    - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid

- Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya

d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan peningkatan kondisi drainase yang berada di wilayah Kota Blitar dalam kondisi baik
e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan diantaranya adalah menyelaraskan data kondisi jalan dengan kondisi lapangan, efisiensi jalur koordinasi, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum di daerah Kabupaten / Kota sebesar 103,20% dari target renja sebesar 88,90% dengan realisasi sebesar 91,7%
b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan reliasasi melebihi dari target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Faktor – faktor penyebab relisasi melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

- Karena adanya factor pendukung dari Segi Sumber Daya manusianya yang kompeten,
- Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid
- Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya

d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan peningkatan jumlah kepala keluarga dengan akses fasilitas penyediaan air minum yang sesuai standar ;
e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan efisiensi jalur koordinasi dalam tahap pra-pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas.

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

a. Realisasi program/kegiatan yang *tidak memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota sebesar 80% dari target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 80%

Adapun faktor – faktor penyebab realisasi tidak memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :

- Karena belum terlaksanaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penggunaan aplikasi SIMTARU secara optimal
- Terbatasnya Sumber daya Manusia yang kompeten dibidangnya

b. Realisasi program/kegiatan yang *memenuhi target* target hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah Kabupaten / Kota sebesar 100% dari target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten / Kota sebesar 100% dari target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota sebesar 100% dari target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%;

c. Faktor – faktor penyebab realisasi memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :
   - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid;
   - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya;

d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai standar sedangkan yang belum terlampaui menghasilkan pemanfaatan tata ruang yang kurang maksimal;

e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan efisiensi jalur koordinasi dalam tahap pra-pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja, alat, dan material yang berkualitas

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Realisasi program/kegiatan yang *memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebesar 101,38% dari target renja sebesar 82,7% dengan realisasi sebesar 83,13% adalah sebagai berikut:
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah daerah

b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan realiasasi melebihi dari target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

c. Adapun faktor – faktor penyebab realisasi memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :
   - Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidangnya
   - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid
   - Penerapan Tekhnologi Aplikasi pendukung
   - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya

d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan pemanfaatan peralatan dan fasilitas kantor Dinas PU & Penataan Ruang yang maksimal;
e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan efisiensi jalur koordinasi dalam tahap pra-pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, serta penyediaan sumberdaya baik pekerja dan alat yang berkualitas.

10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

a. Realisasi program/kegiatan yang *memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% dari target renja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%;
b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada;
c. Adapun faktor – faktor penyebab realiasasi memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :
   - Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidangnya;
   - Sarana dan prasarana yang memadai sehingga mempermudah serta koordinasi dan kerjasama tim yang solid;
   - Kegiatan / paket pekerjaan sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya;
d. Implikasi target pada program/kegiatan yang terlampaui menghasilkan pengendalian kegiatan sengketa tanah yang lebih efisien dan dapat diterima semua pihak;
e. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam mempertahankan capaian target program/kegiatan efisiensi jalur koordinasi terhadap semua pihak yang terlibat.

11. Program Penatagunaan Tanah

a. Realisasi program/kegiatan yang *tidak memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota sebesar 95,98 % dari target renja sebesar 97 % dengan realisasi sebesar 93,1 %;
b. Adapun faktor – faktor penyebab realisasi tidak memenuhi target kinerja program / kegiatan adalah :
   - Koordinasi kurang efektif dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Kota Blitar serta pemangku wilayah karena terbatasnya waktu;
   - Adanya kendala aplikasi terkait rekapitulasi kegiatan yang maintenance.
c. Implikasi target pada program/kegiatan yang belum tercapai menghasilkan pengendalian kegiatan penatagunaan tanah yang kurang maksimal sehingga pemanfaatan tanah yang masuk pada sasaran kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik
d. Langkah -langkah yang perlu diambil dalam memperbaiki capaian target program/kegiatan efisiensi jalur koordinasi terhadap semua pihak yang terlibat serta pemanfaatan sumber daya manusia serta perlatan dengan lebih maksimal.

Pada Tabel 2.1 di atas yang merupakan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sudah memuat indikatoir kinerja tujuan,

sasaran/program/kegiatan/sub kegiatansesuai dengan perubahan renstra tahun 2021 – 2026.

Sedangkan untuk perkiraan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 di sajikan pada Tabel. 2.2 dimana realiasi kinerja pada tahun 2024 diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga target akhir Renstra bisa tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menangani

satu *urusan wajib* yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu *Urusan Bidang Pertanahan*. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah di tetapkan sebagai IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Renstra Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar 2021-2026 sebanyak 7 (tujuh) bidang kegiatan yaitu Indeks Infrastruktur Bina Marga, Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air, Persentase Gedung pemerintah sesuai standart, Persentase peran aktif jasa konstruksi, Persentase rumah tangga yang memiliki akses system pengelolaan air limbah domestic (SPALD), Persentase rumah tangga yang memiliki system penyediaan air minum (SPAM), dan Persentase penyelenggaraan penataan ruang dengan 2 (dua) indikator yang tidak tercapai sesuai target di tahun 2023 yaitu :

- Presentase peran aktif jasa konstruksi dengan target sebesar 71,60% masih tercapai 57,70%
- Presentase penyelenggaraan penataan ruang dengan target 57,33% masih tercapai 52,83 %

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dalam pencapaian target pelayanan Perangkat daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar

No.	Indikator	IKU/IKK / SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	INDIKATOR TUJUAN												
	Indeks Infrastrukstur Daerah	--	58,27	58,37	58,47	58,57	58,67	61,18	61,84	61,84	62,59	63,34	
II	INDIKATOR SASARAN												
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	--	86,36	86,77	88,42	89,69	90,98	87,08	88,37	88,37	89,69	90,98	
	❖ Indeks Infrastruktur Bina Marga	IKU	76.20	76.40	79,10	79.80	80.00	77.10	79.05	79.05	79.80	80.00	
	❖ Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	IKU	97.00	97.75	98.50	99.25	100	97.00	98.42	98.42	99.25	100	
	❖ Persentase Gedung pemerintah sesuai standart	IKU	94.60	94.70	94.85	94.90	95.00	94.60	94.80	94.80	94.90	95.00	
	❖ Persentase peran aktif jasa konstruksi	IKU	43.48	47.83	57.75	57,90	60.87	71.60	57.70	57.70	57,90	60.87	
	❖ Persentase rumah tangga yang memiliki akses	IKU	9.07	9.45	9.82	10.19	10.56	0.27	9.36	9.36	10.19	10.56	

No.	Indikator	IKU/IKK / SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	system pengelolaan air limbah domestic (SPALD)												
	❖ Persentase rumah tangga yang memiliki system penyediaan air minum (SPAM)	IKU	2.45	2.70	3,18	3.23	3.44	0.25	3.13	3.13	3.19	3.44	
	❖ Persentase penyelenggaraan penataan ruang	IKU	40.55	44.63	52,88	54.12	58.21	57.33	52.83	52.83	54.12	58.21	
III	INDIKATOR IKK												
	❖ Rasio luas daerah irigasio kewenanagan kabupaten / kota yang dilayani oleh jaringan irigas	IKK	97.00	97,50	98.00	98,50	99.00	97,32	97.50	97.50	98,50	99.00	
	❖ Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten kota	IKK	1,84	2,04	2,23	2,42	2.61	1,84	2,04	2,04	2,42	2.61	

No.	Indikator	IKU/IKK / SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	❖ Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	IKK	6,88	7,17	7,46	7,75	8.04	6,88	7,17	7,17	7,75	8.04	
	❖ Rasio kepatuhan IMB	IKK	33,60	34,40	35,20	36.00	36.80	17.30	17.30	17.30	36	36.80	
	❖ Tingkat kemantapan jalan	IKK	99,20	99,40	99,60	99,80	100	99,20	99.50	99.50	99,80	100	
	❖ Rasio tenaga operator / terhnisi / analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	IKK	68,25	77,02	85,79	94,56	100	68,25	100	100	94,56	100	
	❖ Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
IV	INDIKATOR SASARAN												
	❖ Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	SPM	96	97	98	99	100	98,27	93.40	93.40	99	100	
	❖ Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	SPM	92	94	96	98	100	98,38	98.70	98.70	98	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- ❖ Rasio kecukupan penyediaan air minum layak dan aman bagi masyarakat yang masih harus ditingkatkan ;
- ❖ Rasio kecukupan penyediaan sarana pengolahan air limbah yang layak dan aman bagi masyarakat yang masih harus ditingkatkan ;
- ❖ Masih perlunya Peningkatan kualitas infrastruktur jalan beserta bangunan pelengkapnya sebagai bentuk layanan bagi pengguna dan pemanfaat jalan.
- ❖ Masih perlunya Peningkatan Pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air yang melipui Irigasi, Drainase dan Sumber Mata Air dalam rangka pemanfaatan dan pengaturan ketersediaan air.
- ❖ Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang sesuai standar perlu ditingkatkan
- ❖ Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Tata Ruang.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah Kota Blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun ke depan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- ❖ Penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan penyediaan sanitasi aman dan layak.
- ❖ Penguatan sistem Penyelenggaraan jalan, jaringan irigasi dan drainase di Kota Blitar.
- ❖ Pemenuhan Gedung Pemerintah yang sesuai standar.
- ❖ Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan.
- ❖ Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi.

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah menentukan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

- ❖ Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan ;
- ❖ Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi ;
- ❖ Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing
- ❖ Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup ;

- ❖ Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital ;
- ❖ Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Dari 6 (enam) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ditunjuk sebagai salah satu penanggung jawab atau pelaksana pada prioritas ke-4 dengan sasaran:

- ❖ Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan umum ;
- ❖ Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Bangunan pelengkapnya ; dan
- ❖ Meningkatnya kualitas penataan ruang

Jika mengacu pada dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk RPJMD pada tahun 2025, prioritas kinerja yang dilakukan di dalam kerangka capaian arah kebijakan Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup antara lain:

- ❖ Penyediaan/peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman ;
- ❖ Penyediaan /peningkatan infrastruktur transportasi / jalan dan bangunan pelengkapnya yang berwawasan lingkungan ;
- ❖ Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- ❖ Pembangunan Gedung Pemerintah yang sesuai standar ;
- ❖ Penguatan Pengendalian pemanfaatan Ruang

Sementara prioritas tahun 2025 diarahkan pada:

- ❖ Peningkatan ketersediaan dan kualitas air minum dan limbah domestik ;
- ❖ Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan bangunan pelengkapnya
- ❖ Pengelolaan Sumber Daya Air (Irigasi, sumber mata air dan drainase) ;
- ❖ Pemenuhan Gedung Pemerintah sesuai standar ;
- ❖ Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025

Kota Blitar

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				63.051.923.610,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				47.606.751.601,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.928.073.610,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.408.641.101,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				60.928.073.610,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				47.408.641.101,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,9 nilai	6.890.098.921,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,9 nilai	7.682.852.952,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	52.190.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	32.526.216,00	Rasionalisasi standar harga
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.350.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	18.051.216,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	44.840.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.475.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.430.107.278,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.278.599.238,00	Penyesuaian jumlah pegawai seperti penambahan ASN & purna tugas

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.427.858.478,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.277.858.478,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	2.248.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	740.760,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	185.272.622,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	354.030.799,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	90.927.622,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	166.044.999,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	94.345.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	187.985.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	363.117.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	773.368.214,00	Perjalanan dinas pada satu rekening sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.655.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.163.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35.161.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	51.467.974,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.913.440,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.061.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	79.818.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.065.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.537.200,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.200.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	197.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	406.331.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	44.975.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	199.937.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	70.596.641,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	125.358.700,00	Rasionalisasi standar harga untuk beberapa peralatan
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	44.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	15.700.700,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	26.596.641,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	109.658.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	362.420.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	507.932.620,00	Rasionalisasi standar harga untuk tagihan listrik serta penambahan jumlah THL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	93.404.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	154.152.620,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan	269.016.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan	353.780.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart	100 %	426.395.380,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart	100 %	611.037.165,00	Rasionalisasi standar harga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	131.636.380,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	143.300.900,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39 Unit	3.999.600,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	70.594.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	39.946.665,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	175.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	342.290.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	39.165.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	81.500.000,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	99 %	12.251.395.763,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	99 %	4.588.834.949,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	18,05 %	12.251.395.763,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	18,05 %	4.588.834.949,00	Rasionalisasi kegiatan dengan sumber dana DAK yang tidak masuk lokasi prioritas
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,346 KM	2.067.100.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,346 KM	993.925.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.743 KM	4.264.810.363,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.743 KM	2.311.975.000,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.500 KM	3.761.751.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.500 KM	0,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.054 KM	1.707.734.400,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.054 KM	1.082.934.949,00	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	450.000.000,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	200.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	90,1 %	674.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	90,1 %	154.567.600,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPAM yang terbangun	89,47 %	674.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPAM yang terbangun	89,47 %	154.567.600,00	Rasionalisasi kegiatan dengan sumber dana DAK yang tidak masuk lokasi prioritas
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	154.567.600,00	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	124.000.000,00	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	200.000.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	0,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Kota Blitar,	Jumlah Sistem Penyediaan Air	2 Unit	200.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Kota Blitar,	Jumlah Sistem Penyediaan Air	2 Unit	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	85 %	4.065.340.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	85 %	2.414.490.600,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPALD yang terbangun	89,47 %	4.065.340.200,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPALD yang terbangun	89,47 %	2.414.490.600,00	Rasionalisasi kegiatan dengan sumber dana DAK yang tidak masuk lokasi prioritas
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	20 Unit	482.567.000,00	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	20 Unit	160.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 M^3/Hari	522.324.000,00	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 M^3/Hari	522.324.000,00	
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	0 M^3/Hari	250.000.000,00	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	0 M^3/Hari	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa					Kel/Desa	Permukiman yang ditingkatkan			
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	36 Rumah Tangga	814.649.200,00	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	200 Rumah Tangga	57.684.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	100.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0,00	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	25 Rumah Tangga	1.512.000.000,00	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	25 Rumah Tangga	1.347.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Orang	80.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Orang	93.982.600,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	1 Dokumen	303.800.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	1 Dokumen	233.500.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa	Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			Limbah Domestik (SPALD)	Semua Kel/Desa	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	99,5 %	5.127.759.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	99,5 %	3.447.480.300,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1,93 %	5.127.759.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1,93 %	3.447.480.300,00	Rasionalisasi kegiatan dengan lokasi yang sudah pernah dikerjakan
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	2 Unit	0,00	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.325.000.000,00	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.618.096.950,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	16 Sistem Drainase Perkotaan	3.225.000.000,00	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	16 Sistem Drainase Perkotaan	1.343.749.350,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	117.759.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	125.634.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan	360.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan	360.000.000,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	95,65 % 95,83 %	12.424.150.300,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	95,65 % 95,83 %	16.708.185.000,00	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100 %	12.424.150.300,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100 %	16.708.185.000,00	Penyesuaian kegiatan dengan prioritas pemerintah kota
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	0 Bantuan Teknis	100.000.000,00	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	0 Bantuan Teknis	0,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.490.200.000,00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16.433.100.000,00	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dokumen	733.950.300,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan	5 Dokumen	275.085.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Gedung melalui SIMBG			
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	99.8 % 99.9 %	17.163.040.976,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	99.8 % 99.9 %	10.515.611.700,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase jalan yang dibangun Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dipelihara Prosentase Jembatan yang dibangun	100 % 5,0912 % 6,1250 % 100 %	17.163.040.976,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase jalan yang dibangun Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dipelihara Prosentase Jembatan yang dibangun	100 % 5,0912 % 6,1250 % 100 %	10.515.611.700,00	Rasionalisasi kegiatan dengan sumber dana DAK yang tidak masuk lokasi prioritas
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	300.000.000,00	
	Pembangunan Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	83.002.469,00	Pembangunan Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	0,00	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Blitar, Semua	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	7.841.999.865,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Blitar, Semua	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	1.936.010.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	400 Jembatan	200.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	80 Jembatan	99.990.000,00	
	Rehabilitasi Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	302.999.919,00	Rehabilitasi Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	666.880.000,00	
	Pembangunan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	1.534.999.216,00	Pembangunan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0,00	
	Rehabilitasi Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	5.500.039.507,00	Rehabilitasi Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	6.412.799.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	1.400.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	1.099.932.500,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100 %	821.902.750,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100 %	630.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94,56 %	451.866.850,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94,56 %	480.000.000,00	Penambahan peserta kegiatan
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	291.666.650,00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	300.000.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Lembaga	160.200.200,00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Lembaga	180.000.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	80 %	310.035.900,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	80 %okumen	150.000.000,00	Rasionalisasi standar harga
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecama	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi	0 Perangkat Pendukung	10.000.000,00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan	0 Perangkat Pendukung	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		tan, Semua Kel/Desa	Jasa Konstruksi yang Disediakan				an, Semua Kel/Desa	Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	300.035.900,00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	150.000.000,00	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase pengawasan jasa konstruksi	100 %	60.000.000,00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase pengawasan jasa konstruksi	100 %	0,00	Belum bisa dilaksanakan
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga	10.000.000,00	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga	0,00	
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0 Dokumen	0,00	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	94,75 %	1.510.385.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	94,75 %	1.266.618.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	100 %	582.157.500,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	100 %	389.297.600,00	Rasionalisasi standar harga
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000,00	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	291.911.500,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	79.500.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.995.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.900.000,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	89.251.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	94.897.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	100 %	349.360.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	100 %	274.540.000,00	Rasionalisasi standar harga
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500 Layanan	99.360.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500 Layanan	99.540.000,00	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	12 Dokumen	150.000.000,00	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	12 Dokumen	100.000.000,00	
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	100 %	578.868.200,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	100 %	602.780.400,00	Penambahan sasaran kegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	192.810.200,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	157.828.400,00	
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	76.098.000,00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	78.036.000,00	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	107.960.000,00	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	166.056.000,00	
	Penilaian Perwujudan RTR	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	4 Dokumen	200.000.000,00	Penilaian Perwujudan RTR	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	4 Dokumen	100.000.000,00	
	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	2.000.000,00	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	100.860.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				*2.123.850.000,00*	*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*				*198.110.500,00*	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				*2.123.850.000,00*	*URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN*				*198.110.500,00*	
10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100 %	23.850.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100 %	25.030.500,00	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	100 %	23.850.000,00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	100 %	25.030.500,00	Penambahan sasaran kegiatan
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	23.850.000,00	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	25.030.500,00	
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	99 %	2.100.000.000,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	99 %	173.080.000,00	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen pertanahan yang tersusun	99 %	2.100.000.000,00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen pertanahan yang tersusun	99 %	173.080.000,00	Rasionalisasi standar harga serta pengalihan biaya pembebasan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1	1 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1	1 Laporan	50.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa	(Satu) Kabupaten/Kota				Kel/Desa	(Satu) Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	123.080.000,00	
	Total				63.051.923.610,00	Total				47.606.751.601,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari pelaksanaan musrenbang maupun hasil Pokok- pokok Pikiran DPRD. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tahun 2025

A. USULAN POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Kerusakan jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder)	Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RT 1 RW 9 tahap 2 Jl. Sungai Hulu Barat Kel. Kauman Kota Blitar, Kota Blitar	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	20	Meter	Usulan disetujui
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sungai jl. Pemuda Sumpono Gg.III RW 03 Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar , Kota Blitar	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	175	Meter Persegi	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	RT 03 RW 05 Cabean Kelurahan Plosokerep, Kota Blitar	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	20	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		RT 1 RW 7 Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar		20	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dusun Pengkol RT 05 RW 5 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	20	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JL. Halmahera RT 2 RW 5 Kel. Klampok Kec. Sananwetan, Kota Blitar	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	30	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jalan bogowonto rt 03 rw 07 kel pakunden kec sukorejo (Utara rumah nya bapak Ferdinanto), Kota Blitar	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	30	m	Usulan disetujui
	Jaringan drainase belum memadai/rusak		Jl. Komberpol Duriat RT.1 RW 4 (sebelah barat pak.H.Toifuri selatan Jembatan) Usulan Bpk.Joko 081233741988 , Kota Blitar		50	1m.x50m.	Usulan disetujui
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai		Jl. Wakhid Hasyim Tanggung Santren (Persawahan)., Kota Blitar		97	m	Usulan disetujui
	Akses sarana sanitasi yang layak belum memadai		Jl.Biak RT 02 RW 04 Kel. Plosokerep kec. Sananwetan. , Kota Blitar		20	m	Usulan disetujui
	Akses sarana sanitasi yang layak belum memadai		Jl. Kenari RT 03 RW 03 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan. , Kota Blitar		30	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)		Jl. Sudarmo barat Kantor Kemenag Kabupaten. , Kota Blitar		20	m	Usulan disetujui
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai		JL. MAHAKAM KELURAHAN TANJUNGSARI, PEREMPATAN PASAR PAHING KE BARAT. SISI IRIGASI JALAN SEBELAH SELATAN., Kota Blitar		105	METER KUBIK	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		JL. KALI NGEBEL KEL. TANJUNGSARI KOTA BLITAR, MENGHUBUNGI SAUDARA MAHFUD (RUKEM) NO. HP : 082245139779, Kota Blitar		20	m	Usulan disetujui
	Akses sarana sanitasi yang layak belum memadai	Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jl. Tirtoyudo Kelurahan Blitar (-8.0976015 112.1429134), Kota Blitar	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	200	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jl. Bungur No.8 Kecamatan Sukorejo Lat -8.101437 Long112.158903, Kota Blitar	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	75	m	Usulan disetujui
	Jaringan drainase belum memadai/rusak	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Raden Fatah Santren Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul., Kota Blitar	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	100	1.m x 100,m	Usulan disetujui
	Jaringan drainase belum memadai/rusak	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Mahakam RT 04 RW 09 Kel. Tanjungsari., Kota Blitar	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	300	200.mx1.5.m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		Jl. Cokrodipo RT 02 RW 08 Kel.Gedog, Sananwetan, Kota Blitar		503	meter persegi	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		Jl. Wungu RT 01 RW 02 – RT 03 RW 04 Rembang , Kota Blitar		100	meter persegi	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jl. Kalimas RT.2 RW.5 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Depan Masjid Al-Huda ke barat, Kota Blitar	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	30	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Citandui RT 3 RW 5 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1	Ls	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Timor RT 01 RW 14 Sananwetan (utara jalan), Kota Blitar	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	250	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		Jl. Arjuno RT 5 RW 4 dan RT 4 RW 4 Kepanjen Lor Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar		400	meter persegi	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		RT.3 RW.7 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar		220	meter	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		Jl. Turi Selatan RT 2 RW 14 Kel. Turi Kec. Sukorejo, Kota Blitar		13,6	m3	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jl. Pemuda Sumpono Gg.III kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar, Kota Blitar	Persentase jalan dalam kondisi baik	900	Meter Persegi	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Mangga gg 3 RT 01/ rw03 Kel Karangsari kec sukorejo, Kota Blitar	* Persentase jembatan yang dipelihara * Persentase jalan yang dibangun * Persentase jembatan yang dibangun * Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	525	m	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan Gilisilat RT 1 RW 5 Karangtengah, Kota Blitar	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	900	m	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan		Jl. Sawungaling Tenggah Ponpes Tahfidz quran Ke Utara. Santren. Tanggung., Kota Blitar		300	3.mx200,m	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan		Jalan Ir Soekarno gg Karyo Pitoyo RT 1 RW 9, Jatimalang, Sentul, Kota Blitar		432	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)		Jl. Pamungkur Barat Gg. VIII RT 03 RW 01 Kraupan Kel. Blitar., Kota Blitar		14	3.5mx4m.	Usulan disetujui
	Kerusakan jalan kota dan utilitasnya		Jl. Trowulan Gg. I, III, V dan Jl. Candi Pawon., Kota Blitar		1600	300m.x4m.	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jl. Ciliwung RT.3 RW.5 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar	Persentase jalan dalam kondisi baik	200	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Ciliwung RT.2 RW.4 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar	* Persentase jembatan yang dipelihara* Persentase jalan yang dibangun* Persentase jembatan yang dibangun* Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	200	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Jalan Joko Kandung gg I gg makam Gedhong Tengah RT 2/4 Kel. Blitar, sukorejo, Kota Blitar	Panjang jalan yang direhabilitasi	122	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)		arah Mushola Al huda RT 3 RW 3 kelurahan Plosokerep, Kota Blitar		100	m	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		Jl. D.I Panjaitan Gang Depan Masjid RT 2 RW 2 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar		1	Ls	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)		Jl. Sultan Agung RT 3 RW 9, Kota Blitar		200	m	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan		Jl. Kali Brantas Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar (pertigaan trafig light sampai depan indo mart.), Kota Blitar		200	METER PERSEGI	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (drainase)		Jl. Ir soekarno. Utara makam bungkarno timur jalan RT.03 RW.11 Bendogerit, Kota Blitar		420	meter persegi	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (jalan)		Jl. Pamenang gang melati tembus gang mawar RT.04 RW.06 Bendogerit, Kota Blitar		215	meter	Usulan disetujui

B. USULAN HASIL DARI MUSRENBANG

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Kerusakan jalan kota dan utilitasnya	Program : PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Jl Kalibrantas RT 1 RW 9, Kota Blitar	IK Program : Persentase jalan dalam kondisi baik IK Keggiatan : * Persentase jembatan yang dipelihara * Persentase jalan yang dibangun * Persentase jembatan yang dibangun * Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi IK Sub Kegiatan : Jumlah jalan yang direhabilitasi	1	Ls	Usulan disetujui
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan drainase)		Jl. R.A Kartini RT.05/RW.01 Kel. Kepanjenlor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar. Barat Indomaret lama, depan Pasar Pon selatan jalan., Kota Blitar		30	meter	Usulan disetujui
	Kerusakan jalan kota dan utilitasnya		Jl. Sentot Prawirodirjo RW 4 Dekat Masjid Baitul Hikmah, Kota Blitar		50	meter	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai		Jl. Rambutan Rt 03 Rw 06 selatan makam mbh Seh, Kota Blitar		-	-	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan		Jl. Rambutan Rt 03 Rw 06, makam umum karangsari, Kota Blitar		1	Ls	Usulan disetujui
	Jaringan drainase belum memadai/rusak	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Jalan sedap malam Rt 02 Rw 14, Kota Blitar	Ik Program : Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik IK Kegiatan : Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara IK Sub Kegiatan : Jumlah sistem drainase	18	meter	Usulan disetujui
	Kerusakan jalan kota dan utilitasnya		Jl Kalibrantas Rt 3 RW 1, Kota Blitar		150	meter	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Jaringan drainase belum memadai/rusak	Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Tanjung (barat Apotek Wijaya) ke utara, RT 01 dan RT 02 RW 08 Kelurahan Sukorejo , Kota Blitar, Sukorejo, Kota Blitar	perkotaan yang direhabilitasi	1	paket	Usulan disetujui
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai	Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jalan Bengawan Solo Rt 05 Rw 09 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar	IK Program : Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik IK Kegiatan : Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan IK Sub Kegiatan : Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	167	m	Usulan disetujui
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai		Jl. Joko Kandung Kelurahan Blitar, Kota Blitar		17	m	Usulan disetujui
	Jaringan irigasi perkotaan (primer dan sekunder) belum memadai		Jalan sekrapyak kelurahan Blitar, Kota Blitar		16	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan	Program : Penyelenggaraa jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan Bogowonto RT 3 RW 6, Kota Blitar	IK Program : Persentase jalan dalam kondisi baik IK Kegiatan : * Persentase jembatan yang dipelihara * Persentase jalan yang dibangun * Persentase jembatan yang dibangun * Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi IK Sub Kegiatan : Jumlah jembatan yang direhabilitasi	1	Ls	Usulan disetujui
	Kerusakan jalan kota dan utilitasnya		Jl. Cokroningrat Jl. Antasari RW 4, Kota Blitar		100	m	Usulan disetujui
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan		Jl. Pemuda Sumpono RT 001 RW 004 dan RT 003 RW 003 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Kota Blitar		300	m	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Akses jalan belum memadai/kualitas jalan tidak sesuai dengan beban dan volume kendaraan	Program : Penyelenggaraa jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Jl. Kedondong (Kali Khetek) Wilayah RW.02 dan RW.04 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Kota Blitar	IK Program : Persentase jalan dalam kondisi baik IK Keggiatan : * Persentase jembatan yang dipelihara * Persentase jalan yang dibangun * Persentase jembatan yang dibangun * Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi IK Sub Kegiatan : Jumlah jembatan yang direhabilitasi	1	Ls	Usulan disetujui

NO	USULAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	STATUS
	Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman belum tersedia/kurang/rusak (Pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan drainase)	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Cimandiri RT 01 RW 09, -8.070511666666667, 112.17143499999999, 300 x 0,8 m, Kota Blitar	IK Program : Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik IK Kegiatan : Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara IK Sub Kegiatan : Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	300	meter	Usulan disetujui

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran:
   - ❖ Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   - ❖ Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
   - ❖ Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   - ❖ Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   - ❖ Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
   - ❖ Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
   - ❖ Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
   - ❖ Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
   - ❖ Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat
   - ❖ Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
   - ❖ Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan menjamin pemerataan, dengan sasaran:
   - ❖ Pembangunan Wilayah Sumatera;
   - ❖ Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
   - ❖ Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
   - ❖ Pembangunan Wilayah Kalimantan;
   - ❖ Pembangunan Wilayah Sulawesi;
   - ❖ Pembangunan Wilayah Maluku; dan
   - ❖ Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
   - ❖ Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
   - ❖ Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
   - ❖ Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
   - ❖ Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   - ❖ Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
   - ❖ Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
   - ❖ Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;

- ❖ Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- ❖ Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- ❖ Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- ❖ Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
- ❖ Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatiF

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran:

- ❖ Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- ❖ Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- ❖ Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- ❖ Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- ❖ Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :

- ❖ Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- ❖ Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- ❖ Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.

7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran:

- ❖ Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
- ❖ Optimalnya kebijakan luar negeri;
- ❖ Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
- ❖ Terjaganya stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan *tugas pokok dan fungsi* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yaitu *melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah* dan tugas pembantuan, dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pencapaian arah kebijakan nasional tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional yang berkualitas, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka diharapkan

rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar-bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Optimalisasi pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya;
- Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya;
- Peningkatan ketersediaan jembatan;
- Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan;
- Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi;
- Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung;
- Peningkatan ketersediaan bangunan gedung;
- Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota;
- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota;
- Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi, kelembagaan konstruksi dan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi;
- Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL;
- Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang;
- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang;
- Peningkatan ketersedian dokumen perencanaan tata ruang; dan
- Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas PU dan Penataan Ruang

Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan realisasi Tahun 2024		Target	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	86.77	88.37	87.18	88.37	89.69	90.98
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	Rata – rata penjumlahan persentase jalan dalam konsisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoardan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	76.40	79.05	79,10	79.05	81.00	82.95
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indek infrastruktur Sumber Daya Air	Rata- rata penjumlahan persentase saluran pengairan dan persentase drainase dalam kondisi baik	97.75	98.42	98.50	98.42	99.25	100
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100	94.70	94.80	94.85	94.80	94.90	95.00
		Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	47.83	57.50	57,75	57.50	57.75	60.87

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan realisasi Tahun 2024		Target	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	2025	2026
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	97	98.70	98	98.70	99	100
			Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	94	98.4	96	98.4	99.215	100
		Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100 %	9.45	9.36	9.82	9.36	10.19	10.56
		Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah raumah tangga) x 100%	2.70	3.13	3,18	3.13	3.19	3.44
3	Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Luas lahan yang sesuai pemanfaatannya dibagi luas wilayah Kota Blitar	95,40	95,73	95,45	95,73	96,25	96,85
		Meningkatnya	Persentase	Rata – rata penjumlahan persentase perencanaan	44.63	52.83	52,88	52.83	54.12	58.21

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan realisasi Tahun 2024		Target	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	2025	2026
		kualitas penyelenggaraan penataan ruang	penyelenggaraan penataan ruang	penataan tuang dan persentase pengendalain pemanfaatan ruang						
4	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun berjalan	85 (A)	85 (A)	85.50 (A)	85.90 (A)	85.95 (A)	86 (A)
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun berjalan	85 (A)	85 (A)	85.50 (A)	85.90 (A)	85.95 (A)	86 (A)

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Pada Rencana Kerja (Renja) Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan ditetapkan dengan mempetimbangkan beberapa hal diantaranya :

1. Mendukung pencapaian arah kebijakan RPJMD Kota Blitar 2021-2026, yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dan Normalisasi Ekonomi Daerah melalui pengembangan layanan berbasis IT yang terintegrasi, peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan pelaku jasa konstruksi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pengendalian tata ruang;
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4. Tindak lanjut LKJiP Tahun 2023;
5. Pencapaian program prioritas daerah dan perangkat daerah.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar pada Renja Tahun 2025 adalah 10 program, 22 kegiatan, dan 78 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 47.606.751.601,00

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel. 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang tupoksi

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart	

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang tupoksi
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penunjang tupoksi
	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Penunjang tupoksi
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Penunjang tupoksi
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Penunjang tupoksi
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Penunjang tupoksi
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penunjang tupoksi
	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	SPM dan LKJIP
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	SPM dan LKJIP
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	SPM dan LKJIP
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	SPM dan LKJIP
	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM dan LKJIP
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	SPM
	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	
	1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Penunjang tupoksi
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Penunjang tupoksi
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Penunjang tupoksi
	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	❖ Persentase gedung pemerintahan yang dibangun ❖ Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
						Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	LKJIP
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Penunjang tupoksi
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	LKJIP
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penunjang tupoksi
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	❖ Persentase jalan dalam kondisi baik ❖ Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	❖ Persentase jalan yang dibangun ❖ Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi ❖ Persentase jembatan yang dipelihara ❖ Prosentase Jembatan yang dibangun	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	LKJIP
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Penunjang tupoksi
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Penunjang tupoksi
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Penunjang tupoksi
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Penunjang tupoksi
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Penunjang tupoksi
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Penunjang tupoksi
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Penunjang tupoksi
	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Penunjang tupoksi
	1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Penunjang tupoksi
	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	LKJIP
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Penunjang tupoksi

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2					3	4	5
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penunjang tupoksi
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Penunjang tupoksi
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang tupoksi
	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penunjang tupoksi
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penunjang tupoksi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah "*Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi*", dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas

1. Prioritas Daerah 1:
   Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Prioritas Daerah 2:
   Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Prioritas Daerah 3:
   Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Prioritas Daerah 4:
   Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Prioritas Daerah 5:
   Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Prioritas Daerah 6:
   Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan *tugas pokok dan fungsi* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yaitu *melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan*. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar mendukung *Prioritas pembangunan 1* yaitu *Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan* dan *Prioritas Pembangunan 4* yaitu *Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup*.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program
Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan	Blitar Melayani	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah	❖ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Blitar Membangun dan Kondusif	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah	❖ Program Penyelenggaraan Jalan ❖ Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ❖ Program Penataan bangunan Gedung ❖ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ❖ Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ❖ Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah ❖ Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase ❖ Program penyelenggaraan Penataan Ruang ❖ Program penyelesaian Sengketa tanah Garapan ❖ Program penatagunaan tanah

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023
pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Optimalisasi fungsi pengendalian dan melaksanakan penyusunan	- Penyelesaian penyusunan revisi RDTR dan RTRW dengan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian, Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	revisi RDTR dan revisi RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dan Instansi terkait lain - Peningkatan pengendalian tata ruang melalui integrasi layanan pemanfaatan ruang kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW kabupaten/kota
2	Sinkronisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur	- Peningkatan kualitas data infrastruktur sebagai salah satu dasar perencanaan pengelolaan infrastruktur - Integrasi antar data infrastruktur terkait melalui pemanfaatan teknologi informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	- Monitoring dan evaluasi kondisi bangunan gedung negara dan fasilitas umum melalui penyediaan data dan perencanaan peningkatan kualitas bangunan sesuai standar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
			Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten_Kota
4	Optimalisasi pengelolaan air limbah	- Peningkatan layanan pengolahan limbah domestik untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik di kawasan rawan pencemaran - Pembinaan masyarakat sebagai pengelola air limbah terutama pada KSM pengelola IPAL	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
5	Peningkatan akses air minum	- Peningkatan koordinasi dan kerja sama penyediaan air minum layak dan aman bersama BUMD PDAM - Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di kawasan rawan air dan tidak terjangkau layanan PDAM - Pembinaan masyarakat pengelola SPAM agar tetap berfungsi dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum daqn penataan Ruang Kota Blitar 2024 adalah 11 program, 21 kegiatan dan 78 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.606.751.601,00				63.199.418.021,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				47.408.641.101,00				60.969.375.521,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,9 nilai	7.682.852.952,00			83 (A)	7.234.603.867,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	32.526.216,00			100%	54.799.500,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	10 Dokumen	18.051.216,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	7.717.500,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kota Blitar	1 Laporan	14.475.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	47.082.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	5.278.599.238,00			100 %	5.701.612.642,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	36 Orang/bulan	5.277.858.478,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Orang/bulan	5.699.251.402,00
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	5 Laporan	740.760,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		5 Laporan	2.361.240,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	354.030.799,00			100 %	194.536.253,00
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	3 Paket	166.044.999,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Paket	95.474.003,00
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	60 Orang	187.985.800,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		60 Orang	99.062.250,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	773.368.214,00			100 %	381.272.850,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	5 Paket	8.163.100,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		5 Paket	15.387.750,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	11 Paket	51.467.974,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		11 Paket	36.919.050,00
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	12 Paket	3.913.440,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		12 Paket	5.250.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	4 Paket	79.818.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		4 Paket	45.214.050,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	2 Paket	16.537.200,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		2 Paket	16.868.250,00
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar	24 Dokumen	7.200.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		24 Dokumen	7.560.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	80 Laporan	406.331.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		80 Laporan	206.850.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	100 Dokumen	199.937.500,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 Dokumen	47.223.750,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	125.358.700,00			100 %	74.126.473,00
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar	32 Unit	15.700.700,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		32 Unit	46.200.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar	8 Unit	109.658.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		8 Unit	27.926.473,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	507.932.620,00			100 %	380.541.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	4 Laporan	154.152.620,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		4 Laporan	98.074.200,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	104 Laporan	353.780.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		104 Laporan	282.466.800,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang terpelihara sesuai standart		100 %	611.037.165,00			100 %	447.715.149,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	28 Unit	143.300.900,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		28 Unit	138.218.199,00
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar	39 Unit	3.999.600,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		39 Unit	10.500.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	20 Unit	39.946.665,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		20 Unit	74.123.700,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	3 Unit	342.290.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Unit	183.750.000,00
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	3 Unit	81.500.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Unit	41.123.250,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		99 %	4.588.834.949,00			100	12.863.965.551,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan		18,05 %	4.588.834.949,00			21,89	12.863.965.551,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan dan pemeliharaan							
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kota Blitar	0,346 KM	993.925.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		0,346	2.170.455.000,00
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Blitar	1,743 KM	2.311.975.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1.743	4.478.050.881,00
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Blitar	0 KM	0,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		2.500	3.949.838.550,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Blitar	3,054 KM	1.082.934.949,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3.054	1.793.121.120,00
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kota Blitar	3 Dokumen	200.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Dokumen	472.500.000,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik		90,1 %	154.567.600,00			90,2	157.500.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Persentase SPAM yang terbangun		89,47 %	154.567.600,00			100	157.500.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Blitar	1 Dokumen	154.567.600,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1	157.500.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik		85 %	2.414.490.600,00			86	3.901.107.210,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun		89,47 %	2.414.490.600,00			100	3.901.107.210,00
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Kota Blitar	20 Unit	160.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		20 Unit	506.695.350,00
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kota Blitar	10 M^3/Hari	522.324.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		10 M^3/Hari	548.440.200,00
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Blitar	36 Rumah Tangga	57.684.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		36 Rumah Tangga	855.381.660,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										RETRIBUSI DAERAH - LRA			
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kota Blitar	25 Rumah Tangga	1.347.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		25 Rumah Tangga	1.587.600.000,00
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Blitar	10 Orang	93.982.600,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		10 Orang	84.000.000,00
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kota Blitar	1 Dokumen	233.500.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Dokumen	318.990.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		99,5 %	3.447.480.300,00			100 %	5.279.146.950,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara		1,93 %	3.447.480.300,00			2,21 %	5.279.146.950,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kota Blitar	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.618.096.950,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		10 Sistem Drainase Perkotaan	1.391.250.000,00
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Blitar	16 Sistem Drainase Perkotaan	1.343.749.350,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		16 Sistem Drainase Perkotaan	3.386.250.000,00
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Blitar	1 Dokumen	125.634.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Dokumen	123.646.950,00
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Blitar	3 Sistem Drainase Perkotaan	360.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA			378.000.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	❖ Persentase gedung pemerintahan yang dibangun ❖ Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun		95,65 % 95,83 %	16.708.185.000,00			100 % 100 %	12.835.357.815,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan		100 %	16.708.185.000,00			100 %	12.835.357.815,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	2 Dokumen	16.433.100.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		2 Dokumen	12.064.710.000,00
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Blitar	5 Dokumen	275.085.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		5 Dokumen	770.647.815,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	❖ Persentase jalan dalam kondisi baik ❖ Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik		99.8 % 99.9 %	10.515.611.700,00			100% 100%	16.322.291.255,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	❖ Persentase jalan yang dibangun ❖ Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi		100 % 5,09 % 6,12 %	10.515.611.700,00			100 % 5,09 % 6,12 %	16.322.291.255,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						❖ Persentase jembatan yang dipelihara ❖ Prosentase Jembatan yang dibangun		100 %				100 %	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Blitar	3 Dokumen	300.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Dokumen	315.000.000,00
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Blitar	2 KM	1.936.010.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		2 KM	8.234.099.858,00
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Blitar	400 Jembatan	99.990.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		400 Jembatan	210.000.000,00
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kota Blitar	3 Jembatan	666.880.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Jembatan	318.149.915,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Blitar	1 KM	6.412.799.200,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 KM	5.775.041.482,00
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Blitar	1 KM	1.099.932.500,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 KM	1.470.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar		100 %	630.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 %	789.497.888,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat		94,56 %	480.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 %	474.460.193,00
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kota Blitar	100 Orang	300.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 Orang	306.249.983,00
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar	250 Lembaga	180.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		250 Lembaga	168.210.210,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI		80 %	150.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100%	315.037.695,00
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kota Blitar	4 Dokumen	150.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		4 Dokumen	315.037.695,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang		94,75 %	1.266.618.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 %	1.585.904.985,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan		100 %	389.297.600,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 %	611.265.375,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	penetapan RTRW dan RRTR Kota							
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar	2 Dokumen	100.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		2 Dokumen	78.750.000,00
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Dokumen	79.500.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Dokumen	306.507.075,00
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Dokumen	114.900.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		2 Dokumen	132.294.750,00
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kota Blitar	1 Laporan	94.897.600,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Laporan	93.713.550,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang		100 %	274.540.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		100 %	366.828.000,00
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kota Blitar	500 Layanan	99.540.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		500 Layanan	104.328.000,00
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Blitar	12 Dokumen	100.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		12 Dokumen	157.500.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Blitar	1 Sistem Informasi	75.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Sistem Informasi	105.000.000,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti		100 %	602.780.400,00			100 %	607.811.610,00
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar	3 Dokumen	157.828.400,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		3 Dokumen	202.450.710,00
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Blitar	1 Dokumen	78.036.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Dokumen	79.902.900,00
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Blitar	12 Laporan	166.056.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		12 Laporan	113.358.000,00
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Kota Blitar	4 Dokumen	100.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		4 Dokumen	210.000.000,00
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Blitar	1 Berita Acara	100.860.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Berita Acara	2.100.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				198.110.500,00				2.230.042.500,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				198.110.500,00				2.230.042.500,00
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti		100 %	25.030.500,00			100 %	25.042.500,00
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi		100 %	25.030.500,00			100 %	25.042.500,00
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Berita Acara	25.030.500,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Berita Acara	25.042.500,00
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat		99 %	173.080.000,00			100%	2.205.000.000,00
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun		99 %	173.080.000,00			100%	2.205.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Laporan	50.000.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Laporan	105.000.000,00
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Dokumen	123.080.000,00	RETRIBUSI DAERAH - LRA		1 Dokumen	2.100.000.000,00
Total									47.606.751.601,00				63.199.418.021,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Renja berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangann terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan

   kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;

   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berkewajiban

   untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025;

   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

3. Rencana Tindak Lanjut

   Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

   Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

   Penataan Ruang ini, diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih matang, sehinggga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.

7. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode1 (satu) tahun. Renja disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan, maka Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025, Renstra Tahun 2021 - 2026, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat (Musrenbang), Pokok-pokok pikiran DPRD serta inovasi-inovasi OPD.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan;

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan tahun 2024. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, review terhadap rancangan awal RKPD 2025, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III Tujuan dan Sasaran, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan, menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan

program dan kegiatan, rekapitulasi dan penjelasan program dan kegiatan;

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan review hasil evaluasi pelakasanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai darisuatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pencapaian target kinerja dapat disajikan dalam penjelasan berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akses rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
			2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
			2. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
sampai dengan Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
					Tujuan : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255	Indeks	0,248	0,251	0,251	100	0,251	0,251	98,43
					Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,78	%	96,37	96,99	97,17	100,19	97,61	97,61	98,82
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase tingkat hunian Rusunawa	95	%	95	95	95	100	95	95	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	*04*	*02*	*2.01*		*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate*	*90*	*%*	*70*	*75*	*75*	*100*	*80*	*80*	*100*
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	1	50
1	*04*	*02*	*2.02*		*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	400	Orang	100	100	100	100	50	250	62,5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	*04*	*02*	*2.03*		*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota*	*100*	*%*	*NA*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40	Unit	NA	10	0	-	6	6	15
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	84,45	Indeks	87,90	80,57	86,26	107,06	80,77	86,26	102,14
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	Dokumen	NA	1	1	100	1	2	50
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	82,73	%	20	20,11	33,91	168,62	20,11	73,42	88,75
						Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12	%	1,03	1,03	1,65	160,19	1,03	3,71	90,05
1	*04*	*04*	*2.01*		*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan*	*100*	*%*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*48,61*	*48,61*	*48,61*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	432	Unit	214	171	177	103,51	108	499	115,5
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23	%	6,37	12,65	12,09	95,57	13,09	13,09	25,06
1	*04*	*03*	*2.03*		*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya*	*910*	*Unit*	*58*	*192*	*110*	*57,29*	*19*	*187*	*24,29*
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	770	Unit	58	105	110	104,76	19	187	24,29
					Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85.64	%		74.47	76,56	102,81	78.19	78.19	91,3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
					Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89.89	%	76,83	73.94	77,13	104,31	79.26	79,26	88,17
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	*Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman*	72	%	78,01	67.52	78,09	115,65	69,15	78,09	108,46
						Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	75,66	%	75,66	66,27	76,17	114,94	69,4	76,17	100,67
1	*04*	*03*	*2.02*		*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun*	*32*	*Dokumen*	*8*	*4*	*4*	*100*	*5*	*17*	*53,13*
1	04	03	2.02	004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8	Laporan	NA	2	2	100	2	4	50
1	04	03	2.02	008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	12	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6	Kelompok	2	NA	NA	NA	2	4	66,67
1	*04*	*03*	*2.03*		*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	*Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik*	*140.663*	*m*	*125663*	*67664*	*183969,3*	*146,39*	*130.663*	*183969,3*	*130,79*
						Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	*85.663*	*m*	*103547*	*67664*	*104245,4*	*154,06*	*73.663*	*104245,4*	*121,69*
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	16	Laporan	NA	2	2	100	4	6	37,5
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	NA	1	1	100	1	2	50
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	68	Ha	NA	4,8	8,54	177,92	4,5	13,04	19,18

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%	74	64	86	134,375	66	86	122,86
						Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%	74,16	64	87	135,94	66	87	124,29
1	*04*	*05*	*2.01*		*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik*	*21475*	*m*	*13698,90*	*15475*	*15922,63*	*102,89*	*17475*	*17475*	*81,37*
						Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	*24123*	*m*	*24071*	*21123*	*28134,82*	*133,19*	*22123*	*22123*	*91,71*
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	Lokasi	NA	9	9	100	4	13	81,25
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16	Laporan	NA	12	12	100	4	16	100
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	Nilai	A (85,88)	A 84,51	A 86,30	102,12	A 86,30	A 86,30	102,05

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	Nilai	A (85,88)	A 84,51	A 86,30	102,12	A 86,30	A 86,30	102,05
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,45	indeks	87,90	80,57	85,73	106,86	84,25	85,73	101,52
1	*04*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	15	15	15	100	15	45	75
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Laporan	12	12	12	100	12	36	75
1	*04*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	0rang/bulan	25	25	25	100	25	25	96,15

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28	Laporan	7	7	7	100	7	21	75
1	*04*	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	NA	2	2	100	2	4	50
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang	NA	49	49	100	50	99	49,5
1	*04*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	NA	1	1	100	1	2	50
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	NA	3	3	100	3	6	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	Paket	NA	4	4	100	4	8	50
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Paket	NA	30	31	103,3	30	61	50,83
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	NA	1	1	100	1	2	50
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	40	40	46	115	40	126	78,75
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20	Dokumen	NA	NA	NA	NA	5	5	25
1	*04*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	*89*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*87*	*87*	*97,75*
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	NA	2	2	100	2	4	36,36
1	*04*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132	Laporan	NA	26	24	92,31	24	48	36,36
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1105	Laporan	NA	247	247	100	264	511	46,24
1	*04*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	*100*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	10	10	100	10	10	100
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144	Unit	4	77	77	100	25	106	73,61

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 realisasi program / kegiatan telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Mekanisme kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mencapai target program dan kegiatan melalui perjanjian kinerja serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- Adanya dukungan organisasi terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dari table hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 maupun Renstra dapat dikatakan berhasil walaupun belum optimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Terkait kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

No.	INDIKATOR	IKU/IKK/ SPM	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase rumah layak huni	IKU	96,37	96,99	97.61	98.23	98.79	97,43	98,13	98,13	98.23	98.79	
	Persentase perumahan dan Kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	IKU	68,62	73,94	79.26	84.57	89.89	76,83	77,13	77,13	84.57	89.89	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	INDIKATOR	IKU/IKK/ SPM	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah												
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani	IKK	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,176	8,26	4,354	16,9	16,9	
	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	IKK	236	236	236	236	236	214	287	178	236	236	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IKK	40.761	41.059	41.357	41.655	41.953	40550	3077	3077	41.655	41.953	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tidak dapat terlepas permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan terkait kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

a. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni
b. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh
c. Perubahan Tupoksi Dinas dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 50-5889 dimana kewenangan jalan lingkungan dan saluran drainase permukiman berpindah ke Dinas PUPR sehingga mempengaruhi pencapaian target indikator yang diampu dinas.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas tentunya berdampak pada terhambatnya pencapaian visi misi kepala daerah. Oleh sebab itu perlu dicari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Selain permasalahan dan hambatan, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dihadapkan pada tantangan dan peluang, diantaranya :

a. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan rumah / perumahan semakin meningkat
b. Kemungkinan munculnya kawasan permukiman kumuh baru sebagai imbas pertambahan penduduk

Dengan adanya masalah, hambatan, tantangan serta peluang yang dihadapi, telah memunculkan isu-isu penting yang strategis untuk segera ditindaklanjuti. Isu-isu strategis tersebut adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya prasarana umum (PSU) terutama jalan lingkungan dan saluran drainase pada kawasan kumuh dalam kondisi kurang baik dan masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Blitar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dalam tahap review terhadap rancangan awal RKPD, proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan. Proses review ini dilakukan mengingat rancangan awal RKPD perlu disesuaikan dan diubah sesuai dengan kondisi, data dan kebutuhan saat ini. Dari hasil review tersebut terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan, diantaranya terdapat rumusan kegiatan dan indikator kegiatan yang sebelumnya ada dalam rancangan awal RKPD karena adanya perubahan nomenklatur dan tupoksi Dinas dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan penataan jalan dan saluran drainase lingkungan serta perubahan nomenklatur sub kegiatan seperti sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh semula berada di Program Kawasan Permukiman pindah ke Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh selain itu juga ketersediaan

anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Beberapa kegiatan juga berbeda dari rancangan awal RKPD terkait besaran nominal kegiatan, dan juga perubahan nomenklatur dan penambahan tupoksi Dinas yaitu penataan pemakaman umum di Kota Blitar serta proses pengajuan pembangunan Rusunawa yang menbutuhkan anggaran untuk analisis dampak lingkungan dan juga ketersediaan anggaran menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam analisis kebutuhan tahun 2025.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kota Blitar

Nama PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			12.347.973.855		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			12.747.973.855		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	874.458.679	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	1.540.907.980	
			Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %				Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %		
1.1	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*		*Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate*	*80 %*	*61.974.800*	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*		*Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate*	*80 %*	*630.458.500*	*Penambahan Amdal Rusunawa*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	-	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	535.500.000	Amdal Rusunawa
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	61.974.800	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	5.005.000	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	1 Dokumen	-	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	1 Dokumen	89.953.500	
1.2	*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*		*Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi*	*100 %*	*21.865.000*	*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*		*Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi*	*100 %*	*45.626.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	21.865.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	30.113.000	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	40 Orang	-	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	40 Orang	15.513.000	
1.3	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*		*Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota*	*100 %*	*74.707.350*	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*		*Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota*	*100 %*	*118.916.900*	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	74.707.350	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	83.916.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit	-	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit	35.000.000	
1.4	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*		*IKM Pengelolaan Rusunawa*	*80,77 Indeks*	*715.911.529*	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*		*IKM Pengelolaan Rusunawa*	*B 86,26 Indeks*	*745.906.580*	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	-	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	79.996.000	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	715.911.529	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	665.910.580	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,15 %	2.008.152.100	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	78,09 %	3.062.237.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,40 %				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	76,17 %		
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	13,09 %				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	2,2 %		
2.1	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*		*Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun*	*5 Dokumen*	*85.000.000*	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*		*Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun*	*2 Dokumen*	*174.818.700*	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	1 Dokumen	164.864.200	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	9.954.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*		*Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya*	*276 unit*	*1.923.152.100*	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*		*Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya*	*207 unit*	*2.887.418.900*	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	*73.663 m*				*Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik*	*10424 m 5,4*		
			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	*130.663 m*				*Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik*	*18396 m 9,3*		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	426.305.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	375.487.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	421.839.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	1.871.961.300	penataan dan pengelolaan areal pemakaman umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	32.445.000	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	1.050.007.600	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	607.525.000	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11 %	3.088.478.800	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11 %	1.888.262.100	
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %				Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan*	*95 %*	*3.088.478.800*	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan*	*72,92 %*	*1.888.262.100*	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	108 unit	3.058.478.800	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 unit	1.854.012.100	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	30.000.000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	34.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	66 %	1.245.195.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	86 %	887.046.400	
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	66 %				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	87 %		
4.1	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*		*Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik*	*17475 m*	*1.245.195.000*	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*		*Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik*	*15922 m*	*887.046.400*	
			Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	*22123 m*				*Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik*	*28134 m*		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	1.240.425.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	879.824.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	4.770.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	7.221.600	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25 Indeks	5.097.591.171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,73 Indeks	5.369.519.775	
5.1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	*100 %*	*43.145.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	*100 %*	*10.031.100*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	28.375.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6.611.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.769.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.420.100	
5.2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	*100 %*	*3.425.254.318*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	*100 %*	*3.503.281.361*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang /bulan	3.422.204.318	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang /bulan	3.501.006.361	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	3.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	2.275.000	
5.3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	*100 %*	*108.546.800*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	*100 %*	*133.074.400*	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	69.755.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	86.490.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	38.791.800	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	46.584.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	*100 %*	*342.343.700*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	*100 %*	*349.691.350*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.689.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.909.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.709.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.469.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	13.289.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.385.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	49.025.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	55.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.582.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.926.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	199.923.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	220.407.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	30.125.700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	19.743.650	
5.5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	*88 %*	*26.356.098*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	*88 %*	*114.416.300*	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	11.571.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26.356.098	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	102.844.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	*100 %*	*849.965.755*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	*100 %*	*884.395.800*	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	73.182.055	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	76.488.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264 Laporan	776.783.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan	807.907.800	
5.7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	*100 %*	*301.979.500*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	*100 %*	*374.629.464*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	141.773.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	146.610.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30.085.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	40.654.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.840.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	169.830.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	83.280.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	17.535.464	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Bapak Slamet Jl. Sirsat No. 54 RT 01 RW 01 Karangsari Kota Blitar, Kota Blitar 2. Sri Utami Jl. Jambu No. 54 RT 03 RW 02 Kel. Karangsari Kota Blitar, Kota Blitar 3. BUDIMAN JL. JAMBU NO. 38 RT 03 RW 02 KEL. KARANGSARI KOTA BLITAR 4. MARYANTO JL. KALIDERES NO. 29 RT 01 RW 009 KEL. KAUMAN KOTA BLITAR 5. AGNES TEA PRATIWI JL. KOL. SUGIONO, RT 01 RW 02 KEL. GEDOG, KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR 6. HERU IRAWAN JL. KETAPANG GG. VI NO. 11, RT 02 RW 01 KEL. TLUMPU KOTA BLITAR,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	16 Unit	

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			7. DARTIYAH jl. jambe no. 29 RT 01 RW 01 KEL. TLUMPU			
			8. AKHMAD FARIZ ALFARIZI JL. BENGAWAN SOLO GG. III NO. 6 RT 03 RW 03 KEL. PAKUNDEN			
			9. FATOYAH JL. BENGAWAN SOLO GG. V NO. 11 RT 003 RW 003 KEL. PAKUNDEN			
			10. MASITAH JL. KETAPANG RT 02 RW 01 KEL. TLUMPU			
			11. Sukaji jl. Bengawan Solo RT 03 RW 05 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo			
			12. Mujari Jl. Kasan Sobari No.34 RT 3 RW 12 Kel. Gedog Kec. Sananwetan, Kota Blitar			
			13. Meselan Jl. Brigjen Katamso No.191 RT.2 RW.11 Kel. Gedog Kec. Sananwetan, Kota Blitar			
			14. Surib : RT 03 Rw 05 Jl.Sulawesi, Cabean, Plosokerep			
			15. Marsitun : RT 03 Rw 05 Jl.Sulawesi, Cabean, Plosokerep			
			16. Ali Rosyidi : RT 02 Rw 05 Jl.kenari no			

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			149, Cabean, Plosokerep, Kota Blitar			
2	Pengaspalan jalan P = 800 m L = 5 m	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perum. Kenari Asri Blok R dan S Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan, Kota Blitar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4000 m	
3	Pembangunan pagar pemakaman umum P=75m T=2m	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	RT.2 RW.6 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	150 m2	
4	PEMBUATAN SALURAN AIR P= 250 L= 0.8 M T= 0.6 M (CP: PAK SUKAR 085891811356)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jalan Duku RT 2/1, Kel Karangsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	120 m	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018, arah kebijakan pembangunan daerah dalam bidang perumahan rakyat di daerah adalah :

(a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
(b) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

(1) penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
(2) penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
(3) fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
(4) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
(5) mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
(6) pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
(7) menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
(8) mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan fasilitas umum dasar dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
(9) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam penerapan SPM perumahan rakyat dan mencapai tujuan bidang perumahan rakyat yaitu mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar maka arah kebijakan pembangunan yang di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

(1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
(2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

(1) infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni;
(2) pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
(3) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;
(4) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakatberpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga; penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tagga;
(5) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; bantuan stimulant pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga;
(6) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga;
(7) mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah;
(8) peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
(9) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 -2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan 1 : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio Rumah layak huni adalah perbandingan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya terhadap jumlah penduduk.	0,250	0,251	0,251	0,253	0,255
	Sasaran 1 : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Persentase Rumah layak huni adalah persentase jumlah rumah layak huni yang sesuai dengan standar kelayak hunian terhadap jumlah keseluruhan rumah	96,99	98,13	97,61	98,23	98,79
2	Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang layak merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan kelengkapan dasar dan kelengkapan penunjang fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman	74,47	76,56	78,19	81,91	85,64
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik yang memenuhi standart teknis jalan dan drainase sehingga dapat menunjang lingkungan hunian yang layak	73,94	77,13	79,26	84,57	89,89

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
3	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.	A 84.51	A 86,30	A 86,30	A 86,30	A 86,30
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi	A 84.51	A 86,30	A 86,30	A 86,30	A 86,30

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Mendukung pencapaian SPM atau IKK
1	*04*	*01*	*2. 01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	
1	04	01	2. 01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	04	01	2. 01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	*04*	*01*	*2. 02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	
1	04	01	2. 02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1	04	01	2. 02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	*04*	*01*	*2. 05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	
1	04	01	2. 05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1	04	01	2. 05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	*04*	*01*	*2. 06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	
1	04	01	2. 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2. 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2. 06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1	04	01	2. 06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2. 06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1	04	01	2. 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	04	01	2. 06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1	*04*	*01*	*2. 07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	
1	04	01	2. 07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1	04	01	2. 07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1	*04*	*01*	*2. 08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	
1	04	01	2. 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
						Air dan Listrik yang Disediakan	
1	04	01	2. 08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	*04*	*01*	*2. 09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	
1	04	01	2. 09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1	04	01	2. 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	04	01	2. 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1	04	01	2. 09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Mendukung Pencapaian SPM, IKK
						Persentase tingkat hunian Rusunawa	
1	*04*	*02*	*2. 01*		*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate*	
1	04	02	2. 01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusu	
1	04	02	2. 01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	
1	04	02	2. 01	0001 0	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*04*	*02*	*2. 02*		*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi*	
1	04	02	2. 02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawa n Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	04	02	2. 02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	
1	*04*	*02*	*2. 03*		*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/ relokasi program kabupaten/ kota*	
1	04	02	2. 03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
1	04	02	2. 03	0009	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	*04*	*02*	*2. 05*		*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus*	*IKM Pengelolaan Rusunawa*	
1	04	02	2. 05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
1	04	02	2. 05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Mendukung pencapaian IKK, Tupoksi, Tematik Kemiskinan
						Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	
						Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	
1	*04*	*03*	*2. 02*		*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun*	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	04	03	2. 02	0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	
1	04	03	2. 02	0012	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	
1	*04*	*03*	*2. 03*		*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya*	
						Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	
						Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	
1	04	03	2. 03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
1	04	03	2. 03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
1	04	03	2. 03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
1	04	03	2. 03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Mendukung pencapaian IKK, Tupoksi, Tematik Kemiskinan
						Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	
1	*04*	*04*	*2. 01*		*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan*	
1	04	04	2. 01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	04	04	2. 01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
1	*04*	*05*			*PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)*	*Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan*	Mendukung pencapaian IKK, Tupoksi
						Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	
1	*04*	*05*	*2. 01*		*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik*	
						Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	
1	04	05	2. 01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	
1	04	05	2. 01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Prioritas Daerah 1:

   Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

2. Prioritas Daerah 2:

   Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital Dan Investasi

3. Prioritas Daerah 3:

   Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dan SDM Yang Berdaya Saing

4. Prioritas Daerah 4:

   Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

5. Prioritas Daerah 5:

   Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Peningkatan Ekonomi Digital

6. Prioritas Daerah 6:

   Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mendukung prioritas pembangunan 1 yaitu Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dan prioritas pembangunan 4 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program
Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan	Blitar Melayani	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Rumah Swadaya,	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Blitar Membangun dan Kondusif	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pencapaian SPM	Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan PSU

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

pada Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni sesuai Standar	○ Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program ○ Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2	Meningkatkan kualitas sarana prasarana di	○ Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan	Program Kawasan Permukiman

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	perumahan dan kawasan permukiman	jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
3	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	○ Melakukan review target kinerja dalam perubahan renstra ○ Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi ○ Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk mencapai visi misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dijabarkan melalui program dan kegiatan teknis yang berisi indikator kinerja, target serta pendanaan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM serta pendayagunaan potensi yang ada di daerah.

Pada tahun 2025 jumlah program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sejumlah 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 40 (empatpuluh) sub kegiatan. Lokasi program dan kegiatan adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Kota Blitar. Untuk dana/pagu indikatif bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Fiskal.

Untuk rumusan program dan kegiatan tahun 2025 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Blitar

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.747.973.855				17.162.914.181,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.747.973.855				17.162.914.181,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.747.973.855				17.162.914.181,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Kota Blitar	100 %	1.540.907.980			100 %	1.321.300.217
		Persentase tingkat hunian Rusunawa		95 %				95 %	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.02.2.01	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate*		*85 %*	630.458.500			*90 %*	*247.255.500*
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		2 Dok	535.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	141.750.000
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dok	5,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	5.505.500
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dok	89.953.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	100.000.000
1.04.02.2.02	*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi*		*100 %*	45.626.000			*100 %*	*47.907.300*

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		60 orang	30.113.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		60 orang	31.618.650
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		40 Orang	15.513.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Orang	16.288.650
1.04.02.2.03	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota*		*100 %*	118.916.900			*100 %*	*158.634.735*
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit rumah	83.916.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6 Unit rumah	108.634.735
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	50.000.000
1.04.02.2.05	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*IKM Pengelolaan Rusunawa*		*B* 86,26 *Indeks*	745.906.580			*B* 86,26 *Indeks*	867.502.682

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		2 Laporan	79.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	80.000.000
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokumen	665.910.580	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	787.502.682
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		76,17 %	3.062.237.600,00			76,17 %	5.427.817.275
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		78,09 %				78,09 %	
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		2,2 %				2,2 %	
1.04.03.2.02	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun*		*2 Dokumen*	174.818.700			*2 Dokumen*	184.107.500
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi		1 Dokumen	164.864.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	173.107.500

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.03. 2.02. 0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		2 Kelompok	9.954.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Hasil Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	2 Kelompok	11.000.000
1.04.03. *2.03*	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah rumah tidak layak huni dikawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya*		207 *unit*	2.887.418.900			*227 unit*	5.243.709.775
		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik		104245,4 *m*				104245,4 *m*	
		Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik		183969,3 *m*				183969,3 *m*	
1.04.03. 2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		20 Unit Rumah	375.487.600	Insentif Fiskal		193 Unit Rumah	3.538.687.635
1.04.03. 2.03. 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		2 Laporan	1.871.961.300,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	464.023.450
1.04.03. 2.03. 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	32.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	34.067.250

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		4.5 Ha	607.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Hasil Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889	8 Ha	1.206.931.440,
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		1.03 %	1.888.262.100			1.03 %	3.400.289.180
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		20.11 %				20.11 %	
1.04.04.2.01	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan*		72,92 *%*	1.888.262.100			*95 %*	3.400.289.180
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		100 Unit Rumah	1.854.012.100	Insentif Fiskal		105 Unit Rumah	3.364.326.680

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		100 Orang	34.250.000		Hasil Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	100 Orang	35.962.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		86 %	887.046.400			86 %	1.540.467.500
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		87 %				87 %	
1.04.05.2.01	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik*		15922 *m*	887.046.400			15922 *m*	1.540.467.500
		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik		28134 *m*				28134 *m*	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		3 Lokasi	879.824.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Lokasi	1.529.467.500,
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		4 Laporan	7.221.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	11.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		B 85,73 Indeks	5.504.519.775			B 85,73 Indeks	5.473.040.009,
1.04.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*		*100 %*	10.031.100			*100 %*	28.446.450
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dokumen	6,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		15 Dokumen	12.200.000
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	3.420.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	16.246.450

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.01. 2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*		*100 %*	3.638.281.361			*100 %*	3.596.669.534
1.04.01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 Orang/ bulan	3.636.006.361,	Dana Alokasi Umum		24 Orang/ bulan	3.593.314.534
1.04.01. 2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD		7 Laporan	2.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7 Laporan	3.355.000
1.04.01. 2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*		*100 %*	133.074.400			*100 %*	121.401.480
1.04.01. 2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	86.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Paket	76.730.500
1.04.01. 2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	46.584.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	44.670.980

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*		*100 %*	349.691.350			*100 %*	384.565.420
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4,909,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	9.558.000
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	20.469.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	23.880.120
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	10.385.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Paket	14.618.200
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	55.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		30 Paket	53.927.500
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	17.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	21.540.600
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	220.407.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Laporan	230.915.300

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5 Dokumen	19,743,650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	30.125.700
1.04.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*		*88 %*	114.416.300			*89 %*	88.491.700
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	11.571.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	17.500.000,
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	102.844.500,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Unit	70.991.700
1.04.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*		*100 %*	884.395.800			*100 %*	976.123.085
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	76.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		36 Laporan	80.500.200
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		286 Laporan	807.907.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		286 Laporan	895.622.885

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.04.01. 2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*		*100 %*	374.629.464			*100 %*	277.342.340
1.04.01. 2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	146.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		11 Unit	148.862.100
1.04.01. 2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	40.654.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Unit	42.686.700
1.04.01. 2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	169.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	49.185.100
1.04.01. 2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas		1 Unit	17.535.464	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	36.608.440
JUMLAH					12,747,973,855				17.162.914.181

Dengan fokus pada :

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diantaranya :

1. Masih terdapatnya infrastruktur permukiman yang kondisinya kurang baik sehingga rawan menimbulkan permukiman kumuh terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman sehingga diterbitkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar.
2. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Blitar baik di dalam permukiman kumuh maupun di luar permukiman kumuh
3. Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan insfratruktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.
2. Menangani percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melui dana APBN dengan menerapkan konsep skema peningkatan keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedang yang melalui APBD melalui Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh dan di Luar kawasan Kumuh dengan konsep skema yang sama dengan dana dari pemerimtah pusat yaitu peningkatan keswadayaan masyarakat.
3. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

Selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga menyusun manajemen resiko untuk mengawal pencapaian target yang telah direncanakan, dari hasil penyusunan didapatkan bahwa resiko tertinggi yang harus dihadapi adalah MBR yang mengundurkan diri dari Program karena kurangnya kemampuan swadaya masyarakat dan MBR merasa tidak mampu melanjutkan pembangunan rumah. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan sosialisasi sebelumnya dan juga menggali kembali kebiasaan gotong royong di masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

Rencana Kerja tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

a) Catatan Penting
Penyusunan Renja tahun 2025 terpengaruh oleh terbitnya :
- ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, dimana kewenangan penataan jalan lingkungan dan saluran drainase dipindahkan ke Dinas PUPR sehingga mempengaruhi pencapaian target indicator utama;
- ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga ada sub kegiatan yang mengalami perubahan nomenklatur yaitu Sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh semula di Program Kawasan Permukiman dengan indicator kinerja Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun berubah menjadi di program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indicator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh;
- ✓ Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65 dimana Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman menjadi tanggungjawab dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Dalam Rencana Kerja tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan tercantum dalam Renstra Dinas tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

b) Kaidah – kaidah Pelaksanaan
Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaannya,
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

c) Rencana Tindak Lanjut

Dalam pencapaian kinerja maka akan diupayakan hal – hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun lembaga lainnya untuk pencapaian target indicator kinerja;
2. Mengupayakan sumber anggaran di luar APBD Kota Blitar seperti DAK, BSPS, CSR, Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara ringkas penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan; meliputi proses
   (1) Pembentukan SK tim penyusun renja
   (2) Orientasi tim kerja
   (3) Penyusunan agenda tim kerja
   (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar.
2. Tahapan Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025; meliputi proses :
   a. Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Blitar 2025 dan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kota Blitar 2021- 2026
   b. Evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
   c. Pemecahan masalah yang sedang dihadapi
   d. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
3. Pelaksanaan Forum OPD.
   Dilakukan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah
   Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :
   a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
   b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
   c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan

d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Walikota Blitar tentang rancangan awal RKPD.

4. Penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025

Proses penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Blitar oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Bappeda Kota Blitar untuk mendapatkan pengesahan, dan selanjutnya Renja Perangkat Daerah ini digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS dan RAPBD tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar nomor 27 tahun 2024);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra tahun 2012-2026, yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah

1. Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.
2. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan capaiannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85,08	85,13	84,39	84,96	100,68	85.00	85.00	99,91
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85,08	84,35	84,39	84,96	100,68	85.00	85.00	99,91
106.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,6	82,70	82,40	83,10	100,85	84,03	84,03	99,33
106.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	31	6	6	6	100	7	19	61,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah	Daerah									
106.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48	11	12	12	100	12	35	72,92
106.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	27	25	25	100	26	26	100
106.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75,00
106.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	Beda Indikator	4	4	100	2	6	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Kelengkapannya										
106.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	Beda Indikator	25	25	100	26	26	100
106.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	100.00	100	100.00	100	100	100	100
106.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Beda Indikator	1	1	100	1	2	50,00
106.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Beda Indikator	3	3	100	3	6	50,00
106.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20	Beda Indikator	5	5	100	5	10	50,00
106.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	Beda Indikator	12	12	100	10	22	55,00
106.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Beda Indikator	2	2	100	1	3	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	12	12	12	100	12	36	75,00
106.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	61	40	45	112,50	40	146	91,25
106.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	Beda Indikator	4	4	100	1	5	62,50
106.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	48	48	48	100	48	144	75,00
106.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	Beda Indikator	13	13	100	13	26	50,00
106.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	15	15	15	100	15	15	88,24
106.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	Sub Keg baru	1	1	100	-	1	8,33
106.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	160	Beda Indikator	50	50	100	40	90	56,25
106.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100	1	1	100,00
	Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator 1 : Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,21	0,19	0,24	0,12	150	0,23	0,23	100
		Indikator 2 : Persentase PMKS	%	7,04	7,40	7,41	7,25	102,16	7,26	7,26	100
		Indikator 3: Persentase PPKS	%	7,04	7,40	7,41	7,25	102,16	7,26	7,26	100
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan PPKS	Indikator 1 : Persentase fakir miskin yang berdaya		3,24 (formulasi baru)	0,66	-	1,86	-	2,32	2,32	71,60
		Indikator 2 : Persentase penurunan PMKS		5,89	3,85	1,47	1,46	99,32	1,49	6,66	113,11
		Indikator 3 : Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial		94,11 (indikator baru)	88,93	-	89,90		91,19	91,19	96,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.02.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	Beda Indikator	8	8	100	6	6	120
106.04.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	19,69	16,17	0,89	1,08	121,35	0,89	18,14	92,13
106.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	145	125	125	125	100	130	130	89,66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	11	10	10	100	10	31	36,47
106.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	540	Beda Indikator	152	156	102,63	325	481	89,07
106.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	256	Beda Indikator	25	25	100	25	50	19,53
106.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	515	Beda Indikator	324	324	100	360	684	132,82
106.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	Beda Indikator	100	100	100	70	96,72	147,83
106.05.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Persentase Peningkatan PMKS terlatih	%	160	50	24,20	27,22	112,48	19,5	134,58	84,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	JAMINAN SOSIAL										
.		Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	6,81	1,82	1,38	11,37	823,91	1,40	12,98	190,60
106.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Persentase PMKS terlatih	%	100	30	20	24,50	122,50	20	74,5	74,5
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	400	Beda Indikator	100	337	337	100	437	109,25
106.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10.264	10.814	9.584	9.584	100	9.584	9.584	106,63
106.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	120	113	113	100	105	338	84,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.06.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	13	20	20	100	40	73	60,83
106.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	50	80	80	100	60	190	67,86
106.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	%	100	88,00	84	81,48	97	90	90	90,00
106.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	25	27	27	100	27	27	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.07.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	980	Beda Indikator	975	975	100	975	975	99,49

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Urusan Sosial yang melaksanakan sebanyak 6 program, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat target 82,40 realisasi 83,10, capaian kinerja 100,85%. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indeks kepuasan penerima layanan terhadap layanan publik di bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial atas 9 unsur yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, tarif/biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara digital melalui SUKMA-E (Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik) Jatim melibatkan responden sebanyak 267 orang dengan hasil IKM 83,10 (katagori BAIK).
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, target 100%, realisasi 100%,capaian kinerja 100,00%. Kinerja ini diperoleh melalui monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yaitu TKSK dan PSM dalam layanan kesejahteraan sosial dan berdasarkan hasil monev sebanyak 44 PSM dan 3 TKSK secara keseluruhan dikatagorikan aktif dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, target 0,89%, realisasi 1,08%, capaian kinerja 121,35%. Rehabilitasi Sosial merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial PPKS (diluar fakir miskin, ODHA, korban penyalahgunaan Napza dan korban bencana) agar bisa hidup layak dan bermartabat di masyarakat dengan jenis layanan menyesuaikan dengan kebutuhan PPKS berdasarkan hasil assessment antara lain pemberian permakanan, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS/PPKS maupun keluarganya, akses layanan kesehatan dan pendidikan, fasilitasi administrasi kependudukan, penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan ke Balai/UPT/LKS rehabilitasi sosial. Capaian kinerja dihitung berdasarkan peningkatan jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial tahun 2022 sebanyak 556 orang, tahun 2023 sebanyak 562 orang, meningkat sebanyak 6 orang (1,08%).
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ada dua indikator kinerja yaitu :
    a. Persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial target 1,38% realisasi 11,37% dengan capaian kinerja 823,91%. Kinerja ini dihitung berdasarkan penurunan jumlah penerima Rastrada dari periode tahun sebelumnya. Tahun 2022 penerima Rastrada sebanyak 10.814 KPM turun sebanyak 1.230 KPM menjadi 9.584 KPM pada tahun 2023 atau turun sebesar 11,37%. Penurunan KPM dimaksud karena graduasi mandiri (katagori mampu), meninggal, dobel Bansos Pusat maupun pindah domisili.
    b. Persentase peningkatan PMKS terlatih target 24,20%, realisasi 27,22%, capaian kinerja 112,48%. Perhitungan kinerja berdasarkan perbandingan jumlah akumulasi peserta pelatihan keterampilan tahun berjalan dengan jumlah akumulasi peserta pelatihan periode tahun sebelumnya yaitu 360 orang di tahun 2022, meningkat sebanyak 98 orang menjadi 458 orang atau naik sebesar 27,22%.

5. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota target 100%, realisasi 100%, capaian 100%. Kota Blitar bukan merupakan daerah rawan bencana namun Pemerintah Kota Blitar tetap mengalokasikan anggaran yang bersifat penyediaan/penjagaan melalui OPD maupun BTT. Pada Dinas Sosial dialokasikan anggaran untuk penyediaan makan bagi korban bencana alam dan sosial serta kelompok rentan (warga miskin yang sakit) berupa bantuan paket Sembako. Pada tahun 2023 terdapat korban bencana kebakaran dan kekeringan sebanyak 20 orang serta warga miskin yang sakit sebanyak 80 orang dan secara keseluruhan telah menerima bantuan sehingga kinerja tercapai 100,00%.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dengan indikator kinerja persentase TMP dalam kondisi baik, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100,00%. Pemeliharaan TMP Raden Wijaya di Kota Blitar merupakan salah satu fungsi mandatori yang diemban Dinas Sosial dimana pemeliharaanya meliputi kebersihan, penyediaan bahan, alat dan sarana kebersihan serta pemeliharaan bangunan serta sarana prasarana di lingkungan TMP. Pemeliharaan kebersihan dilakukan oleh seorang Tenaga Harian Lepas yang diberikan gaji melalui anggaran Dinas Sosial. Sedang pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta penyediaan sarana prasarana kebersihan dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan identifikasi dan ketersediaan anggaran.

Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 tercapai sesuai target bahkan ada beberapa yang melebihi target, namun masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan.
3. Belum semua eks peserta pelatihan memanfaatkan bantuan peralatan usaha untuk merintis usaha.
4. Bencana alam dan sosial terjadi sewaktu-waktu sehingga pelaksanaan kegiatan bersifat kasuistis hanya ketika terjadi bencana.

Guna mengatasi permasalahan tersebut maka kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial antara lain :

1. Melaksanakan pembinaan/Bimtek bagi PPKS secara berkelanjutan dengan materi permasalahan PPKS yang menonjol.
2. Bagi PPKS yang dirujuk dan belum mendapatkan tempat di sentra terpadu rehabilitasi sosial Kemensos maupun UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka sambil menunggu ketersediaan tempat yang bersangkutan dititipkan sementara di Lembaga Kesejahteraan Sosial baik di dalam maupun di luar Kota Blitar.
3. Agar pemanfaatan bantuan peralatan usaha lebih maksimal maka dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan/motivasi usaha terhadap masing-masing penerima manfaat.
4. Karena bencana alam terjadinya sewaktu-waktu maka setiap tahun tetap dialokasinya penyediaan anggaran untuk korban bencana yang sifatnya perorangan, sedangkan apabila terjadi bencana dalam skala yang lebih besar maka disediakan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga melalui BPKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Blitar, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Sosial												
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 368 penyandang disabilitas terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi layanan data dan pengaduan, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan, fasilitasi akses layanan kesehatan, layanan penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan layanan rujukan

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 65 anak terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial baik kepada anak dan keluarganya, fasilitasi akses layanan pendidikan dan kesehatan, layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 134 Lansia terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi layanan data dan pengaduan, pemberian makanan sehat siap konsumsi, pemberian perbekalan kesehatan, bimbingan

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, fasilitasi akses layanan kesehatan, layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan
4	Persentase gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 34 Gepeng telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi pemberian makanan saat di shelter PPKS, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, fasilitasi akses layanan kesehatan, penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan terhadap korban bencana berdasarkan kejadian bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Tahun 2023 sebanyak 20 korban bencana dan 80 orang kelompok rentam (warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya) telah mendapat bantuan bahan makanan
6	Persentase fakir miskin yang berdaya	IKU	10%	10%	2,32%	2,77%	3,24%	15,7%	45,83%	2,32%	2,77%	3,24%	IKU ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan Bansos peralatan usaha pada tahun sebelumnya yang bekerja/merintis usaha dengan total peserta pelatihan. Peserta pelatihan tahun 2022 sebanyak 120 orang dan berdasarkan hasil monev sebanyak 55 orang telah merintis usaha mandiri, sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 45,83%

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Namun mulai tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP ada perubahan formulasi perhitungan menjadi perbandingan jumlah akumulasi peserta pelatihan yang bekerja/merintis usaha ditambah akumulasi penerima Bansos yang graduasi mandiri dengan total jumlah fakir miskin pada tahun n
7	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	IKU	1,45 %	1,47%	1,49%	1,52%	1,54%	6,09%	1,46%	1,49	1,52%	1,54%	IKU ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah PPKS tahun sebelumnya dengan PMKS/PPKS tahun berjalan. Jumlah PMKS/PPKS tahun 2022 sebanyak 11.733 dan 11.562 pada tahun 2023 atau turun sebesar 1,46%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Sebaran PPKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2023 masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 11.562, meskipun angka ini sudah menurun 1,46% dari tahun 2022. Angka ini masih didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 10.610. Upaya penanganan fakir miskin melalui pemberian Bantuan Sosial merupakan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan upaya pemberdayaan fakir miskin dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian Bansos sarana usaha sehingga selesai pelatihan diharapkan bisa langsung membuka rintisan usaha sebagai sumber tambahan penghasilan. Namun tingkat kemandirian fakir miskin belum sesuai harapan karena upaya pemberdayaan fakir miskin belum dipetakan kebutuhan penanganannya secara spesifik, kecenderungan tergantung pada Bansos yang bersifat konsumtif dan kurang optimalnya sinergi antar OPD dalam penanganan fakir miskin.

Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Aktivitas, peran serta, kerja sama, soliditas dan semangat PSKS dalam upaya pelayanan dan penanganan masalah PPKS tidak diragukan lagi namun bekal untuk selalu meningkatkan kualitas agar terus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan peraturan dan kebijakan kurang didapat dengan maksimal sehingga harus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas PSKS melalui Bimbingan Teknis/Diklat pelayanan sosial. Disamping peran serta PSKS, kepedulian keluarga, lingkungan/masyarakat sekitar domisili PPKS akan sangat membantu dan meningkatkan efektivitas penanganan PPKS baik berupa pendampingan, bimbingan maupun motivasi agar PPKS bisa menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat. Namun elemen masyarakat ini juga perlu mendapatkan sosialisasi dan pengetahuan serta motivasi yang bisa menggugah empati mereka terhadap lingkungan sekitar sehingga bisa terjalin sinergi dengan pemerintah dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini belum didukung adanya tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian. Pengelolaan shelter PMKS/PPKS kurang optimal karena keterbatasan SDM. Sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya terbatas hanya untuk anak, belum mengakomodir PPKS selain anak. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran serta keluarga/masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS terlantar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Walikota Blitar.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan análisis kebutuhan Renja Dinas Sosial Kota Blitar disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,03 Indeks	4.475.663.921	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00 Indeks	4.863.390.192	Target Kinerja menyesuaikan capaian tb 2 Tahun 2024 sebesar 88,04
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	15.933.700	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.933.200	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3.093.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3.093.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	12.839.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	2.839.700	Survey IKM melalui e-Sukma dan dianalisis mandiri
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.456.909.700	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.706.710.248	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/ bln	3.455.015.3700	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/ bln	3.704.342.748	Antisipasi kenaikan gaji dan tunjangan ASN
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keungan bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Lap	1.894.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keungan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Lap	2.367.500	Menyesuaikan kebutuhan
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi	100 %	110.100.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	141.758.432	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
	Perangkat Daerah		kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar			Perangkat Daerah		perangkat daerah yang sesuai standar			
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.100.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	46.616.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	80.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	95.142.432	Menyesuaikan kebutuhan
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	245.444.097	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	285.770.234	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.989.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.990.700	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	15.747.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	15.758.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	24.999.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	25.453.100	Menyesuaikan kebutuhan
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	28.025.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	30.713.600	Menyesuaikan kebutuhan
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	24.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	25.241.000	Menyesuaikan kebutuhan
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	127.283.497	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	163.238.534	Menyesuaikan kebutuhan
4.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2000 Dok	10.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2000 Dok	9.975.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	51.847.677	
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	8.971.800	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	42.875.877	Menyesuaikan kebutuhan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	504.153.524	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	515.772.324	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.641.724	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.486.324	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	416.511.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	428.286.000	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	128.122.900	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	155.598.077	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	77.698.900	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	78.013.077	Menyesuaikan kebutuhan
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	40 Unit	26.727.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	58 Unit	32.733.000	Menyesuaikan kebutuhan
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.197.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	29.852.000	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
II	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	626.441.134	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	845.939.600	
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	626.441.134	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	845.939.600	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembg	626.441.134	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembg	845.939.600	Adanya hibah untuk LKS dan Orsos
III	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan	0,88 %	974.910.216	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,88 %	1.040.515.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
			rehabilitasi sosial								
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	974.910.216	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.040.515.900	
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Org	381.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Org	381.500.000	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org	11.375.141	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org	11.372.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	20.037.400	
1.4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Org	235.763.263	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	482 Org	439.921.700	Penambahan target kinerja
1.5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut USia Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	50.500.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut USia Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	42.601.400	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	3.500.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	3.475.000	
1.7	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	79.500.000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35.733.000	Menyesuaikan kebutuhan
1.8	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	56.920.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	53.956.400	Menyesuaikan kebutuhan
1.9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Org	130.851.812	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org	46.918.100	Penyesuaian target kinerja dengan kebutuhan riil
IV	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,42 %	18.256.665.749	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,42 %	19.089.977.955	
			Persentase peningkatan PMKS Terlatih	16,3 %				Persentase peningkatan PMKS Terlatih	16,3 %		
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	18.256.665.749	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	19.089.977.955	
			Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %				Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %		
			Persentase PMKS Terlatih	20 %				Persentase PMKS Terlatih	20 %		
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/	100 Kelurg	103.955.900	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	100 Kelurg	103.955.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
			Kota								
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9514 Kelrg	17.705.478.800	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9572 Kelrg	18.538.791.171	Adanya kenaikan harga beras dan tambahan KPM Rastrada
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	447.231.049	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	447.230.884	
V	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	216.343.400	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	216.343.400	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	62.491.600	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	62.491.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	22.499.800	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	22.499.800	
1.3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orng	24.991.800	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orng	39.991.800	Tambahan untuk kegiatan Tagana Masuk Sekolah
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	94 %	153.851.800	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	94 %	153.851.800	
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orng	153.851.800	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orng	153.851.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	34.999.300	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	35.045.000	
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	34.999.300	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	35.045.000	
1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	975 Makam	34.999.300	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	979 Makam	35.045.000	

Dari tabel diatas terdapat beberapa perbedaan anggaran dan target kinerja sub kegiatan antara Rancangan Awal dan Rancangan Akhir karena menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Dinas Sosial Kota Blitar berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran legislatif. Selanjutnya semua usulan ditelaah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk ditetapkan apakah usulan tersebut diakomodir atau tidak. Rekapitulasi hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Legislatif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

NO	USULAN KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	KEC. SUKOREJO					
	NIHIL					
II	KEC. KEPANJENKIDUL					
1.	Pelatihan atau bantuan sosial buat penyandang disabilitas (bisu, buta huruf, perempuan)	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kel. Kauman RT 2/RW 4	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
III	KEC. SANANWETAN					

NO	USULAN KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kel. Gedog	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Diakomodir
2	Bimtek Karang Taruna	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan se kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	Diakomodir
IV	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					
1.	Bantuan Rastrada untuk Bpk. Sugianto dan Ibu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jl. Kali Ngebel RT 1/RW 1	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	2 KPM	Diakomodir

NO	USULAN KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Siti Komariyah	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tanjungsari Sukorejo	(KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.	Bantuan Terop dan Kursi untuk Rukun Kematian		Jl. Arjuno RT 5/RW 4 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul	Jumlah terop dan kursi kematian	102 Buah	Bukan tusi, tidak diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu terwujudnya Indonesia sebagai begara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu :

1. Pendapatan perkapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing SDM meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Sedangkan tema dan arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025-2029 adalah penguatan pondasi transformasi yang salah satunya adalah transformasi sosial yang meliputi pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Dalam hal perlindungan sosial difokuskan pada perlindungan sosial yang adaptif yang ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Adapun intervensi yang dilakukan meliputi :

1. Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek.
2. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan.
4. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan.
5. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk perluasan cakupan secara inklusif serta penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun provinsi. Arah kebijakan pembangunan kota Blitar tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan masyarakat melalui Penguatan Ekonomi kreatif, pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah” yang sejalan misi ke 3 RPJMD 2021-2026 yaitu “Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di daerah, merupakan OPD teknis yang akan menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan sosial sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Program Penanganan Bencana disinergikan dengan program pusat, provinsi, antar OPD se Kota Blitar bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kabupaten/kota lain serta pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat merupakan wujud nyata upaya Dinas Sosial Kota Blitar untuk meningkatkan pelayanan terhadap PPKS. Disamping itu Dinas Sosial juga melaksanakan tugas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran Renja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota. Berdasarkan misi yang diemban dan Perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 maka tujuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Blitar adalah "Meningkatnya kesejahteraan PPKS". Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang, waktu penyampaiannya jelas, berorientasi pada hasil nyata. Dalam mengemban tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Relaisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	84,39	84,96	86,04	86,44	86,94
2	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	84,39	84,96	86,04	86,44	86,94
3	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator Tujuan : Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin	Data resmi dari BPS	0,24	0,12	0,24	0,22	0,21
		Persentase PMKS	PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	Jumlah PMKS ---------- x 100% Jumlah penduduk	7,41	7,25	6,73	6,23	5,75
		Persentase PPKS	PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	Jumlah PPKS ---------- x 100% Jumlah penduduk	7,41	7,25	6,73	6,23	5,75
4	Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Indikator Sasaran : Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)	Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri) _____ x 100% Jumlah fakir miskin thn n	-	1,86	2,70	3,00	3,24

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Relaisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
		Persentase penurunan PMKS	PMKS adalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	(Jml PMKS thn n-1) – (Jml PMKS thn n) ---------- x 100% Jumlah PMKS thn n-1	1,47	1,46	6,49	1,52	1,54
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial kewenangan kota _____ x 100% Jumlah PPKS	- PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 24 kategori (sesuai Permensos RI no 8 th 2012 bukan korban HIV/Aids dan NAPZA) - PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial adalah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial kewenangan Kab/Kota	-	-	93,09	94,00	95,00

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial maka diperlukan rencana yang jelas terstruktur yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuia standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mendukung pencapaian IKU dan Tupoksi
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	Mendukung pencapaian IKU dan Tupoksi
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian IKU dan Tupoksi
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Luar Panti Sosial	
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	
		Persentase PMKS Terlatih	
1.06.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		Kabupaten/Kota	
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mengemban misi ketiga Kota Blitar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu "Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital" pada tujuan "Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat" dengan sasaran :

1. Menurunnya tingkat ketimpangan antar penduduk miskin.
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB telah diintegrasikan pohon kinerja Dinas Sosial Kota Blitar pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026. Dalam dokumen dimaksud memuat tujuan yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan PPKS" dengan sasaran "Meningkatnya penanganan PPKS".

Dalam rangka tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial menyusun dokumen Rencana Kerja tahun 2025 yang menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi dan pendanaan indikatif berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar 2025, hasil analisis capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023
Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Meningkatkan kapasitas fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan Bansos peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Menyelenggarakan program Bantuan Sosial bagi fakir miskin yang tepat sasaran	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
		Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

OPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar						
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				26.091.212.047				25.228.174.220
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,00 Indeks	4.863.390.192			89,25 Indeks	4.636.910.920
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	5.933.200			100 %	20.000.000
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dok	3.093.500	DAU		6 Dok	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Lap	2.839.700	DAU		12 Laporan	15.000.000
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.706.710.248			100 %	3.543.910.920
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Org/ bln	3.704.342.748	DAU		26 Org/bln	3.541.910.920
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		12 Lap	2.367.500	DAU		12 Laporan	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuia standar		100 %	141.758.432			100 %	130.000.000
1.06.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	46.616.000	DAU		2 Paket	40.000.000
1.06.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		26 Orang	95.142.432	DAU		27 Orang	90.000.000
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	285.770.234			100 %	264.500.000
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		1 Paket	9.990.700	DAU		1 Paket	11.000.000
1.06.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4 Paket	15.758.300	DAU		3 Paket	17.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		6 Paket	25.453.100	DAU		5 Paket	25.500.000
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		10 Paket	30.713.600	DAU		10 Paket	29.000.000
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	25.241.000	DAU		1 Paket	25.000.000
1.06.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dok	5.400.000	DAU		12 Dokumen	6.500.000
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Lap	163.238.534	DAU		40 Laporan	140.000.000
1.06.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2000 Dok	9.975.000	DAU		2000 Dok	10.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	51.847.677			100 %	24.500.000
1.06.01.207.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 Paket	8.971.800	DAU		1 Unit	12.000.000
1.06.01.207.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	42.875.877	DAU		1 Unit	12.500.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	515.772.324			100 %	515.000.000
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Lap	87.486.324	DAU		48 Laporan	90.000.000
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Lap	428.286.000	DAU		13 Laporan	425.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	155.598.077			100 %	130.410.624
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	78.013.077	DAU		15 Unit	93.889.523
1.06.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		50 Unit	5.000.000	DAU		4 Unit	5.000.000
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara		58 Unit	32.733.000	DAU		40 Unit	28.000.000
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	29.852.000	DAU		1 Unit	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	12.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100 %	845.939.600			100 %	689.085.000
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial		100 %	845.939.600			100 %	689.085.000
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Lembg	845.939.600	DAU		5 Lembaga	689.085.000
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		0,88 %	1.040.515.900			0,87 %	1.021.178.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	1.040.515.900			100 %	1.021.178.300
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		135 Org	381.500.000	DAU		140 Org	400.000.000
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Org	11.372.900	DAU		30 Org	12.458.898
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		14 Orang	20.037.400	DAU		8 Org	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		482 Org	439.921.700	DAU		200 Org	245.000.000
1.06.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		180 Orang	42.601.400	DAU		110 Org	55.000.000
1.06.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		9 Orang	3.475.000	DAU		9 Org	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Orang	35.733.000	DAU		35 Org	83.000.000
1.06.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	53.956.400	DAU		50 Org	58.000.000
1.06.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	5.000.000	DAU		5 Org	7.000.000
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Org	46.918.100	DAU		73 Org	133.719.402
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial		1,42 %	19.089.977.955			1,44 %	21.512.157.761

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih		16,3 %				14,04 %	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval		100 %	19.089.977.955			100 %	18.615.000.000
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial		100 %			100	%	
		Persentase PMKS terlatih		20 %			20	%	
1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		100 Keluarga	103.955.900	DAU		100 Kelurga	115.000.000
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		9572 Keluarga	18.538.791.171	DAU, DBHCHT		9514 Keluarga	18.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orng	447.230.884	DAU, DBHCHT		80 Orang	500.000.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)		100 %	216.343.400			100 %	226.000.000
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial		100 %	62.491.600			100 %	66.000.000
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orng	22.499.800	DAU		30 Orang	26.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orng	39.991.800	DAU		60 Orang	40.000.000
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana		94 %	153.851.800			100 %	160.000.000
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		27 Orng	153.851.800	DAU		27 Orang	160.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik		100 %	35.045.000			100 %	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara		100 %	35.045.000			100 %	40.000.000
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		979 Makam	35.045.000	DAU		979 Makam	40.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, sebagai penjabaran Renstra Dinas Sosial dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Renja Dinas Sosial Tahun 2025.
b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
c. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.

9. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Perangkat Daerah akan diawali dengan melakukan persiapan penyusunan renja, yang meliputi penyusunan rancangan keputusan oleh kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, lalu orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Kemudian dilakukan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahapan ini, Perangkat Daerah menyusun ranwal renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan ranwal renja berpedoman pada renstra. Hal ini bertujuan agar dapat menjadikan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja Perangkat Daerah dengan renstra Perangkat Daerah. Hasil perumusan ranwal renja lalu disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat tentang pendahuluan, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, renja dan pendanaan, serta penutup. Ranwal renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala daerah. Penyempurnaan ranwal renja Perangkat Daerah ini mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada ranwal RKPD.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.

RKPD Kota Blitar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada RPJMD maka tujuan dan sasaran RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2021 dan tahun 2026. Selain itu, penetapan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar pada tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp 8.817.011.113,00 dengan realisasi Rp.8.633.696.684,00 atau 97,92%. Sisa anggaran 2,18% yang tidak terserap merupakan hasil efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.43.000.000,00 dapat tercapai Rp 23.891.170,00 atau 55,56%. Hal tersebut karena target pendapatan yang dimaksud merupakan retribusi sewa tanah dari pajak reklame. Sedangkan saat ini publikasi/promosi sebuah produk/jasa banyak dilakukan secara online sehingga pemasangan reklame secara fisik menjadi berkurang.

Capaian kinerja Tujuan Renja “Meningkatnya nilai investasi daerah” pada tahun 2023 adalah 11,54% dari target 0,36%. Capaian tersebut merupakan peningkatan realisasi investasi dari tahun sebelumnya (2022), dimana realisasi investasi tahun 2023 sebesar 385,06 milyar rupiah dan realisasi investasi tahun 2022 adalah 345,22 milyar rupiah. Realisasi investasi Tahun 2023 sebesar 385,06 milyar rupiah tersebut diatas merupakan kinerja Sasaran Renja yang tercapai 229,5% dari target 167,8 milyar rupiah. Sedangkan kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata tercapai sesuai target. Untuk mengetahui lebih detail capaian kinerja pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan, berikut disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024. Capaian kinerja sub kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023 tidak dapat dimunculkan atau nol (0) karena ada perubahan nomenklatur dan indikator kinerja sub kegiatan pada tahun 2024.

Pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar difokuskan pada:

1. Meningkatkan promosi investasi dengan melibatkan para pelaku usaha di Kota Blitar.
2. Meningkatkan pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) khususnya bagi pelaku UMKM.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal agar para pelaku usaha tertib dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan penanaman Modal) dan tertib dalam legalitas usahanya.
4. Mengawal Kajian Akdemis Kebijakan/Insentif Penanaman Modal hingga menjadi Perda.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kota Blitar

Nama PD: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	TUKUAN 1: Meningkatnya tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)	Nilai	A (85,47)	A (84,8)	A (85,66)	101	85,67 (A)	85,67 (A)	99,95%
	SASARAN 1: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)	Nilai	A (85,47)	A (84,8)	A (85,66)	101	85,67 (A)	85,67 (A)	99,95%
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1 (Baik)	Indeks	84,16	84,2 (Baik)	84,65 (Baik)	100,53	84,5 (Baik)	84,5 (Baik)	99,29%
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen					7	7	33,33%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	15	dokumen					5	5	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang /bulan					23	23	33,33%
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39	Dokumen					13	13	33,33%
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket					2	2	33,33%
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129	Orang					43	43	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket					1	1	33,33%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket					5	5	33,33%
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Paket					3	3	33,33%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102	Paket					34	34	33,33%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket					1	1	33,33%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36	Dokumen					12	12	33,33%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Dokumen					25	25	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	Paket					2	2	33,33%
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	Unit					7	7	41,18%
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit					1	1	100,00%
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	Dokumen					36	36	33,33%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	Dokumen					36	36	33,33%
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	9	Unit					3	3	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	183	Unit					61	61	33,33%
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit					0	0	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0	Unit					0	0	
	TUJUAN 2: Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	133,85	%	33,57	0,36	11,54	3205,69	0,42	0,42	0,31%
	SASARAN 2: Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	391	Milyar rupiah	345,22	167,8	385,06	229,5	387	387	98,98%
2.18.02	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65	%	50	50	124,71	249	55	55	84,62%
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	3	Dokumen	0	1	1	100	1	1	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen					1	1	33,33%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3	Kerjasama					1	1	33,33%
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3	Dokumen	-	-	-	-	1	1	33,33%
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	3	Dokumen					1	1	33,33%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	Dokumen					1	1	33,33%
2.18.03	Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60	%	43	45	45,2	100,4%	50	50	83,33%
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	300	%	100	100	100	100	100	100	33,33%
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	3	Dokumen					1	1	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Kabupaten/ Kota									
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,7	%	99,53	99,5	99,71	100,2	99,5	99,5	99,80%
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4	%	57,54	3	87,81	2.927	3	3	75,00%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3434	Orang					1100	1100	32,03%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	Orang					4	4	40,00%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12411	Kegiatan usaha					3976	3976	32,04%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha									
2.18.05	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85	%	71,22	75	75,7	100,9	80	80	94,12%
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375	Perusahaan	238	100	362	362	125	125	33,33%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24	Masalah					7	7	29,17%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000	orang					300	300	30,00%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi	39	Kegiatan usaha					13	13	33,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan, Sasaran Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

No	Indikator	IKK/ IKU/ SPM	Target Kinerja SKPD Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
1	Persentase peningkatan investasi	IKK	0,30	0,36	0,42	0,47	0,53	33,57	11,54	0,42	0,47	0,53	Tercapai
2	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	IKU	167,2	167,8	387	389	391	345,22	385,06	387	389	391	Tercapai
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A	84,8 (A)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)	85,47 (A)	85,66 (A)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)	Tercapai

IKK (Indikator Kinerja Kunci) tahun 2023 tercapai melebihi target, yaitu 11,54% dari target 0,36%. Capaian tersebut karena IKU (Indikator Kinerja Utama) juga tercapai melebihi target, yaitu 385,06 milyar rupiah, meningkat dibanding tahun 2022. Keberhasilan tersebut karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi /iklim usaha yang semakin kondusif, kebijakan pemerintah yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin usaha dan pelaporan LKPM yang terus meningkat.

Sedangkan untuk IKU Nilai SAKIP dapat tercapai sesuai target (dalam kategori predikat A).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar melayani 9 sektor Perizinan Berusaha dengan KBLI, 6 sektor Perizinan Berusaha Non KBLI, 12 sektor Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan 46 jenis perizinan daerah.

Di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kota Blitar berusaha meningkatkan daya tarik investasi bagi calon investor dengan menyelenggarakan promosi investasi melalui event “Soekarno Coffe Fest” dan keikutsertaan pada event promosi tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan untuk meningkatkan tertib pelaporan LKPM bagi pelaku usaha, dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penanaman

modal melalui bimtek dan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar menghadapi permasalahan dan hambatan, yaitu:

- Kurangnya minat literasi masyarakat terhadap proses perizinan yang benar sehingga masih terjadi adanya pelanggaran akibat ketidaksesuaian legalitas izin yang dimiliki dengan kondisi di lapang.
- Laporan yang disajikan dalam sistem OSS RBA belum bisa memenuhi kebutuhan.
- Para pelaku usaha belum tertib dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- Naskah akademis Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal telah disusun, namun belum menjadi perda.
- Masih dibebani target retribusi daerah berupa sewa tanah reklame, padahal sesuai PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 14 menyatakan bahwa DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Sedangkan tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam meningkatkan pelayanan adalah:

- Pembangunan Mal Pelayaanan Publik (MPP) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 dan mulai operasional pada awal tahun 2025, diharapkan mampu mencapai tujuan dari kehadiran MPP tersebut yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- Untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital, agar dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah maka perlu dibangun sistem MPP Digital.
- Perubahan OSS dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA yang memiliki konsekuensi dengan aturan yang mengikutinya memerlukan penyebarluasan informasi yang lebih intensif kepada masyarkat melalui berbagai media.

Mengacu pada tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar maka isu-isu penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang perizinan usaha baik melalui pendampingan dan/atau sosialisasi maupun publikasi media sosial dan elektronik.
2. Keberadaan MPP diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai yaitu mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
3. Mengoptimalkan layanan Jempol Lisa (Jemput Bola Layanan Perizinan Usaha) agar legalitas usaha dapat dijangkau oleh seluruh pealku usaha di Kota Blitar.

4. Menyediakan data dan informasi perizinan serta penanaman modal baik secara digital maupun manual sehingga jika server pusat mengalami down, data manual masih tersedia.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Blitar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.255.414.291	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.338.662.201	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				10.255.414.291	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.338.662.201	
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		*Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi*	60 persen	129.021.100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		*Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi*	60 persen	181.163.000	
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan*	1 dokumen	59.021.100	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan*	1 dokumen	71.163.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	1 Dokumen	43.762.400	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	1 Dokumen	46.154.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*	1 Dokumen	15.258.700	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*	1 Dokumen	25.009.000	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		*Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia*	1 dokumen	70.000.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		*Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia*	1 dokumen	110.000.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	60.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	50.000.000	
2,	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		*Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan*	55 persen	439.206.797	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		*Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan*	55 persen	463.531.900	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase potensi informasi yang dipromosikan*	100 persen	439.206.797	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase potensi informasi yang dipromosikan*	100 persen	463.531.900	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	439.206.797	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	463.531.900	
3,	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		*Persentase penerbitan izin sesuai SOP*	99,6 persen	520.583.500	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		*Persentase penerbitan izin sesuai SOP*	99,6 persen	600.093.514	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya*	4 persen	520.583.500	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		*Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya*	4 persen	600.093.514	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	1144 Pelaku Usaha	199.987.100	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	1144 Pelaku Usaha	223.606.014	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	3 Pelaku Usaha	132.431.500	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	3 Pelaku Usaha	106.902.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terintegrasi secara Elektronik					*Terintegrasi secara Elektronik*			
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	4135 Kegiatan Usaha	188.164.900	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	4135 Kegiatan Usaha	269.584.600	
4,	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		*Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)*	80 persen	406.818.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		*Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)*	80 persen	406.818.000	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM*	125 perusahaan	406.818.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM*	125 perusahaan	406.818.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	350 Pelaku Usaha	223.751.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	350 Pelaku Usaha	223.751.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	13 Kegiatan Usaha	122.045.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	13 Kegiatan Usaha	122.045.000	
5,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	84,8 persen	8.759.784.894	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	84,8 persen	5.687.064.587	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 persen	15.885.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 persen	16.399.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	1.904.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	2.100.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	13.980.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.299.400	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 persen	2.881.668.145	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 persen	2.977.928.187	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	23 Orang/bulan	2.880.284.145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	23 Orang/bulan	2.976.192.187	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	1.384.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	1.736.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 persen	150.590.900	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 persen	161.233.300	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	27.900.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	49.667.500	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	43 Orang	122.690.900	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	43 Orang	111.565.800	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 persen	503.977.180	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 persen	549.659.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	24.793.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	38.232.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	124.385.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	131.734.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	24.544.880	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	26.646.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	34 Paket	55.650.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	34 Paket	57.750.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	30.291.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	32.125.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	18.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	25 Laporan	226.312.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	25 Laporan	245.170.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan*	100 persen	4.334.456.305	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan*	100 persen	972.835.600	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	235.823.905	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	82.439.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	654.055.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	854.417.400	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0 Unit	3.444.576.800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0 Unit	35.978.800	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 persen	716.371.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 persen	829.938.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	144.712.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	138.256.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	36 Laporan	571.659.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	36 Laporan	691.682.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100 persen	156.836.364	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100 persen	179.061.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	103.518.864	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	110.832.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	61 Unit	53.317.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	61 Unit	67.197.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.031.700	
					10.255.414.291					7.338.662.201	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB dan Label Halal bagi pelaku usaha	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kepanjenlor, Bendo, Kauman, Tanggung, Kepanjenkidul Ngadirejo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	155 orang	Diakomodir tetapi tidak spesifik per kecamatan/ kelurahan tetapi dalam level kota
2	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30 orang	Diakomodir tetapi tidak spesifik per kecamatan/ kelurahan tetapi dalam level kota
3	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30 orang	Diakomodir tetapi tidak spesifik per kecamatan/ kelurahan tetapi dalam level kota

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema pembangunan RKP 2024 adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah Pemantapan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi daerah. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional tahun 2025.

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sebagai bagian dari Pemerintah Kota Blitar, mendukung dan berperan serta dalam mendukung arah pembangunan nasional dan Kota Blitar dengan meningkatkan investasi dan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan kepada masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dikaitkan dengan sasaran target kinerja, berikut disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 beserta indikator dan target, yaitu:

Tabel 3.2

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan 1 Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (*Online Single Submission*)	Jumlah realisasi investasi Tahun N –jumlah realisasi investasi Tahun N-1)/ jumlah realisasi investasi Tahun N-1 x 100%	0,36%	11,54%	0,42%	0,47%	0,53%
2	Sasaran 1 Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)		Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	167,8	385,06	387	389	391
3	Tujuan 2 Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	Hasil nilai evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	A (84,8)	A (85,66)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)
4	Sasaran 2 Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah								

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tabel 3.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung Program Pencapaian Tupoksi
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.02.2.01.0003	Fasiitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKN di daerah	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
2.18.04.2.01.0007	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.18.04.2.01.0008	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	"Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Mendukung Program Tematik Investasi
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan turunan dari program mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar 2021-2026 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pendanaan indikatif pada rancangan awal RKPD sebesar Rp7.338.662.201. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disajikan pada tabel 4.2 pada bab ini.

Pelaksanaan Rencana Kerja selalu dievaluasi melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga diketahui keberlanjutan program kegiatan dan permasalahan atau hambatan bila ada. Demikian pula Renja 2025 menindaklanjuti langkah perbaikan pada LKjIP 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 pada Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (Tahap II) dan Launching	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan pelayanan perizinan	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3	Meningkatkan promosi investasi	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4	Meningkatkan monitoring pelaporan LKPM secara berkala	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
5	Meningkatkan regulasi penanaman modal	Menyusun perda pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara On Line	Pengembangan aplikasi SIMIJIN	Program/kegiatan tercover di dinas teknis (Diskominfotik)

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama PD: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	*Persentase Peningkatan Potensi Investasi yang Teridentifikasi*	Kota Blitar	60 persen	181.163.000			65 persen	135.472.155
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Pemberian Fasilitasi/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Ditetapkan*	Kota Blitar	1 dokumen	71.163.000			1 dokumen	61.972.155
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	Kota Blitar	1 Dokumen	46.154.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	45.950.520
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*	Kota Blitar	1 Dokumen	25.009.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	16.021.635
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia*	Kota Blitar	1 dokumen	110.000.000			1 dokumen	73.500.000
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	Kota Blitar	1 Dokumen	60.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	52.500.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	Kota Blitar	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	21.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	*Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan*	Kota Blitar	55 persen	463.531.900			60 persen	461.167.137
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase potensi informasi yang dipromosikan*	Kota Blitar	100 persen	463.531.900			100 persen	461.167.137
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	Kota Blitar	1 Dokumen	463.531.900	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	461.167.137
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	*Persentase penerbitan izin sesuai SOP*	Kota Blitar	99,6 persen	600.093.514			99,7 persen	546.612.675
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya*	Kota Blitar	4 persen	600.093.514			4 persen	546.612.675
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	Kota Blitar	1144 Pelaku Usaha	223.606.014	Pendapatan Bagi Hasil		1190 Pelaku Usaha	209.986.455
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	Kota Blitar	3 Pelaku Usaha	106.902.900	Pendapatan Bagi Hasil		3 Pelaku Usaha	139.053.075

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	Kota Blitar	4135	269.584.600	Pendapatan Bagi Hasil		4300 kgiatan usaha	197.573.145
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	*Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)*	Kota Blitar	80 persen	406.818.000			85 persen	427.158.900
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM*	Kota Blitar	125	406.818.000			125 perusahaan	427.158.900
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	Kota Blitar	8 Kegiatan Usaha.	61.022.000	DAK Non Fisik		9 masalah	64.073.100
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	Kota Blitar	350 Pelaku Usaha	223.751.000	DAK Non Fisik		350 Pelaku Usaha	234.938.550

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	Kota Blitar	13 Kegiatan Usaha	122.045.000	DAK Non Fisik		13 Kegiatan Usaha	128.147.250
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Kota Blitar	84,8	5.687.055.787			85,1 (Baik)	5.580.500.089
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	Kota Blitar	100 persen	16.399.900			100 persen	15.590.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Blitar	7 Dokumen	2.100.500	Pendapatan Bagi Hasil		7 Dokumen	1.950.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	5 Laporan	14.299.400	Pendapatan Bagi Hasil		5 Laporan	14.000.000
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	Kota Blitar	100 persen	2.977.928.187			100 persen	3.025.751.552
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Blitar	23	2.976.192.187	Pendapatan Bagi Hasil		23	3.024.298.352

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semesteran SKPD*	Kota Blitar	13 Laporan	1.736.000	Pendapatan Bagi Hasil		13 Laporan	1.453.200
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	Kota Blitar	100 persen	161.233.300			100 persen	158.120.445
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Blitar	2 Paket	49.667.500	Pendapatan Bagi Hasil		2 Paket	29.295.000
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kota Blitar	43 Orang	111.565.800	Pendapatan Bagi Hasil		43 Orang	128.825.445
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	Kota Blitar	100 persen	549.659.100			100 persen	529.436.880
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Blitar	1 Paket	38.232.700	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	26.032.965
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Blitar	5 Paket	131.734.800	Pendapatan Bagi Hasil		5 Paket	130.604.670
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kota Blitar	3 Paket	26.646.600	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	26.032.965
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Blitar	34 Paket	57.750.000	Pendapatan Bagi Hasil		34 Paket	58.432.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Blitar	1 Paket	32.125.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	31.806.180
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Blitar	12 Dokumen	18.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Dokumen	18.900.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Blitar	25 Laporan	245.170.000	Pendapatan Bagi Hasil		25 Laporan	237.627.600
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan*	Kota Blitar	100 persen	972.835.600			100 persen	934.373.480
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kota Blitar	2 Unit	82.439.400	Pendapatan Bagi Hasil		2 Unit	247.615.100
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kota Blitar	5 Unit	854.417.400	Pendapatan Bagi Hasil		5 Unit	686.758.380
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kota Blitar	0 Unit	35.978.800	Dana Transfer Umum - DAU		0 Unit	0
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	Kota Blitar	100 persen	829.938.000			100 persen	752.189.550
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Blitar	36 Laporan	138.256.000	Pendapatan Bagi Hasil		36 Laporan	151.947.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Blitar	36 Laporan	691.682.000	Pendapatan Bagi Hasil		36 Laporan	600.241.950
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	Kota Blitar	100 persen	179.061.700			100 persen	164.678.182
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kota Blitar	3 Unit	110.832.500	Pendapatan Bagi Hasil		3 Unit	108.694.807
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kota Blitar	61 Unit	67.197.500	Pendapatan Bagi Hasil		61 Unit	55.983.375
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Blitar	2 unit	1.031.700	Pendapatan Bagi Hasil		2 unit	1.031.700

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 memuat usulan rencana kegiatan prioritas urusan penanaman modal dan urusan penunjang peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan. Dalam pelaksanaan Renja terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dicapai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai juga.
2) Ketersediaan anggaran, namun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar program prioritas/unggulan tetap dapat dilaksanakan.

Agar target kinerja dan sasaran dalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 dapat dicapai maka perlu kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
2. Fokus pada pencapaian target kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar.
3. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra).
5. Capaian pelaksanaan kegiatan dalam Renja akan dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP).
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Menyusun kebutuhan administrasi kegiatan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan kegiatan.

10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n + 1;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu

entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas P3AP2KB tahun 2023;
- Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan ;
- Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
- Menyusun perencanaan yang mengacu pada kebijakan Nasional maupun provinsi agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat nasional maupun provinsi
- Digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AP2KB TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AP2KB
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN Dinas P3AP2KB
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P3AP2KB
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS P3AP2KB
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AP2KB TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AP2KB

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi target kinerja pada Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 yaitu :

1. Indikator Tujuan :
   a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari target 67,87 realisasi 67,63, dengan capaian 99,64%
   b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari target 0,67 tercapai 0,60, dengan capaian 110,45%
2. Indikator Sasaran :
   a. Persentase kelembagaan PUG aktif dari target 47,28% realisasi 63,3%, capaian sebesar 133,88% dengan predikat sangat berhasil;
   b. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan, target 100%, realisasi 100%, capaian 100% dengan predikat sangat berhasil;
   c. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan, target 100%, realisasi 100%, capaian 100% dengan predikat sangat berhasil;
   d. Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi) target 2,13, realisasi 1,92 tidak memenuhi target karena idealnya 2-2,1, kalau kurang dari 2 di takutkan akan terjadi kelangkaan penduduk. Adapun masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan SDM pengelola program pengendalian penduduk utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi pengendalian penduduk. Adapun tindak lanjutnya adalah pelatihan SDM pengelola pengendalian penduduk dan mitra kerja;
   e. Nilai SAKIP perangkat daerah, target nilai A (83,00) realisasi 85,28, capaian 102,74%
3. Indikator Program
   a. Program Pengarusutamaan Gender;
      1) Persetase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, target 100 %, realisasi 100%, dengan capaian 100%.
      2) Persentase perempuan pengambilan keputusan publik; target 46%, realisasi 59%, dengan capaian 128,26%
      3) Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis; target 0,33%, capaian 0,51% dengan capaian 154,54%.
   b. Program Perlindungan Perempuan;

Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan, target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.

c. Program Pemenuhan Hak Anak;
   Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak, target 1005, realisasi 100% dengan capaian 100%.
d. Program Perlindungan Khusus Anak;
   Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih; target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%.
e. Program Pengendalian Penduduk;
   Rata-rata usia kawin pertama wanita target 23,01 tahun, realisasi 25,03 tahun dengan capaian 108,78%
f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
   1) Persentase peserta KB aktif; target 74,35 %, realisasi 74,36% dengan capaian 100,49%
   2) Cakupan Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need); target 8,98%, realisasi 10,7%, capaian 100,49%
g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
   Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB; target 74,35%, realisasi 76,43% dengan capaian 103,28%.
h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); target 83, realisasi 85,06, capaian 102,48%.

Sedangkan pada tahun 2024, Dinas P3AP2KB Kota Blitar melaksanakan 2 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan 8 program dengan 26 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Adapun programnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pemenuhan Hak Anak
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Pengendalian Penduduk
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada bab ini disajikan reviu terhadap hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2024 yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Adapun hasil rekapitulasinya adalah seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar sampai dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
					Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A / 85,36	85,32	A / 83	85,28	102,74%	A / 85,32	85,32	100.00
					Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A / 85,36	85,32	A / 83	85,28	102,74%	A / 85,32	85,32	100.00
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik / 88	83.01	Baik / 83	85.02	102.43%	Baik / 86	85,02	97.73
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	-	7	7	100%	7	14	50.00
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	-	13	13	100%	13	26	50.00
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar Tunjangan ASN	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24		24	20	83.33%	23	23	100.00
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8		2	2	100%	2	4	50.00
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						perangkat daerah yang sesuai standar									
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	297		99	99	33%	99	198	67.00
2	8	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	33		33	33	100%	33	33	100.00
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20		5	5	100%	5	10	50.00
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16		4	4	100%	4	8	50.00
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24		6	6	100%	6	12	50.00
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96		24	24	100%	24	48	50.00
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240		60	60	100%	60	120	50.00
2	8	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Persen	100	100	100	99.85	99.85%	100	100	99.95

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144		36	33	91.67%	36	69	47.92
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8		2	2	100%	2	4	50.00
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	164		41	32	78.05%	41	73	44.51
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168		42	42	100%	42	84	50.00
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	8	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12		3	3	100%	3	6	50.00
					Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76.59	68.61	67.87	67,63	99,64%	74.2	67.64	88.00
					Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	100	55,03	47.28	63,3	133,88%	100	100	100.00
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
						Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Persen	0.33	0.21%	0.33	0.51	155%	0.33	0.33	100.00
						Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Persen	48	32.80%	46	59.5	129.35%	47	47	97,92
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Persen	47	15%	32	34.24	107%	37	37	46,15

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	13		3	3	100%	3	6	46.15
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persen	20.73	13.89	20.53	57.93	289.65%	20.54	20,54	99.08
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	30		7	7	100%	7	14	46.67
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	6		1	1	100%	1	2	33.33
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Organisasi	12		3	3	100%	3	6	50.00
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	84		21	21	100%	21	42	50.00
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2468		614	614	100%	614	1.228	49.76
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10		2	2	100%	2	4	40.00
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Persen	100		100	100	100%	100	67	66.67
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	43		1	7	700%	12	19	44.19
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8		2	2	100%	2	4	50.00
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	460		110	110	100%	115	225	48.91
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan	Dokumen	10		2	2	100%	2	4	40.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10		2	2	100%	2	4	40.00
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak/Orang	410		100	100	100%	100	200	48.78
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6		2	2	100%	2	4	66.67
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	7	2.01	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	kegiatan	6		5	5	100%	5	5	83.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	8	7	2.01	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	orang	30			-	-	10	10	33.33
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	60		2	2	100%	30	32	53.33
2	8	7	2.02	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	layanan	75		-	-	-	60	60	80.00
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	8	7	2.03	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	420		2	2	100%	348	350	83.33
					Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	0.96	0,617	1,19	1,19	100%	1,00	1,00	96,92
					Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Indeks	2,00	1,92	2.13	1,92	96%	1,94	1,94	97.00
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	25.21	25,60	23.01	25.03	108.83%	25.1	25,1	100,00
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23.2	22,70	22.25	23.07	100.30%	23.1	23,1	100,00
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design	Dokumen	4		1	1	100%	1	2	50.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	20		3	3	100%	5	8	40.00
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Persen	100		100	100	100%	100	100	100
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	27		6	6	100%	6	12	44.44
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	6		1	1	100%	1	2	33.33
2	14	2	2.02	20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Indeks	8.01	8,01	8.98	10.7	133.75%	8.55	8,55	86.13
						Persentase KB Aktif	Persen	74.67	74,32	74.35	74.36	100.49%	74.4	74,4	99,64
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Kecamatan	3		3	3	100%	3	3	100
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	16		3	3	100%	3	6	37.50
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan	Laporan	18		4	4	100%	4	8	44.44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)									
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	28		6	6	100%	6	12	42.86
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	18		4	4	100%	4	8	44.44
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Organisasi	4		1	1	100%	1	2	50.00
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Persen	100		100	100	100%	100	67	66.67
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1442		359	359	100%	361	720	49.93
2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB))	laporan	12		-	-	-	4	4	33.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	50.76		50.35	50.64	101.28%	50.45	50.45	99.00
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	101		25	22	88%	25	47	46.53
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2952		12	323	0%	1000	1.323	44.82
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	20		13	13	100%	15	15	75.00
2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	620		150	150	100%	155	305	49.19
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	16		3	3	100%	3	6	37.50
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	610		12	323	100%	150	473	77.54
2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	480		12	100	833.33%	150	250	52.08
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Persen	100		100	100	100%	100	100	100.00
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Dokumen	1		1	1	100%	1	1	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	14	3	2.04	5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kampung	21		-	-	-	21	21	100.00
2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persen	21		6	6	100%	21	21	100.00
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Persen	74.67		74.35	76.43	103.28%	74.4	74,4	99.64
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100.00
2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	3		-	-	-	1	1	33.33
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6		1	1	100%	1	2	33.33
2	14	4	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	73		13	30	100%	20	50	68.49
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan	Orang	807		6	6	100%	807	807	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
2	14	4	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		2		1	1	100%	1	1	50.00
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	-	-	-	-	3	3	100.00
2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	3	-	-	-	-	3	3	100.00
2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kelompok	9664	-	-	-	-	9664	9.664	100.00

Dari tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar sampai dengan Tahun 2024 diatas dapat diketahui :

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
   1. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
   2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
   1. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
   - ✓ Faktor terpenuhi/melebihi target kinerja pada program ini adalah penetapan target kinerja yang sesuai dengan Renstra, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan antar perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Blitar.
   - ✓ Faktor penyebab tidak tercapainya : 1). Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) disebabkan karena motivasi masyarakat khususnya PUS untuk mengikuti KB MKJP menurun; 2). Sub kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang disebabkan karena data Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Kota Blitar diperkirakan menurun sesuai hasil updating data. Hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pencapaian target indikator kinerja Dinas P3AP2KB.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra DP3AP2KB Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan akan mendukung tercapainya target indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

f. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
Mengintensifkan koordinasi dengan provinsi, organisasi perangkat daerah lainnya, organisasi masyarakat ataupun dengan mitra kerja lainnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dapat dikatakan sangat berhasil (dengan rata-rata keberhasilan capaian sasaran strategis 109,30%), walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,87	67,87	74,2	75,50	76,59	68,61	67,63	67,64	67,75	68,70	Target tidak dapat tercapai
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	IKU	47,26	47,28	100	100	100	55,03	63,3	100	100	100	Target tercapai
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		0,67	0,67	1,00	0,98	0,96	0,617	0,60	1,00	0,98	0,96	Target tercapai
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	IKU	2,14	2,13	1,94	1,96	2,00	1,92	1,92	1,94	1,96	2,00	Target tercapai
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	IKK	26	32	37	42	47	4,12	34,24	37	42	47	Target tercapai
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	IKK	0,014	0,012	0,008	0,006	0,004	13,81	0,012	0,008	0,006	0,004	Target tercapai
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	IKK	2,04	2,03	1,94	1,96	2,00	1,92	1,92	1,94	1,96	2,00	Target tercapai
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	IKK	20,5	20,75	17,20	17,19	17,18	1,31	17,2	17,20	17,19	17,18	Target tercapai
6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	IKK	27,5	30	100	100	100	100	100	100	100	100	Rencana ada perubahan target 2025-2026
7	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	IKK	74,32	74,35	64,66	64,70	64,75	72,75	62,42	64,67	64,73	64,77	Rencana ada perubahan target 2025-2026

No	Indikator	IKU/ IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
8	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
9	Persentase peserta KB aktif MKJP	IKK	43,8	43,95	38,36	38,38	38,40	37,75	38,3	38,36	38,39	38,40	Rencana ada perubahan target 2025-2026
10	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	IKK	45,5	45,6	81,95	82,00	82,25	80,65	81,91	81,95	82,00	82,25	Rencana ada perubahan target 2025-2026
11	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	IKK	67,8	67,95	60,14	60,32	60,33	14,28	14,28	60,15	60,33	60,35	Rencana ada perubahan target 2025-2026
12	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	IKK	24,5	24,75	85,96	85,97	85,98	85,94	85,95	85,96	85,97	85,98	Rencana ada perubahan target 2025-2026

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Penilaian status pencapaian IDG berdasarkan BPS dapat dikelolmpokkan menjadi rendah (IDG<50); sedang (50≤IDG<60); tinggi (60≤IDG≤80); sangat tinggi (IDG>80) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021). Pada tahun 2023 IDG Kota Blitar turun bila dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2023 IDG Kota Blitar 68,61 sedangkan di tahun 2023 IDG Kota Blitar 67,63 meskipun masih termasuk kategori tinggi.

   Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IDG, yaitu :

   a. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan. Menurut BPS Kota Blitar Dalam Angka 2024 Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,13 tahun dari 10,65 tahun menjadi 10,78 tahun pada tahun 2023.

Tahun *Year*	IPM *HDI* (Poin)	Komponen IPM *Component of HDI*			
		Umur Harapan Hidup (UHH) *Life Expectancy* (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) *Expected Years of Schooling* (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) *Mean Years of Schooling* (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan *Adjusted per Capita Expenditure* (000 Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	78,88	74,39	14,32	10,11	13.733
2021	79,27	74,46	14,33	10,35	13.816
2022	80,15	74,71	14,56	10,65	14.058
2023	80,78	74,97	14,57	10,78	14.548

Catatan/*Note*: Menggunakan metode baru (UHH menggunakan proyeksi penduduk *Long Form* SP2020)/ *Used new method (UHH use civil projekction Long Form SP2020)*

Sumber/*Source*: BPS Kota Blitar/*BPS - Statistics of Blitar Municipality*

Sedangkan pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan menurut tingkat pendidikan di Kota Blitar, menurut BPS Kota Blitar Dalam Angka 2024 adalah sebagai berikut :

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *Educational Attainment*	Tahun *Year*		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki/*Male*	**108**	**115**	**206**
S D/*Primary School*	1	2	11
SMTP Umum/ *General Middle School*	2	27	25
SMTA Umum/ *General High School*	12	27	52
SMTA Kejuruan/ *Vocational High School*	22	52	78
Perguruan Tinggi/D3/ *College*	71	7	40
Perempuan/*Female*	**104**	**175**	**335**
S D/*Primary School*	12	26	28
SMTP Umum/ *General Middle School*	26	44	67
SMTA Umum/ *General High School*	22	39	73
SMTA Kejuruan/ *Vocational High School*	16	60	101
Perguruan Tinggi/D3/ *College*	28	6	66
Jumlah/*Total*	**212**	**290**	**541**

Sumber/*Source* : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Blitar/*Cooperatives, Micro, Small and Midle Enterprises and Labor Agency of Blitar Municipality*

b. Selanjutnya menurut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,2021) semakin meningkatnya persentase angkatan kerja perempuan seharusnya diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang tidak bias gender sehingga mampu menyerap angkatan kerja tanpa ada diskriminasi gender.

Jenis Kegiatan *Type of Activity*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-laki/*Male*	Perempuan/*Female*	Jumlah/*Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/*Economically Active*	**48.041**	**39.135**	**87.176**
- Bekerja/*Working*	45.575	37.030	82.605
- Pengangguran Terbuka/*Unemployment*	2.466	2.105	4.571
Bukan Angkatan Kerja/*Economically Inactive*	**11.334**	**22.134**	**33.468**
Jumlah/*Total*	**59.375**	**61.269**	**120.644**
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *Economically active Participation Rate*	**80,91**	**63,87**	**72,26**
- Tingkat Pengangguran *Unemployment Rate*	**5,13**	**5,38**	**5,24**

Sumber/*Source* : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/*BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

c. Terakhir pada dimensi pemberdayaan, ketimpangan gender dilihat dari persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Semakin besar skor yang diraih, maka semakin besar angka kursi yang diduduki oleh perempuan pada parlemen. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Keterlibatan perempuan di parlemen di Kota Blitar belum mencapai 30%. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Blitar menurut BPS Blitar dalam Angka 2024 :

Partai Politik *Political Parties*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI-Perjuangan	8	2	10
PKB	3	1	4
Partai Golkar	2	-	2
PPP	3	-	3
Partai DEMOKRAT	2	-	2
PKS	-	1	1
Partai HANURA	1	-	1
Partai Gerinda	2	-	2
Partai Nasdem	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**21**	**4**	**25**

Sumber/*Source*: Sekretariat DPRD Kota Blitar/*Secretariat of Regional Parliamentry Assembly of Blitar Municipality*

Meskipun Kota Blitar dikategorikan sebagai wilayah dengan skor IDG tinggi, tetapi masih terdapat permasalahan kesetaraan gender. Permasalahan tersebut dapat dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan serta prosentase keterlibatan perempuan di parlemen yang belum mencapai 30%.
Tindak lanjut yang dilakukan yaitu : melakukan identifikasi perempuan bekerja di swasta/sektor formal; meningkatkan kapasitas perempuan dalam berusaha/bekerja; penguatan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan.

2. Indikator kinerja Persentase kelembagaan PUG yang aktif merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Restra Tahun 2021-2026. Nilai dari Persentase kelembagaan PUG yang aktif tahun 2023 adalah 63,3% dari target 47,28%. Jumlah lembaga/OPD di Kota Blitar ada 29 dan yang sudah melaksanakan PUG ada 29 OPD. Jumlah anggota lembaga aktif sebanyak 9.831 orang, sedangkan jumlah seluruh anggota lembaga ada 15.523 orang.
   Pengumpulan dan pengolahan data terpilah menurut jenis kelamin disebut merupakan syarat yang diperlukan untuk berbagai keperluan, utamanya untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Ini sesuai dengan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
   Kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu :
   a. Tidak semua anggota lembaga di Kota Blitar aktif dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender
   b. Data dan informasi tentang data terpilah menurut jenis kelamin pada umumnya belum tersedia di setiap perangkat daerah. Sekalipun ada, belum dilakukan analisis secara detail.

   Tindak lanjut :
   a. Mengadakan sosialisasi, pelatihan serta pemberian edukasi kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan terkait PUG secara rutin dan konsisten agar perempuan di Kota Blitar berpartisipasi aktif dalam pembangunan (baik dibidang politik, hukum, sosial termasuk ekonomi)
   b. Melaksanakan sosialisasi Perda PUG dan Penyusunan perwali tentang pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023
   c. Melaksanakan pelatihan sistem data terpilah gender

3. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Restra Tahun 2021-2026 mencapai nilai 100%, karena setiap kasus kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan di Dinas P3AP2KB selalu di selesaikan 100%. jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ada 11 orang dan yang diselesaikan ada 11 orang.

Kendala/permasalahan yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini yaitu : Di Kota Blitar sudah didirikan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berfungsi untuk wadah keluarga berdiskusi bila ada masalah, tapi sampai saat ini PUSPAGA ini belum berjalan optimal sehingga pelayanan kepada keluarga khususnya dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan juga masih belum maksimal, sehingga kasus yang lapor hanya sedikit jadi realisasi anggaran untuk kasus pendampingan juga hanya sedikit, sesuai jumlah kasus yang ditangani

Untuk menjaga tingkat responsif penyelesaian kasus tetap 100% antara lain :

a. Lebih mengoptimalkan peran PUSPAGA melalui pertemuan dan koordinasi dengan Satgas dan lembaga lain
b. Pembentukan Pos Curhat di masing-masing kelurahan

4. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Restra Tahun 2021-2026 mencapai nilai 100%, karena setiap kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Dinas P3AP2KB selalu di selesaikan 100%. jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ada 24 anak dan yang diselesaikan ada 24 anak.

   Kendala/permasalahan yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini yaitu : Rumah aman sudah tersedia tapi belum dimanfaatkan karena belum ada klien yang membutuhkan sehingga anggaran untuk rumah aman tidak bisa diserap.

   Tindak lanjut :

   - Peningkatan kualitas SDM yang menangani perlindungan anak
   - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak kekerasan untuk memanfaatkan rumah aman

5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar (Semester 2) jumlah penduduk di Kota Blitar sebanyak 159.781 jiwa.

   Capaian LPP Tahun 2023 didasarkan pada Data Proyeksi SUPAS (Survey Penduduk Antar Sensus) 2015 sebesar 0,60. Namun setelah dirilis data hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 (LS SP2020) capaian LPP sebesar 1,19. Capaian ini berbeda dikarenakan sumber data yang digunakan dalam penghitungan juga berbeda. Oleh karena itu hasil LPP adalah hasil penghitungan LF SP2020 yang dijadikan dasar dalam penentuan target pada tahun berikutnya.

   Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, penduduk datang dan penduduk pindah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selama tahun 2023, keempat faktor tersebut mengalami penurunan.

Kecamatan *Subdistrict*	Penduduk (ribu) *Population (thousand)*		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 *Annual Population Growth Rate (%) 2022–2023*	
	2022[1]	2023[2]	2021-2022	2022-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Sukorejo	54,06	54,41	0,27	0,64
020. Kepanjenkidul	45,40	45,73	-0,07	0,76
030. Sananwetan	59,12	59,64	0,39	0,90
Kota Blitar	**158,56**	**159,78**	**0,20**	**0,77**

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka 2024

Kecamatan *Subdistrict*	Jenis Migrasi/*Migration*			
	Kelahiran *Birth*	Kematian *Death*	Datang *Move-in*	Pindah *Move-out*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Sukorejo	548	482	1.256	1.084
020. Kepanjenkidul	450	433	1.063	906
030. Sananwetan	621	531	1.577	1.355
Kota Blitar	**1.619**	**1.446**	**3.896**	**3.345**

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Sesuai dengan tupoksi Dinas P3AP2KB dalam menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk, tentunya dioptimalkan dengan mengendalikan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana dengan penggunaan kontrasepsi modern dengan lebih memprioritaskan pada segmen sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) Muda sehingga sejak dini tingkat kelahiran bisa ditekan dan rata - rata anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya bisa mencapai angka ideal yaitu 2.
Kendala yang dihadapi adalah menurunnya prevalensi KB Aktif bagi Pasangan Usia Subur yang dapat berdampak pada tingginya angka kelahiran
Tindak lanjutnya dengan melakukan KIE Program KB secara lebih masive melalui beberapa media cetak, elektronik dan media sosial.

6. Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur selama masa reproduksi) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana penghitungannya dilakukan setahun sekali pada akhir tahun 2024 oleh BPS. Sebelum capaian tahun berjalan di publikasikan oleh BPS, maka menggunakan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 senilai 1,92.
Jika TFR lebih besar dari 2,0, maka populasi cenderung bertumbuh, sedangkan jika kurang dari 2,0, maka populasi cenderung menurun.
BKKBN menyatakan bahwa tingginya angka prevalensi stunting mempunyai korelasi yang erat dengan angka kesuburan total (TFR) yang tinggi. Semakin tinggi angka TFR, semakin tinggi angka prevalensi stunting. Apabila TFR rendah, maka akan paralel dengan jumlah kasus stunting baru dari kelompok usia bayi baru lahir yang rendah pula.
Kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan SDM pengelola program pengendalian penduduk utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi pengendalian penduduk
b. Peran motivator KB dalam peningkatan kesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) muda perlu ditingkatkan utamanya terkait perluasan cakupan sasaran penggerakan KB
c. Belum optimalnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pendampingan pada keluarga beresiko stunting

Tindak lanjut untuk sasaran ini adalah :

a. Pelatihan SDM pengelola pengendalian penduduk dan mitra kerja
b. Perumusan strategi optimalisasi peningkatan kesertaan KB melalui segmentasi sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) muda
c. Peningkatan peran TPK dalam pendampingan keluarga beresiko stunting

7. Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD adalah Rp. 231.604.482.797,00, sedangkan jumlah keseluruhan belanja operasional dan modal APBD adalah Rp. 676.400.349.360,00 sehingga prosentase ARG sebesar 34,24%. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah yang telah dilatih PUG ada 29 lembaga/OPD.
   Kendala yang dihadapi yaitu : belum semua program/kegiatan pada perangkat daerah dilakukan evaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota
   Tindak lanjutnya adalah koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD sehingga pada saat desk penyusunan RKA/P-RKA bisa sekaligus melaksanakan ARG untuk semua lembaga pemerintah/OPD.

8. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ada 30 anak; dan jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) ada 30 anak. Dari 30 anak ini, tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan sebanyak 9 anak, kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 13 anak, dan Kecamatan Sukorejo sebanyak 8 anak.

Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan di Kota Blitar pada tahun 2023 ada 3 lembaga, yaitu 1) P2TP2A yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 50 Blita; 2) UPPA Polres Blitar Kota, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 17 Blitar; dan 3) Satgas PPA Kota Blitar dimana sekretariatnya beralamat di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.
Kendala yang dihadapi : semua kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, sudah ditangani 100%. Sudah disediakan Rumah Aman yang berfungsi untuk tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan/kekerasan seksual dibawah umur. Namun sayangnya keberadaan dan fungsi rumah aman itu sendiri belum dimanfaatkan karena belum ada klien yang memerlukan, sehingga anggaran yang disediakan untuk rumah aman ini belum bisa terrealiasasi.
Tindak lanjutnya :

a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP; untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan pelayanan dan pendampingan yang berdasarkan SOP
b. Peningkatan kualitas SDM di bidang perlindungan anak; mengikuti pelatihan, seminar, workshop baik yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota

9. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan). Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ada 18 orang, jumlah penduduk perempuan ada 80.130 orang. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi di Kota Blitar ada 3 yaitu :
   a. P2TP2A yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 50 Blita;
   b. UPPA Polres Blitar Kota, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 17 Blitar; dan
   c. Satgas PPA Kota Blitar dimana sekretariatnya beralamat di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

   Kader perempuan di Kota Blitar yang sudah dilatih ada 684 orang, yang berada di 3 organisasi, yaitu :
   a. Tim Penggerak PKK, dengan jumlah anggota 614 orang
   b. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota, dengan jumlah anggota 35 orang
   c. Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dengan jumlah anggota 35 orang

   Kendala yang dihadapi yaitu : Pelayanan kepada keluarga khususnya dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan masih belum maksimal, dan kesadaran akan pelaporan kasus kekerasan belum optimal;
   Tindak lanjut :
   a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP; dalam memberika pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekersan terhadap perempuan berdasarkan SOP yang telah ada
   b. Menjaga tingkat responsif penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan lebih mengoptimalkan peran PUSPAGA (Pusat

Pembelajaran Keluarga) melalui pertemuan dan koordinasi dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, juga dengan lembaga lain

c. Pembentukan pos curhat di masing-masing kelurahan, mendorong setiap kelurahan untuk mendirikan pos curhat, melalui pertemuan PKK atau setiap pertemuan dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, karena tidak ada anggaran khusus untuk mendirikan Pos curhat di kelurahan

10. Angka kelahiran pada remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR);
    ASFR ini adalah banyaknya jumlah kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu (15-19 tahun). Kegunaan indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk , untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil Proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.
    ASFR 15-19 tahun erat kaitannya dengan pernikahan dibawah umur 20 tahun. Pernikahan pada usia ini dapat beresiko pada kesehatan ibu maupun anak yang dilahirkan.
    Jumlah kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ada 31 orang, yang tersebar di 3 kecamatan, Sukorejo ada 11 orang, Kepanjenkidul ada 13 orang dan Sananwetan ada 7 orang. Untuk jumlah perempuan usia 15-19 tahun ada 6.221 orang. Capaian ASFR sejumlah 17,20.
    Kendala yang dihadapi yaitu
    a. Belum termanfaatkannya secara optimal Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai Penyuluhan KB oleh kelompok remaja dan Keluarga yang memiliki Remaja
    b. Tingkat partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam kegiatan Bina keluarga Remaja (BKR) menurun
    Tindak lanjut :
    a. Meningkatkan KIE Kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja melalui jalur sekolah dan kelompok remaja di Kampung KB
    b. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi remaja berbasis teknologi informasi (layanan online peduli remaja)

11. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE);
    Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) sejumlah 1.135 orang, dengan rincian dimasing-masing kecamatan yaitu Kepanjenkidul 345 orang, Sananwetan 385 orang dan Sukorejo ada 405 orang. Untuk sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) sejumlah 1.135 orang.
    Dalam pelaksanaan KIE Program KKBPK tidak ditemukan kendala yang berarti karena alokasi anggaran yang tersedia sudah tercukupi dan tenaga Penyuluh KB serta Kader KB sudah secara optimal melaksanakan KIE

Tindak lanjut : Mempertahan metode KIE yang sudah berjalan dan meningkatkan metode KIE berbasis teknologi informasi utamanya melalui channel media sosial atau podcast

12. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR);
    Tingkat pemakaian metode kontrasepsi modern dilakukan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS). Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).
    Jumlah peserta KB modern 13.255 orang, sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur 20.502, sehingga dapat diketahui mCPR nya adalah 64,65%
    Kendala : menurunnya tren capaian mCPR dari tahun ke tahun
    Tindaklanjut :
    a. Meningkatkan komunikasi, informasi daan edukasi (KIE) alat kontrasepsi modern kepada Pasangan Usia Subur
    b. Meningkatkan akses terhadap layanan dan alat kontrasepsi modern yang berkualitas dan terjangkau
    c. Meningkatkan layanan pasca pemakaian alat kontrasepsi modern khususnya yang menangani masalah kesehatan aatau efek samping

13. Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP.
    Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ada 25 faskes dari jumlah total faskes ada 25, yang artinya persentasenya adalah 100%.
    Kendala : Tidak ada kendala karena semua fasilitas kesehatan tenaga bidan dan dokternya sudah terlatih CTU (Contraceptive Technologi Update).
    Tindak lanjut :
    a. Update secara berkala kompetensi Tenaga Dokter dan Bidan dalam pemasangan kontrasepsi
    b. Fasilitasi sarana prasarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan

14. Persentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
    Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB modern.
    Jumlah peserta KB aktif MKJP pada tahun 2023 sebesar 5.077 orang dari jumlah peserta KB aktif sebanyak13.255 orang, dengan prosentase 38,3%.
    Kendala : Masih adanya kekhawatiran Pasangan Usia Subur terkait efek samping penggunaan kontrasepsi khususnya Metode Operasi Pria (MOP)
    Tindak lanjut :

a. Meningkatkan KIE dan sosialisasi kelebihan dan kekurangan penggunaan metode kontrasepsi
b. Meningkatkan layanan pasca pemakaian MKJP khususnya penanganan efek samping dan jaminan pasca layanan

15. Persentase pelayanan KB pasca persalinan;
KB pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari.
Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ada 1.286 orang. Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan ada 1.570 orang.
Kendala : Belum semua Klinik KB melayani KB Pasca Persalinan
Tindak lanjut :
a. Pelatihan Tenaga Dokter dan Bidan yang kompeten terkait KB Pasca Persalinan
b. Peningkatan KIE bagi Ibu Hamil dalam perencanaan KB Pasca Persalinan
c. Advokasi ke Klinik KB terkait efektivitas KB Pasca Persalinan

16. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah;
Perhitungan capaian pada tahun 2022-2023 didasarkan pada jumlah keluarahan dengan kesertaan rendah di bagi jumlah kelurahan yang ada di Kota Blitar. Jumlah kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ada 3 kelurahan dari 21 kelurahan yang ada di Kota Blitar yaitu :
A. Kelurahan Kauman : 70,35%
B. Kelurahan Karangtengah : 71,10%
C. Kelurahan Karangsari 72,86%
Untuk tahun 2024-2026 dihitung berdasarkan prevalensi kesertaan KB rendah.
Kendala : Minat masyarakat untuk ber KB utamanya KB MKJP tidak merata di semua Kelurahan
Tindak lanjut : Meningkatkan Sosialisasi dan kunjungan rumah bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB

17. Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI);
Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah.
Jumlah peserta KB pada keluarga PBI ada 2.575 orang, sedangkan jumlah keluarga PBI ada 2.969 orang, sehingga prosentasenya 85,94%
Kendala : Minat untuk ber KB Pasangan Usia Subur Penerima Bantuan Iuran menurun
Tindak lanjut : KIE dan pendampingan khusus oleh kader KB dan Penyuluh KB kepada Pasangan Usia Subur PBI agar kesertaan KB meningkat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses penentuan isu-isu penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas Pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi Dinas P3AP2KB di masa datang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai kondisi objektif pada Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka pada penyusunan Renja Tahun 2025 perlu memperhatikan isu-isu penting tugas dan fungsi yang berkembang di Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dipengaruhi faktor partisipasi perempuan dalam pembangunan, persentase angkatan kerja perempuan; dan persentase keterwakilan perempuan di parlemen.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin di setiap OPD dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
3. Belum maksimalnya pelayanan kepada keluarga khususnya dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan kesadaran akan pelaporan kasus kekerasan yang belum optimal;
4. Belum optimalnya fungsi rumah aman dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
5. Menurunnya tren capaian kesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur;
6. Belum optimalnya KIE program pengendalian penduduk dan KB melalui media sosial dan media elektronik lainnya;
7. Belum optimalnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, tema pembangunan Kota Blitar tahun 2025 adalah ”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian

Ekonomi Daerah". Tema pembangunan tahun 2025 tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas P3AP2KB mendukung prioritas pembangunan ke-3, yaitu Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Adapun program Dinas P3AP2KB yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pemenuhan Hak Anak
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Pengendalian Penduduk
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
8. Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas P3AP2KB Tahun 2025 dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas P3AP2KB sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kota Blitar**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87**	**4.310.415.374,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Blitar**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87**	**4.462.444.193,00**	**Adanya penyesuaian pagu anggaran dinas**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart*	*100%*	*31.368.500,00*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart*	*100%*	*30.667.300,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran dinas*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.073.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14.478.800,00	Adanya pengurangan pagu anggaran dinas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	16.295.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	16.188.500,00	Adanya pengurangan pagu anggaran dinas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	*100%*	*3.198.008.389,00*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	*100%*	*3.348.258.495,00*	*Adanya penyesuaian gaji pegawai*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.194.358.389,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.344.608.495,00	Adanya penyesuaian gaji pegawai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	3.650.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	*100%*	*125.254.900,00*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	*100%*	*114.636.900,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99 Paket	57.392.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99 Paket	50.899.000,00	Adanya pengurangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
											pagu anggaran
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	67.862.900,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	63.737.900,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	*100%*	*282.210.750,00*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	*100%*	*279.401.882,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.581.900,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.571.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.897.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.094.600,00	Adanya kebutuhan perlengkapan kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	13.723.700,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.413.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.825.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.725.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.999.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.994.300,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	200.102.950,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	201.260.382,00	Jumlah perjalanan dinas yang meningkat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.680.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.643.600,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	*100%*	*74.296.802,00*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	*100%*	*79.325.300,00*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	74.296.802,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	79.325.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart*	*100%*	*269.749.505,00*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart*	*100%*	*292.058.360,00*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.196.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.190.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	64.991.505,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	76.800.360,00	Penyesuaian tarif listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	203.562.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	214.068.000,00	Penyesuaian honor THL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kota Blitar*	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	*100%*	*329.526.528,00*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Blitar*	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	*100%*	*318.095.956,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	119.657.528,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	129.199.256,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	29.873.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	36.896.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	179.995.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.700,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000,00	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Kota Blitar**	**Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis** **Persentase perempuan pengambilan keputusan publik** **Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG**	**0,003** **45%** **100%**	**1.067.008.700,00**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kota Blitar**	**Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis** **Persentase perempuan pengambilan keputusan publik** **Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG**	**0,003** **45%** **100%**	**1.017.240.900,00**	**Adanya pengurangan pagu anggaran**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis*	*42%*	*92.499.400,00*	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis*	*42%*	*92.000.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	92.499.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	92.000.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*	*20,67*	*374.509.900,00*	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*	*20,67*	*346.240.900,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	238.509.900,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	220.240.900,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	136.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	126.000.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi*	*3 organisasi*	*599.999.400,00*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi*	*3 organisasi*	*579.000.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 Lembaga	114.999.600,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 Lembaga	105.000.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	620 Orang	484.999.800,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	614 Orang	474.000.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Kota Blitar**	**Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan**	**100%**	**383.006.620,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kota Blitar**	**Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan**	**100%**	**353.221.650,00**	**Adanya pengurangan pagu anggaran**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan*	*100%*	*78.098.700,00*	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan*	*100%*	*85.748.900,00*	*Frekuensi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan bertambah*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	78.098.700,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	85.748.900,00	*Frekuensi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan bertambah*
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih*	*100%*	*162.962.320,00*	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih*	*100%*	*142.962.950,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	14 Orang	44.999.900,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	36 Orang	24.999.881,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	117.962.420,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	117.962.420,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan*	*100%*	*141.945.600,00*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan*	*100%*	*124.509.800,00*	Adanya pengurangan pagu anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	115 Orang	60.445.800,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	42 Orang	60.445.800,00	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*3 Dokumen*	*81.499.800,00*	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*64.064.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Kota Blitar**	**Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak**	**100%**	**132.297.600,00**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Blitar**	**Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak**	**100%**	**97.260.700,00**	**Adanya pengurangan pagu anggaran**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase anak yang partisipasi dalasm perencanaan pembangunan*	*100%*	*54.446.000,00*	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan*	*100%*	*27.794.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	54.446.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	27.794.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak*	*100%*	*77.851.600,00*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak*	*100%*	*69.466.700,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	42.342.600,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	42.342.500,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	35.509.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.124.200,00	Adanya pengurangan pagu anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Kota Blitar**	**Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih**	**100%**	**439.081.350,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kota Blitar**	**Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih**	**100%**	**457.776.769,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak*	*100%*	*192.075.500,00*	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak*	*100%*	*180.749.719,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Kota Blitar	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	6 Kegiatan	141.324.500,00	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Kota Blitar	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	6 Kegiatan	130.000.119,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Blitar	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	50.751.000,00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Blitar	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	272 Orang	50.749.600,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus*	*100%*	*132.517.050,00*	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus*	*100%*	*142.517.050,00*	*Bertambahnya jumlah AMPK yang dilayani*
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	15 Orang	15.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	24 Orang	25.000.000,00	*Jumlah AMPK yang ditangani bertambah*
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Blitar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	70 Layanan	117.517.050,00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Blitar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	85 Layanan	117.517.050,00	Jumlah layanan terhadap AMPK bertambah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak*	*100%*	*114.488.800,00*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak*	*100%*	*134.510.000,00*	*Frekuensi peningkatan kapasitas SDM bertmabah*
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Blitar	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	400 Orang	114.488.800,00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Blitar	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	400 Orang	134.510.000,00	*Frekuensi peningkatan kapasitas SDM bertmabah*
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Kota Blitar**	**Rata-rata usia kawin pertama wanita**	**25,14 tahun**	**194.600.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Kota Blitar**	**Rata-rata usia kawin pertama wanita**	**25,14**	**250.124.400,00**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Kota Blitar*	*Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)*	*23,12 Tahun*	*73.500.000,00*	*Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	*Kota Blitar*	*Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)*	*23,12*	*39.547.600,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Blitar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	47.500.000,00	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Blitar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	39.547.600,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia*	*100%*	*121.100.000,00*	*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia*	*100&*	*210.576.800,00*	Penambahan Jumlah kampung Kb dari 10 Kampung KB menjadi 21 Kampung K
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ssitem Informasi Keluarga	Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 laporan	60.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Ssitem Informasi Keluarga	Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 laporan	60.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	7 Dokumen	29.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	21 Dokumen	55.476.800,00	Penambahan Jumlah kampung Kb dari 10 Kampung KB menjadi 21 Kampung KB
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	30.000.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	42.600.000,00	Penambahan Jumlah kampung Kb dari 10 Kampung KB menjadi 21 Kampung KB
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	42.600.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	33.000.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	19.500.000,00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	19.500.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Kota Blitar**	**Persentase KB Aktif** **Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**74,46 Persen** **8,25 Indeks**	**2.107.581.378,00**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kota Blitar**	**Persentase KB Aktif** **Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**74,46 Persen** **8,25 Indeks**	**1.985.127.800,00**	**Adanya pengurangan pagu anggaran**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Kota Blitar*	*Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB*	*3 kecamatan*	*499.500.000,00*	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*Kota Blitar*	*Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB*	*3 kecamatan*	*439.500.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Laporan	140.000.000,00	Pengendalian Program KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	80.000.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	64.500.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	64.500.000,00	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga	8 Laporan	45.000.000,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga	9 Laporan	45.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	100.000.000,00	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	100.000.000,00	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	150.000.000,00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	150.000.000,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Kota Blitar*	*Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi*	*100%*	*760.423.378,00*	*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	*Kota Blitar*	*Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi*	*100%*	*784.369.800,00*	*Penambahan Jumlah Kader IMP sebanyak 60 orang*
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	361 Orang	335.784.378,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	421 Orang	359.730.800,00	*Penambahan Jumlah Kader IMP sebanyak 60 orang*
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	424.639.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	424.639.000,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Blitar*	*Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	*50,56 %*	*479.908.000,00*	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Blitar*	*Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	*50,56*	*393.508.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	25 Laporan	12.500.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	12 Laporan	12.500.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1000 Orang	325.958.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	655 Orang	325.958.000,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	16.500.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	16.300.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Blitar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	155 Orang	77.500.000,00	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Blitar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	20 Orang	38.750.000,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Kota Blitar*	*Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB*	*100%*	*367.750.000,00*	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*Kota Blitar*	*Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB*	*100%*	*367.750.000,00*	*Adanya pengurangan pagu anggaran*
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah DASHAT di Kampung KB	21 Unit	210.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah DASHAT di Kampung KB	11 Unit	210.000.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Kampung	154.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Blitar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Kampung	154.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Kota Blitar**	**Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB**	**74,46 Persen**	**956.937.411,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kota Blitar**	**Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB**	**74,46 Persen**	**961.291.800,00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Kota Blitar*	*Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina*	*100%*	*462.437.411,00*	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Kota Blitar*	*Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina*	*100%*	*466.791.800,00*	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	28.800.000,00	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	28.800.000,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	78.500.000,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	169.573.000,00	Penyelnggaraan Event Harganas Tk. Prop di Kota Blitar
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	240.000.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	18 Unit	240.000.000,00	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Blitar	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	807 Orang	115.137.411,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Blitar	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	60 Orang	28.418.800,00	Adanya pengurangan pagu anggaran
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Kota Blitar*	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	*3 laporan*	*494.500.000,00*	*Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Kota Blitar*	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	*3 laporan*	*494.500.000,00*	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Kota Blitar	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	3 laporan	115.000.000,00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Kota Blitar	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	3 laporan	115.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Blitar	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	9664 laporan	379.500.000,00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Blitar	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3720 laporan	379.500.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuarikan hasil telaah hibah, musrenbanng dan pokok-pokok pikiran DPRD. Pada penyusunan Renja 2025, tidak ada usulam Pokok Pikiran DPRD atau usulan hibah. Yang adaaaaaaaa hanya usulan Musrenbang Kecamatan, dimana ada dari beberapa usulan tersebut yang diakomodir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
1	Pembinaan atau sosialisasi terkait pencegahan stunting	***Program*** Pembinaan Keluarga Berencana (KB) ***Kegiatan*** Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal ***Sub Kegiatan*** Pengendalian Program KKBPK	Kelurahan se-Kecamatan Sananwetan, Kepanjenkidul, sukorejo	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	140	Orang	Diakomodir, menggunakan dana BOKB Non Fisik dan sasarannya adalah keluarga resiko stunting se-Kota Blitar
2	Sosialisasi KB Pria	***Program*** : Pembinaan Keluarga Berencana ***Kegiatan*** : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota ***Sub Kegiatan*** : Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kelurahan Tanggung	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	30	Orang	Diakomodir, tetapi untuk seluruh masyarakat Kota Blitar
3	Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	***Program*** Pengendalian Penduduk ***Kegiatan*** Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Pakunden, Sukorejo	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	20	Orang	Diakomodir, menggunakan dana BOKB Non Fisik

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
		dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk ***Sub Kegiatan*** Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal					
4	Pendampingan & fasilitasi keluarga balita rawan stunting & stanting	***Program*** Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ***Kegiatan*** Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ***Sub Kegiatan*** Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Kelurahan Blitar	Jumlah keluarga yang mendapat pendampingan	50	Balita	Diakomodir, menggunakan dana BOKB Non Fisik
5	Sosialisasi kepada calon pengantin	***Program*** Pengendalian Penduduk ***Kegiatan*** Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	30	Pasangan	Diakomodir, menggunakan dana BOKB non fisik

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume		Catatan
		dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ***Sub Kegiatan*** Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs jalur non formal dan informal					

Sumber: Non DSP Musrenbang Kecamatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS P3AP2KB KOTA BLITAR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
   - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
   - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
   - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
   - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   - ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
   - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
   - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial
   Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu
   (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
      a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
      b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
      c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
      d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
   (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
      a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
      b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
      c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
      d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
      e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
      f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja
   (3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
      a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
      b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
      c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
      d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
      e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Transformasi Ekonomi
   Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu
   (1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
      a. Penguatan industri dasar
      b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
      c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
      d. Pengembangan industri medium-high technology
      e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
      f. Produktivitas UMKM dan koperasi
      g. Pengembangan ekonomi biru
      h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
      i. Peningkatan produktivitas BUMN
      j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
      k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
      l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
      m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
   (2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
      a. Percepatan transisi energi
      b. Ekonomi sirkular industri
      c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
      d. Pengelolaan hutan lestari
   (3) Transformasi digital, melalui:
      a. Penguatan fondasi utama transformasi digital

b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
c. Pemerintah digital
d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
c. Perkuatan system logistic nasional
d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Wilayah metropolitan
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
a. Digitalisasi pelayanan publik
b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
c. Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
b. Penguatan tata kelola ASN
c. Penggajian tunggal ASN
d. Reformasi system pension
e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
   a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
   b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
      a. Pembangunan bidang hukum
      b. Pembangunan bidang keamanan
      c. Pembangunan bidang demokrasi
   (2) Stabilitas ekonomi makro
      a. Optimalisasi pendapatan negara
      b. Peningkatan kualitas belanja negara
      c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
   (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
      a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
      b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
   (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
      a. Penguatan ketahanan keluarga
      b. Peningkatan kesetaraan gender
      c. Perwujudan masyarakat inklusif
   (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
      a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
      d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
   (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
      a. Kemandirian pangan
      b. Peningkatan ketahanan air nasional
      c. Ketahanan energi
   (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
      a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
      b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025

Berkaitan dengan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan, khususnya Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dimana untuk mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, maka Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia harus dapat melindungi anak-anak dari ancaman krisis moral dan karakter.

Setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan dan inklusivitas. Pembangunan tersebut harus merata, adil dan dapat mencakup semua kalangan masyarakat, serta dapat mengakomodasi suara dari kelompok-kelompok rentan. Pemberian kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan

akan menghasilkan kebijakan yang representatif dan inklusif. Oleh karenanya, dengan mendorong perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, akan mendorong perubahan tatanan, kehidupan menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan manusia, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan individu saja, namun juga harus melalui pendekatan keluarga. Secara garis besar masih ada bias gender dalam kehidupan keluarga terutama ketertinggalan berbagai aspek berada di pihak perempuan, anak dan lansia perempuan. Dapat dikatakan sangatlah relevan dan penting mengintegrasikan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga yang terkait dengan pendekatan teori struktural fungsional dan teori sistem.

Tantangan keluarga di masa depan adalah transisi demografi dan struktur keluarga, era *ageing population*, mobilitas yang tinggi, fenomena *childfree, delayed married*, perilaku kehidupan sesama jenis yang akan merubah transisi demografi dan struktur keluarga.

Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sedangakan kesetaraan gender di Kampung KB adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesemapatan dan akses yang sama dalam segala hal.

Kesetaraan gender penting dalam program Kampung KB karena memberikan manfaat jauh lebih besar, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan reproduksi, meningkatkan pendidikan, mendorong partisipasi politik dan membangun masyarakat yang harmonis.

Untuk mencapai kesetaraan gender di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), strategi yang dilakukan melalui program dan kegiatan berikut ini :

1. Pemberdayaan Perempuan;
   Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu komponen kunci dalam mencapai kesetaraan gender. Kampung KB telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan ketrampilan, pendidikan keuangan dan akses terhadap modal usaha. Dengan demikian, perempuan dapat menjadi agen perubahan dan memiliki kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka.
2. Pelibatan aktif pria;
   Kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif pria. Kampung KB telah berupaya untuk melibatkan pria dalam upaya-upaya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Pria diajak untuk berperan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan keluarga, serta mendukung perempuan dalam peningkatan kualitas hidup mereka malalui akses yang sama terhadap pekerjaan dan pendidikan.
3. Pendidikan kesetaraan gender;
   Salah satu langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Kampung KB telah melaksanakan berbagai program pendidikan kesetaraan gender, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya melibatkan pria dalam perencanaan keluarga;
4. Kemitraan dengan lembaga pendukung;

Untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan, Kampung KB menjalin kemitraan dengan lembaga pendukung, seperti organnisasi Non Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemitraan ini memungkinkan adanya kolaborasi dan pemenuhan kebutuuuhan pendukung yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang aktif.

5. Pengawasan dan evaluasi;
   Kampung KB juga melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kesetaraan gender. Melalui mekanisme ini, keslahan dan kelemahan program dapat diidentifikasi dan diperbaiki agar mecapai hasil yang lebih optimal.

Kesetaraan gender merupakan komponen penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Kampung KB telah memberikan perhatian serius terhadap upaya mencapai kesetaraan gender, dengan pemberdayaan perempuan, pelibatan aktif pria, pendidikan kesetaraan gender, kemitraan dengan lembaga pendukung, dan pengawasan serta evaluasi program. Dengan terus menjalankan langkah-langkah ini, diharapkan Kampung KB dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi daerah-daerah lain dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang mewakili keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	%	67,87	67,63	67,69	75,50	76,59
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	Kelembagaan PUG yang aktif yaitu kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi Perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara Perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi dan kekerasanseksual.	%	100	100	100	100	100
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya	%	100	100	100	100	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
2	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Metode atau cara yang digunakan untuk mengukur atau menghitung perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada persentase perubahan jumlah penduduk dari awal periode ke akhir periode, biasanya diukur dalam satuan persen pertahun.	%	0,67	0,60	1,00	0,98	0,96
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita Wanita usia subur mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun		2,13	1,92	1,94	1,96	2,00
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunanaan APBD Nilai A pada Range >80-90	Nilai	83	85,29	85,32	85,34	85,36
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunanaan APBD Nilai A pada Range >80-90	Nilai	83	85,29	85,32	85,34	85,36

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas P3AP2KB disusun berdasarkan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan Dinas P3AP2KB, tindaklanjut LKJIP dan sebagainya. Terdapat 8 Program, 26 Kegiatan dan 65 Sub kegiatan. Faktor-faktor yang memjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan rutin setiap tahun
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
3. Program dan kegiatan yang sudah ada di juknis dana khusus (DAK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan DAK BOKB)

Pada tahun 2025, Dinas P3AP2KB membutuhkan total anggaran Rp. 9.584.488.093,00 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum : Rp. 6.629.941.093,-
2. Dana Alokasi Khusus : Rp. 2.954.547.000,-
   A. DAK Non Fisik PPA : Rp. 406.000.000,-
   B. DAK Non Fisik BOKB : Rp. 2.123.908.000,-
   C. DAK fisik BOKB : Rp. 424.639.000,-

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung sasaran Meningkatnya kinerja perangkat daerah
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung Tupoksi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung Tupoksi
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung Tupoksi
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Mendukung sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
							Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Mendukung TupoksiTupoksi
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Mendukung Tupoksi
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung Tupoksi
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung Tupoksi
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Mendukung Tupoksi
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Mendukung Tupoksi
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Mendukung Tupoksi
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Mendukung sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Mendukung Tupoksi
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung Tupoksi
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Mendukung Tupoksi
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Tindaklanjut LKJIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Mendukung Tupoksi
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Mendukung Tupoksi
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung TupoksiTupoksi
4	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	Mendukung sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Mendukung Tupoksi
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung Tupoksi
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Mendukung Tupoksi
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung Tupoksi
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung Tupoksi
5	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Mendukung sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Mendukung Tupoksi
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Mendukung Tupoksi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Mendukung Tupoksi
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Tindaklanjut LKJIP
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Mendukung Tupoksi
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Mendukung Tupoksi
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Mendukung Tupoksi
6	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Mendukung sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Mendukung Tupoksi
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Mendukung Tupoksi
7	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Aktif Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Mendukung sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Mendukung Tupoksi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
						Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Mendukung penurunan stunting
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Mendukung penurunan stunting
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tindaklanjut LKJIP
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Mendukung Tupoksi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
							Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Mendukung Tupoksi
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Mendukung penurunan stunting
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Mendukung Tupoksi
8	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Mendukung sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Mendukung Tupoksi
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Mendukung Tupoksi
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Mendukung Tupoksi
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Mendukung penurunan stunting
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Mendukung Tupoksi
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mendukung Tupoksi
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	Mendukung Tupoksi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
						salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Mendukung penurunan stunting

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan DP3AP2KB Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026, telaahan kebijakan nasional, hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2024, telahaan usulan kegiatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Kegiatan prioritas daerah tahun 2025 yang menjadi prioritas DP3AP2KB tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas DP3AP2KB Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Blitar Keberagaman	Sekolah Perempuan (Sekoper)	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	*Perlindungan Perempuan* Program : Perlindungan Perempuan Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
				Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota *Perlindungan Anak* Program : Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA
		Penguatan ketahanan keluarga	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
	Blitar Sehat	Pendampingan keluarga beresiko stunting		Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu hamil, pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)

Sumber: RKPD Tahun 2025, diolah

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas P3AP2KB juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJiP Dinas P3AP2KB Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas P3AP2KB Tahun 2023 pada Renja Dinas P3AP2KB Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Kelembagaan PUG yang aktif :		
	a. Mengadakan sosialisasi, pelatihan serta pemberian edukasi kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan terkait PUG secara rutin dan konsiten agar perempuan di Kota Blitar berpartisipasi aktif dalam pembangunan (baik dibidang politik, hukum, sosial termasuk ekonomi)	Akan dilakukan pelatihan secara rutin setiap tahun dan pendampingan penyusunan PPRG kepada OPD	*Program* Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; *Kegiatan* Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota; *Sub Kegiatan* Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota
	b. Melaksanakan pelatihan sistem data terpilah gender	Akan dilakukan pelatihan system data terpilah gender untuk seluruh OPD	
	c. Melaksanakan sosialisasi Perda PUG dan Penyusunan Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan Perda PUG Nomor 3 tahun 2023	Pada setiap pertemuan tentang Penagrusutamaan gender, akan dilakukan sosialisasi Perda PUG Nomor 3 Tahun 2025 (karena tidak ada anggaran khusus untuk sosialisasi Perda PUG)	
2.	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan :		
	a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP	Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan SOP yang telah ada	Program Perlindungan Perempuan; *Kegiatan* Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan; *Sub Kegiatan* Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dan; *Sub kegiatan* koordinasi dan sinronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
	b. Menjaga tingkat responsif penyelesaian	Akan lebih mengoptimalkan peran PUSPAGA	*Program* Perlindungan Perempuan

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	kasus kekerasan terhadap perempuan	(Pusat Pembelajaran Keluarga) melalui pertemuan dan koordinasi dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, juga lembaga lain	*Kegiatan* Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota *Sub kegiatan* Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	c. Pembentukan Pos Curhat di masing-masing kelurahan	Mendorong setiap kelurahan untuk mendirikan pos curhat, melalui pertemuan PKK atau setiap pertemuan dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, karena tidak ada anggaran khusus untuk mendirikan Pos curhat di keluarahan	
3.	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak :		
	a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP	Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan pelayanan dan pendampingan yang berdasarkan SOP	*Program* Perlindungan Khusus Anak; *Kegiatan* Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; *Sub Kegiatan* Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan *Sub Kegiatan* Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK
	b. Peningkatan kualitas SDM di bidang Perlindungan Anak	Mengikuti pelatihan, seminar, workshop baik yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota	*Program* Perlindungan Khusus Anak *Kegiatan* Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota *Sub kegiatan* Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
	A. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat/anak-anak yang terkena dampak kekerasan untuk	Mengadakan sosialisasi tentang kekerasan anak dan manfaat rumah aman	*Program* Perlindungan Khusus Anak *Kegiatan* Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	memanfaatkan rumah aman dan sosialisasi perlindungan anak		para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota *Sub Kegiatan* Penguatan Kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA.
4.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi :		
	a. Diperlukan inovasi strategi Promosi dan KIE Pasangan Usia Subur/generasi milenial melalui optimalisasi pemanfaatan KIE dengan media sosial	Membuat inovasi dalam rangka promosi dan KIE kepada PUS dan generasi milenial melalui media sosial	*Program* Pembinaan Keluarga Berencana; *Kegiatan* Pelaksanaan Advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local; *Sub Kegiatan* Promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana berikut :

TABEL 4.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS P3AP2KB TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA BLITAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						9.584.488.093,00							10.101.076.925,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.584.488.093,00							10.101.076.925,00	
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						6.387.944.093,00						A/85,36	6.663.331.525,00	
1	2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			BAIK /87 NILAI	4.462.444.193,00						Baik /88	4.536.767.575,00	
	2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	-			100 %	30.667.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	32.935.875,00	
	2 08 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	14.478.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur	ASN DINAS P3AP2KB	8 Dokumen	15.826.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	16.188.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	14 Laporan	17.109.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-			100 %	3.348.258.495,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	3.357.908.808,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.344.608.495,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	24 orang/bulan	3.354.076.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	3.650.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	17 Laporan	3.832.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-			100 %	114.636.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	131.517.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				99 Paket	50.899.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	99 paket	60.261.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	63.737.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	31 orang	71.256.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-			100 %	279.401.882,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	296.321.050,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.571.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	1 Paket	9.010.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	22.094.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	6 Paket	17.742.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	12.413.000,00	Kota Blitar, Semua Kecama	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis	ASN DINAS P3AP2KB	5 Paket	14.409.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
													tan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	9.725.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	7 Paket	15.566.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.994.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	1 Paket	18.899.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	12 Dokumen	5.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	201.260.382,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	120 Laporan	210.108.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.643.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan,	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas	ASN DINAS P3AP2KB	2 Dokumen	4.914.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-			100 %	79.325.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	78.011.642,00	
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	79.325.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	3 unit	78.011.642,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	-			100 %	292.058.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	283.236.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.190.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	1 Laporan	1.255.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	76.800.360,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	36 Laporan	68.241.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	214.068.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	2 Laporan	213.740.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	-			100 %	318.095.956,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	100 %	356.835.700,00	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	129.199.256,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas	ASN DINAS P3AP2KB	37 unit	125.640.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	36.896.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	57 unit	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	ASN DINAS P3AP2KB	2 unit	188.995.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	2.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur	ASN DINAS P3AP2KB	4 unit	2.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				KELUARGA BERENCANA
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis Persentase perempuan pengambilan keputusan publik Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	-			0,003 % 45 % 100 %	1.017.240.900,00						0,003% 48% 100 %	1.120.359.600,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	-			42 %	92.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	OPD, Organisasi Perempuan, SEKOPER	47%	97.124.300,00	
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	92.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur	OPD, Organisasi Perempuan, SEKOPER	4 Dokumen	97.124.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-			20,67 %	346.240.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	SEKOPER, PEKKA, FORUM PUSPA, Perempuan Kota Blitar	20,73%	393.235.500,00	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	220.240.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	SEKOPER, PEKKA, FORUM PUSPA, Perempuan Kota Blitar	9 Dokumen	250.435.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Organisasi	126.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecama	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis	SEKOPER, PEKKA, FORUM	1 organisasi	142.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						tan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	PUSPA, Perempuan Kota Blitar			PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	-			3 organisasi	579.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan KotaBlitar	3 organisasi	629.999.800,00	
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				21 Lembaga	105.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan KotaBlitar	21 lembaga	120.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				614 Orang	474.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan KotaBlitar	625 orang	509.249.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	-			100 %	353.221.531,00						100 %	406.256.100,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			100 %	85.748.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan Kota Blitar, Satgas PPA	100 %	86.103.800,00	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan				3 Dokumen	85.748.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi	Perempuan Kota Blitar, Satgas PPA	4 Dokumen	86.103.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Kel/Desa	NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	-			100 %	142.962.831,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan KOrban Kekerasan, Satgas PPA, P2TP2A	100 %	171.109.500,00	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				36 Orang	24.999.881,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan KOrban Kekerasan, Satgas PPA, P2TP2A	40 Orang	47.249.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang				2 Layanan	117.962.950,00	Kota Blitar, Semua	DAK NONFISIK-DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya	Pembangunan karakter masyarakat	Perempuan KOrban	3 Layanan	123.860.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
				02	02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Kekerasan, Satgas PPA, P2TP2A			PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	-			100 %	124.509.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan Kota Blitar	100 %	149.042.800,00	
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				42 Orang	60.445.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Perempuan Kota Blitar	120 Orang	63.468.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															penyandang disabilitas	dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	64.064.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Perempuan Kota Blitar	4 Dokumen	85.574.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	-			100 %	97.260.700,00						100 %	138.912.500,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	-			100 %	27.794.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-anak Kota Blitar	100 %	57.168.300,00	
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak				3 Dokumen	27.794.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan	Anak-anak Kota Blitar	4 Dokumen	57.168.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Kel/Desa		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	-			100 %	69.466.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	100 %	81.744.200,00	
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	42.342.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	110 Orang	44.459.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	27.124.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	4 Dokumen	37.284.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	-			100 %	457.776.769,00						100 %	461.035.750,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	-			100 %	180.749.719,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	100 %	201.679.350,00	
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak,	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				6 Kegiatan	130.000.119,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur	Anak-Anak Se-Kota Blitar	6 Kegiatan	148.390.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA									kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				272 Orang	50.749.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	275 Orang	53.288.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	-			100 %	142.517.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	100 %	139.142.900,00	
	2	08	07	2.02	005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				24 Orang	25.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecama	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis	Anak-Anak Se-Kota Blitar	40 Orang	15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							tan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				85 Layanan	117.517.050,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	90 Layanan	123.392.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	-			100 %	134.510.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan	Anak-Anak Se-Kota Blitar	100 %	140.213.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															penyandang disabilitas	Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				400 Orang	134.510.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Anak-Anak Se-Kota Blitar	420 Orang	140.213.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.196.544.000,00								3.437.745.400,00	
6	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-			25,14 tahun	250.124.400,00							25,18%	271.580.000,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	-			23,12 Tahun	39.547.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	23,20 Tahun	49.875.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	39.547.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	7 Satuan Pendidikan	49.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	-			100 %	210.576.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	100 %	221.705.000,00	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				2 Laporan	60.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	2 Laporan	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan SDM yang berdaya saing				
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				21 Dokumen	55.476.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	21 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	42.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	12 laporan	31.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	33.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	3 Dokumen	44.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	19.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	2 Dokumen	20.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Aktif Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	-			74,46 Persen 8,25 Indeks	1.985.127.800,00						74,67 Persen 8,01 indeks	2.163.106.400,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	-			3 kecamatan	439.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	3 Kecamatan	524.475.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															generasi Z) dan penyandang disabilitas	yang berdaya saing				
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	80.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	6 Laporan	147.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Laporan	64.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	6 laporan	67.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui				9 Laporan	45.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	9 Laporan	47.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	100.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	6 Dokumen	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	150.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	12 Organisasi	157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	-			100 %	784.369.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	100 %	798.443.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				421 Orang	359.730.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	421 Orang	352.573.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	424.639.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	5 laporan	445.870.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-			50,56 %	393.508.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	50,76%	454.050.900,00	
	2	14	03	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	12 Laporan	13.125.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				655 Orang	325.958.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	1100 Orang	342.225.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan SDM yang berdaya saing				
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	16.300.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	6 laporan	17.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				20 Orang	38.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	30 Orang	81.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	-			100 %	367.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	100 %	386.137.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						Pembinaan Kesertaan Ber-KB									gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	3.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	3.937.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB				11 Unit	210.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	21 Unit	220.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan				21 Kampung	154.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	21 Kampung	161.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)						Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	-			74,46 %	961.291.800,00						74,67%	1.003.059.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	-			100 %	466.791.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	100 %	485.559.000,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	28.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	2 Laporan/ Dokumen	30.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
															milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	dan SDM yang berdaya saing				
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	169.573.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	3 laporan	82.425.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				18 Unit	240.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	25 unit	252.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,				60 Orang	28.418.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	807 Orang	120.894.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-			3 laporan	494.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	3 Laporan	517.500.000,00	
	2	14	04	2.02	005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3 laporan	115.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	3 Laporan	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon				3720 laporan	379.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas disektor	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	9664 laporan	397.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
						PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan						Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milinieal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	pendidikan dan kesehatan Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing				AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H											9.584.488.093,00							10.101.076.925,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas P3AP2KB harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
2. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas P3AP2KB tahun 2025 ;
3. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

5. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja DP3AP2KB Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Semoga Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 2, bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju ;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dan Hasil Evaluasi Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup ;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 ;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
5. Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.
6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2025.

2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan.

3) Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

4) Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

5) Menyusun perencanaan perencanaan yang mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA DLH tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

BAB III. Tujuan dan Sasaran DLH

Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap kebijakan Nasional dalam pembangunan bidang lingkungan hidup, tujuan & sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar serta daftar Program, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang program dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2025.

BAB V. Penutup

Berisi catatan penting, kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan capaian Renja 2023, terdapat salah satu indikator yang tidak mencapai target, yaitu Indeks Kualitas Lahan. Hal tersebut dikarenakan ada perubahan metode dari perhitungan luasan RTH menjadi delineasi tutupan vegetasi, sehingga banyak RTH yang berbentuk lapangan dan sawah tidak bisa masuk dalam perhitungan IKL ini. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah dengan penanaman tanaman bertajuk lebar, agar bisa memenuhi nilai delineasi.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evalusasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

Kota Blitar

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	67,12 indeks	59,73 indeks	61,72 indeks	67,78 indeks	109,82%	63,52 indeks	63,52 indeks	94,64%
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	90,00 %	-	82,50 %	91,67 %	111,12%	85,00	88,34 %	98,16%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	58%	40%	55%	55%	100,00%	56%	50,33%	86,78%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	*Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau*	15 aksi	3 aksi	3 aksi	3 aksi	100,00%	3 aksi	9 aksi	60,00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Hidup Kabupaten/Kota	*kerusakan lingkungan yang terlaksana*								
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1 dokumen	3 dokumen	75,00%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti*	6 kasus/ aduan	0 kasus/ aduan	2 kasus/ aduan	2 kasus/ aduan	100,00%	1 kasus/ aduan	3 kasus/aduan	
Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	6 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	33,33%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	65%	67%	64%	64%	100,00%	65%	65,33%	100,51%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	lingkungan hidup								
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup*	*300 usaha*	*42 usaha*	*60 usaha*	*58 usaha*	*96,67%*	*60 usaha*	*160 usaha*	*53,33%*
Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	48 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	24 dokumen	50,00%
Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	240 laporan	-	60 laporan	60 laporan	100,00%	60 laporan	120 laporan	50,00%
Program Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Lingkungan Hidup	lingkungan hidup yang tersedia								
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun*	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	80,00%
Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	80,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun*	5 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-	2 dokumen	40,00%
Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	5 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	-	2 dokumen	40,00%
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	87,40 indeks	85,9 indeks	85,48 indeks	85,83 indeks	100,41%	86,43 indeks	86,43 indeks	98,90%
Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
pencemaran udara	industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)								
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	15,15%	13,21%	7%	8,79%	125,57%	8,95%	10,32%	68,10%
	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim*	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100,00%	3 kali	9 kali	60,00%
	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	90 titik	18 titik	18 titik	16 titik	88,89%	18 tiitk	54 titik	60,00%
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	50,00%
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	56,78 indeks	31,5 indeks	55,73 indeks	33,51 indeks	60,13%	56,23 indeks	56,23 indeks	99,03%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	100%	96,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,28%	16,27%	16,00%	16,27%	101,69%	16,27%	16,27%	99,93%
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luas RTH Publik yang terkelola*	1681,36 ha	-	420,34 ha	410,17 ha	97,58%	420,34 ha	830,51 ha	49,50%
Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58 unit	12 unit	13 unit	13 unit	100,00%	14 unit	41 unit	70,69%
Tujuan 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	98,00%	97,73%	94,00%	97,78%	104,02%	95,00%	96,84%	98,81%
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	75,00%	60,00%	72,00%	73,81%	102,51%	72,00%	68.60%	91,47%
Sasaran 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	98,00%	97,73%	94,99%	97,78%	102,94%	96,00%	97,17%	99,15%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	83,18%	84,31%	83,10%	83,10%	100,00%	83,15%	83,52%	100,41%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	14,82%	13,42%	11,89%	11,00%	100,12%	12,85%	12,42%	83,81%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	*Volume sampah tertangani*	*114.043,28 ton*	*22.508,66 ton*	*22.666,52 ton*	*23.382 ton*	*103,16%*	*22.808,21 ton*	*68.698,87 ton*	*60,24%*
	Volume sampah yang terkurangi	*18.701,05 ton*	*3.113,19 ton*	*3.386,95 ton*	*3.720,74 ton*	*109,86%*	*3.680,54 ton*	*10.514,47 ton*	*56,22%*
Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	50,00%
Subkegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	26.053,47 Ton	27.103,54 ton	104,03%	-	27.103,54 ton	-
Subkegiatan Peningkatan Peran Serta	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat	12 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100,00%	3 kelompok	9 kelompok	75,00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat								
Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	44 unit	15 unit	11 unit	11 unit	100,00%	11 unit	37 unit	84,10%
Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	*Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina*	*105 kelompok*	*21 kelompok*	*21 kelompok*	*21 kelompok*	*100,00%*	*21 kelompok*	*63 kelompok*	*60,00%*

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	56 lembaga	-	14 lembaga	14 lembaga	100,00%	14 lembaga	28 lembaga	50,00%
Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	2 dokumen	5 dokumen	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri	57,14%	44,44%	47,62%	47,62%	100,00%	50,79%	47,62%	83,34%
	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	30,58%	21,84%	24,03%	24,03%	100,00%	26,21%	24,03%	78,57%
	Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	1 kali	3 kali	60,00%
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	*Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh*	89 predikat	14 predikat	16 predikat	21 predikat	131,25%	18 predikat	53 predikat	59,55%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kabupaten/Kota	*Jumlah predikat sekolah adiwiyata yang diperoleh*	305 predikat	51 predikat	56 predikat	52,8 predikat	94,29%	61 predikat	165 predikat	54,10%
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 entitas	-	5 entitas	5 entitas	100,00%	5 entitas	10 entitas	50,00%
Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	80,00%	70,00%	72,50%	73,81%	101,81%	75,00%	72,94%	91,17%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan*	*225 usaha/kegiatan*	*35 usaha/ kegiatan*	*40 usaha/ kegiatan*	*36 usaha/ kegiatan*	*90,00%*	*45 usaha/ kegiatan*	*116 kegiatan/ usaha*	*51,56%*

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaks	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	50,00%
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	84,68 (A)	86,00 (A)	85,05 (A)	98,90%	87 (A)	87 (A)	97,75%
Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	84,68 (A)	86,00 (A)	85,05 (A)	98,90%	87 (A)	87 (A)	97,75%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5 indeks	84,59 indeks	79 indeks	89,89 indeks	113,78%	79,5 indeks	84,66 indeks	105,17%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100,00%*	*100%*	*100%*	*100%*

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Perangkat Daerah	*standart*								
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	11 dokumen	21 dokumen	55,26%
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	7 laporan	10 laporan	43,48%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*99,90%*	*100%*	*100%*	*100%*
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/bulan	59 orang/ bulan	48 orang/ bulan	48 orang/ bulan	100,00%	57 orang/ bulan	164 orang/bulan	71,93%
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	16 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00%	4 laporan	11 laporan	68,75%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100%	100%	100%	92%	92,00%	100%	100%	100%
Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 paket	-	4 paket	4 paket	100,00%	3 paket	7 paket	58,33%
Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	276 orang/bulan	-	69 orang	69 orang	100,00%	69 orang	138 orang	50,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100,00%*	*100%*	*100%*	*100%*
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	2 paket	50,00%
Subkegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan	24 paket	-	6 paket	6 paket	100,00%	5 paket	11 paket	45,83%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	-	4 paket	4 paket	100,00%	2 paket	6 paket	37,15%
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 paket	-	20 paket	32 paket	160,00%	21 paket	53 paket	61,63%
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	-	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	2 paket	50,00%
Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 dokumen	-	36 dokumen	36 dokumen	100,00%	36 dokumen	72 paket	50,00%
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	77 laporan	50 laporan	72 laporan	144,00%	50 laporan	199 laporan	99,50%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	*100 persen*	*100 persen*	*100 persen*	*100 persen*	*100,00%*	-	*100%*	*100%*

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 unit	-	6 unit	6 unit	100,00%	-	6 unit	21,43%
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit	-	7 unit	7 unit	100,00%	-	7 unit	25,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100,00%*	*100%*	*100%*	*100%*
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	30 laporan	36 laporan	36 laporan	100,00%	24 laporan	90 laporan	62,50%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 laporan	-	26 laporan	26 laporan	100,00%	26 laporan	52 laporan	50,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100,00%*	*100%*	*100%*	*100%*
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	156 unit	33 unit	39 unit	39 unit	100,00%	37 unit	109 unit	69,87%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 unit	-	69 unit	69 unit	100,00%	-	69 unit	25,00%
Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	410 unit	-	101 unit	78 unit	77,23%	80 unit	158 unit	38,54%
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	-	1 unit	1 unit	100,00%	-	1 unit	25,00%
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1700 unit	6 unit	425 unit	425 unit	100,00%	98 unit	529 unit	31,12%

Atas hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2023, terdapat 2 indikator kinerja dari tujuan dan sasaran yang tidak memenuhi target, yaitu :

- Indeks Kualitas Lahan
  - Permasalahan/Kendala yang dihadapi :
    Tidak tercapainya target kinerja Indeks Kualitas Lahan Perubahan dari target 55,73 dengan realisasi 33,51 tingkat capaian 60,13%, disebabkan karena metode dari perhitungan luasan RTH menjadi delineasi tutupan vegetasi. Perhitungan IKL memakai citra satelit sehingga banyak RTH di Kota Blitar yang berbentuk lapangan dan sawah tidak bisa masuk dalam perhitungan IKL ini.

  - Dari permasalahan di atas, DLH perlu menentukan strategi dan kebijakan untuk memperbaiki capaian kinerja selanjutnya.
    Strategi DLH dalam memperbaiki IKL selanjutnya adalah:
    1. Melakukan pemetaan lahan berbentuk lapangan dan sawah yang tidak bisa masuk dalam perhitungan IKL.

    Langkah kebijakan yang diambil adalah:
    1. Melaksanakan penanaman tanaman penghijauan dengan menggunakan tipe tanaman yang bertajuk lebar.

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - Kendala yang Dihadapi :
    Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2023, ditemukan berbagai kendala pada dokumen berikut ini :
    - Dinas LIngkungan Hidup Kota Blitar belum sepenuhnya memahami pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan adanya action plan pada monitoring dan evaluasi pada rencana aksi (indikator sasaran). Pengukuran kinerja organisasi antara lain telah dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan dan sebagian telah mempengaruhi penyesuaian aktifitas dan penyesuaian anggaran namun belum mempengaruhi pada penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan dan strategi dalam pencapaian kinerja.
    - Perangkat daerah beserta jajarannya belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, karena pengukuran kinerja

hanya sampai pada pejabat struktural saja tanpa ada rekomendasi sedangkan untuk level staf belum dilakukan pengukuran kinerja.

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta belum sepenuhnya dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

- Langkah/strategi DLH dalam meningkatkan SAKIP selanjutnya, adalah :
  Menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP DLH 2023, sebagai berikut :
  - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilakukan untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
  - Memanfaatkan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas lingkungan hidup Kota Blitar telah menetapkan 4 (empat) Kinerja Utama dengan (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 6 (enam) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2023. Capaian Kinerja Utama dan Sasaran Strategis selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatnya kualitas air

   Indikator :

   1. Indeks kualitas air

      Perhitungan Indeks Pencemaran Air diambil dari uji badan air yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan

frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 33 titik memenuhi baku mutu, 2 titik mengalami cemar ringan, 1 titik mengalami cemar sedang, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar berat.

2. Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air

   Indikator :

   2. Persentase badan air yang terpantau

      Pada tahun 2023, realisasi persentase badan air yang memenuhi baku mutu adalah 91,67% atau sebesar 111,12% dari target 82,50%.

3. Kinerja Utama 2 : Meningkatnya kualitas udara

   Indikator :

   3. Indeks kualitas udara

      Perhitungan Indeks Pencemaran Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara.

4. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara

   Indikator :

   4. Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)

      Pada tahun 2023, persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Data didapat dari hasil uji kualitas udara metode passive sampler dan grab sampling. Paasive sampler dilkukan pada 4 titik sedangkan Grab Sampling dilakukan pada 9 titik. Titik-titik tersebut mewakili sektor transportasi, pemukiman, perkantoran, dan industri.

5. Kinerja Utama 3 : Meningkatnya kualitas lahan

   Indikator :

5. Indeks kualitas lahan

   Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas tutupan vegetasi di RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Penilaian kualitas lahan dilakukan dengan mendeleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 80,5736410848 ha luas RTH, 587,91480888 ha tutupan vegetasi relevan lainnya, dan 0,618861853 ha rehabilitasi hutan dan lahan yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.

6. Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH

   Indikator :

   6. Persentase RTH yang terkelola

      Pada tahun 2023, realisasi persentase RTH yang terkelola adalah 100% atau sebesar 100%, dari target 100%. Seluruh RTH publik di Kota Blitar dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana serta tanaman di RTH.

7. Kinerja Utama 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3

   Indikator :

   4. Persentase capaian layanan persampahan

      Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah pengurangan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di

masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

1. Pengolahan sampah di TPA = 22.078,85 ton/tahun
2. TPST 3R dan pengomposan = 891,87,00 ton/tahun
3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 4.240,03 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2023 sejumlah 27.988,20 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar.

8. Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan

Indikator :

8. Capaian layanan persampahan perkotaan

Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2023 adalah 82,07%, sedangkan persentase sampah yang terkurangi pada tahun 2023 adalah 15,69%.

9. Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3

Indikator :

9. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau

Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 42 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, terdapat 31 usaha yang taat, dan 11 usaha yang tidak taat.

10. Kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memperoleh predikat A untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai 85,05.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	TUJUAN												
1	Indeks kualitas air	IKU	59.92	61.72	63.52	65.32	67,12	59.73	67.78	67.78	65.32	67,12	
2	Indeks kualitas udara	IKU	84.53	85.48	86.43	87.38	88,33	85.9	85.83	85.83	87.38	88,33	
3	Indeks kualitas lahan	IKU	55.23	55.73	56.23	56.73	57,23	31.5	33.51	33.51	56.73	57,23	
4	Persentase capaian layanan persampahan	IKU	93	94	95	96	98	97.73	97.78	97.78	96	98,00	
5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		67	72	72	75	75	60	73.81	73.81	75	75,00	

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85 (A)	86 (A)	87 (A)	88 (A)	89 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,05 (A)	88 (A)	89 (A)	
	SASARAN												
1	Persentase badan air yang terpantau		80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	
2	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan		92.86	-	-	-	-	92.86	-	-	-	-	
3	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Persentase RTH yang terkelola		96.10	100	100	100	100	96.10	100	100	100	100	
5	Capaian layanan persampahan perkotaan		94	-	-	-	-	97.73	-	-	-	-	
6	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau		70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85 (A)	86 (A)	87 (A)	88 (A)	89 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,05 (A)	88 (A)	89 (A)	
8	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu		-	82.5	85	85	90	-	91.67	91.67	85	90	

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)		-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
11	Persentase sampah terkelola		-	94.99	96	98	98	-	97.78	97.78	98	98	
12	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik		-	72.5	75	75	80	-	73.81	73.81	75	80	

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	IKK OUTCOME												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKK	68,86	70,03	71,20	72,37	73,54	64,15	67,58	67,58	72,37	73,54	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	IKK	93	94	95	96	98	97,73	97,78	97,78	96	98	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	IKK	64	64	65	65	65	67	67,5	67,5	65	65	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Potensi lahan untuk ruang terbuka hijau mulai menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- ✓ Penambahan penduduk disertai dengan penambahan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan penduduk turut berperan penting dalam kenaikan nilai emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah dari sumbernya sebagai upaya pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga TPA cepat penuh.
- ✓ Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup relatif masih rendah.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Kurangnya dukungan Aparatur yang mempunyai standart kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas – tugas teknis.
- ✓ Proses pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup masih belum berjalan dengan optimal

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Potensi penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ✓ Penegakan hukum terhadap aturan lingkungan masih belum optimal ;
- ✓ Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan belum optimal ;

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Kerusakan lingkungan telah menjadi isu nasional yang global dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat ;
- ✓ Terjalinnya networking yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar;
- ✓ Masyarakat Kota Blitar yang semakin ”kritis” untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;
- ✓ Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
- ✓ Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu–isu strategis dimaksud antara lain :

1. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Terutama dari sisi pengurangan sampah dari sumbernya hingga dicapai kondisi *zero waste*. Hal ini dikarenakan antara lain :
   - ✓ Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.
   - ✓ Penanganan TPA yang belum efektif, yang disebabkan oleh terbatasnya lahan TPA.
   - ✓ Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat.
   - ✓ Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah. Sedangkan kondisi saat ini di Kota Blitar, RTH publik masih berkisar 16,27%, termasuk Kota Blitar belum memiliki hutan kota. Ruang Terbuka Hijau selain sebagai peresapan air juga mampu mereduksi emisi dari kendaraan maupun industri.
3. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca ini salah satu pemicu utamanya adalah pertambahan jumlah penduduk tiap tahun. Hal ini menjadi permasalahan bersama seluruh sektor untuk dapat menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi seperti yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah.
4. Nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan

berperan besar mempengaruhi kualitas badan air. Sedangkan terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pilot project kampung zero waste
2. Melaksanakan penghijauan di area publik
3. Melaksanakan aksi mitigasi Rencana Aksi Daerah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca
4. Sosialisasi dan pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi sebagai pencemar

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Blitar

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 nilai	6,651,233,621.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 nilai	7.096.176.621	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	*100 persen*	*19,550,000.00*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	*100 persen*	*8.020.000,00*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5,100,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7 Laporan	14,450,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.920.000,00	Penyesuaian hasil asistensi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		sa	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kel/Desa	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	*100 persen*	*5,646,183,514.00*	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	*100 persen*	*6.103.708.514*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	5,641,783,514.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	6.101.783.514,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	4 Laporan	4,400,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	4 Laporan	1.925.000,00	Penyesuaian hasil asistensi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			n/Semesteran SKPD					ulana n/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	*100 persen*	*108,531,300.00*	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	*100 persen*	*108.531.300,00*	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	42,528,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	42.528.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	66,003,300.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	66.003.300,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	*100 persen*	*311,749,600.00*	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	*100 persen*	*311.749.600,00*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Blitar, Semua Kecama	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	1 Paket	2,833,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera	1 Paket	2.833.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Bangunan Kantor	tan, Semua Kel/Desa	gan Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor	an, Semua Kel/Desa	ngan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40,621,800.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40.621.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4,641,500.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.641.500,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	66,550,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	66.550.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,491,300.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.491.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8,040,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.040.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	173,572,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	173.572.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	*100 persen*	*36,259,150.00*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	*100 persen*	*36.259.150,00*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	36,259,150.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	36.259.150,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	*100 persen*	*346,107,357.00*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	*100 persen*	*345.055.357.00*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	62,031,357.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	62.031.357,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	284,076,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	283.024.000,00	Penyesuaian hasil asistensi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	*100 persen*	*182,852,700.00*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	*100 persen*	*182.852.700,00*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	129,605,600.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	129.605.600,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	48,207,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	48.207.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	5,040,100.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	5.040.100,00	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen	34,240,000.00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen	33.800.000,00	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	*1 dokumen*	*34,240,000.00*	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*		Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	*1 dokumen*	*33.800.000,00*	
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH	1 Dokumen	34,240,000.00	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH	1 Dokumen	33.800.000,00	Penyesuaian hasil asistensi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		sa	kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi					kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	100 persen 57 persen 11,69 persen	437,638,400.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	100 persen 57 persen 11,69 persen	437.638.400,00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	*3 aksi 3 kali 18 titik*	*437,638,400.00*	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien	*3 aksi 3 kali 18 titik*	*437.638.400,00*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
								yang memenuhi baku mutu			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	189,550,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	189.550.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	248,088,400.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	248.088.400,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27 persen	3,293,666,169.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27 persen	3.268.692.755,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH Publik yang Terkelola	*420,34 ha*	*3,293,666,169.00*	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*		Luas RTH Publik yang Terkelola	*420,34 ha*	*3.268.692.755,00*	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman	Kota Blitar, Semua	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragama	15 Unit	3,293,666,169.00	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman	Kota Blitar, Semua	Jumlah Sarana dan Prasarana	15 Unit	3.268.692.755,00	Penyesuaian hasil asistensi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Hayati	Kecamatan, Semua Kel/Desa	n Hayati yang Dikelola			Hayati	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100 persen	14,444,800.00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100 persen	13.082.500,00	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	*50 usaha/keg iatan*	*14,444,800.00*	*Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	*50 usaha/ kegiatan*	*13.082.500,00*	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan	1 Dokumen	14,444,800.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	1 Dokumen	13.082.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya					Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65 persen	43,954,800.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65 persen	43.954.800,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	*60 usaha*	*43,954,800.00*	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*		Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	*60 usaha*	*43.954.800,00*	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Kota Blitar, Semua Kecama	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan	12 Dokumen	10,280,000.00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Kota Blitar, Semua Kecamat	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan	12 Dokumen	10.280.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Izin PPLH	tan, Semua Kel/Desa	Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Izin PPLH	an, Semua Kel/Desa	Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	33,674,800.00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	33.674.800,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen	386,778,800.00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen	384.128.800,00	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	*21 kelompok*	*386,778,800.00*	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	*21 kelompok*	*384.128.800,00*	
	Pendampingan	Kota	Jumlah	3	155,247,000.	Pendampingan	Kota	Jumlah	3	155.247.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	00	Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 Lembaga	231,531,800.00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 Lembaga	228.881.800,00	Penyesuaian hasil asistensi
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelurahan berseri Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	53,97 persen 1 kali 28,4 persen	495,447,800.00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelurahan berseri Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	53,97 persen 1 kali 28,4 persen	495.447.800,00	
	Pemberian Penghargaan		Jumlah predikat adiwiyata yang	*66 predikat*	*495,447,800.00*	*Pemberian Penghargaan*		Jumlah predikat	*66 predikat*	*495.447.800,00*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	*20 predikat*		*Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	*20 predikat*		
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	495,447,800.00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	495.447.800,00	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	3,500,000.00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	3.500.000,00	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	*1 kasus/aduan*	*3,500,000.00*	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*		Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	*1 kasus/aduan*	*3.500.000,00*	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	1 Pengaduan	3,500,000.00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	1 Pengaduan	3.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani			Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti /ditangani			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	83,16 persen 14,84 persen	14,703,186,105.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	83,16 persen 14,84 persen	14.747.668.819,00	
	Pengelolaan Sampah		Volume sampah tertangani Volume sampah yang terkurangi	*22950,27 ton 3977,45 ton*	*14,703,186,105.00*	*Pengelolaan Sampah*		Volume sampah tertangani Volume sampah yang terkurangi	*22950,27 ton 3977,45 ton*	*14.747.668.819,00*	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	435,216,950.00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	435.216.950,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan	11 Unit	6,866,701,806.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	11 Unit	6.861.647.406,00	Penyesuaian hasil asistensi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	7,500,300.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	7.500.300,00	
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase	7,393,767,049.00	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase	7.443.304.163,00	Penyesuaian hasil asistensi

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2025 ini terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Blitar

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pembangunan Taman Pojok Kel. Sananwetan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kel. Sananwetan	Pembangunan Taman Pojok Kel. Sananwetan	1 unit	Tidak masuk dalam DSP tingkat kota

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DLH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
   - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
   - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
   - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya

- ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
- ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
      a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
      b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
   (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
      a. Penguatan ketahanan keluarga
      b. Peningkatan kesetaraan gender
      c. Perwujudan masyarakat inklusif
   (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
      a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
      d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
   (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
      a. Kemandirian pangan
      b. Peningkatan ketahanan air nasional
      c. Ketahanan energi

(5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
   a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
   b. Pembangunan berketahanan iklim.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional yang sesuai dengan tupoksi DLH adalah

a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah.

Dalam rangka mencapai prioritas infrastruktur dasar dan konektivitas: aktivitas sanitasi layak infrastruktur dasar dan konektivitas dengan tujuan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal, maka hal-hal yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2025 adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, tercapainya pengembangan SPALD;

2) Sampah: pengelolaan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. permukiman layak dan pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional; dan

Bidang Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan penanganan perubahan iklim baik kegiatan *mitigasi* yang tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 26 persen, maupun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.

Kemudian untuk menjaga kualitas lingkungan maka perlu dilakukan upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,58 pada tahun 2023 yang di dukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan diperlukan upaya implementasi pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan dan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Menindaklanjuti hal ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah:

1. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 8,95 persen pada tahun 2024, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
2. Masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
3. Perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan *World Meteorological Organization*/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
4. Perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
5. Perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
6. Perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
7. Metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
8. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatklan data badan informasi lingkungan hidup;
9. Upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;

10. Penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah;
11. Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
12. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
13. Perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

3.2. Tujuan & Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	67,785	1	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	91,67%
		2	Indeks kualitas udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	87,38			2	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	100%
		3	Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	56,73			3	Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025
		4	Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	97,79%			4	Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbulan sampah dalam satu tahun) x 100%	98,00
		5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	75%			5	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%	75,00
5	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel . 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		n/Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		kebutuhan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	
2.11.02.2.01	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		RPPLH Provinsi	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	
2.11.03.2.01	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	
2.11.04.2.01	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	Luas RTH Publik yang Terkelola	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	
2.11.05.2.0	*Pengumpulan Limbah B3 dalam*	Jumlah usaha dan/atau	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2	*1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	
2.11.06.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
2.11.08.2.01	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	
2.11.09.2.01	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	
2.11.10.2.01	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	tingkat Kabupaten/Kota	Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	
2.11.11.2.01	*Pengelolaan Sampah*	Volume sampah tertangani Volume sampah yang terkurangi	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Prioritas Daerah 1:
   Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan

2. Prioritas Daerah 2:
   Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi

3. Prioritas Daerah 3:
   Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing

4. Prioritas Daerah 4:
   Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

5. Prioritas Daerah 5:
   Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital

6. Prioritas Daerah 6:
   Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yaitu membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar mendukung prioritas pembangunan 4 yakni peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Blitar Membangun dan Kondusif	Penguatan Pengelolaan RTH	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :		
1	Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan	Pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang membuang limbahnya ke sungai dengan membuat IPAL dengan berkoordinasi / bekerjasama dengan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	menyebabkan terjadinya pencemaran air.	DPUPR yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik, serta melakukan monitoring secara berkelanjutan.	Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.	Dokumen rekomendasi kepada DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen limbah domestik	
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :		
1	Melaksanakan penanaman pohon tanaman keras di pinggir jalan	Melakukan penanaman tanaman sesuai kebutuhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin	Membuat surat rekomendasi pelaksanaan car free day secara rutin sebagai salah satu langkah untuk mengurangi gas rumah kaca yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor, dan sebagai tindak lanjut / mempertahankan hasil uji kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan :		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Dikarenakan perhitungan IKL memakai citra satelit diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar.	Melakukan penanaman tanaman sesuai kebutuhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
	Untuk meningkatkan capaian layanan persampahan, perlu dilakukan :		
1	Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif	Penataan dan pengolahan sampah di Cell 1 dengan metode *sanitary landfill*	Program Pengelolaan Persampahan / Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

4.2 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 4.3.

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80 nilai	26.524.090.495,00			80,5 nilai	6,727,287,928.00
-	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		*100 persen*	*8.020.000,00*			*100 persen*	*10.390.160,00*
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	5.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	5.478.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	2,920,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	4,912,160.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Realisasi Kinerja SKPD							
-	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		*100 persen*	*6.103.708.514,00*			*100 persen*	*5,643,189,868.00*
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 Orang/bulan	6.101.783.514,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		57 Orang/bulan	5.638.525.868,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.925.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	4.664.000,00
-	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		*100 persen*	*108.531.300,00*			*100 persen*	*101.313.630,00*
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	42.528.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	41.030.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 Orang	66.003.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		69 Orang	60.283.630,00
-	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		*100 persen*	*311.749.600,00*			*100 persen*	*348.029.880,00*
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.833.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	3.293.510,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	40.621.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	49.676.330,00
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4.641.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	4.976.070,00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan	22 Paket	66.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		23 Paket	73.185.420,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			, Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM			
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.491.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	17.541.700,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	8.040.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Dokumen	8.448.000,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	173.572.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	190.908.850,00
-	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		*100 persen*	*36.259.150,00*			*100 persen*	*100.000.000,00*
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	36.259.150,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	100.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		*100 persen*	*345.055.357.00*			*100 persen*	*352,117,150.00*
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	62.031.357,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Laporan	55,048,950.00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Laporan	283.024.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26 Laporan	297,068,200.00
-	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		*100 persen*	*182.852.700,00*			*100 persen*	*172.247.240,00*
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Unit	129.605.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		39 Unit	135.688.520,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 Unit	48.207.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		104 Unit	33.280.500,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425 Unit	5.040.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		425 Unit	3.278.220,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia		100 persen	33.800.000,00			100 persen	171.831.900,00
2.11.02.2.01	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		*1 dokumen*	*33.800.000,00*			*1 dokumen*	*171.831.900,00*
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	33.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	171.831.900,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu		100 persen 57 persen 11,69 persen	437.638.400,00			100 persen 58 persen 15,15 persen	525.569.440,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)							
2.11.03.2.01	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu		*3 aksi* *3 kali* *18 titik*	*437.638.400,00*			*3 aksi* *3 kali* *18 titik*	*525.569.440,00*
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	189.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	227.683.280,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	248.088.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	297.886.160,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota		16,27 persen	3.268.692.755,00			16,28 persen	7.259.768.581.00
2.11.04.2.01	*Pengelolaan Keanekaragaman*	Luas RTH Publik yang		*420,34 ha*	*3.268.692.755,00*			*420,34 ha*	*7.259.768.581.00*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hayati Kabupaten/Kota	Terkelola							
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	3.268.692.755,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Unit	7.259.768.581.00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan		100 persen	13.082.500,00			100 persen	15.889.280.00
2.11.05.2.02	*Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan		*50 usaha/ kegiatan*	*13.082.500,00*			*55 usaha/ kegiatan*	*15.889.280.00*
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.082.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.889.280.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya							
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		65 persen	43.954.800,00			65 persen	85.487.930,00
2.11.06.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		*60 usaha*	*43.954.800,00*			*60 usaha*	*85.487.930,00*
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	48.437.180,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Badan Usaha	33.674.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Badan Usaha	37.050.750,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	Persentase kelompok masyarakat peduli		100 persen	384.128.800,00			100 persen	507.969.440,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	lingkungan yang dibina							
2.11.08.2.01	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina		*21 kelompok*	*384.128.800,00*			*21 kelompok*	*507.969.440,00*
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	155.247.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	253.281.490,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Lembaga	228.881.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Lembaga	254.687.950,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)		53,97 persen 1 kali 28,4 persen	495.447.800,00			57,14 persen 1 kali 30,58 persen	523.831.440,00
2.11.09.2.01	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat*	Jumlah predikat adiwiyata yang		*66 predikat*	*495.447.800,00*			*71 predikat*	*523.831.440,00*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota	diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh		*20 predikat*				*21 predikat*	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Entitas	495.447.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Entitas	523.831.440,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100 persen	3.500.000,00			100 persen	8.239.000,00
2.11.10.2.01	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		*1 kasus/ aduan*	*3.500.000,00*			*1 kasus/ aduan*	*8.239.000,00*
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Pengaduan	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Pengaduan	8.239.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis		83,16 persen 14,84	14.747.668.819,00			83,18 persen 14,82	11.207.713.771,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3R		persen				persen	
2.11.11.2.01	*Pengelolaan Sampah*	Volume sampah tertangani Volume sampah yang terkurangi		*22950,27 ton 3977,45 ton*	*14.747.668.819,00*			*23109,62 ton 4542,92 ton*	*11.207.713.771,00*
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	435.216.950,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Kelompok	443.478.805,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	6.861.647.406,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Unit	2.972.860.604,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.500.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Persentase	7.443.304.163,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Persentase	7.771.374.362,00

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

a. Renja tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) tahun 2025.

b. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renja tahun 2025 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Blitar.

d. Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2025 terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka akan dilakukan penyesuaian.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DLH Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance*.

12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dilakukan

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2023 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Pengembangan SDM /Kementerian Dalam Negeri) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Renja Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh

mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 53);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan perngkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya renja 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil

2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPDNUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pendaftaran Penduduk ;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan ;

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pendaftaran Penduduk ;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan ;

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
1					2	3		4	5	6		7		8	9		10		11
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
					Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	*Nilai Hasil Evaluasi SAKIP*	*87,35*	*A*	*86,72*						*86,35*	*A*	*86,81*		99%
					Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	*87,35*	*A*	*86,72*						*86,35*	*A*	*86,81*		99%
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	87,35	(A)		86		86,5		101%	87	Baik	0		0%
2	12	'01	201		*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100	%	0	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
2	12	01	201	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	dokumen	8	11	dokumen	11	dokumen	100%	11	dokumen	30	%	94%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																			K
2	12	01	201	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	Laporan	10	9	laporan	9	laporan	100%	9	laporan	28	Laporan	70%
2	12	01	202		*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200	%	200%
2	12	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108	orang/bln	0	28	orang/bln	26,00	orang/bln	93%	27	orang/bln	53	orang/bln	49%
2	12	01	203	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan							1	laporan	1	laporan	
2	12	01	205		*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100,00	%	100	%	100%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
2	12	01	205	10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	0	2	paket	2,00	paket	100%	2	paket	4	Paket	50%
					Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	152	Orang	0	37	orang	35,00	orang	95%	38	orang	73	Orang	48%
2	12	01	206		*Kagiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100	%	100	%	100%
2	12	01	206	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	0	1	paket	1,00	paket	100%	1	paket	2	paket	50%
2	12	01	206	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	paket	0	3	paket	3,00	paket	100%	2	paket	5	paket	63%
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	0	5	paket	5,00	paket	100%	3	paket	8	paket	67%
2	12	01	206	03	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	0	2	paket	2,00	paket	100%	2	paket	4	paket	50%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																			K
2	12	01	206	04	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	0	2	paket	2,00	paket	100%	2	paket	4	paket	50%
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	dokumen	0	12	dokumen	24,00	dokumen	200%	24	dokumen	48	dokumen	40%
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	0	30	laporan	26,00	laporan	87%	30	laporan	56	laporan	47%
2	12	01	206	05	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	0	1	dokumen	1,00	dokumen	100%	1	dokumen	2	dokumen	200%
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100,00	%	100	%	100%
2	12	01	206	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	0	1	unit	1,00	unit	100%	0	unit	1	unit	50%
2	12	01	206	09	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	unit	0	1	unit	1,00	unit	100%	2	unit	3	unit	75%
2	12	01	206	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	unit	-	4	unit	4,00	unit	100%	3	unit		unit	0%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																			K
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	-	-	-	-	-	-		0		unit	0%
2	12	01	208		*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100	%	100	%	100%
2	12	01	208	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	0	12	laporan	12,00	laporan	100%	48	laporan	60,00	lapora n	125%
2	12	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	laporan	0	13	laporan	13,00	laporan	100%	13	laporan	26,00	lapora n	50%
2	12	01	209		*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%		%	100	%	100%
2	12	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	unit	0	13	unit	13,00	unit	100%		unit	13,00	unit	108%
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	unit	0	-	-	3,00	unit	#VALUE!	1	unit	4,00	unit	100%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
2	12	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	16	unit	0	3	unit	1,00	unit	33%	1	unit	2,00	unit	13%
2	12	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	1	unit	1,00	unit	100%	1	unit	2,00	unit	50%
2	12	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Dsarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	1	unit	-	-	-					0%
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	unit	0	1	unit	1,00	unit	100%	1	unit	2,00	unit	50%
					Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	*Nilai Survey Kepuasan Mayarakat*	*86*	*Baik*	*88,72*						*85*	*Baik*	*83,37*	*Baik*	97%
					Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk*	*99*	*%*	*96,88*						*97*	*%*	*98,2*	*%*	99%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	0,18	%	0,21	0,03	%	0,26	%	867%	0,03	%	0,50	%	278%
						2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	12,75	%	0,5	2,55	%	3,83	%	150%	2,55	%	6,88	%	54%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
						3. Persentase penerbitan dokumen KK	100	%	100	100	%	100	%	100%	100	%	100,00	%	100%
2	12	02	201		*Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK)*			-					-					
2	12	02	201	02		- KTP	99,71	%	99,49	99,62	%	99,75	%	100%	99,71	%	99,71	%	100%
						- KIA	95	%	91,14	87,35	%	99,97	%	114%	95	%	95	%	100%
						-KK	100	%	100	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
2	12	02	201	01	Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	laporan		1	laporan	1,00	laporan	100%	1	laporan	2,00	lapora n	50%
2	12	02	201	02	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	129200	dokume n		32300	dokumen	31754,0 0	dokumen	98%	32300	dokumen	64054, 00	dokum en	50%
2	12	02	202		*Kegiatan Penataan Pendafataran Penduduk*	*Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100	%	100	%	100%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
2	12	02	202	02	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4	dokumen	0	1	dokumen	1,00	dokumen	100%	1	dokumen	2,00	dokumen	50%
2	12	02	204		*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200,00		200%
2	12	02	204	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	4	laporan	0	1	laporan	1,00	laporan	100%	1	laporan	2,00	laporan	50%
					Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil*	*99*	*%*	*95,5*						*97*	*%*	*96,81*	*%*	98%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	8,76	%	0,61	2,19	%	4,76	%	217%	2,19	%	7,56	%	86%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
						2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	10,4	%	0	2,6	%	1,16	%	45%	2,6	%	3,76	%	36%
						3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100	%	100	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
						4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,12	%	0,85	0,03	%	0,51	%	1700%	0,3	%	1,66	%	1383%
2	12	03	201		*Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	*Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran, kematian, perkawinan , perceraian)*			-			-	-	-					
						- Akte kelahiran	99	%	98,91	98,91	%	99,42	%	101%	98,67	%	98,67	%	100%
						- Akte kematian	100	%	100	100	%	100,00	%	100%	100	%	100	%	100%
						- Akte perkawinan	90	%	83,08	83,43	%	87,84	%	105%	87,81	%	87,81	%	98%
						- Akte perceraian	89,99	%	79,15	82,19	%	80,31	%	98%	87,39	%	87,39	%	97%
2	12	03	201	01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	21600	Dokumen	0	5400	Dokumen	4554,00	Dokumen	84%	5400	Dokumen	9954,00	Dokumen	46%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																			K
2	12	03	201	03	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4	Dokumen	0	1	Dokumen	1,00	Dokumen	100%	1	Dokumen	2,00	Dokumen	50%
2	12	03	202		*Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100	%	100	%	100%
2	12	03	202	01	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
2	12	03	202	04	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan		Laporan	0%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
2	12	03	202	06	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
2	12	03	202	08	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
2	12	03	203		*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina*	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200,00	%	200%
2	12	03	203	04	Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
					Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	*Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan*	*79,3*	*%*	*51,72*						*65,5*	*%*	*62*	*%*	78%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	64	%	0	16	%	16	%	100%	16	%	32	%	50%
2	12	04	201		*Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	*Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan*	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200,00	%	200%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																			K
2	12	04	201	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	Dokumen	0	1	Dokumen	0,00	Dokumen	0%	1	Dokumen	1,00	Dokumen	25%
2	12	04	201	02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12	Dokumen	0	3	Dokumen	3,00	Dokumen	100%	3	Dokumen	6,00	Dokumen	50%
2	12	04	202		*Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan*	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200,00	%	200%
2	12	04	202	01	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4	Dokumen	0	1	Dokumen	1,00	Dokumen	100%	1	Dokumen	2,00	Dokumen	50%
2	12	04	202		*Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update*	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200,00	%	200%
2	12	04	202	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
2	12	04	202	02	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
2	12	03	203		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	%	0	100	%	100,00	%	100%	100	%	200,00	%	200%
2	12	03	203	04	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
2	12	03	203	05	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	Laporan	0	1	Laporan	1,00	Laporan	100%	1	Laporan	2,00	Laporan	50%
2	12	05			PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100	%	-	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
2	12	05	201		*Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan*	*Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan*	100	%	-	100	%	100,00	%	100%	100	%	100	%	100%

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 -2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023					Target Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
										Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Tujuan / Sasaran/Program /dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
																		K
2	12	05	201	02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	800	Dokumen	200	200	Dokumen	200	Dokumen	100%	200	Dokumen	600,00	Dokumen	75%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2023, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program pelayanan perkantoran (realisasi kinerja 100%)

- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%, capaian realisasi anggaran 99%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%, capaian realisasi anggaran 96%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%, capaian realisasi anggaran 99%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%, capaian realisasi anggaran99%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 100%, capaian realisasi anggaran 99%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96%, capaian realisasi anggaran 96%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%, capaian realisasi anggaran 97%

Untuk capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi harga pada proses pengadaan barang/jasa.

2. Program Pelayanan Pendaftaran

Semua Indikator program tercapai sesuai target, namun demikian terdapat permasalahan terkait perkamaan KTP el dan KIA dimana untuk KTP el masih terdapat penduduk usia 23 tahun ke atas yg belum melakukan perekaman dikarenakan secara faktual penduduk tidak ada ditempat. Langkah yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja adalah Menonaktifkan biodata penduduk yang secara faktual tidak berdomisli di kota Blitar. Sedanfkan unuk KIA dikarenakan adanya kebijakan migrasi data base SIAK terpusat, ada sebagian data KIA yang tidak terekam ke dalam sistem yang baru sehingga dengan sistem terpusat yang baru, data yang tercetak sebelumnya di SIAK lama tidak terhitung. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan Konsolidasi data dan updating data cetak KIA

- Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk tercapai 100%, Untuk capaian realisasi anggaran 94,94%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Kegiatan Penataan Pendafataran Penduduk 100%, capaian realisasi anggaran 99,36%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100%, capaian realisasi anggaran 98%

Untuk capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi harga pada proses pengadaan barang/jasa

3. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja program yang tidak tercapai adalah Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian , hal ini dikarenakan Masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin cerai hidup yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga untuk cakupan kepemilikan akte perceraian masih rendah. Langka yang akan dilakukan adalah bagi masyarakat yang

sudah bercerai namun nomor akte perceraian belum tercatat dalam data base kependudukan akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan SIDAK (ferifikasi data administrasi kependudukan) yang dilakukan secara dor to dor langsung ke alamat.

- Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai adalah Prosentase kepemilikan dokumen penacattan sipil (akte perceraian) dimana masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin cerai hidup yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga untuk cakupan kepemilikan akte perceraian masih rendah. Langka yang akan dilakukan adalah bagi masyarakat yang sudah bercerai namun nomor akte perceraian belum tercatat dalam data base kependudukan akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan SIDAK (ferifikasi data administrasi kependudukan) yang dilakukan secara dor to dor langsung ke alamat.

- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang tidak tercapai adalah persentase kepemilikan akta perceraian yakni 98%, capaian realisasi anggaran 93,15%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 90%, capaian realisasi anggaran 98,14%

Untuk capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi harga pada proses pengadaan barang/jasa

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (realisasi capaian kinerja 100%)

- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100%, capaian realisasi anggaran 100%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100%, capaian realisasi anggaran 98%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100%, capaian realisasi anggaran 100%
- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100%, capaian realisasi anggaran 100%

Untuk capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi harga pada proses pengadaan barang/jasa

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (capaian realisai kinerja 100%

- Tingkat Capaian Realisasi kinerja Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan 100%, capaian realisasi anggaran 99%

Untuk capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi harga pada proses pengadaan barang/jasa

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.

Tabel. 2.2

Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Blitar

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi realisasi capaian		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Idikator Kinerja Utama													
a.	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	-		95%	96%	97%	98%	99%	96,88%	98,20%	98,04*	98%	99%	Berdasarkan hasil capaian setiap tahun untuk capaian masing – masing indikator tercapai dan melebihi dari target yang
b.	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	-		95%	96%	97%	98%	99%	95,5%	96,81%	96,85*	98%	99%	
c.	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	-		51,7	58,6	65,5	72,4	79,3%	51,72	62%	62%*	72,4	79,3%	
d.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	(86,72) (A)	(86,81) (A)	(86,81) (A) *	(86,85) (A)	87,35 (A)	
2.	Indikator Kunci Keberhasilan (IKK)		IKK											
a	Perekaman KTP Elektronik	99,4		100	100	100	100	100	97,3	99,63%	99,06*	100	100	

b.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50%		82,77	85,32	87,87	90,42	92,72	91,14	94,97%	95,06*	90,42	92,72	
c.	Kepemilikan Akta Kelahiran	98%		95,76	96,09	96,42	96,75	97,08	98,91	99,42%	99,49*	96,75	97,08	
d.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-		2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	

Dari rekapitulasi hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar dapat diuaraiakan sebagai berikut:

a. Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian masing – masing indikator sasaran dari tahun ke tahun melampaui target dan mengalami peningkatan. Untuk capaian tahun 2024 berdasarkan data dari *Aplikasi PDAK (pengelola data administrasi kependudukan) Ditjendukcapil* Kementrian Dalam Negeri Bulan Maret 2004 , masih terdapat indikator sasaran yang belum tercapai. Yakni rata – rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil. Dimana komponen yang masih kurang adalah kepemilikan dokumen perkawinan yang masih 87,90% dari target sebesar 89%. Permasalahan yang ada adalah masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga berdampak pada cakupan kepemilikan dokumen perkawinan. Sedangkan untuk capaian Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dari target yang ditentukan di tahun 2024 yakni 19 OPD/Lembaga yang menggunakan data kependudukan untuk layanan. Sampai dengan TRibulan I tahun 2024 PKS pemanfaatan data kependudukan masih 18 OPD atau terealisasi sebesar 62% dari target 65,5%.

b. Capaian Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) untuk capaian Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama pada tahun 2024 adalah 18 OPD , belum melebihi mencapai target yang ditentukan pada tahun 2024 yakni 19 OPD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai hasil evaluai capaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat dilihat permasalahan – permasalahan dalam capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu yang berkembang terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan guna peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga . Selain itu juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital , maka menjadi tantangan baru bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mensukseskan penyelenggaraan identitas kependudukan digital.

Untuk itu, dalam proses penyusun Renja 2025 perlu memperhatikan isu-isu penting tugas dan fungsi yang berkembang:

a. Keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan kementiran/propinsi dan (RPJMD/RKPD),
b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
c. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga memberikan

kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependuudkan .

e. Peningkatan pelaksanaan identitas kependudukan digital .
f. Peningkatan penerbitan PKS pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah menentukan 3 (tiga) arah kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :1). SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dana kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2). Infrastuktur yang berkualitas yang diarahkan pada peningkatan insfrastuktur konektivitas, pengembangan transissi energi, percepatan insfrastuktur IKN , hingga reformasi pengelolaan sampah; 3) Ekonomi inklusif yang berkelanjutan yang digharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan dan meningkatkan produk – produk yang ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencattaan sipil Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kota Blitar

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.146.203.886,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	88 nilai	5.052.166.874	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	88 nilai	6.205.807.316,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	29.091.237,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	24.228.200,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	10.233.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	6.131.400,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	18.857.737,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	18.096.800,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.601.493.871,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.739.435.904,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.600.7893.871,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.738.735.904,00	Kenaikan plafon anggaran untuk gaji
Kooordinasi dan Penyusunan Laporan JKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	700.000,00	Kooordinasi dan Penyusunan Laporan JKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	700.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	116.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	120.780.500,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	58.400.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	63.300.000,00	Pengadaan pakain pelayanan lapangan yang semula ada di bidang, hasil asistensi untuk dialihkan ke sekretariat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	58.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	57.480.500,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100 %	430.513.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100 %	420.974.300,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.770.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.651.900,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.251.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.406.600,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	14.068.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	22.772.500,00	Penambahan karangan bunga ucapan duka cita, sesuai hasil asistensi untuk di geser di Sub kegiatan peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.075.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.220.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.246.800,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.198.300,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8.100.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8.100.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	200.000.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	110.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	93.625.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	146.470.532,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	75.223.200,00	
Pengadaan Mebel	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	66.523.555,00	Pengadaan Mebel	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1Unit	17.794.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pengadaan Kendaraan Dinas Opsional atau Lapangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Opsional atau Lapangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Sesuai hasil asistensi untuk pengadaan kendaraan dinas anggaran dialihkan ke BPKAD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	54.946.977,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	57.429.200,00	Penyesuaian kebutuhan AC

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	575.093.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	616.404.612,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	170.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	162.506.100,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	405.093.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	453.898.512,00	Penyesuaian plafon anggaran untuk jasa pelayanan umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	153.104.834,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	208.760.600,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	71.160.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	95.000.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	41.466.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	53.825.000,00	Penyesuaian kebutuhan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	813.600,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	805.600,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.665.234,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	58.170.000,00	Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Mebel	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.000.000,00	53.825.000,00	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	960.000,00	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen KK Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen e-KTP Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KIA	100 % 0,03 % 2,55 %	550.673.840,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen KK Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen e-KTP Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KIA	100 % 0,03 % 2,55 %	454.263.500,00	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KIA Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP	92,45 % 99,68 % 100 %	506.688.340,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KIA Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP Persentase kepemilikan	92,45 % 99,68 % 100 %	421.213.500,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KK					dokumen kependudukan KK			
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	9.811.200,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	57.603.100,00	Penambhaan pagu untuk sidak penduduk non permanen
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	323001 dokumen	496.877.140,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	32300 dokumen	363.610.400,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	100%	5.420.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	100%	5.420.000,00	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	5.420.000,00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	5.420.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	38.565.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	27.630.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 Laporan	38.565.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 Laporan	27.630.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian ersentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan Persentase penerbitan dokumen akta kelahiran Persentase penerbitan dokumen akta kematian	2,60 % 2,19 % 0,3 % 100 %	500.000.000,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian ersentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan Persentase penerbitan dokumen akta kelahiran Persentase penerbitan dokumen akta kematian	2,60 % 2,19 % 0,3 % 100 %	272.858.100,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran,) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)	100 % 98,67 % 87,39 % 87,81 %	171.649.100,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kematian kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kelahiran kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perceraian kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perkawinan	100 % 98,67 % 87,39 % 87,81 %	142.574.500,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5400 dokumen	143.089.100,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5400 dokumen	117.394.500,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan	1 Paket	28.560.000,00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	25.180.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Kebutuhan yang Tersedia								
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100%	240.090.700,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100%	108.745.800,00	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	4.770.000,00	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	4.650.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	1 Laporan	40.500.000,00	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	26.883.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Terkait Pencatatan Sipil								
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	146.571.500,00	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	33.846.400,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	48.249.200,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	43.366.400,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	100%	88.260.200,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	100%	21.537.800,00	
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	88.260.200,00	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	21.537.800,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16 %	694.034.157,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	16 %	400.000.000,00	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	100 %	228.165.157,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	100 %	149.410.700,00	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
										yang diterbitkan
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	165.369.260,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	117.073.400,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	62.795.897,00	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	32.337.300,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	100 %	96.045.500,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	100 %	50.410.000,00	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan	1 Dokumen	96.045.500,00	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Dokumen	50.410.000,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Administrasi Kependudukan		Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun			Administrasi Kependudukan		Kependudukan yang Disusun			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100 %	223.225.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100 %	130.276.100,00	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	123.467.500,00	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	44.818.500,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	99.757.500,00	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	85.457.600,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %	146.648.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %	69.903.200,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.363.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	48.037.600,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	96.285.500,00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	21.865.600,00	Penyesuaian pengurangan pagu anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100 %	49.255.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100 %	49.255.200,00	
Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependuduka	100 %	49.255.200,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependuduka	100 %	49.255.200,00	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	200 Dokumen	49.255.200,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependdudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	200 Dokumen	49.255.200,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Jumlah				6.846.180.071,00					7.382.184.116,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun OPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Tahun 2025

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	HIHIL	HIHIL	HIHIL	HIHIL	HIHIL	HIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 " Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan ", dengan menetapkan 3 arah kebijakan yakni:

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dana kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa ,
2. Infrastuktur yang berkualitas yang diarahkan pada peningkatan insfrastuktur konektivitas, pengembangan trasissi energi, percepatan insfrastuktur IKN , hingga reformasi pengelolaan sampah
3. Ekonomi inklusif yang berkelanjutan yang digharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan dan meningkatkan produk – produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil sesuai dalam mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yakni dengan meningkatnya kualitas pelayanna public khususnya pelayanan administrasi kependudukan . Adapun yang harus diperhatikan adalah :

a. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk dengan meningkatkan kapasitas SDM di bidang adminduk dan menimgkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan adminduk.
b. Optimalisasi pemanfaatan tekhnologi dan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan .
c. Fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam pemanfaatan data kependudukan untuk layanan public.
d. Melakukan langkah – langkah percepatan capaian dokumen kependudukan sesuai dengan target nasional.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat dari tabel 3.1

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2024	TARGET	
				TARGET	REALISASI		2025	2026
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM adalah nilai dari hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public. Dalam hal ini survey yang dilakukan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,50 (Baik)	89,95 (Baik)	85 (Baik)	85,50 (Baik)	86 (Baik)
a	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dokumen pendaftaran penduduk dimaksud dalam rumusan perhitungan adalah dokumen KK, KIA, KTP	96%	98,20%	97%	98%	99%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pencatatan sipil merupakan proses pembuatan catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada intansi pelaksana. Peristiwa penting di maksud meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,	96%	96,81%	97%	98%	99%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2024	TARGET	
				TARGET	REALISASI		2025	2026
			perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil yang meruapakan rumusa perhitungan adalah dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta prkawinan dan akta perceraian.					
b.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga / badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/Lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan.	Perjanjian kerjasama (PKS) merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama – sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah sehingga sangat penting pemerintahan suatu wilayah. Adapun Elemen data tersebut antara lain : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan darah=, Agama / Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya.	58,6%	62%	72,4%	72,4%	79,3%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3.	85,85 (A)	86,81 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2024	TARGET	
				TARGET	REALISASI		2025	2026
			Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.					
a.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	85,85 (A)	86,81 (A)	86,85 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025 merupakan hasil rumusan atas isu – isu strategis pelayanan , tindak lanjut LKJIP, telahan kebijakan nasional telahahan usulan masyarakat dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan PD Tahun 2025 sesuai dengan tabel 3.3

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keternagan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keternagan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keternagan
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen KK Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen e-KTP Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KIA	Mendukung Sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
8	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KIA Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KK	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
9	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	
10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan Persentase penerbitan dokumen akta kelahiran Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Mendukung Sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
11	Pelayanan Pencatatan Sipil	kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kematian kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kelahiran kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perceraian kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perkawinan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keternagan
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	
12	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	
13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	Mendukung sasaran Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum
14	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keternagan
15	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	
16	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
17	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Mendukung sasaran Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum
18	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependuduka	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 4.1.

Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disusun dengan focus pada perbaikan – perbaikan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar utamanya untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam dokumen LKjIP tahun 2023 yakni dengan :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP el dengan: 1. Memberikan undangan/mendatangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kepndudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kementrian Dalam negeri ungtuk dibekukan datanya 2. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KTP-el	- Program Pendaftaran Penduduk - Kegiatan Pelayanan Pendafataran Penduduk - Sub Pencatatan, penatausahaan , dan penerbaitan dokumen atas pendafatran penduduk - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kepedudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	√		√
		Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen perkawinan dan perceraian dengan: 1. Melaksanakan perkawinan masal melalui inovasi PENAK MAS EDI (Pencatatan Perkawinan Masal Sehari Jadi) 2. Mengadakan PKS dengan KUA dalam update data perkawinan 3. Bekerjasama dengan Pengadilan agama melalui inovasi LADANG PALA (Layanan Sidang Adminduk Bersama Pengadilan Agama) yaitu memfasilitasi warga Kota Blitar dalam pelaksanaan isbad Nikah guna pengurusan dokumen adminduk. 4. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran Masyarakat yang	- Program Pencatatan Sipil - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Sub. Kegiatan Fasilitasi terkait pencatatan sipil - Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusal pemerintahan dibidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		sudah kawin namun nomor akte perkawinan/surat nikah belum tercatat dalam data base	- Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kepedudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	√ √		√ √
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kepedudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	√		√
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	- Telah dilakukan review target kinerja dalam perubahan renstra . Khususnya target kinerja program pencatatan sipil - Hasil capaian kinerja dinas disampaiakan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi relaisasi capaian kinerja dan apel pagi - Setiap hasil monev yang dilakukan untuk mengindentifikasi dentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan stratgei dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah - Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD	√		

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				6.772.184.116				6.952.672.600,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.772.184.116				6.952.672.600,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.772.184.116				6.952.672.600,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat		88 BAIK	5.595.807.316			-	5.132.888.600,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	24.228.200,00			100 %	31.275.000,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11 Dokumen	6.131.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	11.475.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11 Laporan	18.096.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Laporan	19.800.000,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	4.129.435.904			100 %	3.623.800.000,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan	4.128.735.904	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29 Orang/bulan	3.623.000.000,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	800.000,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	120.780.500,00			100 %	118.700.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	63.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	60.000.000,00
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		41 Orang	57.480.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		41 Orang	58.700.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart		100 %	420.974.300,00			100 %	450.800.000,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	12.651.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	13.000.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	25.406.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	27.000.000,00
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	22.772.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	14.600.000,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	45.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	45.700.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	13.198.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	14.500.000,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	8.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	8.500.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	202.000.000,00
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	93.625.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	125.500.000,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	75.223.200,00			100 %	155.000.000,00
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	17.794.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	95.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit	57.429.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	60.000.000,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	616.404.612,00			100 %	577.500.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	162.506.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		48 Laporan	172.000.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	453.898.512,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	405.500.000,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	208.760.600,00			100 %	175.813.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit	95.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Unit	71.500.000,00
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	1.500.000,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	53.825.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			42.000.000,00
2	12	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	805.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	813.600,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	58.170.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	60.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA Persentase penerbitan dokumen KK		0,03 % 2,55 % 100 %	454.263.500,00			0,03 % 2,55 % 100 %	558.884.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)		92,45 % 99,68 % 100 %	421.213.500,00			92,45 % 99,68 % 100 %	510.500.000,00
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		1 Dokumen	57.603.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.500.000,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		32300 Dokumen	363.610.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32300 Dokumen	500.000.000,00
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk		100 %	5.420.000,00			100 %	5.962.000,00
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan								
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		1 Dokumen	5.420.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.962.000,00
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk		100 %	27.630.000,00			100 %	42.422.000,00
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk		1 Laporan	27.630.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	42.422.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian Persentase penerbitan dokumen akta kematian		2,19 % 0,3 % 2,6 % 100 %	272.858.100,00			2,19 % 0,3 % 2,6 % 100 %	504.000.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran,) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kematian) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perceraian) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte perkawinan)		98,67 % 100 % 87,39 % 87,81 %	142.574.500,00			98,67 % 100 % 87,39 % 87,81 %	173.000.000,00
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		5400 Dokumen	117.394.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5400 Dokumen	144.000.000,00
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		1 Paket	25.180.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	29.000.000,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan		100 %	108.745.800,00			100 %	242.000.000,00
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		1 Laporan	4.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil								
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	26.883.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			41.000.000,00
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	33.846.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	147.000.000,00
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil								
						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	43.366.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	49.000.000,00
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina		100 %	21.537.800,00			100 %	89.000.000,00
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil								
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	21.537.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	89.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan		16 %	400.000.000,00			16 %	706.900.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan		100 %	149.410.700,00			100 %	229.000.000,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1 Dokumen	117.073.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	166.000.000,00
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		3 Dokumen	32.337.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	63.000.000,00
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan		100 %	50.410.000,00			100 %	96.900.000,00
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		1 Dokumen	50.410.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	96.900.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update		100 %	130.276.100,00			100 %	224.000.000,00
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Laporan	44.818.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	124.000.000,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Laporan	85.457.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	100.000.000,00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 %	69.903.200,00			100 %	157.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
					Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Laporan	48.037.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	60.000.000,00
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		1 Laporan	21.865.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	97.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart		100 %	49.255.200,00			100 %	50.000.000,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan		100 %	49.255.200,00			100 %	50.000.000,00
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		200 Dokumen	49.255.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		200 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
										ALOKASI UMUM			
J U M L A H									7.382.184.116,00				6.952.672.600,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar tahun 2022 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam upaya menciptakan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
b. Mengoptimalkan pelayanan adminduk online dan memberikan kemudahan – kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar dan operator SIPAK yang ada dikelurahan dalam rangka memberikan pelayanan yang

membagahagiakan bagi masyarakat.Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur pelayanan.

d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

13. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, tahun 2025 diarahkan pada tema: "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah", guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan.

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021– 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjut dalam proses penyusunan KUPPAS dan RAPBD Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA/PPAS Tahun 2024, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025 dan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Serta sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika;

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, serta penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK menguraikan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB V PENUTUP, berisikan catatan penting dengan menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2023;

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2023 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diketahui dari pengukuran kinerja dan pengukuran keuangan pada tahun sebelumnya. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun lalu (tahun 2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas Komuninkasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar s/d Tahun 2024 Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Tujuan 1 : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	2,81	2,82	3,68	130%	3,2	9,69	2,808696
	SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100	90	94	94	100%	98	278	2,78
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	100	86.66	90	100	111%	92,89	279,55	2,7955
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100	100	100	1	1%	100	201	2,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	24	7	6	6	100%	6	19	0,791667
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	1	1	3	300%	2	6	0,857143
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	63	60	3	90	3000%	20	170	2,698413
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	12	93	93	100%	96	201	2,01
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	0	1	1	100%	1	2	0,5
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	0	1	1	100%	1	2	0,5
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	5	1	1	100%	1	7	1,75
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	11	1	2	1	50%	3	5	0,454545
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	8	0	1	1	100%	1	2	0,25
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8	6	2	2	100%	2	10	1,25
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	7	1	1	1	100%	2	4	0,571429
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	7	2	1	1	100%	2	5	0,714286
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan	4	3	1	3	300%	1	7	1,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4	1	1	1	100%	1	3	0,75
	SASARAN 2: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	100	76	86	88.69	103%	91	255,69	2,5569
		Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%					100%		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100 100	83 60	85 70	85 70	100%	90 80	258 80	2,58 0,8
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		89		45,5	45,8	101%	57	102,8	1,155056
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	8	3	1	1	100%	2	6	0,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	5	4	4	100%	4	13	1,083333
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	48	12	12	12	100%	12	36	0,75
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2080	500	510	510	100%	520	1530	0,735577
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34	11	11	11	100%	11	33	0,970588
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	28	5	5	5	100%	12	22	0,785714
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5650	995	1000	1000	100%	1100	3095	0,547788
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12	12	15	15	100%	1	28	2,333333
2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	160	30	30	30	100%	30	90	0,5625

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	320	0	80	80	100%	80	160	0,5
	SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100	100	100	100	100	98		
		Indeks Pembangunan Statistik	3,1					2,7		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	100	100	95,07	100	105%	96,71	296,71	2,9671
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100	3	100	100	100%	100	203	2,03
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	14	1	5	6	120%	3	10	0,714286
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu	40	27	14	30	214%	10	67	1,675

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Statistik Daerah yang Terintegrasi								
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	72	1	1	12	1200%	4	17	0,236111
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	20	1	8	8	100%	4	13	0,65
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	4	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	24	20	28	140%	1	53	13,25
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	69,77	39.4	46,51	46.8		54,26		
2.21.02..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69,77	39,402	46,51	46,8	101%	64,26	150,4618	2,15654
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	60,77	39,3991919327539	46,51	47,8	103%	54,26	141,4592	2,32778

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	1	8	8	100%	1	10	2,5
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	1	6	6	100%	4	11	0,611111
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9	1	3	3	100%	2	6	0,666667
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	82	1	20	35	175%	20	56	0,682927
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	100	25	35	35,2	101%	50	110,2	1,102
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	140	1	20	35	175%	40	76	0,542857

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	TUJUAN 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 88,75					A 86,25		
	SASARAN 5 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 88,75	84,82	85	85,27		A 86,25		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Baik (79-84)	84,09	Baik (79-84)	85,64		Baik (79-84)		
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44	11	11	13	118%	11	35	0,795455
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	7	7	7	100%	7	21	0,75
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1	2	200%	1	5	1,25
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	5	13	13	100%	13	31	0,596154
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	6	4	4	100%	4	14	0,875
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	249	68	68	68	100%	65	201	0,807229
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350	4	50	50	100%	100	154	0,44
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	16	4	4	100%	4	24	1,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		3	3	100%	3	6	0,5
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	5	5	100%	5	30	1,5
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1140	995	36	36	100%	36	1067	0,935965
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	6	1	1	100%	1	8	2
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	3	24	24	100%	24	51	0,53125
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	37	36	36	100%	36	109	0,751724
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	2	36	36	100%	36	74	0,513889

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52		13	13	100%	13	26	0,5
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100%	100	300	3
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	9	8	8	100%	8	25	0,78125
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	8	8	6	75%	9	23	0,676471
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	8	1	1	100%	1	10	2,5
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	8	2			2	10	1,25
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2	100			100	102	1,02
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9					3	3	0,333333

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	6	0			6	12	0,5

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Diskominfotik Tahun 2024 Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
    - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
    - Pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini telihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfotik.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
    - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
    - Adanya Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Program Informasi dan Komunikasi Publik semua mencapai target. Hal ini telihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Program Informasi dan Komunikasi Publik telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut :

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Program Informasi dan Komunikasi Publik, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfotik.

3. Program Aplikasi Informatika

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Penatalaksanaan dan pengawasan Egoverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
    - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
    - Pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Aplikasi Informatika semua mencapai target. Hal ini telihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Aplikasi Informatika telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan Program Aplikasi Informatika, ke depan dilakukan perbaikan pelaksanaan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Diskominfotik.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
    - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
    - Data statistik sektoral dapat dikumpulkan sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai bank data Kota Blitar .
    - Meningkatnya koordinasi pro aktif dengan OPD terkait di OPD yang belum mengumpulkan data statistik sektoral

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 1 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral semua mencapai target. Hal ini telihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan kinerjanya dengan program-program yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Harapanya dengan kinerja yang lebih baik dan program-program yang lebih tepat sasaran, Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar dapat naik lebih signifikan dan dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Beberapa program atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan aplikasi SIPD terkait penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan di Kota Blitar

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
    - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
    - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
    - Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian mandiri keamanan informasi perangkat daerah menggunakan indeks KAMI.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 2 kegiatan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi semua mencapai target. Hal ini telihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi telah mencapai 100%.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, ke depan dilakukan Beberapa program atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar adalah dengan melakukan bimbingan teknis, desk atau pendampingan terkait peningkatan nilai capaian Indeks Kami.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator -indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Penngukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menangani urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Terkait hal tersebut Dinas Kominfotik berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2022 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (sesuai Renstra 2021 – 2026)

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisis
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
I	INDIKATOR TUJUAN													
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik			2,31	2,82	3,90	4,20	4,35	2,81	3,68		4,20	4,35	
II	INDIKATOR SASARAN													
A.	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)													
	Persentase layanan publik online dan terintegritasi			89	94	98	100	100	90	94	94,3	100	100	
	Nilai Hasil Monev PPID			81	86	91	96	100	76	88,69		96	100	
	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat					100	100	100			25	100	100	
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)													

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisis
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
	Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo			100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Presentase layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi			89	94	98	100	100	90	89,3	10,65	100	100	
	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar			34	45,5	57	68,5	80		45,8	38,5	68,5	80	
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)													

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisis
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan			96	97	100	100	100	100	100	25	100	100	
	Indeks Pembanunan Statistik					2,7	2,9	3,1				2,9	3,1	
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)													
	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100		100	100	

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisis
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
	Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100		100	100	
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)													
	Indeks KAMI			38,76	46,51	54,26	62,02	69,77	39,4	46,8		62,02	69,77	
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)													
	Tingkat keamanan informasi pemerintah			38,76	46,51	54,26	62,02	69,77	39,4	67,4		62,02	69,77	
III	INDIKATOR PROGRAM													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik (79-84)	Baik 84,09	85,64		Baik (79-84)	Baik (79-84)	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik													

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Analisis
1	2	3	4		6	7	8	8		9	10	11	12	13
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan			83	85	90	95	100	83	85		95	100	
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah			60	70	80	90	100	60	70		90	100	
3	Program Aplikasi Informatika													
	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik			86,35	90,00	92,89	95,00	100	100	90		95,00	100	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral													
	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik			93,43	95,07	96,71	98,35	100	100	100		98,35	100	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi													
	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			38,76	46,51	64,26	62,02	69,77	59,3	46,80		62,02	69,77	

Berdasarkan table 2.2 dapat diketahu bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase layanan publik online dan terintegritasi merupakan periode pertama penghitungan di awal Renstra tahun 2021-2026. Dengan Target di Tahun 2023 sebesar 94% dan terealisasi sebesar 94 % dengan persentase sebesar 100%, kriteria sangat baik
2. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil PPID dengan target 86 % pada tahun ini terealisasi 88,69 % persentase sebesar 103 % baik.
3. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo dengan target 100 % dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu adanya koordinasi dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah

- Indikator Kinerja Kunci Presentase layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 89 % dan terealisasi 90 % dengan kriteria sangat baik , hal ini menunjukan bahwa internet di seluruh Perangkat Daerah sudah dapat diakses guna mendukung giat atau operasional pada bidang IT. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar.

4. Indikator Kinerja Kunci Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar dengan target 45,5 % dan terealisasi 45,8 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khusunya media social sehingga diseminasi informasi kepada Masyarakat mudah terserap.
5. Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan dengan target 97 % pada tahun ini terealisasi 100 % persentase sebesar 104.16 %. Dikarenakan Data Statistik Sektoral sudah terkumpul sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai Bank Data Kota Blitar.
6. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral
7. Indikator Kinerja Kunci Presentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan terealisasi 100 % dengan kriteria sangat baik. Menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya

sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral

8. Indikator Kinerja Utama Indeks KAMI dengan target 46,51% dan terealisasi 46,8 % dengan kriteria sangat baik.
9. Indikator Kinerja Kunci Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan target 46,51% dan terealisasi 46,8 % dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan ini ditentukan oleh factor pendukung yaitu Adanya Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang penilaian mandiri keamanan informasi menggunakan Indeks KAMI

2.3 Isu- Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik, urusan bidang persandian yang harus diselesaikan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :

- Perlunya peningkatan pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar .
- Perlunya peningkatan pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
- Perlunya peningkatan pengembangan pemanfaatan layanan Data center untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
- Perlunya peningkatan pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
- Belum optimalnya pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
- Belum optimalnya pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

2. Urusan Bidang Statistik

Belum optimalnya peningkatan pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;

3. Urusan Bidang Persandian

Perlunya peningkatan pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2025 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	95 Persen	5.700.316.310,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	95 Persen	5.635.316.310,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 Persen	573.714.904,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 Persen	70.990.004,00	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	11 Dokumen	573.714.904,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	70.990.004,00	
	Pengelolaan E-government di	Kota Blitar,	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan	98 persen	5.126.601.406,00	Pengelolaan E-government di	Kota Blitar,	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan	98 persen	5.564.326.306,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kepan jen Kidul	dan layananan publik			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kepan jen Kidul	dan layananan publik			
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	238.928.611 ,00	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	531.023.911 ,00	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	20 Perangkat Daerah	4.887.672.795,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	5.033.302.395,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	90 Persen 95 Persen	2.539.304.140,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	90 Persen 95 Persen	2.513.252.886,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan					pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	68,5 Persen	2.539.304.140,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	68.5 Persen	2.513.252.886,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	279.003.900,00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	278.902.086,00	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1112 Permohonan	1.435.546.786,00	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	700 Permohonan	566.991.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	16 Rekome n	20.397.534, 00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomen dasi	51.285.500, 00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	533 Media	723.823.680 ,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	1.582.733.5 00,00	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	110 Orang	80.532.240, 00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	80 Orang	33.340.000, 00	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	98,31 Persen	340.838.700 ,00	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	98.31 Persen	306.400.700 ,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Kota Blitar, kepan	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	100 Persen	340.838.700 ,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Kota Blitar, kepan	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	100 Persen	306.400.700 ,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota	jen Kidul	dari BPS			Kabupaten/Kota	jen Kidul	dari BPS			
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	7 Persentase	137.905.300,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	90 Persentase	70.814.500,00	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	14	113.824.800,00	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80 Persentase	205.469.200,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	89.108.600,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	30.117.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62,02 Persen	256.283.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62.02 Persen	247.600.400,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	62.02 Persen	205.203.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	62.02 Persen	196.528.400,00	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	75.400.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	66.598.700,00	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	49.608.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	49.446.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	39.965.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	40.253.200,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	75 Persen	51.080.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	75 Persen	51.072.000,00	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 Perangkat Daeraht	51.080.000,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah	51.072.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kota Blitar, kepan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 indeks	5.239.852.896,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kota Blitar, kepan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 indeks	6.223.617.972,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jen Kidul				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jen Kidul				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	24.494.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	17.828.778,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Unit	24.494.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Unit	6.278.778,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 persen	237.059.290,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 persen	3.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Unit	87.661.790,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Unit	8.050.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	100 persen	20.139.150,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	100 persen	4.529.010.785,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Dokumen	5.239.150,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Dokumen	4.527.010.785,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 persen	237.059.290,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 persen	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2 Unit	74.250.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2 Unit	131.486.439,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Unit	75.147.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Unit	33.186.439,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	20.139.150,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	98.300.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7 Laporan	10.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7 Laporan	288.464.775,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.900.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.636.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		116.790.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	10.020.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Paket	24.790.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Paket	23.306.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, kepanjen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Orang	92.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, kepanjen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Orang	46.015.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kidul					Kidul				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	3.994.465.046,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	5.800.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	33/13 orang/bulan	3.987.165.046,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Orang/bulan	4.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	7.300.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	190.685.675,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 persen	296.515.310,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 persen	84.480.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	9.700.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepan jen Kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Paket	84.480.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Blitar,	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	3 Paket	13.012.310,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Blitar,	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	3 Paket	935.287.905	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah	kepanjen Kidul	sesuai standart		00	Pemerintahan Daerah	kepanjen Kidul	sesuai standart		,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Paket	27.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Paket	687.641.905,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Paket	51.125.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Paket	247.646.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	1 Paket	5.800.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	1 Paket	237.059.290,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Dokumen	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Dokumen	87.661.790,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Laporan	185.878.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Laporan	75.147.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	550.389.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, kepanjen Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	74.250.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 ini tidak terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD

.

Tabel. 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
      - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
      - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
      - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
      - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
      - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
      - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
      - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
      - ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
      - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
      - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu
(1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
   a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
   b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
   c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
   d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
(2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
   a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
   c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
   d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
   e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
   f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja
(3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
   a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
   b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
   c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
   d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
   e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Transformasi Ekonomi
Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu
(1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
   a. Penguatan industri dasar
   b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
   c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
   d. Pengembangan industri medium-high technology
   e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
   f. Produktivitas UMKM dan koperasi
   g. Pengembangan ekonomi biru
   h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
   i. Peningkatan produktivitas BUMN
   j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
   k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
   l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
   m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
(2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
   a. Percepatan transisi energi
   b. Ekonomi sirkular industri
   c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
   d. Pengelolaan hutan lestari
(3) Transformasi digital, melalui:
   a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
   b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
   c. Pemerintah digital
   d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital
(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
   a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
   b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi

c. Perkuatan system logistic nasional
d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Wilayah metropolitan
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
a. Digitalisasi pelayanan publik
b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
c. Harmonisasi dan kolaborasi keweangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
b. Penguatan tata kelola ASN
c. Penggajian tunggal ASN
d. Reformasi system pension
e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

(1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
a. Pembangunan bidang hukum
b. Pembangunan bidang keamanan
c. Pembangunan bidang demokrasi

(2) Stabilitas ekonomi makro
   a. Optimalisasi pendapatan negara
   b. Peningkatan kualitas belanja negara
   c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
(3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
      a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
      b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
   (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
      a. Penguatan ketahanan keluarga
      b. Peningkatan kesetaraan gender
      c. Perwujudan masyarakat inklusif
   (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
      a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
      d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
   (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
      a. Kemandirian pangan
      b. Peningkatan ketahanan air nasional
      c. Ketahanan energi
   (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
      a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
      b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar 2021-2026. Tujuan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan indikator tujuan yang disusun adalah Indeks SPBE. Target Kinerja dari Indikator Tujuan yang ingin di capai tahun 2025 adalah sebesar 4,20

SASARAN

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata Kelola TIK
2. Meningkatnya system keterbukaan informasi public
3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah
4. Meningkatnya keamanan informasi
5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar yaitu Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2023 terealisasi 3,68 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu dengan target 2,82. sehingga mulai Tahun 2024-2026 targetnya tujuannya dinaikkan melebihi dari target yang ada di perubahan renstra ketiga, dengan harapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar akan terus meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar sebagai berikut:

Table 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8
	Tujuan 1 :Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE	2,82	3,68	3,9	4,25 *	4,35 *
	Sasaran 1 : Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	94%	94 %	94,3%	100%	100%
	Sasaran 2 : Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar	86	88.69	91	96	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8
			Layanan Informasi Publik					
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	SP4N Lapor adalah layanan yang mewadahi aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwewenang sehingga aspirasi atau pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti pihak terkait.	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Sasaran 3 : Meningkatnya permanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Perencanaa OPD : Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan : Dokumen LKJIP	97%	100 %	100%	100% *	100%
		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik : Ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	2,7	2,9	3,1
	Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai Per Area Keamanan Informasi : 7 Area Keamanan 1. Tata kelola 2.Pengelolaan Resiko 3.Kerangja Kerja	46.51	46.8	54,26	62,02	69,77

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8
			4.Pengelolaan Aset 5.Teknologi 6.Suplemen 7.Katagori SE					
	Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Peragkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 85	A 85.27	A 86,43	A 87,5	A 88,75
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 85	A 85.27	A 86,43	A 87,5	A 88,75

*Target dinaikkan karena realisasi di tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2023

3.2 Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan pada pencapaian program nasional, pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar, pencapaian SPM bidang Komunikasi dan Informasi, peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik dan pencapaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program dan Kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2023 berdasarkan hasil pemetaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	Kemiskinan/stanting/P3DN
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemiskinan/stanting/P3DN
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	P3DN
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	P3DN
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kemiskinan/stanting/P3DN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	P3DN
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	stunting
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase implementasi Persandian Untuk	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen IKM yang disusun/dokumen x 100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, DAN STATISTIK KOTA BLITAR

4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	● Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yanga ada di SPBE. ● Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawaasan E-Gov dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota
2	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	● Optimalisasi dukungan perangkat derah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. ● Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. ● Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	● Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. ● Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi.	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Keamanan Informasi.	● Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah. ● Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja - Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program Kerja Tahun 2025

Pada tahun anggaran tahun 2025 ini, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menyesuaikan dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 2021 – 2026.

Program yang disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Ditetapkan untuk dipedomani, dijabarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 14.256.188.268,00 . Adapun program / kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2025 diuraikan secara rinci pada Tabel 4.1 tentang Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				14.896.188.268,00				14.568.575.116,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.896.188.268,00				14.568.575.116,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.342.187.168,00				13.992.036.816,00
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 indeks	6.223.617.972,00			84 indeks	5.794.278.260,00
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 persen	17.828.778,00			100 persen	20.050.000,00
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	11 Dokumen	6.278.778,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		11 Dokumen	6.500.000,00
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	7 Laporan	3.500.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		7 Laporan	4.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Laporan	8.050.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Laporan	9.050.000,00
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	4.529.010.785,00			100 persen	4.389.558.260,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	13 Orang/bulan	4.527.010.785,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		13 Orang/bulan	4.386.758.260,00
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	4 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	2.800.000,00
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	131.486.439,00			100 persen	135.200.000,00
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	65 Paket	33.186.439,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		65 Paket	35.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan							
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 Orang	98.300.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		100 Orang	100.000.000,00
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	288.464.775,00			100 persen	302.816.610,00
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	4 Paket	8.636.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Paket	9.000.000,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	3 Paket	10.020.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		3 Paket	11.613.310,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	5 Paket	23.306.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Paket	24.000.000,00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	36 Paket	46.015.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36 Paket	47.537.500,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Paket	5.800.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Paket	6.000.000,00
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	24 Dokumen	4.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		24 Dokumen	4.200.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan							
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	36 Laporan	190.685.675,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36 Laporan	200.465.800,00
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	84.480.000,00			100 persen	94.000.000,00
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	3 Unit	84.480.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		3 Unit	94.000.000,00
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	935.287.905,00			100 persen	593.594.100,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	36 Laporan	687.641.905,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		36 Laporan	325.667.000,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	13 Laporan	247.646.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		13 Laporan	267.927.100,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 persen	237.059.290,00			100 persen	259.059.290,00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	8 Unit	87.661.790,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		8 Unit	97.661.790,00
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	8 Unit	75.147.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		8 Unit	85.147.500,00
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	2 Unit	74.250.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Unit	76.250.000,00
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	90 Persen 95 Persen	2.513.252.886,00			90 Persen 95 Persen	2.544.714.340,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan							
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	68.5 Persen	2.513.252.886,00			68.5 Persen	2.544.714.340,00
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	5 Komunitas	278.902.086,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Komunitas	288.131.840,00
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	700 Permohonan	566.991.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		700 Permohonan	575.616.760,00
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	5 Rekomendasi	51.285.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Rekomendasi	54.142.034,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	6 Media	1.582.733.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		6 Media	1.592.633.706,00
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	80 Orang	33.340.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		80 Orang	34.190.000,00
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik		95 Persen	5.635.316.310,00			95 Persen	5.653.044.216,00
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 Persen	70.990.004,00			100 Persen	75.564.210,00
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	4 Dokumen	70.990.004,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Dokumen	75.564.210,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	98 persen	5.564.326.306,00			98 persen	5.577.480.006,00
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	2 Aplikasi	531.023.911,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Aplikasi	538.928.611,00
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	30 Perangkat Daerah	5.033.302.395,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		30 Perangkat Daerah	5.038.551.395,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				306.400.700,00				319.730.300,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Data statistik yang terpublikasi		98.31 Persen	306.400.700,00			98.31 Persen	319.730.300,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						STATISTIK SEKTORAL	menggunakan sistem elektronik							
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	100 Persen	306.400.700,00			100 Persen	319.730.300,00
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	90 Persentase	70.814.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		90 Persentase	73.905.500,00
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	80 Persentase	205.469.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		80 Persentase	211.824.800,00
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Dokumen	30.117.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	34.000.000,00
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				247.600.400,00				256.808.000,00
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi		62.02 Persen	247.600.400,00			62.02 Persen	256.808.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						PENGAMANAN INFORMASI	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota		62.02 Persen	196.528.400,00			62.02 Persen	203.288.000,00
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	1 Dokumen	66.598.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	70.000.000,00
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	4 Laporan	49.446.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	50.808.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi Output Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	2 Laporan	40.253.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Laporan	42.050.000,00
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	21 Perangkat Daerah	40.230.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		21 Perangkat Daerah	40.430.000,00
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi		75 Persen	51.072.000,00			75 Persen	53.520.000,00
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	30 Perangkat Daerah	51.072.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		30 Perangkat Daerah	53.520.000,00
	J U M L A H									14.896.188.268,00				14.568.575.116,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik tahun 2025 sebagai penjabaran Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bagian dam proses pelaksanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan seluruh program

dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan tepat sasaran , tepat waktu , tepat anggaran dan administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya . Misi ke-5 Wali Kota Blitar Terpilih periode 2021-2026 yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berbasis Teknologi Informasi ”.

Misi ke-5 Wali Kota Blitar dijabarkan menjadi tujuan/sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas adalah “Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” Dan tujuan akhirnya untuk mewujudkan Kota Blitar sesuai dengan visi “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT “

14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraf kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 ayat 2 bahwa Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran serta prakiraan maju;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Perhubungan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas perhubungan;
3. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 maupun perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah harus bersinergi dengan dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. Renstra Perangkat Daerah itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (SAKIP). Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Perhubungan) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Perhubungan dan Renja Dinas

Perhubungan Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 setelah ditetapkan KUAPPAS Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
3. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu – isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
Menguraikan mengenai telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan serta Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
Menguraikan garis besar mengenai rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026.

BAB V Penutup.
Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Perhubungan Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisa apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (*output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan didukung dengan dana yang cukup memadai. Untuk besarnya anggaran belanja daerah Dinas Perhubungan tahun 2023 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Daerah

Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
Belanja Daerah	21.934.888.646,00	21.323.973.509,77	610.915.136,23	97,21

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Belanja Daerah lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Dinas Perhubungan Kota Blitar

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.624.718.972,00	2.578.749.292,79	98,25	45.969.679,21	1,75
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	*2.624.718.972*,00	*2.578.749.292,79*	*98,25*	45.969.679,21	1,75
Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	113.215.844,00	111.133.495,00	98,16	2.082.349,00	1,84
Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	529.633.636,00	520.982.329,00	98,37	8.651.307,00	1,63
Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	111.267.906,00	111.044.232,00	99,80	223.674,00	0,20
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.870.601.586,00	1.835.589.236,79	98,13	35.012.349,21	1,87
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.069.733.788,00	8.821.187.137,00	97,26	248.546.651,00	2,74
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*9.069.733.788*,00	*8.821.187.137,00*	*97,26*	248.546.651,00	2,74
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.193.020.682,00	1.132.557.670,00	94,93	60.463.012,00	5,07

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95.517.064,00	90.971.958,00	95,24	4.545.106,00	4,76
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	7.576.278.482,00	7.395.099.190,00	97,61	181.179.292,00	2,39
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	204.917.560,00	202.558.319,00	98,85	2.359.241,00	1,15
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	294.666.911,00	290.258.339,00	98,50	4.408.572,00	1,50
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*294.666.911*,00	*290.258.339,00*	*98,50*	4.408.572,00	1,50
Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	101.697.251,00	100.604.669,00	98,93	1.092.582,00	1,07
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	192.969.660,00	189.653.670,00	98,28	3.315.990,00	1,72
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.659.524.481,00	1.644.446.226,00	99,09	15.078.255,00	0,91
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*1.659.524.481*,00	*1.644.446.226,00*	*99,09*	15.078.255,00	0,91
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	667.559.732,00	660.465.548,00	98,94	7.094.184,00	1,06

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	991.964.749,00	983.980.678,00	99,20	7.984.071,00	0,80
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	240.840.161,00	234.490.070,00	97,36	6.350.091,00	2,64
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*240.840.161*,00	*234.490.070,00*	*97,36*	6.350.091,00	2,64
Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	123.061.697,00	119.950.850,00	97,47	3.110.847,00	2,53
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	92.778.464,00	89.539.220,00	96,51	3.239.244,00	3,49
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.299.445.849,00	1.269.108.500,00	97,67	30.337.349,00	2,33
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*1.299.445.849*,00	*1.269.108.500,00*	*97,67*	30.337.349,00	2,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.299.445.849,00	1.269.108.500,00	97,67	30.337.349,00	2,33
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.745.958.484,00	6.485.733.944,98	96,14	260.224.539,02	3,86
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*53.479.054*,00	*52.612.630,00*	*98,38*	866.424,00	1,62

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.839.560,00	8.723.500,00	98,69	116.060,00	1,31
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.639.494,00	43.889.130,00	98,32	750.364,00	1,68
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*4.953.204.045*,00	*4.743.171.874,00*	*95,76*	210.032.171,00	4,24
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.045.829,00	4.742.385.894,00	95,77	209.659.935,00	4,23
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	1.158.216,00	785.980,00	67,86	372.236,00	32,14
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*163.428.036*,00	*162.005.700,00*	*99,13*	1.422.336,00	0,87
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.492.500,00	42.735.000,00	98,26	757.500,00	1,74
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	119.935.536,00	119.270.700,00	99,45	664.836,00	0,55
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*438.310.364*,00	*426.207.183,00*	*97,24*	12.103.181,00	2,76
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.865.043,00	6.857.925,00	99,90	7.118,00	0,10
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.458.008,00	19.773.200,00	96,65	684.808,00	3,35
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.837.677,00	9.598.870,00	88,57	1.238.807,00	11,43
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.084.000,00	53.236.500,00	87,15	7.847.500,00	12,85
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.673.536,00	9.386.800,00	97,04	286.736,00	2,96

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	8.100.000,00	7.536.000,00	93,04	564.000,00	6,96
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.979.600,00	304.649.888,00	99,57	1.329.712,00	0,43
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.312.500,00	15.168.000,00	99,06	144.500,00	0,94
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*67.784.445*,00	*66.195.000,00*	*97,66*	1.589.445,00	2,34
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	#DIV/ 0!	0,00	#DIV/ 0!
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	6.780.488,00	6.780.000,00	99,99	488,00	0,01
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.003.957,00	59.415.000,00	97,40	1.588.957,00	2,60
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*644.477.200*,00	*635.568.953,98*	*98,62*	8.908.246,02	1,38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.527.200,00	225.715.682,00	98,34	3.811.518,00	1,66
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.950.000,00	409.853.271,98	98,77	5.096.728,02	1,23
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*425.275.340*,00	*399.972.604,00*	*94,05*	25.302.736,00	5,95
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.893.100,00	291.820.504,00	92,38	24.072.596,00	7,62
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.582.240,00	22.312.100,00	98,80	270.140,00	1,20
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	100,0 0	0,00	0,00

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGAGRAN		SISA PAGU ANGGARAN	
		Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.800.000,00	25.840.000,00	96,42	960.000,00	3,58
TOTAL	21.934.888.646,00	21.323.973.509,77	97,21	610.915.136,23	2,79

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) dapat dilihat dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,30		85,05	84,07	98,85	85,10	85,10	99,77%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,30		85,05	84,07	98,85	85,10	85,10	99,77%
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80,99		80,96	86,17	106,44	80,97	80,97	99,98%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	50,00%
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	56		14	14	100,00	14	28,00	50,00%
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28		7	7	100,00	7	14,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	400		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	50,00%
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	200		50	43	86,00	50	93,00	46,50%
2.15.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	68		17	14	82,35	17	31,00	45,59%
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	400		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	13		2	2	100,00	5	7,00	53,85%
2.15.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200		50	50	100,00	50	100,00	50,00%
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	400		100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	50,00%
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4		1	1	100,00	1	2,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	14		4	4	100,00	4	8,00	57,14%
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	28		7	7	100,00	7	14,00	50,00%
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	96		24	27	112,50	24	51,00	53,13%
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4		1	1	100,00	1	2,00	50,00%
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	96		24	24	100,00	24	48,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	235		85	88	103,53	50	138,00	58,72%
2.15.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1		1	1	100,00	0	1,00	100,00%
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	400		100,00	100	100,00	100,00	200,00	50,00%
2.15.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5		0	0	#DIV/0!	0	0,00	0,00%
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5		1	1,00	100,00	2	3,00	60,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	22		10	10	100,00	4	14,00	63,64%
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	400		100,00	100	100,00	100,00	200,00	50,00%
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	156		48	48	100,00	36	84,00	53,85%
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	52		13	13,00	100,00	13	26,00	50,00%
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	400		100,00	100	100,00	100,00	200,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	235		64	83	129,69	56	139,00	59,15%
2.15.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	169		57	57	100,00	40	97,00	57,40%
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	12		3	3	100,00	3	6,00	50,00%
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana danprasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4		1	1	100,00	1	2,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	nilai	0,430		0,465	0,2595	139,65	0,44	0,44	97,67%
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	97		94	95,75	101,86	95	95,00	97,94%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,70		99,50	99,51	100,01	99,55	99,55	99,85%
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	20		5	5	100,00	2	7	35,00%
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Unit	153		48	61	127,08	5	66	43,14%
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	51		23	24	104,35	8	32	62,75%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	6.142		5.994	5.994	100,00	6.042	12.036	195,96%
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	148		50	51	102,00	28	79	53,38%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	91,00		87,00	96,97	111,46	89,00	89,00	97,80%
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	jenis	61		12	12	100,00	15	27	44,26%
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	5		1	1	100,00	1	2	40,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	39		12	12	100,00	1	13	33,33%
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	indeks	81,18		81,12	84,98	104,76	81,14	81,14	99,95%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Indeks	83,80		82,10	82,76	100,80	82,75	82,75	98,75%
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	80,00		77,00	77,31	100,40	78,00	78,00	97,50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	48		12	12	100,00	12	24,00	50,00%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	83,50		81,75	84,26	103,07	82,45	82,45	98,74%
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	96,50		95,00	94,51	99,48	95,50	95,50	98,96%
2.15.02.2.05.0003	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Unit	18.900		5.100	3.485	68,33	4.500	7.985	42,25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.05.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	dokumen	4.000		1.000	1.000	100,00	1.000	2.000	50,00%
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit	44		11	11	100,00	11	22,00	50,00%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	85,50		83,15	87,92	105,74	83,90	83,90	98,13%
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	90		84,00	95,92	114,19	86	86,00	95,56%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Laporan	48		12	12	100,00	12	24,00	50,00%
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	38		9	9	100,00	9	18,00	47,37%
	Sasaran 3: Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	1.134			443		390	833,00	126,54%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	%	0,29		0,32	1,72	537,50	0,31	0,31	93,10%
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	7		2	2	100,00	2	4,00	57,14%
2.15.02.2.06.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Laporan	48		12	12	100,00	12	24,00	50,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
			Satuan	K		Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.06.0014	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	7		2	2	100,00	1	3,00	42,86%
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	29		6	6	100,00	9	15,00	51,72%
2.15.02.2.06.0017	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Laporan	5		1	1	100,00	1	2,00	40,00%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

1) Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target :

No	Nama Program / kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan*	95%	94.51%	99,48%

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya kendaraan berkeselamatan. Selain itu juga kurangnya penegakan hukum terkait kelengkapan dokumen keselamatan kendaran di jalan.

2) Program / kegiatan yang *memenuhi target* :

No	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Program / kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	100 %
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	100 %

No	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Program / kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
7	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	5 jenis	5 jenis	100 %
8	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	12 jenis	12 jenis	100 %
9	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	2 kajian	100 %

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

b. Penetapan target yang direncanakan sudah tepat.

3). Program / kegiatan yang *melebihi target :*

No	Nama program / Kegiatan	Indikator Program / kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,96	86,17	106,44%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	0,32	1,72	537,50%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,50 %	99,51 %	100,01%
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	87 %	96,97 %	111,46%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	83,15	87,92	105,74%
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	84 %	99,92 %	114,19%

No	Nama program / Kegiatan	Indikator Program / kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	81,75	84,26	103,07%
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	82,10	82,76	100,80%
5	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	77 %	77,31%	100,40%

Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Program yang realisasinya memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar, berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan peningkatan pelayanan bidang perhubungan kepada masyarakat pada umumnya.
2. Terhadap Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar akan berdampak pada laporan kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Dari beberapa uraian terkait capaian kinerja program / kegiatan, untuk menghindari adanya kinerja program / kegiatan yang tidak tercapai/ terealisasi, maka perlu diambil kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil yang ada.
2. Perencanaan dan penganggaran harus benar-benar diperhitungkan dengan seksama.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan

2. Kesehatan
3. Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, Dinas Perhubungan tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Blitar berusaha untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lainnya (Dishub Kabupaten Tulungagung), dengan perolehan data sebagaimana tabel 2.2.1.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel 2.2.2 berikut:

Tabel 2.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota Lain
Tahun 2023

Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar
Meningkatnya Kinerja Transportasi	- Persentase Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi (Kabupaten Tulungagung) - Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (Kota Blitar)	85 %	94 %	87,50%	95,75 %	102,94 %	101,86 %

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	v/c ratio kinerja ruas jalan	IKK	C 0,47	C 0,465	B 0,440	B 0,435	B 0,430	C 0,738	B 0,2595	B 0,2595	B 0,435	B 0,430	Tingkat capaian kinerja 139,65% dengan kategori sangat berhasil.
2.	Rasio konektivitas	IKK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tingkat capaian kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil.
3.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	IKU	93	94	95	96	97	92,31	95,75	95,75	96	97	Tingkat capaian kinerja 101,86% dengan kategori sangat berhasil.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan, diantaranya adalah:

❖ Tantangan :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan uji kendaraan bermotor;
2. Program pemberantasan pungli diseluruh Kota Blitar dari berbagai jenis pungutan;
3. Belum meratanya fasilitas dan prasarana perhubungan.

❖ Peluang :

1. Dinamika perkembangan teknologi terbaru dibidang perhubungan;
2. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap layanan perhubungan (angkutan umum dan tertib berlalu lintas;
3. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi.

Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Optimalisasi pelayanan angkutan umum;
2. Optimalisasi sistem pengelolaan parkir;
3. Peningkatan keselamatan jalan menuju smart city;
4. Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan;
5. Peningkatan pelayanan uji kendaraan.

Terkait dengan isu-isu strategis diatas, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Penambahan ketersediaan prasarana perhubungan dan perlengkapan jalan lainnya;
2. Pelaksanaan kajian manajemen rekayasa lalu lintas sesui dengan perkembangang arus lalu lintas di Kota Blitar;
3. Sosialisasi tertib berlalu lintas sejak dini pada beberapa jenjang pendidikan;
4. Pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan kepada juru parkir dalam upaya optimalisasi kinerja;
5. Sosialisasi pentingnya angkutan berkeselamatan bagi pemilik kendaraan wajib uji;
6. Pengawasan dan pengendalian angkutan umum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Kota Blitar Tahun 2022-2026 bahwa Tema pembanguan RKPD Kota Blitar tahun 2025 adalah Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan Yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah, dengan menentukan 3 (tiga) Prioritas Pembangunannya, yaitu :

1. Merealisasikan SAPTA PROGRAM PRIORITAS yang belum tercapai;
2. Akselerasi pencapaian target IKU DAERAH yang belum terpenuhi;
3. Penguatan program kegiatan sesuai tema pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perhubungan di wilayah Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,96%	6.766.679.366	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,96%	6.766.679.366	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	12.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	12.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	8.800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	8.800.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	3.200.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	3.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.109.509.066	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.109.509.066	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/bulan	5.107.924.666	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/bulan	5.107.924.666	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.584.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.584.400	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	230.990.600	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	230.990.600	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	75.678.600	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	75.678.600	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	155.312.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	155.312.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	357.083.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	357.083.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.760.100	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.760.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	13.735.800	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	13.735.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 paket	13.668.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 paket	13.668.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	46.012.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	46.012.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	9.098.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	9.098.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	7.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	7.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	235.135.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	235.135.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	21.875.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	21.875.000	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	38.378.300	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	38.378.300	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	11.606.200	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	11.606.200	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	26.772.100	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	26.772.100	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	710.730.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	710.730.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	48 laporan	250.816.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	48 laporan	250.816.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	459.914.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	459.914.000	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	307.987.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	307.987.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	262.502.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	262.502.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit	25.435.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit	25.435.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.050.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.050.000	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,60%	7.014.843.247	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,60%	7.014.843.247	
2.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	3 jenis	7.014.843.247	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	3 jenis	7.014.843.247	
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	16 unit	192.720.384	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terbangun	16 unit	192.720.384	
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	52.005.691	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 unit	52.005.691	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Blitar	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	6047 unit	6.700.117.172	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Blitar	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	6047 unit	6.700.117.172	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Blitar	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	23 unit	70.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Blitar	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	23 unit	70.000.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	90 %	199.896.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	90 %	199.896.000	
2.2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Blitar	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	16 jenis	199.896.000	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Blitar	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	16 jenis	199.896.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Kota Blitar	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 unit	179.940.200	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Kota Blitar	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 unit	179.940.200	
	Sub KegiatanRehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Blitar	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	19.955.800	Sub KegiatanRehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Blitar	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	19.955.800	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	83,25	1.324.417.800	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	83,25	1.324.417.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Blitar	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	79%	1.324.417.800	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Blitar	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	79%	1.324.417.800	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.324.417.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota	12 laporan	1.324.417.800	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	82,90	129.015.018	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	82,90	129.015.018	
2.4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Blitar	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	96 %	129.015.018	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Blitar	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	96 %	129.015.018	
	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	4600 unit	31.086.300	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	4600 unit	31.086.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Blitar	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1000 dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Blitar	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1000 dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	72.928.718	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	72.928.718	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	81,16	1.494.382.800	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	81,16	1.494.382.800	
2.5	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	84,47%	1.494.382.800	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	84,47%	1.494.382.800	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	1.074.360.600	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan	1.074.360.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	9 unit	420.022.200	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	9 unit	420.022.200	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	0,30	2.209.873.900	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kota Blitar	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	0,30	2.209.873.900	
2.6	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	2.209.873.900	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	2.209.873.900	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.965.350.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/ Kota	12 laporan	1.965.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	69.094.500	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 laporan	69.094.500	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Blitar	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 dokumen	91.968.000	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Blitar	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 dokumen	91.968.000	
	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	83.461.400	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	83.461.400	
	TOTAL				19.139.108.131					9.139.108.131	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang dan usulan pokir DPRD ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas kegiatan pembangunan pada tahun 2025, yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Urusan Perhubungan Tahun 2025

Kota Blitar

NO	USULAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pokir DPRD ELY HIDAYAH FITNAWATI	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota *Uraian Kegiatan: Pengadaan warning light*	Depan SDN Sentul 3 Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang tersedia	1 unit	Diakomodir
2	Musrenbang Kota Blitar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota *Uraian* *Kegiatan:* *Pengadaan PJU*	Jl. Cipemali Jl. Hasyim Ashari Jl. KH Mas Mansyur Jl. DI Panjaitan	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang terbangun	16 buah	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Renja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur maupun dengan Renja Kementerian Perhubungan.

Dalam Rangka Peningkatan Kualitas di bidang Perhubungan perlu adanya sinkronisasi perumusan program prioritas Nasional tahun 2025 yaitu *Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar* dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
b. Optimalisasi restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
c. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi;
d. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi;
e. Peningkatan penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Mengacu pada program prioritas tersebut diatas, maka pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2025 yang berhubungan dengan urusan bidang perhubungan meliputi Penguatan aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan transportasi dengan melalui satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari beberapa kegiatan yang saling berkaitan dan tersinkronisasi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana dalam table 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Blitar

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Target	
				2023		2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	V/C Ratio Pada Tahun n	C 0,465	B 0,2595	C 0,440	B 0,435
1.1	Meningkatnya sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik, dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	94 %	95,75 %	95 %	96 %
1.2	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	81,12	84,98	81,14	81,16
1.3	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	Formulasi Perhitungan: Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan		443 kejadian	390 kejadian	378 kejadian
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	85,05	84,07	85,10	85,20
2.1	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	85,05	84,07	85,10	85,20

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan.
2) Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai.
3) Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas.

Dari beberapa strategi tersebut memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil meliputi:

1) Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
2) Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
3) Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
4) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
5) Optimalisasi layanan angkutan sekolah
6) Pengembangan layananan uji KIR berbasis IT
7) Optimalisasi pengelolaan parkir
8) Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
9) Penertiban pelanggaran lalu lintas

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel . 3.2

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
2.15.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	
2.15.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
2.15.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
2.15.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	
2.15.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
2.15.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
2.15.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	
2.15.02.2.05.0003	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	
2.15.02.2.05.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	
2.15.02.2.06.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.15.02.2.06.0014	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.15.02.2.06.0017	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar serta mendukung Tematik RB dan RB
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2025 dan pagu indikatif tahun 2025 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, serta program prioritas daerah.

4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mendukung Prioritas Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas Daerah, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 serta mendukung terwujudnya target capaian daerah

Tabel 4.1

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Daerah	Program	Keiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar serta mendukung Tematik RB dan RB

4.2 Rencana Tindak lanjut LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 203, maka pelaksanaan Renja Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasrana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai;
2. Optimalisasi pengelolaan Terminal Tipe C;
3. Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis;
4. Optimalisasi kinerja juru parkir dan dalam rangka peningkatan PAD parkir;
5. Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas;
6. Optimalisasi layanan uji berkala kendaraan bermotor;
7. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan;
9. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun rencana tindak lanjut tersebut dalam pemetakan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023

Pada Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasrana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara berkelanjutan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	Optimalisasi pengelolaan Terminal Tipe C	Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan lanjutan fasilitas utama/ penunjnag Terminal Tipe c	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
3	Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis	Pelaksanaan operasionalisasi angkutan sekolah gratis dan upaya Penambahan armada angkutan sekolah gratis (bus sekolah) melalui usulan ke Kementerian Perhubungan maupun bantuan CSR	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		angkutan sekolah	- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
4	Optimalisasi kinerja juru parkir dan dalam rangka peningkatan PAD parkir	Penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian juru parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Peningkatan kinerja juru parkir dengan melaksanakan studi tiru/ komparasi	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pengadaan system manajemen administrasi parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
5	Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas	Sosialisasi kelalulintasan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan di berbagai jenjang terkait keselamatan dan tertib berlalu lintas	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6	Optimalisasi layanan uji berkala kendaraan bermotor	Pengadaan alat uji berkala	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
7	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Koordinasi dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
8	Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Monev capaian kinerja seluruh pegawai secara berkala	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas Perangkat Daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Blitar	85,20	6.766.685.166	Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85,20	8.491.480.161
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Blitar	85,20	6.766.685.166	Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85,20	8.491.480.161

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	80,98	6.766.685.166	Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80,99	8.491.480.161
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100,00%	12.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		100,00%	45.460.500
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	14 dokumen	8.800.000	Pendapatan Bagi Hasil		14 dokumen	9.660.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	7 Laporan	3.200.000	Pendapatan Bagi Hasil		7 Laporan	35.800.000
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100,00%	5.109.514.866	Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,00%	6.152.705.383
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Blitar	50 Orang/ bulan	5.107.930.466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang/ bulan	6.150.605.383

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	17 Laporan	1.584.400	Pendapatan Bagi Hasil		17 Laporan	2.100.000
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100,00%	230.990.600	Pendapatan Bagi Hasil		100,00%	283.000.000
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar	3 Paket	75.678.600	Pendapatan Bagi Hasil		3 Paket	156.000.000
2.15.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	50 Orang	155.312.000	Pendapatan Bagi Hasil		50 Orang	127.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100,00%	357.083.900	Pendapatan Bagi Hasil		100,00%	385.706.295
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	1 Paket	9.760.100	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	10.200.000
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Blitar	4 Paket	13.735.800	Pendapatan Bagi Hasil		4 Paket	18.000.000
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Blitar	7 Paket	13.668.000	Pendapatan Bagi Hasil		7 Paket	14.100.000
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Blitar	24 Paket	46.012.000	Pendapatan Bagi Hasil		24 Paket	65.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	1 Paket	9.098.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	11.500.000
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Blitar	24 Dokumen	7.800.000	Pendapatan Bagi Hasil		24 Dokumen	18.200.000
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Blitar	50 Laporan	235.135.000	Pendapatan Bagi Hasil		50 Laporan	248.706.295
2.15.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Blitar	1 Dokumen	21.875.000	Pendapatan Bagi Hasil		0 Dokumen	0
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100,00%	38.378.300	Pendapatan Bagi Hasil		100,00%	293.000.000
2.15.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Blitar	0 Unit	0	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Blitar	2 Unit	11.606.200	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	8.000.000
2.15.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar	4 Unit	26.772.100	Pendapatan Bagi Hasil		3 Unit	85.000.000
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100,00%	710.730.500	Pendapatan Bagi Hasil		100,00%	701.881.651
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Kota Blitar	36 Laporan	250.816.500	Pendapatan Bagi Hasil		36 Laporan	246.881.651
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Blitar	13 Laporan	459.914.000	Pendapatan Bagi Hasil		13 Laporan	455.000.000
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100,00%	307.987.000	Pendapatan Bagi Hasil		100,00%	629.726.332

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Blitar	50 Unit	262.502.000	Pendapatan Bagi Hasil		58 Unit	322.324.302
2.15.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Blitar	48 Unit	25.435.000	Pendapatan Bagi Hasil		32 Unit	29.175.198
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Blitar	3 Unit	10.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		3 Unit	228.226.832
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Blitar	1 Unit	10.050.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	50.000.000
	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas	Level Of Service (LOS)	Kota Blitar	0,435	12.372.422.965	Pendapatan Bagi Hasil		0,430	23.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
	perhubungan								
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Kota Blitar	96 %	7.214.739.247	Pendapatan Bagi Hasil		97 %	12.321.467.946
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Kota Blitar	99,60%	7.014.843.247	Pendapatan Bagi Hasil		99,70%	11.915.946.962
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	Kota Blitar	3 Jenis	7.014.843.247	Pendapatan Bagi Hasil		6 Jenis	11.915.946.962
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Kota Blitar	16 Unit	192.720.384	Pendapatan Bagi Hasil		50 Unit	1.712.056.346
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Kota Blitar	1 Unit	52.005.691	Pendapatan Bagi Hasil		10 Unit	677.518.464

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Kota Blitar	6047 Unit	6.700.117.172	Pendapatan Bagi Hasil		6142 Unit	8.797.651.707
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Kota Blitar	23 Unit	70.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		40 Unit	728.720.445
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Kota Blitar	90 %	199.896.000	Pendapatan Bagi Hasil		91 %	405.520.984
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	Kota Blitar	16 Jenis	199.896.000	Pendapatan Bagi Hasil		18Jenis	405.520.984
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kota Blitar	1 Unit	179.940.200	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	185.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Kota Blitar	4 Unit	19.955.800	Pendapatan Bagi Hasil		13 Unit	220.520.984
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Kota Blitar	81,16	2.947.809.818	Pendapatan Bagi Hasil		81,18	7.119.288.865
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Kota Blitar	83,25	1.324.417.800	Pendapatan Bagi Hasil		83,8	2.407.000.000
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	Kota Blitar	79 %	1.324.417.800	Pendapatan Bagi Hasil		80 %	2.407.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 Laporan	1.324.417.800	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	2.407.000.000
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Kota Blitar	82,90	129.015.018	Pendapatan Bagi Hasil		83,50	674.000.000
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	Kota Blitar	96 %	129.015.018	Pendapatan Bagi Hasil		96,50 %	674.000.000
2.15.02.2.05.0003	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Kota Blitar	4600 Unit	31.086.300	Pendapatan Bagi Hasil		4700 Unit	199.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.05.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Kota Blitar	1000 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1000 Dokumen	150.000.000
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Kota Blitar	11 Unit	72.928.718	Pendapatan Bagi Hasil		11 Unit	325.000.000
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Kota Blitar	84,75	1.494.377.000	Pendapatan Bagi Hasil		85,50	4.038.288.865
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	Kota Blitar	88 %	1.494.377.000	Pendapatan Bagi Hasil		90%	4.038.288.865

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 Laporan	1.074.360.600	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	2.308.288.865
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kota Blitar	9 Unit	420.016.400	Pendapatan Bagi Hasil		10 Unit	1.730.000.000
	Sasaran 3: Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kota Blitar	378 Kejadian	2.209.873.900	Pendapatan Bagi Hasil		366 Kejadian	3.559.243.189

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	Kota Blitar	0,30	2.209.873.900	Pendapatan Bagi Hasil		0,29	3.559.243.189
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	2 Kajian	2.209.873.900	Pendapatan Bagi Hasil		1 Kajian	3.559.243.189
2.15.02.2.06.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 Laporan	1.965.350.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	2.050.750.250
2.15.02.2.06.0014	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	1 Dokumen	69.094.500	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	208.853.339

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kota Blitar	7 Dokumen	91.968.000	Pendapatan Bagi Hasil		7 Dokumen	525.000.000
2.15.02.2.06.0017	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Kota Blitar	1 Laporan	83.461.400	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	774.639.600
					19.139.108.131				31.491.480.161

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan tahun 2024.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

a. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam melaksanakan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan satu tahun kedepan. Dimana antar kegiatan dalam satu program harus ada keterpaduan dan sinkronisasi satu sama lain, begitu juga dalam satu kegiatan harus ada sinkronisasi antara sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit pelaksana.

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2025 maupun perkiraan maju tahun 2026.

c. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan Kota Blitar bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b. Guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaanya.

c. Dinas Perhubungan Kota Blitar wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.

d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Guna optimalisasi layanan perhubungan selain rencana tindak lanjut pada tabel diatas, Dinas perhubungan juga mengambil beberapa langkah sebagai berikut:

a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi vertikal pada Forum Perangkat Daerah, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi dan ketepatan sasaran kegiatan akan terwujud.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Akhirnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Perhubungan Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar.

15. RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Dokumen RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada didalamnya, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Pembangunan Daerah diperlukan dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang tahunan dan perencanaan jangka menengah.

Dengan bertujuan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.*

Pasal 13 Ayat (2) Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat

Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan RENJA Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025. Dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. tahun 2024 diarahkan pada tema "*Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Insfrastruktur yang Berkualitas derta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan*" guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah Kota Blitar menyusun RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan kondisi diatas, selanjutnya disusun RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, pendanaan dan penjabaran pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju ;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
3. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 ;
4. Penyusunan RENJA PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar karena akan memberikan *arah dalam pelaksanaan pembangunan* sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus *dipedomani* oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

1.1.1 Keterkaitan antara RENJA PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan RENJA salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah. Ini artinya antara RENJA dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan RENJA berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal RENJA Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara RENJA PD dengan RENSTRA Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RENJA Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA). RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara Dokumen RENSTRA dengan Dokumen RENJA Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara RENJA PD dengan RENJA Kementerian / Lembaga dan RENJA Provinsi

RENJA Kementerian / Lembaga (RENJA Kementrian Pemuda Dan Olahraga) dan Renja Provinsi (RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan RENJA PD, seperti halnya RENSTRA maupun RKPD. Namun RENJA Kementrian Pemuda Dan Olahraga dan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Program Provinsi dan Pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.4 RENJA dan Tindak lanjutnya dalam APBD

RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu RENJA merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7) ;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA/PPAS Tahun 2024, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar

Tahun 2025 dan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Serta sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN YANG LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun yang lalu dan Capaian Renstra PD ;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  Memuat telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional ;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar
  Memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai Perubahan RENSTRA perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
- 3.3 Program dan Kegiatan
  Memuat rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V : PENUTUP
Berisikan catatan penting dengan menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Di Bidang Kepemudaan Dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 (tahun N-2) dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan / program / kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2023 terdiri dari 4 (Empat) Program antara lain :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.*
2. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.*
3. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.*
4. *Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung dengan anggaran sebesar *Rp.* 15.344.775.486,- *(Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), terdiri dari :

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	14.155.838.114,-
2.	Belanja Modal	:	Rp.	1.188.937.372,-
	J u m l a h	*:*	*Rp.*	*15.344.775.486,-*

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025, maka evaluasi yang dipergunakan adalah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat daerah dan RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.

Review hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan Realisasi RENSTRA tersebut mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan / atau Realisasi APBD Kota Blitar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Evaluasi Pelaksanaan RENJA pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dan perkiraan capaian realisasi target RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diuraikan dalam *Tabel 2.1* berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
					TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,87) Nilai	A Nilai	A (84,20) Nilai	A (84,84) Nilai	100,76%	A (84,85) Nilai	A (85,9) Nilai	101,21%
					SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,87) Nilai	A Nilai	A (84,20) Nilai	A (84,84) Nilai	100,76%	A (84,85) Nilai	A (85,9) Nilai	101,21%
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	84 Indeks	81 Indeks	84,89 Indeks	104,80%	85 Indeks	85 Indeks	98.84%
2	19	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Waktu dan Sesuai Standart								
2	19	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	33 dokumen	75%
2	19	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	9 dokumen	25 dokumen	71,42%
2	19	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 orang	22 orang	22 orang	21 orang	95,45%	20 orang	63 orang	76,83%
2	19	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	20 Laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	15 laporan	75%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Triwulanan / Semesteran SKPD									
2	19	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	3 paket	11 paket	78,57%
2	19	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	100 orang	26 orang	26 orang	26 orang	100%	26 orang	78 orang	78%
2	19	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	75%
2	19	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	20 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	5 paket	19 paket	95%
2	19	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	32 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	24 paket	75%
2	19	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%
2	19	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	80%
2	19	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	72 laporan	75%
2	19	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan sesuai kebutuhan								
2	19	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	6 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	19	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	21 unit	-	15 unit	15 unit	100%	5 unit	20 unit	95,24%
2	19	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	156 laporan	-	37 laporan	37 laporan	100%	36 laporan	73 laporan	46,79%
2	19	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	240 laporan	-	63 laporan	63 laporan	100%	60 laporan	123 laporan	51,25%
2	19	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	49 Unit	10 unit	13 unit	13 unit	100%	13 unit	36 unit	73,47%
2	19	01	2.09	0006	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	192 unit	-	42 unit	42 unit	100%	47 unit	89 unit	46,35%
2	19	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 objek	2 objek	-	-	-	-	2 objek	66,67%
2	19	01	2.09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 jenis	3 objek	-	-	-	-	3 objek	60%
					TUJUAN 2 : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	4,25 %	0.97%	0,74%	0,97%	131,08%	0,88%	2,82%	66,35%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional	31,42%	12,28%	10,68%	12,5%	117,04%	2,91%	27,69%	88,13%
					SASARAN 1 : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	52,25%	50,56%	50,9%	51,05%	100,29%	51,35%	51,35%	98,28%
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	54,26	-	-	-	-	52,5	59,67	109,97%
					SASARAN 2 : Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Prestasi Olahraga	78%	64%	72%	71,73%	99,6%	74%	74%	94,87%
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	90%	80%	80%	80%	100%	83%	83%	92,22%
						Persentase Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	7%	3%	6,28%	6,20%	98,72%	7%	7%	100%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	02	2.01		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dab Kepeloporan Pemuda	6189 orang	50 orang	1425 orang	1508 orang	105,82%	1463 orang	2.938 orang	47,47%
2	19	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 orang	50 oran	70 orang	70 orang	100%	50 orang	170 orang	56,67%
2	19	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Pemenuhana Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,	875 orang	-	215 orang	215 orang	100%	210 orang	425 orang	48,57%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan								
2	19	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	1 unit	50%
2	19	02	2.01	0008	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarela wanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan	4931 orang	-	1140 orang	1222 orang	107,19%	1202 orang	2424 orang	49,15%
2	19	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	28,57%
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	43%	40%	41%	43%	104,8%	41%	41%	95,35%
						Cakupan pelatih yang tersertifikasi	71%	68%	69%	69%	100%	70%	70%	98,59%
						Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	77%	63%	67%	67%	100%	70%	70%	90,9%
2	19	03	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	22 cabor	19 cabor	20 cabor	20 cabor	100%	20 cabor	20 cabor	90.9%
2	19	03	2.01	0003	Sub Kegitan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 obyek	-	7 obyek	7 obyek	100%	9 obyek	9 obyek	90%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	14 kejuaraan	4 kejuaraan	4 kejuaraan	4 kejuaraan	100%	4 kejuaran	12 kejuaran	85,71%
2	19	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	8 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	50%
2	19	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	340 orang	-	25 orang	25 orang	100%	90 orang	115 orang	33,82%
2	19	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12 jenis	5 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	11 jenis	91,67%
2	19	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	12 pelatda	-	3 pelatda	3 pelatda	100%	3 pelatda	6 pelatda	50%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Keolahragaaan (Sport Science)								
2	19	03	2.04		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	03	2.04	0002	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	50%
2	19	03	2.04	0004	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	12 organisasi	-	3 organisasi	3 organisasi	100%	3 organisasi	6 organisasi	50%
2	19	03	2.05		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	67%	33%	33%	33%	100%	50%	50%	74,63%
2	19	03	2.05	0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	16 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	50%
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	82%	64%	64%	64%	100%	73%	73%	89,02%

Nama PD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	82%	64%	64%	64%	100%	73%	73%	89,02%
2	19	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
2	19	04	2.01	0003	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	350 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	150 orang	42,85%
2	19	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	4 jenis	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	50%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dispora Tahun 2024 Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
   b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
      - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Administrasi keuangan Perangkat Daerah
      - Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
      - Administrasi umum Perangkat Daerah
      - Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
      - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
      - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
      - Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari beberapa unsur diantaranya: Pimpinan, Mitra kerja, ASN.
      - Pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah
      Dari 7 kegiatan pada Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.
   f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
      Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota akan dilakukan perbaikan perencanaan terget kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Dispora.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
      - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Indikator Kinerja Persentase Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda
   b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
      - Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, da Pemuda Kader Kabupaten/Kota
      - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
   c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
      - Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh KNPI menarik minat pemuda untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan;
      - Kegiatan lintas sektor (Crosscutting) yang diselenggarakan dengan OPD dan BUMN;
      - Kontribusi pihak swasta dalam mendukung kegiatan kepemudaan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya kinerja program/kegiatan
   - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luas cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 21 kelurahan ;
   - Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kelurahan ;
   - Fasilitasi peningkatan profesionalisme dan pembinaan kepeloporan bagi pemuda masih kurang ;
   - Implementasi Kota Layak Pemuda belum disusun secara cermat dan terperinci ;
   - Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktifitas pemuda belum terakomudir melalui kegiatan / kreatifitas pembinaan dalam ruang ;
   - Prestasi pemuda Kota Blitar masih kurang khususnya pada keikutsertan kegiatan pemuda tingkat propinsi dan nasional
   - Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat.

e. Impliaksi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah Dari 2 kegiatan pada Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
   - Melakukan survei untuk memetakan minat dan kebutuhan pemuda di setiap kelurahan
   - Mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan pemuda.
   - Meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, LSM, dan sektor swasta untuk menyediakan lebih banyak kegiatan
   - Mengadakan kemitraan dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk melibatkan pemuda dalam program ekstrakurikuler.
   - Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kegiatan pemuda di setiap kelurahan.
   - Memanfaatkan fasilitas publik yang ada, seperti balai kelurahan dan lapangan olahraga, untuk kegiatan pemuda.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
   b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
   c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
      - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
      - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
      - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
      - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
      - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
   d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan

- Tersedianya Dana Hibah bagi Organisasi Olahraga (KONI, KORMI dan NPCI) untuk operasional Cabang Olahraga ;
- Sarana dan Prasarana Olahraga sudah terkelola dengan baik ;
- Pemberian Reward bagi atlet dan pelatih olaharaga yang berprestasi;
- Peran sera fihak swasta dalam pembinaan atlit dan penyelenggaraan even olahraga.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah
Dari 5 kegiatan pada Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

f. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan perlu pembangunan infrastruktur olahraga yang berkelanjutan, pelatihan dan pengembangan atlit, pelatih dan pengurus cabang olahraga secara berkelanjutan, penyelenggaraan kompetisi dan turnamen secara berkala, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

d. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan
- Jumlah Anggota Pramuka mengalami peningkatan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah
Dari 5 kegiatan pada Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota semua mencapai target. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

f. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan akan dilakukan perbaikan perencanaan terget kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas daya saing kepramukaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudan
Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut :

a) Capaian tahun 2023 sebesar 100,3% berasal dari perhitungan realisasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan sebesar 51,05% dibagi dengan target sebesar 50,9%.

b) Faktor pendukung Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
- Jumlah anggota Pramuka mengalami peningkatan ;

- Keaktifan OKP dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda ;
- Fasilitasi Dana Hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP ;
- Pemberian fasilitas Kantor Sekretariat untuk KNPI dan Pramuka ;
- Banyaknya Kegiatan Tingkat Kota yang melibatkan peran pemuda.

c) Faktor penghambat Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :
- Restruktur pada OKP yang mengakibatkan penyesuaian anggota OKP dan Komunitas pemuda ;
- Kurangnya Fasilitasi Kegiatan dari Pemerintah Daerah ;
- Pemberian Dana Hibah tidak dapat diberikan setiap setiap tahun karena tidak ada dasar hukum yang memayungi

d) Tindak lanjut Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :
- Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI ;
- Penguatan kelembagaan komunitas ;
- Penguatan peran KNPI.

2. Indikator Persentase Prestasi Olahraga

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut

a) Capaian tahun 2023 sebesar 99,62% berasal dari perhitungan realisasi Persentase Prestasi Olahraga sebesar 72% dibagi dengan target sebesar 71,73%.

b) Faktor pendukung Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
- Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas ;
- Pemberian Reward bagi atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi.

c) Faktor penghambat tidak tercapainya target Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga pada Tahun 2023 diantaranya adalah:
- Tidak ada SOP tentang kriteria pengiriman atlit delegasi ;
- Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi
- Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap) ;
- Minat Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Disabilitas masih kurang ;
- Belum terbangunnya integrasi antara olahraga dengan mitra kerja pendidikan ;
- Kurangnya peran pihak swasta dalam pembinaan atlit.

d) Tindak lanjut atas Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
- Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding ;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah ;
- Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas ;
- Melakukan Sosialisasi secara masif ;
- Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi.

3. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

a) Capaian tahun 2023 sebesar 100,76% berasal dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu 84,84 dibagi Target Tahun 2023 yaitu 84,20.
b) Faktor pendukung Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
   - Mampu memahami Perencanaan Strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
   - Mampu memahami manajemen kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar (melalui perencaan, pelaporan dan evaluasi)
   - Mampu menyusun sistem pengukuran dan pelaporan kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
   - Komitmen Pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan ;
   - Koordinasi dan kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan ;
   - Cascading kinerja telah tersusun pada tiap level.
c) Faktor Penghambat Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
   - Belum mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif ;
   - Kompetensi ASN perlu ditingkatkan.
d) Tindak lanjut atas Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
   - Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan pada saat melakukan penyesuaian (Refocusing) Organisasi dan penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja ;
   - Memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk dapatnya memahami dan peduli terhadap hasil pengukran kinerja yang telah dilakukan untuk perbaikan kinerja organisasi di tahun berikutnya ;
   - Agar dalam penyajian data dalam laporan kinerja dilengkapi dengan data perbandingan realisasi kinerja di level nasional ;
   - Memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk mendukung efektivitas, efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam *Tabel 2.2* sebagai berikut :

TABEL. 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

No.	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	4	6	7	8	8		9	10	11	12	13	14
1	Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	-	0,89%	0,74%	0,88%	0,87%	0,87%	-	0,97%	0,88%	0,89%	0,89%	Tercapai
2	Persentase peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional	-	12,79%	10,68%	2,91%	3,95%	1,09%	-	12,5%	3,16%	4,05%	1,30%	Tercapai
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	IKU	50,53%	50,90%	51,35%	51,80%	52,2%	50,08%	51,05%	51,50%	51,96%	52,42%	Tercapai
4	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	IKU	-	-	-	-	-	-	-	59,67	60,65	61,25	-
5	Persentase Prestasi Olahraga	IKU	65%	72%	74%	77%	78%	57%	71,73%	74%	77%	78%	Tercapai
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SPM	A (84,19)	A (84,20)	A (84,21)	A (84,22)	A (84,87)	A (84,64)	A 84,84	A (85,9)	A (86,5)	A (87)	Tercapai
7	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	IKK	80.26	81.26	82.86	84.16	87,12	-	30,11%	82.86	84.16	87,12	Tidak Tercapai
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	IKK	80	80	83	83	90	-	81,78%	83	83	90	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa :

a) Capaian indikator Persentase Peningaktan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah pada tahun 2023 mencapai 131,08% dengan kategori tercapai, angka ini diperoleh dari realisasi 0,74% dibagi target 0,97%. Faktor pendukung keberhasilan adalah meningkatnya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang diselenggaran pemerintah sehingga keterlibatan pemuda semakin meningkat.
b) Capaian Indikator Persentase peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional pada tahun 2023 mencapai 113,1% dengan kategori tecapai, angka ini diperoleh dari realisasi 12,08% dibagi target 10,68%. Faktor pendukung keberhasilan adalah peningkatan keikutsertaan cabor pada kejuaraan-kejuaraan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.
c) Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan pada tahun 2023 mencapai 100,3% dengan kategori tercapai, angka ini diperoleh dari perhitungan realisasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan sebesar 51,05% dibagi dengan target sebesar 50,9%. Faktor pendukung keberhasilan adalah Jumlah anggota Pramuka megnalami peningkatan, Keaktifan OKP dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda, Fasilitasi Dana Hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP, Pemberian fasilitas Kantor Sekretariat untuk KNPI dan Pramuka.
d) Capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Prestasi Olahraga pada tahun 2023 sebesar 99,62% dengan kategori tercapai berasal dari perhitungan realisasi Persentase Prestasi Olahraga sebesar 72% dibagi dengan target sebesar 71,73%. Faktor pendukung keberhasilan adalah Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas, Pemberian Reward bagi atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi.
e) Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 sebesar 100,76% dengan ketegori tercapai berasal dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu 84,84 dibagi Target Tahun 2023 yaitu 84,20. Faktor pendukung keberhasilan adalah Mampu memahami Perencanaan Strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, Mampu memahami manajemen kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar (melalui perencaan, pelaporan dan evaluasi), Mampu menyusun sistem pengukuran dan pelaporan kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, Komitmen Pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan, Koordinasi dan kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan, Cascading kinerja telah tersusun pada tiap level.
f) Capaian Indikator Kinerja Kunci Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri pada tahun 2023 sebesar 37,05% dengan kategori tidak tercapai berasal dari realisasi 81,26% dibagi target sebesar 30,11%. Faktor penghambat adalah usia pemuda masih banyak yang menempuh pendidikan, target yang ditetapkan terlalu tinggi.
g) Capaian Indikator Kinerja Kunci Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2023 sebesar 102,16% dengan kategori tercapai berasal dari realisasi 81,73% dibagi target 80%. Faktor pendukung keberhasilan adalah Jumlah anggota Pramuka megnalami peningkatan, Keaktifan OKP dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda, Fasilitasi Dana Hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP, Pemberian fasilitas Kantor Sekretariat untuk KNPI dan Pramuka.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISPORA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas fungsi Dispora, isu penting pada renja 2025 sebagai berikut :

a) *Bidang Kepemudaan*
   - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luas cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 21 kelurahan ;
   - Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kelurahan ;
   - Fasilitasi peningkatan profesionalisme dan pembinaan kepeloporan bagi pemuda masih kurang ;
   - Implementasi Kota Layak Pemuda belum disusun secara cermat dan terperinci ;
   - Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktifitas pemuda belum terakomudir melalui kegiatan / kreatifitas pembinaan dalam ruang ;
   - Prestasi pemuda Kota Blitar masih kurang khususnya pada keikutsertan kegiatan pemuda tingkat propinsi dan nasional
   - Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat.

b) *Bidang Olahraga*
   - Tidak ada SOP tentang kriteria pengiriman atlit delegasi ;
   - Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi
   - Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap) ;
   - Minat Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Disabilitas masih kurang ;
   - Belum terbangunnya integrasi antara olahraga dengan mitra kerja pendidikan ;
   - Kurangnya peran pihak swasta dalam pembinaan atlit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, tema pembangunan Kota Blitar tahun 2025 adalah ”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Tema pembangunan tahun 2025 tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Dispora mendukung prioritas pembangunan ke-3, yaitu Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Adapun program Dispora yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

3. Program Pengembangan Daya Saing Kepramukaan

Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dispora Tahun 2025 dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dispora sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5 Indeks	5.674.234.196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5 Indeks	4.827.009.479	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	137.621.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	65.429.700	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2.216.500	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	136.621.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	65.429.700	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	2.965.247.246	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	2.545.046.179	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.964.247.246	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.543.494.179	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Lapo ran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Lapo ran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 laporan	1.552.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	80.031.600	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	87.419.900	Penyesuaian

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Daerah yang Sesuai Standart					Perangkat Daerah yang Sesuai Standart			Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	30.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	26 orang	50.031.600	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	25 orang	57.419.900	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	359.603.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	369.327.700	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.747.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.790.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	27.503.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	28.208.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 paket	57.501.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 paket	52.361.100	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	50.742.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	52.326.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	25.016.200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	25.057.200	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.700.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat		Jumlah laporan Penyelengga raan rapat	24 laporan	190.394.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelengga raan rapat	24 laporan	202.884.800	Penyesuaian

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		koordinasi dan konsultasi SKPD					koordinasi dan konsultasi SKPD			Kebutuhan Anggaran
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	127.293.400	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	36.398.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 unit	127.293.400	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6 unit	36.398.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	1.693.356.450	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	1.617.665.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	54.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	52.567.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	1.639.356.450	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	1.565.098.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	311.080.700	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	105.722.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	78.580.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	78.580.700	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	42 unit	32.500.000	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	53 unit	27.137.500	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	83%	2.817.419.850	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	83%	3.135.177.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6,88%				Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6,88%		
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemudan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota		Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepeminpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	1575 orang	2.738.112.200	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemudan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota		Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepeminpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	1575 orang	3.047.668.300	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	50 orang	18.917.200	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	50 orang	20.161.300	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota		Jumlah Kab/Kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	5 kegiatan	479.195.000	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota		Jumlah Kab/Kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	5 kegiatan	497.781.600	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yayng haknya terpenuhi	255 orang	2.225.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yayng haknya terpenuhi	255 orang	2.364.726.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	165.556.200	Usulan Aspirasi
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembang an Organisasi Kepemudaan	80%	79.307.650	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembang an Organisasi Kepemudaan	80%	87.509.100	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan		Jumlah Organisasi Kepramukaan tingkat	24 organisasi	79.307.650	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan		Jumlah organisasi kepemudan yangg difasilitasi dalam	100 orang	87.509.100	Penyesuaian

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		daerah yang meningkat kapasitasnya			Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			Kebutuhan Anggaran
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelompok pramuka aktif	73%	378.666.500	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelompok pramuka aktif	73%	378.666.500	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	73%	378.666.500	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	73%	378.666.500	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 organisasi	350.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 organisasi	350.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	28.666.5000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	28.666.5000	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pembinaan atlet muda	42%	9.619.434.604	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pembinaan atlet muda	42%	6.939.377.079	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
			Cakupan pelatih yang tersertifikasi	70%				Cakupan pelatih yang tersertifikasi	70%		
			Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	73%				Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	73%		
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	22 Cabor	3.668.139.104	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	22 Cabor	2.699.212.679	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegitan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten /kota yang tersedia	7 unit	3.668.139.104	Sub Kegitan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten /kota yang tersedia	10 unit	2.699.212.679	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Olahraga di tingkat kabupaten/kota										
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	4 kejuaraan	347.079.400	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	4 kejuaraan	402.224.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegiatan	247.079.400	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 kegiatan	255.365.200	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan tingkat kabupaten/kota	50 orang	100.000.000	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan tingkat kabupaten/kota	50 orang	146.858.800	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4 jenis	1.113.318.600	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4 jenis	315.170.400	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	140 orang	1.078.318.600	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	140 orang	288.865.300	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengeta huan dan Teknologi Keolah ragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	35.000.000	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengeta huan dan Teknologi Keolah ragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	26.305.100	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	4.087.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	3.175.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/Kota	3 dokumen	4.087.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3.175.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	50%	403.897.500	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	50%	377.770.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	403.897.500	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	377.770.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran
	J U M L A H				18.489.755.150	J U M L A H				15.280.230.458	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar juga berasal dari Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

- Usulan dari Kelurahan Gedog berkaitan dengan kurangnya Bantuan Operasional untuk Organisasi Olahraga Disabilitas (NPCI) maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Pembinaan Organisasi Olahraga Disabilitas (NPCI) pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
- Usulan dari Kelurahan Bendo berkaitan dengan Kurangnya Perhatian Terhadap Olahraga Rekreasi dan Olahraga Permainan Tradisional Masyarakat Kota Blitar maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Pembinaan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Blitar pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
- Usulan dari Kelurahan Kepanjenlor berkaitan dengan pencapaian prestasi olahraga prestasi yang maksimal maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan ;
- Usulan berkaitan dengan kurangnya bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang berdomisili di Kota Blitar maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota;
- Usulan dari Kelurahan Pakunden berkaitan dengan kurangnya Bantuan Operasional untuk Menunjang Kegiatan Kantor Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Dana Hibah untuk Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah ;
- Usulan dari Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Gedog, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Karangtengan, Kelurahan Klampok dan Kelurahan Sananwetan berkaitan dengan kurangnya Sarana dan Prasarana olahraga maka usulan *bisa diakomodir* dengan Pemberian Fasilitas Olahraga pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.

2.5.2 Pokok – pokok pikiran DPRD

- Pada tahun 2025 terdapat usulan berkaitan dengan pengembangan olahraga masyarakat di Kelurahan Blitar dan Kelurahan tlumpu maka usulan *bisa diakomodir* dengan pemberian fasilitas olahraga pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.
- Usulan pembangunan pagar pembatas pada area *Sport Center* maka usulan *bisa diakomodir* dengan pembangunan pagar pembatas *Sport Center* pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.

Rumusan usulan program dan kegiatan yang diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dimaksud dijabarkan dalam *Tabel 2.5* sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025

NO	Usulan	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Fasilitasi Pemberian Dana Hibah untuk Akademi Komunitas Negeri Putra Sang fajar	• Program Pengembangan Kapasitasa Daya Saing Kepemudaan • Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota • Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Sananweta n,Kota Blitar	Jumlah Organisasi/Lembaga yang menerima dana hibah	1 Lembaga	Diakomod ir
2	Fasilitasi Pemberian Dana Hibah untuk IPPNU	• Program Pengembangan Kapasitasa Daya Saing Kepemudaan • Kegaitan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab./Kota • Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi kepemudaan melalui Kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab./kota	Kota Blitar	Jumlah Organisasi/Lembaga yang menerima dana hibah	1 Lembaga	Diakomod ir
3	Pemberian bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi dan SMA	• Program Pengembangan Kapasitasa Daya Saing Kepemudaan • Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota • Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima bantuan beasiswa perguruan tinggi dan SMA	125 orang	Diakomod ir

NO	Usulan	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
		Pemuda di tingkat kabupaten/kota				
4	Sarana Prasarana Pemuda (Co-Working Space)	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota • Sub Kegitan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kecamatan Se-Kota Blitar	Jumlah Sarana Prasana Pemuda yang tersedia	21 paket	Diakomodir
5	Fasilitasi Pemberian Dana Hibah untuk Kwarcab Pramuka	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan • Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Organisasi/Lembaga yang menerima dana hibah	1 Lembaga	Diakomodir
6	Fasilitasi Pembinaan Atlit Olahraga Prestasi berupa Dana Hibah untuk KONI	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga • Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait	Kota Blitar	Jumlah Organisasi/Lembaga yang menerima dana hibah	1 Lembaga	Diakomodir
7	Fasilitasi Pembinaan Atlit Olahraga Disabilitas berupa Dana Hibah untuk NPCI	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga • Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi	Kota Blitar	Jumlah Organisasi/Lembaga yang menerima dana hibah	1 Lembaga	Diakomodir

NO	Usulan	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
		Keolahragaan Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait				
8	Fasilitasi Pembinaan Atlit Olahraga Rekreasi berupa Dana Hibah untuk KORMI	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga • Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait	Kota Blitar	Jumlah Organisasi/Lembaga yang menerima dana hibah	1 Lembaga	Diakomodir
9	Fasilitas Olahraga untuk 8 Kelurahan (Plosokerep, Rembang, Gedog, Bendogerit, Klampok, Sananwetan, Tlumpu dan Karangtengah)	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota • Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kel. Plosokerep, Kel. Rembang, Kel. Gedog, Kel. Bendogerit, Kel. Klampok, Kel. Sananwetan, Kel. Tlumpu. Kel. Karangtengah	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia	8 paket	Diakomodir
10	Pembangunan pagar pembatas lapangan sepak bola Bendo / Mareno dengan sport center dan jalan umum	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota • Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Kepanjenkidul Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten /kota yang tersedia	1 paket	Diakomodir

NO	Usulan	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
		pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				
11	Pembangunan Lanjutan Sirkuit BMX	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota • Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kepanjenkidul, Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 paket	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas

   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:

   a. Transformasi ekonomi
      - Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - Penguatan infrastruktur digital
      - Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - Percepatan infrastruktur IKN

   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

   SDM berdaya saing dan produktif, melalui

   a. Transformasi sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem

   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan

   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
      - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
      - Pengembangan skema graduasi bansos
      - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
      - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
      - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
      - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
      - Peningkata produksi industri pengolahan
      - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
      - Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

   Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu

   (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
      a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
      b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat

c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

(2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan science, technology, engineering, art dan mathematics
c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja

(3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu

(1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
a. Penguatan industri dasar
b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
d. Pengembangan industri medium-high technology
e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
f. Produktivitas UMKM dan koperasi
g. Pengembangan ekonomi biru
h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
i. Peningkatan produktivitas BUMN
j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian

(2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
a. Percepatan transisi energi
b. Ekonomi sirkular industri
c. Pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)
d. Pengelolaan hutan lestari

(3) Transformasi digital, melalui:
a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
c. Pemerintah digital
d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi

b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
c. Perkuatan system logistic nasional
d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Wilayah metropolitan
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
a. Digitalisasi pelayanan publik
b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
c. Harmonisasi dan kolaborasi keweangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
b. Penguatan tata kelola ASN
c. Penggajian tunggal ASN
d. Reformasi system pension
e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
    (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
        a. Pembangunan bidang hukum
        b. Pembangunan bidang keamanan
        c. Pembangunan bidang demokrasi
    (2) Stabilitas ekonomi makro
        a. Optimalisasi pendapatan negara
        b. Peningkatan kualitas belanja negara
        c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
    (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
    (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
        a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
        b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
    (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
        a. Penguatan ketahanan keluarga
        b. Peningkatan kesetaraan gender
        c. Perwujudan masyarakat inklusif
    (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
        a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
        b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
        c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
        d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
    (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
        a. Kemandirian pangan
        b. Peningkatan ketahanan air nasional
        c. Ketahanan energi
    (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
        a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
        b. Pembangunan berketahanan iklim.

Beberapa arah kebijakan pada rancangan RKP Tahun 2025 yang menjadi dasar perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai penekanan tema RKP Tahun 2025 :
    - Peningkata partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualtas. Dispora melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa Perguruan Tinggi Negeri bagi Mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, sesuai kebijakan pada Perwali Nomor 188/306/HK/410.020.3/2023 tentang Penerimaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Tahun Ajaran 2023-2024.
    - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa. Dispora melaksanakan kegiatan pembinaan imtaq dan pencegahan penyalahgunaan Narkotiaka dan obat-obatan terlarang
    - Peningakatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat. Dispora melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
2. Sesuai agenda pembangunan :
    - Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja. Dispora melaksanakan peningkatan produktivitas, daya saing

dan kamampuan kerja bagi pemuda melaui kegiatan pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas pemuda melalui pemuda pelopor, pemuda keren, dan program kepramukaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar. Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah Misi yang ke 2, yaitu : "**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter"**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam kurun waktu 2021 – 2026 menetapkan tujuan yaitu *Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan* dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah dengan target 0,87% pada tahun 2025.
2. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dengan target 3,95% pada tahun 2025.
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A (84,86) pada tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, dalam rentang waktu dari tahun 2021 – 2026 telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah dengan indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan target pada target pada tahun 2025 adalah 51,80 %.
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator Persentase Prestasi Olahraga dan target pada tahun 2025 adalah 77 %.
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A (84,86) pada tahun 2025

Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dijabarkan pada *tabel 3.1* berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Persentase Partisipasi Pemuda dlm Organisasi Kepemudaan th } N - \text{th } N-1}{\text{Persentase Partisipasi Pemuda dlm Organisasi Kepemudaan th } N-1} \times 100\%$	0,74%	0,97%	0,88%	0,89%	0,89%
		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional	$\frac{\%\ \text{atlit yg berprestasi Th } N - \text{th } N-1}{\%\ \text{atlit yg berprestasi th } N-1} \times 100\%$	10,68%	12,5%	3,16%	4,05%	1,30%
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100$	50,9%	51,05%	51,50%	51,96%	52,42%
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada Tahun N	-	-	59,67	60,65	61,25
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Atlit yang berprestasi}}{\text{Jumlah atlit delegasi}} \times 100$	72%	71,73%	74%	77%	78%
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan Evaluasi / Penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (84,20)	A (84,84)	A (85,9)	A (86,5)	A (87)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan Evaluasi / Penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (84,20)	A (84,84)	A (85,9)	A (86,5)	A (87)

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja Dispora Tahun 2025 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan progra dan kegiatan ditetapkan dengan mempertibangkan beebrapa hal, yaitu :

1. Mendukung pencapaian visi dan misis Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu misi ke 2 : “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Keren Sehat Dan Berdaya Saing”.;
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4. Tindaklanjut LKJiP Tahun 2023; dan
5. Pencapaian program prioritas daerah dan perangkat daerah

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dispora Kota Blitar pada Renja Tahun 2025 adalah 4 program 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.280.230.458,00 dengan sumber dana dari Pendapatan Bagi hasil.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dispora tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	Mendukung pencapaian IKU
						Persentase Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda	
2	19	02	2.01		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepeminpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	Tematik Kemiskinan dengan pemberian beasiswa
2	19	02	2.01	0011	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Mendukung pencapaian IKU
2	19	02	2.01	0013	Sub Kegiatan Koordinas Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Mendukung pencapaian IKU
2	19	02	2.01	0014	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yayng haknya terpenuhi	Tematik Kemiskinan dengan pemberian beasiswa
2	19	02	2.01	0016	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Mendukung pencapaian IKU
2	19	02	2.02		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Hibah Untuk AKN dan IPPNU
2	19	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan	Jumlah organisasi kepemudan yangg difasilitasi dalam pengembangan	Hibah Untuk AKN dan IPPNU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
					organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Mendukung pencapaian IKU
2	19	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina	Mendukung pencapaian IKU
2	19	04	2.01	0003	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Mendukung pencapaian IKU
2	19	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Prioritas Daerah
						Cakupan pelatih yang tersertifikasi	
						Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	
2	19	03	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	Prioritas Daerah, Pokir dan DSP Kecamatan
2	19	03	2.01	0005	Sub Kegitan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten /kota yang tersedia	Prioritas Daerah, Pokir dan DSP Kecamatan
2	19	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.02	0006	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan tingkat kabupaten/kota	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.03	0007	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.03	0008	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.04		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	Hibah untuk KONI, NPCI
2	19	03	2.04	0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/Kota	Hibah untuk KONI, NPCI, KORMI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2	19	03	2.05		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	Mendukung pencapaian IKU
2	19	03	2.05	0010	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Mendukung pencapaian IKU
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian IKU
2	19	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Rutin dan Tupoksi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2	19	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rutin dan Tupoksi
2	19	01	2.09	0006	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Rutin dan Tupoksi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Blitar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas Tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di BAB sebelumnya. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut dibutuhkan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas yaitu Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Ketrampilan dan Keahlian Pemuda dan Atlit.

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan Dinas. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana kerja berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024, sebagai penjabaran prioritas RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026.

Dalam menjalankan rencana program dan kegiatan, Perangkat Daerah diberikan pagu indikatif program. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD). Rencana Kerja berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan seluruh Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksana dari Program Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah Percepatan pencapaian Visi dan Misi Walikota Blitar sebagaimana tema pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026.

Dari Strategi dan Kebijakan yang ada, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan menguraikan dalam 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 15.455.230.442,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
   - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
   a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupatean / Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota.
      - Sub Kegiatan Koordinas Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
      - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
   b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabiupaten / Kota
      - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendididkan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
   - Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Keolahragaan (Sport Science)

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
   - Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
      - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
      - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Kegiatan prioritas daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang menjadi prioritas perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Dispora Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Blitar Cerdas	Pemuda Keren	Pemilihan Duta Pemuda Keren	● Program Pengembangan Kapasitasa Daya Saing Kepemudaan ● Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota ● Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
		Beasiswa bagi siswa pada keluarga berpenghasilan rendah tingkat Perguruan Tinggi dan	Pemberian Beasiswa PTN bagi Mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	● Program Pengembangan Kapasitasa Daya Saing Kepemudaan ● Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota,

		Sekolah Menengah Atas		Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota ● Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
		Penyediaan sarana prasarana pemuda (co working space di kelurahan)	Pemberian fasilitas penunjang pemuda di kelurahan	● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ● Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab./Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab./Kota ● Sub Kegitan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
		Pembangunan sirkuit BMX	Pembangunan Lanjutan Sirkuit BMX	● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ● Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota ● Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Selain itu, penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Kerja Dispora Kota Blitar Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Mengoptimalkan keberadaan pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan sangat diperlukan yaitu Pemuda yang Berkarakter, Maju dan Mandiri.	● Verivikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI ● Penguatan kelembagaan komunitas ● Penguatan Peran KNPI	● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. ● Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota
2.	Mengoptimalkan Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga	● Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding	● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal.	• Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah • Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas • Melakukan Sosialisasi secara masif • Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi	• Kegiatan Pembinaan dan Pengembagnan Olahraga Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah kab/Kota • Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahrga Kab/Kota

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 4.3 berikut :

Tabel. 4.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA BLITAR

NAMA OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85,5 Indeks	4.827.009.479				85,5 Indeks	6.010.014.956	
2.19.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart		100%	65.429.700				100%	145.121.100	
2.19.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	11 Dokumen	2.216.500	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	11 Dokumen	1.500.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	10 Laporan	63.213.200	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	10 Laporan	143.621.100	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart		100%	2.545.046.179				100%	3.113.959.608	
2.19.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	20 orang	2543.494.179	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	20 orang	3.112.459.608	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	5 laporan	1.552.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	5 laporan	1.500.000	Pendapatan Bagi Hasil

		Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD									
2.19.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart		100%	87.419.900				100%	92.533.180	
2.19.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	3 Paket	30.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	3 Paket	40.000.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Blitar	25 orang	57.419.900	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	25 orang	52.533.180	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart		100%	369.327.700				100%	430.083.990	
2.19.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	1 paket	5.790.600	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	1 paket	6.034.350	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Blitar	4 paket	28.208.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	4 paket	28.878.255	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kota Blitar	5 paket	52.361.100	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	5 paket	60.376.575	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Blitar	8 paket	52.326.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	8 paket	53.279.100	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	1 paket	25.057.200	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	1 paket	26.267.010	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Blitar	12 dokumen	2.700.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	12 dokumen	2.835.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Blitar	24 laporan	202.884.800	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	24 laporan	252.413.700	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100%	36.398.400				100%	133.658.070	

2.19.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar	6 unit	36.398.400	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	6 unit	133.658.070	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart		100%	1.617.665.600				100%	1.778.024.273	
2.19.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Blitar	36 laporan	52.567.600	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	36 laporan	56.700.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Blitar	60 laporan	1.565.098.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	60 laporan	1.721.324.273	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart		100%	105.722.000				100%	316.634.735	
2.19.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Blitar	10 unit	78.584.500	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	10 unit	82.509.735	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.01.2.09.0006	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Blitar	53 unit	27.137.500	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	530unit	34.125.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif		83%	3.135.177.400				83%	2.932.040.811	
		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		6,88%					6,88%		
2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemudan Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepeminpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda		1575 orang	3.047.668.300				1625 orang	2.665.017.810	
2.19.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Kota Blitar	50 orang	20.161.300	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	50 orang	19.863.060	Pendapatan Bagi Hasil

2.19.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Blitar	5 kegiatan	497.781.600	Pendaapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	5 kegiatan	293.154.750	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Kota Blitar	255 orang	2.364.726.400	Pendaapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	255 orang	2.336.250.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kota Blitar	1 unit	164.999.000	Pendaapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	1 unit	15.750.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan		80%	87.509.100				80%	267.023.001	
2.19.02.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudan yangg difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kota Blitar	100 orang	87.509.100	Pendaapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	100 orang	267.023.001	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda		42%	6.939.377.079				42 %	9.460.226.325	
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi		70%					70 %		
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar		73%					73 %		
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan		22 Cabor	2.669.212.679				22 Cabor	3.000.000.000	
2.19.03.2.01.0005	Sub Kegitan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten /kota yang tersedia	Kota Blitar	10 unit	2.669.212.679	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	10 unit	3.000.000.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah		4 kejuaraan	402.224.000				4 kejuaraan	575.799.420	
2.19.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	6 kegiatan	255.365.200	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	6 kegiatan	259.433.370	Pendapatan Bagi Hasil

2.19.03.2.02.0006	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan tingkat kabupaten/kota	Kota Blitar	50 orang	146.858.800	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	50 orang	316.366.050	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		4 jenis	315.170.400				4 jenis	1.168.984.530	
2.19.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kota Blitar	140 orang	288.865.300	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	140 orang	1.132.234.530	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.03.2.03.0008	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kota Blitar	2 Pelatda	26.305.100	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	20Pelatda	36.750.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina		100%	3.175.000.000				100%	4.291.350.000	
2.19.03.2.04.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	3 dokumen	3.175.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	3 dokumen	4.291.350.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi		50%	377.770.000				50%	424.092.375	
2.19.03.2.05.0010	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Blitar	1 lembaga	377.770.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	1 dokumen	424.092.375	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif		73%	378.666.500				73 %	380.099.825	
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina		73%	378.666.500				73 %	380.099.825	
2.19.04.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Blitar	1 organisasi	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	1 organisasi	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil
2.19.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Blitar	50 orang	28.666.5000	Pendapatan Bagi Hasil		Kota Blitar	50 orang	30.099.825	Pendapatan Bagi Hasil
	J U M L A H				15.455.230.458	J U M L A H				18.782.381.917	

BAB V
PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025, penyelenggaraan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting

1. Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Renja Dispora Tahun 2025 disusun mengacu pada rancangan awal RKP Tahun 2025, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Dispora Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar Tahun 2025
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Dispora Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 berdasarkan peran sertanya dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dispora Tahun 2025 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
5. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dispora Tahun 2025 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap Renja Dispora juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap renja ini.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini, diharapkan seluruh Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

3. Rencana Kerja ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.
4. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2025 ini akan dapat terwujud jika seluruh Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025.

16. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Blitar.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip–prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan dalam

rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Perpustakaan Nasional / Arsip Nasional Republik Indonesia) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Perpusnas, Renja ANRI dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Uundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7) ;

24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Merupakan pedoman pelaksanaaan pelayanan Perangkat Daerah;
- Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025;
- Sebagai pedoman penyusunan KUA/PPAS Tahun 2025;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, menguraikan mengenai telaahan terhadap arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang diambil dari Renstra/Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menguraikan tentang rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2026.

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, serta rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Blitar tahun lalu (tahun 2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2023, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
   a. Realisasi program melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83,24 dari target sebesar 81 karena berasal dari rata-rata hasil SKM layanan perpustakaan dan SKM layanan kearsipan.
   b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
   c. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan mencakup semua sub kegiatan di dalam program ini sebesar 100%.
   d. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
   e. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
      Meskipun kinerja seluruh kegiatan tercapai 100%, namun masih harus tetap memperhatikan target dan capaian sub kegiatan di dalamnya sehingga tidak ada pencapaian kurang dari 100%.
   f. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah :
      Dari 6 kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh targetnya tercapai 100%. Hanya ada 1 sub kegiatan yang capaiannya melebihi target yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Terdapat 2 sub kegiatan yang capaiannya kurang dari target yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Meskipun ada sub kegiatan yang melebihi dan kurang dari target, akan tetapi kelebihan/kekurangan realisasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi dan indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100%.

g. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut :
Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program pelayanan perkantoran, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

2. Program Pembinaan Perpustakaan
   a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
      1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
         a) Sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
         b) Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
   b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
      1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
         a) Sub kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
         b) Sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
         c) Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
         d) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
      2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
         a) Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
         b) Sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
      1. Program Pembinaan Perpustakaan memiliki 2 indikator kinerja yang realisasi keduanya melebihi target.
      2. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan didalamnya yang memiliki realisasi melebihi target yaitu :
         a) Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
   d. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi tidak tercapai pada aktivitas Perencanaan pembangunan penunjang gedung perpustakaan.
- Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca tidak memenuhi target karena kurang cermatnya pada saat penyusunan target pemenang lomba.
- Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka melebihi target karena terdapat penyesuaian terhadap jumlah judul dan jumlah eksemplar yang disediakan.

e. Sub Kegiatan Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah :

Capaian program pada Program Pembinaan Perpustakaan memiliki 2 indikator yaitu :

- Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 82,8 dari target sebesar 81,5.
- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 3,3 : 1 dari target sebesar 3,3 : 1.

Program Pembinaan Perpustakaan memiliki 2 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 1,18% dari target sebesar 0,3%.
- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Peningkatan Pemustaka telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 149,98% dari target sebesar 57%.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut :

1. Mengusulkan pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan melalui DAK Perpustakaan untuk mempermudah akses layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
2. Menambah sarana prasarana layanan perpustakaan berupa perabot dan TIK perpustakaan.
3. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
4. Meningkatkan promosi layanan perpustakaan melalui medsos.
5. Mengembangkan perpustakaan kelurahan dalam rangka percepatan transformasi literasi berbasis inklusi sosial pada masyarakat.
6. Meningkatkan jumlah dan keberagaman koleksi bahan pustaka.

3. Program Pengelolaan Arsip

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah semua indikator kegiatan dan sub kegiatan.
c. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pengelolaan Arsip.
d. Faktor–faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Seluruh sub kegiatan pada Program Pengelolaan Arsip terealisasi sesuai target yang ditentukan. Seluruh capaian kinerja dalam rangka pemenuhan terhadap target IKU OPD urusan Kearsipan, dimana jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian harus tercapai 100.000 lembar selama 5 tahun atau 20.000 lembar setiap tahun pada periode Renstra tahun 2022-2026.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah :
   Capaian program pada Program Pengelolaan Arsip memiliki 1 indikator yaitu Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 83,67 dari target sebesar 81.
   Program Pengelolaan Arsip memiliki 2 kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.
   - Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 20% dari target sebesar 20%.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut adalah cermat dalam penentuan target program/kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan periodisasi Renstra antara tahun 2022 dan 2023. Capaian kinerja Renja Tahun 2022 tidak disajikan dalam tabel karena terdapat perbedaan indicator kinerja sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap capaian target indikator tahun 2022 dan tahun 2023. Selain itu, dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan maupun sub kegiatan sehingga berbeda dengan tahun 2023.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode Renstra tahun 2021-2026, sehingga capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan adalah perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan 2024.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Program Pembinaan Perpustakaan ;
3. Program Pengelolaan Arsip.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2024
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
						Tujuan: Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A) Nilai	85,56 (A) Nilai	84 (A) Nilai	86,14 (A) Nilai	102,55 %	86 (A) Nilai	86 (A) Nilai	100%
						Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A) Nilai	85,56 (A) Nilai	84 (A) Nilai	86,14 (A) Nilai	102,55 %	86 (A) Nilai	86 (A) Nilai	100%
2	23	1				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (85,5) Indeks	Baik (81,13) Indeks	Baik (81,3) Indeks	Baik (83,24) Indeks	102,60 %	Baik (83,5) Indeks	Baik (83,5) Indeks	97,66 %
2	23	1	2	1		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	2	1	1	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00 %	7 Dokumen	14 Dokumen	50,00 %
2	23	1	2	1	6	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan	-	8 Laporan	8 Laporan	100,00 %	8 Laporan	19 Laporan	50,00 %
2	23	1	2	2		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %
2	23	1	2	2	1	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	-	31Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	100,00 %	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	50,00 %
2	23	1	2	2	7	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	100,00 %	7 Laporan	14 Laporan	50,00 %
2	23	1	2	5		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	2	5	2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	12 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100,00 %	3 Paket	6 Paket	50,00 %
2	23	1	2	5	10	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	-	43 orang	43 orang	100,00 %	43 orang	43 orang	50,00 %
2	23	1	2	6		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %
2	23	1	2	6	1	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	2 Paket	50,00 %
2	23	1	2	6	2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100,00 %	3 Paket	6 Paket	50,00 %
2	23	1	2	6	3	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	-	8 Paket	8 Paket	100,00 %	8 Paket	16 Paket	50,00 %
2	23	1	2	6	4	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	-	25 Paket	28 Paket	112,00 %	25 Paket	50 Paket	50,00 %
2	23	1	2	6	5	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	2 Paket	50,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	2	6	6	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	12 Dokumen	24 Dokumen	50,00 %
2	23	1	2	6	9	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169 Laporan	-	43 Laporan	53 Laporan	123,26 %	42 Laporan	95 Laporan	56,21 %
2	23	1	2	7		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %
2	23	1	2	7	5	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	181 Unit	-	167 Unit	168 Unit	100,60 %	10 Unit	178 Unit	98,34 %
2	23	1	2	7	6	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	-	24 Unit	27 Unit	112,50 %	5 Unit	5 Unit	82,05 %
2	23	1	2	7	11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	25,00 %
2	23	1	2	8		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %
2	23	1	2	8	2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	-	84 Laporan	36 Laporan	42,86 %	36 Laporan	36 Laporan	50,00 %
2	23	1	2	8	4	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	52 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	100,00 %	13 Laporan	26 Laporan	50,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pelayanan Umum Kantor	Kantor yang Disediakan								
2	23	1	2	9		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %
2	23	1	2	9	2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	-	11 Unit	11 Unit	100,00 %	9 Unit	9 Unit	50,00 %
2	23	1	2	9	5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	2 Unit	50,00 %
2	23	1	2	9	6	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	-	37 Unit	40 Unit	108,11 %	37 Unit	37 Unit	50,00 %
2	23	1	2	9	9	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	1 Unit	50,00 %
2	23	1	2	9	11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	-	26 Unit	26 Unit	100,00 %	26 Unit	26 Unit	50,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23					URUSAN PERPUSTAKAAN									
						Tujuan: Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	53 Angka	47,49 Angka	48 Angka	51,43 Angka	107,15 %	52 Angka	52 Angka	98,11 %
						Sasaran: Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	43 Indeks	11,37 Indeks	6,6 Indeks	41,54 Indeks	629,39 %	42 Indeks	42 Indeks	97,67 %
2	23	2				Program : Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	85 Indeks	81,55 Indeks	81,5 Indeks	82,80 Indeks	101,60 %	83 Indeks	83 Indeks	97,65 %
							Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,5 : 1 Rasio	3,7 : 1 Rasio	3,3 : 1 Rasio	3,33 : 1 Rasio	100,91 %	3,4 : 1 Rasio	3,4 : 1 Rasio	100%
2	23	2	2	1		Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1,06%	1,06%	0,30%	1,06%	353,33 %	1,06%	1,06%	100%
2	23	2	2	1	1	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	1 Layanan	-	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	100,00 %
2	23	2	2	1	2	Sub Kegiatan : Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/	1 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100,00 %	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Kota Sesuai Kewenangannya								
2	23	2	2	1	3	Sub Kegiatan: Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12 Eksemplar	-	3 Eksemplar	5 Eksemplar	166,67 %	3 Eksemplar	8 Eksemplar	66,67 %
2	23	2	2	1	4	Sub Kegiatan: Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98 Perpustakaan	-	98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	100,00 %	98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	50,00 %
2	23	2	2	1	6	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98 orang	-	98 orang	98 orang	100,00 %	98 orang	98 orang	50,00 %
2	23	2	2	1	9	Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3640 Eksemplar	-	910 Eksemplar	776 Eksemplar	85,27 %	910 Eksemplar	1.686 Eksemplar	46,32 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	2	2	1	10	Sub Kegiatan: Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	7 Dokumen	46,67 %
2	23	2	2	2		Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	72%	117%	57%	149,98%	263,12 %	67%	67%	93,05 %
2	23	2	2	2	1	Sub Kegiatan: Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	125 lokus	-	122 lokus	122 lokus	100,00 %	125 lokus	125 lokus	100%
2	23	2	2	2	2	Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	-	-	-		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100,00 %
2	23	2	2	2	3	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	170 orang	-	20 orang	19 orang	95,00 %	50 orang	69 orang	40,59 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	2	2	2	4	Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	-	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100,00 %	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50%
2	23	2	2	2	5	Sub Kegiatan : Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 orang	-	-	-		1 orang	1 orang	33,33 %
2	24					URUSAN KEARSIPAN									
						Tujuan : Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	85 Indeks	80,17 Indeks	80,18 Indeks	84,75 Indeks	105,69 %	84,85 Indeks	84,85 Indeks	99,82 %
						Sasaran : Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100% (100.000 lembar)	100% (20.000 lembar)	100% (20.000 lembar)	100,25% (20.049 lembar)	100,25 %	100% (20.000 lembar)	100% (60.049 lembar)	60,05 %
							Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	90%	-	-	-		88%	88%	97,78 %
2	24	2				Program : Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	86 Indeks	80,71 Indeks	81 Indeks	83,67 Indeks	103,30 %	84 Indeks	84 Indeks	97,67 %
2	24	2	2	1		Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	50,00 %
2	24	2	2	1	2	Sub Kegiatan: Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	18000 Berkas	-	4500 Berkas	4500 Berkas	100,00 %	4500 Berkas	9.000 Berkas	50,00 %

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	24	2	2	1	3	Sub Kegiatan: Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	119 Laporan	-	29 Laporan	29 Laporan	100,00 %	30 Laporan	59 Laporan	54,21 %
2	24	2	2	3		Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	80%	20%	20%	20%	100,00 %	20%	40%	50,00 %
2	24	2	2	3	1	Sub Kegiatan: Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	600 Pengguna	-	150 Pengguna	150 Pengguna	100,00 %	150 Pengguna	300 Pengguna	50,00 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator–indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Blitar

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	URUSAN PERPUSTAKAAN												
1.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	IKU, IKK	47	48	52	52,5	53	47,49	51,43	52	52	52	Realisasi tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dan 2026 tercapai sesuai target tahun 2024
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IKK	6,5	6,6	42	42,5	43	11,37	41,54	42	42	42	Realisasi tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dan 2026 tercapai sesuai target tahun 2024
3.	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	IKK	0,3	0,3	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	Realisasi tahun 2024 dan tahun 2025, 2026 diproyeksikan sama dengan realisasi tahun 2023
4.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	IKK	1 : 962,2	1 : 962,2	1 : 1210	1 : 1210	1 : 1210	1 : 1101	1 : 1210	1 : 1210	1 : 1210	1 : 1210	Tercapai
5.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	IKK	3,2 : 1	3,3 : 1	3,4 : 1	3,5 : 1	3,6: 1	3,7 : 1	3,3 : 1	3,4 : 1	3,4 : 1	3,4 : 1	Realisasi tahun 2024 dan tahun 2025, 2026 diproyeksikan sama dengan target tahun

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													2024
6.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	IKK	0	1	64,65	64,65	64,65	62,24	64,65	64,65	64,65	64,65	Tercapai
II.	URUSAN KEARSIPAN												
1.	Indeks Kearsipan	Indikator Tujuan bukan IKU	35	80,18	84,85	84,95	85	80,17	84,75	84,85	84,85	84,85	Realisasi tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dan 2026 tercapai sesuai target tahun 2024
2.	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,25%	100%	100%	100%	Tercapai
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	IKK	58,8	59	88	89	90	62,5	87,5	88	88	88	Realisasi tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dan 2026 tercapai sesuai target tahun 2024. Adapun target mulai tahun 2024 dinaikkan karena realisasi tahun 2023 sebesar 87,5
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan	IKK	33,8	34	86	86,5	87	33,8	85,8	86	86	86	Realisasi tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dan 2026 tercapai sesuai target tahun 2024. Adapun target mulai tahun

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	rakyat												2024 dinaikkan karena realisasi tahun 2023 sebesar 85,8

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Perpustakaan pada Renstra tahun 2021-2026.
   Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca dilakukan melalui survey terhadap masyarakat Kota Blitar dan merupakan upaya memonitor kondisi tingkat gemar membaca masyarakat dan mendapatkan gambaran kondisi tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar setiap tahun sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan daerah dan strategi pengembangan kegemaran membaca serta sejauhmana kontribusi masyarakat untuk menumbuhkembangkan budaya baca. Nilai dari Tingkat Kegemaran Membaca tahun 2024 belum dapat disajikan karena pelaksanaan survei dilaksanakan pada tribulan IV.
   Target tahun 2024 dinaikkan dari semula sebesar 48,5 menjadi 52 serta naik menjadi 52,5 pada tahun 2025 dan naik menjadi 53 pada akhir periode Renstra tahun 2026. Kenaikan target ini berdasarkan realisasi Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 sebesar 51,43 (kategori Sedang) dari target tahun 2023 sebesar 48. Pada saat penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026, target awal Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2022 ditetapkan sebesar 47 dengan membandingkan terhadap realisasi Tingkat Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI tahun 2021 sebesar 59,52 (kategori Sedang).
2. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang merupakan indikator sasaran Renstra masih menunggu survei dan penghitungan pada tribulan IV tahun 2024. Target tahun 2024 dinaikkan dari semula 6,7 menjadi 42 serta naik menjadi 42,5 pada tahun 2025 dan 43 pada tahun 2026. Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 sebesar 41,54 (skor Rendah) dari target sebesar 6,6.
   Pada saat penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026, target awal Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2022 ditetapkan sebesar 6,5 dengan membandingkan terhadap realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional RI tahun 2021 sebesar 13,54 (skor Sangat Rendah).
3. Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perpustakaan tahun 2024 masih diproyeksi hasilnya sama dengan realisasi tahun 2023 atau sama dengan target tahun 2024. Sesuai dengan jadwal penghitungan dilaksanakan pada tribulan IV karena sebagian hitungan merupakan perbandingan dengan jumlah penduduk sehingga menunggu rilis jumlah penduduk semester 2 tahun 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Berbagai kegiatan memperkenalkan bahan-bahan pustaka yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar pada tahun 2024 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi dan berkelanjutan antara lain:

a. Penambahan sarana prasarana layanan perpustakaan : pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Blitar beserta pengadaan perabot dan TIK yang bersumber dari DAK Perpustakaan Tahun 2024 dan menjadi salah satu Proyek Strategis Pemerintah Kota Blitar tahun 2024.

b. Layanan teknis : pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
c. Layanan di tempat : layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis mBlitar), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
d. Layanan ekstensi : LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
e. Layanan online : keanggotaan online, katalog online, e-book, layanan PETA (Pesan Antar), Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
   Adanya inovasi webinar kepenulisan untuk masyarakat umum berseri yaitu KEMAS BLITAR (KEpenulisan online untuk MASyarakat Kota Blitar) mulai tahun 2024 yang menghadirkan narasumber dari berbagai genre kepenulisan
f. Pengembangan gemar membaca : Wisata Buku untuk siswa TK/RA dan SD/MI, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, bedah buku local content, Bimbingan Pemustaka SMP/MTs, Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi), Workshop dan Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi kepenulisan tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Local Content dan Penerbitan Naskah Local Content.
   Adanya inovasi Kelurahan Bercerita Sebaek Paras Elok (SEjarah BudayA EKonomi PARiwiSata kEarifan LOKal) yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 dan menjadi agenda event Kota Blitar.
g. Pembinaan Perpustakaan : monev perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan sekolah, sosialisasi kepustakawanan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, pendataan perpustakaan binaan, pembinaan perpustakaan kelurahan.
h. Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial : sebagai upaya memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan, dilaksanakan Launching Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi yang merupakan program prioritas nasional oleh Walikota Blitar bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tanggal 29 Mei 2023.
   Adanya penunjukan 7 (tujuh) Perpustakaan Kelurahan oleh Perpustakaan Nasional untuk pelaksanaan replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2024 yaitu Perpustakaan Kelurahan Perpustakaan Kelurahan Bendo, Gedog, Karangsari, Tlumpu, Karangtengah, Kepanjenlor, dan Plosokerep sehingga total ada 10 Perpustakaan Kelurahan yang melakukan replikasi kegiatan Transformasi Perpustakaan (tahun 2023 ditunjuk Perpustakaan Kelurahan Rembang, Pakunden dan Kauman).

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter).

4. Berdasarkan realisasi tahun 2023, maka target Indeks Kearsipan tahun 2024 yang merupakan Tujuan Renstra dinaikkan dari semula sebesar 45 menjadi 84,85 serta naik menjadi 84,95 pada tahun 2025 dan 85 pada tahun 2026. Realisasi Indeks Kearsipan Pemerintah Kota Blitar tahun 2022 sebesar 80,17 dan target tahun 2023 sebesar 40. Berdasarkan realisasi tahun 2022, target Indeks Kearsipan pada P-RKPD Tahun 2023 dinaikkan menjadi 80,18 dan terealisasi sebesar 84,75 (kategori A — Memuaskan).
   Pada saat penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026, target awal Indeks Kearsipan tahun 2022 ditetapkan sebesar 35 karena hasil pengawasan kearsipan Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 sebesar 35 (kategori Cukup).
5. Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun 2021-2026 dengan target arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (5 tahun) sebanyak 100.000 lembar dan target setiap tahun sebesar 100% (20.000 lembar)
   Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Kearsipan mulai periode Renstra tahun 2021-2026.
   Adapun hal-hal yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian arsip daerah antara lain:
   a. Melaksanakan kegiatan berkelanjutan antara lain alih media (Ijazah, buku induk sekolah, personal file ASN, dokumen asset daerah), fumigasi, termit control, pengolahan dan penataan arsip.
   b. Intensifikasi sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kearsipan serta penyediaan/penerbitan regulasi dan pedoman standarisasi teknis yang mewajibkan penyediaan *Record Centre* dan *Central File* pada setiap OPD.
   c. Intensifikasi koordinasi lintas sektoral guna penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional Arsiparis baik melalui Inpassing, Diklat/Bimtek untuk Arsiparis.
   d. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi otomasi (sejalan dengan di terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dimana kearsipan merupakan salah satu unsur layanan adminstrasi pemerintah berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi) dengan mengupayakan penyusunan dan pengembangan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) serta peningkatan pemberdayaan PNS melalui basic keilmuan teknologi informasi.
   e. Penguatan sumber daya internal berupa peningkatan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap pimpinan dan pengambil kebijakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah.

Guna pencapaian kinerja pelayanan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupaya untuk :

1. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
2. Meningkatkan kualitas layanan kearsipan daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan sebagai pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.

Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung informasi yang sejatinya merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa. Dalam hal ini, bidang kearsipan dapat berperan secara nyata dalam memperkokoh ketahanan budaya melalui penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip guna mendukung pembangunan karakter bangsa dan kearsipan yang berkelanjutan untuk masa depan terbaik.

Penyelenggaraan kearsipan dapat memberikan sumbangsih pada terwujudnya birokrasi yang yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik yang prima melalui penyediaan dan pemanfaatan arsip terintegrasi dalam kerangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan dengan kinerja Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 masih dalam kategori SEDANG sehingga masih diperlukan strategi dan kebijakan agar meningkat pada tahun berikutnya.
2. Urusan Kearsipan dengan kinerja Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kearsipan tahun 2023 sudah pada kategori MEMUASKAN, namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan :
   a. Belum ada perumusan dan implementasi regulasi daerah terkait perpustakaan yang diperlukan guna mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca agar terjalinnya kerjasama yang baik di antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Perangkat Daerah se Kota Blitar dalam rangka menumbuh-kembangkan kegemaran membaca dan budaya baca.
   b. Belum optimalnya fasilitas dan pelayanan perpustakaan serta belum terintegrasinya kegiatan pengelolaan perpustakaan sehingga mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan.
   c. Kurangnya koleksi buku perpustakaan sedangkan jangkauan layanan perpustakaan semakin luas dan meningkat melalui layanan Mobil Perpustakaan Keliling maupun layanan perpustakaan di luar jam kerja.
   d. Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah terakreditasi B dan masih diperlukan adanya

kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan agar memenuhi Standart Nasional Perpustakaan.

2. Urusan Kearsipan :
   a. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah meskipun telah diupayakan Preservasi Arsip melalui alih media arsip (digitalisasi), pengolahan dan penataan arsip, restorasi (perbaikan kerusakan pada arsip), fumigasi dan termit control arsip serta upaya-upaya yang lain, namun perlindungan dan penyelamatan arsip daerah masih tetap perlu dioptimalkan.
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan arsip daerah berbasis teknologi informasi.
   c. Belum optimalnya pengawasan kearsipan sehingga tetap diperlukan asistensi dan pembinaan kearsipan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya sebagai berikut:

Tabel 2.3.
ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS
Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Belum optimalnya kegemaran membaca masyarakat
		Belum optimalnya akses layanan perpustakaan. Akses layanan perpustakaan ini meliputi belum optimalnya layanan perpustakaan berbasis digital, belum meratanya jangkauan layanan mobil perpustakaan keliling, kurangnya promosi layanan perpustakaan, perlunya penambahan sarana prasarana layanan sesuai standar perpustakaan.
		Belum optimalnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi social
		Belum tercukupinya koleksi perpustakaan
Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Belum optimalnya tata kearsipan pemerintahan daerah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan kearsipan berbasis teknologi informasi
		Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah
		Kurangnya komitmen dan kesadaran terhadap kearsipan

Selain hal tersebut, telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dengan para pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemustaka dan pengguna layanan arsip melalui layanan perpustakaan dan layanan kearsipan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
   a. Belum ada perumusan dan implementasi regulasi daerah terkait perpustakaan yang diperlukan guna mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca agar terjalinnya kerjasama yang baik di antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Perangkat Daerah se Kota Blitar dalam rangka menumbuh-kembangkan kegemaran membaca dan budaya baca.
   b. Belum optimalnya fasilitas dan pelayanan perpustakaan serta belum terintegrasinya kegiatan pengelolaan perpustakaan sehingga mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan.
   c. Kurangnya koleksi buku perpustakaan sedangkan jangkauan layanan perpustakaan semakin luas dan meningkat melalui layanan Mobil Perpustakaan Keliling maupun layanan perpustakaan di luar jam kerja.
   d. Perpustakaan Umum yang berada di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah terakreditasi B namun masih diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan agar memenuhi Standart Nasional Perpustakaan.
   e. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah meskipun telah diupayakan Preservasi Arsip melalui alih media arsip (digitalisasi), pengolahan dan penataan arsip, restorasi (perbaikan kerusakan pada arsip), fumigasi dan termit control arsip serta upaya-upaya yang lain, namun perlindungan dan penyelamatan arsip daerah masih tetap perlu dioptimalkan.
   f. Belum optimalnya kualitas pelayanan arsip daerah berbasis teknologi informasi.
   g. Belum optimalnya pengawasan kearsipan sehingga tetap diperlukan asistensi dan pembinaan kearsipan Perangkat Daerah.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kualitas pengelolaan arsip :
   a. Tantangan

      Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;
   b. Peluang

      Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Dengan demikian peluang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :
      1) Program Blitar Cerdas.

         Program Blitar Cerdas antara lain termasuk untuk penguatan kegemaran membaca dan literasi melalui perpustakaan keliling dan pojok baca. Selain itu juga adanya peningkatan akses dan sarana prasarana perpustakaan.
      2) Pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Aspek teknologi informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka layanan perpustakaan dan layanan kearsipan juga memanfaatkan teknologi informasi seperti Layada (Layanan Anak Dalam Jaringan), katalog online, e-book, Tali Pustaka (Data Literasi Perpustakaan Kota Blitar), Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), dan JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional).

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah :

A. Urusan Perpustakaan :
   1. Optimalisasi kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
   2. Optimalisasi akses layanan perpustakaan meliputi layanan perpustakaan berbasis digital, keterjangkauan layanan mobil perpustakaan keliling, promosi layanan perpustakaan, dan penambahan sarana prasarana layanan sesuai standar perpustakaan.
   3. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui pembinaan dan pengembangan perpustakaan kelurahan.
   4. Ketercukupan koleksi perpustakaan.

B. Urusan Kearsipan :
   1. Optimalisasi tata kearsipan pemerintahan daerah melalui kegiatan pengelolaan kearsipan.
   2. Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan berbasis teknologi informasi.
   3. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah.
   4. Peningkatan apresiasi, komitmen dan kesadaran terhadap kearsipan dari para pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan asistensi kearsipan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, tema pembangunan Kota Blitar tahun 2025 adalah ”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Tema pembangunan tahun 2025 tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Urusan Perpustakaan mendukung prioritas pembangunan ke-3, yaitu Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Urusan Kearsipan mendukung prioritas pembangunan ke-2, yaitu Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi.

Adapun program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan :
   Program Pembinaan Perpustakaan pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan aktivitas yaitu :
      - Bimbingan Pemustaka dan Literasi Digital bagi SMP/MTs
   b. Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan aktivitas yaitu :
      - Pembuatan Minuman dan Pemasaran Online
      - Pembuatan Hampers dan Pemasaran Online
2. Urusan Kearsipan :
   Program Pengelolaan Arsip pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan aktivitas yaitu :
      - Preservasi arsip melalui alih media

Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025 dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025. Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6.948.533.526,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6.843.517.389,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.948.533.526,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.843.517.389,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.457.663.326,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.458.304.489,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5 Indeks	5.365.253.341,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5 Indeks	5.554.781.789,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	15.792.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	43.205.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.606.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	29.134.000,00	Penambahan Penyusunan SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	12.186.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	14.071.400,00	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.954.655.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	4.283.399.074,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	3.953.529.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	3.731.990.574,00	Proyeksi kenaikan gaji dan penyesuaian tunjangan fungsional hasil penyetaraan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	1.126.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	1.408.500,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	123.247.706,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	102.870.503,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	61.965.206,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	44.629.600,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	61.282.500,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	58.240.903,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	367.512.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	361.806.600,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.484.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.750.000,00	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.217.900,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.217.400,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	30.991.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	38.709.200,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	60.540.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	51.670.000,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.047.800,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.094.000,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.100.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.100.000,00	Tidak ada perubahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	236.130.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	235.266.000,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	81.465.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	73.490.600,00	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.480.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	22.778.400,00	Penambahan target aktivitas

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	50.985.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35.600.800,00	Penyesuaian kebutuhan belanja dan pagu OPD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15.111.400,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	510.184.795,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	505.475.312,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	140.287.795,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	101.959.142,00	Pembayaran listrik untuk Gedung Perpustakaan baru masih kurang, namun pagu OPD tidak mencukupi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	369.897.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	403.516.170,00	Pengadaan seragam untuk Tenaga Pendukung Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	312.395.140,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	184.534.300,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	125.559.140,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	113.739.100,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	3.960.000,00	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	50.430.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	36.847.200,00	Pergeseran aktivitas pemeliharaan CCTV, AC, jaringan internet dari sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	89.988.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.988.000,00	Penyesuaian pagu anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	46.418.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan CCTV, AC, jaringan internet pindah ke sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,3 : 1 Rasio	1.092.409.985,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,5 : 1 Rasio	903.522.700,00	Penyesuaian target
			Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	84 Indeks				Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	84 Indeks		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,45%	504.293.100,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1,06%	416.290.400,00	Penyesuaian target
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98 Perpustakaan	56.946.100,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98 Perpustakaan	36.946.100,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamata	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Perpustakaan	45.000.000,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamata	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	0 Perpustakaan	0	Kegiatan DAK tidak ada di tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n, Semua Kel/Desa	Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				n, Semua Kel/Desa	Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98 Orang	32.685.000,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98 Orang	22.685.000,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	4 Dokumen	118.000.000,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	4 Dokumen	118.000.000,00	Perubahan rincian SKM
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	910 Eksemplar	120.940.700,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	696 Eksemplar	113.938.000,00	Penyesuaian standar harga
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Eksemplar	130.721.300,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Eksemplar	124.721.300,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pemustaka	67%	588.116.885,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pemustaka	67%	487.232.300,00	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	90.511.400,00	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	32.511.100,00	Penyesuaian kebutuhan belanja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	109.418.535,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	73.932.100,00	Penambahan target dari 3 menjadi 10 Perpustakaan Kelurahan replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang	187.202.000,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	130.443.300,00	Penyesuaian target kinerja dan kebutuhan belanja
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	125 Lokus	200.984.950,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	125 Lokus	250.345.800,00	Penambahan target aktivitas Wisata Buku dan Pameran Literasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				490.870.200,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				385.212.900,00	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	85 Indeks	490.870.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	85 Indeks	385.212.900,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	370.727.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	354.714.800,00	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4500 Berkas	250.012.500,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4500 Berkas	307.002.500,00	Masterplan Depo Arsip
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	120.714.500,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	47.712.300,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan	20%	120.143.200,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20%	30.498.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Informasi Kearsipan Nasional)								
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna	120.143.200,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna	30.498.100,00	Penyesuaian kebutuhan belanja
					6.948.533.526,00					6.843.517.389,00	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Sedangkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses untuk tahun 2025, tidak ada usulan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Perangkat Daerah sudah melakukan sinkronisasi rumusan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar di Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Rincian usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.5. dokumen RENJA ini.

Tabel. 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 unit	Peminjaman bahan pustaka diakomodir dengan bulk loan (paket pinjam buku)
2	Pembuatan pojok baca di fasilitas umum/kelurahan	Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kelurahan Gedog, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Rembang, Kelurahan Klampok dan Kelurahan Karangtengah	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 unit	Peminjaman bahan pustaka diakomodir dengan bulk loan (paket pinjam buku)

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				
B.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
1.	Sosialisasi Pengelolaan Arsip / Kearsipan	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kelurahan Kauman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang	Tidak dapat difasilitasi melalui Sosialisasi offline namun dapat melalui media sosial Dinperpusip

Sumber : DSP (Daftar Skala Prioritas) Non Prioritas Musrenbang Kecamatan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas

   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:

   a. Transformasi ekonomi
      - Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - Penguatan infrastruktur digital
      - Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - Percepatan infrastruktur IKN

   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

   SDM berdaya saing dan produktif, melalui

   a. Transformasi sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem

   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
      - Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
      - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
      - Pengembangan skema graduasi bansos
      - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
      - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
      - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
      - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
      - Peningkatan produksi industri pengolahan
      - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
      - Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu

(1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
   a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
   b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
   c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
   d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

(2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
   a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan science, technology, engineering, art dan mathematics
   c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
   d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
   e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
   f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja

(3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
   a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
   b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
   c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
   d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
   e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu

(1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
   a. Penguatan industri dasar
   b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
   c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
   d. Pengembangan industri medium-high technology
   e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
   f. Produktivitas UMKM dan koperasi
   g. Pengembangan ekonomi biru
   h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
   i. Peningkatan produktivitas BUMN
   j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
   k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
   l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
   m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian

(2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
   a. Percepatan transisi energi
   b. Ekonomi sirkular industri
   c. Pengembangan pekerjaan hijau (green jobs)
   d. Pengelolaan hutan lestari

(3) Transformasi digital, melalui:
   a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
   b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
   c. Pemerintah digital
   d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
   a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
   b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi

c. Perkuatan system logistic nasional
d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Wilayah metropolitan
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
a. Digitalisasi pelayanan publik
b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
c. Harmonisasi dan kolaborasi keweangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
b. Penguatan tata kelola ASN
c. Penggajian tunggal ASN
d. Reformasi system pension
e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

(1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
a. Pembangunan bidang hukum
b. Pembangunan bidang keamanan
c. Pembangunan bidang demokrasi

(2) Stabilitas ekonomi makro
   a. Optimalisasi pendapatan negara
   b. Peningkatan kualitas belanja negara
   c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
(3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
(1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
   a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
   b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
(2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
   a. Penguatan ketahanan keluarga
   b. Peningkatan kesetaraan gender
   c. Perwujudan masyarakat inklusif
(3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
   a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
   c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
   d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
(4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
   a. Kemandirian pangan
   b. Peningkatan ketahanan air nasional
   c. Ketahanan energi
(5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
   a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
   b. Pembangunan berketahanan iklim.

Adapun identifikasi kebijakan Nasional yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan dan kearsipan sebagai berikut:

Urusan Perpustakaan

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar salah satu sasarannya yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang diarahkan untuk penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan melalui :

a. peningkatan akses dan sarana prasarana layanan perpustakaan.
b. peningkatan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
c. pengembangan layanan literasi berbasis digital;
d. peningkatan keberagaman koleksi perpustakaan untuk menumbuhkan kearifan lokal.

Hal ini bertujuan guna meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat literat, inovatif, kreatif dan berkarakter.

Urusan Kearsipan

Dalam rangka memperkuat transformasi pelayanan publik dengan salah satu sasaran meningkatnya transformasi digital, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yaitu mendorong terwujudnya Pemerintah Digital melalui :

a. Penguatan pelaksanaan kebijakan SPBE nasional.
b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menjadi simpul JIKN dan mendorong Pemerintah Daerah yang telah menjadi simpul JIKN untuk mengelola data pada simpul JIKN dengan menerbitkan suatu kebijakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu sehingga ditentukan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Target 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat		Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari 5 indikator yaitu : frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet	48	51,43	52	52,5	53
		Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan iterasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 unsur pembangun literasi masyarakat yaitu : Pemerataan pelayanan perpustakaan (UPLM1), Ketersediaan koleksi perpustakaan (UPLM2), Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3), Kunjungan masyarakat (UPLM4), Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM5), Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6), Pemustaka yang terdaftar (UPLM7)	6,5	41,54	42	42,5	43

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi operasional	Target 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
2.	Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah		Indeks Kearsipan	➢ Indeks Kearsipan merupakan Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan yang menggambarkan Kualitas Pengelolaan Arsip ➢ Indeks Kearsipan diperoleh dari Agregat Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan External dengan bobot 60 % dan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan internal dengan bobot 40% (Sumber : Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Pasal 24)	80,18	84,75	84,85	84,95	85
		Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah merupakan upaya Preservasi Arsip melalui Alih Media (*scanning)* yang bertujuan menjamin keselamatan fisik dan informasi arsip serta menjamin ketersediaan data yang autentik dan terpercaya.	100%	100,25%	100%	100%	100%
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung-jawaban nasional) berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Sumber : Modul Petunjuk Pengisian IKK Kab/Kota)	59	87,5	88	89	90
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	84(A)	86,14(A)	86,14(A)	86(A)	86(A)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu misi ke 2 : "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter" untuk Urusan Perpustakaan dan misi ke 5 : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi" untuk Urusan Kearsipan;
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4. Tindaklanjut LKJiP Tahun 2023; dan
5. Pencapaian program prioritas Daerah dan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada Renja Tahun 2025 adalah 3 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.843.517.389,00 dengan sumber dana dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
223.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung sasaran Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah
223.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
223.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tupoksi
223.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tupoksi
223.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
223.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tupoksi
223.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tupoksi
223.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
223.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tupoksi
223.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tupoksi
223.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
223.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tupoksi
223.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
223.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
223.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
223.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tupoksi
223.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
223.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tupoksi
223.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Tupoksi
223.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tupoksi
223.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tupoksi
223.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	
223.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	IKK
223.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Mendukung IKK
223.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan	Jumlah tenaga perpustakaan yang	Mendukung IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
223.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Mendukung IKK
223.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Mendukung IKK
223.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Mendukung IKK
223.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Mendukung IKK
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	RB tematik kemiskinan , TPBIS
223.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	
223.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	IKU, IKK, RB tematik kemiskinan, DSP Musrenbang
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Mendukung sasaran Meningkat-nya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Mendukung IKK
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung IKK
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Mendukung IKK

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR

Dalam rangka mendukung KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat serta sebagai Perangkat Daerah pelayanan publik, perlu adanya peningkatan pada sasaran strategis dengan melakukan inovasi layanan perpustakaan dan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi yang didukung oleh semua sumber daya yang dimiliki.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026, telaahan kebijakan nasional, hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2024, telahaan usulan kegiatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Kegiatan prioritas daerah tahun 2025 yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025
yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing	Blitar Cerdas	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Pembuatan Minuman dan Pemasaran Online Pembuatan Hampers dan Pemasaran Online Pembinaan Perpustakaan Kelurahan	Program Pembinaan Perpustakaan / Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Penguatan literasi masyarakat	Bimbingan Pemustaka dan Literasi Digital bagi SMP/MTs Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Wisata Buku Parenting Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan / Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi	Blitar Melayani	Digitalisasi Arsip	Preservasi arsip melalui alih media	Program Pengelolaan Arsip / Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, diolah

Selain itu, penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 4.2.
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023
pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

NO	LANGKAH PERBAIKAN LKJIP	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat	Mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi pembudayaan kegemaran membaca berkerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait	*Program Pembinaan Perpustakaan* *Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*
2.	Menyediakan bahan pustaka terutama buku anak yang dilayankan melalui mobil perpustakaan keliling dan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah)	Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka	*Program Pembinaan Perpustakaan* *Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*
3.	Meningkatkan pemanfaatan IT atau teknologi informasi	Implementasi pengelolaan informasi dan layanan kearsipan berbasis digital melalui koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pembina di tingkat Pusat dan Propinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota lain serta Dinas Kominfotik dan OPD terkait di lingkungan Kota Blitar	*Program Pengelolaan Arsip* *Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*
4.	Meningkatkan kualitas layanan kearsipan	Secara berkesinambungan dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan melalui berbagai kegiatan : sosialisasi, asistensi, coaching clinic, bimtek, sharing session, dan kegiatan sejenis daring maupun luring dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal	*Program Pengelolaan Arsip* *Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025 adalah 3 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan –kegiatan tersebut diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.3.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR				6.843.517.389,00				7.679.216.033,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.843.517.389,00				7.679.216.033,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.458.304.489,00				7.188.345.833,00
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,5 Indeks	5.554.781.789,00			84,5 Indeks	6.136.935.048,00
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	43.205.400,00			100 %	18.083.000,00
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	29.134.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	4.134.000,00
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	14.071.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	13.949.000,00
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	4.283.399.074,00			100 %	4.554.655.800,00
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/bulan	4.281.990.574,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang/bulan	4.553.529.000,00
2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	7 Laporan	1.408.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		7 Laporan	1.126.800,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM			
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	102.870.503,00			100 %	107.206.808,00
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	44.629.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	45.324.308,00
2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	58.240.903,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Orang	61.882.500,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	361.806.600,00			100 %	379.103.300,00
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.484.300,00
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	12.217.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	13.470.873,00
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	38.709.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Paket	30.991.400,00
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	25 Paket	51.670.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		25 Paket	60.540.800,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM			
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.094.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	14.385.927,00
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	8.100.000,00
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Laporan	235.266.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		42 Laporan	246.130.000,00
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	73.490.600,00			100 %	265.000.000,00
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	22.778.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	15.000.000,00
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	35.600.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	50.000.000,00
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	15.111.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	200.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	505.475.312,00			100 %	579.897.000,00
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	101.959.142,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Laporan	210.000.000,00
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	403.516.170,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	369.897.000,00
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	184.534.300,00			100 %	232.989.140,00
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	113.739.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Unit	125.559.140,00
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	3.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Unit	6.000.000,00
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 Unit	36.847.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		76 Unit	51.430.000,00
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	29.988.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	50.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		3,5 : 1 Rasio	903.522.700,00			3,6 : 1 Rasio	1.051.410.785,00
					0	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan		84 Indeks				84 Indeks	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		1,06 %	416.290.400,00			1,06 %	461.293.100,00
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Perpustakaan	36.946.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98 Perpustakaan	56.946.100,00
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Orang	22.685.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98 Orang	32.685.000,00
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	118.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	120.000.000,00
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696 Eksemplar	113.938.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		696 Eksemplar	120.940.700,00
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Eksemplar	124.721.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Eksemplar	130.721.300,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka		67 %	487.232.300,00			67 %	590.117.685,00
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	1 Orang	32.511.100,00	DANA TRANSFER UMUM-		1 Orang	91.511.400,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Semua Kel/Desa			DANA ALOKASI UMUM			
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perpustakaan	73.932.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Perpustakaan	109.418.535,00
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	130.443.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	188.202.800,00
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Lokus	250.345.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125 Lokus	200.984.950,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				385.212.900,00				490.870.200,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan		85 Indeks	385.212.900,00			85 Indeks	490.870.200,00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan		100 %	354.714.800,00			100 %	370.727.000,00
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4500 Berkas	307.002.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4500 Berkas	250.012.500,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	47.712.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	120.714.500,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)		20 %	30.498.100,00			20 %	120.143.200,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)							
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Pengguna	30.498.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150 Pengguna	120.143.200,00
J U M L A H									6.843.517.389,00				7.679.216.033,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah–Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dan literasi untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif dan kualitas pelayanan lebih ditingkatkan.
b. Dalam rangka meningkatkan tata kearsipan pemerintah daerah untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah, kualitas pelayanan kearsipan perlu ditingkatkan.

c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perpustakaan dan kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar, webinar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.
d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

17. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar, diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah & acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan & mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada pasal 16 Ayat (2) Permendagri no 86 Tahun 2016 Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Sementara berdasarkan Pasal 126 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025 disusun dengan prinsip–prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Disbudpar tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Disbudpar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Disbudpar;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan, Penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Disbudpar Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat

daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Disbudpar Kota Blitar Tahun 2021-2026

1.1.3. Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/ Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementrian/Lembaga (Renja Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/dan Renja Provinsi (Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementrian dan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4. Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disbudpar Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Disbudpar Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025 di susun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 21);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Merupakan pedoman pelaksanaaan pelayanan Perangkat Daerah;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Evaluasi dan analisis capaian pada masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Indikator Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal terlihat bahwa dengan target 1,98% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 2,26% sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.
2. Indikator Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terlihat bahwa dengan target 1,25% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 1,25% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
3. Indikator Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif terlihat bahwa dengan target 4,04% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 4,04% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
4. Indikator PDRB pariwisata terlihat bahwa dengan target 10 dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 10,2 sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.

Indikator Sasaran :

1. Indikator Persentase kelompok seni budaya yang aktif terlihat bahwa dengan target 70% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 87,24% sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.
2. Indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar terlihat bahwa dengan target 9,40% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 9,40% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
3. Indikator Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif terlihat bahwa dengan target 30,8% dimana realisasi indikatornya di

tahun 2024 sebesar 30,8% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.

4. Indikator Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya terlihat bahwa dengan target 0,5% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 0,5% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
5. Indikator Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan terlihat bahwa dengan target 76,71% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 76,71% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah terlihat bahwa dengan target A(83,75) dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar A(86,15) sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.

Strategi adalah cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar – dasar pelaksanaan yang akan dijabarkan dalam bentuk program – program. Dalam melaksanakan visi KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat serta misi pertama Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, arah kebijakan yang diambil yaitu peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya serta peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya. Sedangkan dalam melaksanakan misi ketiga Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital, arah kebijakan yang diambil yaitu Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada, Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru, Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata, Pemasaran pariwisata berbasis digital, Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru, serta Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan.

Adapun program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7. Kabupaten/Kota

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2024

Kota Blitar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
				Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	2,97%	1,24%	1,49%	1,76%	118.12 %	1,98%	2,26%	76,09%
				Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	75%	70%	65%	87%	133,85 %	70%	87,24%	116,32%
2.22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	100%	60%	75%	75%	100%	85%	85%	85%
2.22	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	100%	9 kelompok	9 kelompok	100%
2.22	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	1 objek	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
2.22	02	2.02		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	10 event	8 event	9 event	9 event	100%	10 event	10 event	100%
2.22	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	8 laporan	9 laporan	9 laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%
2.22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%	80%	80%	80%	100%	90%	90%	100%
2.22	04	2.01		Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	7 event	7 event	7 event	100%	7 event	7 event	100%
2.22	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
2.22	04	2.01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
				Tujuan 1 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	2,97%	1,24%	1,49%	1,76%	118.12 %	1,98%	2,26%	76,09%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sasaran 2 : Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	76,71%	76,71%	100%
2.22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%	50%	60%	60%	100%	70%	70%	100%
2.22	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	5 objek	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	3 objek	60%
2.22	05	2.02	0001	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 objek	1 objek	1 objek	1 objek	100%	1 objek	3 objek	60%
				Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator 1 : Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75%	9,08%	1,00%	8,20%	820%	1,25%	1,25%	71,42%
					Indikator 2 : PDRB Pariwisata	-	-	-	-	-	10	10.2	102%
				Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	9,66%	6,99%	9,30%	32,52%	349,68 %	9,40%	9,40%	97,30%
3.26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno	65%	30%	30%	30%	100%	30%	40%	61%
3.26	02	2.02		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	100%	3 kawasan	3 kawasan	100%
3.2	0	2.0	000	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	2	2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26	02	2.02	0007	Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	3 lokasi	3 lokasi	100%
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
					Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
					Persentase peningkatan usaha pariwisata	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
3.26	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	-	-	-	-	-	1 destinasi	1 destinasi	100%
3.26	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2 lokasi	2 lokasi	100%
3.26	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	100%	1 destinasi	1 destinasi	100%
3.2	0	2.0	000	Sub Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil	2 laporan	150	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	2	3	6	Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		laporan						
3.26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,13%	0,04%	0,06%	0,06%	100%	0,08%	0,08%	61%
3.26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	15 media	9 media	10 media	10 media	100%	11 media	11 media	73%
3.26	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.26	03	2.01	0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
3.26	03	2.01	0007	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 promosi	4 promosi	4 dokumen	4 dukumen	100%	4 promosi	4 promosi	80%
				Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator 3 : Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	6,42%	1,94%	1,60%	3.30%	206,25 %	4,04%	4,04%	62,92%
				Sasaran 2 :	Indikator 1 :	46,2%	0,24%	15,4%	15,4%	100%	30,8%	30,8%	66,66%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif								
					Indikator 2 : Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	-	-	-	-	-	0,5%	0,5%	100%
3.26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	4,5%	4,7%	3,3%	3,3%	100%	3,9%	3,9%	86%
3.26	05	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan	49 orang	34 orang	39 orang	39 orang	100%	49 orang	49 orang	100%
3.26	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	25 orang	30 orang	30 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
3.26	05	2.01	0009	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 orang	-	-	-	-	9 orang	9 orang	100%
				Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83.85)	A (83,60)	A (83,70)	A (85,07)	101%	A (83,75)	A (86,15)	102%
				Sasaran 1 :	Nilai SAKIP Perangkat	A (83.85)	A (83,60)	A (83,70)	A (85,07)	101%	A	A	102%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Daerah						(83,75)	(86,15)	
3.26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (angka)	85,14 (angka)	81 (angka)	87,23 (angka)	107%	83 (angka)	97,09 (angka)	116%
3.26	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
3.26	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%
3.26	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	41 orang/bulan	41 orang/bulan	41 orang/bulan	100%	41 orang/bulan	41 orang/bulan	100%
3.26	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				ran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
3.26	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	1 paket	44 paket	44 paket	100%	44 paket	44 paket	100%
3.26	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 orang	4 orang	41 orang	41 orang	100%	41 orang	41 orang	100%
3.26	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	28 paket	28 paket	28 paket	100%	28 paket	28 paket	100%
3.26	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 paket	4 jenis	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
3.26	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	43 paket	43 jenis	43 paket	43 paket	100%	43 paket	43 paket	100%
3.2	0	2.0	000	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Bahan	428 paket	428 paket	428	428	100%	428 paket	428 paket	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	6	4	Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan			paket	paket				
3.26	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	7 paket	7 paket	100%
3.26	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	100%	60 paket	60 paket	100%
3.26	01	2.06	0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 laporan	62 laporan	62 laporan	62 laporan	100%	62 laporan	62 laporan	100%
3.26	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.26	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.26	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	-	-	-	-	6 unit	6 unit	100%
3.26	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
3.26	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	0	2.0	000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12	12	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026) (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	8	2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan	laporan				
3.26	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	51 laporan	75 laporan	75 laporan	100%	75 laporan	75 laporan	100%
3.26	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
3.26	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 barang	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
3.26	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Untuk mengetahui capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan pengukuran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator Kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui metode kuantitatif maupun kualitatif, dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), atau dampak (impact). Indikator ini bisa berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Selanjutnya analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , diukur mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) , dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang sudah ada.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025 diharapkan mampu tercapai walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya dan saat ini masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
	Indikator tujuan										
1	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal		1,49%	1,98%	2,48%	2,97%	1,76%	2,26%	2,71%	3,17%	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra
2	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum		1,00%	1,25%	1,50%	1,75%	8,20%	1,25%	1,50%	1,75%	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
3	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif		1.60%	4,04%	4,59%	6,42%	3,30%	4,04%	4,59%	6,42%	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
4	PDRB pariwisata		-	10	11	12	-	10,2	11	12	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
	Indikator sasaran										
1	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	IKU	65%	70%	75%	75%	87%	87,24%	87,76%	88,27%	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	IKU	9,30%	9,40%	9,52%	9,66%	32,52%	9,40%	9,52%	9,66%	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
3	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	IKU	0,12%	30,8%	38,5%	46,2%	15,4%	30,8%	38,5%	46,2%	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
											target diatas renstra atau sama dengan target renstra
4	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya		-	0,5%	0,7%	0,8%	-	0,5%	0,7%	0,8%	Indikator ini capaian 2024 sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
5	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan		-	76,71%	78,08%	79,45%	-	76,71%	78,08%	79,45%	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A(83,70)	A(83,75)	A(83,80)	A(83,85)	A(85,07)	A(86,15)	A(85,07)	A(85,07)	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
1	Terlestarikannya cagar budaya	IKK	38,24	41,18	44,12	47	64,38	65,75	67,12	68,49	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra
	Urusan Pemerintahan Pilihan										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	IKK	0,12%	9,49%	9,75%	9,87%	328,81%	9,49%	9,75%	9,87%	Indikator ini capaian 2024 sudah melebihi target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar	IKK	9,26%	9,36%	9,47%	9,50%	42,46%	9,36%	9,47%	9,50%	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
3	Tingkat hunian akomodasi	IKK	87,21	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	Indikator ini capaian 2024 tidak sesuai dengan target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan sama dengan realisasi

No	Indikator	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
											tahun 2023
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	IKK	1	1,25	1,50	1,75	35,74	1,25	1,50	1,75	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	IKK	1,8	1,9	2,0	2,1	6,40	1,9	2,0	2,1	Indikator ini capaian 2024 sudah sesuai target, sehingga tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan target diatas renstra atau sama dengan target renstra

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah.

Evaluasi dan analisis capaian pada masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Indikator Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal terlihat bahwa dengan target 1,98% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 2,26% sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.
2. Indikator Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terlihat bahwa dengan target 1,25% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 1,25% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
3. Indikator Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif terlihat bahwa dengan target 4,04% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 4,04% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
4. Indikator PDRB pariwisata terlihat bahwa dengan target 10 dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 10,2 sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.

Indikator Sasaran :

1. Indikator Persentase kelompok seni budaya yang aktif terlihat bahwa dengan target 70% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 87,24% sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.
2. Indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar terlihat bahwa dengan target 9,40% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 9,40% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
3. Indikator Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif terlihat bahwa dengan target 30,8% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 30,8% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
4. Indikator Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya terlihat bahwa dengan target 0,5% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 0,5% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
6. Indikator Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan terlihat bahwa dengan target 76,71% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 76,71% sehingga capaian indikator tersebut sesuai dengan target.
7. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah terlihat bahwa dengan target A(83,75) dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar A(86,15) sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun IKK Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Indikator Terlestarikannya cagar budaya terlihat bahwa dengan target 41,18% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 65,75% sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.
2. Indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan terlihat bahwa dengan target 9,49% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 9,49% sehingga capaian indikator tersebut melebihi target.
3. Indikator Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar terlihat bahwa dengan target 9,36% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 9,36% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
4. Indikator Tingkat hunian akomodasi terlihat bahwa dengan target 10,29 dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 10,29 sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
5. Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku terlihat bahwa dengan target 1,25% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 1,25% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.
6. Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD terlihat bahwa dengan target 1,9% dimana realisasi indikatornya di tahun 2024 sebesar 1,9% sehingga capaian indikator tersebut sesuai target.

Untuk itu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar akan terus berupaya untuk mempertahankan bahkan untuk lebih baik lagi dengan :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder dalam proses pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata;
2. Meningkatkan fungsi pengendalian program dan kegiatan pembangunan dalam mengoptimalkan pencapaian target;
3. Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana agar lebih efektif dalam mengawal perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

Kondisi lokal menjadi basic dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu-isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi senyatanya yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat strategis.

Adapun kondisi di Kota Blitar yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pariwisata
   a. Promosi dan pemaketan pariwisata belum dikelola secara optimal;
   b. Belum adanya Perda tentang Pariwisata;
   c. Belum terlembaganya pemandu wisata untuk menarik wisatawan;
   d. Belum adanya wisata malam yang menarik;
   e. Belum tersedianya pengelolaan data homestay/penginapan sebagai

potensi pendukung PDRB;

2. Urusan Kebudayaan

a. Minimnya pelestarian nilai, tradisi dan warisan kekayaan budaya;

b. Belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan cagar budaya.

Adapun Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelestarian nilai budaya;

b. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya;

c. Rata-rata wisatawan lama di Kota Blitar masih di bawah 1 hari;

d. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 mengambil tema "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Perdagangan yang berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi".

Dari tema tersebut telah ditentukan 6 Prioritas Rencana Kerja Perangkat daerah 2025 yaitu, 1) Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan; 2) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital Dan Investasi; 3) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dan SDM Yang Berdaya Saing; 4) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup; 5) Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Peningkatan Ekonomi Digital; 6) Pemantapan Kota Biitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Perkembangan pariwisata diperkirakan akan semakin dominan perannya dalam menggerakkan perekonomian Kota Blitar, hal ini dikarenakan jumlah dan lama kunjungan wisatawan yang meningkat. Angka kunjungan wisatawan diperkirakan akan meningkat tajam seiring dengan semakin banyak dan variatifnya obyek wisata yang ada di Kota Blitar. Strategi pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya, meliputi :

a. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;

b. Mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata;

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;

d. Meningkatkan pemasaran wisata;

e. Meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.

Kerinduan masyarakat akan sosok nasionalis dan patriotis seperti Bung Karno dan Suprijadi, menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar, untuk belajar tentang nasionalisme dengan mengunjungi makam Bung Karno yang merupakan destinasi wisata sekaligus

sebagai cagar budaya, menelusuri jejak Suprijadi sebagai tokoh PETA dan objek wisata sejarah lainnya yang ada di Kota Blitar. Strategi pelestarian kawasan cagar budaya, meliputi :

a. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
b. Melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
c. Mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat;
d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				2.418.635.100	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				2.418.635.100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Blitar	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85%	533.296.200	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Blitar	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85%	533.296.200	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 kelompok	309.864.200	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 kelompok	309.864.200	Penambahan aktivitas pelatihan
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	151.397.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	151.397.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 orang	158.467.200	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 orang	158.467.200	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	10 event	223.432.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	10 event	223.432.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	223.432.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	223.432.000	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kota Blitar	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%	1.793.428.300	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kota Blitar	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%	1.793.428.300	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	1.793.428.300	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	1.793.428.300	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	534.511.300	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	534.511.300	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 jenis	1.258.917.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 jenis	1.258.917.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Blitar	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%	91.910.600	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Blitar	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%	91.910.600	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah cagar budaya yang dikelola	1 objek	91.910.600	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah cagar budaya yang dikelola	3 objek	91.910.600	Penambahan jumlah objek cagar budaya yang dikelola
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	91.910.600	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 objek	91.910.600	Penambahan jumlah objek cagar budaya yang dikelola
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Blitar			10.113.212.172	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Blitar			10.113.212.172	
	BIDANG URUSAN PARIWISATA	Kota Blitar			10.113.212.172	BIDANG URUSAN PARIWISATA	Kota Blitar			10.113.212.172	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata Persentase peningkatan usaha pariwisata	50 % 30 % 25 % 20 %	959.854.100	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata Persentase peningkatan usaha pariwisata	50 % 30 % 25 % 20 %	959.854.100	Perbaikan indikator sesuai Renstra
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	105.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	105.000.000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	105.000.000	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	105.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola	3 kawasan	590.054.200	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola	3 kawasan	590.054.200	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 unit	293.430.600	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 unit	293.430.600	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	296.623.600	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	296.623.600	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	264.799.900	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	264.799.900	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	264.799.900	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	264.799.900	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0.08%	715.358.300	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0.08%	715.358.300	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	11 media	715.358.300	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	11 media	715.358.300	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	14.217.600	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	14.217.600	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	639.771.100	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	639.771.100	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 promosi	61.369.400	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 promosi	61.369.400	
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Kota	Persentase pelaku ekraf yang	4.2 %	32.635.600	PROGRAM PENGEMBANGAN	Kota	Persentase pelaku ekraf yang	4.2 %	32.635.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Blitar	aktif dalam kegiatan			SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Blitar	aktif dalam kegiatan			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Blitar	Jumlah pelaku ekraf yang ikut kegiatan	49 orang	32.635.600	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Blitar	Jumlah pelaku ekraf yang ikut kegiatan Manusia Ekonomi Kreatif	49 orang	32.635.600	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	22.885.600	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	22.885.600	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Blitar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 orang	9.750.000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Blitar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 orang	9.750.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 (angka)	8.405.364.172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 (angka)	8.405.364.172	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	16.164.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	16.164.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	5.001.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	5.001.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	11.163.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	11.163.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	4.501.401.351	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	4.501.401.351	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	4.500.116.351	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	4.500.116.351	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.285.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	1.285.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	126.370.768	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	126.370.768	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	53.764.368	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	53,764,368	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 orang	72.606.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 orang	72.606.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	345.205.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	345.205.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	34.344.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	34.344.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	33.392.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	33.392.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	24.926.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	24.926.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	50.039.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	50.039.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	14.629.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	14.629.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	9.540.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	9.540.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	173.192.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	173.192.400	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.140.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.140.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang tersedia sesuai standart	100%	20.967.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang tersedia sesuai standart	100%	20.967.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5.967.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5.967.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	3.226.396.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	3.226.396.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	319.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	319.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	2.907.396.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	2.907.396.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100%	168.858.953	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100%	168.858.953	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	82.143.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	82.143.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	81.688.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	81.688.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.027.953	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.027.953	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perencanaan kerja juga memperhatikan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagaimana dalam tabel terlampir

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
	Musrenbang						
1	Belum lengkapnya identitas taman agro wisata belimbing	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kelurahan Karangsari	Jumlah gapura taman agrowisata belimbing	30.000.000	1 unit	Diakomodir
	Pokir DPRD						
2	Pembinaan kelompok masyarakat penunjang kegiatan UMKM (Pasar Jaranan)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kelurahan Blitar	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pertunjukan Pasar Jaranan	87.500.000	1 unit	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
   - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
   - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
   - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
   - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
   - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
   - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
   - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
   - Pembangunan Wilayah Sumatera;
   - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
   - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
   - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
   - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
   - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
   - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
   - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
   - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
   - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;

- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- Meningkatnya produktifitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran :
   - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
   - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
   - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
   - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
   - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
   - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
   - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
   - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
   - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
   - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
   - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
   - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
   - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
   - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga Negara secara optimal;
   - Optimalnya kebijakan luar negeri;
   - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
   - Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
   - Terjaganya stabilitas keamanan nasional.

Sesuai tupoksi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, maka kebijakan nasional yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan :

1. Pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya melalui kegiatan penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dan pengelolaan objek cagar budaya.
2. Peningkatan kualitas kegiatan seni budaya melalui kegiatan fasilitasi kelompok seni budaya yang berpartisipasi dalam event daerah.
3. Peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar melalui kegiatan pengembangan pemeliharaan destinasi wisata, dan pemberdayaan pelaku pariwisata.
4. Peningkatan aktifitas ekonomi kreatif melalui kegiatan fasilitasi pelatihan dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagaimana tabel terlampir :

Tujuan:
1. Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya
2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya
2. Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar
4. Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif
5. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Tujuan							
1.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - 1 / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N – 1 X 100	1,49%	1,76%	2,26%	2,48%	2,97%
2.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun N – Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N -1) / Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N -1) X 100%	1,00%	8,20%	8,20%	8,25%	8,30%
		Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekraf tahun N - Jumlah pelaku ekraf tahun dasar / Jumlah ekraf tahun dasar X 100% Tahun dasar = tahun 2021	1,60%	3,30%	4,04%	4,59%	6,42%
		PDRB Pariwisata	Rata-rata persentase laju pertumbuhan dari sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya	-	-	10,2	11	12
3.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (83,70)	A (85,07)	A (86,15)	A (86,16)	A (86,17)
	Sasaran							
1.	Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100%	65%	87%	87%	87,24%	87,76%
2.	Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan / Jumlah cagar budaya yang dikelola X 100%	-	-	76,71%	78,08%	79,45%
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun N - 1 / Jumlah wisatawan tahun N - 1 X 100%	9,30%	32,52%	9,40%	9,52%	9,66%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
4.	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Peresentase meningkatnya jumlah kegiatan berbasis ekonomi kreatif	(jumlah kegiatan ekonomi kreatif tahun n dikurangi jumlah kegiatan ekonomi kreatif tahun dasar)/jumlah kegiatan ekonomi kreatif tahun dasar x 100% Tahun dasar = tahun 2021	0,12%	15,4%	30,8%	38,5%	46,2%
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun N / Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun N-1 X 100%	-	-	0,5%	0,7%	0,8%
5.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (83,70)	A (85,07)	A (86,15)	A (83,80)	A (83,85)

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Persentase budaya lokal yang dikembangkan*	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	*Persentase kesejarahan yang dikembangkan*	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*	
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	*Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan*	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD yang tersedia sesuai standart*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
				Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan*	
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno	
			Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	
			Persentase peningkatan usaha pariwisata	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP, Musrenbang
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP, Pokir DPRD
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan*	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	*Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan*	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan*	Mendukung pencapaian Tupoksi, Kebijakan Nasional, LKJIP
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kota Blitar serta untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selain itu, perumusan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025 juga mengacu pada langkah perbaikan LKjIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Tahun 2023

Pada Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri	Membuat jadwal pergelaran periodik dan menyediakan ruang untuk berkreasi terhadap kelompok seni budaya	Program : Pengembangan Kebudayaan Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian	Melaksanakan kunjungan dan monitoring aktifitas kelompok seni budaya	Program : Pengembangan Kebudayaan Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
3	Meningkatkan partisipasi kelompok seni budaya dalam event budaya	Melibatkan kelompok seni budaya dalam pelaksanaan event budaya	Program : Pengembangan Kebudayaan Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
4	Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal	Pengelolaan Media Publikasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
5	Mengajukan draf perda tentang	Mengajukan draf perda pariwisata	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Pariwisata		Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
6	Melaksanakan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru	Melaksanakan pemeliharaan kawasan pariwisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025 adalah 7 program, 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan–kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Blitar

Nama PD : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			13.021.847.272					14.785.769.517	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.418.635.100					3.075.252.581	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Persentase budaya lokal yang dikembangkan*	100 %	533.296.200				100%	728.896.226	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi*	9 Kelompok	309.864.200			Kelompok insan budaya	9 Kelompok	298.412.940	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	151.397.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan budaya	1 Objek	156.720.375	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 Orang	158.467.200	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan budaya	8 Orang	141.692.565	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi*	10 event	223.432.000			Kelompok insan budaya	10 event	430.483.286	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	10 Laporan	223.432.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan budaya	10 Laporan	430.483.286	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	*Persentase kesejarahan yang dikembangkan*	90 %	1.793.428.300				90 %	2.242.589.055	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi*	7 event	1.793.428.300			Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya	7 event	2.242.589.055	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 orang	534.511.300	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya	6 orang	445.612.230	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 unit	1.258.917.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya	1 unit	1.796.976.825	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	*Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan*	70 %	91.910.600				70 %	103.767.300	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola*	1 obyek	91.910.600			Obyek cagar budaya	1 obyek	103.767.300	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	91.910.600	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA	Obyek cagar budaya	1 Objek	103.767.300	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
						Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.113.212.172					11.710.516.936	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			10.113.212.172					11.710.516.936	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	83 (angka)	8.405.364.172				83 (angka)	9.096.153.226	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	16.164.200			perencanaan dan pelaporan	100 %	16.970.940	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.001.200	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	perencanaan dan pelaporan	10 Dokumen	5.249.790	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	11.163.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	perencanaan dan pelaporan	7 Laporan	11.721.150	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	4.991.401.351			ASN	100 %	4.669.123.398	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.990.116.351	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	41 Orang/bulan	4.667.773.938	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	1.285.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	2 Laporan	1.349.460	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	126.370.768			Layanan kepegawaian	100 %	175.353.097	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	53.764.368	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Layanan kepegawaian	44 Paket	61.698.210	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	72.606.400	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Layanan kepegawaian	41 Orang	113.654.887	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100%	345.205.700			ASN	100%	386.867.927	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	34.344.100	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	8 Paket	37.786.870	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.392.900	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	4 Paket	31.502.205	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	24.926.900	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	2 Paket	26.176.027	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.039.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	ASN	10 Paket	52.497.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
						Kel/Desa	UMUM				
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.629.500	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	6 Paket	15.397.725	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	9.540.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	36 Dokumen	10.017.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	173.192.400	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	20 Laporan	199.500.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.140.900	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN	1 Dokumen	13.990.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD yang tersedia sesuai standart*	100%	20.967.200			ASN dan PTT	100%	112.802.256	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5.967.200	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT	5 unit	97.052.256	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT	1 Unit	15.750.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100%	3.226.396.000			TLD	100%	3.325.656.988	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319.000.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	TLD	12 Laporan	334.950.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan	2.907.396.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	TLD	75 Laporan	2.990.706.988	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	100%	168.858.953			ASN dan PTT	100%	409.378.620	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	82.143.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT	12 Unit	86.354.520	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	81.688.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT	5 Unit	87.036.600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.027.953	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT	2 Unit	235.987.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan*	50 %	959.854.100				50 %	1.557.663.345	
			Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	30%					30%		
			Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	25%					25%		
			Persentase peningkatan usaha pariwisata	20%					20%		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik*	1 destinasi	105.000.000			Destinasi pariwisata	1 destinasi	157.500.000	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
											DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	105.000.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Destinasi pariwisata	2 Lokasi	157.500.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola*	3 kawasan	590.054.200			Destinasi pariwisata	3 kawasan	899.380.230	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit	293.430.600	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Destinasi pariwisata	3 Unit	495.130.440	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	296.623.600	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Destinasi pariwisata	3 Lokasi	404.249.790	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	1 destinasi	264.799.900			-	1 destinasi	500.783.115	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	264.799.900	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Laporan	500.783.115	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan*	0.11%	715.358.300				0.13 %	986.625.045	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam	*Jumlah media promosi*	11 media	715.358.300			Promosi	11 media	986.625.045	DINAS

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
		dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*pariwisata yang dilakukan*					pariwisata			KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	14.217.600	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Promosi pariwisata	2 Dokumen	3.172.575	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	639.771.100	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Promosi pariwisata	3 Kegiatan	882.445.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	61.369.400	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Promosi pariwisata	4 Promosi	101.007.270	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	*Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan*	4,2%	32.635.600				4,5%	70.075.320	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan*	49 orang	32.635.600			Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	49 orang	70.075.320	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	22.885.600	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	40 Orang	32.275.320	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
							UMUM-DANA ALOKASI UMUM				
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 Orang	9.750.000	Kota Blitar. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	9 Orang	37.800.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H				13.021.847.272					14.785.769.517	

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

1.1. Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

1.2. Kaidah–Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

1.3. Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan ruang untuk berkreasi mengembangkan jati diri, dengan membuat jadwal pergelaran periodik dan menyediakan ruang untuk berkreasi terhadap kelompok seni budaya.
b. Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian, dengan melaksanakan kunjungan dan monitoring aktifitas kelompok seni budaya.
c. Meningkatkan partisipasi kelompok seni budaya dalam event budaya, dengan melibatkan kelompok seni budaya dalam pelaksanaan event budaya.
d. Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal, dengan pengelolaan media publikasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
e. Mengajukan draf perda tentang Pariwisata
f. Melaksanakan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru, dengan melaksanakan pemeliharaan kawasan pariwisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang

Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

18. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja

Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX) yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi,

UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian Koperasi dan UKM serta Renja Kementerian Ketenagakerjaan) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja KemenkopUKM, Renja Kemenaker, Renja DinkopUKM Jatim dan Renja Disnakertrans Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kota Blitar Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026 ;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
34. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19);

36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX).
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian target Renstra s/d tahun 2024, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar serta daftar program dan kegiatan tahun 2025.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V. Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja atau Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Oleh karena itu dalam hal evaluasi perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antara kinerja renja dengan renstra perangkat daerah periode berjalan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang telah berkesinambungan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2023 dengan mengacu pada APBD Tahun 2023 untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ;
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Program Penempatan Tenaga Kerja;
11. Program Hubungan Industrial.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Tenaga Kerja										
	Bidang Urusan Ketenagakerjaan										
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72	%		70	69,53	99	70,50	70	97
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	90	%		82	91,91	112,09	85	85	91
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	%		46	56	121,74	47	47	94
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	%		82	82	101,22	83	83	93
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	650	orang		450	466	103,56	175	175	27
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83	%		77	90	116,88	79	79	95
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang	20	%		0	0	-	14	14	70

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						terserap melalui bursa kerja online									
					Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	900	orang		170	289	170	150	150	17
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300	orang		150	150	100	150	150	50
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	37,1	%		0	45	-	32,7	32,7	88
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	390	orang		0	0	-	0	0	-
					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	174	orang		30	10	33	30	30	17
					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	22	%		18	43,39	241,05	19	19	86
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	%		100	90	90	100	100	100
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	350	perusahaan		55	55	100	75	75	21

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	perkara		5	n/a	n/a	5	5	5
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	14	perkara		1	1	100	0	0	-
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12	Asosiasi dan serikat pekerja		4	n/a	-	4	4	33
					Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,25	%		2,1	n/a	-	2,15	2,15	96
					Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	39,5	%		36,7	48,23	131	37,8	37,8	96

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26	%		22	22	100	23	23	88
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15	Unit usaha		3	3	100	3	3	20
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit usaha	30	10	10	100	10	10	25
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	%		36	36	100	36,4	36,4	95
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5	%		5	5	100	5	5	100
					Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	orang		40	40	100	50	50	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	38,5	%		36,4	36,4	100	36,4	36,4	95
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	610	orang		160	160	100	160	160	26
					Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi	39	%		36	36	100	37	37	95
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	37	%		33	33	100	34	34	92
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	32	%		28	28	100	29	29	91
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	320	Unit usaha		80	80	100	50	50	16

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	%		29	29	100	30	30	91
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	400	Unit usaha		100	100	100	100	100	20
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	%		32	62	192	34	34	85
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	%		11	62	559	12	12	80
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120	orang		30	30	100	30	30	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40	keluarga		10	10	100	10	10	25
					Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan WUB	2	%		1,75	33,33	1904	1,9	1,9	95
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	2	%		1,8	0,95	52,57	1,85	1,85	93
						Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6	%		2,3	2,3	100	2,3	2,3	88
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	%		100	37	37	100	100	100
						Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	12000	Unit usaha		12000	12000	100	12000	12000	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	Unit usaha		25	25	100	50	50	25
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	orang		75	75	100	25	25	25
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200	orang		50	50	100	50	50	25
					Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	%		1,85	21,79	1177	1,85	1,85	93
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan	2	%		0	1,16	-	1,7	1,7	85
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan	100	%		100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	400	Unit usaha		100	100	100	100	100	25
					Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	Nilai angka		83,56	81,17	99,15	84	84	100
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	Nilai angka		83,56	81,17	99,15	84	84	100
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	indeks	0	81	82,93	102	81,5	81,5	100
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	5	2	2	100	5	5	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	laporan	5	3	3	100	4	4	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	94	94	100	100	100
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	Orang/bulan	21	23	27	117	27	27	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan		12	12	100	12	12	100
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	0	100	98	98	100	100	100
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket		2	2	100	2	2	100
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	100	50	50	100	50	50	100
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100	%	0	100	99	99	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						perangkat daerah sesuai standar									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	2	2	2	100	3	3	100
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket		10	10	100	10	10	100
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	24	12	12	100	12	12	100
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	17	12	12	100	12	12	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen		0	0	100	0	-	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100	%	0	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4	12	12	100	12	12	100
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan		12	12	100	12	12	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit		0	-	100	0	0	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	unit		25	25	100	25	25	100
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	unit		3	3	100	3	3	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit		0	-	100	0	0	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6	0	-	100	0	0	-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	0	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	13	13	13	100	10	10	100
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	unit		0	0	-	0	0	-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit		10	10	100	10	10	100
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	1	1	100	1	1	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan periodesasi Renstra antara tahun 2021 dan 2022. Capaian kinerja Renja Tahun 2021 tidak disajikan dalam tabel karena masuk dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja periode Tahun 2016 – 2021 sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap capaian target indikator tahun 2021 dan tahun 2022. Selain itu, dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan maupun sub kegiatan sehingga berbeda dengan tahun 2022.

Analisis atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga Kerja Kota Blitar.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Kompeten dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Pencari Kerja Kompeten	82 %	82,16%	100,20

Keterangan:

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.034 orang pencaker sedangkan jumlah pencari kerja seluruhnya di tahun 2023 sebanyak 1.125 orang pencaker.

Hal ini karena pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan lowongan kerja yang ada dan kompetensi pencari kerja sesuai dengan bidang yang tersedia.

b. Sasaran 2: Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan	18%	21,90%	122,67

Keterangan :

Perusahaan yang terdaftar di Kota Blitar sebanyak 242 perusahaan sedangkan BUMD, BUMN dan atau perusahaan swasta besar lainnya sebanyak 105 perusahaan sudah patuh aturan ketenagakerjaan dengan membayar sesuai umk dan mempunyai perjanjian kerja bersama, hal ini terjadi karena adanya pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Koperasi Aktif	36,7 %	38,65%	105,3

Keterangan :

Koperasi di Kota Blitar sejumlah 282 koperasi sedangkan koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahun, sudah update sertipikat NIK dan menyusun dan menyampaikan laporan tribulanan secara rutin sebanyak 136 koperasi, upaya yang dilakukan agar koperasi menjadi koperasi aktif adalah melakukan Fasilitasi Pendampingan, pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi.

d. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi

Indikator Kinerja Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	36 %	36,1%	100,28

Keterangan

Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi sebanyak 100 koperasi sedangkan Jumlah KSP/USP seluruhnya sebanyak 277 koperasi, untuk mendorong agar KSP/USP naik klasifikasinya dilakukan Pendampingan dan pembinaan kepada koperasi secara berkelanjutan.

e. Sasaran 5: Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas mempunyai indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1,85 %	21,79%	1177,83

Keterangan:

Jumlah UM yang omzetnya naik tahun 2023 sebanyak 3.043 sedangkan jumlah UM Tahun 2023 sebanyak 13.965, faktor pendukung keberhasilan tersebut Pendampingan pasca pelatihan, fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan sedangkan kendala yang dihadapi Banyaknya pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi jumlah omzet usahanya dengan alasan pembinaan pelaku usaha kecil ada di tingkat provinsi. Untuk itu dilakukan updating data secara berkelanjutan.

f. Sasaran 6: Meningkatnya Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,75%	33,33%	1904,57

Keterangan:

Jumlah WUB tahun 2023 sebanyak 64 WUB sedangkan jumlah WUB thn sebelumnya sebanyak 48 WUB keberhasilan ini didukung dengan Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan dan pendampingan pasca pelatihan dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, untuk terus menumbuhkan WUB.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

Sampai dengan tahun 2022, capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja
Kota Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
I	INDIKATOR TUJUAN													
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKK	70	70,5	71	71,5	72	67,78	72,26	72,26	72,265	72,3	Tercapai 101,77% , kategori Berhasil
2.	Persentase Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		IKK	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	n/a	2,82	2,95	3,05	3,1	Tercapai 100%, kategori berhasil
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKK	83,56	83,56	84,00	84,25	84,5	83,16	81,17	84	84,25	84,5	Tercapai 96,43% Kategori berhasil
II	INDIKATOR SASARAN													
1.	Persentase pencari kerja yang berkompeten		IKU	80	82	85	87	90	66	82,16	85	87	89	Tercapai 108,14% Kategori berhasil
2.	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan		IKU	16	18	19	21	22	30	21,90	22	24	25	Tercapai 228,37% Kategori berhasil

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
3.	Persentase Koperasi Aktif		IKU	35,6	36,7	37,8	38,8	39,5	48,9	38,65	39	40	41	Tercapai 127,59% Kategori berhasil
4.	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi		IKU	35	36	37	38	39	39	36,1	37	38	39	Tercapai 97,57% Kategori berhasil
5.	Persentase Pertumbuhan WUB		IKU	1,6	1,75	1,9	1,95	2	1,62	33,33	1,9	1,95	2,0	Tercapai 1754,21% Kategori berhasil
6.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas		IKU	1,6	1,85	1,9	1,95	2	n/a	1,97	1,9	1,95	2,0	Tercapai 1146,84% Kategori berhasil
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	83,56	83,56	84,00	84,25	84,5	83,34	81,17	81,17	84,25	84,5	Tercapai 96,63% Kategori berhasil

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, disajikan data capaian indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 masih disajikan data proyeksi karena tahun 2024 masih dalam proses pelaksanaan.

Beberapa langkah dan strategi yang diupayakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam mencapai kinerja dengan maksimal adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan sistem pendukung usaha dengan melibatkan berbagai lembaga yang menyediakan dukungan bagi koperasi dan UMKM untuk mengakses sumber daya produktif. Sumber daya produktif ini meliputi bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi, dan teknologi. Selain itu, perluasan usaha juga mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, kapasitas usaha, dan perluasan jangkauan pasar.
b. Melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM khususnya dengan berfokus pada peningkatan kualitas kelembagaan dan perbaikan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini mencakup aspek kewirausahaan, kemampuan teknis, manajemen, dan pemasaran. Dengan SDM yang berkualitas, koperasi dan UMKM dapat beroperasi lebih efisien dan efektif.
c. Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan. Melaksanakan pengawasan hukum, memastikan pembayaran upah yang sesuai peraturan, dan memantau kondisi kerja yang layak. Mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Dinas bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi serta UKM melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan. Kendala yang sering dihadapi meliputi kurangnya akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan yang memadai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dinas perlu memastikan adanya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, isu terkait perlindungan tenaga kerja, baik dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja maupun perlindungan hak-hak tenaga kerja, juga menjadi fokus utama.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi, UKM dan tenaga kerja di daerah, dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut.

a. Kurangnya daya saing usaha mikro. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan akses permodalan, teknologi dan informasi pasar. Keterbatasan SDM terampil dan pengelolaan usaha yang kurang profesional juga turut menghambat potensi usaha mikro untuk berkembang dan bersaing dengan baik.
b. Kurangnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, akibatnya tingkat pengangguran meningkat dan perusahaan semakin kesulitan dalam proses rekrutmen.

c. Belum optimalnya pengelolaan koperasi. Hal ini sering disebabkan oleh kelemahan dalam kelembagaan organisasi, kurangnya profesionalisme dalam manajemen, dan keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan pelatihan.
d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pencarian dan penempatan tenaga kerja yang terintegrasi dapat menghambat pencocokan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, memperpanjang waktu penempatan, dan mengurangi efektivitas dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1) Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
2) Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital;
3) Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing;
4) Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
5) Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi; dan
6) Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka mengimplementasikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD: Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48 %	1.999.999.700	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48 %	1.924.999.800	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan terlatih	85 %	1.999.999.700	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan terlatih	85 %	1.924.999.800	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	1.999.999.700	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	1.924.999.800	Penyesuaian Standar Harga
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	81 %	232.772.300	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	81 %	224.447.400	
			Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	16 %			Kota Blitar	Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	16 %		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota		Jumlah pencari kerja terdaftar	230 orang	23.691.300	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota		Jumlah pencari kerja terdaftar	230 orang	23.691.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Blitar	Jumlah pencaker yg mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	23.691.300	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Kota Blitar	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	50 orang	23.691.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	33,3 %	209.081.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	33,3 %	200.756.400	Penyesuaian Standar Harga
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	120 orang	83.324.600	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	130 orang	75.000.000	Penyesuaian Standar Harga
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	46 orang	125.756.400	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	46 orang	125.756.400	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Blitar	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	175.999.300	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Blitar	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	175.997.900	
	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	85 perusahaan	175.999.300	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	85 perusahaa n	175.997.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	102.554.200	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	102.553.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 perkara	1.095.200	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 perkara	1.095.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	4 asosiasi dan serikat pekerja	72.349.900	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Blitar	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	24 %	293.945.300	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Blitar	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	25 %	143.286.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	293.945.300	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	143.286.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Kota Blitar	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	10 unit usaha	293.945.300	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Kota Blitar	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP	10 unit usaha	143.286.000	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	35 %	18.685.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	31 %	18.685.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	30 %	18.685.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	36 %	18.685.000	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 unit usaha	18.685.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 unit usaha	18.685.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	31 %	65.705.300	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	32 %	75.705.300	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100 %	65.705.300	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100 %	75.705.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	65.705.300	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan		Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	75.705.300	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	37,1 %	495.370.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	37,8 %	239.800.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5 %	495.370.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	37,8 %	239.800.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	495.370.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 orang	239.800.000	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	36 %	391.764.311	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	38 %	524.491.211	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	13 %	391.764.311	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	14 %	524.491.211	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, & Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 orang	374.984.511	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	30 unit usaha	507.691.811	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Keluarga yg Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dlm Peningkatan Taraf Hidup Keluargamelalui Kehidupan Berkoperasi & Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 keluarga	16.779.800	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	10 unit usaha	16.799.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	1,9 %	843.411.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	1,95 %	977.094.500	
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,4 %				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,5 %		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Kota Blitar	Persentase UM yang diberdayakan melalui	100 %	843.411.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Kota Blitar	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan,	100 %	977.094.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan			Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)			
		Kota Blitar	Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100 %			Kota Blitar	Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100 %		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	1 dokumen	195.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	9000 unit usaha	189.372.600	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	50 unit usaha	295.244.800	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	50 unit usaha	434.555.800	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 orang	111.046.200	Pemulihan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 unit usaha	111.046.200	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	242.120.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	242.119.900	Penyesuaian Standar Harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1, 8 %	426.320.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,8 %	666.319.600	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Blitar	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100 %	426.320.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Blitar	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100 %	666.319.600	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	426.320.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	666.319.600	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	4.842.661.985	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	4.968.291.579	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100 %	39.739.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100 %	18.684.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5 dokumen	6.356.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5 dokumen	6.356.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	Jumlah Lap Capaian Kinerja&	4 Laporan	33.383.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi	4 Laporan	12.328.500	Pemindahan Alokasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Anggaran antar Subkegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.751.891.785	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.941.500.772	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.746.871.585	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/ bln	3.937.401.572	Penyesuaian Kenaikan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.020.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.099.200	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	100 %	94.743.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	100 %	86.911.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	49.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	37.800.000	Penyesuianan Standar Harga
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yg MengikutiSosialisasi Peraturan Per UU-an	50 orang	45.543.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yg MengikutiSosialisasi Peraturan Per UU-an	50 orang	49.111.000	Penyesuaian Standar Harga
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	317.403.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	319.180.200	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	5.084.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	5.189.800	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	2 paket	29.108.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	3 paket	23.668.500	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah	1 paket	11.654.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah	1 paket	8.227.900	Penyesuaian Standar Harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			tangga kantor yang tersedia					tangga kantor yang tersedia			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	22.585.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	24.480.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	24.998.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	24.615.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	217.423.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	222.279.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.150.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.320.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	340.483.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	350.972.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.948.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.948.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	272.534.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	283.024.000	Penyesuaian Standar Harga
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	110.421.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	62.414.800	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	23.112.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	23.042.500	Penyesuaian Standar Harga
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	87.309.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	39.372.300	Penyesuaian Standar Harga
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Tidak melakukan pengalokasian anggaran pada tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	36.119.300	Mengganti kendaraan operasional yang sudah tidak layak
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	187.978.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	188.627.507	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	101.531.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	94.479.500	Penyesuaian Standar Harga
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit	5.400.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	19.247.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	20.637.000	Penyesuaian Standar Harga
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	61.800.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	73.511.007	Penyesuaian Standar Harga
					9.786.654.196					9.939.118.290	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan pogram kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi, perangkat daerah juga berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Untuk tahun perencanaan 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mendapatkan usulan dari Program Prioritas, Musrenbang Kecamatan dan Kota serta dari pokok – pokok pikiran DPRD sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel. 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1.	Inkubator Bisnis	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Diakomodasi dalam Renja 2025
2.	Bursa Kerja Online	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Blitar	Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online		Diakomodasi dalam Renja 2025
3.	Blitar StartUp Community	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		Diakomodasi dalam Renja 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
4.	Kurangnya informasi/ kapasitas pelaku usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kel. Blitar, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	20 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
5.	Kurangnya informasi/ kapasitas pelaku usaha mikro	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kel. Ngadirejo & Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	40 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
6.	Pelatihan pemasaran digital dan desain marketplace untuk UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kec. Sananwetan, Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	290 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
7.	Pelatihan pemasaran digital dan peningkatan usaha mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	120 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
8.	Sosialisasi tentang koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
9.	Pembinaan dan fasilitasi pendampingan pelaku usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	15 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
10.	Pelatihan pengolahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	10 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	produk khas Karangsari	MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
11.	Pelatihan handycraft	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menerjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang meliputi;

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar merumuskan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah kegiatan Inkubasi Bisnis dan Start Up Community. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta mendorong munculnya wirausahawan baru melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan bimbingan yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis yang inovatif dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga menyelenggarakan pasar kerja online. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam bertemu dan berinteraksi secara lebih efisien dan efektif di era digital. Dengan adanya pasar kerja online, diharapkan akan tercipta peluang kerja yang lebih luas dan transparan, serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Blitar. Platform ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UKM lokal dengan memperluas akses mereka terhadap tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis digital.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Tujuan							
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Partisipasi Angkatan Kerja Tahun n	70,5	72,26	72,26	72,265	72,3
	Meningkatnya nilai tambah bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Tambah bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Jumlah Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro Tahun n	2,1	2,82	2,95	3,05	3,1
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	83,56	81,17	84,00	84,25	84,50
	Sasaran							
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	Pencari Kerja yang Berkompeten adalah Pencaker yg mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yg di keluarkan oleh BNSP	82	82,16	85	87	89
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Tahun n	n/a	n/a	19	21	22
	Menurunnya Permasalahan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yg melaksanakan pembayaaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun	18	21,90	22	24	25

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja					
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahanya, Menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan), Melaksanakan RAT setiap Tahun	36,7	38,65	39	40	41
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	KSP/USP yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	36	36,1	37	38	39
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >1M /tahun	1,85	1,97	1,9	1,95	2,0
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	Wira Usaha Baru adalah: Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	1,75	33,33	1,9	1,95	2,0
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	83,56	81,17	84,00	84,25	84,50

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel . 3.3

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mendukung pencapaian SPM atau IKK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	URUSAN TENAGA KERJA		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	
		Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	
	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	
	URUSAN KOPERASI UKM		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	
	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)	
		Persentase Kelurahan yang memiliki	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		wirausaha baru minimal 2	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 yaitu “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”, dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;

b. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital;

c. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing;

d. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

e. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi;

f. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja melalui berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	Blitar Makmur	- Bursa Kerja online-offline - Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional	• Memuat program unggulan inovatif Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-up Community. Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang. Program ini bertujuan semakin menumbuhkan industri kreatif dan kampung kreatif • Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital	Blitar Makmur	- Satu kelurahan dua wirausaha - Penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Tahun 2023 pada Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi untuk mencapai kinerja koperasi di Kota Blitar yang optimal serta akuntabilitas yang lebih baik	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja akan meningkatkan kapasitas pengawas, mengembangkan sistem monitoring, memperkuat regulasi, melakukan audit berkala, memberikan edukasi, meningkatkan kerjasama antar instansi, serta menerapkan pelaporan dan evaluasi rutin untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi	1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota Subkegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota Subkegiatan Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan
2.	Meningkatkan kompetensi pencari kerja di Kota Blitar sehingga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi, mengadakan bursa kerja, menjalin kerjasama dengan industri, serta menyediakan kursus keterampilan khusus	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3.	Optimalisasi database usaha mikro guna meningkatkan akurasi dan kelengkapan data, mempercepat pengambilan keputusan, mendukung penyusunan kebijakan tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program bantuan, memfasilitasi pemantauan dan evaluasi, serta meningkatkan	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan memperbarui dan mengintegrasikan data usaha mikro dalam satu database terpadu, mengembangkan sistem informasi yang mendukung, melakukan audit dan validasi data secara berkala, meningkatkan keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	transparansi dan akuntabilitas		
4.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi dan permodalan yang memadai bagi pelaku usaha mikro	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja akan menyediakan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi akses ke sumber pendanaan yang terjangkau	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan Pemulihan Usaha Mikro 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2023, diolah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025 adalah 11 program, 18 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar		9.939.118.290,00				9.884.652.808,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.325.445.100,00				2.323.300.560,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja		49 Persen	1.924.999.800,00			50 Persen	1.837.500.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih		87 Persen	1.924.999.800,00			90 Persen	1.837.500.000,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		150 Orang	1.924.999.800,00	Dana Transfer Umum-DBHCHT		150 Orang	1.837.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online		82 Persen 18 Persen	224.447.400,00			83 Persen 20 Persen	301.001.295,00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar		260 Orang	23.691.000,00			260 Orang	24.875.865,00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		50 Orang	23.691.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	24.875.865,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja		35.4 Persen	200.756.400,00			37,1 Persen	276.125.430,00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		130 Orang	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		140 Orang	87.490.830,00
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		46 Orang	125.756.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		52 Orang	188.634.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan		100 Persen	175.997.900,00			100 Persen	184.799.265,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama		90 Perusahaan	175.997.900,00			100 Perusahaan	184.799.265,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		5 Perkara	102.553.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Perkara	107.681.910,00
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		5 Perkara	1.095.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Perkara	1.149.960,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	75.967.395,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.613.673.190,00				7.561.352.248,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,50 Angka	4.968.291.579,00			83,00 Angka	5.079.125.085,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan		100 Persen	18.684.500,00			100 Persen	41.726.580,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	6.356.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	6.673.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	12.328.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	35.052.780,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar		100 Persen	3.941.500.772,00			100 Persen	3.939.486.375,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/ bulan	3.937.401.572,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		27 Orang/ bulan	3.934.215.165,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD		12 Laporan	4.099.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	5.271.210,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 Persen	86.911.000,00			100 Persen	99.480.150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perangkat Daerah yang sesuai							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	37.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Paket	51.660.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	49.111.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	47.820.150,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar		100 Persen	319.180.200,00			100 Persen	333.273.780,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.189.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	5.338.725,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	23.668.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	30.563.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8.227.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	12.237.330,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	28.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Paket	23.714.250,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	24.615.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	26.248.425,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	5.670.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	222.279.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	228.294.150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.207.500,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sesuai Kebutuhan		100 Persen	62.414.800,00			100 Persen	115.942.995,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	23.042.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	24.268.125,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	39.372.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	91.674.870,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar		100 Persen	350.972.800,00			100 Persen	357.507.360,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12 Laporan	67.948.800,00	Dana Transfer Umum-		12 Laporan	71.346.240,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Dana Bagi Hasil			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	283.024.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	286.161.120,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 Persen	188.627.507,00			100 Persen	191.707.845,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	94.479.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit	106.607.970,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	20.637.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit	20.209.875,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	73.511.007,00	Dana Transfer Umum-		1 Unit	64.890.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dana Bagi Hasil			
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan		25 Persen	143.286.000,00			26 Persen	308.642.565,00
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan		3 Unit Usaha	143.286.000,00			3 Unit Usaha	308.642.565,00
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit Usaha	143.286.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit Usaha	308.642.565,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi		36 Persen	18.685.000,00			37 Persen	19.619.250,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi		31 Persen	18.685.000,00			32 Persen	19.619.250,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota								
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		90 Unit Usaha	18.685.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		90 Unit Usaha	19.619.250,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)		32 Persen	75.705.300,00			33 Persen	68.990.565,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi		100 Persen	75.705.300,00			100 Persen	68.990.565,00
	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi		100 Unit Usaha	75.705.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Unit Usaha	68.990.565,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		37,8 Persen	239.800.000,00			38,5 Persen	251.790.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan		37,8 Persen	239.800.000,00			38,5 Persen	251.790.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		200 Orang	239.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		200 Orang	251.790.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha		38 Persen	524.491.211,00			40 Persen	411.373.527,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi		14 Persen	524.491.211,00			15 Persen	411.373.527,00
	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota		30 Unit Usaha	507.691.811,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		30 Unit Usaha	393.733.737,00
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya		10 Unit	16.799.400,00	Dana Transfer		10 Unit	17.639.790,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang keanggotaannya daerah Kab/Kota			Usaha		Umum-Dana Bagi Hasil		Usaha	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha		1,95 Persen	977.094.500,00			2 Persen	932.175.256,00
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital		2,5 Persen				2,6 Persen	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)		100 Persen	977.094.500,00			100 Persen	932.175.256,00
		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan		0,5 Persen				0,5 Persen	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata		9000 Unit Usaha	189.372.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		9000 Unit Usaha	198.843.706,00
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		50 Unit Usaha	434.555.800,00	Dana Transfer Umum-		50 Unit Usaha	362.507.040,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dana Bagi Hasil			
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		25 Unit Usaha	111.046.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Unit Usaha	116.598.510,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		50 Orang	242.119.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	254.226.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan		1.9 Persen	666.319.600,00			2 Persen	489.636.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan		100 Persen	666.319.600,00			100 Persen	489.636.000,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		100 Unit Usaha	666.319.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Unit Usaha	489.636.000,00

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar selama satu tahun anggaran. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam penyusunannya, penting untuk melakukan analisis situasi dan kondisi terkini sektor koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan di Kota Blitar. Analisis ini mencakup pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta identifikasi isu-isu dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan dengan RKPD sangat diperlukan. Harmonisasi ini juga melibatkan penyesuaian dengan program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan tidak adanya duplikasi kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, Renja ini tidak hanya menjadi pedoman operasional tahunan tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pembinaan yang semakin kompleks, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam upaya mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan koperasi aktif dan peningkatan kualitas kesehatan koperasi maka koordinasi

dengan perangkat daerah terkait maupun stakeholder harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga efektifitas kinerja akan lebih mudah tercapai.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur koperasi dan usaha mikro dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur koperasi dan usaha mikro.
d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

19. RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan Renja merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA PD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra PD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Oleh karenanya, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada dokumen RPJMD dan Renstra yang telah disusun.

Sehubungan dengan perubahan periodesasi dokumen perencanaan, tahun 2025 menjadi tahun transisi dengan periode perencanaan selanjutnya yaitu periode perencanaan tahun 2025 - 2029. Walaupun sebagai tahun transisi, penyusunan Renja Tahun 2025 masih berpedoman Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 dan akan dilanjutkan dengan penyusunan. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan Yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah. Sedangkan kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah pemantapan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 juga disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesi Nomor 630 Tahun 2023);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 –2025;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);;
16. Peraturan Walikota Blitar No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud & Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021–2026 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025
b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
c) Sebagai sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian target Renstra s/d tahun 2024, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta daftar program dan kegiatan tahun 2025.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V. Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar serta Pada tahun 2023, program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan indikator capaian target sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu, pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026, tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode renstra.

Perkiraan tingkat capaian target indikator program dalam Review Renstra PD sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan capaian target tahun 2024 secara singkat sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
209.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,75	0.00	81.00	86,17	106,38	81,25	86,17	105,41
209.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	0.00	5.00	5	100	5	10	50,00
209.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	0.00	4.00	4	100	4	8	50,00

209.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	224	0.00	56.00	56	100	56	112	50,00
209.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	20	0.00	5.00	5	100	5	10	50,00
209.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00	0.00	100.00	100	100	100	100	#VALUE!
209.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0.00	3.00	3	100	1	4	80,00
209.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	392	0.00	98.00	98	100	98	196	50,00
209.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0.00	2.00	2	100	1	3	75,00
209.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	0.00	3.00	3	100	2	5	50,00

209.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0.00	6.00	5	83,33	3	8	66,67
209.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	0.00	5.00	5	100	4	9	56,25
209.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
209.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	288	0.00	72.00	72	100	72	144	50,00
209.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	224	0.00	62.00	85	137,1	56	141	62,95
209.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	864	0.00	216.00	216	100	216	432	50,00
209.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	0.00	13.00	13	100	13	26	50,00
209.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	120	0.00	42.00	42	100	30	72	60,00

	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
209.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	128	0.00	62.00	62	100	32	94	73,44
209.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	kkal/ kapita/ hari	2200	0.00	2200.00	2.888,21	131,28	2200	131,28	5,97
		Angka konsumsi energi per kapita	kkal/ kapita/ hari	2133,34	0.00	2010.00	2.149,00	106,92	2051	106,92	5,01
209.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	84	0.00	100.00	100	100	84	100	119,05
209.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	0.00	3.00	3	100	2	5	125,00
209.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein	gr/ kapita/ hari	57	0.00	57.00	66,2	116,14	57	116,14	203,75
209.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	0.00	4.00	4	100	4	8	100,00
209.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00

209.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	%	16	0.00	13.83	63,82	461,46	14,52	461,46	2884,13
209.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	kali	10	0.00	2.00	2	100	2	100	1000,00
209.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	8	0.00	3.00	3	100	3	6	75,00
209.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	%	100	0.00	67.00	68,18	101,76	100	101,76	101,76
209.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
325.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	%	15,82	0.00	2.92	21,05	720,89	4,24	720,89	4556,83
		Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	%	6,9	0.00	15.07	16,33	108,36	15,07	108,36	1570,43
325.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	%	38,58	0.00	29.67	44,09	148,6	32,64	148,6	385,17
325.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	4	0.00	1.00	1	100	2	3	75,00

325.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	0.00	1.00	1	100	5	6	30,00
325.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	%	3,26	0.00	1.48	4,52	305,41	2,08	305,41	9368,40
325.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
325.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	160	0.00	30.00	30	100	40	70	43,75
325.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	juta rupiah	35.267	0.00	34230.00	34.230,00	100	34572	100	0,28
325.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	%	43	0.00	17.39	17,39	100	26,09	100	232,56

325.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Usaha	8	0.00	2.00	2	100	2	4	50,00
325.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	kg/ kapita/ tahun	19	0.00	18.40	21	114,13	18,6	114,13	600,68
325.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Usaha	40	0.00	40.00	40	100	20	60	150,00
325.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	40	0.00	20.00	20	100	10	30	75,00
327.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	%	29,03	0.00	19.35	50	258,4	22,58	258,4	890,11
		Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	31,48	0.00	20.37	97,2	477,17	24,04	477,17	1515,79
		Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	75	0.00	72.00	72,84	101,17	73	101,17	134,89

327.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100	0.00	40.00	41,67	104,18	60	104,18	104,18
327.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	0.00	3.00	3	100	2	5	125,00
327.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	%	50	0.00	20.00	27,58	137,9	30	137,9	275,80
327.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	16	0.00	2.00	2	100	3	5	31,25
327.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
327.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan	8	0.00	2.00	2	100	2	4	50,00
327.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	%	70	0.00	55.00	95,1	172,91	60	172,91	247,01

327.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	100	0.00	51.39	69,43	135,1	51,9	135,1	135,10
		Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	%	52,94	0.00	100.00	100	100	100.00	100	188,89
327.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	%	100	0.00	25.00	75	300	100	300	300,00
327.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	2	3	75,00
327.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana RPH yang ditingkatkan	Persen	90	0.00	69.90	83,33	119,21	70	119,21	132,46
327.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	0.00	3.00	3	100	3	6	200,00
327.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	100	0.00	100.00	100	100	100.00	100	100,00
		Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	72,22	0.00	44.44	64,28	144,64	55,56	144,64	200,28
		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	52	0.00	40.00	48	120	44	120	230,77

327.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	kasus	0	0	0	0	100	0	0	100,00
327.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	90	0.00	2.00	2	100	0	2	2,22
		Jumlah kader zoonosis	orang	90					42	42	46,67
327.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	%	71	0.00	63.00	80	126,98	67	126,98	178,85
327.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	16	0.00	3.00	4	133,33	5	9	56,25
327.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	%	48	0.00	36.00	105,46	292,94	40	292,94	610,29
327.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	0.00	1.00	1	100	1	2	100
		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	unit usaha	60					21	21	35,00
327.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	%	100	0.00	75.00	80	106,67	100	106,67	106,67

	Teknis Kesejahteraan Hewan										
327.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	2	0	2	3	150	0	3	150
		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	unit usaha	24					8	8	33,33
327.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100	0.00	100.00	100	100	100.00	100	100,00
327.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	%	33	0.00	13.33	17	127,53	13	127,53	386,45
327.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	400	0.00	100.00	100,11	100,11	100	200,11	50,03
327.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	53,85	0.00	33.00	34,62	104,91	41,66	104,91	194,82
		Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	58,33	0.00	33.00	66,67	202,03	44,62	202,03	346,36
327.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	%	30	0.00	15.00	45	300	20	300	1000,00

327.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	2	3	75,00
327.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	rekomendasi	4	0.00	1.00	4	400	1	5	125,00
327.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	8	0.00	2.00	2	100	2	4	50,00
327.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	rekomendasi	4	0.00	1.00	2	200	1	3	75,00
327.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	23,81	0.00	9,52	10,14	106,51	14,29	14,29	104,29
		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	%	38,82	0.00	25.00	36,13	144,52	30,56	36,13	93,07
		Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	0,93	0.00	0.93	2,78	298,92	0,93	2,78	298,92
327.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	%	50	0.00	35.00	73,66	210,46	40	210,46	420,92

327.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	0.00	3.00	3	100	3	6	200,00
327.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	84	0.00	31.00	34	109,68	27	61	72,62
327.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3	0.00	3.00	3	100	3	6	200,00

Rata-rata capaian kinerja program, kegatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia tecapai sebesar 83,33% dari target sebesar 100%. Target indikator tidak tercapai karena tidak bisa dilaksanakannya pengadaan kamera dan stabilizer yang terkendala tidak tersedianya produk sesuai dengan anggaran yang tersedia dan telah mempunyai sertifikat TKDN. Sedangkan beberapa target kinerja tercapai sangat tinggi yaitu lebih dari 120 %. Hal ini disebabkan karena :

1. Beberapa indikator program dan kegiatan (persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan, persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar, persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak, persentase peternak yang dibina, persentase obat hewan yang sudah teregister, persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik, persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar, persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia, persentase unit usaha produk hewan yang dibina, persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis, jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis, persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital, persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani, persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani) memiliki target yang terlalu rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk perencanaan selanjutnya.
2. Untuk indikator persentase balita rawan pangan yang tertangani, persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT dan persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM mencapai target lebih dari 120% karena meningkatnya ketersediaan anggaran dan perubahan standar harga serta besaran bantuan yang diberikan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menangani satu urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu Urusan Pangan, serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah di tetapkan sebagai IKU PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2023 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

No.	Indikator		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	✓		86,25	86,5	86,75	87	86,31	87,7	86,75	87	Tercapai 101,39% , kategori Berhasil
2	Produksi tanaman pangan dan holtikultura	Kwintal			198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	245.151,00	240.477,00	198.325,67	198.444,66	Tercapai 121,33%, kategori Sangat Berhasil
3	Produksi hasil peternakan	Kwintal			84.322	84.651	84.828	85.042	104.984,00	100.122,81	100.123	100.125	Tercapai 118,28%, kategori Sangat Berhasil
4	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal		✓	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2412,4	2.485,00	2.489,33	2.519,10	Tercapai 100,81%%, kategori Sangat Berhasil
5	Produksi hasil budidaya ikan hias	ekor			4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.699.324,00	4.719.733	4.740.864	4.762.198	Tercapai 100%, kategori Sangat Berhasil
6	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	%		✓	44,83	45,33	45,83	46,83	142,14	107,4	45,83	46,83	Tercapai 236,93% kategori Sangat Berhasil
7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi dan jagung)	ton/ ha		✓	18,64	18,65	18,66	18,68	21,34	21,72	18,66	18,68	Tercapai 116,46% kategori Sangat Berhasil
8	Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	%		✓	5	5	5	5	-44,07	69,41	5	5	Tercapai 1388,20 %, kategori sangat berhasil.

Secara umum capaian kinerja pelayanan pada tahun 2023 mencapai 100% atau lebih. Bahkan sebagian besar telah memenuhi target pada tahun 2025 yang merupakan tahun akhir Renstra. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular mencapai 69,41% pada tahun 2023 atau sebesar 1.388,20% dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan vaksinasi secara masif mampu menurunkan angka kejadian penyakit terutama PMK dan LSD yang pada tahun 2022 menjadi wabah penyakit pada ternak sapi di Kota Blitar. Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan adalah :

1. Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan.
2. Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis.
3. Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak.
4. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dan perikanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali Kota Blitar No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam struktur organisasi baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan hasil penilaian kewenangan, yaitu Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan yang menangani sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan; Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan menangani sub sektor ketahanan pangan dan perikanan; dan Bidang Peternakan menangani sub sektor peternakan. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Pembangunan Pertanian, Pangan dan Perikanan berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2025 masuk pada Prioritas Nasional 2 yaitu “ Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru”. Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui strategi :

1. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio.
2. Meningkatkan produkstivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, ternologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tatakelola dan rantai nilai hasil pertanian.
3. Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama disaat panen raya.
4. Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produkstif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
5. Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana

produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)
6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal
7. Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan
8. Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Sedangan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke depan antara lain :

1. Belum meratanya kemandirian pangan sehingga mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan.
2. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.
3. Belum optimalnya daya dukung lahan terhadap peningkatan produksi pertanian.
4. Perdagangan bebas komoditas pertanian dan perikanan mensyaratkan adanya standarisasi dan diversifikasi produk untuk mampu bersaing.
5. Masih kurangnya peningkatan tata kelola administrasi perangkat daerah (perencanaan dan akuntablitas kinerja) yang efektif dan efisien.

Dalam pengembangan pelayanan peluang yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain :

1. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dengan instansi-instansi vertikal terkait.
2. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)
3. Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.
4. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk pertanian.
5. Dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui program/kegiatan bidang pertanian, perikanan dan pangan yang selaras dengan program/kegiatan di Kota Blitar.

Bedasarkan RKP Tahun 2025, analisis kinerja pelayanan daerah sampai dengan 2023, isu strategis dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, maka strategi pencapaian target kinerja pada tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian
2. Peningkatkan pematuan harga pangan dan stok pangan
3. Pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.
5. Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran
6. Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian

Sedangkan kebijakan yang dilaksanakan adalah :

1. Menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis terpadu dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi pemantauan harga pangan dan stok pangan melalui penyusunan SOP dan koordinasi dengan pihak terkait (Satgas Pangan).
3. Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan.
4. Koordinasi lintas sektoral dalam penentapan dan pelaksanaan LP2B.
5. meningkatkan kualitas evalusi dan perencanaan kinerja dengan pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan serta sosialisasi dan review kinerja perangkat daerah.
6. Meningkatkan standar mutu produk hasil perikanan dan pertanian.
7. Meningkatan akses pasar produk hasil pertanian dan perikanan.
8. Meningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pertanian dan perikanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD 2021 - 2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2025 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5 Angka	9.028.925.320	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5 Angka	8.985.496.976	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	177.824.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	101.927.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.090.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.927.200	Penyesuaian standart harga
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	167.734.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	91.999.900	Penyesuan rincian obyek belanja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	6.456.155.374	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	6.629.955.509	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.453.385.374	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.627.185.509	Penyesuaian kebutuhan untuk ASN baru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5 Laporan	2.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	2.770.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	125.090.472	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	127.352.300	Penyesuaian rincian belanja dan standar harga
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	98 Orang	87.090.472	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	98 Orang	89.852.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Semua Kel/Desa	Perundang-Undangan				Semua Kel/Desa	Perundang-Undangan			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	352.059.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	326.427.500	Penyesuaian standart harga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.859.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.849.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	46.266.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.022.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.243.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	24.692.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.181.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.240.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.278.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.278.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	14.940.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	14.940.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	199.980.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	180.093.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.312.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.312.500	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	23.418.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	114.989.300	Penambahan sub kegiatan dan standar harga
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.119.300	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.240.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.418.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.630.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	1.433.345.535	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	1.453.902.195	Penyesuaian standart harga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	194.617.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	164.617.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.238.728.335	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.289.284.995	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 Persen	461.030.739	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 Persen	230.943.072	Penyesuaian rincian obyek belanja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	110.808.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	109.156.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.171.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.030.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	292.050.839	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	63.756.572	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	2200 kkal/kap/hari	114.775.500	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi perkapita /hari	2200 kkal/kap/hari	151.588.100	
			Angka konsumsi energi per kapita	2150 kkal/kap/hari				Angka konsumsi energi per kapita	2150 kkal/kap/hari		
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 angka	2.923.600	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 angka	28.840.000	Penambahan sub kegiatan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 Unit	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani	3 Unit	25.916.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Indonesia yang Dikembangkan			
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2.923.600	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2.923.200	
2.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi protein	57 gr/kap/thari	111.851.900	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi protein	57 gr/kap/thari	122.748.100	Penyesauian standar harga
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	58.600.100	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	69.496.400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	53.251.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	53.251.700	
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase balita rawan pangan yang tertangani	15.24 Persen	53.205.700	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase balita rawan pangan yang tertangani	15.24 Persen	53.203.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 kali	53.205.700	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 kali	53.203.600	Penyesuaian standart harga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	53.205.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	53.203.600	
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Tingkat keamanan pangan segar	100 Persen	10.250.200	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Tingkat keamanan pangan segar	100 Persen	10.249.700	
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100 Persen	10.250.200	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100 Persen	10.249.700	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.250.200	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.249.700	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	5,57 Persen	324.121.578	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	5,57 Persen	299.114.300	
			Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	15,82 Persen				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	15,82 Persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	35,61%	163.378.700	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	35,61%	138.375.700	Pengurangan rincian obyek belanja
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	111.230.300	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	86.227.500	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	52.148.400	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	52.148.200	
5.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	2,67%	160.742.878	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	2,67%	160.738.600	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.788.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.787.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	120.000.128	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	119.996.200	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	34.954.750	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	34.954.600	
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Volume penjualan hasil olahan perikanan	34918 juta rupiah	2.314.934.955	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Volume penjualan hasil olahan perikanan	34918 juta rupiah	110.974.300	
6.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	34,78%	25.622.200	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	34,78%	25.622.200	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	25.622.200	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	25.622.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	18,8 kg/kapita/ tahun	2.289.312.755	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	18,8 kg/kapita/ tahun	85.352.100	Pengurangan rincian obyek belanja (revitalisasi PIAIH)
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 Ton	55.352.100	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	55.352.100	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	2.233.960.655	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	30.000.000	
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase sarana pertanian yang tersedia	74%	800.774.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase sarana pertanian yang tersedia	74%	539.227.600	
			Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	27,78%				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	27,78%		
			Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	25,81%				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	25,81%		
7.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	80%	709.595.600	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	80%	448.050.000	Penyesuaian rincian obyek belanja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	455.842.900	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	373.050.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	253.752.700	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	75.000.000	
7.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang dibina	40%	53.535.700	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang dibina	40%	53.535.300	Penyesuaian standar harga
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	53.535.700	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	53.535.300	
7.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100%	32.850.500	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten /Kota		Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100%	32.850.200	Penyesuaian standar harga
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	23.928.700	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/	2 Laporan	23.928.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Tanaman Skala Kecil			
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	8.921.800	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	8.921.700	
7.4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase obat hewan yang sudah teregister	65%	4.792.200	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase obat hewan yang sudah teregister	65%	4.792.100	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4.792.200	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4.792.100	
8.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	52%	1.946.245.154	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	52%	623.037.292	
			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100%				Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100%		
8.1	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100%	137.288.400	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100%	108.222.592	Penyesuaian rincian belanja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	2.120.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	84.400.000	
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	135.168.400	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	1 Dokumen	23.822.592	
8.2	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70%	1.808.956.754	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70%	514.814.700	Penyesuaian target dan rincian belanja
			Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan Persentase prasarana pertanian yang tersedia	80%				Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan Persentase prasarana pertanian yang tersedia	80%		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	611.250.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	4.950.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	225.227.520	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	98.827.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	11.230.614	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	22.275.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	611.250.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	203.750.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	349.998.620	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	185.012.200	
9.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	48 Persen	227.805.640	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	48 Persen	241.503.800	
			Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100 persen				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100 persen		
			Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	61,11 persen				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	61,11 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 Angka	41.055.400	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota		Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 Angka	49.134.900	Penyesuaian standar harga
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	42 Orang	41.055.400	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	42 Orang	49.134.900	
9.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	69%	146.104.940	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	69%	153.876.300	Penyesuaian rincian belanja
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	29.015.850	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	26.812.100	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	117.089.090	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	127.064.200	
9.3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	44%	28.331.500	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	44%	27.464.700	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	8.619.300	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	8.811.000	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21 Unit Usaha	19.712.200	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21 Unit Usaha	18.653.700	
9.4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Prosentase KIE yang yang terlaksana	100%	12.313.800	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Prosentase KIE yang yang terlaksana	100%	11.027.900	Penyesuaian standar harga
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 Unit	12.313.800	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 Unit	11.027.900	
10.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100%	16.041.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100%	17.675.000	
10.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13%	16.041.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13%	17.675.000	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	16.041.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	17.675.000	
11.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	50%	39.335.250	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	50%	18.184.600	
			Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	49,23%				Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	49,23%		
11.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	20 unit	28.012.400	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	20 unit	7.649.400	Penyesuaian rincian belanja
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	28.012.400	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	7.649.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
11.2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.524.800	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.524.600	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	5.524.800	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	5.524.600	
11.3	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.798.050	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.010.600	Penyesuaian rincian belanja
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	5.798.050	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	5.010.600	
12.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	33.33 Persen	1.627.139.800	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	33.33 Persen	1.614.072.200	
			Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	19.05 Persen				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	19.05 Persen		
			Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0.93 Persen				Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0.93 Persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
12.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	45%	1.627.139.800	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	45%	1.614.072.200	Penyesuaian rincian belanja
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	72.465.800	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	59.124.600	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Unit	1.550.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Unit	1.550.000.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	4.674.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	4.947.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak saja bersifat top down melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan PD.

Pada Tahun 2024 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka PD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi dan ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

No.	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	POKIR DPRD 2025							
1	Pembangunan saluran irigasi sawah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rt.03 Rw.09 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar	Terbangunnya saluran sawah (JITUT)	240 m'	Diakomodasi dalam RENJA 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan PD di Kabupaten / Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian :

No.	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Keterangan
	A. Nasional		
1.	a) Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio. b) Meningkatkan produkstivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, ternologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tatakelola dan rantai nilai hasil pertanian. c) Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama disaat panen raya. d) Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produkstif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional. e) Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) f) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal g) Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan h) Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.	Arah Kebijakan RKP 2025	
2.	a) Terjaganya ketahanan pangan nasional. b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. c) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. d) Meningkatkan kualitas SDM pertanian. e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.	Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024	

No.	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Keterangan
3.	a) Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat. b) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan. c) Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan. d) Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. e) Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan	Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2020-2024	
	B. PROPINSI		
1	a) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bearagam bergizi seimbang dan aman (B2SA). b) Meningkatkan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan konsumsi pangan tingkat rumah tangga sekaligus peningkatan pendapatan. c) Meningkatkan pengawasan PSAT pre market dan post market untuk menjamin peredaran pangan yang aman dikonsumsi. d) Meningkatkan ketersediaan sarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, alsintan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. e) Penyediaan infrastruktur pertanian dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura. f) Optimalisasi pengamanan dan perlindungan tanaman. g) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian h) Peningkatan nilai evaluasi SAKIP melalui perencanaa, pengukuran, pelaporan , evaluasi dan pencapaian kinerja yang akuntabel.	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026	
2	a) Meningkatkan Produksi perikanan budidaya b) Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar c) Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut d) Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan e) Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan	Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	

3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Berdasarkan Perubahan Ketiga Rencana Strategik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 - 2026 serta hasil analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.

Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Tahun 2025 - 2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	74,68	79,25	75,18 (angka)	75,68 (angka)	76,18 (angka)
		Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita	Pangsa pengeluaran pangan adalah perbandingan antara pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan dengan total pengeluaran yang diukur dalam persen	N/A	N/A	42,36 %	42,16 %	41,96 %
1.2	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.	86,5	87,7	86,75 (angka)	87 (angka)	88,5 (angka)
2.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.	197,81 milyar rupiah	213,52 milyar rupiah	198,8 milyar rupiah	199,79 milyar rupiah	200,79 milyar rupiah
		Nilai Tukar Petani	NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karen a mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani di bandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.	N/A	N/A	101,67 (angka)	102,17 (angka)	102,67 (angka)
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan pembudiday a ikan karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan /dijual pembudidaya ikan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan pembudidaya ikan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk	N/A	N/A	101 (angka)	101,5 (angka)	102 (angka)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			konsumsi rumah tangga pembudidaya ikan.					
2.1	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Produksi tanaman pangan adalah hasil panen dari budidaya tanaman pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang yang dibudidayakan pada lahan sawah. - Produksi Hortikultura adalah hasil panen budidaya tanaman sayuran dan buah - buahan baik semusim maupun tahunan yang dibudidayakan pada lahan pekarangan dan lahan sawah.	198.206,74 kwintal	240.477,00 kwintal	198.325,67 kwintal	198.444,66 kwintal	198.563,73 kwintal
		Jumlah Produksi hasil peternakan	Hasil utama peternakan di antaranya daging, susu, dan telur, yang menjadi makanan untuk manusia	84.651,00 kwintal	100.122,81 kwintal	100.123 kwintal	100.125 kwintal	100.126 kwintal
		Jmlah Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	- Ikan konsumsi adalah ikan yang berhabitat di air tawar/payau yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh manusia. - Budidaya ikan konsumsi adalah kegiatan memelihara,membesarkan ikan konsumsi dan memanen hasilnya.	2.464,92 kwintal	2.485,00 kwintal	2.489,33 kwintal	2.519,10 kwintal	2.549,33 kwintal
		Jumlah Produksi hasil budidaya ikan hias	- Ikan Hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun air laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi tapi untuk memberikan nilai estetika/ memperindah. - Budidaya ikan hias adalah kegiatan memelihara, membesarkan, membiakkan ikan hias dan memanen hasilnya.	4.719.626 ekor	4.719.733 ekor	4.740.863 ekor	4.762.198 ekor	4.783.627 ekor
2.2	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	Nilai produksi hasil pertanian adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dihitung komulatif dalam satu tahun.	N/A	N/A	92.181.425,08 ribu rupiah	94.025.053,58 ribu rupiah	95.905.554,66 ribu rupiah
		Nilai produksi hasil perikanan	Nilai produksi hasil perikanan adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pemasaran ikan segar dan omset usaha olahan hasil perikanan yang dihitung komulatif dalam satu tahun.	N/A	N/A	34.977.794,39 ribu rupiah	35.677.350,27 ribu rupiah	36.390.897,28 ribu rupiah
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	84,71 (A)	84,77 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
3.1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	84,71 (A)	84,77 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun untuk mendukung pecapaian visi Walikota Blitar yaitu untuk mewujudkan Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat Pada tahun 2026. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menggemban misi Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital yang telah diterjemahkan dalam renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Hal tersebut dimaksudkan juga untuk mendukung program prioritas nasional yaitu untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja PD tahun 2023 analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025. Dengan adanya perubahan pada SIPD RI, menyebabkan adanya penyesuaian nomenklatur pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 terdapat 12 program, 30 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Lokasi program kegiatan tersebut terdapat di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo dengan sasaran ditujukan kepada masyarakat petani, peternak dan pembudidaya perikanan yang tergabung dalam kelompok dan yang berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Sumber pendanaan program dan kegiatan berasal dari dana PAD, DAU, DAK Non Fisik dan DBHCHT. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				12.934.327.468				16.423.340.764
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.471.329.576				10.841.300.529
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.471.329.576				10.841.300.529
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81.5 Angka	9.256.291.176			81,75 angka	10.578.745.948
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 Persen	101.944.500			100 Persen	113.702.587
2	09	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	9.927.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	11.719.911

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	92.017.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	101.982.676
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	6.899.955.509			100 Persen	7.608.788.410
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	6.897.185.509	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56 Orang/bulan	7.605.560.998
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	2.770.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	3.227.412
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 Persen	127.352.300			100 Persen	155.940.061
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	37.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000
2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Orang	89.852.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98 Orang	105.940.061

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	327.204.300			100 Persen	707.612.967
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.849.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	11.190.558
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	41.799.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	227.078.508
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	24.692.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	121.645.362
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	70.146.136
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	23.278.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	40.356.266
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	14.940.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		72 Dokumen	17.357.429
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Laporan	180.093.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56 Laporan	199.838.708

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.06	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.312.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 Persen	89.989.300			100 Persen	0,00
2	09	01	2.07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	36.119.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
2	09	01	2.07	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	18.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
2	09	01	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	22.630.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	0,00
2	09	01	2.07	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 Persen	1.453.902.195			0 Unit	1.401.167.811
2	09	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216 Laporan	164.617.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	162.439.476
2	09	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	1.289.284.995	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		216 Laporan	1.238.728.335

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 Persen	255.943.072			13 Laporan	591.534.112
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	109.156.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	178.689.994
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	58.030.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	59.199.256
2	09	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32 Unit	30.000.000
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	63.756.572	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	323.644.862
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari		2200 kkal/kap/ hari	151.585.100			2200 kkal/kap/ hari	165.314.081
						Angka konsumsi energi per kapita		2150 kkal/kap/ hari				2150 kkal/kap/ hari	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah		100 angka	28.840.000			100 angka	3.428.214
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	25.916.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	-
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.923.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.428.214
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein		57 gr/kap/thari	122.745.100			57 gr/kap/thari	161.885.867
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	69.493.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	98.549.604
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	53.251.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	63.336.263
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani		15.24 Persen	53.203.600			16 Persen	82.654.425

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan		2 kali	53.203.600			2 kali	82.654.425
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	53.203.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	82.654.425
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar		100 Persen	10.249.700			100 Persen	14.586.075
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji		100 Persen	10.249.700			100 Persen	14.586.075
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.249.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	14.586.075
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.462.997.892				5.582.040.235
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				410.088.200				540.811.781

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis		5,57 Persen	299.113.900			6,9 Persen	389.017.415
						Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas		15.82 Persen				15,82 Persen	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan		35.61 Persen	138.375.300			38,58 Persen	128.823.117
3	25	04	2.02	000 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	86.227.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kelompok	86.280.410
3	25	04	2.02	000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kelompok	52.147.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Kelompok	42.542.707
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan		2.67 Persen	160.738.600			3,26 Persen	260.194.298
3	25	04	2.04	000 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.787.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.077.410

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	119.996.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	203.718.118
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	34.954.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	50.398.770
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan		34918 Juta Rupiah	110.974.300			35267 juta rupiah	151.794.366
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu		34.78 Persen	25.622.200			43,48 Persen	50.598.122
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Usaha	25.622.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit Usaha	50.598.122
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun		18.8 kg/ kapita/ tahun	85.352.100			19 kg/kapita/ tahun	101.196.244

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ton	55.352.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Ton	50.598.122
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Pelaku Usaha	50.598.122
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.052.909.692				5.041.228.454
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia		74 Persen	538.877.200			75 Persen	479.157.183
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian		80 Persen	448.050.000			100 Persen	209.738.764
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	373.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	104.393.633
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	105.345.131
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase peternak yang dibina		40 Persen	57.675.700			50 Persen	173.618.537

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Kewenangan Kabupaten/Kota								
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	57.675.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	173.618.537
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar		100 Persen	28.409.500			100 Persen	89.542.820
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	19.587.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	66.542.820
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.821.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	23.000.000
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister		65 Persen	4.742.000			70 Persen	6.257.062
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.742.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.257.062
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik		52.42 Persen	675.837.292			52,94 Persen	1.989.364.412

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia		100 Persen	98.050.000			100 Persen	99.775.681
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	84.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	6.655.869
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	93.119.812
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia		70.33 Persen	577.787.292			70,05 Persen	1.889.588.731
						Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan		80 Persen				90 Persen	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	4.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	150.000.000
3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	98.827.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	236.488.896
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	85.247.592	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	11.230.614
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kota Blitar, Semua	3 Unit	203.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	1.093.955.625

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	185.012.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	397.913.596
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		48 Persen	241.123.700			52 Persen	341.390.959
						Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani		100 Persen				100 Persen	
						Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar		61.11 Persen				72,22 Persen	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis		0 Angka	49.134.800			0 Angka	78.418.386
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Orang	49.134.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	78.418.386
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia		69 Persen	153.696.300			71 Persen	229.300.011

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	26.812.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	38.669.387
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	126.884.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	190.630.624
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina		44 Persen	27.264.700			48 Persen	27.840.928
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.811.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	9.799.047
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit Usaha	18.453.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit Usaha	18.041.881
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana		100 Persen	11.027.900			100 Persen	5.831.634
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	11.027.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	5.831.634
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur		100 Persen	17.675.000			100 Persen	111.206.667
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT		13 Persen	17.675.000			13 Persen	111.206.667

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ha	17.675.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Ha	111.206.667
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis		50 Persen	18.124.300			58,33 Persen	93.730.592
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis		20 unit	7.649.400			30 unit	82.707.300
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.649.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	82.707.300
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan		1 Rekomendasi	5.524.300			1 rekomendasi	5.688.921
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.524.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	5.688.921

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan		1 Rekomendasi	4.950.600			1 rekomendasi	5.334.371
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.950.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.334.371
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital		33.33 Persen	1.561.272.200			38,89 Persen	2.026.378.641
						Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis		19.05 Persen				23,81 Persen	
						Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani		0.93 Persen				0,93 Persen	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM		45 Persen	1.561.272.200			50 Persen	2.026.378.641
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	6.324.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	66.782.970
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	1.550.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		21 Unit	1.953.530.168
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	4.947.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	6.065.503

Sedangkan tindak lanjut untuk langkah perbaikan LKJIP 2023 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian.	Pelatihan pembuatan Pupuk Organik dan pendampingan PTPS	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
4	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	Pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan pemasaran hasil perikanan dengan pemanfaatan platform digital Pelatihan pengemasan hasil olahan perikanan	- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
6	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
7	Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias di Kelompok Wanita Tani (KWT)	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangann terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
   a. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
   b. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2025;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaa Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiaatn tahun 2025;
   d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih matang, sehinggga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.

20. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Tahun 2025.
b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
c. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.
d. Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan kesejahteraan Masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi”, dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya

mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1; dan

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021–2026 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025
b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
c) Sebagai sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan dokumen RKPD Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Pada sub bab ini disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan telaah terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM. Pada sub bab ini disajikan table Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Isu – isu penting dapat mengambil dari LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai hasil persandingan antara rancangan awal RKPD dengan program/kegiatan/sub kegiatan hasil identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah. Pada sub bab ini disajikan table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil telaah atas Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Pada bab ini juga berisi Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan rekapitulasi mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dengan mencantumkan tagging program/kegiatan/sub kegiatan terhadap SPM/Tematik/Tindaklanjut LKJIP/Keterangan lain. Pada bab ini juga berisi Tabel Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026. Pada bab ini juga berisi Tabel Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag kota Blitar tahun lalu (2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Disperindag Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06	Urusan Perdagangan										
	Bidang urusan aaperdagangan										
	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,7	%	25,11	24,75	25,03	101	24,8	74,94	3,03
	Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,02	indeks	82,8	81	85,01	104,9	85,02	85,01	0,9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	indeks	80	81	84,81	104,70	80,5	83,40	101,71
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	dokumen	10	10	10	100%	10	20	40,00
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	laporan	8	8	8	100 %	8	16	40,00
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/ bulan	58	58	58	100	58	58	96,67
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	20	laporan	4	4	4	100	4	8	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang		300	300	100	300	600	
	Sub Keg. Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket		5	5	100	5	10	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	55	paket	11	11	11	100	11	22	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	paket	3	3	3	100	3	6	35,29
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	155	paket	6	31	31	100	31	62	40,00
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15	paket	15	15	15	100	15	45	3
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35	paket	5	7	7	100	7	14	40,00
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	180	dokumen	36	36	36	100	36	72	40,00
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	laporan	50	50	50	100	50	100	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	20,00
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	660	rekening	132						
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan							
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	unit	3	3	3	100	3	6	40,00
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	unit	4	4	4	100	4	8	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	unit	1	1	1	100	1	2	40,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	75	%	4,75	68	50	72,46	70,5	70,5	94,00
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	90	%	70	70	54,54	77,91	70	70	77,78
	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	21	unit	4	4	4	100	4	8	38,10
	Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	7	7	7	100	9	23	3,2
	Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	5	%	5	5	5	100	6	16	320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4	dokumen		4	4	100	4		
	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	3	dokumen		3	3	100	3	9	3
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100	%		100	100	100	100	100	100,00
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	2	%		2	2	100	2	6	3
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	laporan	2	2	2	100	2	6	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10	laporan		2	2	100	2	4	40,00
	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100	%		100	100	100	100	100	100
	Sub Keg. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	2	laporan		2	2	100	2	6	3
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	55	%		35	56,2	160,57	40	56,2	102,18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	6.000	unit		5500	4431	80,56	5.700	5700	95,00
	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ditera ulang	6.000	unit		5500	4431	80,56	5.700	5.700	95,00
	Sub Keg. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	1.550	orang		300	940	113	350	1.290	83,23
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	6	%		2	2,07	103,50	2,5	2,07	34,50
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan		%		2,5			3,5		
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	dokumen		3	3	100	4		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	dokumen		4	4	100	5	13	
	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	6	dokumen		6	6	100	6	12	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil, karena berkaitan dengan ekonomi yang sudah mulai membaik dan mulai beranjak naik walaupun masih dalam masa pemulihan karena terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

No.	Indikator	SPM/IKK /SPM	Target Renstra SKPD pada Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi capaian pada tahun		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	IKU	1,75 %	2	2,25	2,5	3	1,85	2,22	2,22	2,24%	2,25 %	Realisasi tahun 2023 diatas target
2	Persentase Peningkatan produktivitas Industri	IKU	0,75 %	1	1,5	2	2,5	0,83	1,072	1,072	1,5%	2 %	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A (80)	A(81)	A(81,5)	A(85)	85,02	A(84)	A(85,01)	A(85,01)	A(85,02)	A(85,02)	Realisasi tahun 2023 diatas target
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	IKK	15	15,5	16	16,5	17	5,27	15,5	15,5	16	16,5	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	IKK	70	70	70	70	70	53,91	70	70	70	70	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	IKK	35	40	45	50	50	56,27	40	40	45	50	
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	IKK	1	1,3	1,5	1,7	1,7	1,45	1,3	1,3	1,5	1,7	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKK	5,50	6	6,50	7	7	100	6	6	6,50	7	

No.	Indikator	SPM/IKK /SPM	Target Renstra SKPD pada Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi capaian pada tahun		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Kota Blitar	IKK	Kota Blitar tidak memiliki kawasan Industri										

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standart pelayanan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar
3. Pembinaan dan penataan PKL sesuai Perwali dengan melibatkan OPD terkait (LKJIP)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disajikan secara lengkap pada tabel 2.3 Dokumen RENJA ini.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KOTA BLITAR

SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				17.303.444.697					13.026.514.383	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat Daerah - Penyesuaian pagu anggaran - Pemenuhan anggaran untuk pemenuhan sarpras/gedung perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	7.391.751.595	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	8.349.936.487	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.734.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.411.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.003.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.050.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	8 laporan	6.730.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	6.360.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.970.783.010	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	6.310.678.821	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	57 pegawai	5.965.424.910	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	6.305.321.021	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	12 laporan	5.358.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKP	12 laporan	5.357.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	100 %	154.251.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	209.599.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			daerah yang sesuai standar								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	91.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	111.255.200	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350 orang	63.051.200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	350 orang	98.344.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Presentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	137.002.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Presentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	228.469.200	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	8.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	48.164.200	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	55.051.200	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	420.338.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	552.281.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Paket	20.197.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	34.991.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	54.308.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	84.308.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	7.577.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.468.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	17 paket	53.987.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	80.025.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan	6 paket	35.350.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	45.070.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			penggandaan yang disediakan								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	36 dokumen	6.840.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	243.519.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	290.577.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standar	100%	441.253,929	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standar	100%	643.673.566	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	205.864.929	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	360.549.566	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	235.389.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	283.024.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%	258.388.456	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%	395.823.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	150.379.456	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	185.376.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	25.509.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	25.987.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	28.020.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	7.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	34.871.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	137.002.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	228.489.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	73.950.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	180.305.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	7.068.446.350	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	4.694.068.700	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	80 %	6.204.596.600	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	80 %	3.914.088.800	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	2.631.654.400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	414.394.800	
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2 unit	3.572.942.200	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	11 Unit	3.499.694.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 Persen	863.849.750	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 %	779.979.900	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	446.438.500	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	362.568.700	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	417.411.250	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	417.411.200	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	194.267.400	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100%	166.013.400	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Kota Blitar	Presentase barang penting yang diawasi	100%	92.438.600	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Kota Blitar	Presentase barang penting yang diawasi	100%	82.209.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	92.438.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	82.209.800	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100%	77.728.800	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100 %	73.903.600	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	77.728.800	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	73.903.600	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di		persentase pedagang pupuk dan pestisida	100 %	24.100.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di	Kota Blitar	persentase pedagang pupuk dan pestisida	100 %	9.900.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		bersubsidi yang diawasi			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		bersubsidi yang diawasi			
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	24.100.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	9.900.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	45%	170.509.038	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	45%	128.971.500	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	5.800 unit	170.509.038	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	5.800 unit	128.971.500	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	74.867.038	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	108.071.400	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	200 orang	95.642.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	160 orang	20.900.100	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	3,5%	2.478.470.314	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	3,5%	2.371.970.314	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5%	2.478.470.314	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5%	2.371.970.314	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	69.069.745	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	75.569.745	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	2.325.526.569	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	2.215.526.569	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	83.874.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	83.874.000	
Jumlah					17.303.444.697					15.710.960.401	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum OPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjaringan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (grass roots) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan.

c. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana PD Kota pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan.

d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan PD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum PD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan.

Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum PD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum PD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KOTA BLITAR

SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jl. Bengawan Solo GG V No. 18 Kel. Pakunden Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Paket	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jl. Riam Kanan No. 42 RT 03 RW 08 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKPD 2025 adalah "Pemantapan kesejahteraan rakyat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi" yang dijabarkan dalam 6 Prioritas, yaitu :

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di tahun 2025 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya	24,75	25,03	25,03	25,035	29
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		10,01	9,85	10,01	10,11	10,12
	Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Volume Usaha Perdagangan adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa pada suatu periode tahun buku yang bersangkutan dan nantinya akan mendatangkan suatu pendapatan	2	2,22	2,25	2,5	3
	Sasaran 2 : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	Produktivitas adalah produksi dari sejumlah komoditi dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri dalam kurun waktu tertentu	1	1,072	1,5	2,5	7,75
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	A (81)	A (85,01)	A (86,04)	A (86,04)	A (86,04)

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.3 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

3.4 Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
2. Optimalisasi pengawasan perdagangan
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
4. Peningkatan pemasaran hasil industri

Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

3.5 Program dan Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 adalah 5 Program, 14 Kegiatan dan 35 sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
						Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	24,9	
						Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	[(Volume Usaha Perdagangan tahun n - Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1))/ Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1))] x 100 %	%	2,5	
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	%	73,5	32.716.886.000
3	30	03	2	01		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	{Jumlah bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik/ Jumlah bangunan pasar rakyat yang ada} x 100 %	%	*80*	*31.625.000.000*
3	30	03	2	01	01	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan pada tahun n	unit	8	15.812.500.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	03	2	01	02	Sub Keg.Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun n	unit	9	15.812.500.000
3	30	03	2	02		Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	(Jumlah usaha perdgangan yang dibina / jumlah usaha perdagangan) x 100%	%	*6*	*1.091.886.000*
3	30	03	2	02	01	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokumen	4	545.943.000
3	30	03	2	02	02	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokumen	4	545.943.000
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	(Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan / Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang ada) x 100%	%	100	291.500.000
3	30	04	2	01		Keg.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	(Jumlah barang penting yang diawasi / jumlah barang penting yang harus diawasi) x 100%	%	*100*	*90.500.000*

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	04	2	01	01	Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat pada tahun n	laporan	2	90.500.000
3	30	04	2	02		Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	(jumlah harga dan stok barang yang diawasi / jumlah harga dan stok barang yang harus diawasi) x 100%	%	*100*	*110.500.000*
3	30	04	2	02	01	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah hasil dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada tahun n	laporan	3	110.500.000
3	30	04	2	03		Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	(Jumlah pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi / jumlah pedagang pupuk dan pestisida yang ada) x 100%	%	*100*	*90.500.000*
3	30	04	2	03	02	Sub.Keg. Pengawasan pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah hasil pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	laporan	2	90.500.000
3	30	06				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	%	50	709.696.500

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	06	2	01		Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun n	unit	6000	709.696.500
3	30	06	2	01	01	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n	unit	5900	291.977.000
3	30	06	2	01	02	Sub Keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina pada tahun n	orang	300	417.719.500
						Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,91	
						Sasaran : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	[(Produktivitas industri tahun n - Produktivitas industri tahun (n-1))] /produktivitas industry tahun (n-1))] x 100%	%	2	
3	31	02				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	{(Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1)/Jumlah IKM tahun (n-1)} x 100 %	%	5	2.430.225.000
3	31	02	2	01		Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	(Jumlah IKM yang dibina / Jumlah IKM) x 100%	%	*5*	*2.430.225.000*

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	31	02	2	01	02	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada tahun n	dokumen	4	500.850.000
3	31	02	2	01	05	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada tahun n	dokumen	5	1.600.375.000
						Sub.Keg.Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry pada tahun n	dokumen	5	329.000.000
						Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A (82)	
1	06	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n	%	81,5	9.108.329.988
1	06	01	2	01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar tahun n / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus disusun tahun n) x 100 %	%	*100*	*18.973.000*

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	01	01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tahun n	dokumen	10	10.628.000
1	06	01	2	01	06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada tahun n	laporan	8	8.345.000
1	06	01	2	02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	*100*	*7.593.520.388*
1	06	01	2	02	01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada Tahun berjalan	orang	60	7.586.617.888
1	06	01	2	02	02	Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	4	6.502.500
1	06	01	2	05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	*100*	*231.525.000*

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	05	02	Sub keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pada tahun berjalan	paket	5	98.500.000
1	06	01	2	05	10	Sub keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan	orang	300	133.025.000
1	06	01	2	06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar tahun n / jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus disediakan tahun n) x 100 %	%	*100*	*436.733.600*
1	06	01	2	06	01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	11	12.850.000
1	06	01	2	06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	4	76.476.750
1	06	01	2	06	03	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	paket	7	51.773.400
1	06	01	2	06	04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	15	115.015.000
1	06	01	2	06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan pada tahun berjalan	paket	6	44.100.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	06	06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	dokumen	36	8.612.700
1	06	01	2	06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	127.905.750
1	06	01	2	07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	(Jumlah BMD yang tersedia sesuai standart/Jumlah BMD yang harus disediakan)x 100%	%	100	300.900.000
1	06	01	2	07	11	Sub Keg.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	300.900.000
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	80.000.000
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	8.000.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	30.000.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standart / Jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	*100*	*401.600.000*
1	06	01	2	08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	laporan	48	201.600.000
1	06	01	2	08	04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	200.000.000
1	06	01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar tahun n / jumlah BMD yang harus dipelihara tahun n) x 100 %	%	*100*	*125.078.000*
1	06	01	2	09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaterpelihara pada tahun berjalan	unit	13	33.424.000
2	23	01	2	09	00 05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	2	7.500.000
1	06	01	2	09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	unit	4	18.000.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	09	09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	46.420.000
1	06	01	2	09	11	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	5	27.234.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan tahun 2025 dan pagu indikatif tahun 2025 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk mendukung pencapaian sasaran, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2025 serta mendukung terwujudnya target capaian nasional, provinsi dan Daerah.

Tabel. 4.1.

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023

pada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan pembangunan pasar ayam.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
2	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan menata PKL dengan lebih baik lagi sesuai dengan perwali yang ada dan tetap berkoordinasi dengan OPD tang terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan
3	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM		
4	Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK	Melaksanakan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan OPD terkait	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
5	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industriyang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
6	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat -

4.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KOTA BLITAR

Nama PD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	.			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.710.960.401				20.532.057.700
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	81	8.429.936.487			84	8.485.790.951
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	9.411.200	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	3.325.051
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar	10 dokumen	3.050.700	Dana Transfer Umum-DAU		10 dokumen	3.325.051
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	8 dokumen	6.360.500	Dana Transfer Umum-DAU		8 dokumen	7.448.820

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	6.390.678.821	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	6.393.542.924
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	57 orang	6.385.321.021	Dana Transfer Umum-DAU		57 pegawai	6.367.634.364
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Kota Blitar	12 laporan	5.357.800	Dana Transfer Umum-DAU		12 laporan	5.908.560
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100 %	209.599.200	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	195.078.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar	4 paket	111.255.200			4 paket	95.325.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Blitar	350 orang	98.344.000	DBHCHT		350 orang	99.753.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	552.281.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	545.266.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	1 Paket	34.991.900	Dana Transfer Umum-DAU		1 paket	35.145.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	4 paket	84.308.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 paket	74.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	10.468.800	Dana Transfer Umum-DAU		1 paket	11.644.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	15 Paket	80.025.000	Dana Transfer Umum-DAU		15 paket	83.987.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	4 Paket	45.070.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 paket	48.350.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kota Blitar	36 dokumen	6.840.000	Dana Transfer Umum-DAU		36 dokumen	7.840.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	15 laporan	290.577.500	Dana Transfer Umum-DAU		15 laporan	283.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	643.673.566	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	674.455.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	360.649.566	Dana Transfer Umum-DAU		24 laporan	380.405.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	283.024.000			24 laporan	294.050.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	395.823.500	Dana Transfer		100 %	431.075.156

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Umum-DAU			
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Blitar	2 unit	28.020.000			2 unit	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	17 unit	185.376.500	Dana Transfer Umum-DAU		17 unit	186.379.456
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	10 unit	25.987.000	Dana Transfer Umum-DAU		10 unit	36.195.700
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Blitar	1 unit	121.569.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 unit	125.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Blitar	2 unit	34.871.000				38.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	Kota Blitar	100 %	228.469.200				311.100.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Blitar	2 unit	48.164.200			2 unit	50.000.000
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Blitar					2 unit	75.500.000
	Pengadaan Pealatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar	2 unit	180.305.000				185.600.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Kota Blitar	72%	4.694.068.700	Dana Transfer Umum-DAU		%	7.221.976.604
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	Kota Blitar	80 %	3.914.088.800	Dana Transfer Umum-DAU		%	5.891.716.604
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	2 unit	414.394.800	Dana Transfer Umum-DAU		2 unit	2.256.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	11 unit	3.499.694.000			11 unit	3.635.716.604

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	6 %	779.979.900	Dana Transfer Umum-DAU		%	1.330.260.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	5 Dokumen	362.568.700	Dana Transfer Umum-DAU		5 dokumen	950.260.000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	4 Dokumen	417.411.200	Dana Transfer Umum-DAU		4 dokumen	380.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Kota Blitar	100 %	166.013.400	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	253.386.749
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	Kota Blitar	100%	82.209.800			100%	112.446.749
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	2 laporan	82.209.800			2 laporan	112.446.749
	Pengendalian Harga, dan Stok	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	Kota Blitar	100%	73.903.600	Dana Transfer		100 %	98.738.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					Umum-DAU			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	4 laporan	73.903.600	Dana Transfer Umum-DAU		4 laporan	98.738.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	Kota Blitar	100 %	9.900.000			100 %	42.200.000
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	2 laporan	9.900.000			2 laporan	42.200.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	Kota Blitar	45 %	128.971.500	Dana Transfer Umum-DAU		%	224.820.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Kota Blitar	5.800 Unit	108.071.400	Dana Transfer		5.500 Unit	224.820.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Umum-DAU			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Blitar	5500 unit	20.900.100	Dana Transfer Umum-DAU		5500 unit	89.000.000
	Pengawasan/Penyulu han Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Blitar	160 orang	95.642.900	Dana Transfer Umum-DAU		160 orang	135.820.000
	URUSAN PERINDUSTRIAN				2.371.970.314				4.030.352.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM	Kota Blitar	3,5 %	2.371.970.314	Dana Transfer Umum-DAU		%	4.030.352.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase IKM yang memperoleh pembinaa	Kota Blitar	5 %	2.371.970.314	Dana Transfer Umum-DAU		%	4.030.352.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	3 Dokumen	72.569.745	Dana Transfer Umum-DAU		3dokumen	218.652.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	5 dokumen	2.215.526.569	Dana Transfer Umum-DAU		5 dokumen	3.654.500.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	3 dokumen	83.874.000			3 dokumen	157.200.000
TOTAL					15.790.960.401				19.652.122.148

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaiman tertuang dalam LKjIP Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi.
b. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
c. Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM
d. Pada Tahun2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK
e. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
f. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun (2021-2026) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan 2024, sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
   a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
   b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2024 dan tahun 2025.
   c. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
   a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 ;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
   d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidak-tidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

21. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil eavaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* maka dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja akan diarahkan untuk mewujudkan amanat dari peraturan tersebut tetapi tetap berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten / kota terdiri atas :

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ada 3 peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.*

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n + 1;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Ranwal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementrian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahan) dan Renja Provinsi (Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahn dan Renja Satpol PP Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah,Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatanperangkat daerah tahun 2025.

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat dalam *Tabel 2.1* sebagai berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05				Urusan Pemerintahan									
					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
					Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,41%	2,01%	3,87%	3,94%	101.81%	5,92%	5,92%	56.87%
					Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	14,64%	4,36%	6,40%	6,53%	102.03%	8,68%	8,68%	59.29%
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,39%	93,59%	95,64%	96,15%	100.53%	96,89%	96,89%	97.48%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,04%	94,20%	95,06%	95.17%	100.12%	96,39%	96,39%	97.32%
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum		60%	62,05%	20%	20%	20%	20%	102.05%	170.08%
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	-	2017 kasus	1369 kasus	67.87%	1842 laporan	1842 laporan	-
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	4 laporan	-	1929 kasus	1680 kasus	87.09%	1785 laporan	1785 laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	66.67%
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66.67%
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	135 orang	41 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	131 orang	97.04%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Hak Asasi Manusia									
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33.33%
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani dan jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66.67%
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	2.02	010	Sosialisasi Penegakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	3 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada								
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	30 laporan	83.33%
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	05	02	2.03		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	6 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	16.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	-	0,58	0,43	74,14%	0,60	0,60	92.31%
					Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	94%	-	91%	100%	109.89%	92%	100%	108.70%
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Setiap Tahunnya								
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	36 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	5.56%
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	63 unit	-	10 unit	10 unit	100%	23 unit	33 unit	52.38%
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki	36 orang	-	-	-	-	12 orang	12 orang	33.33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran								
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Persentase relawan kebakaran yang	20%	53%	20%	20%	100%	20%	20%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pencegahan Kebakaran	memiliki kapasitas siap siaga kebakaran								
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	420 orang	100 orang	140 orang	280 orang	200.00%	140 orang	520 orang	123.81%
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa/ kelurahan	-	-	-	-	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	100%
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41) nilai	A	A (85,25) nilai	A (81,30) Nilai	95,37%	A (85,35)	A (85,35)	100%
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41) nilai	A	A (85,25) nilai	A (81,30) Nilai	95,37%	A (85,35)	A (85,35)	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah									
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25 indeks	82 indeks	81,50 indeks	83,50 Indeks	102,45%	81,75 indeks	81,75 indeks	100%
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	30 dokumen	100%
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	21 laporan	100%
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	44 orang/bulan	45 orang	44 orang	97.78%	45 orang	45 orang	100%
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	13 laporan	108.33%
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	-	6 paket	7 paket	116.67%	7 paket	14 paket	66.67%
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 orang	41 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	131 orang	97.04%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	-	5 paket	5 paket	100%			
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	-	5 paket	5 paket	100%	5 paket	10 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	66.67%
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perundang - undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan								
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 laporan	45 laporan	46 laporan	46 laporan	100%	46 laporan	137 laporan	99.28%
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	-	-	-	0%	2 paket	2 paket	40.00%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	6 unit	6 unit	100%	5 unit	11 unit	91.67%
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 unit	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	-	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	48 laporan	50.00%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	-	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	48 laporan	66.67%
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	-	1 unit	1 unit	100%	5 unit	6 unit	40.00%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	-	5 unit	5 unit	100%	9 unit	14 unit	51.85%
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	5 unit	71.43%
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	33.33%

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 tidak ada atau NIHIL.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE KETERCAPAIAN
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	100%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	100%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	20%	20%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

Faktor pendorong yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualifikasi, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang ada.
2. Kepedulian staf terhadap penilaian kinerja organisasi masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan staf terhadap hasil penilaian kinerja.
3. Belum tersedianya data gangguan ketentraman ketertiban umum yang disusun secara sistematis dan akurat.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

- Melakukan perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam menentukan target kinerja.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE KETERCAPAIAN
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	95,64%	96,15%	100.53%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	81,50 indeks	83,50 Indeks	102,45%

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar

NO	Indikator	IKU/IKK /SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	IKU	4,39%	6,40%	8,68%	11,40%	14,64%	4,36%	6,53%	8,68%	11,40%	14,64%	Realisasi tahun 2023 diatas target
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	IKU	90%	91%	92%	93%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2023 diatas target
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	94,38%	95,64%	96,89%	98,14%	99,39%	93,89 %	96,15%	96,89%	98,14%	99,39%	Realisasi tahun 2023 diatas target
4.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	IKK	93.74%	95.06%	96.39%	97.71%	99.04%	94,20 %	95,17%	96.39%	97.71%	99.04%	Realisasi tahun 2023 diatas target
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2023 sesuai target

NO	Indikator	IKU/IKK /SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKK	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13,13 menit	10,91 menit	10,91 menit	10,91 menit	10,91 menit	Realisasi tahun 2023 diatas target
10.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Realisasi tahun 2023 sesuai target
11.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Realisasi tahun 2023 sesuai target

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung *Misi ke 1* "Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan ", *Tujuan ke 1* "Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis ", *Sasaran ke 2* " Meningkatnya ketertiban umum" dan *Misi ke 4* "Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan", *Tujuan ke 3* " Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ", *Sasaran ke 5* "Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana ". Apabila target kinerja tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- Masih tingginya angka pelanggaran perda dan perkada di Kota Blitar;
- Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar;
- Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal;
- Penanganan kejadian kebakaran belum optimal;
- Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran belum optimal;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- Keterbasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi ;
- Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penegak perda;
- Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran;
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
- Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya .

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna ;

- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal ;
- ❖ Dinamika masyarakat yang semakin kompleks ;
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal ;
- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda ;
- ❖ Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal .

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- ❖ Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ;
- ❖ Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya ;
- ❖ Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
3. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan
4. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal
5. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

7. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran yang merupakan amanat Permendagri No 114 tahun 2018.
8. Pembentukan Satgas Linmas sesuai dengan amanat Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan trantibum dan linmas.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dalam penegakan perda dan perkada direncanakan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan lebih taat jadwal .
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku.
3. Menambah volume kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban umum agar bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar.
4. Mengoptimalkan koordinasi antara perangkat daerah .
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang melibatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas.
7. Mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan salah satu prioritas pembangunan daerah yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintah dan Berbasis Digital dan Investasi yang telah di tetapkan sebagaimana dalam *Tabel 2.3* sebagai berikut .

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 nilai	7.171.894.954,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 nilai	8.071.894.954,00	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah - Penyesuaian pagu anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	22.404.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	22.404.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	4.043.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	4.043.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	18.361.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	7 laporan	18.361.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	5.988.495.804,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	6.888.495.804,00	Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang / bulan	5.987.435.304,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang / bulan	6.887.435.304,00	Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	1.060.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	4 laporan	1.060.500,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	214.671.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	214.671.500,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	132.627.700,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	132.627.700,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	45 orang	82.043.800,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	45 orang	82.043.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai	100%	248.200.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum	100%	248.200.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			standar					perangkat daerah sesuai standar			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.738.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.738.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	20.712.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	20.712.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	7.623.800,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	7.623.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	14.700.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan ogistic kantor yang disediakan	12 paket	14.700.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8.882.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8.882.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.400.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46 laporan	181.143.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46 laporan	181.143.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	145.005.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	145.005.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	41.501.700,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	41.501.700,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	103.504.100,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	103.504.100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	197.615.124,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	197.615.124,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	66.503.124,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	66.503.124,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	131.112.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 laporan	131.112.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	355.501.926,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	355.501.926,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	242.970.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	242.970.300,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1.800.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1.800.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	20.739.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	20.739.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	89.992.626,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	89.992.626,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	98,14%	4.129.240.570,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	98,14%	4.129.240.570,00	
		Kota Blitar	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	97,71%			Kota Blitar	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	97,71%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	3.088.937.736,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	3.088.937.736,00	
		Kota Blitar	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum				Kota Blitar	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	80.933.800,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	80.933.800,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	1 dokumen	114.544.736,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	1 dokumen	114.544.736,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Ketertiban Umum					dan Ketertiban Umum			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	175.570.100,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	175.570.100,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	2.679.241.100,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	2.679.241.100,00	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	38.648.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	38.648.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1.029.955.634,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1.029.955.634,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	553.375.843,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	553.375.843,00	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	464.115.991,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	464.115.991,00	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12.463.800,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12.463.800,00	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	10.347.200,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	10.347.200,00	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	10.347.200,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	10.347.200,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN,	Kota	Persentase kejadian	100%	516.538.700,00	PROGRAM PENCEGAHAN,	Kota	Persentase kejadian kebakaran yang	100%	516.538.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Blitar	kebakaran yang tertangani			PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Blitar	tertangani			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	37.975.100,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	37.975.100,00	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	6.899.000,00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	6.899.000,00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	10.020.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	10.020.000,00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	3.354.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	12 dokumen	3.354.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kebakaran			
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	9.841.700,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	9.841.700,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 unit	7.860.400,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 unit	7.860.400,00	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	300.698.916,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	300.698.916,00	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	294.896.116,00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	294.896.116,00	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	5.802.800,00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	5.802.800,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kota	Persentase relawan kebakaran yang memiliki	20 orang	177.864.684,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kota	Persentase relawan kebakaran yang	20 orang	177.864.684,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan Kebakaran	Blitar	kapasitas siap siaga kebakaran			Pencegahan Kebakaran	Blitar	memiliki kapasitas siap siaga kebakaran			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	122.675.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	58.834.000,00	Rincian Menyesuaikan kebutuhan
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa / kelurahan	55.189.684,00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa / kelurahan	119.030.684,00	Rincian Menyesuaikan kebutuhan

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2025. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran usulan tersebut belum bisa diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025, Usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam *Tabel 2.4* berikut .

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			--- NIHIL ---			

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan“. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan kedalam 5 agenda pembangunan, sedangkan yang berkaitan dengan tusi Satpol PP sebagai berikut :

Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan agenda :

(1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
   a. Pembangunan bidang hukum
   b. Pembangunan bidang keamanan
   c. Pembangunan bidang demokrasi

(2) Stabilitas ekonomi makro
   a. Optimalisasi pendapatan negara
   b. Peningkatan kualitas belanja negara
   c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

(3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2025 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar Tahun 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran	3,87	3.94	5,92	8,06	10,41

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			masyarakat terhadap aturan perda dan perkada terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi					
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	6,40	6,53	8,68	11,40	14,64
3.	Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di Tingkat kabupaten /kota dan provinsi.	0,58	0,58	0,60	0,62	0,65
4.	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.	91	100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Reali sasi		2025	2026
			Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Lokasi kejadian kebakaran.					
5.	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	85,25	81,30	85,35	85,37	85,39
6.	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	85,25	81,30	85,35	85,37	85,39

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran di Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa strategi, yaitu :

1. Peningkatan penegakan perda, dengan kebijakan mereviu kembali Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum yang belum memiliki sanksi yang mengikat.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, dengan kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat/Satuan perlindungan masyarakat dalam cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

3. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan kebijakan optimalisasi peran serta tenaga relawan pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan non kebakaran. Serta meningkatkan kompetensi tenaga pemadam kebakaran melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi baik internal maupun eksternal yang diselenggarakan pihak terkait.
4. Peningkatan kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja, serta meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Mendukung Misi ke 1 “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan “,dan Misi ke 4 “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”:
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4. Tindaklanjut LKJiP Tahun 2023; dan
5. Pencapaian program prioritas daerah dan perangkat daerah

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025 adalah 3 program, 13 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Jumlah kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 12.717.674.224,00 yang penganggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 11.967.674.224 (94,11%) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 750.000.000 (5,89%). Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana *Tabel 3.2* berikut :

Tabel 3.2

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05				Urusan Pemerintahan		
					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
					Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	
					Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	
						Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	
					Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum		
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						Umum	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	
1	05	02	2.02	010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	
1	05	02	2.03		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
					Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
					Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						diinspeksi	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Mendukung SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Mendukung pencapaian tupoksi

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mendukung pencapaian tupoksi

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian tupoksi
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian tupoksi

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan tahun 2025 dan pagu indikatif tahun 2025 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk mendukung pencapaian sasaran, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025 serta mendukung terwujudnya target capaian nasional, provinsi dan daerah.

4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025, juga memuat tindak lanjut LKJIP Tahun 2023, sebagaimana pada tabel 4.1 berikut.

Tabel. 4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Dearah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2.	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan teknis kepada aparatur pemadam kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
3.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4.	Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.	Melaksanakan sosialisasi dan penekanan tugas dari Kepala kepada seluruh ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada table 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Blitar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar		12.717.674.224,00				12.972.005.233,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kota Blitar		12.717.674.224,00				12.972.005.233,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	82 Nilai	8.071.894.954,00				6.945.787.678,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	22.404.800,00				21.309.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	4.043.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	3.146.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	18.361.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	18.163.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	6.888.495.804,00				5.648.955.978,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan	6.887.435.304,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang/bulan	5.647.997.378,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	1.060.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	958.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar			214.671.500,00				194.439.200,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		7 Paket	132.627.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	138.085.300,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-		45 Orang	82.043.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	56.353.900,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Undangan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	248.200.000,00				249.139.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.738.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.670.200,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	20.712.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	18.323.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	7.623.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	6.258.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	14.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	14.175.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	8.882.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	7.893.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.670.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46 Laporan	181.143.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Laporan	189.148.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah			145.005.800,00				108.500.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan sesuai kebutuhan							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	41.501.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	63.706.800,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	103.504.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	44.794.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar			197.615.124,00				237.072.200,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	66.503.124,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	69.828.200,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	131.112.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	167.244.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	355.501.926,00				486.369.900,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	242.970.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	302.691.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	5 Unit	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	1.890.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	20.739.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	19.584.900,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	89.992.626,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	162.204.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan		98.14 % 97.71 %	4.129.240.570,00				5.436.138.955,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		100%	3.088.937.736,00				4.296.907.755,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	80.933.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	739.836.625,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan	Kota Blitar, Semua Kecamata	1 Dokumen	114.544.736,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	510.191.430,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketertiban Umum	Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n, Semua Kel/Desa						
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	175.570.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	170.639.200,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 laporan	2.679.241.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	2.829.694.100,00
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	38.648.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	46.546.400,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada			1.029.955.634,00				1.081.438.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	553.375.843,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1 Laporan	615.883.000,00
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	464.115.991,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		12 Laporan	454.115.800,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.463.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.439.600,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan			10.347.200,00				50.000.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	10.347.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	50.000.000,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani			516.538.700,00				597.871.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEBAKARAN								
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			37.975.100,00				47.107.400,00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.899.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.246.600,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	15.283.800,00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.354.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	3.603.600,00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	9.841.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	11.331.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebakaran							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	7.860.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	9.642.300,00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi			300.698.916,00				322.650.700,00
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	294.896.116,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	307.271.700,00
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.802.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.379.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran			177.864.684,00				228.113.300,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	140 Orang	58.834.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		140 Orang	182.113.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kebakaran Setiap Tahunnya	Kel/Desa						
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Desa/Kelurahan	119.030.684,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Desa/Kelurahan	46.000.000,00
					12.717.674.224,00				12.972.005.233,00

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 difokuskan pada :

a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS;
b. Pembuatan SOP pen anganan PMKS;
c. Pemberian sosialisasi / pemahamam kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
d. Pengoptimalan layanan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. Pengintesifan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
f. Penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
g. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran;
h. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018;
i. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
j. Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi;
l. Pengoptimalan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara edukatif dan humanis;
m. Penguatan pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
   Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
   a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
   b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 ;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
   d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya
3. Rencana Tindak Lanjut
   Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

22. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Perwali Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Bappeda dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja Bappeda bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga (Renja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Renja Provinsi (Renja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Bappeda, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Bappenas dan Renja Bappeprov Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja Bappeda merupakan salah satu dokumen dasar dalam tahap penyusunan APBD khususnya KUA PPAS dan P APBD yang ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 106);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai kerangka dasar penyusunan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan arah kegiatan Bappeda pada Tahun 2025;
2. Sebagai rujukan bidang-bidang teknis di Bappeda dalam perencanaan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menguraikan tentang program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2026.

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Bappeda Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja atau Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Oleh karena itu dalam hal evaluasi perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antara kinerja Renja dengan Renstra Perangkat Daerah periode berjalan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang telah berkesinambungan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Blitar tahun 2023 dengan mengacu pada APBD Tahun 2023 untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bappeda Kota Blitar yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan

Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2024

Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5	01				Bidang Urusan Perencanaan										
					Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Inovasi pemerintah daerah	1. Indikator tujuan : Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan	25,67	Nilai	25,2	25,51	25,6	100,35	25,63	25,63	99,84
						2. Indikator tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	98,9	Indeks	97,54	91,93	98,37	107	97,85	98,37	99,46
						3. Indikator tujuan : Indeks Inovasi Daerah	57	Indeks	-	-	-	-	55,65	55,65	97,63
					Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran : Tingkat Capaian Kinerja RPJMD	95,98	%	-	-	-	-	75,00	75,00	78,14
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	98,9	%	95,54	98,65	98,13	99,47	98,80	98,80	103,41
						Persentase Capaian Sasaran RPJMD	94,96	%	94,19	94,35	95,84	101,58	91,1	95,84	100,93

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	10	Dokumen	-	2	2	100	2	4	40
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7	Berita Acara	-	2	2	100	1	3	42,86
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	4	Berita Acara	-	2	1	50	1	3	75
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	11	dokumen	-	2	2	100	3	5	45,45
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan yang Dihasilkan	4	Buku	-	1	1	100	1	2	50
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	-	3	3	100	3	6	50
5	01	02	203	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	-	1	1	100	1	2	50
					Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran : Persentase Perangkat Daerah yang Kualitas Perencanaannya Baik	100	%	-	-	-	-	100	100	25
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD dan RKPD	100	%	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	96,12	%	95,03	95,48	97,88	102,51	95,75	97,88	101,83
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	16	Laporan	-	4	4	100	4	8	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan									
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16	Laporan	-	4	4	100	4	8	50
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	16	Laporan	-	4	4	100	4	8	50
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16	Laporan	-	4	4	100	4	8	50
5	05				Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	1. Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan rekomendasi riset/ litbang	75,00	%	-	-	-	-	40,00	40,00	53,33
						2. Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah	95,00	%	-	-	-	-	92,50	92,50	97,37
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02	202	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek – aspek sosial	12	dokumen	-	2	2	100	3	6	50
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02	203	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6	dokumen	-	1	1	100	2	3	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6	dokumen	-	1	1	100	2	3	50
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4	dokumen	-	4	4	100	1	5	125
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8	laporan	-	1	1	100	2	2	25
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4	laporan	-	1	1	100	1	2	50
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	laporan	-	1	1	100	1	2	50
					Non Urusan										
					Tujuan :	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 86,00	Nilai	85,56	88,15	85,41	96,89	85,70	85,70	99,65

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah										
					Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 86,00	Nilai	85,56	88,15	85,41	96,58	85,70	85,70	99,65
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05 Baik	indeks	84,52	81,3	83,06	102,16	83	83,06	98,82
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	dokumen	-	9	9	100	9	18	50
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	Laporan	-	9	9	100	7	16	57,14
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/ bulan	-	29	30	103,45	30	30	93,75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12	Laporan	-	3	3	100	3	6	50
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100%	100	100	100
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	-	2	2	100%	2	4	50
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	-	35	35	100%	35	35	50
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100%	100	100	100
5	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	-	1	1	100%	1	2	50
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	16	Paket	-	4	4	100%	4	8	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Paket	-	2	2	100%	2	4	50
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48	Paket	-	2	2	100%	2	4	8,33
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	-	1	1	100%	1	2	50
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	240	Dokumen	-	60	60	100	60	120	50
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480	Laporan	-	120	120	100	120	240	50
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	Unit	-	23	23	100	20	43	53,75
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan	-	12	12	100	12	24	50
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	-	13	13	100	13	26	50
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	unit	-	3	3	100%	3	6	50
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	8	Unit	-	2	2	100%	2	4	50
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	-	20	20	100%	20	40	50
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	-	1	1	100%	1	2	50

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2024

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappeda Tahun 2023 Kota Blitar, diperoleh pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain adalah :
      1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
      7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
   d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
      Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari 7 kegiatan terdapat 1 sub kegiatan yang outputnya melebihi target kinerja hasil/keluaran, yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai melalui mutasi pegawai sehingga mempengaruhi realisasi capaian kinerja. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pencapaian target indikator kinerja Bappeda.
   e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Bappeda
      Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota akan mendukung tercapainya target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100%.
   f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
      Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Bappeda.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
      1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
      3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

c. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
Pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dari 3 kegiatan terdapat 1 sub kegiatan yang outputnya tidak tercapai, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang disebabkan karena belum terbitnya regulasi penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025 – 2029 dari pemerintah pusat. Hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pencapaian target indikator kinerja Bappeda.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Bappeda

Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah akan mendukung tercapainya target indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

f. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait terbitnya regulasi penyusunan dokumen perencanaan daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

c. Realisasi program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
Semua kegiatan pada program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target yang direncanakan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Bappeda
Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah akan mendukung tercapainya target indikator Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD dan RKPD sebesar 100%.

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
1. Mengintensifkan koordinasi dengan OPD terkait

4. Program Penelitian dan Pengembangan

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
c. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
   Semua kegiatan pada program Penelitian dan Pengembangan telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Bappeda
   Keberhasilan capaian program Penelitian dan Pengembangan akan mendukung tercapainya target indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.
f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
   Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappeda disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2022. Capaian kinerja Renja Tahun 2022 disajikan dalam tabel hanya pada program dan kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator sub kegiatan antara Tahun 2022 dan 2023 sebagai implikasi diberlakukannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Sampai dengan tahun 2024, capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Blitar disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar

No.	Indikator	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	INDIKATOR TUJUAN												
1.	Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan		25,49	25,51	25,63	25,65	25,67	25,20	25,60	25,63	25,65	25,67	Target 2022 tidak tercapai
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	IKU	91,72	91,93	97,85	97,93	98	97,54	98,37	98,68	98,97	99,37	Capaian indikator pada Tahun 2023 sangat tinggi yaitu 98,37 dikarenakan sebagian besar capaian indikator tujuan Perangkat Daerah melebihi target, hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap rata - rata capaian keseluruhan. Untuk target capaian kinerja pada tahun berikutnya dilakukan review pada Renstra 2021-2026 Perubahan Ketiga
3.	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	55,65	56,50	57,00	-	-	55,65	56,50	57,00	Target capaian kinerja indikator baru ditetapkan mulai tahun 2024 sesuai review Renstra 2021-2026 Perubahan Ketiga, meskipun Nilai Indeks Inovasi Daerah dikeluarkan oleh Kemendagri setiap tahunnya
II	INDIKATOR SASARAN												
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Kualitas Perencanaannya Baik	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	Target capaian kinerja indikator baru ditetapkan mulai tahun 2024 sesuai review Renstra 2021-2026 Perubahan Ketiga

No.	Indikator	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD	-	-	-	75,00 %	86,00 %	95,98 %	-	-	75,00 %	86,00 %	95,98 %	Target capaian kinerja indikator baru ditetapkan mulai tahun 2024 sesuai review Renstra 2021-2026 Perubahan Ketiga, meskipun mulai Tahun 2022 sudah dilakukan penghitungan
3.	Persentase pemanfaatan rekomendasi riset/ litbang	-	-	-	40,00 %	50,00 %	60,00%	-	-	-	50,00 %	60,00%	Target melebihi
4.	Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah	-	-	-	92,50 %	93,75%	95,00 %	-	-	-	93,75%	95,00 %	Target capaian kinerja indikator baru ditetapkan mulai tahun 2024 sesuai review Renstra 2021-2026 Perubahan Ketiga
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	88,12 (A)	88,15 (A)	85,70 (A)	85,90 (A)	86,00 (A)	85,56 (A)	85,41 (A)	86,60 (A)	86,70 (A)	86,80 (A)	Realisasi melebihi target
III	INDIKATOR PROGRAM												
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	-	95,54	98,65	98,80	98,85	98,90	98,50	98,13	98,13	99,00	99,50	Realisasi melebihi target
	Persentase Capaian Sasaran RPJMD	-	90,99	94,35	94,72	94,78	94,96	94,19	95,84	95,84	97,20	98,00	Realisasi melebihi target
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah												

No.	Indikator	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD dan RKPD	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	-	81	95,48	95,75	96	96,12	95,03	97,88	95,75	98,65	99,35	Realisasi melebihi target
3	Program Penelitian dan Pengembangan												
	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81,05 Baik	81,30 Baik	83,0 Baik	83,55 Baik	84,05 Baik	84,52 Baik	83,06 Baik	83,0 Baik	83,55 Baik	84,05 Baik	Target tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2024

Sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 terdapat perubahan indikator tujuan dan sasaran serta targetnya pada Bappeda Kota Blitar, sehingga pada beberapa indikator kinerja belum dapat disajikan data capaian kinerja pada Tahun 2022 dan 2023 karena mulai diberlakukan pada Tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, pada beberapa indikator kinerja yang tidak mengalami perubahan pada Renstra disajikan data capaian kinerja indikator tahun 2022 dan 2023 serta capaian Renja Tahun 2025 yang dituliskan sebagai perkiraan atau proyeksi capaian. Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 masih disajikan data proyeksi karena tahun 2024 masih dalam proses pelaksanaan.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan

   Indikator ini adalah salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Berdasarkan LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2023 terjadi kenaikan nilai SAKIP dari unsur Perencanaan sebesar 0,40 yaitu dari 25,20 pada Tahun 2022 menjadi 25,60 pada Tahun 2023. Dan realisasi nilai SAKIP dari unsur Perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 25,60 tersebut telah berhasil melampaui target 25,51, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,35%.

2. Indeks Perencanaan Pembangunan

   Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 98,37 dari target sebesar 91,93 tingkat capaian sebesar 107% dengan predikat Sangat Berhasil.

   Perhitungan sebesar 98,37 diperoleh dari rata-rata :

   - Persentase capaian indikator tujuan Perangkat Daerah sebesar 98,03%;
   - Persentase capaian indikator sasaran Perangkat Daerah sebesar 95,84%;
   - Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah sebesar 97,88%;
   - Keselarasan program RKPD dengan RPJMD sebesar 100%; dan
   - Keselarasan RKPD dengan APBD sebesar 100%.

   Walaupun telah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

   - ✓ Terdapat beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan terlalu rendah targetnya dari capaian kinerjanya;
   - ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
   - ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis teknologi informasi.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   Nilai SAKIP Bappeda Kota Blitar pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 85,41 (A) dan tingkat capaiannya sebesar 96,92% dengan predikat

Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan targetnya yaitu 88,15, kinerja sasaran ini dikatakan belum mencapai target.

Hal ini disebabkan karena :

- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Dalam pengukuran kinerja, belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- ✓ Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi namun belum dimanfaatkan secara optimal;
- ✓ Monitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi; dan
- ✓ Terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami dan peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja.

Sedangkan capaian indikator kinerja program secara keseluruhan telah terealisasi dan dilaksanakan sesuai/melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini

Beberapa langkah dan strategi yang diupayakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam mencapai kinerja dengan maksimal adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas bersama Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
b. Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja pembangunan;
c. Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana agar lebih efektif dalam mengawal perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2025 Kota Blitar memiliki kewajiban untuk merumuskan dan menetapkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Agustus Tahun 2025;
b. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan pencapaian telah sesuai target yang ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan tahun selanjutnya;

c. Belum optimalnya rekomendasi hasil riset dan perkembangan inovasi Perangkat Daerah sebagai dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, tema pembangunan Kota Blitar tahun 2025 adalah ”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Tema pembangunan tahun 2025 tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi;
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital;
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.354.230.104					9.444.147.546	
	PERENCANAAN				7.625.900.304					8.606.854.046	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55 indeks	5.264.927.104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55 indeks	5.505.128.966	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	30.618.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	22.715.200	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	14.307.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9.735.200	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7 Laporan	16.310.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7 Laporan	12.980.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.106.901.755	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.379.145.119	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	4.101.685.355	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	4.374.435.019	Perubahan target dan anggaran karena adanya penambahan pegawai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	5.216.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.710.100	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	162.537.445	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	159.135.200	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	67.452.345	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	48.772.800	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	95.085.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	110.362.400	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	491.243.004	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	491.524.304	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	777.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.209.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.639.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.273.800	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.261.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.248.800	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.509.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.507.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.383.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.614.300	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	60 Dokumen	13.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	60 Dokumen	13.500.000	Tidak Berubah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peraturan Perundang-undangan		Perundang- Undangan yang Disediakan			Peraturan Perundang-undangan		Perundang- Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	339.171.404	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	339.171.404	Tidak Berubah
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Tidak Berubah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	165.375.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	137.000.100	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	-	-	-	-	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14.699.900	Penambahan Sub Kegiatan sesuai kebutuhan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	165.375.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	122.300.200	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	104.481.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	109.734.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	3.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	3.600.000	Tidak Berubah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	100.881.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	106.134.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	203.770.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	205.875.043	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	102.764.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	102.764.700	Perubahan Target capaian menyesuaikan jumlah unit kendaraan
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	16.680.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	9.552.500	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.818.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.050.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	53.508.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	53.508.000	Tidak Berubah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	95.57 %	1.271.674.039	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	99,00%	1.662.426.180	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
			Persentase Capaian Sasaran RPJMD	91.2 %				Persentase Capaian Sasaran RPJMD	97,20 %		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	100 %	1.028.023.339	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	100 %	1.418.775.980	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	497.439.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	888.191.641	Perubahan karena adanya kegiatan prioritas PD (Penyusunan RPJMD 2025-2030)
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	160.272.439	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	160.272.439	Tidak Berubah
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	274.902.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	274.902.000	Tidak Berubah
	Koordinasi Penyusunan dan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	95.409.900	Koordinasi Penyusunan dan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	95.409.900	Perubahan menyesuai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)			kan kebutuhan
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100 %	56.949.700	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100 %	56.949.700	Tidak Berubah
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	56.949.700	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	56.949.700	Tidak Berubah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	100 %	186.701.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	100 %	186.700.500	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	148.637.900	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	148.637.800	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	38.063.100	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	38.062.700	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)	83 % 100 %	1.089.299.161	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)	98,65 % 100 %	1.439.298.900	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	642.726.900	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	600.704.400	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	478.672.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	395.575.700	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	164.054.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	164.054.400	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	161.759.200	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	107.398.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	161.759.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	107.398.000	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi Perencanaan Bidang		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras	100 %	284.813.061	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras	100 %	731.196.500	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Infrastruktur dan Kewilayahan		dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	284.813.061	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	731.196.500	Perubahan karena adanya kegiatan prioritas Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Green Metric)
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				728.329.800	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				837.293.500	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	728.329.800	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	837.293.500	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	231.151.700	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	102.513.500	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	231.151.700	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	102.513.500	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	238.104.200	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	203.111.200	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	119.347.700	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	102.290.800	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	118.756.500	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	100.820.400	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	100 %	259.073.900	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	100 %	531.668.800	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	54.983.100	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	54.983.100	Perubahan menyesuaikan rincian
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	146.578.500	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	148.034.300	Perubahan menyesuaikan kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	25.920.700	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	289.551.900	Perubahan karena adanya pelaksanaan kegiatan Pameran IGA dan Inotek
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	31.591.600	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	39.099.600	Perubahan menyesuaikan kebutuhan
					8.351.230.104					9.444.147.546	

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan program kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi, perangkat daerah juga berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Untuk tahun perencanaan 2025, Bappeda Kota Blitar tidak mendapat usulan dari Musrenbang Kecamatan maupun dari pokok – pokok pikiran DPRD.

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital;
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi;
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN.
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui :
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun;
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting;
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem.
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan

   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui :

   - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
   - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos;
   - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya;
   - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
   - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
   - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
   - ✓ Peningkatan produksi industri pengolahan;

- ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial
   Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu
   (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
      a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;
      b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat;
      c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan;
      d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.
   (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
      a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
      b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics;*
      c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
      d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas;
      e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan;
      f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja.
   (3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
      a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek);
      b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif;
      c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan;
      d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya;
      e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Transformasi Ekonomi
   Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu
   (1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
      a. Penguatan industri dasar;
      b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting;
      c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati;
      d. Pengembangan industri medium-high technology;
      e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil;
      f. Produktivitas UMKM dan koperasi;
      g. Pengembangan ekonomi biru;
      h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan;
      i. Peningkatan produktivitas BUMN;
      j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah;
      k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
      l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan;
      m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian.

(2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
   a. Percepatan transisi energi;
   b. Ekonomi sirkular industri;
   c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*);
   d. Pengelolaan hutan lestari.

(3) Transformasi digital, melalui:
   a. Penguatan fondasi utama transformasi digital;
   b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis;
   c. Pemerintah digital;
   d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital.

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
   a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi;
   b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi;
   c. Perkuatan system logistic nasional;
   d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global;
   e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
   a. Wilayah metropolitan;
   b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
   c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
   a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi;
   b. Penguatan tata kelola regulasi.

(2) Pelayanan publik, melalui:
   a. Digitalisasi pelayanan publik;
   b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik;
   c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik;
   d. Perluasan akses pelayanan publik.

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
   a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah;
   b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional;
   c. Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah.

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
   a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN;
   b. Penguatan tata kelola ASN;
   c. Penggajian tunggal ASN;
   d. Reformasi system pension;
   e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material.

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
   a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan;

b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga;
c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah;
d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha;
e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi;
f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

(6) Partai politik, melalui:
a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen;
b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
(1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
a. Pembangunan bidang hukum;
b. Pembangunan bidang keamanan;
c. Pembangunan bidang demokrasi.
(2) Stabilitas ekonomi makro
a. Optimalisasi pendapatan negara;
b. Peningkatan kualitas belanja negara;
c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
(3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
(1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif;
b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan.
(2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
a. Penguatan ketahanan keluarga;
b. Peningkatan kesetaraan gender;
c. Perwujudan masyarakat inklusif.
(3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman;
d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah.
(4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
a. Kemandirian pangan;
b. Peningkatan ketahanan air nasional;
c. Ketahanan energi.
(5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna;
b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta riset dan inovasi Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi kebijakan yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025. Selain itu dengan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Tahun 2025 pada kegiatan sectoral bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan bidang Infrastruktur serta dalam urusan Riset dan Inovasi Daerah, arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 juga menjadi bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan bidang Infrastruktur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Inovasi pemerintah daerah		1. Indikator Tujuan : Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh KEMENPANRB pada komponen Perencanaan Kinerja	25,51	25,60	25,63	25,65	25,67
		2. Indikator Tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah adalah hasil perhitungan mandiri atas keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tingkat capaian kinerja daerah, dihitung dari : 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 3. Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 4. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RPJMD 5. Keselarasan RKPD dengan APBD	91,93	98,37	98,68	98,97	99,37
		3. Indikator Tujuan : Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	50,83	55,65	56,50	57,00
	Meningkatnya Kualitas	1. Indikator Sasaran : Persentase Perangkat	Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik adalah dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Daerah yang Kualitas Perencanaannya Baik	perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian sebesar 90% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu					
		2. Indikator Sasaran : Tingkat Capaian Kinerja RPJMD	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD adalah hasil perhitungan mandiri atas tingkat capaian kinerja akhir periode RPJMD yang meliputi : tujuan, sasaran dan program	-	-	75,00 %	86,00 %	95,98 %
	Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	1. Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan rekomendasi riset/ litbang	Pemanfaatan rekomendasi riset/litbang adalah hasil pengukuran mandiri rekomendasi riset/litbang yang dihasilkan oleh Brida dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (fisik dan non fisik)	-	-	40,00 %	50,00 %	60,00%
		2. Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah	Pemanfaatan inovasi daerah adalah hasil pengukuran mandiri inovasi daerah yang diterapkan mencakup inovasi perangkat daerah dan inovasi teknologi masyarakat	-	-	92,50 %	93,75%	95,00 %
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar	A ((88,15)	A (85,41)	A (86,60)	A (86,70)	A (86,80)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			manajaemen kinerja yang meliputi: a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi kinerja e. pencapaian sasaran/ kinerja organisasi					

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2024

3.3 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Renja Bappeda Tahun 2025 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu misi ke 5 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi” ;
2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
4. Tindaklanjut LKJiP Tahun 2023; dan
5. Pencapaian program prioritas Daerah dan Perangkat Daerah

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kota Blitar pada Renja Tahun 2025 adalah 4 program, 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.294.147.546 dengan sumber dana dari Pendapatan Bagi Hasil.

Rincian program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda Tahun 2025b disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD - Persentase Capaian Sasaran RPJMD	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Mendukung pencapaian Tupoksi dan program prioritas
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Capaian Program Perangkat Daerah - Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Mendukung pencapaian Tupoksi dan program prioritas
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial dan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah Persentase rekomendasi litbang yang menjadi kebijakan	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Mendukung pencapaian Tupoksi
5.05.02.2.04.0004	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah ”Pemantapan Kesehjateraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Prioritas Daerah 1:
   Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Prioritas Daerah 2:
   Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Prioritas Daerah 3:
   Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Prioritas Daerah 4:
   Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Prioritas Daerah 5:
   Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Prioritas Daerah 6:
   Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Kota Blitar mendukung prioritas pembangunan 2 yaitu Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Bappeda Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi	Blitar Melayani	Penguatan SAKIP	- Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Subkegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Subkegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Subkegiatan : • Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan • Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
			Peningkatan Kualitas Data Pembangunan Daerah	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Subkegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah,	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Subkegiatan : • Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota • Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Penguatan evaluasi perencanaan dan penganggaran	Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah,	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Subkegiatan :

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Pemetaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
				• Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota • Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Perda RPJMD	Penyusunan Perda RPJMD Tahun 2025-2030 diikuti Penyusunan Renstra Tahun 2025-2030	1. Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Subkegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia Subkegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
		Penyelenggaraan Green Metric	Penyelenggaraan Green Metric	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kwilayahan Subkegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber : Bappeda Kota Blitar Tahun 2024

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Bappeda Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Bappeda Tahun 2023

pada Renja Bappeda Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan	Secara berkala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	pembangunan untuk memastikan pencapaian telah sesuai target yang ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan tahun selanjutnya	kinerja IKD, IKU dan IKK sampai dengan sub kegiatan untuk memastikan pencapaiannya	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2.	Mengoptimalkan rekomendasi hasil kajian penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan	Menyampaikan rekomendasi hasil kajian penelitian dan pengembangan kepada Walikota dan *stakeholder* terkait.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		Mempublikasikan hasil kajian penelitian dan pengembangan secara terpadu melalui diseminasi kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan

Sumber : LKJIP Bappeda Kota Blitar 2023, diolah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Bappeda Kota Blitar tahun 2025 adalah 4 program, 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01				PERENCANAAN				8.456.854.046				9.403.454.253
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		83.55 indeks	5.355.128.966			84.05 indeks	6.379.217.423
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	22.715.200			100 %	35.210.930
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	9 Dokumen	9.735.200	Pendapatan Bagi Hasil		9 Dokumen	16.453.625
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	7 Laporan	12.980.000	Pendapatan Bagi Hasil		7 Laporan	18.757.305
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	4.229.145.119			100 %	4.996.462.494
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	30 Orang/ bulan	4.224.435.019	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Orang/ bulan	4.990.463.634

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar	3 Laporan	4.710.100	Pendapatan Bagi Hasil		3 Laporan	5.998.860
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	159.135.200			100 %	186.918.062
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	2 Paket	48.772.800	Pendapatan Bagi Hasil		2 Paket	77.570.197
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	35 Orang	110.362.400	Pendapatan Bagi Hasil		35 Orang	109.347.865
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	491.524.304			100 %	564.929.455
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	3.209.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	894.585
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	4 Paket	23.273.800	Pendapatan Bagi Hasil		4 Paket	36.384.850
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	2 Paket	8.248.800	Pendapatan Bagi Hasil		2 Paket	9.501.070
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	12 Paket	50.507.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Paket	58.085.810

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	28.614.300	Pendapatan Bagi Hasil		1 Paket	25.741.025
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar	60 Dokumen	13.500.000	Pendapatan Bagi Hasil		60 Dokumen	15.525.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	120 Laporan	339.171.404	Pendapatan Bagi Hasil		120 Laporan	390.047.115
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	1 Dokumen	25.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	28.750.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	137.000.100			100 %	190.181.250
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar	2 Unit	14.699.900	Pendapatan Bagi Hasil		2 Unit	36.568.000
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar	20 Unit	122.300.200	Pendapatan Bagi Hasil		20 Unit	190.181.250
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	109.734.000			100 %	134.610.927
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	12 Laporan	3.600.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Laporan	4.140.000
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	13 Laporan	106.134.000	Pendapatan Bagi Hasil		13 Laporan	130.470.927
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	205.875.043			100 %	234.336.305

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	3 Unit	102.764.700	Pendapatan Bagi Hasil		3 Unit	118.179.405
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar	2 Unit	9.552.500	Pendapatan Bagi Hasil		2 Unit	19.182.000
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	20 Unit	40.050.000	Pendapatan Bagi Hasil		20 Unit	35.440.700
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar	1 Unit	53.508.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Unit	61.534.200
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD - Persentase Capaian Sasaran RPJMD		99,00 % 97,20 %	1.662.426.180			99,50 % 98,00 %	1.369.042.795
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi		100 %	1.418.775.980			100 %	1.088.844.490
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Blitar	2 Dokumen	888.191.641	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	478.672.500
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Blitar	2 Berita Acara	160.272.439	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	184.313.305
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Blitar	2 Berita Acara	274.902.000	Pendapatan Bagi Hasil		1 Berita Acara	316.137.300

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Kota Blitar	3 Dokumen	95.409.900	Pendapatan Bagi Hasil		3 Dokumen	109.721.385
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti		100 %	56.949.700			100 %	65.492.155
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Blitar	1 Buku	56.949.700	Pendapatan Bagi Hasil		1 Buku	65.492.155
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti		100 %	186.700.500			100 %	214.706.150
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Blitar	3 Laporan	148.637.800	Pendapatan Bagi Hasil		3 Laporan	170.933.585
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Blitar	1 Laporan	38.062.700	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	43.772.565
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Capaian Program Perangkat Daerah - Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD		98,65 %	1.439.298.900			99,35 %	1.655.194.035

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)		100 %				100 %	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	600.704.400			100 %	681.635.935
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Blitar	4 Laporan	395.575.700	Pendapatan Bagi Hasil		4 Laporan	492.973.375
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Blitar	4 Laporan	205.128.700	Pendapatan Bagi Hasil		4 Laporan	188.662.560
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	107.398.000			100 %	186.023.080
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Blitar	4 Laporan	107.398.000	Pendapatan Bagi Hasil		4 Laporan	186.023.080
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen		100 %	731.196.500			100 %	787.535.020

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Blitar	4 Laporan	731.196.500	Pendapatan Bagi Hasil		4 Laporan	787.535.020
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				837.293.500				837.579.270
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah		100 %	837.293.500			100 %	837.579.270
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial dan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah		100 %	102.513.500			100 %	265.824.455
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Blitar	2 Dokumen	102.513.500	Pendapatan Bagi Hasil		3 Dokumen	265.824.455
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah		100 %	203.111.200			100 %	273.819.830
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Blitar	1 Dokumen	102.290.800	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	137.249.855
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Blitar	2 Dokumen	100.820.400	Pendapatan Bagi Hasil		2 Dokumen	136.569.975

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti		100 %	531.668.800			100 %	297.934.985
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Blitar	1 Dokumen	54.983.100	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	63.230.565
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Blitar	2 Laporan	148.034.300	Pendapatan Bagi Hasil		2 Laporan	168.565.275
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Blitar	1 Laporan	289.551.900	Pendapatan Bagi Hasil		1 Dokumen	29.808.805
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Blitar	1 Laporan	39.099.600	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	36.330.340
Total									9.294.147.546				10.241.033.523

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2024

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, baik dalam Bappeda maupun dengan Perangkat Daerah lain dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja Bappeda selama 1 (satu) tahun. Upaya optimalisasi kinerja di Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sekaligus dapat mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
3. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang sesuai kebutuhan, transparan dan partisipatif.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur perencana.
d. Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sampai dengan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

23. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraf kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra BPKAD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2023 dan Tahun 2024 (sampai dengan semester I) yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan/subkegiatan baru yang disusun dalam Renja BPKAD Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra BPKAD Kota Blitar;
3. Memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026;
4. Penyusunan Renja BPKAD Kota Blitar bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Tahun 2025.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja BPKAD Kota Blitar tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis BPKAD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementrian Keuangan Republik Indonesia) dan Renja Provinsi (Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam

proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementrian Keuangan dan Renja BPKAD Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja BPKAD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan tindak lanjutnya dalam proses penyusunan KUA PPAS dan APBD

Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman pada RKPD, APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan arahan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 dan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan IV (empat) tahun 2023 berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sebagai Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman peyusunan KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

(Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan)

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

(Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program,

kegiatan dan subkegiatan Masyarakat)

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

(Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan)

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2023 dan prakiraan capaian Tahun 2024 dengan mengacu dan APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD Kota Blitar berdasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan Renja BPKAD Kota Blitar tahun – tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan BPKAD Kota Blitar.

Program BPKAD Kota Blitar yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPKAD Kota Blitar sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Indeks	44.962.616.578	85	10.193.312.385	84	11.438.447.512	84	10.954.247.954	100	95,77	84	11.283.259.185	84	32.430.819.524	100	72
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	%	159.212.453	100	42.212.400	100	12.723.972	100	11.535.500	100	90,66	100	12.536.000	100	66.283.900	100	42
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	Dokumen	74.509.794	-	0	8	5.870.766	8	4.981.000	100	84,84	8	5.849.000	8	10.830.000	25	15
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	Laporan	84.702.659	-	0	10	6.853.206	10	6.554.500	100	95,64	10	6.687.000	10	13.241.500	25	16
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	36.649.632.045	100	8.271.407.844	100	9.054.252.779	100	8.686.295.402	100	95,94	100	9.266.312.601	100	26.224.015.847	100	72
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3136	Orang/bulan	36.635.222.293	-	0	784	9.050.703.579	784	8.682.785.402	100	95,93	784	9.262.403.101	1.568	17.945.188.503	50	49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72	Laporan	14.409.752	-	0	18	3.549.200	18	3.510.000	100	98,90	18	3.909.500	36	7.419.500	50	51
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	1.166.569.138	100	195.738.200	100	201.818.070	100	186.061.700	100	92,19	100	185.983.500	100	567.783.400	100	49
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	Paket	525.262.500	-	0	3	139.875.000	3	130.945.000	100	93,62	3	52.148.200	6	183.093.200	50	35
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	641.306.638	-	0	75	61.943.070	75	55.116.700	100	88,98	75	133.835.300	150	188.952.000	50	29
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	3.104.412.388	100	1.194.951.901	100	915.920.381	100	902.336.139	100	98,52	100	684.413.400	100	2.781.701.440	100	90
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	54.283.580	-	0	1	13.370.340	1	13.293.000	100	99,42	1	13.357.400	2	26.650.400	50	49
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	148.567.312	-	0	3	36.592.934	3	36.387.000	100	99,44	3	36.569.800	6	72.956.800	50	49
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	44.835.502	-	0	3	11.043.227	3	10.856.500	100	98,31	3	11.007.300	6	21.863.800	50	49
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	Paket	108.265.097	-	0	24	30.519.280	24	29.171.000	100	95,58	24	51.634.200	48	80.805.200	50	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	1.218.462.556	-	0	3	388.896.280	3	388.818.000	100	99,98	3	300.316.700	6	689.134.700	50	57
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dokumen	48.561.660	-	0	36	11.961.000	36	11.940.000	100	99,82	36	11.880.000	72	23.820.000	50	49
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432	Laporan	1.441.157.900	-	0	108	413.616.438	108	402.645.639	100	97,35	108	249.727.000	216	652.372.639	50	45
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	Dokumen	40.278.781	-	0	12	9.920.882	12	9.225.000	100	92,99	12	9.921.000	24	19.146.000	50	48
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%	1.463.845.911	-	0	100	345.253.709	100	334.310.000	100	96,83	100	326.898.800	100	661.208.800	100	45
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Unit	34.555.066	-	0	4	114.880.519	4	113.375.000	100	98,69	4	190.646.400	8	304.021.400	50	880
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	112	Unit	1.429.290.845	-	0	28	230.373.190	28	220.935.000	100	95,90	28	136.252.400	56	357.187.400	50	25
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	1.219.705.200	100	81.851.318	100	438.434.717	100	384.690.992	100	87,74	100	431.237.500	100	897.779.810	100	74
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	Laporan	412.171.200	-	0	24	105.873.917	24	87.530.202	100	82,67	24	93.660.000	48	181.190.202	50	44
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	807.534.000	-	0	13	332.560.800	13	297.160.790	100	89,36	13	337.577.500	26	634.738.290	50	79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100	%	1.336.249.300	100	401.901.262	100	470.043.884	100	449.018.221	100	95,53	100	375.877.384	100	1.226.796.867	100	92
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	220	Unit	450.042.409	-	0	55	110.847.884	55	95.666.121	100	86,30	55	110.853.584	110	206.519.705	50	46
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit/Kali	130.827.410	-	0	50	45.696.000	50	45.453.600	100	99,47	50	43.561.500	100	89.015.100	50	68
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit/Kali	481.359.767	-	0	1	313.500.000	1	307.898.500	100	98,21	1	221.462.300	2	529.360.800	50	110
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	100	%	38.481.790.215,5	100	1.441.804.558	100	17.968.940.134	100	5.210.672.357	100	29,00	100	5.913.330.380	100	12.565.807.295	100	33
		Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	100	%		98		95		95		100	#DIV/0!	96		96	-	96	-
		Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	100	%		100		100		100		100	#DIV/0!	100		100	-	100	-
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	100	%	6.173.839.589	100	1.441.804.558	100	1.502.010.895	100	1.438.597.010	100	95,78	100	1.100.420.180	100	3.980.821.748	100	64
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	325.645.678	-	0	2	72.705.780	2	72.101.950	100	99,17	2	68.832.000	4	140.933.950	50	43
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	299.931.668	-	0	2	84.314.795	2	83.403.372	100	98,92	2	80.038.600	4	163.441.972	50	54

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	272	Dokumen	157.782.197	-	0	68	99.515.250	68	93.692.640	100	94,15	68	45.045.600	136	138.738.240	50	88
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	272	Dokumen	123.958.337	-	0	68	59.473.964	68	55.610.000	100	93,50	68	45.720.180	136	101.330.180	50	82
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	272	Dokumen	160.232.853	-	0	68	39.466.220	68	39.365.500	100	99,74	68	41.930.800	136	81.296.300	50	51
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	272	Dokumen	422.971.620	-	0	68	87.332.910	68	77.796.807	100	89,08	68	71.780.300	136	149.577.107	50	35
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	Dokumen	3.171.618.972	-	0	2	600.400.916	2	573.527.475	100	95,52	2	548.662.400	4	1.122.189.875	50	35
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	497.764.648	-	0	2	118.549.440	2	117.533.314	100	99,14	2	147.774.300	4	265.307.614	50	53
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Dokumen	656.386.696	-	0	1	317.597.678	1	302.950.000	100	95,39	1	30.848.000	2	333.798.000	50	51
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	320	Orang/Kali	357.546.921	-	0	80	22.653.942	80	22.615.952	100	99,83	80	19.788.000	160	42.403.952	50	12
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	68	OPD	1.913.992.926	68	514.441.000	68	508.463.015	68	498.398.585	100	98,02	68	363.478.400	68	1.376.317.985	100	72
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1280	Dokumen	468.451.594	-	0	320	120.618.384	320	120.509.732	100	99,91	320	109.403.600	640	229.913.332	50	49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1096	Dokumen	6.871.550	-	0	274	1.692.500	274	1.692.500	100	100,00	274	10.270.600	548	11.963.100	50	174
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Dokumen	66.219.306	-	0	25	37.510.174	25	37.510.174	100	100,00	25	37.697.400	50	75.207.574	50	114
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	1172	Laporan	11.322.130	-	0	293	2.788.702	293	2.788.702	100	100,00	293	25.236.200	586	28.024.902	50	248
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1424	Dokumen	339.854.955	-	0	356	83.708.117	356	76.001.617	100	90,79	356	65.997.600	712	141.999.217	50	42
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20	Dokumen	149.007.156	-	0	5	36.701.270	5	35.148.070	100	95,77	5	42.304.000	10	77.452.070	50	52

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600	Orang	872.266.234	-	0	150	225.443.868	150	224.747.790	100	99,69	150	72.569.000	300	297.316.790	50	34
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	100	%	2.288.098.841	100	547.665.000	100	791.059.904	100	787.659.737	100	99,57	100	508.304.600	100	1.843.629.337	100	81
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	64	Dokumen	469.278.616	-	0	16	120.140.370	16	119.997.766	100	99,88	16	118.677.000	32	238.674.766	50	51
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	56	Laporan	202.034.374	-	0	14	49.762.161	14	49.546.713	100	99,57	14	49.373.500	28	98.920.213	50	49
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4	Dokumen	5.624.789	-	0	1	1.385.416	1	1.358.904	100	98,09	1	1.217.800	2	2.576.704	50	46
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	Dokumen	542.663.299	-	0	2	133.660.911	2	132.761.464	100	99,33	2	133.260.400	4	266.021.864	50	49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	Dokumen	43.386.285	-	0	1	10.686.277	1	10.676.240	100	99,91	1	6.331.500	2	17.007.740	50	39
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	Dokumen	3.822.214	-	0	1	941.432	1	918.400	100	97,55	1	936.900	2	1.855.300	50	49
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4	Dokumen	534.862.772	-	0	1	116.123.891	1	115.620.355	100	99,57	1	110.206.900	2	225.827.255	50	42
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	Dokumen	245.306.471	-	0	1	60.420.313	1	60.272.883	100	99,76	1	50.873.300	2	111.146.183	50	45
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	400	Orang/kali	241.120.022	-	0	100	297.939.133	100	296.507.012	100	99,52	100	37.427.300	200	333.934.312	50	138
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan BTT dan Santunan Kematian	100	%	27.500.000.000	100	2.333.212.840	100	15.093.180.000	100	2.413.757.451	100	15,99	100	3.842.732.200	100	8.589.702.491	100	31
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48	Laporan	27.500.000.000	-	0	12	15.093.180.000	12	2.413.757.451	100	15,99	12	3.842.732.200	24	6.256.489.651	50	23
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	68	OPD	605.858.859	-	0	68	74.226.320	68	72259574	100	97,35	68	98.395.000	136	170.654.574	###	28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	16	Dokumen	199.858.859	-	0	4	14.226.320	4	12597074	100	88,55	4	48.395.000	8	60.992.074	50	31
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4	Dokumen	406.000.000	-	0	1	60.000.000	1	59662500	100	99,44	1	50.000.000	2	109.662.500	50	27
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	50	%	9.144.811.221	30	8.587.832.404	35	2.585.001.528	35	2.421.761.373	100	93,69	40	1.362.105.529	40	12.371.699.306	80	135
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaannya/penyelesaian permasalahannya	100	%	9.144.811.221	100	8.587.832.404	100	2.585.001.528	100	2.421.761.373	100	93,69	100	1.362.105.529	100	12.371.699.306	100	135
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	609.000.000	-	0	1	150.000.000	1	149.935.450	100	99,96	1	-	2	149.935.450	50	25
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	Dokumen	67.347.280	-	0	2	16.588.000	2	10.300.000	100	62,09	2	16.588.000	4	26.888.000	50	40
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	824.903.581	-	0	1	110.578.222	1	76.902.900	100	69,55	1	140.578.222	2	217.481.122	50	26
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	Laporan	3.665.092.874	-	0	2	787.732.235	2	755.085.100	100	95,86	2	539.700.307	4	1.294.785.407	50	35
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	Laporan	406.000.000	-	0	1	100.000.000	1	99.900.000	100	99,90	1	50.000.000	2	149.900.000	50	37

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	406.000.000	-	0	1	140.000.000	1	133.197.900	100	95,14	1	100.000.000	2	233.197.900	50	57
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Laporan	1.356.810.588	-	0	2	838.638.800	2	789.522.423	100	94,14	2	166.479.000	4	956.001.423	50	70
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	116	Laporan	215.180.000	-	0	29	53.000.000	29	49.842.000	100	94,04	29	53.000.000	58	102.842.000	50	48
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	600	Laporan	1.042.039.600	-	0	150	256.660.000	150	250.415.600	100	97,57	150	269.260.000	300	519.675.600	50	50
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600	Orang/Kali	552.437.298	-	0	150	131.804.271	150	106.660.000	100	80,92	150	26.500.000	300	133.160.000	50	24
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	35,45	%	13.255.019.361	20	1.822.931.593	31,5	3.405.684.354	47,5	3.232.441.742	151	94,91	32,5	3.479.747.195	32,45	8.535.120.530	92	64
		Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah	35,45	%		31		31,5		53,8		171	#DIV/0!	32,5		32,45	-	92	-
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak	4	dokumen	13.255.019.361	1	1.822.931.593	1	3.405.684.354	1	3.232.441.742	100	94,91	1	3.479.747.195	2	8.535.120.530	50	64
		Persentase realisasi pajak daerah	95	%		110		85		114		135	#DIV/0!	90		90	-	95	-
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12	Dokumen	1.127.308.923	-	0	3	477.641.781	3	456.689.929	100	95,61	3	217.096.121	6	673.786.050	50	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024			
								Target Renja PD Tahun 2023		Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	310.558.852	-	0	1	40.819.890	1	20.309.190	100	49,75	1	18.186.730	2	38.495.920	50	12
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36	Laporan	874.939.541	-	0	9	218.491.385	9	218.478.164	100	99,99	9	125.000.000	18	343.478.164	50	39
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36	Laporan	2.031.759.604	-	0	9	475.433.234	9	475.173.233	100	99,95	9	300.000.000	18	775.173.233	50	38
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200.000	Pajak	1.799.650.451	-	0	50000	450.274.789	52996	439.451.776	106	97,60	50000	362.382.342	102.996	801.834.118	51	45
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	860	Layanan	845.309.419	-	0	215	208.188.907	215	181.445.361	100	87,15	215	149.560.000	430	331.005.361	50	39
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	196380	Dokumen	6.104.235.826	-	0	49095	1.495.115.958	49095	1.422.609.089	100	95,15	49095	1.247.010.514	98.190	2.669.619.603	50	44
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	16	Laporan	161.256.745	-	0	4	39.718.410	4	18.285.000	100	46,04	4	96.712.930	8	114.997.930	50	71

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan
   a. Realisasi Kegiatan dan subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
   b. Realisasi Kegiatan dan subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   c. Realisasi Kegiatan dan subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   a. Realisasi Kegiatan dan subkegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Pendapatan Daerah
   a. Realisasi Kegiatan dan subkegiatan Pengelolaan pendapatan pajak daerah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

   Seluruh kegiatan/subkegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sedangkan untuk tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga periode Renstra, capaian program sampai dengan tahun 2024 terhadap periode akhir RPJMD sudah diatas 70% pada seluruh program sehingga kedepan perlu optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara konsisten agar dapat mendorong pencapaian target periode akhir Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Blitar

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI			CATATAN
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase realisasi Pajak Daerah terhadap realisasi PAD			32,45%	33,45%	34,45%	35,45%	32,96%	33,45%	34,45%	35,45%	Pada Tahun 2023 Realisasi Pajak Daerah menyumbang sebesar 32,96% terhadap PAD
2	Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah			35%	40%	45%	50%	35%	40%	45%	50%	

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

Seluruh Indikator telah memenuhi target, kedepan BPKAD Kota Blitar terus melakukan Optimalisasi pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, mencari sumber – sumber pajak baru, memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga kedepan kontribusi pajak daerah terhadap PAD semakin meningkat, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan pengelolaan aset daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan;
2. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah;
5. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah;
6. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
7. Perlunya produk hukum terbaru berkaitan dengan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pajak daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur mengenai pajak daerah;
8. Masih belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;
9. Masih terdapatnya piutang pajak baik yang masih dapat ditagih maupun yang sudah kedaluarsa yang belum terselesaikan.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Kurangnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan – pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
3. Lemahnya koordinasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan akuntansi dan dokumen pelengkap sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
4. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan OPD dalam pelaksanaan anggaran;

5. Belum adanya Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Tim Terpadu Pengelolaan Pajak Daerah;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah;
7. Tidak lengkapnya berkas pendukung sebagai syarat administrasi penghapusan piutang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD - Kota Blitar	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	84 Indeks	11.273.357.421,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD - Kota Blitar	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	84 Indeks	19.119.812.355,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart*	100 %	12.536.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart*	100 %	12.664.700,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	5.849.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	5.913.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10 Laporan	6.687.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10 Laporan	6.751.700,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar*	100 %	9.497.872.500,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar*	100 %	17.345.032.301,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	60 Orang/bulan	9.493.963.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	868 Orang/bulan	17.340.947.301,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	18 Laporan	3.909.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	18 Laporan	4.085.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	185.983.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	174.363.370,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	3 Paket	52.148.200,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	3 Paket	75.144.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	75 Orang	133.835.300,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	73 Orang	99.219.370,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	684.411.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	789.313.400,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	13.357.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	13.348.900,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	36.569.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	45.814.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	11.007.300,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	11.013.900,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	51.634.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	24 Paket	59.990.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	300.316.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	387.063.600,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	36 Dokumen	11.880.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	36 Dokumen	12.600.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	108 Laporan	249.727.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	108 Laporan	249.808.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	12 Dokumen	9.921.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	12 Dokumen	9.675.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan*	100 %	156.252.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan*	100 %	152.877.300,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	4 Unit	20.000.000,00	Pengadaan Mebel	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	4 Unit	19.493.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	28 Unit	136.252.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	28 Unit	133.384.300,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	431.237.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	413.865.500,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	24 Laporan	93.660.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	24 Laporan	94.280.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	337.577.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	319.585.500,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	100 %	305.064.521,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*	100 %	231.695.784,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	55 Unit	110.853.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	55 Unit	110.831.284,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	43.561.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	45.796.500,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	150.650.021,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	75.068.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase tertib perencanaan keuangan daerah* *Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu* *Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %*	100 % 100 % 98 %	6.070.598.180,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase tertib perencanaan keuangan daerah* *Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu* *Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %*	100 % 100 % 98 %	6.078.870.180,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun*	100 %	1.100.420.180,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun*	100 %	1.139.615.180,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	68.832.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	68.428.700,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	80.038.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2 Dokumen	79.635.100,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	45.045.600,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	88.560.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	45.720.180,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	45.435.900,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	41.930.800,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	40.339.500,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	71.780.300,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	68 Dokumen	72.571.980,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	548.662.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	553.986.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	2 Dokumen	147.774.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	2 Dokumen	140.510.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	1 Dokumen	30.848.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	1 Dokumen	31.048.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	80 Orang	19.788.000,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	80 Orang	19.100.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan*	68 OPD	363.478.400,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan*	68 OPD	363.350.500,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	302 Dokumen	109.403.600,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	302 Dokumen	109.314.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	274 Dokumen	10.270.600,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	274 Dokumen	10.306.900,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	25 Dokumen	37.697.400,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	25 Dokumen	37.641.200,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	293 Laporan	25.236.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	293 Laporan	25.218.000,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	68 Dokumen	65.997.600,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	68 Dokumen	65.734.400,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	5 Dokumen	42.304.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	3 Dokumen	34.336.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	150 Orang	72.569.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	150 Orang	80.800.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan*	100 %	508.304.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan*	100 %	508.304.500,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	16 Dokumen	118.677.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	16 Dokumen	118.676.400,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	14 Laporan	49.373.500,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	14 Laporan	49.364.200,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	1 Laporan	1.217.800,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	1 Laporan	1.212.300,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	133.260.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	140.673.800,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	1 Dokumen	6.331.500,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	1 Dokumen	6.322.200,00	*Tidak Berubah*
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	1 Dokumen	936.900,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	1 Dokumen	933.500,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	110.206.900,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	104.465.800,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	50.873.300,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	50.872.200,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	100 Orang	37.427.300,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	100 Orang	35.784.100,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	100 %	4.000.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	100 %	4.000.000.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12 Laporan	4.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12 Laporan	4.000.000.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan*	68 OPD	98.395.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan*	68 OPD	67.600.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah*	4 Dokumen	48.395.000,00	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah*	4 Dokumen	17.600.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	1 Dokumen	50.000.000,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	1 Dokumen	50.000.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi*	40 %	1.372.105.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi*	40 %	5.706.362.222,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian*	100 %	1.372.105.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian*	100 %	5.706.362.222,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	0,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	16.588.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	16.588.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	140.578.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	203.178.222,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	539.700.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	483.957.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	1 Laporan	50.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik*	1 Laporan	50.000.000,00	*Tidak Berubah*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Blitar					Blitar	*Daerah*			
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1 Laporan	100.000.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1 Laporan	100.000.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	166.479.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	4.566.479.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan pengadaan kendaraan DInas*
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	29 Laporan	53.000.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	29 Laporan	53.000.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	150 Laporan	269.260.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	150 Laporan	206.660.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	150 Orang	26.500.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	150 Orang	26.500.000,00	*Tidak Berubah*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah* *Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah*	32,45 % 32,45 %	2.515.850.930,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD - Kota Blitar	*Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah* *Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah*	32,45 % 32,45 %	2.516.178.530,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah* *Persentase Realisasi Pajak Daerah*	1 dokumen 90 %	2.515.850.930,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah* *Persentase Realisasi Pajak Daerah*	1 dokumen 90 %	2.516.178.530,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	3 Dokumen	217.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	3 Dokumen	145.361.558,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	1 Laporan	18.186.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	1 Laporan	18.137.600,00	*Perubahan menyesuaikan standart harga*
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	9 Laporan	125.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	9 Laporan	125.000.000,00	*Tidak Berubah*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	9 Laporan	300.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	9 Laporan	300.000.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	50000 Obyek Pajak	362.382.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	50000 Obyek Pajak	362.382.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	215 Layanan	149.560.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	215 Layanan	149.560.000,00	*Tidak Berubah*
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	49095 Dokumen	1.247.010.000,00	Penagihan Pajak Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	49095 Dokumen	1.294.039.372,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	4 Laporan	96.712.930,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKAD - Kota Blitar	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	4 Laporan	121.698.000,00	*Perubahan menyesuaikan kebutuhan*
J U M L A H					21.231.911.531,00					33.421.223.287,00	

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diaksanakan oleh BPKAD Kota Blitar juga berasal dari pemangku kepentingan baik dari DPRD dan kelompok masyarakat, pada tahun 2025 BPKAD Kota Blitar tidak mendapat usulan dari Musrenbang Kecamatan maupun dari pokok-pokok pikiran DPRD.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP Tahun 2025 ” Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan tema dan melaksanakan arah kebijakan dan sasaran tersebut, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional, yakni:

a. Prioritas Nasional 1:

   Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

b. Prioritas Nasional 2 :

   Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

c. Prioritas Nasional 3:

   Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

d. Prioritas Nasional 4:

   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

e. Prioritas Nasional 5:

   Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

f. Prioritas Nasional 6 :

   Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

g. Prioritas Nasional 7:

   Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bitar yaitu melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dukungan BPKAD Kota Blitar dalam pencapaian arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dalam prioritas Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam prioritas tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas dengan kegiatan prioritas transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu BPKAD Kota Blitar dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah,

dan pendapatan daerah serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan, perlu memperkuat pelayanan bagi perangkat daerah maupun masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan maupun pada dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi wewenang daerah terfasilitasi oleh sumber pendanaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran BPKAD Kota Blitar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Target	Realisasi	Target	Target
						2023		2024	2025
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Realisasi pajak daerah terhadap PAD	32,45%	32,96 %	33,45%	34,45%
					Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	100%	100%	100%	100%
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	70	71
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	35%	35%	40%	45%
					Indeks Pengelolaan Aset Daerah	-	-	2,5	2,7

2.	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,65)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86)	A (85,40)	A (85,60)	A (85,65)

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD tahun 2025 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan, tindaklanjut LKJIP, dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 sesuai Tabel 3.3.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Isu penting Pelayanan dan Tindak Lanjut LKJIP
5.02	KEUANGAN		
37013	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Isu penting Pelayanan dan Tindak Lanjut LKJIP
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
37378	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Isu penting Pelayanan dan Tindak Lanjut LKJIP
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
37743	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian	Isu penting Pelayanan dan Tindak Lanjut LKJIP
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
38109	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
	dan Bangunan (BPHTB)		
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BPKAD Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Rencana tindak lanjut perbaikan LKJIP BPKAD Kota Blitar Tahun 2023 pada Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP BPKAD Kota Blitar Tahun 2023 pada Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan kegiatan pendukung/penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
			Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan keuangan daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Melaksanakan pembinaan penyusunan leporan keuangan daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan pelayanan penatausahaan Belanja Tidak Terduga	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD	KegiatanPengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
		Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
		Mengimplementasikan SIPD Penatausahaan keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
3	Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Melaksanakan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (dimulai dari perencanaan, penatausahaan sampai pelaporan Barang Daerah termasuk didalamnya pengawasan dan sertifikasi aset)	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Inventarisasi Barang Milik Daerah
			Penilaian Barang Milik Daerah
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola barang daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
4	Meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian fiskal daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Melaksanakan kajian untuk menggali sumber-sumber penghasilan daerah yang baru sesuai dengan Regulasi yang baru (UU HKPD)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Melaksanakan Sosialisasi lebih insentif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Melaksanakan update dan pemutakhiran database pajak daerah, integrasi aplikasi pajak daerah dengan aplikasi stakeholder terkait, memudahkan pelayanan pajak daerah melalui e-pelayanan pajak daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Melaksanakan penilaian dan penyesuaian NJOP PBB	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap WP yang mengajukan keberatan/keringanan pajak daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Melaksanakan penagihan pajak daerah kepada WP secara intensif, menerapkan reward dan punishment pada WP yang tertib dan melanggar ketentuan pajak daerah	Penagihan Pajak Daerah
		Melaksanakan rekonsiliasi penerapan transaksi non tunai terhadap OPD penghasil dalam penerapan pembayaran Pajak, retribusi dan Lain-lain	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
		pendapatan asli daerah yang sah	

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan BPKAD Kota Blitar tahun 2025 adalah 4 program, 14 kegiatan, dan 67 Sub Kegiatan. Selanjutnya program, kegiatan dan Sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPKAD Kota Blitar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			33.421.223.287,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			26.815.245.403,00
5.02	KEUANGAN			33.421.223.287,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			26.815.245.403,00
37013	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	19.119.812.355,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		84 Indeks	11.428.717.870,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	12.664.700,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	39.999.187,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.913.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	18.719.209,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6.751.700,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	21.279.978,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 %	17.345.032.301,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	9.374.655.265,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	17.340.947.301,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Orang/bulan	9.371.035.081,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	4.085.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	3.620.184,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	174.363.370,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	293.078.946,00
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	75.144.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	131.962.500,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	99.219.370,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75 Orang	161.116.446,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	789.313.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	779.926.267,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.348.900,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	13.637.747,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.814.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	37.324.793,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	11.013.900,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	11.264.092,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	59.990.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Paket	27.199.606,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	387.063.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	306.116.209,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12.600.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Dokumen	12.200.220,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	249.808.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		108 Laporan	362.064.300,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	9.675.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	10.119.300,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	152.877.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	367.764.244,00
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	19.493.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	8.681.322,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	133.384.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28 Unit	359.082.922,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	413.865.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	306.428.400,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	94.280.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Laporan	103.550.400,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	319.585.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	202.878.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	231.695.784,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	266.865.561,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	110.831.284,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55 Unit	113.064.842,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45.796.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Unit	32.867.970,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.068.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	120.932.749,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37378	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	100 % 100 % 98 %	6.078.870.180,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 % 100 % 98 %	9.758.971.923,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	100 %	1.139.615.180,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	1.551.063.148,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	68.428.700,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	81.812.461,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	79.635.100,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	75.352.291,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	88.560.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 Dokumen	39.639.862,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	45.435.900,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 Dokumen	31.142.242,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	40.339.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 Dokumen	40.255.544,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	72.571.980,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 Dokumen	106.263.806,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	553.986.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	796.810.678,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	140.510.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	125.054.173,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	31.048.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	164.905.032,00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	19.100.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Orang	89.827.059,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	68 OPD	363.350.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 OPD	480.855.364,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	302 Dokumen	109.314.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		302 Dokumen	117.689.809,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	274 Dokumen	10.306.900,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		274 Dokumen	1.726.350,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	37.641.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Dokumen	16.636.377,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	293 Laporan	25.218.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		293 Laporan	2.844.476,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	68 Dokumen	65.734.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 Dokumen	85.382.279,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	34.336.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	37.435.295,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	80.800.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150 Orang	219.140.778,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan	100 %	508.304.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	574.842.565,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	118.676.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Dokumen	117.897.583,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	49.364.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Laporan	50.757.404,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1.212.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.413.124,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	140.673.800,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	136.334.129,00
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	6.322.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.900.003,00
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	933.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	960.261,00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	104.465.800,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	134.374.391,00
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.872.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	61.628.719,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	35.784.100,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	60.576.951,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	4.000.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	7.000.000.000,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	4.000.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	7.000.000.000,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	68 OPD	67.600.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		68 OPD	152.210.846,00
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	17.600.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	50.210.846,00
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	102.000.000,00
37743	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	40 %	5.706.362.222,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45 %	2.297.464.888,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian	100 %	5.706.362.222,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 %	2.297.464.888,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	153.000.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	16.588.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	16.919.760,00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	203.178.222,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	207.241.786,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	483.957.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	920.786.880,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	102.000.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	102.000.000,00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	4.566.479.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	340.873.596,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29 Laporan	53.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29 Laporan	54.060.000,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	150 Laporan	206.660.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	261.793.200,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	26.500.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150 Orang	138.789.666,00
38109	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	32,45 % 32,45 %	2.516.178.530,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34,45 % 34,45 %	3.330.090.722,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah	1 dokumen 90 %	2.516.178.530,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 dokumen 90 %	3.330.090.722,00
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	145.361.558,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	283.222.381,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	18.137.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	78.022.175,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	125.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Laporan	219.812.397,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	9 Laporan	300.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Laporan	510.442.068,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50000 Obyek Pajak	362.382.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50000 Obyek Pajak	452.128.931,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	215 Layanan	149.560.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		215 Layanan	212.373.504,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	49095 Dokumen	1.294.039.372,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		49095 Dokumen	1.533.576.488,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	121.698.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	40.512.778,00
J U M L A H				33.421.223.287,00					26.815.245.403,00

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Blitar tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra BPKAD Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan tahun 2024 (Triwulan I). Rencana Kerja sebagai pedoman bagi BPKAD Kota Blitar di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
   Program kegiatan tahun 2025 dilaksanakan berdasar prioritas pembangunan tahun 2025 dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
   a. BPKAD Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD tahun 2025;
   b. BPKAD Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja tahun 2025;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaa Renja Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
   Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
   a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja, RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
   b. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
   c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

3. Rencana Tindak Lanjut
   Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD Kota Bitar. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian BPKAD Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh staf di BPKAD Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarak

24. RENCANA KERJA BADAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Kepegawaian Negara) dan Renja Provinsi (Renja Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Kepegawaian Negara dan Renja Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh

langsung terhadap terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Pada tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, tema pembangunan tahun 2025 *"Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar mengemban pelayanan publik dan tata kelola berkomitmen menerapkan *good governance* dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi sebagai upaya pencapaian misi 5 RPJMD. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor ... Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi

penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

Penyusunan Renja Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan mampu mendorong tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, konsisten, terintegrasi, dan partisipatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam fungsinya melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna antaranya dengan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan penilaian kinerja yang meliputi pelayanan pengadaan, pemberhentian, informasi, penilaian, evalusi kinerja dan penghargaan pegawai serta merumuskan kebijakan teknis dalam hal mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi.

2.1 Evaluasi Hasil Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi Kewenangan Daerah dengan (tiga) program yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Urusan Kepegawaian dijabarkan dalam Program Kepegawaian, sedangkan urusan pendidikan dan pelatihan dijabarkan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi memuat kajian terhadap realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Pada Tahun 2023 (n-2) mengampu dua urusan yaitu: Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang terbagi dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan;
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan;

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terbagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan.

2. Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terbagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan;
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terbagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan;
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terbagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan;

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan.

Untuk mengetahui pelaksanaan atas Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (n-1), mengacu pada APBD tahun 2024 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berikut disajikan tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s.d Tahun 2024

Kota Blitar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03				KEPEGAWAIAN									
					TUJUAN 1: MENINGKATNYA TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 86,38	A 85,16	A 86,30	A 85,49	99,06%	A 86,30	A 86,30	99,97%
					SASARAN 1 : MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 86,38	A 85,16	A 86,30	A 85,49	99,06%	A 86,30	A 86,30	99,97%
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00 BAIK	84,13 BAIK	83,25 BAIK	87,07 BAIK	104,59%	87,00 (baik)	87,50 (baik)	103,57%
5	03	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.01	0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100,00%	10 dokumen	20 dokumen	66,67%
5	03	01	2.01	0006	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100,00%	8 laporan	16 laporan	66,67%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.02	0001	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	304 orang/bulan	103 orang	108 orang	108 orang	100,00%	103 orang	207 orang	68,09%
5	03	01	2.02	0007	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	36 laporan	66,67%
5	03	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
5	03	01	2.05	0002	Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	0	3 paket	3 paket	100,00%	2 paket	5 paket	83,33%
5	03	01	2.05	0010	Sub kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100,00%	40 orang	40 orang	100%
5	03	01	2.05	0011	Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	29 orang	40 orang	40 orang	100,00%	40 orang	40 orang	100%
5	03	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.06	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	24 unit	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	75,00%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.06	0003	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4 jenis	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
5	03	01	2.06	0004	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 paket	1600 dos	36 paket	28 paket	77,78%	36 paket	36 paket	66,67%
5	03	01	2.06	0005	Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15 jenis	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	66,67%
5	03	01	2.06	0006	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 dokumen	720 buah	24 dokumen	24 dokumen	100%	24 dokumen	24 dokumen	66,67%
5	03	01	2.06	0009	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 laporan	38 kali	84 laporan	84 laporan	100%	45 laporan	45 laporan	91,49%
5	03	01	2.06	0010	sub kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	0	0	0	0,00%	1 dokumen	1 dokumen	33,34%
5	03	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.07	0005	sub kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	0	72 unit	72 unit	100%	2 unit	2 unit	50,00%
5	03	01	2.07	0006	sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	0	17 unit	17 unit	100%	5 unit	5 unit	88,00%
5	03	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.08	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	13 laporan	1 rekening	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	92,30%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	66,67%
5	03	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.09	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
5	03	01	2.09	0006	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	89 unit	92 unit	92 unit	100%	92 unit	92 unit	100%
5	03	01	2.09	0009	Sub kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	40 unit	1 unit	1 unit	100%	0 unit	0 unit	100%
					TUJUAN 2: MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80,50	53,88	80,20	70,89	88,39%	80,30	80,30	99,63%
					SASARAN 2: MENINGKATNYA TATA KELOLA KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BAIK	Indeks Sistem Merit	300	262	270	271,5	100,56%	280	280	93,33%
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	74,00%	52,00%	55,00%	52,00%	94,55%	61,00%	61,00%	82,43%
						Persentase data kepegawaian yang valid	78,00%	58,00%	63,00%	95,00%	150,79%	68,00%	68,00%	87,18%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,58%	84,49%	91,18%	83,15%	91,19%	91,18%	91,18%	99,56%
						Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	94,66%	82,27%	90,16%	92,00%	102,04%	91,56%	91,56%	96,73%
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%	49,78%	43,67%	51,92%	118,89%	45,94%	45,94%	90,97%
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%	17,40%	44,20%	18,61%	42,10%	46,47%	46,47%	91,10%
5	03	02	2.01		Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	8,00%	8,00%	20,00%	97,61%	488,05%	8,00%	8,00%	100,00%
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
						Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	50%	95%	95%	100,00%	50%	50%	52,63%
5	03	02	2.01	0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	33,34%
5	03	02	2.01	0003	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	33,34%
5	03	02	2.01	0006	Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	36 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	12 dokumen	33,34%
5	03	02	2.01	0008	Sub kegiatan : Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00%	1 lembaga	1 lembaga	33,34%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.01	0010	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	33,34%
5	03	02	2.01	0011	Sub kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	36 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	12 dokumen	33,34%
5	03	02	2.02		Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	70,00%	70%	70,00%	82,40%	117,71%	70,00%	70,00%	100,00%
5	03	02	2.02	0001	Sub kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	4 dokumen	4 dokumen	66,67%
5	03	02	2.03		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	30,00%	0	10,00%	12,05%	120,50%	10,00%	17,00%	56,67%
5	03	02	2.03	0002	Sub kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	36 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	12 dokumen	66,67%
5	03	02	2.04		Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	96,16%	82,27%	96,16%	92,00%	95,67%	93,06%	96,00%	99,83%
5	03	02	2.04	0002	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 laporan	laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	2 laporan	2 laporan	66,67%
5	03	02	2.04	0004	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 orang	308 orang	200 orang	284 orang	142,00%	200 orang	584 orang	97,33%
5	03	02	2.04	0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	460 orang	100 orang	320 orang	170 orang	53,12%	160 orang	330 orang	71,74%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.04	0008	Sub kegiatan: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	36 laporan	1 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	24 laporan	66,67%
					SASARAN 3 : MENINGKATNYA KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	50%	49%	13,02%	75,91%	583,03%	49%	52,00%	104,00%
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,85%	92,00%	96,70%	94,93%	98,17%	96,75%	96,75%	99,90%
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%	45,94%	43,67%	51,92%	118,89%	45,94%	45,94%	90,97%
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%	46,47%	44,20%	18,61%	42,10%	46,47%	46,47%	91,10%
5	04	02	2.01		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	2,09%	1,20%	1,83%	152,50%	1,20%	2,05%	170,83%
5	04	02	2.01	0001	sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	36 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	24 dokumen	66,67%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD)Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	04	02	2.01	0003	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3150 orang	1000 orang	0	0	0,00%	1000 orang	1400 orang	44,44%
5	04	02	2.01	04	sub kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	750 dokumen	50 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	0,00%	250 dokumen	550 dokumen	73,33%
5	04	02	2.02		Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	66,67%
5	04	02	2.02	0007	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15 laporan	1 laporan	0	0	0,00%	5 laporan	5 laporan	40,00%

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tribulan I Tahun 2024

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023 (n-2) Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota telah tercapai target kinerja yaitu berupa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai capaian 87,07.
   a. Tidak ada realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
   b. Realisasi kegiatan/ sub kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
   c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian nilai 87,07 dari target 83,25.
   d. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target dari kinerja program/ kegiatan;
      1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dapat memenuhi target karena telah dilakukan analisa kebutuhan atas kinerja organisasi;
      2) Kelengkapan dokumen penunjang, ketersediaan penyedia barang/jasa dan sarana prasarana yang tersedia mendukung tercapainya target kinerja;
      3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kinerja penunjang urusan telah dilakukan berkala.

   e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renja Perangkat Daerah. Dari 7 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi telah berjalan dengan baik.
   f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
      Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan yaitu, kedepan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan BKPSDM.

2. Program Kepegawaian
   Program Kepegawaian memiliki memiliki 6 (enam) indikator kinerja, antara lain: (1.) Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan dengan target 55,00% terealisasi 52,00% atau tercapai 94,55% yang diperoleh dari jumlah eksisting ASN Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Terampil; (2) Persentase data kepegawaian yang valid dengan target 63% terealisasi 95,00% atau tercapai 150,79%, diperoleh dari updating data pada siasn; (3) Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi, diperoleh 83,15% dari nilai target 91,18% terealisasi 83,20%; (4) Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80 tercapai 102,04% dari target 90,16% terealisasi 92,00%.
   a. Tidak ada realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Namun ada indikator kinerja program yang belum mencapai target yaitu persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi. Hal ini dikarenakan masih ada ASN yang belum mengikuti diklat sesuai jabatannya.
   b. Realisasi kegiatan/sub kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu;

1) Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN yang disetujui dengan indikator Kinerja Persentase usulan formasi ASN yang disetujui.
2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator kinerja persentase ASN yang ditempatkan.
3) Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator kinerja persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi.
4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja persentase SKP yang diverifikasi.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target dari kinerja program/kegiatan;
   1) Adanya kebijakan dari pusat untuk pengangkatan ASN melalui jalur PPPK, sehingga terjadi kenaikan yang signifikan usulan formasi ASN yang disetujui dari target yang ditetapkan.
   2) Adanya reward dari pemerintah provinsi Jawa timur atas prestasi yang diraih BKPSDM Kota Blitar, berupa fasilitasi diklat fungsional perencana.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renja Perangkat Daerah. Dari 4 kegiatan pada Program Kepegawaian telah tercapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi telah berjalan dengan baik.
f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu, kedepan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan BKPSDM.

3. Capaian *Program Pengembangan Sumber Daya Manusia* dengan indikator Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah tercapai 97,90% dari target 96,7% terealisasi 94,93%
   a. Tidak ada realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun target kinerja Program Pengembangan Sumber Daya manusia dengan indikator Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa ASN yang belum ada kemauan melanjutkan tingkat Pendidikan ke jenjang sarjana/diploma.
   b. Realisasi kegiatan/sub kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   c. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu pengembangan kompetensi teknis.
   d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target dari kinerja program/kegiatan;
      1) Masih adanya ASN yang kurang dalam minat meningkatkan Pendidikan kejenjang sarjana/diploma.
      2) Adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 pada pasal 49 ayat 2 yang menyebutkan “pembelajaran dapat dilaksanakan melalui sistem terintegrasi” sehingga muncul pemanfaatan pengembangan kompetensi melalui digital/online. Dengan adanya hal tersebut banyak ASN yang bisa mendapatkan pengembangan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi digital.
      3) Pelayanan yang semakin baik pada BKPSDM, terutama dengan adanya aplikasi SMEDI (Sistem Manajemen Pembelajaran

Kediklatan) sehingga memudahkan ASN Kota Blitar dalam meningkatkan pengembangan kompetensi.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renja Perangkat Daerah. Dari 1 kegiatan pada Program *Pengembangan Sumber Daya Manusia* telah tercapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi telah berjalan dengan baik.
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan yaitu, kedepan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan BKPSDM.

Adapun untuk Capaian Kinerja pada tahun 2024 (n-1) pada tribulan I *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, program ini menunjang seluruh kelancaran kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Blitar, dengan 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Dari perencanaan pelaksanaan di tribulan I, beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana karena schedule pelaksanaan pada tribulan 2.

Capaian Kinerja Pada tribulan I Tahun 2024 c*apaian Program Kepegawaian* memiliki 6 (enam) indikator kinerja, antara lain: (1.) Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan dengan target 61,00% terealisasi 67,19% atau tercapai 110,15% yang diperoleh dari jumlah eksisting ASN Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Terampil; (2) Persentase data kepegawaian yang valid dengan target 68% terealisasi 71,00% atau tercapai 103,93%, diperoleh dari updating data pada siasn; (3) Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi, diperoleh 44,37% dari nilai target 91,18% terealisasi 48,66%; (4) Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80 tercapai 98,91% dari target 91,56% terealisasi 90,56%. Untuk indikator SKP tersebut karena adanya perubahan aturan pengelolaan kinerja pegawai yang awalnya dari PP Nomor 46 Tahun 2011 menjadi PP Nomor 30 Tahun 2019 kemudian terbit pengelolaan kinerja sesuai PerMenPAN RB Nomor 6 Tahun 2022. Beberapa perubahan aturan dan kebijakan tersebut berpengaruh pada pemahaman ASN dalam menyusun melaporkan SKP nya kepada BKPSDM; (5) Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi, tercapai 103,59% dari target yang ditetapkan 45,94% terealisasi 47,59%. Capaian yang tinggi ini karena beberapa inovasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan BKSDM untuk memfasilitasi melalui berbagai bentuk pengembangan kompetensi baik dilakukan secara mandiri, pola kontribusi dengan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, baik klasikal maupun online sampai blended learning; (6) Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi tercapai 34,24% atau dari target 45,47% terealisasi sebesar 15,57%. Dengan capaian kinerja sub kegiatan yang belum terlaksana sesuai perencanaan tribulan I adalah sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.

Capaian *Program Pengembangan Sumber Daya Manusia* dengan indikator Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah tercapai 103,33% dari target 1,2% terealisasi 1,24%. Nilai ini salah satunya karena terbitnya Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik Pada Dokumen Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pemberian fasilitasi tugas belajar, izin belajar dan pencantuman gelar dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan serta dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, Pagu anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sebesar Rp. 14.645.969.413,00 realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 12.7994.779.239,00 atau sebesar 87,36% dari anggaran yang dianggarkan. Untuk Program Kepegawaian Daerah rata-rata tingkat ketercapaian indikator 99,93%, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ketercapaian indikator sebesar 97,90% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 104,59%.

Sedangkan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Untuk lebih jelasnya tersaji dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

No	Indikator	SKM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra 2021 - 2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN			80,2	80,3	80,4	80,5	70,89	80,3	80,4	80,5	Target IP ASN belum dapat terpenuhi dalam 2 tahun terakhir, Pemerintah kota Blitar melalui BKPSDM terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat teknis, manajerial, dan fungsional. Dan Perangkat Daerah lainnya dapat memberikan pengembangan kompetensi melalui peningkatan kapasitas, coaching mentoring kepada pegawai.
2	Sasaran: Indeks Sistem Merit			270	280	290	300	271,5	280	290	300	Didukung oleh komitmen, strategi dan program yang efektif dalam Perencanaan Kebutuhan Pegawai, pengadaan, pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi, mutasi, Rotasi dan Promosi, pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, perlindungan serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit.
3	Sasaran: Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN			13,02%	14,73%	16,40%	16,40%	75,91%	52,00%	52,00%	55,00%	Pengembangan Kompetensi ASN melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, capaian ini berkat peran aktif ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan peningkatan jenjang pendidikan, mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah, mengikuti diklat baik secara klasikal maupun daring yang sesuai dengan tupoksi, mengikuti uji kompetensi (fit & proper test) dengan hasil yang memuaskan, inovasi peningkatan

No	Indikator	SKM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra 2021 - 2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												pengembangan kompetensi melalui pekan kolabjar.
4	Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A (86,35)	A (86,36)	A (86,37)	A (86,38)	A (85,49)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	Target capaian nilai SAKIP BKPSDM belum dapat tercapai dalam 3 tahun terakhir, perlu adanya dukungan peran aktif dari seluruh elemen dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib melaporkan setiap capaian kinerja secara tepat waktu dan sesuai standart.
5	IKK: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar		64,75%	95,84%	95,95%	95,79%	95,79%	83,23%	85,00%	86,00%	87,00%	Capaian IKK dalam 3 tahun terakhir masih jauh dari target, hal ini perlu upaya untuk memotifasi ASN meraih jenjang pendidikan lebih tinggi. Upaya yang telah dilakukan BKPSDM adalah dengan menerbitkankan perwali Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik Pada Dokumen Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
6	IKK: Rasio Pegawai fungsional		11,76%	22,20%	22,25%	22,30%	22,35%	24,27%	24,27%	24,57%	24,87%	Capaian melebihi target yang meningkat dari tahun ke tahun disebabkan jumlah pegawai fungsional terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan formasi dalam perekrutan pegawai baru.

No	Indikator	SKM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra 2021 - 2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	IKK: Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi		15,57%	44,20%	46,47%	48,74%	51,01%	17,85%	18,00%	18,50%	19,00%	pejabat fungsional yang bersertifikat tidak memenuhi target yang ditetapkan. Jumlah pelaksanaan diklat sertfikasi pejabat fungsional sangat terpengaruh dengan adanya kuota dan jenis sertifikasi fungsional yang tersedia dari lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi.

Sumber: Laporan Kinerja Tribulanan, 2024

Realisasi kinerja sasaran sesuai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip – prinsip manajemen kepegawaian yang baik
   Capaian indeks Sistem Merit yang diperoleh pada tahun 2023 melebihi dengan target yang ditentukan, dimana target yang ditetapkan adalah 270 dan pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar mampu mewujudkannya melebihi target sebesar 271,50 atau tercapai 100,56%.
2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara
   Hasil analisa Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat struktural, Teknis/Fungsional dan Peningkatan Kapasitas ASN pada tahun 2023 melebihi target yang ditentukan dengan besar target yang ditentukan sebesar 13,02% dengan realisasi sebesar 75,91%, tercapai lebih dari lima kali lipatnya.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

   Untuk tahun 2023 dengan target Nilai SAKIP Perangkat Daerah A, capaian kinerjanya diperoleh predikat A namun belum mencapai target yang diinginkan dengan nilai 86,35, namun diperoleh nilai 85,49.

Dari rekapitulasi hasi kinerja pelayanan tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Sistem Merit Tahun 2024 belum menyajikan nilai indeks yang final, karena penilaian tahunan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dilakukan pada bulan Oktober.
b. Capaian indikator Persentase ASN yang mengikuti diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN pada tribulan I Tahun 2024 diperoleh 47,59% dari target tahun 2024 sebesar 49,00% atau nilai capaian 97,12%. Hal ini didorong oleh kesadaran ASN memperoleh pengembangan kompetensi individu 20 JP dalam satu tahun. Sehingga antusiasme ASN Kota Blitar mengikuti webinar sangat tinggi.
c. Capaian indikator Nilai SAKIP perangkat daerah belum dapat disajikan, karena tahap evaluasi SAKIP masih berjalan.

Beberapa langkah dan strategi yang diupayakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam mencapai kinerja dengan maksimal adalah sebagai berikut:

a. Membangun manajemen talenta untuk meningkatkan tata kelola kepegawaian melalui sistem merit;
b. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas bersama lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi serta pendidikan pelatihan ASN;
c. Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk mengawal ketercapaian target kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD. Isu yang berkembang terkait pelayanan kepegawaian dan pendidikan pelatihan ASN adalah pada pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN baik individu maupun tingkat kota.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Belum optimalnya nilai Indeks Profesionalitas ASN individu, salah satu penyebabnya karena banyak pejabat struktural belum mendapatkan pelatihan manajerial;
2. Masih banyaknya tenaga fungsional tertentu yang belum memiliki sertifikasi kompetensi;

Tantangan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan yang purna tugas (pensiun);
2. Penyetaraan jabatan menjadi tenaga fungsional yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan pengampu.

Peluang Pengembangan Pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan sistem merit melalui optimalisasi;
2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dan penempatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
3. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* reformasi birokrasi pemerintah Kota Blitar dalam bidang SDM aparatur, meliputi:
    a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *Minus Growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta monitoring dan evaluasi redistribusi/ realokasi PNS
    b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
    c. Pembangunan *Assesment Center*

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil analisa terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, serta isu-isu penting skala nasional, regional maupun lingkup kota yaitu:

1. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional pasca penyetaraan jabatan;
2. Rencana tindaklanjut keputusan penghapusan Pegawai Tidak Tetap.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatnya Profesionalisme Aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel dimana pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten, profesional dalam pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual maka untuk itu diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggungjawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Indeks	9.276.254.499	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75 Indeks	16.388.948.799	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	10.032.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	9.175.500	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.068.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.211.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.964.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.964.500	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	8.357.549.689	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	15.643.976.599	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/ bulan	8.355.549.689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/ bulan	15.642.162.699	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.800.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	250.798.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	143.108.900	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	58.596.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	78.709.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	73.379.900	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	122.089.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	11.133.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	440.078.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	379.489.100	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	30.994.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	29.040.500	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6.428.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.983.800	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	50.406.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	32.400.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	32.987.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	29.185.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	8.555.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokuemn	8.553.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	299.997.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	273.896.800	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.710.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	430.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	28.976.660	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	63.615.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	8.952.200	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 unit	28.976.660	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 unit	54.662.800	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	67.254.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	70.756.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.254.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.756.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	121.565.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	78.827.700	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	74.862.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	49.213.700	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	46.702.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	29.614.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	48,21%	1.948.483.500	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	48,21%	1.762.741.150	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	67%				Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	67%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,38%				Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,38%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	48,74%				Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	48,74%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase data kepegawaian yang valid	73%				Persentase data kepegawaian yang valid	73%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	93,06%				Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	93,06%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	1.260.289.400	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	1.197.347.050	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%			Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
		Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	20%			Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	20%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	564.274.400	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	523.395.350	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	35.681.900	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	29.277.600	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	400.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	450.000.000	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	260.333.100	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	194.674.100	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang ditempatkan	70%	413.340.900	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang ditempatkan	70%	366.678.800	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	413.340.900	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	366.678.800	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase talent pool yang ASN yang dikelola	10%	185.172.500	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase talent pool yang ASN yang dikelola	10%	126.836.200	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 Dokumen	185.172.500	Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 Dokumen	126.836.200	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase SKP yang diverifikasi	94,56%	89.680.700	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase SKP yang diverifikasi	94,56%	71.879.100	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	38.610.500	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	30.590.500	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	7.531.200	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	5.661.900	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	43.539.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	35.626.700	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,80%	1.167.474.392	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,80%	2.183.322.400	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	48,21%				Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	48,21%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	48,74%				Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	48,74%		Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	629.851.192	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	552.437.500	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen	14.418.600	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen	10.569.500	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000 Orang	520.804.992	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1050 Orang	447.909.700	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	250 Dokumen	94.627.600	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	250 Dokumen	93.958.300	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan		Konkuren, Perangkat Daerah								
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	96,80%	537.623.200	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	96,80%	1.630.884.900	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	537.623.200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan dan kel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1.630.884.900	Pagu Indikatif tidak sesuai Ranwal
JUMLAH ANGGARAN AWAL RKPD 2025					12.392.212.391	JUMLAH HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025				20.335.012.349	

Dari analisa kebutuhan Renja 2025 diatas jika dibandingkan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat perubahan pagu indikatif atas estimasi gaji dan tunjangan pegawai sehingga berdampak pada proporsi belanja tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh. Atas perubahan tersebut maka target kinerja tahun 2025 dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 belum dapat terlaksana secara optimal. Dan akan dilaksanakan pada Rencana Kerja tahun berikutnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program, kegiatan dan sub kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hibah KORPRI	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Blitar	Jumlah Leembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	KORPRI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar pada tahun 2025 tidak mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan. Baik usulan bersumber dari Musrenbang RKPD maupun bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional dan sesuai PMDN No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, dimana secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang telah disinkronkan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan serta sesuai PMDN No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 2 (dua) kementerian/ kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. *Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia*
   Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020 – 2024 yaitu:*"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".*
   Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

   a. Profesional artinya,
      1. Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,
      2. Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

   b. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu:
      (a) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
      (b) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara

Dalam Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2021 – 2026 adalah Meningkatnya Profesionalitas ASN. Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu Mewujudkan Aparatur yang Profesional.

2. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia*

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu "Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong ". Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional dan Kompetetif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, AKuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap, yaitu:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam ASN Kementerian PANRB harus melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antaraperkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuhdedikasi berdasarkan norma dan etika.

2. Profesional

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

3. Akuntabel

Dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus bertanggung jawab terhadapsetiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

4. Melayani

Melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus menempatkan Kementerian/Lembaga/Pemda lain sebagai pihak yang harus didahulukan.

5. *Kolaboratif*

Kolaboratif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB saling membuka diri, menerima pendapat orang lain dan saling menghargai.

6. *Inovatif*

Inovatif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB melakukannya dengan cara yang baru, kreatif, inventif, dan imaginatif, mengikuti perkembangan terkini, tidak anti terhadap perubahan.

7. *Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)*

Dalam kesempurnaan mengandung makna bahwa dalam bekerja, dibutuhkan ketekunan sekaligus ketepatan, agar menghasilkan keluaran yang maksimal, dengan tingkat kesalahan nol persen.

Dari hasil telaahan Visi KemenPAN dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKPSDM Kota Blitar telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, yang menjadi tahun peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan tema: *"Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar mengemban tema pelayanan publik dan tata kelola mengarah pada isu strategis daerah dalam pemantapan penerapan *good governance* dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Dan berupaya dalam pencapaian misi 5 RPJMD "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi*", maka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan menjadi penekanan pada tahun 2025 ini.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2025;

3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam stretegi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond serta continuously improve*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah Misi ke 5, yaitu : "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi*"

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, professional, berbasis teknologi informasi sehingga pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Dalam mewujudkan misi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar

No	Tujuan	Target Akhir Tahun Rencana (2026)	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan / Penjelasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	80,50	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai indeks yang menunjukkan kualitas profesionalitas ASN berdasarkan nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah *"Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara"* dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih dan pada RPJMD Kota Blitar. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan terus menjadi cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar kedepan karena hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2021 - 2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah dengan manajemen pegawai dimulai pada tahap rekruitmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai dengan analisa jabatan atau kompetensi dan kebutuhan organisasi yang ada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai strategi-strategi dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, dengan menuangkan dalam sasaran-sasaran kegiatan guna pencapaian tujuan atau cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Sasaran-sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian tertuang dalam Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2021-2026. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merumuskan secara menyeluruh program dan kegiatan yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama selama 5 tahun perencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2

Tujuan dan Sasaran Renja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1.	Tujuan: Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai indeks yang menunjukkan kualitas profesionalitas ASN berdasarkan nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.	80,20	70,89	80,30	80,40	80,50
2.	Sasaran: Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN. Penilaian dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada Pemerintah Daerah.	270	271,50	280	290	300

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
3.	Sasaran: Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari peningkatan kapasitas ASN adalah agar para individu dapat bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dan agar pembangunan tertata dengan baik.	13,02	75,91	49,00	49,50	50,00
4.	Sasaran: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penerapan implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A (86,35)	A (85,49)	A (86,36)	A (86,37)	A (86,38)

3.3 Program Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi Kota Blitar di bidang kepegawaian serta tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 20.335.012.349,- *(Dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)* yang berasal dari APBD Kota Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan.
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terbagi menjadi 7 (tujuh) sub kegiatan
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatanProgram Kepegawaian Daerah
   - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terbagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan
   - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
   - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
   - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
   - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan.
   - Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan

Adapun secara garis besar uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, dapat dikemukakan sebagaimana sebagai berikut:

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

dan Prakiraan Maju 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				20.335.012.349,00				13.028.000.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20.335.012.349,00				13.028.000.000,00
5	03				KEPEGAWAIAN				18.151.689.949,00				11.822.400.000,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,75 indeks	16.388.948.799,00			-	9.758.700.000,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	9.175.500,00			-	10.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	6.211.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.400.000,00
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	2.964.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.200.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	15.643.976.599,00			-	8.802.200.000,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Orang/bulan	15.642.176.599,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8.800.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.800.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.200.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	143.108.900,00			-	267.000.000,00
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	58.596.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			55.000.000,00
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	73.379.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			83.000.000,00
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	11.133.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			129.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	379.489.100,00			-	462.400.000,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	29.040.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			32.500.000,00
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.983.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.800.000,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	32.400.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			53.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	29.185.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.000.000,00
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	8.553.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			8.900.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	273.896.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			315.000.000,00
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	430.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.200.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	63.615.000,00			-	30.500.000,00
5	03	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.952.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	54.662.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.500.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	70.756.000,00			-	70.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	70.756.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			70.500.000,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	78.827.700,00			-	115.500.000,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	10 Unit	49.213.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			78.000.000,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit	29.614.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase data kepegawaian yang valid Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80		48,21 % 67 % 91,38 % 48,74 % 73 % 93,06 %	1.762.741.150,00			-	2.063.700.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola Persentase layanan pensiun tepat waktu Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui		95 % 100 % 20 %	1.197.347.050,00			-	1.336.500.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	523.395.350,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			580.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.277.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.500.000,00
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	450.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			450.000.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	194.674.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			269.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan		70 %	366.678.800,00			-	435.000.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	366.678.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			435.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool yang ASN yang dikelola		10 %	126.836.200,00			-	194.000.000,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	126.836.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			194.000.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi		94,56 %	71.879.100,00			-	98.200.000,00
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.590.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.500.000,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	5.661.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.900.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	35.626.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			49.800.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.183.322.400,00				1.205.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi		96,80 % 48,21 % 48,74 %	2.183.322.400,00			-	1.205.600.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural		1,20 %	552.437.500,00			-	641.100.000,00
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.569.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1050 Orang	447.909.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			527.000.000,00
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Dokumen	93.958.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			99.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional		12 %	1.630.884.900,00			-	564.500.000,00
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1.630.884.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			564.500.000,00
J U M L A H									20.335.012.349,00				13.028.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

dan Prakiraan Maju 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				20.335.012.349,00				13.028.000.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20.335.012.349,00				13.028.000.000,00
5	03				KEPEGAWAIAN				18.151.689.949,00				11.822.400.000,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,75 indeks	16.388.948.799,00			-	9.758.700.000,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	9.175.500,00			-	10.600.000,00
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	6.211.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	2.964.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			3.200.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	15.643.976.599,00			-	8.802.200.000,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Orang/bulan	15.642.176.599,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8.800.000.000,00
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.800.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			2.200.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	143.108.900,00			-	267.000.000,00
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	58.596.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			55.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	73.379.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			83.000.000,00
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	11.133.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			129.000.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	379.489.100,00			-	462.400.000,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	29.040.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			32.500.000,00
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.983.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			6.800.000,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	32.400.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			53.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	29.185.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			35.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	8.553.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			8.900.000,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	273.896.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			315.000.000,00
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	430.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			11.200.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	63.615.000,00			-	30.500.000,00
5	03	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.952.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			10.000.000,00
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	54.662.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			30.500.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	70.756.000,00			-	70.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	70.756.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			70.500.000,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	78.827.700,00			-	115.500.000,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	10 Unit	49.213.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			78.000.000,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit	29.614.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase data kepegawaian yang valid Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80		48,21 % 67 % 91,38 % 48,74 % 73 % 93,06 %	1.762.741.150,00			-	2.063.700.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola Persentase layanan pensiun tepat waktu Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui		95 % 100 % 20 %	1.197.347.050,00			-	1.336.500.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	523.395.350,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			580.000.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.277.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			37.500.000,00
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	450.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			450.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	194.674.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			269.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan		70 %	366.678.800,00			-	435.000.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	366.678.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			435.000.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool yang ASN yang dikelola		10 %	126.836.200,00			-	194.000.000,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	126.836.200,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			194.000.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi		94,56 %	71.879.100,00			-	98.200.000,00
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.590.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			40.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	5.661.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			7.900.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	35.626.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			49.800.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.183.322.400,00				1.205.600.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi		96,80 % 48,21 % 48,74 %	2.183.322.400,00			-	1.205.600.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural		1,20 %	552.437.500,00			-	641.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.569.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			15.100.000,00
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1050 Orang	447.909.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			527.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Dokumen	93.958.300,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			99.000.000,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional		12 %	1.630.884.900,00			-	564.500.000,00
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1.630.884.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL			564.500.000,00
J U M L A H									20.335.012.349,00				13.028.000.000,00

Selain itu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar juga difokuskan untuk tindak lanjut atas LKJIP 2023 sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Rencana Tindaklanjut LKjIP 2023 pada Renja BKPSDM

Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	1). Melengkapi penyusunan talent pool sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
		2). Menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai (diklat, praktik kerja/magang, coaching, mentoring) berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		3). Mengimplementasikan kebijakan pola karier dengan mengacu pada manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN
		4). Melakukan assessment dalam proses pengisian jabatan administrator dan pengawas.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5). Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja pegawai;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		6). Memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk membangun manajemen talenta.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		7). Mengintegrasikan data pelanggaran disiplin dengan sistem BKN (SI ASN)	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		8). Mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian dengan manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara	1) Memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi dan hasil pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		2). Menyusun Kebijakan Coaching dan Mentoring bagi ASN dengan kriteria tertentu.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		3). Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen talenta sebagai sarana untuk mengetahui data talenta secara realtime, menjaga kualitas talenta, meningkatkan motivasi dan kinerja talenta serta memberikan kepastian arah pengembangan karir talenta melalui aplikasi manajemen talenta di SIKOI.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		4). Memberikan akses, kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada seluruh ASN untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas untuk memperoleh pengembangan kompetensi berupa BK CorpU dan Tugas Belajar melalui pemanfaatan aplikasi SMEDI SIKOI untuk seluruh Perangkat Daerah.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		5). Perumusan pengembangan kompetensi ASN secara ideal harus dapat menjawab kebutuhan ASN yang professional, melalui metode-metode baru yang berbasis pada teknologi memanfaatkan SMEDI SIKOI sehingga biaya pengembangan kompetensi menjadi lebih efisien dengan mekanisme *Corparate University* (CorpU).	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1). Meningkatkan implementasi nilai – nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi disetiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evauasi.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2). Membentuk Tim Kerja untuk menyusun rencana aksi organisasi.	
		3). Menyusun peta proses bisnis secara lebih mudah dipahami dan dapat diukur.	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
4. Dengan ditetapkannya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

25. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja Bakesbangpol tahun 2025 menjadi tahun keempat pelaksaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan msyarakat, tahun 2025 diarahkan pada tema pembangunan “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi”.

Proses penyusunan Renja Bakesbangpol tahun 2025 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Bakesbangpol tahun 2024, serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Bakesbangpol (Renstra Bakesbangpol) Tahun 2021-2026, dan RKPD tahun 2025. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam pelaksanaan Renja Bakesbangpol dimungkinkan adanya perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan tahap perumusan rancangan dengan mengevaluasi kinerja tahun berjaan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hingga ditetapkan menjadi dokumen perubahan rencana kerja yang berpedoman pada perubahan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2 Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan

kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Bakesbangpol Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bakesbangpol Kota Blitar;

3 Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;

4 Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu

Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bakesbangpol Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (n-1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8					Urusan Pemerintahan Umum									
8	01				Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik									
					Tujuan: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,25	85,15	83,7	85,15*	101,7	84,92	85,15*	100,25
					Sasaran:									
					Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
					Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,5%	69,77%	80,2%	87,05%	108,5	80,3%	87,05%	108,13
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (85,54)	A (84,97)	A (85,62)	100,8	A (84,98)	A (85,62)	100,7
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,85)	88,69	88,7 indeks	90,03 indeks	102,31	88,75 indeks	90,04 indeks	101,6
8	01	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100	100%	100%	100
8	01	01	2. 01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	35 Dokumen	72,92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	9 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	49 Laporan	61,25
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/ bulan	19 Orang/bulan	100	19 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	15 Laporan	75
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	NA	2 paket	2 paket	100	5 paket	7 paket	87,5
8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang/bulan	19 Orang	19 Orang	19 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	106,03 %	106,03	100%	100%	102,01
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 komponen (1 paket)	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	300
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 jenis (3 paket)	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	9 Paket	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	27 jenis	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	6 Paket	75
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	480 dos (12 paket)	12 Paket	12 Paket	100	2 Paket	26 Paket	54,2
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8 cetakan 14556 lembar (1 paket)	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	3 bahan bacaan (24 Dokumen)	24 Dokumen	24 Dokumen	100	24 Dokumen	48 Dokumen	75
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 laporan	44 laporan	40 laporan	51 laporan	127,5 %	40 Laporan	135 Laporan	81,82
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 unit	1 jenis (1 unit)	13 unit	13 unit	100	41 unit	55 unit	203,7
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	13 unit	13 unit	100	19 Unit	19 Unit	190
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	3 rekening (36 Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	108 Laporan	75
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 laporan	5 orang (13 Laporan)	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	39 Laporan	75
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100	100%	100%	100
8	01	01	2.	000	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	17 unit	15 unit	10 Unit	10 Unit	100	11 Unit	11 Unit	64,7

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			09	2	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	26 Unit	-	8 Unit	0	0	8 Unit	8 Unit	30,76
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158 Unit	6 jenis (6 unit)	69 Unit	69 Unit	100	69 Unit	144 Unit	91,1
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3 unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	7 Unit	116,7
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100
						Persentase kampung berkarakter Pancasila	47,6	9,5%	9,5%	4,75%	50	19,04%	33,29 %	69,93
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85 %	85 %	82%	87%	106,1	83%	85%	100
						Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	10 kampung	2 kampung	5 kampung	1 kampung	20	4 kampung	7 kampung	70
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 orang	350 orang	100 orang	100 orang	100	300 orang	750 orang	75
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	1 dokumen	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	7 laporan	58,3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	900 keluarga	NA	100 keluarga	100 keluarga	100	400 keluarga	500 keluarga	55,5
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	85 %	90 %	82 %	85 %	103,66	83%	86%	101,2
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	200 Orang	500 Orang	500 Orang	100	500 Orang	1200 orang	80
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	700 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	100	200 orang	450 orang	64,28

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	38 laporan	8 laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 dokumen	30 dokumen	78,9
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80 %	68,23%	68 %	87,05 %	128,01	72 %	75,76 %	94,7
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	123 ormas	131 ormas	125 ormas	151 ormas	120,8	121 ormas	151 ormas	122,76
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 orang	100 orang	150 Orang	150 Orang	100	200 orang	450 orang	60
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	80 %	93,33 %	77 %	80 %	103,9	78 %	83,77 %	104,7
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	95 %	100 %	87 %	89 %	102,3	90%	93 %	97,89

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1150 orang	75 orang	250 Orang	250 Orang	100	300 orang	625 orang	54,35
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	3 laporan	75
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7240 orang	90 orang	1810 Orang	1810 Orang	100	1810 orang	3710 orang	51,24
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	11 laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	3 laporan	6 laporan	54,5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50

Program/kegiatan tahun 2023 ada beberapa yang tidak memenuhi target hal ini disebabkan kurangnya koordinasi, berikut tabel persentase realisasi anggaran:

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	97,20
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,18
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran	99,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,14
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	97,78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,39
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	87,69
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,81
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,05
	Pengadaan Mebel	99,07
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	99,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	96,70
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	96,70
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	96,40
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99,91
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	68,69
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	89,62
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	89,62
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	80,82
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	93,21
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	96,62
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	96,62
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	96,03

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	100
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	99,61
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	99,61
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	84,85
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	81,60
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78,39
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78,39
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	78,39

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a. Struktur Organisasi Bakesbangpol yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
   b. Mekanisme kerja Bakesbangpol yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
   c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Bakesbangpol, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
   d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
   e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :
   a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai bidang Bakesbangpol.
   b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
   c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
   d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
   e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR

TAHUN 2023

NO	Indikator	IKU/IKK /SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Tujuan	84,90	84,91	84,92	84,93	84,94	85,15	85,15*	85,15*	85,155	85,16	Untuk penghitungan nilai IKUB tahun N akan dihitung pada tahun N+1
2	Persentase Kejadian SARA Tertangani	Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Konflik Sosial Tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif		80,1%	80,2%	80,3%	80,4%	80,5%	69,77%	87,05	87,05*	87,07	87,08	Untuk persentase Ormas aktif tidak bisa dipastikan setiap tahunnya naik
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (84,96)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	A (84,99)	A (85,54)	A (85,62)	A (86,12)	A (86,13)	A (86,14)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Keterlambatan laporan potensi kejadian SARA dan konflik social yang diterima;
2. Tidak adanya kewajiban ormas mendaftaran keberadaannya kepada Bakesbangpol;
3. Pemberian layanan rekomendasi kepada masyarkat kurang didukung oleh SDM yang kompeten;
4. Belum optimalnya peran aktif Jejaring Panca Mandala untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Renja Bakesbangpol berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Bakesbangpol Kota Blitar.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA BLITAR

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bakesbangpol							Bakesbangpol			
	Sasaran:					Sasaran:		Indikator Sasaran:			
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.8 nilai	5.260.687.297	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.8 nilai	4.356.176.444	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	27.052.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	15.041.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.526.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.520.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	18.526.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	12.520.600	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.920.896.449	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	3.191.470.586	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.912.370.249	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.188.949.986	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	8.526.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	2.520.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	182.027.176	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	144.481.900	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	2 Paket	85.771.476	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	58.196.900	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	96.255.700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	86.285.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	395.036.194	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart	100 %	313.094.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.369.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.872.500	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.503.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.814.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	42.710.494	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.102.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	28.800.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.192.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.206.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	247.272.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.389.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.499.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	982.766.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	197.383.600	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	145.186.100	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	79.520.100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	167.579.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	27.123.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	600.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.740.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	256.392.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	266.891.256	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.282.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.275.056	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	212.110.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	222.616.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	496.516.718	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	227.813.102	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	169.458.718	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	98.567.800	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6.324.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	42.058.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	32.244.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	65.677.302	
	Tujuan :		Indikator Tujuan :			Tujuan :		Indikator Tujuan :			
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84		
	Sasaran:		Indikator Sasaran:			Sasaran:		Indikator Sasaran:			
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat		Persentase kejadian SARA tertangani	100		Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat		Persentase kejadian SARA tertangani	100		
			Persentase konflik sosial tertangani	100				Persentase konflik sosial tertangani	100		
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4		Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan		Persentase penyelesaian	100 %	2.490.315.200	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan		Persentase penyelesaian konflik	100 %	1.417.665.200	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Karakter Kebangsaan		konflik keagamaaan			Karakter Kebangsaan		keagamaan			
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	14.3 %				Persentase Kampung Berkarakter Pancasila	14.3 %		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			84	2.498.815.200	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84	1.426.133.100	
			Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	3 kampung				Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila	3 kampung		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	82.109.100	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	377.958.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	326.375.000	FKUB= 150 jt FPK= 100 jt IKUB= 75 jt

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	400 Keluarga	204.094.400	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	400 Keluarga	39.404.100	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	70.000.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	30.515.000	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	78 Orang	958.262.800	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	78 Orang	909.222.000	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	8.500.000.00	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	8,467,900.00	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	480.000.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	6.940.000	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 Orang	50.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 Orang	23.100.000	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	762.428.397	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	681.033.400	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	84 %	762.428.397	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	84 %	681.033.400	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	78.035.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	15.387.200	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	200 Orang	49.971.900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	200 Orang	44.071.400	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	634.420.697	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Laporan	625.324.800	IDI= 75 jt 7 parpol= 545.199.800
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	75 %	90.983.200	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	75 %	40.983.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	122 ormas	90.983.200	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang aktif	122 ormas	40.983.500	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	300 orang	90.983.200	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	300 orang	40.983.500	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asing di Daerah		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Asing di Daerah		Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	79 %	287.958.000	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	79 %	251.375.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	93 %	287.958.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi	93 %	251.375.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	85.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	202.958.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	1 Laporan	201.375.000	BNK= 200 jt

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	di Daerah					di Daerah		Kepercayaan di Daerah			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100 %	1.962.726.167	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100 %	1.601.375.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1.962.726.167	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1.601.375.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810 Orang	635.254.867	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6510 Orang	500.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1.217.800.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1.001.375.000	FKDM= 50 jt TNI= 400 jt POLRI= 550 jt
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.671.300	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

KOTA BLITAR

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
1	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan kerukunan antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
2	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan pembauran kebangsaan		FPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
3	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Blitar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BNK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
4	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	GOLKAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1 parpol	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
	masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
5	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		GERINDRA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
6	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		DEMOKRAT	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
7	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PDIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
8	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PPP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
9	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PKB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
10	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
11	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	POLRESTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
12	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan		KODIM 0808	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
13	(UNTUK HIBAH)		FKDM	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom updan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
c. pelaksanaan evaluasi politik;
d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan
f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;

m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;

o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;

p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;

q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;

r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;

t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;

v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan kelompok Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Blitar
Tahun 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator : 1. Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2. Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3. Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4. Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	84,91	85,15*	85,15*	85,155	85,16

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
2	Sasaran:							
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Konflik Sosial Tertangani	Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila - Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut - Kriteria aktif Ormas dan Orpol meliputi: 1. Aktif mengupdate profil Ormas/Orpol 2. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Ormas/ Orpol pada Bakesbangpol Menghadiri sosialisasi pemberdayaan Ormas/ Orpol	80,2%	87,05%	87,05%*	87,07%	87,08%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. - Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada perangkat daerah.	A (84,97)	A (85,62)	A (86,12)	A (86,13)	A (86,14)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2025 Bakesbangpol memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 44 sub kegiatan seprti yang terterat dalam tabel berikut:

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
				2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
				3	Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara
				4	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
				5	Pembentukan Paskibraka
				6	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
				7	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
				8	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	9	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				11	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	4	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	13	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
				14	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	15	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
				16	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
				17	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				19	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
				21	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				25	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
				26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				28	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
				29	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
				30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
				31	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
		10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				33	Pengadaan Mebel
				34	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
				35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
		11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
				37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				39	Pemeliharaan Mebel
				40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
				42	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
				43	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				44	Pemeliharaan/Rehabitilasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Bakesbangpol Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 pada Renja Bakesbangpol Tahun 2025

Tabel 4.1

Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023

pada Renja Bakesbangpol Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi baragama	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat b. Mengaktifkan peran FKDM baik tingkat kecamatan maupun kota	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
3	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas dan Orpol	Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor secretariat/keberadaannya	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Memberantas penyakit sosial mayarakat	a. Sosialisasi anti miras dan narkoba b. Patroli gabungan Kost-kostan dan tempat hiburan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	publik	pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bakesbangpol

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Blitar

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bakesbangpol	Kota Blitar						
					Sasaran:	Indikator Sasaran:							
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			8.692.358.544			A (85)	9.774.344.845,00
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88.8 nilai	4.687.708.544			A (88,85)	4.874.897.943,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 %	15.041.200			100 %	16.405.020,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	2.520.600			12 Dokumen	2.952.510,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 Laporan	12.520.600			20 Laporan	13.452.510,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart		100 %	3.591.470.586			100 %	3.547.757.494,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/bulan	3.588.949.986			22 Orang/bulan	3.544.804.984,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	2.520.600			5 Laporan	2.952.510,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart		100 %	144.481.900			100 %	159.128.535,00
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	58.196.900			3 Paket	69.060.050,00
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		22 Orang	86.285.000			22 Orang	90.068.485,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart		100 %	313.094.800			100 %	334.152.404,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.872.500			1 Paket	14.037.555,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	30.814.100			4 Paket	20.478.255,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	8.102.600			4 Paket	9.846.019,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	28.800.000			6 Paket	30.390.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	16.206.000			1 Paket	20.301.600,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	7.800.000			24 Dokumen	8.190.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	200.000.000			40 Laporan	220.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	9.499.600			1 Dokumen	10.908.975,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	128.915.700			100 %	293.813.780,00
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	60.000.000			2 Unit	60.000.000,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		21 Unit	11.052.200			21 Unit	28.854.885,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	27.123.500			10 Unit	154.958.895,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	30.740.000			1 Unit	50.000.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	266.891.256			100 %	269.211.978,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	44.275.056			36 Laporan	46.496.268,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	222.616.200			13 Laporan	222.715.710,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		100 %	227.813.102			100 %	254.428.732,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	98.567.800			14 Unit	105.431.654,00
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		8 Unit	6.324.000			8 Unit	7.000.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		50 Unit	32.244.000			50 Unit	33.660.900,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lainnya	Dipelihara							
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	25.000.000			1 Unit	20.000.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	65.677.302			1 Unit	88.336.178,00
					Tujuan :	Indikator Tujuan :							
					Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		84				84,25	
					Sasaran:	Indikator Sasaran:							
					Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani		100				100	
						Persentase konflik sosial tertangani		100				100	
					Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif		80,4				80,5	
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaan		100%	1.426.133.100			100%	1.663.531.840,00
						Persentase Kampung Berkarakter Pancasila		14.3 %				14.3 %	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3 kampung	1.426.133.100			85	1.663.531.840,00
						Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila		84%				3 kampung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300 Orang	82.109.100			300 orang	67.500.000,00
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3 Laporan	326.375.000			3 laporan	396.855.900,00
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		400 Keluarga	39.404.100			300 Keluarga	50.000.000,00
					Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		1 Dokumen	30.515.000			1 Dokumen	73.500.000,00
					Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		78 Orang	909.222.000			78 Orang	1.006.175.940,00
					Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	8.467.900			1 Dokumen	9.000.000,00
					Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	6.940.000			1 Dokumen	8.000.000,00
					Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		78 Orang	23.100.000			78 Orang	52.500.000,00
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		100 %	684.783.400			100%	931.862.227,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik		84 %	684.783.400			85%	931.862.227,00
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	15.387.200			200 Orang	82.000.000,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	44.071.400			200 Orang	183.720.495,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi		8 Laporan	625.324.800			8 Laporan	666.141.732,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik di Daerah							
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		75 %	40.983.500			80%	55.482.360,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang aktif		122 ormas	40.983.500			123 ormas	55.482.360,00
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 Orang	40.983.500			300 orang	55.482.360,00
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial		79 %	251.375.000			80%	262.208.000,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi		93 %	251.375.000			95%	262.208.000,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		300 Orang	50.000.000			300 orang	59.250.000,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	201.375.000			1 Laporan	202.958.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kepercayaan di Daerah								
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		100 %	1.601.375.000			100%	1.986.362.475,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti		100 %	1.601.375.000			100%	1.986.362.475,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		6510 Orang	500.000.000			6510 Orang	645.017.610,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		3 Laporan	1.001.375.000			3 Laporan	1.226.190.000,00
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	115.154.865,00

Pelaksaaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota blitar, difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dengan

   Meningkatkan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)

2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dengan melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait

3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik Dengan melaksanakan Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 memuat usulan rencana kegiatan prioritas urusan pemerintahan umum. Dalam pelaksanaan Renja terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dicapai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai juga.
2) Ketersediaan anggaran, namun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar program prioritas/unggulan tetap dapat dilaksanakan.

Agar target kinerja dan sasaran dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 dapat dicapai maka perlu kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
2. Fokus pada pencapaian target dan indikator kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
3. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra).
5. Capaian pelaksanaan kegiatan dalam Renja akan dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam aplikasi SIRUP.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Menyusun kebutuhan administrasi kegiatan.

25. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja Bakesbangpol tahun 2025 menjadi tahun keempat pelaksaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan msyarakat, tahun 2025 diarahkan pada tema pembangunan “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi”.

Proses penyusunan Renja Bakesbangpol tahun 2025 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Bakesbangpol tahun 2024, serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Bakesbangpol (Renstra Bakesbangpol) Tahun 2021-2026, dan RKPD tahun 2025. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam pelaksanaan Renja Bakesbangpol dimungkinkan adanya perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan tahap perumusan rancangan dengan mengevaluasi kinerja tahun berjaan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hingga ditetapkan menjadi dokumen perubahan rencana kerja yang berpedoman pada perubahan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2 Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan

kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Bakesbangpol Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bakesbangpol Kota Blitar;

3 Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;

4 Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu

Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bakesbangpol Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (n-1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8					Urusan Pemerintahan Umum									
8	01				Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik									
					Tujuan: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,25	85,15	83,7	85,15*	101,7	84,92	85,15*	100,25
					Sasaran:									
					Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
					Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,5%	69,77%	80,2%	87,05%	108,5	80,3%	87,05%	108,13
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (85,54)	A (84,97)	A (85,62)	100,8	A (84,98)	A (85,62)	100,7
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,85)	88,69	88,7 indeks	90,03 indeks	102,31	88,75 indeks	90,04 indeks	101,6
8	01	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100	100%	100%	100
8	01	01	2. 01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	35 Dokumen	72,92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	9 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	49 Laporan	61,25
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/ bulan	19 Orang/bulan	100	19 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	15 Laporan	75
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	NA	2 paket	2 paket	100	5 paket	7 paket	87,5
8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang/bulan	19 Orang	19 Orang	19 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	106,03 %	106,03	100%	100%	102,01
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 komponen (1 paket)	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	300
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 jenis (3 paket)	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	9 Paket	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	27 jenis	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	6 Paket	75
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	480 dos (12 paket)	12 Paket	12 Paket	100	2 Paket	26 Paket	54,2
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8 cetakan 14556 lembar (1 paket)	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	3 bahan bacaan (24 Dokumen)	24 Dokumen	24 Dokumen	100	24 Dokumen	48 Dokumen	75
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 laporan	44 laporan	40 laporan	51 laporan	127,5 %	40 Laporan	135 Laporan	81,82
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 unit	1 jenis (1 unit)	13 unit	13 unit	100	41 unit	55 unit	203,7
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	13 unit	13 unit	100	19 Unit	19 Unit	190
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	3 rekening (36 Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	108 Laporan	75
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 laporan	5 orang (13 Laporan)	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	39 Laporan	75
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100	100%	100%	100
8	01	01	2.	000	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	17 unit	15 unit	10 Unit	10 Unit	100	11 Unit	11 Unit	64,7

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			09	2	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	26 Unit	-	8 Unit	0	0	8 Unit	8 Unit	30,76
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158 Unit	6 jenis (6 unit)	69 Unit	69 Unit	100	69 Unit	144 Unit	91,1
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3 unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	7 Unit	116,7
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100
						Persentase kampung berkarakter Pancasila	47,6	9,5%	9,5%	4,75%	50	19,04%	33,29 %	69,93
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85 %	85 %	82%	87%	106,1	83%	85%	100
						Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	10 kampung	2 kampung	5 kampung	1 kampung	20	4 kampung	7 kampung	70
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 orang	350 orang	100 orang	100 orang	100	300 orang	750 orang	75
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	1 dokumen	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	7 laporan	58,3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	900 keluarga	NA	100 keluarga	100 keluarga	100	400 keluarga	500 keluarga	55,5
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	85 %	90 %	82 %	85 %	103,66	83%	86%	101,2
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	200 Orang	500 Orang	500 Orang	100	500 Orang	1200 orang	80
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	700 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	100	200 orang	450 orang	64,28

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	38 laporan	8 laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 dokumen	30 dokumen	78,9
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80 %	68,23%	68 %	87,05 %	128,01	72 %	75,76 %	94,7
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	123 ormas	131 ormas	125 ormas	151 ormas	120,8	121 ormas	151 ormas	122,76
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 orang	100 orang	150 Orang	150 Orang	100	200 orang	450 orang	60
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	80 %	93,33 %	77 %	80 %	103,9	78 %	83,77 %	104,7
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	95 %	100 %	87 %	89 %	102,3	90%	93 %	97,89

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1150 orang	75 orang	250 Orang	250 Orang	100	300 orang	625 orang	54,35
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	3 laporan	75
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7240 orang	90 orang	1810 Orang	1810 Orang	100	1810 orang	3710 orang	51,24
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	11 laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	3 laporan	6 laporan	54,5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50

Program/kegiatan tahun 2023 ada beberapa yang tidak memenuhi target hal ini disebabkan kurangnya koordinasi, berikut tabel persentase realisasi anggaran:

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	97,20
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,18
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran	99,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,14
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	97,78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,72
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,39
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,91
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	87,69
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,81
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,05
	Pengadaan Mebel	99,07
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	99,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	96,70
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	96,70
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	96,40
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99,91
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	68,69
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	89,62
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	89,62
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	80,82
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	93,21
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	96,62
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	96,62
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	96,03

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	100
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	99,61
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	99,61
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	84,85
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	81,60
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78,39
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78,39
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	78,39

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a. Struktur Organisasi Bakesbangpol yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
   b. Mekanisme kerja Bakesbangpol yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
   c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Bakesbangpol, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
   d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
   e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :
   a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai bidang Bakesbangpol.
   b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
   c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
   d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
   e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR

TAHUN 2023

NO	Indikator	IKU/IKK /SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Tujuan	84,90	84,91	84,92	84,93	84,94	85,15	85,15*	85,15*	85,155	85,16	Untuk penghitungan nilai IKUB tahun N akan dihitung pada tahun N+1
2	Persentase Kejadian SARA Tertangani	Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Konflik Sosial Tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif		80,1%	80,2%	80,3%	80,4%	80,5%	69,77%	87,05	87,05*	87,07	87,08	Untuk persentase Ormas aktif tidak bisa dipastikan setiap tahunnya naik
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (84,96)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	A (84,99)	A (85,54)	A (85,62)	A (86,12)	A (86,13)	A (86,14)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Keterlambatan laporan potensi kejadian SARA dan konflik social yang diterima;
2. Tidak adanya kewajiban ormas mendaftaran keberadaannya kepada Bakesbangpol;
3. Pemberian layanan rekomendasi kepada masyarkat kurang didukung oleh SDM yang kompeten;
4. Belum optimalnya peran aktif Jejaring Panca Mandala untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Renja Bakesbangpol berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Bakesbangpol Kota Blitar.

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KOTA BLITAR

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bakesbangpol							Bakesbangpol			
	Sasaran:					Sasaran:		Indikator Sasaran:			
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.8 nilai	5.260.687.297	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.8 nilai		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	27.052.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.526.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.520.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	18.526.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	12.520.600	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.920.896.449	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.912.370.249	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.188.949.986	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	8.526.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	2.520.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	182.027.176	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	144.481.900	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	2 Paket	85.771.476	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	58.196.900	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	96.255.700	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	86.285.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	395.036.194	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart	100 %	284.178.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.369.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.872.500	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.503.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.814.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	42.710.494	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.102.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	28.800.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.192.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.206.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	247.272.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.389.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.499.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	982.766.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	145.186.100	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	79.520.100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	167.579.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	27.123.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	600.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.740.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	256.392.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	266.891.256	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.282.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.275.056	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	212.110.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	222.616.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	496.516.718	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	227.595.478	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	169.458.718	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	98.567.800	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6.324.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	42.058.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	32.244.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	65.677.302	
	Tujuan :		Indikator Tujuan :			Tujuan :		Indikator Tujuan :			
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84		
	Sasaran:		Indikator Sasaran:			Sasaran:		Indikator Sasaran:			
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat		Persentase kejadian SARA tertangani	100		Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat		Persentase kejadian SARA tertangani	100		
			Persentase konflik sosial tertangani	100				Persentase konflik sosial tertangani	100		
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4		Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan		Persentase penyelesaian	100 %	2.490.315.200	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan		Persentase penyelesaian konflik	100 %	1.417.665.200	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Karakter Kebangsaan		konflik keagamaaan			Karakter Kebangsaan		keagamaan			
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	14.3 %				Persentase Kampung Berkarakter Pancasila	14.3 %		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			84	2.490.315.200	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84	1.417.665.200	
			Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	3 kampung				Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila	3 kampung		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	82.109.100	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	377.958.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	326.375.000	FKUB= 150 jt FPK= 100 jt IKUB= 75 jt

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	400 Keluarga	204.094.400	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	400 Keluarga	39.404.100	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	70.000.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	30.515.000	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	78 Orang	958.262.800	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	78 Orang	909.222.000	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	480.000.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	6.940.000	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 Orang	50.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 Orang	23.100.000	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	762.428.397	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	681.033.400	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	84 %	762.428.397	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	84 %	681.033.400	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	78.035.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	15.387.200	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	200 Orang	49.971.900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	200 Orang	44.071.400	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	634.420.697	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Laporan	625.324.800	IDI= 75 jt 7 parpol= 545.199.800
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	75 %	90.983.200	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	75 %	40.983.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	122 ormas	90.983.200	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang aktif	122 ormas	40.983.500	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 orang	90.983.200	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 orang	40.983.500	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	79 %	287.958.000	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	79 %	251.375.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	93 %	287.958.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi	93 %	251.375.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	85.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	202.958.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	201.375.000	BNK= 200 jt

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100 %	1.962.726.167	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100 %	1.601.375.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1.962.726.167	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1.601.375.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810 Orang	635.254.867	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6510 Orang	500.000.000	

		RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1.217.800.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1.001.375.000	FKDM= 50 jt TNI= 400 jt POLRI= 550 jt
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.671.300	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025

KOTA BLITAR

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
1	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan kerukunan antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
2	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan pembauran kebangsaan		FPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
3	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Blitar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BNK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
4	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	GOLKAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1 parpol	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
	masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
5	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		GERINDRA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
6	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		DEMOKRAT	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
7	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PDIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
8	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PPP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
9	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PKB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
10	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat		PAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
11	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	POLRESTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
12	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan		KODIM 0808	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
13	(UNTUK HIBAH)		FKDM	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom updan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
c. pelaksanaan evaluasi politik;
d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan
f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;

m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;

o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;

p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;

q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;

r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;

t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;

v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan kelompok Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Blitar
Tahun 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator : 1. Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2. Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3. Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4. Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	84,91	85,15*	85,15*	85,155	85,16

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
2	Sasaran:							
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Konflik Sosial Tertangani	Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila - Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut - Kriteria aktif Ormas dan Orpol meliputi: 1. Aktif mengupdate profil Ormas/Orpol 2. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Ormas/ Orpol pada Bakesbangpol Menghadiri sosialisasi pemberdayaan Ormas/ Orpol	80,2%	87,05%	87,05%*	87,07%	87,08%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. - Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada perangkat daerah.	A (84,97)	A (85,62)	A (86,12)	A (86,13)	A (86,14)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2025 Bakesbangpol memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 44 sub kegiatan seprti yang terterat dalam tabel berikut:

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
				2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
				3	Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara
				4	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
				5	Pembentukan Paskibraka
				6	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
				7	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
				8	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	9	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				11	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	4	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	13	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
				14	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	15	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
				16	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
				17	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				19	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
				21	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				25	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
				26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				28	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
				29	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
				30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
				31	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
		10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				33	Pengadaan Mebel
				34	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
				35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
		11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
				37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				39	Pemeliharaan Mebel
				40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
				42	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
				43	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				44	Pemeliharaan/Rehabitilasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Bakesbangpol Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 pada Renja Bakesbangpol Tahun 2025

Tabel 4.1

Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023

pada Renja Bakesbangpol Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi baragama	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat b. Mengaktifkan peran FKDM baik tingkat kecamatan maupun kota	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
3	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas dan Orpol	Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor secretariat/keberadaannya	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Memberantas penyakit sosial mayarakat	a. Sosialisasi anti miras dan narkoba b. Patroli gabungan Kost-kostan dan tempat hiburan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	publik	pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bakesbangpol

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Blitar

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bakesbangpol	Kota Blitar						
					Sasaran:	Indikator Sasaran:							
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			8.692.358.544			A (85)	9.774.344.845,00
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88.8 nilai	4.687.708.544			A (88,85)	4.874.897.943,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 %	15.041.200			100 %	16.405.020,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	2.520.600			12 Dokumen	2.952.510,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 Laporan	12.520.600			20 Laporan	13.452.510,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart		100 %	3.591.470.586			100 %	3.547.757.494,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/bulan	3.588.949.986			22 Orang/bulan	3.544.804.984,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	2.520.600			5 Laporan	2.952.510,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart		100 %	144.481.900			100 %	159.128.535,00
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	58.196.900			3 Paket	69.060.050,00
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		22 Orang	86.285.000			22 Orang	90.068.485,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart		100 %	313.094.800			100 %	334.152.404,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.872.500			1 Paket	14.037.555,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	30.814.100			4 Paket	20.478.255,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	8.102.600			4 Paket	9.846.019,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	28.800.000			6 Paket	30.390.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	16.206.000			1 Paket	20.301.600,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	7.800.000			24 Dokumen	8.190.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	200.000.000			40 Laporan	220.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	9.499.600			1 Dokumen	10.908.975,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	128.915.700			100 %	293.813.780,00
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	60.000.000			2 Unit	60.000.000,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		21 Unit	11.052.200			21 Unit	28.854.885,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	27.123.500			10 Unit	154.958.895,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	30.740.000			1 Unit	50.000.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	266.891.256			100 %	269.211.978,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	44.275.056			36 Laporan	46.496.268,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	222.616.200			13 Laporan	222.715.710,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		100 %	227.813.102			100 %	254.428.732,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	98.567.800			14 Unit	105.431.654,00
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		8 Unit	6.324.000			8 Unit	7.000.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		50 Unit	32.244.000			50 Unit	33.660.900,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lainnya	Dipelihara							
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 Unit	25.000.000			1 Unit	20.000.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	65.677.302			1 Unit	88.336.178,00
					Tujuan :	Indikator Tujuan :							
					Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		84				84,25	
					Sasaran:	Indikator Sasaran:							
					Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani		100				100	
						Persentase konflik sosial tertangani		100				100	
					Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif		80,4				80,5	
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaan		100%	1.426.133.100			100%	1.663.531.840,00
						Persentase Kampung Berkarakter Pancasila		14.3 %				14.3 %	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3 kampung	1.426.133.100			85	1.663.531.840,00
						Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila		84%				3 kampung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300 Orang	82.109.100			300 orang	67.500.000,00
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3 Laporan	326.375.000			3 laporan	396.855.900,00
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		400 Keluarga	39.404.100			300 Keluarga	50.000.000,00
					Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		1 Dokumen	30.515.000			1 Dokumen	73.500.000,00
					Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		78 Orang	909.222.000			78 Orang	1.006.175.940,00
					Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	8.467.900			1 Dokumen	9.000.000,00
					Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	6.940.000			1 Dokumen	8.000.000,00
					Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		78 Orang	23.100.000			78 Orang	52.500.000,00
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		100 %	684.783.400			100%	931.862.227,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik		84 %	684.783.400			85%	931.862.227,00
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	15.387.200			200 Orang	82.000.000,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	44.071.400			200 Orang	183.720.495,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi		8 Laporan	625.324.800			8 Laporan	666.141.732,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik di Daerah							
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		75 %	40.983.500			80%	55.482.360,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang aktif		122 ormas	40.983.500			123 ormas	55.482.360,00
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 Orang	40.983.500			300 orang	55.482.360,00
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial		79 %	251.375.000			80%	262.208.000,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi		93 %	251.375.000			95%	262.208.000,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		300 Orang	50.000.000			300 orang	59.250.000,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	201.375.000			1 Laporan	202.958.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kepercayaan di Daerah								
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		100 %	1.601.375.000			100%	1.986.362.475,00
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti		100 %	1.601.375.000			100%	1.986.362.475,00
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		6510 Orang	500.000.000			6510 Orang	645.017.610,00
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		3 Laporan	1.001.375.000			3 Laporan	1.226.190.000,00
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	115.154.865,00

Pelaksaaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota blitar, difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dengan

   Meningkatkan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)

2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dengan melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait

3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik Dengan melaksanakan Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 memuat usulan rencana kegiatan prioritas urusan pemerintahan umum. Dalam pelaksanaan Renja terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dicapai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai juga.
2) Ketersediaan anggaran, namun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar program prioritas/unggulan tetap dapat dilaksanakan.

Agar target kinerja dan sasaran dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 dapat dicapai maka perlu kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
2. Fokus pada pencapaian target dan indikator kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
3. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra).
5. Capaian pelaksanaan kegiatan dalam Renja akan dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam aplikasi SIRUP.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Menyusun kebutuhan administrasi kegiatan.

26. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragrap kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan kata lain, RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Sedangkan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024,

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
						Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	0,4	0,58	0,43	74,14	0,6	0,43	66,15
						Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,4	0,55	0,43	78,18	0,57	0,43	70,49
1	5	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	95%	66	92%	91,47%	99,42%	93%	93%	97,89%
							Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori Madya	3 kelurahan	1	2 kelurahan	2 kelurahan	100%	2 kelurahan	2 kelurahan	66,67%
							Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	80%	40	50%	50%	100%	60%	60%	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	03	2	1		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	03	2	1	3	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3800 orang	-	950 orang	950 orang	100%	950 orang	1900 orang	50%
1	5	03	2	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	03	2	2	6	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	84 kawasan	-	21 kawasan	21 kawasan	100%	21 kawasan	42 kawasan	50%
1	5	03	2	2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	81 orang	-	-	-	-	27 orang	27 orang	33,33%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
											Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	5	03	2	2	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	24 kawasan	-	90 (org)	90 (org)	100%	8 kawasan	8 kawasan	33,33%
1	5	03	2	2	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	48 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 laporan	24 laporan	50%
1	5	03	2	3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	03	2	3	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	-	50 orang	1553 orang	>100 %	50 orang	50 orang	801,50%
1	5	3	2	4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	3	2	4	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	75%
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)	-	A (80)	A (83,70)	104,62	A (83,70)	A (83,70)	99,97%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
											Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah									
1	5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84,23)	Baik (84,08)	Baik (80)	Baik (86,45)	108,06	Baik (84,08)	Baik (84,08)	100%
1	5	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	48 dokumen	11 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	35 dokumen	72,92%
1	5	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 laporan	9 dokumen	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	49 laporan	61,25%
1	5	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	13 ASN	14 org/bln	14 org/bln	100%	25 Orang/bln	52 Orang/bln	52%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
											Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	5	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	5 dokumen	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	15 laporan	75%
1	5	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	1	2	5	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100%	3 paket	6 paket	50%
1	5	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100 orang	-	25 orang	25 orang	100%	25 orang	50 orang	50%
1	5	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	93,33%	100%	97,14%	97,14%	100%	100%	100%
1	5	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	-	2 paket	2 paket	100%	1 paket	3 paket	75%
1	5	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100%	3 paket	6 paket	50%
1	5	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100%	3 paket	6 paket	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
											Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	5	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32 Paket	-	12 paket	12 paket	100%	8 paket	20 paket	62,50%
1	5	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	50%
1	5	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	96 dokumen	-	24 dokumen	24 dokumen	100%	24 dokumen	48 dokumen	50%
1	5	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	50 rakor	50 laporan	40 laporan	80%	50 laporan	90 laporan	45%
1	5	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	-	100%	100%	100%	-	100%	-
1	5	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	8 unit	-	4 unit	4 unit	100%	-	4 unit	50%
1	5	1	2	7	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32 unit	-	20 unit	20 unit	100%	-	20 unit	62,50%
1	5	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	88,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	144 laporan	-	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
											Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	5	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	52 laporan	-	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	26 laporan	50%
1	5	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	87,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	60 unit	-	15 unit	11 unit	73,33%	15 unit	26 unit	43,33%
1	5	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	-	20 unit	20 unit	100%	20 unit	40 unit	50%
1	5	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 unit	10 jenis	37 unit	34 unit	91,89%	37 unit	71 unit	47,97%
1	5	1	2	9	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	8 jenis	-	-	-	2 unit	2 unit	33,33%

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai salah satu sasaran yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan kelurahan tangguh bencana
			Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Optimalisasi koordinasi penanganan bencana
			Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
   b. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulanan bencana;
   c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara atasan dan bawahan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
   d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
   e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
   a. Belum memadainya / Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
   b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan;
   c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat;
   d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif;
   e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No.	*Indikator*	*IKU/IKK/SPM*	*Target Renstra SKPD*					*Realisasi Capaian*			*Proyeksi*		*Catatan Analisis*
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah	IKU OPD	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,40	0,43	0,43	0,45	0,46	Berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh BNPB, Kota Blitar memiliki kapasitas dengan kategori sedang. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan ; -Kebijakan/Regulasi/Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana -Kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD -Komitmen pemerintah, komunitas dan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana -Menyusun Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan tingkat ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah antara lain melalui tingkat individu, organisasi dan tingkat sistem.
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	IKK/SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Capaian telah mencapai 100% sesuai Target

No.	*Indikator*	*IKU/IKK/SPM*	*Target Renstra SKPD*					*Realisasi Capaian*			*Proyeksi*		*Catatan Analisis*
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKK/SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Capaian telah mencapai 100% sesuai Target
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	IKK/SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Capaian telah mencapai 100% sesuai Target

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan dan kecamatan tangguh bencana;
4. Peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Membangun sistem pelayanan informasi bencana yang terintegrasi pada setiap fase bencana;
6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan korban terdampak;
7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
8. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan masyarakat.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kota Blitar.

TABEL 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KOTA BLITAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	94 %	903.867.224	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	94 %	1.152.747.200	
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	3 kelurahan				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	3 kelurahan		
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	70 %				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	70 %		
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	191.111.900	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	221.103.300	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 orang	131.111.900	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 orang	171.103.300	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								paling lama dalam 1 (satu) tahun			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	385.939.924	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	606.910.600	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 kawasan	60.869.900	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan / atau kawasan-kawasan strategis kabupaten / Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 kawasan	280.000.000	Mengakomodir usulan musrenbang kecamatan
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 orang	42.219.340	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten / Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 orang	42.212.700	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten / Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	59.960.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	161.991.884	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	163.879.100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 kawasan	60.858.800	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mtigasi bencana	8 kawasan	60.858.800	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	166.672.800	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	172.006.800	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 orang	83.336.400	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 orang	83.169.200	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	83.336.400	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	88.837.600	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun	100 %	160.142.600	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun	100 %	152.726.500	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	80.142.600	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	68.106.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	20 orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	20 orang	84.620.100	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,16) indeks	3.628.161.082	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,16) indeks	3.869.846.337	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah - Penyesuaian Pagu anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	16.610.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	6.388.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	3.473.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	2.684.300	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	13.137.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	3.704.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.100.119.819	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.363.360.774	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.097.241.319	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.359.651.774	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	2.878.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	3.709.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	124.933.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	163.767.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	14.902.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	20.902.000	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	110.031.800	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	142.865.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	276.672.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	331.787.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.415.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	35.230.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	25.092.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.520.400	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	6.857.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	10.418.700	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	24.665.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	27.185.000	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.788.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	38.632.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	180.254.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	187.401.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	113.620.400	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	9 unit	36.754.200	Menyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	30.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 unit	76.866.200	Menyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	10 unit	10.000.000	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	560.437.563	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	580.107.063	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	42.612.063	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	41.292.063	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	517.825.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	538.815.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	249.387.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	310.813.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	150.957.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	185.959.100	Berdasarkan kondisi riil jumlah unit kendaraan
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	5.918.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	28 unit	13.198.000	Menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	12.512.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	24.947.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	49.975.800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 unit	36.734.000	Menyesuaikan kebutuhan

2.6 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 terdapat usulan kegiatan dari musrenbang Kecamatan sebagai berikut :

TABEL 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KOTA BLITAR

NO.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	-Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Plosokerep	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	24 orang	Diakomodir
2	Kurangnya Informasi/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rembang	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	24 orang	Diakomodir
3	Kurangnya Informasi/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Gedog	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 Orang	Diakomodir
4	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Klampok	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	26 Orang	Diakomodir
5	Kurangnya Informasi/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bendogerit	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 Orang	Diakomodir
6	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan	Karang Tengah	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	22 Orang	Diakomodir

NO.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
		Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
7	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sananwetan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	23 Orang	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
   - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
   - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
   - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
   - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
   - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
   - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
   - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
   - Pembangunan Wilayah Sumatera;
   - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
   - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
   - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
   - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
   - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
   - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
   - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;

- Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
   - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
   - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
   - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
   - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
   - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
   - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
   - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
   - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
   - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
   - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
   - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
   - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
   - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
   - Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
   - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

- Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui agenda pembangunan yang perlu dilakukan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta

c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang

Sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) penanggulangan bencana; dan

2) peningkatan ketahanan iklim.

c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) pembangunan energi berkelanjutan;

2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan

3) pengembangan industri hijau.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;

b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;

c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;

d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	*Tujuan :* Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	*Indikator Tujuan :* Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Terbitmya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,58	0,43	0,43	0,62	0,65
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	*Indikator sasaran :* Indeks kapasitas daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut yaitu : Indeks Kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,55	0,43	0,43	0,59	0,61

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
2	*Tujuan :* Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	*Indikator Tujuan :* Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A(80)	A(83,70)	A(83,70)	A(83,71)	A(83,72)
	Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	*Indikator Sasaran :* Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A(80)	A(83,70)	A(83,70)	A(83,71)	A(83,72)

3.3 Data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung Pencapaian Tupoksi
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Mendukung pencapaian SPM dan IKK
						Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	
						Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau Kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) kabupaten/kota	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
						sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yang telah tersusun	

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab./Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah pada kegiatan yang mendukung capaian SPM sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tindak lanjut LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2023 Sebagaimana tercantum pada tabel 4.1 adalah :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

Sedangkan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Terdapat 2 program, 11 kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Blitar, dengan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp. 5.022.593.537,- dan Prakiraan maju rencana tahun 2026 dengan pagu indikatif Rp. 5.247.373.213,-

Tabel 4.1

RENCANA TINDAK LANJUT LKJIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023
PADA RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun Lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat	Meningkatkan kerjasama antar Lembaga, instansi Pemerintah, Swasta dan organisasi relawan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
2.	Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Segera Menyusun Perda Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota

Tabel 4.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.022.593.537				5.247.373.213
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.022.593.537				5.247.373.213
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik (84,16) indeks	3.869.846.337			Baik (84,23) indeks	4.036.988.653
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	6.388.900			100 %	6.708.345
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	2.684.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.818.515
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	3.704.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	3.889.830

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	2.363.360.774			100%	2.455.278.812
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/ bulan	2.359.651.774	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang/ bulan	2.451.384.362
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	3.709.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	3.894.450
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	163.767.400			100 %	171.955.770
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20.902.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	21.947.100
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	142.865.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	150.008.670
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar		100 %	331.787.900			100 %	348.377.295

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	35.230.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	36.992.130
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27.520.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.896.420
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10.418.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.939.635
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.544.250
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	38.632.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	40.563.810
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	5.670.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	187.401.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	196.771.050

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	113.620.400			100 %	119.301.420
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit	36.754.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 unit	38.591.910
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	76.866.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	80.709.510
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar		100 %	580.107.063			100 %	609.112.416
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	41.292.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	43.356.666
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	538.815.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	565.755.750
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar		100 %	310.813.900			100 %	326.254.595
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	185.959.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	195.157.055

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	13.198.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Unit	13.857.900
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Unit	24.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Unit	26.194.350
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	49.975.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	52.474.590
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	36.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.570.700
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih		94 %	1.152.747.200			95 %	1.210.384.560
		Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya		3 kelurahan				3 kelurahan	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100 %				100 %	
		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana		70 %				80 %	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	221.103.300			100 %	232.158.465

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 Orang	171.103.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		950 Orang	179.658.465
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	52.500.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	606.910.600			100 %	637.256.130
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau Kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Kawasan	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Kawasan	294.000.000
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Orang	42.212.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang	44.323.335

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	59.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	62.958.000
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	163.879.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	172.073.055
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kawasan	60.858.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 kawasan	63.901.740
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	172.006.800			100 %	180.607.140
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	83.169.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	87.327.660
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	88.837.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	93.279.480
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar		100 %	152.726.500			100 %	160.362.825

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penanggulangan bencana yang telah tersusun							
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	68.106.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	71.511.720
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab./Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	84.620.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	88.851.105

BAB V
PENUTUP

Dari uraian – uraian seperti tersebut diatas terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang penanggulangan bencana. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.

Kaidah-kaidah yang dipedomani adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Renja Tahun 2025 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan; serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Blitar Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

27. RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintasPerangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir;
f. Penetapan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Mengacu pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Memantapkan Kota Blitar sebagai pusat layanan kesehatan), RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Jawa Timur Cerdas dan Sehat) dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2024 (Kehidupan sehat dan sejahtera);

3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan yang disusun dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ;
4. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
5. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan Renstra RSUD Mardi Waluyo

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Kesehatan) dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;

27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025; dan
30. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 /2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar serta program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2026

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun Lalu Dan Capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tercapai tidaknya kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	-	-	-			
						Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3	Tahun	74,26	74	74,97	101,31	74,1	74,97	100,90
						Sasaran 1: Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Status	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	100,00
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65	%	85,98	80,25	85,98	107,27	80,35	85,98	107,14
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	-	-	100	80	100	129,87	-	-	-
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	-	-	100	100	100	100,00	-	-	-
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	87	%	NA	NA	NA	NA	82	100	114,94

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan*	*46*	*unit*	NA	*15*	*15*	*100*	*11*	*38*	*82,61*
						Tujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	*Nilai*	A (84,3)	81,7	84,78	103,77	84,88	85,15	100,08
						Sasaran 2: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	nilai	A (84,3)	81,7	84,78	103,77	84,88	85,15	100,08
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,6)	Indeks	82,15	79,05	82,15	104,05	BAIK (82,2)	82,2	99,52
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
1	02	01	2	02	0001	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*516*	*Orang/bulan*	*511*	554	550	99,28	*555*	*616*	*116,14*
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	%	100,00	45	45	100	70	45	75,00
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90	%	100,00	100	100	100	100	90	100,00
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	60	%	100,00	50	100	200	100	50	83,33
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100,00	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90	%	100,00	50	100	200	100	90	100,00
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%	91,30	80	91,3	114,13	82	82	94,25
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%	100,00	50	100,00	200,00	82	82	94,25
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87	%	100,00	80	100,00	125,00	82	100	114,94
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87	%	81,48	80	86,19	107,74	82	82	94,25
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90	%	100,00	100	100,00	100	100	100	100,00
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%	99,25	100	100	100	100	100	100,00
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%	86,84	80	86,84	108,55	82	82	94,25

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%	100,00	80	76,92	96,15	90	76,92	96,15
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%	100,00	85	100,00	117,65	90	90	90,00
1	02	01	2	10	0001	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1*	*Unit kerja*	*NA*	*1*	*1*	*100*	*1*	*1*	*100*

Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian kinerja indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS telah melebihi target Renstra. Untuk target indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagian sudah tercapai dan sebagian belum tercapai. Untuk indikator sub kegiatan, dikarenakan adanya perubahan indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka capaian kinerja tahun 2022 tidak diperhitungkan.

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

a) Tersedianya SDM yang memadai dan sesuai kompetensi
b) Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung pelayanan
c) Tersedianya anggaran dari pendapatan BLUD
d) Pelayanan kesehatan yang sesuai SOP/SPO dan SPM Rumah Sakit
e) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan - Koordinasi yang baik antar bidang/bagian dan instalasi

Sedangkan faktor-faktor penghambat kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

a) Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD
b) Realisasi kinerja dan anggaran menunggu ketersediaan kas sesuai pendapatan BLUD
c) Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pemberian layanan
d) Perubahan rincian kegiatan karena aturan/kebijakan dan kebutuhan pelayanan
e) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan belum optimal

Karena RSUD Mardi Waluyo adalah Organisasi Bersifat Khusus yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka semua pembiayaan kecuali gaji ASN dan kegiatan yan sumber dari DBHCHT, bersumber dari pendapatan BLUD. Sehingga implikasi dari hal tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sampai dengan tribulan 1 adalah realisasi kinerja tergantung dari pendapatan yang diterima. Implikasi yang yang lain adalah kinerja yang telah direncanakan kemungkinan tidak sesuai jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak bisa terlaksana.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal-hal di atas adalah:

a) Peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat/pasien yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo semakin meningkat yang berimbas pada peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan, maka kinerja dan anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target
b) Melakukan analisa terhadap prioritas-prioritas kegiatan karena penyesuaian pendapatan yang diterima
c) Melakukan efisiensi anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indkator Kunci (IKK). Berdasarkan indikator kinerja tersebut, capaian kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	Indikakor	IKU/IKK/ SPM/ Standar Nasional	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Akreditasi RSUD	Indikator Sasaran/ IKU	Paripurna					Paripurna			Paripurna		
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	A (81,5)	A (81,7)	A (84,88)	A (84,98)	A (85,08)	A (84,3)	A (84,78)	A (84,78)	A (84,98)	A (85,08)	
3	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Indikator Program	80,15%	80,25%	80,35%	80,5%	80,65%	85,98%	86,92	86,92	80,5%	80,65%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	78,95	79,05	82,2	82,4	82,6	81,73	82,93	82,93	82,4	82,6	

Penjelasan penilaian kinerja pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

1. Akreditasi Rumah Sakit
   Akreditasi rumah sakit diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan review setiap tahun. Pada Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan Akreditasi dan lulus dengan Predikat PARIPURNA sesuai target RPJMD dan Renstra.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   SPM Rumah Sakit merupakan indicator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Penilaian SPM ditetapkan meliputi evaluasi kinerja pelayanan medik, keperawatan dan pelayanan penunjang medis. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. SPM disusun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yang diukur dengan menggunakan 24 indikator yang menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan penghitungan persentase indikator yamg mencapai target. Analisa terhadap pencapaian nilai SPM yang tidak atau belum memenuhi standar dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja pada indikator dimasing-masing unit.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Nilai interval untuk penilaian IKM seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pedoman Evaluasi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NO	INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN KINERJA	UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25– 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5234 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo di atas yang bersumber dari capaian tahun sebelumnya, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang ditandai dengan adanya keluhan/komplain pengguna layanan

b) Belum optimalnya pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis
c) Belum optimalnya fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit (alat medis dan non medis)
d) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (SIM RS)
e) Belum optimalnya pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS)
f) Biaya operasional rumah sakit yang tinggi idak sebanding dengan pendapatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 akan menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, khususnya untuk kegiatan anggaran tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan maka tingkat hasil capaian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Mempertahankan rumah sakit dengan predikat akreditasi Paripurna
2. Peningkatan persentase capaian SPM dan IKM

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya. Melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program yang dicantumkan dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD Mardi Waluyo akan melaksanakan penyusunan anggaran tahun 2025, penyusunan anggaran ini membutuhkan rancangan awal RKPD tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program kegiatan tahun 2025 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,5 %	*4.000.000.000*	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,5 %	1.000.000.000	Menyesuaikan dengan amggaran DBHCHT tahun 2024
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjanjang medik sesuai standar	85 %	*4.000.000.000*	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjanjang medik sesuai standar	85 %	1.000.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan*	*3 unit*	*4.000.000.000*	*Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*		*Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan*	*4 unit*	*1.000.000.000*	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK Indeks (82,4)	148.107.566.156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK Indeks (82,4)	152.809.995.218	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	33.107.566.156	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	42.809.995.218	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*516 orang /bulan*	*33.107.566.156*	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*		*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*616 orang /bulan*	*42.809.995.218*	*Menyesuaikan dengan jumlah ASN Tahun 2024*
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	115.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	*110.000.000.000*	
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %		
			Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55 %				Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55 %		
			Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %				Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %		
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90 %				Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90 %		
			Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	55 %				Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	55 %		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90 %				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90 %		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	85 %				Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	85 %		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	85 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	85 %		
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	85 %				Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	85 %		
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	85 %				Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	85 %		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90 %		
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %				Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %		
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	85				Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	85		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80 %		
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	95 %				Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	95 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1 unit kerja*	*130.400.000.000*	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1 unit kerja*	*110.000.000.000*	*Penyesuaian dengan pendapatan BLUD*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo juga berasal dari para usulan pemangku kepentingan baik dari pokok pikiran Dewan, Perguruan Tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program dan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 serta RPJMD Kota Blitar 2021-2026.

Adapun usulan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo yang berasal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan pada tahun 2025 adalah NIHIL.

Tabel 2.4

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN

   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem

   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
   - ✓ Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
   - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
   - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
   - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   - ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
   - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
   - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energy

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial
   Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu
   (1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
      a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
      b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
      c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
      d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
   (2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
      a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
      b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
      c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
      d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
      e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
      f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja
   (3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
      a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
      b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
      c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
      d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
      e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Transformasi Ekonomi
   Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu
   (1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
      a. Penguatan industri dasar
      b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
      c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
      d. Pengembangan industri medium-high technology
      e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
      f. Produktivitas UMKM dan koperasi
      g. Pengembangan ekonomi biru
      h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
      i. Peningkatan produktivitas BUMN
      j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
      k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
      l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
      m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
   (2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
      a. Percepatan transisi energi
      b. Ekonomi sirkular industri
      c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)

d. Pengelolaan hutan lestari

(3) Transformasi digital, melalui:
a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
c. Pemerintah digital
d. Penguatan factor pendukung dan akselerator transformasi digital

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
c. Perkuatan system logistic nasional
d. Peningkatan investasi untuk integrase ekonomi domestic dan global
e. Peningkatan perdagangan domestic, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
a. Wilayah metropolitan
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
a. Pebentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
a. Digitalisasi pelayanan publik
b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
c. Harmonisasi dan kolaborasi keweangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
b. Penguatan tata kelola ASN
c. Penggajian tunggal ASN
d. Reformasi system pension
e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha

e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
(1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
a. Pembangunan bidang hukum
b. Pembangunan bidang keamanan
c. Pembangunan bidang demokrasi
(2) Stabilitas ekonomi makro
a. Optimalisasi pendapatan negara
b. Peningkatan kualitas belanja negara
c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
(3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
(1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
(2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
a. Penguatan ketahanan keluarga
b. Peningkatan kesetaraan gender
c. Perwujudan masyarakat inklusif
(3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
(4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
a. Kemandirian pangan
b. Peningkatan ketahanan air nasional
c. Ketahanan energi
(5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2025 di atas, RSUD Mardi Waluyo mengemban kebijakan dan strategi transformasi sosial yang arah kebijakannya adalah meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Tahun 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,00	74,97	74,10	74,975	74,980
	Sasaran: Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang	A (81,7)	A (84,78)	A (84,78)	A (84,98)	A (85,08)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal					
	Sasaran: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (81,7)	A (84,78)	A (84,78)	A (84,98)	A (85,08)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo tahun 2024 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan, tindaklanjut LKJIP, telaah kebijakan nasional, dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024 sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	
2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	
2	*2*	*2.01*	*14*	*Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	• *Isu strategis pelayanan* • *Telaah kebijakan nasional*
5.01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
5.01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
5.01	*1*	*2.02*	*1*	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya*	*Penunjang tupoksi*
5.01	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
					perangkat daerah yang sesuai standar	
					Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	
					Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
					Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	
					Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	
5.01	*1*	*2.10*	*1*	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	• *Isu strategis pelayanan* • *Tindak lanjut LKJIP* • *Telaah kebijakan nasional*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Pada tahun 2025 Renja RSUD Mardi Waluyo memuat 2 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 fokus pada penanganan isu-isu strategis terkait pelayanan rumah sakit, kebijakan-kebijakan pelayanan yang menjadi prioritas serta rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023. Adapun rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023

Pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memberikan pelatihan / refreshing terkait penanganan bencana kebakaran dan bantuan hidup dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Memastikan proses penyusunan FMEA (Failure Mode and Analysis) tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan benar	
		Peningkatan Komunikasi Efektif dalam Asuhan Pelayanan	
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Verifikasi ijazah untuk semua pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	

Selain rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023, Renja RSUD Kota Blitar juga memuat kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait perumahsakitan diantaranya:

a) Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar
b) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik
c) Pengembangan SIMRS
d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
e) Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
f) Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik
g) Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				153.809.995.218				185.244.816.156	
2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Kota Blitar	80,5 %	1.000.000.000	DAK /DBHCHT		80,65 %	1.400.000.000	DAK /DBHCHT
2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar		85 %	1.000.000.000	DAK /DBHCHT		87 %	1.400.000.000	DAK /DBHCHT
2	*2*	*2.01*	*14*	*Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*		*4 unit*	*1.000.000.000*	*DAK /DBHCHT*		*3 unit*	*1.400.000.000*	*DAK /DBHCHT*
5.01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	BAIK Indeks (82,4)	152.809.995.218			BAIK Indeks (82,6)	163.507.566.156	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	42.809.995.218	DAU		100 %	33.107.566.156	DAU
5.01	*1*	*2.02*	*1*	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*		*615 orang /bulan*	*42.809.995.218*	*DAU*		*516 orang*	*33.107.566.156*	*DAU*
5.01	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	110.000.000.000	Pendapatan BLUD		100 %	*130.400.000.000*	Pendapatan BLUD
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas		55 %				60 %		
					Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar		90 %				90 %		
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		55 %				60 %		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		90 %				90 %		
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target		85 %				87 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar		85 %				87 %		
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi		85 %				87 %		
					Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target		85 %				87 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar		90 %				90 %		
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi		100 %				100 %		
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target		85 %				87 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar		80 %				80 %		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi		95 %				100 %		
5.01	*1*	*2.10*	*1*	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		*1 unit kerja*	*110.000.000.000*	*BLUD*		*1 Unit kerja*	*130.400.000.000*	*BLUD*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra RSUD Mardi Waluyo dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan dengan program yang pendanaannya bersumber dari APBD, BLUD, DAK dan DBHCHT. Untuk program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari BLUD, pagu indikatif tergantung pada Pendapatan BLUD dan untuk penggunaan dananya mengutamakan prioritas serta tingkat urgensi kebutuhan pada saat tahun anggaran berjalan. Karena sebagai unit organisasi bersifat khusus, maka RSUD Mardi Waluyo memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo disusun untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Mardi Waluyo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, kegiatan dan program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi, Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui pengembangan pelayanan
b. Meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit;

c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar klas B Pendidikan;
d. Meningkatkan kualitas SDM
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan
f. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh aparatur RSUD Mardi Waluyo guna tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang berkualitas, konsisten dan terintegrasi.

28. RENCANA KERJA KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rencana awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

1.1.2. Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Kecamatan Sananwetan 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
2. Berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Sananwetan Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Sananwetan tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Kecamatan Sananwetan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Sananwetan;
4. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
5. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat daerah tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan/pedoman dasar bagi seluruh aparatur/ personil di masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional dengan memberikan arah program dan kegiatan dari masing-masing unit di lingkungan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sesuai program yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026;
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
4. Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2025.
5. Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan.
6. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
7. Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
8. Sebagai Pedoman penyusunan KUAPPAS 2025 dan Rencana APBD 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan dokumen RKPD Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANANWETAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sananwetan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sananwetan

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022, 2023, dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Pada sub bab ini disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan

Berisi telaah terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, dan SPM. Pada sub bab ini disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan format sebagaimana tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sananwetan

Berisikan uraian isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai hasil persandingan antara rancangan awal RKPD dengan program / kegiatan / sub kegiatan hasil identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah. Pada sub bab ini disajikan tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil telaah atas usulan musrenbang dan pokok – pokok pikiran DPRD.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagai bahan telaah Perangkat Daerah dapat menggunakan Draft Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Berisikan rekapitulasi mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dengan mencantumkan tagging program/kegiatan/sub kegiatan terhadap SPM/Tematik (Kemiskinan/Stunting/P3DN/Inflasi/Investasi) / keterangan lain.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisi bab – bab sebelumnya, dengan menyajikan :

1. Rencana tindak lanjut lkjip perangkat daerah tahun 2023 pada renja perangat daerah tahun 2025
2. Rumusan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
c. Rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA KECAMATAN SANANWETAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Sananwetan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sananwetan

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sananwetan tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Walikota kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adapun fungsi dari Kecamatan Sananwetan berdasarkan Perwali Nomor 77 Tahun 2016 adalah :

a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
l. Penyelenggaraan keamanan dan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
o. Pelaksanaan pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja Kecamatan Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sananwetan, bahwa penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada tahun 2023, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Sananwetan tercapai Rp. 298.265.95,00 dari target sebesar Rp. 302.403.949,00 atau 98,63 %. PAD ini berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah pertanian / Bengkok.

Dari sisi belanja, pada tahun 2023 terealisasi sebesar 98,62% atau Rp. 16.281.100.862,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 16.508.115.425,00.

Program Kecamatan Sananwetan yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berikut adalah Hasil Evaluasi Capaian Renja Tahun lalu (2024) dan Capaian Renstra Kecamatan Sananwetan yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sananwetan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sananwetan s/d Tahun 2024 Kota Blitar Nama PD : Kecamatan Sananwetan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	83,14	83	88,6	106,75	84	86,3	102,74%	
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	47	-	8	8	100,00	13	21	44,68%	Kecamatan
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	4	4	100,00	9	13	40,63%	Gedog
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	5	5	100,00	9	14	43,75%	Plosokerep
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	5	5	100,00	9	14	43,75%	Klampok

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	5	5	100,00	9	14	43,75%	Sananwetan
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	5	5	100,00	9	14	43,75%	Rembang
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	5	5	100,00	9	14	43,75%	Karangtengah
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	-	5	5	100,00	9	14	43,75%	Bendogerit
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32	-	8	8	100,00	7	15	46,88%	Kecamatan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	-	80	80	100,00	88	88	100,00%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	0 1	01	2.02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Gedog
						Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Plosokerep
						Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Klampok
						Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Sananwetan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Rembang
						Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Karangtengah
						Jumlah laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Bendogerit
7	0 1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	
7	0 1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	3	3	100,00	1	4	100,00%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Gedog
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Plosokerep
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Klampok
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Sananwetan
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Rembang
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Karangtengah
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Bendogerit
7	0 1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	120	-	150	120	80,00	120	120	100,00%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	65	-	60	60	100,00	12	72	110,77%	Gedog
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Plosokerep
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	44	-	13	13	100,00	13	26	59,09%	Klampok
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	52	-	11	11	100,00	11	22	42,31%	Sananwetan
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	60	-	11	11	100,00	11	22	36,67%	Rembang
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	40	-	13	13	100,00	13	26	65,00%	Karangtengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	44	-	12	12	100,00	12	24	54,55%	Bendogerit
7	0 1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
7	0 1	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Kecamatan
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Gedog
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Plosokerep

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Klampok
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Sananwetan
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Rembang
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Karangtengah
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Bendogerit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	-	4	4	100,00	4	8	50,00%	Kecamatan
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Gedog
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Plosokerep
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	-	3	3	100,00	4	7	46,67%	Klampok
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Sananwetan
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Rembang
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Karangtengah
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Bendogerit
7	01	01	2.06	03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	21	-	5	5	100,00	4	9	42,86%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24	-	6	6	100,00	6	12	50,00%	Gedog
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	22	-	4	4	100,00	6	10	45,45%	Plosokerep
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	18	-	3	3	100,00	5	8	44,44%	Klampok
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Sananwetan
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15	-	3	3	100,00	4	7	46,67%	Rembang
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24	-	6	6	100,00	6	12	50,00%	Karangtengah
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20	-	5	5	100,00	5	10	50,00%	Bendogerit
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	112	-	25	25	100,00	30	55	49,11%	Kecamatan
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11	-	2	2	100,00	3	5	45,45%	Gedog

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	28	-	7	7	100,00	7	14	50,00%	Plosokerep
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	22	-	1	1	100,00	7	8	36,36%	Klampok
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16	-	1	1	100,00	5	6	37,50%	Sananwetan
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	28	-	7	7	100,00	7	14	50,00%	Rembang
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	39	-	9	9	100,00	10	19	48,72%	Karangtengah
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	46	-	25	25	100,00	7	32	69,57%	Bendogerit
7	0 1	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Kecamatan
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Gedog

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Plosokerep
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Klampok
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Sananwetan
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Rembang
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Karangtengah
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	1	25,00%	Bendogerit
7	0 1	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	168	-	60	60	100,00	36	96	57,14%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	-	36	36	100,00	12	48	66,67%	Gedog
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Plosokerep
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Klampok
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	-	36	36	100,00	12	48	66,67%	Sananwetan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Rembang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Karangtengah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Bendogerit
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	-	20	20	100,00	20	40	50,00%	Kecamatan
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24	-	-	-	-	-	0	0,00%	Kecamatan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Gedog
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Plosokerep
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Klampok

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Sananwetan
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Rembang
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Karangtengah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	168	-	-	-	-	-	0	0,00%	Bendogerit
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	71	-	45	43	95,56	12	55	77,46%	Kecamatan
						Jumlah paket mebel yang disediakan	26	-	-	-	-	2	2	7,69%	Gedog
						Jumlah paket mebel yang disediakan	61	-	55	55	100,00	2	57	93,44%	Plosokerep
						Jumlah paket mebel yang disediakan	58	-	-	-	-	50	50	86,21%	Klampok
						Jumlah paket mebel yang disediakan	14	-	2	2	100,00	4	6	42,86%	Sananwetan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah paket mebel yang disediakan	3	-	-	-	-	1	1	33,33%	Rembang
						Jumlah paket mebel yang disediakan	4	-	-	-	-	1	1	25,00%	Karangtengah
						Jumlah paket mebel yang disediakan	12	-	-	-	-	0	0	0,00%	Bendogerit
7	0 1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	-	3	4	133,33	5	9	45,00%	Kecamatan
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15	-	3	3	100,00	4	7	46,67%	Gedog
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	-	3	3	100,00	1	4	66,67%	Plosokerep
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	-	1	1	100,00	2	3	42,86%	Klampok
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	-	2	2	100,00	5	7	41,18%	Sananwetan
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Rembang
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Karangtengah
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Bendogerit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	-	-	-	-	0	0	0,00%	Kecamatan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	-	24	24	100,00	24	48	50,00%	Kecamatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	-	24	24	100,00	24	48	50,00%	Gedog
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	-	36	36	100,00	24	60	55,56%	Plosokerep
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	-	24	24	100,00	24	48	50,00%	Klampok

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	-	36	36	100,00	24	60	55,56%	Sananwetan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	-	36	36	100,00	24	60	55,56%	Rembang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	-	36	36	100,00	24	60	55,56%	Karangtengah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	-	24	24	100,00	24	48	50,00%	Bendogerit
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	-	36	36	100,00	36	72	50,00%	Kecamatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Gedog
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Plosokerep

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Klampok
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Sananwetan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Rembang
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Karangtengah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	12	100,00	12	24	50,00%	Bendogerit
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	10	10	10	100,00	12	12	100,00%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	6	6	6	100,00	6	7	100,00%	Gedog
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	6	6	6	100,00	6	7	100,00%	Plosokerep
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	6	6	6	100,00	6	7	100,00%	Klampok
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	6	6	6	100,00	6	7	100,00%	Sananwetan
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	6	6	6	100,00	6	7	100,00%	Rembang
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	7	7	7	100,00	7	8	100,00%	Karangtengah
						Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	6	6	6	100,00	6	7	100,00%	Bendogerit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	256	-	64	64	100,00	64	128	50,00%	Kecamatan
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	33	-	18	18	100,00	5	23	69,70%	Gedog
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	128	-	38	38	100,00	30	68	53,13%	Plosokerep
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	69	-	-	-	-	19	19	27,54%	Klampok
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	76	-	16	16	100,00	20	36	47,37%	Sananwetan
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	62	-	32	32	100,00	10	42	67,74%	Rembang
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	117	-	54	54	100,00	21	75	64,10%	Karangtengah
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	124		40	40	100,00	28	68	54,84%	Bendogerit
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	7	-	1	3	300,00	2	5	71,43%	Kecamatan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6	-	1	2	200,00	3	5	83,33%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98	100	97	97	100,00	97	97	98,98%	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	2	2	100,00	1	3	50,00%	Kecamatan
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Gedog
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Plosokerep
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Klampok
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Sananwetan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Rembang
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Karangtengah
						Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	6	-	1	1	100,00	1	2	33,33%	Bendogerit
7	0 1	02	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	22	-	10	10	100,00	4	14	63,64%	Kecamatan
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	8	-	1	1	100,00	1	2	25,00%	Gedog
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	8	-	1	1	100,00	1	2	25,00%	Plosokerep
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	86	-	40	40	100,00	40	80	93,02%	Klampok

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	16	-	5	5	100,00	5	10	62,50%	Sananwetan
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	8	-	1	1	100,00	1	2	25,00%	Rembang
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	10	-	2	2	100,00	2	4	40,00%	Karangtengah
						jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	12	-	3	3	100,00	3	6	50,00%	Bendogerit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
						Persentase rt berdaya	75	75	75	75	75	75	75	100,00%	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	0 1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14	-	7	7	100,00	7	7	50,00%	Kecamatan
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14	-	10	10	100,00	14	14	100,00%	Gedog
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	45	-	45	45	100,00	45	45	100,00%	Plosokerep
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	33	-	32	32	100,00	33	33	100,00%	Klampok
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	11	-	11	11	100,00	11	11	100,00%	Sananwetan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	31	-	31	31	100,00	31	31	100,00%	Rembang
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	45	-	47	47	100,00	45	45	100,00%	Karangtengah
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	8	-	11	11	100,00	8	8	100,00%	Bendogerit
7	0 1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9	-	7	7	100,00	7	7	77,78%	Kecamatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15	-	15	15	100,00	15	15	100,00%	Gedog
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	47	-	47	47	100,00	47	47	100,00%	Plosokerep

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	8	-	8	8	100,00	8	8	100,00%	Klampok
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	17	-	19	19	100,00	19	17	100,00%	Sananwetan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	31	-	31	31	100,00	31	31	100,00%	Rembang
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10	-	11	11	100,00	11	10	100,00%	Karangtengah
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	8	-	8	8	100,00	8	8	100,00%	Bendogerit
7	0 1	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100	-	100	100	100	100	100	100,00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	0 1	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7	-	7	7	100,00	7	7	100,00%	Kecamatan
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	3	-	6	6	100,00	6	3	100,00%	Gedog
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7	-	7	7	100,00	7	7	100,00%	Plosokerep
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4	-	4	4	100,00	4	4	100,00%	Klampok
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7	-	7	7	100,00	7	7	100,00%	Sananwetan
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	-	8	8	100,00	8	8	100,00%	Rembang
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	-	10	10	100,00	10	8	100,00%	Karangtengah
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	8	-	8	8	100,00	8	8	100,00%	Bendogerit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	16	-	4	4	100,00	4	8	50,00%	Kecamatan
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Gedog
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	4	-	1	1	100,00	1	2	50,00%	Plosokerep
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	6	-	3	3	100,00	1	4	66,67%	Klampok
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	5	-	2	2	100,00	1	3	60,00%	Sananwetan
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	6	-	3	3	100,00	1	4	66,67%	Rembang
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	6	-	3	3	100,00	1	4	66,67%	Karangtengah
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	5	-	2	2	100,00	1	3	60,00%	Bendogerit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	4806	-	1080	2036	188,52	2186	4222	87,85%	Kecamatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	1920	-	600	600	100,00	600	1200	62,50%	Gedog
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	630	-	135	135	100,00	225	360	57,14%	Plosokerep

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	1140	-	32	32	100,00	1010	1042	91,40%	Klampok
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	1094	-	239	239	100,00	135	374	34,19%	Sananwetan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	305	-	85	85	100,00	100	185	60,66%	Rembang
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	580	-	145	145	100,00	145	290	50,00%	Karangtengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Progra m/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegia tan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegia tan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
									Target Renja PD tahun 2023	Realisa si Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	1764	-	554	554	100,00	554	1108	62,81%	Bendogerit

Pada Tahun 2024 tingkat capaian Renstra Kecamatan sananwetan rata – rata telah mencapai target yang diperkirakan sebelumnya yaitu sebanyak 59,20%.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :

   a. Adanya Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

   b. Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang kondusif;

   c. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

2. Faktor Penghambat :

   a. Kualitas sumber daya aparatur masih ada yang rendah dalam memahami tupoksi yang telah ada;

   b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

   c. Belum maksimalnya pengelolaan aset daerah dikarenakan masih lemahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset daerah tersebut;

   d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga akan menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari;

   e. Belum optimalnya ketersediaan data–data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya data kemiskinan.

Analisis kinerja diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kinerja ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi yang diambil sehingga diketahui capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kami tampilkan tabel tentang pencapaian kinerja Kecamatan Sananwetan berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Sananwetan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

No	Indikator	IKU/IKK/SKM	Target Renstra Kecamatan Sananwetan					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	A (85)	A (86,88)	A (87,89)	A (88,89)	A (89,88)	A (85,06)	A (85,13)	A (85,13)	A (88,89)	A (89,88)	
2	Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	-	A (85)	A (86,88)	A (87,89)	A (88,89)	A (89,88)	A (85,06)	A (85,136)	A (85,136)	A (88,89)	A (89,88)	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	IKU	Baik (84)	Baik (86)	Baik(88)	Sangat Baik(89)	Sangat Baik(90)	Baik (83,14)	Baik (87,98)	Baik(86,57)	Sangat Baik(89)	Sangat Baik(90)	
4	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	-	97%	97%	97%	98%	98%	99,11%	98,63%	98,63%	98%	98%	
5	Presentase kelurahan berdaya	-	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sananwetan

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, maka dapat menemukan permasalahan utama sebagai bahan untuk menyusun tujuan, sasaran, program dan kegiatan pemerintah beserta OPD yang melaksanakan.

Begitu sentralnya penentuan masalah dalam suatu proses perencanaan pembangunan, maka dalam penentuan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sananwetan perlu adanya penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal di Kecamatan Sananwetan. Melalui tahapan ini diharapkan dapat memberi prediksi berbagai peluang ataupun prediksi ancaman bagi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sananwetan. Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan tepat sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Sananwetan dalam kurun waktu 2025. Isu-isu strategis atau isu-isu penting merupakan kesatuan permasalahan maupun peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat dan peluang yang harus dimanfaatkan sebagai akselerator percepatan pencapaian pembangunan.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut diatas maka perumusan isu-isu penting atau strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan menjadi sentral guna kesempurnaan dokumen perencanaan. Dalam penentuan isu-isu penting atau strategis ini tentunya tidak terlepas dari faktor eksternal Kecamatan Sananwetan yaitu arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 dan faktor internal melalui capaian kinerja Kecamatan Sananwetan tahun sebelumnya. Melalui arah kebijakan ini, maka Kecamatan Sananwetan sebagai OPD teknis dapat mengukur potensi-potensi internal maupun eksternal yang dimiliki Kecamatan Sananwetan yang dapat menjadi pendorong pencapaian kebijakan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 atau menghambat faktor pencapaian arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025. Adapun arah pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 yang merupakan periode keempat dari RPJPD 2005 – 2025, maka pembangunan di Tahun 2025 diarahkan untuk :

1. Memantapkan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan lingkungan hidup
2. Memantapkan Kota Blitar yang eksis dalam aktivitas pelayanan perdagangan dan jasa regional dan nasional serta transformasi dari pola pengembangan perdagangan berbasis keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif
3. Memantapkan Kota Blitar sebagai kota pendidikan berkualitas yang didukung masyarakat berwawasan pendidikan
4. Memantapkan Kota Blitar sebagai pusat layanan Pendidikan
5. Memantapkan penerapan *good governance*
6. Memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informatika dan *e government*
7. Memantapkan nilai-nilai sosio religious dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan

8. Memantapkan karakter budaya local sebagai identitas Kota Blitar yang beriman dan berakhlak mulia, berbudi luhur, toleransi tinggi, bergotong royong yang berjiwa nasionalisme dan patriotism
9. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang

Isu–isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. Sarana prasarana pendukung pelayanan yang ada di Kecamatan Sananwetan beserta kelurahnnya belum optimal, baik itu yang ada di pelayanan ataupun di seksi-seksi lainnya. Hal ini dikarenakan masih luasnya lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan kantor sehingga memaksimalkan sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat sedang yang di kelurahan terdapat beberapa lokasi kelurahan yang tidak maksimal dan perlu adanya relokasi sehingga bisa maksimal dalam pelayanan ;
2. Belum optimalnya system yang terhubung sampai tingkat RT ataupun jajaran samping maupun OPD lainnya. Bila ini terwujud maka tata kelola manajaman pemerintahan modern dapat terwujud. System ini tidak hanya untuk pelayanan melainkan untuk persuratan, informasi ataupun himbauan dan lain sebagainya;
3. Kualitas SDM yang ada di Kecamatan ataupun di kelurahan perlu ditingkatkan secara periodik melalui kegiatan pelatihan pelayanan, megingat tugas utama di kecamatan dan kelurahan adalah pelayanan kepada masyarakat;
4. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.

Pemerintah Kecamatan Sananwetan ditunjuk sebagai pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dijabarkan dalam 4 (empat) program kegiatan. Disamping itu, Pemerintah Kecamatan Sananwetan juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar. Dukungan tersebut, harus tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk–produk Kecamatan Sananwetan, diantaranya:

1. Produk–produk perencanaan pembangunan (Renja) yang lebih berkualitas;
2. Hasil–hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan pembangunan dan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Kecamatan Sananwetan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Blitar
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sananwetan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	12.899.052.825	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	13.948.408.072	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	19.387.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.401.300	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	6.905.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	6.905.400	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.482.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.495.900	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	10.132.319.692	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	11.162.319.692	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang / bulan	10.132.319.692	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang / bulan	11.162.319.692	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	143.904.680	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	163.068.380	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	52.929.380	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	45.529.380	
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	90.975.300	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	117.539.000	
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	250.609.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	255.516.800	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.741.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.741.000	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.322.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.322.800	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.568.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.568.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	77.733.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	70.783.200	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.647.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.504.900	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.100.000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	100.996.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	100.996.400	
18	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	1.106.920.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	1.111.673.500	
20	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	4.788.900	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	36.131.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35.673.500	
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1.066.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1.066.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.029.652.264	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.029.189.500	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	74.446.264	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	73.983.500	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	955.206.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	955.206.000	
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	216.258.689	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	217.238.900	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	112.672.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	112.672.400	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	28.586.289	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	29.566.500	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	1 Unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	1 Unit	70.000.000	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	337.013.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	338.513.200	
32	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	337.013.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	338.513.200	
33	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	3.687.900	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	3.687.900	
34	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	333.325.300	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	334.825.300	
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.712.028.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.550.587.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.286.919.900	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.139.569.600	
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	54.989.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	50.950.100	
38	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	2.231.930.800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	2.193.050.475	
39	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	425.108.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	411.018.200	
40	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	322.611.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	322.611.000	
41	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	102.497.400	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	88.407.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	145.017.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	145.017.700	
43	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	145.017.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	145.017.700	
44	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	770 Orang	145.017.700	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	770 Orang	145.017.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	159.841.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	180.392.008	
46	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.440.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.440.000	
47	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.440.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.440.000	
48	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.700.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.700.000	
49	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	1.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.700.000	
50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	31.580.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai	100 %	40.733.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								standar			
51	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.000.000	
52	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	24.580.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	33.733.800	
53	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	61.407.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	57.407.100	
54	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.885.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.885.500	
55	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.830.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.830.300	
56	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10.080.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7.987.900	
57	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.675.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.675.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.092.600	
59	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	
60	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.235.800	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.235.800	
61	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	22.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	37.225.008	
62	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	
63	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.225.008	
64	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	25.605.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	26.277.000	
65	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	23.805.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24.477.000	
66	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.609.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.609.100	
68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.415.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.415.600	
69	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.193.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.193.500	
70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	74.728.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	63.361.400	
71	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	74.728.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	63.361.400	
72	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.248.400	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	73.480.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	62.113.000	
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.098.911.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.089.757.700	
75	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	3.016.338.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	3.016.338.000	
76	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	35.688.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan	35.688.800	
77	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	2.980.649.200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	2.980.649.200	
78	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	82.573.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	73.419.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	81.580.600	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	65.524.800	
80	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	992.900	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7.894.900	
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	23.763.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	23.763.000	
82	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	23.763.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	23.763.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	360 Orang	23.763.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	360 Orang	23.763.000	
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	151.738.232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	164.129.364	
85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	
86	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000	
88	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	1.679.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.679.000	
89	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	30.580.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	42.233.800	
90	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	
91	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	24.580.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	36.233.800	
92	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	49.075.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	38.275.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
94	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.512.000	
95	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1.200.000	
96	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.875.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.875.000	
97	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.488.000	
98	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	
99	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	
100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	29.178.232	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	29.923.864	
101	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	9.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	9.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.178.232	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.323.864	
103	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	24.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	24.300.000	
104	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.500.000	
105	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	
106	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.491.700	
107	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7.491.700	
108	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	8.000.000	
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	44.716.988	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	36.849.656	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PUBLIK					
110	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	44.716.988	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	36.849.656	
111	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.248.756	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.756	
112	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	43.468.232	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	35.600.900	
113	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100 % 100 %	1.493.044.166	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100 % 100 %	1.481.390.366	
114	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.417.699.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.417.699.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.318.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47 Lembaga Kemasyarakatan	22.318.300	
116	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47 Pokmas / Ormas	1.395.380.900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47 Pokmas / Ormas	1.395.380.900	
117	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	75.344.966	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	63.691.166	
118	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	74.309.200	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.350.650	
119	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1.035.766	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7.340.516	
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	19.770.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	26.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	19.770.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	26.900.000	
122	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	19.770.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	0 Orang	26.900.000	
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	148.130.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	148.206.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.442.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.442.500	
125	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.442.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.442.500	
126	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.750.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.750.000	
127	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.750.000	
128	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	24.980.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	33.938.800	
129	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	18.980.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	27.938.800	
131	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	49.138.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	54.131.200	
132	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.982.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.305.900	
133	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.660.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.660.500	
134	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.350.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12.020.000	
135	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.897.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.897.000	
136	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.929.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.929.900	
137	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	617.900	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	617.900	
139	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	18.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	20.315.000	
140	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	9.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	9.000.000	
141	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.315.000	
142	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	36.577.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	20.385.600	
143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	34.777.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	18.585.600	
144	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	
145	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	16.243.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	16.243.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	8.295.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	8.295.500	
147	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.947.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.947.500	
148	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	45.046.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	37.410.100	
149	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	45.046.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	37.410.100	
150	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.224.400	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.224.400	
151	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	43.822.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	36.185.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.624.779.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.616.361.000	
153	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.543.331.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.544.798.000	
154	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan	23.031.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan	24.498.000	
155	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	1.520.300.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	1.520.300.000	
156	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	81.447.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	71.563.000	
157	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	80.404.900	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	69.418.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1.042.900	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2.144.900	
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	20.798.486	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	20.798.486	
160	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	20.798.486	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	20.798.486	
161	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49 Orang	20.798.486	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	49 Orang	20.798.486	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	150.188.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	168.370.056	
163	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	
164	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	
165	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.678.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.678.800	
166	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	1.678.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.678.800	
167	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	30.695.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai	100 %	38.877.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								standar			
168	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	
169	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	24.695.200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	32.877.000	
170	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	49.212.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	60.968.200	
171	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	3.887.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.887.900	
172	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	
173	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.006.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.006.900	
174	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.755.500	
176	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	
177	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	617.900	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	617.900	
178	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	24.836.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	19.423.100	
179	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.803.100	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.803.100	
180	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.033.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.620.000	
181	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	26.860.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	30.611.856	
182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	25.060.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	28.811.856	
183	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.478.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.385.100	
185	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.478.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.478.600	
186	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.906.500	
187	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	97.930.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100	87.930.000	
188	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	97.930.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	87.930.000	
189	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.246.400	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.246.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	96.683.600	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	86.683.600	
191	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.684.468.918	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	7.361.845.573	
192	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	3.600.280.218	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	7.285.839.847	
193	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	46.212.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	3.554.068.218	
194	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	3.554.068.218	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	3.731.771.629	
195	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	84.188.700	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	76.005.726	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	83.225.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	68.019.000	
197	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	962.900	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7.986.726	
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	25.312.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	25.312.000	
199	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	25.312.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	25.312.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	360 Orang	25.312.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	360 Orang	25.312.000	
201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	153.839.286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	167.899.486	
202	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	
203	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000	
205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	1.679.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.679.000	
206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	30.080.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	39.877.800	
207	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000	
208	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	24.580.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	34.377.800	
209	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	54.468.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	57.830.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.991.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.991.800	
211	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.978.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.466.100	
212	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.998.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.510.400	
213	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	20.300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	20.006.000	
214	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.656.400	
215	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	
216	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	
217	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	28.052.986	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	28.068.686	
218	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.374.754	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.390.454	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.678.232	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.678.232	
220	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	22.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	23.700.000	
221	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	21.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	21.900.000	
222	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	
223	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.333.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.317.300	
224	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.484.300	
225	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.833.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.833.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	36.696.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	28.696.500	
227	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	36.696.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	28.696.500	
228	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.248.400	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.400	
229	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	35.448.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	27.448.100	
230	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	967.571.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	959.011.000	
231	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	895.660.700	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	895.660.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 Lembaga Kemasyarakatan	15.026.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 Lembaga Kemasyarakatan	15.026.300	
233	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	880.634.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	880.634.400	
234	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	71.910.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	63.350.300	
235	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	70.874.700	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	53.412.400	
236	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1.035.900	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	9.937.900	
237	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	19.037.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	21.537.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	19.037.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	21.537.500	
239	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	19.037.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	60 Orang	21.537.500	
240	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	149.909.286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	162.787.086	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000	
242	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000	
243	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000	
244	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	1.679.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.679.000	
245	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	30.180.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	41.788.900	
246	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	24.580.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122 Orang	35.288.900	
248	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	50.284.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	50.284.000	
249	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.992.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.992.000	
250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	
251	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	8.022.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	8.022.000	
252	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000	
253	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.070.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.070.000	
254	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	500.000	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	
256	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	26.310.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	26.551.700	
257	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.241.600	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.483.200	
258	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.068.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.068.500	
259	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	24.247.286	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	25.274.586	
260	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	22.447.286	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	23.474.586	
261	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	
262	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.782.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.782.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.750.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.750.400	
264	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.032.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.032.500	
265	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	44.678.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	38.940.700	
266	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	44.678.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	38.940.700	
267	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.248.700	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.700	
268	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	43.430.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	37.692.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.158.351.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.147.447.100	
270	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.078.087.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.078.087.300	
271	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Kemasyarakatan	29.306.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Kemasyarakatan	29.306.300	
272	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	2.048.781.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	2.048.781.000	
273	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	80.264.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	69.359.800	
274	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	79.229.200	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	64.924.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1.035.400	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4.435.400	
276	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	20.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	24.565.000	
277	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	20.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	24.565.000	
278	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56 Orang	20.800.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	86 Orang	24.565.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	161.278.335	
280	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.442.800	
281	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	24.565.000	
282	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.700.000	
283	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	5 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.700.000	
284	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai	100 %	39.375.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								standar			
285	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	
286	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	33.375.200	
287	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	50.534.099	
288	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.990.100	
289	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.999.999	
290	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	9.083.300	
291	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.092.800	
293	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	
294	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	617.900	
295	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	40.296.900	
296	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	17.794.000	
297	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22.502.900	
298	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	12.451.636	
299	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	10.651.636	
300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.477.700	
302	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.479.700	
303	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	7.998.000	
304	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	98 %	1.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100%	70.845.600	
305	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.300.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	70.845.600	
306	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.300.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.274.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	69.571.200	
308	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.705.192.064	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100% 100%	2.771.381.164	
309	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.705.192.064	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.705.192.064	
310	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	34.864.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	34.864.600	
311	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.670.327.464	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.670.327.464	
312	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	66.189.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	63.724.200	
314	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.464.900	
315	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	24.305.000	
316	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	24.305.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	328 Orang	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	328 Orang	24.305.000	

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisa Kebutuhan banyak terjadi perubahan baik pada segi anggaran maupun target kinerja. Ada yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Semua berdasarkan penyesuaian kebutuhan di lapangan.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak *an sich* dari pemerintah kepada masyarakat (*top down*) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (*buttom up*) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2025. Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan tidak terdapat usulan yang ada kaitannya dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok fungsi kecamatan, yang dijelaskan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Blitar

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
A	POKOK - POKOK PIKIR MASYARAKAT					
1	Perbaikan kantor Kelurahan Gedog (pemeliharaan cat, kanopi tempat parkir, tempat baliho)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gedog	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	Diakomodir
2	Pembangunan Jogging track P 280 m L 5 m	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Joging Track yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
B	DSP MUSRENBANG RKPD KECAMATAN					
1	Pavingisasi halaman kantor Kelurahan Sananwetan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Halaman Kantor yang terpaving	1 Unit	Diakomodir
2	Pengadaan pagar, gerbang, neon box papan nama kantor Kelurahan Bendogerit baru, gerbang, l=43 meter, p=96 m, keliling = 276 m	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Pagar, Gerbang, dan Papan Nama Kantor yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
C	DSP TINGKAT KELURAHAN					
1	Pembangunan Talud kantor Kelurahan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gedog	Jumlah Talud yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
2	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gedog	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan dilatih	1 Kelompok	Diakomodir

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembangunan kolam kantor kelurahan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gedog	Jumlah Kolam yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
4	BSC FOOD COURT (Fasilitasi UMKM Bendogerit di BSC (Bendogerit Sport Centre))	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Foodcourt yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
5	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan dilatih	1 Kelompok	Diakomodir
6	Pembangunan Sarana Communal Space/ Ruang Komunal untuk UMKM	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rembang	Jumlah sarana communal yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
7	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rembang	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan dilatih	1 Kelompok	Diakomodir
8	Pengembangan Pusat Kuliner di Lingkungan Sumber Blimbing Karangtengah	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangtengah	Jumlah pusat kuliner yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
9	Pembuatan Kolam Koi	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Karangtengah	Jumlah Kolam yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
10	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangtengah	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan dilatih	1 Kelompok	Diakomodir
11	Pembuatan Kolam Koi	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Kolam yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
12	Pembuatan Taman Pojok	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sananwetan	Jumlah taman pojok yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
13	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan	1 Kelompok	Diakomodir

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
		Kelurahan	Sananwetan	dilatih		
14	Pembangunan Food Court Karplos	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Foodcourt yang terbangun	1 Unit	Diakomodir
15	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan dilatih	1 Kelompok	Diakomodir
16	Pemeliharaan Kalibalang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampok	Jumlah Kalibalang yang terpelihara	1 Unit	Diakomodir
17	Pelatihan dan Pembinaan Pokdarwis	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampok	Jumlah Pokdarwis yang dibina dan dilatih	1 Kelompok	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SANANWETAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
   - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
   - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
   - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
   - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
   - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi;
   - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
   - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
   - Pembangunan Wilayah Sumatera;
   - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
   - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
   - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
   - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
   - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
   - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
   - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
   - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
   - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
   - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;

- Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
   - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
   - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
   - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
   - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
   - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
   - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
   - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
   - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
   - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
   - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
   - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
   - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
   - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
   - Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
   - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
   - Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
   - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
   - Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi sebagaimaana tersebut diatas, memang secara tersurat tidak ada prioritas yang langsung berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan, namun kecamatan sebagai PD yang langsung berhadapan dengan masyarakat memiliki kepentingan sebagai PD pendukung (supporting) dalam menyukseskan beberapa kebijakan nasional sebatas kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan. Adapun

prioritas nasional yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan kinerja utama meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Guna mendukung prioritas tersebut maka kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Sananwetan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sananwetan

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Sananwetan pada tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sananwetan dalam mengemban visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
3. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sananwetan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sananwetan Tahun 2025-2026

Sesuai Perubahan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Baik (86)	Baik (87,98)	Baik (86,57)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Indikator yang mengukur tingkat kesesuaian pelayanan kepada masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan standart pelayanan	97%	98,63%	100%	98%	98%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Indikator yang mengukur tingkat keberdayaan kelurahan. Bisa dilihat dari keikutsertaan kelurahan dalam program RT Keren	75%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur nilai SAKIP dari setiap perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh tim APIP yang menyasar keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	A (86,88)	A (85,13)	A (85,13)	A (88,89)	A (89,88)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan	Indikator yang mengukur nilai SAKIP dari setiap perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh tim APIP yang menyasar keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	A (86,88)	A (85,13)	A (85,13)	A (88,89)	A (89,88)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sananwetan di atas, dibutuhkan strategi – strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik
2. Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan
3. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam usaha mewujudkan strategi yang telah disusun, dibutuhkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan
2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan
3. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
5. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025, Kecamatan Sananwetan dan 7 (tujuh) kelurahan memiliki rata – rata Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang hampir sama. Pada Kecamatan Sananwetan, terdapat 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Sedangkan di Kelurahan, terdapat 4 (empat) Program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kecamatan Sananwetan Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kecamatan Sananwetan	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kecamatan Sananwetan	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Sananwetan	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kecamatan Sananwetan	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kecamatan Sananwetan	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	Kecamatan Sananwetan	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kecamatan Sananwetan	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kecamatan Sananwetan	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kecamatan Sananwetan	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Sananwetan	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Sananwetan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kecamatan Sananwetan	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kelurahan Gedog	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gedog	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Kantor	yang Disediakan		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gedog	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gedog	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Gedog	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Gedog	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Gedog	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gedog	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT BerdayaPersentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kelurahan Gedog	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Gedog	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gedog	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gedog	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Gedog	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Gedog	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Gedog	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Gedog	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Gedog	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Gedog	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Plosokerep	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Plosokerep	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Lapangan			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Plosokerep	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Plosokerep	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Plosokerep	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kelurahan Plosokerep	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Plosokerep	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Plosokerep	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Plosokerep	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Plosokerep	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Plosokerep	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Plosokerep	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Plosokerep	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klampok	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Klampok	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Klampok	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Klampok	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Klampok	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Klampok	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Klampok	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kelurahan Klampok	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Klampok	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klampok	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampok	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Klampok	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Klampok	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Klampok	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Klampok	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Klampok	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Kelurahan Klampok	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sananwetan	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Sananwetan	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Sananwetan	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sananwetan	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kelurahan Sananwetan	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Sananwetan	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sananwetan	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Sananwetan	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Sananwetan	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Sananwetan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Sananwetan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Sananwetan	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Sananwetan	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Rembang	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Rembang	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rembang	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rembang	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Rembang	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Rembang	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Rembang	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rembang	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kelurahan Rembang	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kelurahan Rembang	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rembang	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Rembang	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Rembang	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Rembang	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Rembang	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Rembang	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Rembang	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kelurahan Karang Tengah	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kelurahan Karang Tengah	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Karang Tengah	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Karang Tengah	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Bendogerit	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kelurahan Bendogerit	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bendogerit	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Lapangan			
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bendogerit	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Kelurahan Bendogerit	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Bendogerit	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	Kelurahan Bendogerit	Mendukung Kemiskinan dan Stunting
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Bendogerit	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Bendogerit	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Bendogerit	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Bendogerit	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kelurahan Bendogerit	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Kelurahan Bendogerit	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Bendogerit	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Tahun 2024, telah dilakukan penyusunan LKjIP atas realisasi kinerja dan anggaran Kecamatan Sananwetan pada Tahun 2023. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat hal – hal yang memerlukan langkah perbaikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Kecamatan Sananwetan Tahun 2023

Pada Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025jjj

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindaklanjut	Pemetaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/ kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi yang layak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan.	-Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota -Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah -Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
		Mengintegrasikan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan berbasis IT	-Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik -Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan -Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
2	Mengoptimalkan koordinasi pembangunan infrastruktur kewilayahan	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien baik dengan masyarakat maupun OPD terkait	-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan -Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan -Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Melakukan pembangunan yang terintegrasi dan saling terhubung antara Kecamatan dan Kelurahan dengan program EPIC Sananwetan	-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok masyarakat di	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat	-Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan -Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindaklanjut	Pemetaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	kecamatan	Melakukan pendataan dan juga penjaringan kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	Mengoptimalkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam hal pendataan masalah kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		Rutin mengupdate data di level kelurahan dan kecamatan	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 Kecamatan Sananwetan mengacu pada Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Sananwetan, yang terdiri dari 4 (empat) program, dan 11 (sebelas) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan se-Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 adalah sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Blitar

Nama PD : Kecamatan Sananwetan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	13.948.408.072,00	PAD dan DAU		84 Indeks	13.564.328.476
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.401.300,00	PAD		100 %	9.871.365
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	6.905.400,00	PAD		13 Dokumen	7.250.670
	7	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.495.900,00	PAD		7 Laporan	2.620.695
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	11.162.319.692,00	DAU		100 %	10.638.935.677

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	11.162.319.692,00	DAU		88 Orang/bulan	10.638.935.677
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	163.068.380,00	PAD		100 %	171.221.799
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	45.529.380,00	PAD		3 Paket	47.805.849
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	117.539.000,00	PAD		120 Orang	123.415.950
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	255.516.800,00	PAD		100 %	268.292.640
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.741.000,00	PAD		1 Paket	4.978.050
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.322.800,00	PAD		4 Paket	28.688.940
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.568.500,00	PAD		4 Paket	12.146.925

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	70.783.200,00	PAD		30 Paket	74.322.360
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.504.900,00	PAD		1 Paket	33.080.145
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	8.100.000,00	PAD		36 Dokumen	8.505.000
	7	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	100.996.400,00	PAD		20 Laporan	106.046.220
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000,00	PAD		1 Dokumen	525.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	1.111.673.500,00	PAD		100 %	1.167.257.175
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00	PAD		10 Unit	10.500.000
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	35.673.500,00	PAD		6 Unit	37.457.175
	7	01	01	2.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1.066.000.000,00	PAD		8 Unit	1.119.300.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.029.189.500,00	PAD dan DAU		100 %	1.080.648.975
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	73.983.500,00	PAD		36 Laporan	77.682.675
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	955.206.000,00	DAU		36 Laporan	1.002.966.300
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	217.238.900,00	PAD		100 %	228.100.845
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	112.672.400,00	PAD		13 Unit	118.306.020
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	29.566.500,00	PAD		58 Unit	31.044.825
	7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	PAD		1 Unit	5.250.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00	PAD		1 Unit	73.500.000
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	338.513.200,00	PAD		100 %	355.438.860
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	338.513.200,00	PAD		100 %	355.438.860
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	3.687.900,00	PAD		1 Dokumen	3.872.295
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	334.825.300,00	PAD		4 Laporan	351.566.565
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sananwetan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.550.587.800,00	PAD		100 % 100 %	2.678.117.190

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.139.569.600,00	PAD		100 %	2.246.548.080
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	50.950.100,00	PAD		14 Lembaga Kemasyarakatan	53.497.605
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	2.088.619.500,00	PAD		9 Pokmas / Ormas	2.193.050.475
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	411.018.200,00	PAD		100 %	431.569.110
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	322.611.000,00	PAD		7 Lembaga Kemasyarakatan	338.741.550
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	4 Laporan	88.407.200,00	PAD		4 Laporan	92.827.560

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Masyarakat						
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	145.017.700,00	PAD		100 %	152.268.585
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	145.017.700,00	PAD		100 %	152.268.585
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	770 Orang	145.017.700,00	PAD		770 Orang	152.268.585

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Gedog	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	180.392.008,00	PAD		84 Indeks	189.411.608,40
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.440.000,00	PAD		100 %	1.512.000,00
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedog	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.440.000,00	PAD		9 Dokumen	1.512.000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.700.000,00	PAD		100 %	1.785.000
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Gedog	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.700.000,00	PAD		4 Laporan	1.785.000
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	40.733.800,00	PAD		100 %	42.770.490
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.000.000,00	PAD		1 Paket	7.350.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Gedog	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	33.733.800,00	PAD		65 Orang	35.420.490
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	57.407.100,00	PAD		100 %	60.277.455
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.885.500,00	PAD		1 Paket	4.079.775
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.830.300,00	PAD		3 Paket	12.421.815
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7.987.900,00	PAD		6 Paket	8.387.295
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.675.000,00	PAD		4 Paket	23.808.750
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.092.600,00	PAD		1 Paket	7.447.230
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Gedog	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Gedog	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.235.800,00	PAD		1 Dokumen	1.297.590
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	37.225.008,00	PAD		100 %	39.086.258
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Gedog	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	PAD		1 Unit	15.750.000
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedog	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.225.008,00	PAD		1 Unit	23.336.258
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Gedog	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	26.277.000,00	PAD		100 %	27.590.850
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gedog	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24.477.000,00	PAD		36 Laporan	25.700.850
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gedog	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.609.100,00	PAD		100 %	16.389.555

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Gedog	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.415.600,00	PAD		7 Unit	7.786.380
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedog	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.193.500,00	PAD		5 Unit	8.603.175
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Gedog	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	63.361.400,00	PAD		100 %	66.529.470
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Gedog	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	63.361.400,00	PAD		100 %	66.529.470
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Gedog	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.400,00	PAD		1 Dokumen	1.310.820
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gedog	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	62.113.000,00	PAD		3 Laporan	65.218.650

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Gedog	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.089.757.700,00	PAD		100 % 100 %	3.244.245.585
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Gedog	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	3.016.338.000,00	PAD		100 %	3.167.154.900
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gedog	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	35.688.800,00	PAD		15 Lembaga Kemasyarakatan	37.473.240
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gedog	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	2.980.649.200,00	PAD		17 Pokmas / Ormas	3.129.681.660
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Gedog	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	73.419.700,00	PAD		100 %	77.090.685

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gedog	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	65.524.800,00	PAD		3 Lembaga Kemasyarakatan	68.801.040
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Gedog	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7.894.900,00	PAD		2 Laporan	8.289.645
8	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Gedog	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	23.763.000,00	PAD		100 %	24.951.150
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Gedog	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	23.763.000,00	PAD		100 %	24.951.150

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Gedog	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	360 Orang	23.763.000,00	PAD		360 Orang	24.951.150
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Plosokerep	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	164.129.364,00	PAD		84 Indeks	160.995.832,20
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Plosokerep	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000,00	PAD		100 %	1.497.300,00
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000,00	PAD		9 Dokumen	1.497.300
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Plosokerep	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000,00	PAD		100 %	1.762.950

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.679.000,00	PAD		4 Laporan	1.762.950
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Plosokerep	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	42.233.800,00	PAD		100 %	44.345.490
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000,00	PAD		1 Paket	6.300.000
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	36.233.800,00	PAD		40 Orang	38.045.490
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Plosokerep	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	49.075.000,00	PAD		100 %	51.528.750
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	PAD		1 Paket	4.200.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000,00	PAD		3 Paket	12.600.000
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6.512.000,00	PAD		5 Paket	6.837.600
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.875.000,00	PAD		7 Paket	15.618.750
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.488.000,00	PAD		1 Paket	8.912.400
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000,00	PAD		1 Dokumen	525.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Plosokerep	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	29.923.864,00	PAD		100 %	31.420.057
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	9.600.000,00	PAD		12 Unit	10.080.000
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.323.864,00	PAD		2 Unit	21.340.057

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Plosokerep	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	24.300.000,00	PAD		100 %	25.515.000
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.500.000,00	PAD		36 Laporan	23.625.000
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.491.700,00	PAD		100 %	16.266.285
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7.491.700,00	PAD		6 Unit	7.866.285
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	8.000.000,00	PAD		16 Unit	8.400.000
#	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Plosokerep	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	36.849.656,00	PAD		100 %	38.692.139

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Plosokerep	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	36.849.656,00	PAD		100 %	38.692.139
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.756,00	PAD		1 Dokumen	1.311.194
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	35.600.900,00	PAD		3 Laporan	37.380.945
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Plosokerep	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.481.390.366,00	PAD		100 % 100 %	1.555.459.884
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.417.699.200,00	PAD		100 %	1.488.584.160

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47 Lembaga Kemasyarakatan	22.318.300,00	PAD		47 Lembaga Kemasyarakatan	23.434.215
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47 Pokmas / Ormas	1.395.380.900,00	PAD		47 Pokmas / Ormas	1.465.149.945
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Plosokerep	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	63.691.166,00	PAD		100 %	66.875.724
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.350.650,00	PAD		7 Lembaga Kemasyarakatan	59.168.183
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7.340.516,00	PAD		2 Laporan	7.707.542
#	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Plosokerep	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	26.900.000,00	PAD		100 %	28.245.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Plosokerep	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	26.900.000,00	PAD		100 %	28.245.000
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Plosokerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	26.900.000,00	PAD		50 Orang	28.245.000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Klampok	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	148.206.100,00	PAD		84 Indeks	155.616.405
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.442.500,00	PAD		100 %	1.514.625,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Klampok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.442.500,00	PAD		9 Dokumen	1.514.625
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.750.000,00	PAD		100 %	1.837.500
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Klampok	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.750.000,00	PAD		4 Laporan	1.837.500
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	33.938.800,00	PAD		100 %	35.635.740
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000,00	PAD		1 Paket	6.300.000
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Klampok	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	27.938.800,00	PAD		60 Orang	29.335.740
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	54.131.200,00	PAD		100 %	56.837.760

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.305.900,00	PAD		1 Paket	4.521.195
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.660.500,00	PAD		3 Paket	11.193.525
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12.020.000,00	PAD		5 Paket	12.621.000
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.897.000,00	PAD		7 Paket	15.641.850
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.929.900,00	PAD		1 Paket	9.376.395
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Klampok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Klampok	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	617.900,00	PAD		12 Dokumen	648.795
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	20.315.000,00	PAD		100 %	21.330.750

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Klampok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	9.000.000,00	PAD		10 Unit	9.450.000
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Klampok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.315.000,00	PAD		1 Unit	11.880.750
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Klampok	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	20.385.600,00	PAD		100 %	21.404.880
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	18.585.600,00	PAD		24 Laporan	19.514.880
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	16.243.000,00	PAD		100 %	17.055.150
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Klampok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	8.295.500,00	PAD		7 Unit	8.710.275
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Klampok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.947.500,00	PAD		18 Unit	8.344.875

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
#	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Klampok	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	37.410.100,00	PAD		100 %	39.280.605
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Klampok	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	37.410.100,00	PAD		100 %	39.280.605
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Klampok	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.224.400,00	PAD		1 Dokumen	1.285.620
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Klampok	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	36.185.700,00	PAD		3 Laporan	37.994.985
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Klampok	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.616.361.000,00	PAD		100 % 100 %	1.697.179.050
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Klampok	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	1.544.798.000,00	PAD		100 %	1.622.037.900

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Klampok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 Lembaga Kemasyarakatan	24.498.000,00	PAD		33 Lembaga Kemasyarakatan	25.722.900
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klampok	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	1.520.300.000,00	PAD		8 Pokmas / Ormas	1.596.315.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Klampok	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	71.563.000,00	PAD		100 %	75.141.150
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Klampok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	69.418.100,00	PAD		4 Lembaga Kemasyarakatan	72.889.005
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Klampok	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2.144.900,00	PAD		2 Laporan	2.252.145
#	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Klampok	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	20.798.486,00	PAD		100 %	21.838.410

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Klampok	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	20.798.486,00	PAD		100 %	21.838.410
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Klampok	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49 Orang	20.798.486,00	PAD		49 Orang	21.838.410
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Sananwetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	168.370.056,00	PAD		84 Indeks	176.788.558,80
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000,00	PAD		100 %	1.497.300,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000,00	PAD		9 Dokumen	1.497.300
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.678.800,00	PAD		100 %	1.762.740
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.678.800,00	PAD		4 Laporan	1.762.740
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	38.877.000,00	PAD		100 %	40.820.850
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000,00	PAD		1 Paket	6.300.000
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	32.877.000,00	PAD		60 Orang	34.520.850
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	60.968.200,00	PAD		100 %	64.016.610

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.887.900,00	PAD		1 Paket	4.082.295
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000,00	PAD		3 Paket	12.600.000
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.006.900,00	PAD		3 Paket	10.507.245
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	PAD		5 Paket	26.250.000
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.755.500,00	PAD		1 Paket	7.093.275
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	617.900,00	PAD		1 Dokumen	648.795
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	19.423.100,00	PAD		100 %	20.394.255

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.803.100,00	PAD		1 Unit	6.093.255
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.620.000,00	PAD		1 Unit	14.301.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Sananwetan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	30.611.856,00	PAD		100 %	32.142.449
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	28.811.856,00	PAD		36 Laporan	30.252.449
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.385.100,00	PAD		100 %	16.154.355
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.478.600,00	PAD		7 Unit	7.852.530
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.906.500,00	PAD		17 Unit	8.301.825

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
#	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sananwetan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	87.930.000,00	PAD		100 %	92.326.500
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	87.930.000,00	PAD		100 %	92.326.500
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.246.400,00	PAD		1 Dokumen	1.308.720
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	86.683.600,00	PAD		3 Laporan	91.017.780
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sananwetan	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.676.285.944,00	PAD		100 % 100 %	3.860.100.241
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sananwetan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	3.600.280.218,00	PAD		100 %	3.780.294.229

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	46.212.000,00	PAD		11 Lembaga Kemasyarakatan	48.522.600
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	3.554.068.218,00	PAD		17 Pokmas / Ormas	3.731.771.629
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sananwetan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	76.005.726,00	PAD		100 %	79.806.012
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	68.019.000,00	PAD		7 Lembaga Kemasyarakatan	71.419.950
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	7.986.726,00	PAD		2 Laporan	8.386.062
#	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	25.312.000,00	PAD		100 %	26.577.600

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Sananwetan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	25.312.000,00	PAD		100 %	26.577.600
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Sananwetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	360 Orang	25.312.000,00	PAD		360 Orang	26.577.600
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Rembang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	167.899.486,00	PAD		84 Indeks	176.294.460,30
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000,00	PAD		100 %	1.497.300,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000,00	PAD		9 Dokumen	1.497.300
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000,00	PAD		100 %	1.762.950
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.679.000,00	PAD		4 Laporan	1.762.950
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	39.877.800,00	PAD		100 %	41.871.690
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000,00	PAD		1 Paket	5.775.000
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Rembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	34.377.800,00	PAD		65 Orang	36.096.690
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	57.830.700,00	PAD		100 %	60.722.235

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.991.800,00	PAD		1 Paket	4.191.390
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.466.100,00	PAD		3 Paket	16.239.405
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.510.400,00	PAD		4 Paket	6.835.920
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	20.006.000,00	PAD		7 Paket	21.006.300
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.656.400,00	PAD		1 Paket	9.089.220
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000,00	PAD		1 Dokumen	525.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	28.068.686,00	PAD		100 %	29.472.120

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Rembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.390.454,00	PAD		2 Unit	9.859.977
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.678.232,00	PAD		2 Unit	19.612.144
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Rembang	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	23.700.000,00	PAD		100 %	24.885.000
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	21.900.000,00	PAD		36 Laporan	22.995.000
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.317.300,00	PAD		100 %	16.083.165
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Rembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7.484.300,00	PAD		7 Unit	7.858.515
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7.833.000,00	PAD		17 Unit	8.224.650

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
#	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Rembang	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	28.696.500,00	PAD		100 %	30.131.325
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Rembang	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	28.696.500,00	PAD		100 %	30.131.325
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.400,00	PAD		1 Dokumen	1.310.820
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rembang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	27.448.100,00	PAD		3 Laporan	28.820.505
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Rembang	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	959.011.000,00	PAD		100 % 100 %	1.006.961.550
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Rembang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	895.660.700,00	PAD		100 %	940.443.735

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 Lembaga Kemasyarakatan	15.026.300,00	PAD		31 Lembaga Kemasyarakatan	15.777.615
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	880.634.400,00	PAD		31 Pokmas / Ormas	924.666.120
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Rembang	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	63.350.300,00	PAD		100 %	66.517.815
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Rembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	53.412.400,00	PAD		8 Lembaga Kemasyarakatan	56.083.020
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Rembang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	9.937.900,00	PAD		2 Laporan	10.434.795
#	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Rembang	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	21.537.500,00	PAD		100 %	22.614.375

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Rembang	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	21.537.500,00	PAD		100 %	22.614.375
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Rembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	21.537.500,00	PAD		60 Orang	22.614.375
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Karang Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	162.787.086,00	PAD		84 Indeks	118.128.240,30
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.426.000,00	PAD		100 %	1.497.300,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.426.000,00	PAD		9 Dokumen	1.497.300
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.679.000,00	PAD		100 %	1.762.950
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.679.000,00	PAD		4 Laporan	1.762.950
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	41.788.900,00	PAD		100 %	43.878.345
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.500.000,00	PAD		1 Paket	6.825.000
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122 Orang	35.288.900,00	PAD		122 Orang	37.053.345
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	50.284.000,00	PAD		100 %	52.798.200

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.992.000,00	PAD		1 Paket	4.191.600
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000,00	PAD		3 Paket	12.600.000
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	8.022.000,00	PAD		5 Paket	8.423.100
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000,00	PAD		10 Paket	15.750.000
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.070.000,00	PAD		1 Paket	8.473.500
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000,00	PAD		1 Dokumen	525.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	26.551.700,00	PAD		100 %	27.879.285

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.483.200,00	PAD		4 Unit	11.007.360
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.068.500,00	PAD		2 Unit	16.871.925
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Karang Tengah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	25.274.586,00	PAD		100 %	26.538.315
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	23.474.586,00	PAD		36 Laporan	24.648.315
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.782.900,00	PAD		100 %	16.572.045
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.750.400,00	PAD		8 Unit	8.137.920

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.032.500,00	PAD		14 Unit	8.434.125
#	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Karang Tengah	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	38.940.700,00	PAD		100 %	40.887.735
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Karang Tengah	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	38.940.700,00	PAD		100 %	40.887.735
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.248.700,00	PAD		1 Dokumen	1.311.135
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	37.692.000,00	PAD		3 Laporan	39.576.600
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Karang Tengah	Presentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	2.147.447.100,00	PAD		100 % 100 %	2.254.819.455
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Karang Tengah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai	100 %	2.078.087.300,00	PAD		100 %	2.181.991.665

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								standart						
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 Lembaga Kemasyarakatan	29.306.300,00	PAD		45 Lembaga Kemasyarakatan	30.771.615
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	2.048.781.000,00	PAD		10 Pokmas / Ormas	2.151.220.050
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Karang Tengah	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	69.359.800,00	PAD		100 %	72.827.790
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	64.924.400,00	PAD		8 Lembaga Kemasyarakatan	68.170.620
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4.435.400,00	PAD		2 Laporan	4.657.170

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
#	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Karang Tengah	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	24.565.000,00	PAD		100 %	25.793.250
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Karang Tengah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	24.565.000,00	PAD		100 %	25.793.250
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Karang Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	86 Orang	24.565.000,00	PAD		86 Orang	25.793.250
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Bendogerit	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	161.278.335,00	PAD		84 Indeks	193.620.561,75

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.442.800,00	PAD		100 %	25.793.250,00
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.442.800,00	PAD		9 Dokumen	1.514.940
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.700.000,00	PAD		100 %	1.785.000
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.700.000,00	PAD		4 Laporan	1.785.000
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	39.375.200,00	PAD		100 %	41.343.960
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000,00	PAD		1 Paket	6.300.000
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	33.375.200,00	PAD		36 Orang	35.043.960

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	50.534.099,00	PAD		100 %	53.060.804
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.990.100,00	PAD		1 Paket	4.189.605
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.999.999,00	PAD		3 Paket	12.599.999
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	9.083.300,00	PAD		5 Paket	9.537.465
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.050.000,00	PAD		7 Paket	15.802.500
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.092.800,00	PAD		1 Paket	7.447.440
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	PAD		12 Dokumen	2.835.000
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	617.900,00	PAD		1 Dokumen	648.795

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	40.296.900,00	PAD		100 %	42.311.745
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	17.794.000,00	PAD		20 Unit	18.683.700
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22.502.900,00	PAD		3 Unit	23.628.045
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Bendogerit	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	12.451.636,00	PAD		100 %	13.074.218
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	10.651.636,00	PAD		24 Laporan	11.184.218
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	PAD		12 Laporan	1.890.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	15.477.700,00	PAD		100 %	16.251.585
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7 Unit	7.479.700,00	PAD		7 Unit	7.853.685

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Lapangan		Perizinannya						
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	7.998.000,00	PAD		21 Unit	8.397.900
#	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bendogerit	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	70.845.600,00	PAD		100 %	74.387.880
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kelurahan Bendogerit	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	70.845.600,00	PAD		100 %	74.387.880
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.274.400,00	PAD		1 Dokumen	1.338.120
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	69.571.200,00	PAD		2 Laporan	73.049.760

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bendogerit	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Presentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.771.381.164,00	PAD		100 % 100 %	2.909.950.222
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	2.705.192.064,00	PAD		100 %	2.840.451.667
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	34.864.600,00	PAD		8 Lembaga Kemasyarakatan	36.607.830
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.670.327.464,00	PAD		8 Pokmas / Ormas	2.803.843.837
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Bendogerit	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	66.189.100,00	PAD		100 %	69.498.555

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	63.724.200,00	PAD		8 Lembaga Kemasyarakatan	66.910.410
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.464.900,00	PAD		1 Laporan	2.588.145
#	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Bendogerit	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	24.305.000,00	PAD		100 %	25.520.250
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Bendogerit	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	24.305.000,00	PAD		100 %	25.520.250

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Bendogerit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	328 Orang	24.305.000,00	PAD		328 Orang	25.520.250

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025 sebagai pelaksanaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai hal yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Perubagan Kecamatan Sananwetan Tahun 2016 – 2021 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 mengacu pada RKPD Tahun 2025

b. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, dan seluruh staf Kecamatan sananwetan secara bersama – sama mempunyai tanggungjawab untuk :

    1. Melaksanakan Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 dengan sebaik – baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

    2. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2025.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

29. RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Lebih lanjut dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan, yaitu a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rencana awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Sukorejo tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Kecamatan Sukorejo dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Sukorejo;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026; dan
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
24. Peraturan Walikota Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUKOREJO TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sukorejo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukorejo

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukorejo

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOREJO

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN SUKOREJO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sukorejo

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sukorejo berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Kecamatan Sukorejo tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Kecamatan tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Sukorejo.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada tahun 2023, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Sukorejo pada awal tahun 2023 sebesar Rp. 411.052.610,00 dan pada Perubahan APBD tahun 2023 terdapat penambahan Bengkok yang dikelola oleh Kecamatan Sukorejo sehingga pendapatan yang dikelola Kecamatan Sukorejo menjadi sebesar Rp.507.258.680,00. PAD ini diperoleh dari berupa sewa tanah aset pemerintah (eks bengkok), serta sewa Agro Belimbing. Anggaran Belanja Kecamatan Sukorejo pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 28.015.247.225 dan pada perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 27.840.786.694 dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 99,13 **%** atau sebesar Rp. 27.598.458.512,82 . Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja operasi dan belanja` modal. Belanja Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 22.778.722.855 (sebelum perubahan) dan Rp. 22.084.478.241 (setelah perubahan). Belanja Modal Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2023 sebesar Rp. 5.236.524.370 (sebelum perubahan) dan Rp. 5.756.308.453 (setelah perubahan). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Belanja Operasi Kecamatan Sukorejo Tahun 2023 tidak maksimal antara lain:

1. Terdapat ASN yang purna tugas ditahun berjalan.
2. Anak ASN yang tidak terpenuhi syaratnya untuk diberikan tunjangan karena faktor usia dan atau pendidikan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN disesuaikan dengan besar kecilnya kinerja ASN yang bersangkutan.

Program Kecamatan Sukorejo yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) terdapat pemutakhiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Adapun Program yang ada ditahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berikut adalah Hasil Evaluasi Capaian Renja Tahun lalu (2023) dan Capaian Renstra Kecamatan Sukorejo yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kota Blitar

(Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024)

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program/Kegiatan Renstra PD tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10=(8/9)	11	12= (7+9+11)	13= (12/6)
KECAMATAN SUKOREJO																
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	89	BAIK	90,26	89	90,26	101,42	89,10	89,10	100,00
		7	01	01	2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu sesuai standart	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	01	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan (Bulanan/Semesteran) yang tersusun tepat waktu	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program/Kegiatan Renstra PD tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
											Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10=(8/9)	11	12= (7+9+11)	13= (12/6)
		7	0 1	0 1	2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	0 1	0 1	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	0 1	0 1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	0 1	0 1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercukupi	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	0 1	0 1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu	97	%	100%	97%	100%	103%	97%	100%	100%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program/Kegiatan Renstra PD tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10=(8/9)	11	12= (7+9+11)	13= (12/6)
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase koodinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase RT Berdaya	75	%	100%	75%	100%	133%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program/Kegiatan Renstra PD tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10=(8/9)	11	12= (7+9+11)	13= (12/6)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan bidang umumpemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Sukorejo, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh perkiraan realisasi capaian target Renstra Kecamatan Sukorejo sampai dengan tahun 2023 tercapai 100% :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   Faktor – faktor kendala tidak tercapainya target pada program ini salah satunya adalah karena Fasilitasi Nikah gratis bagi masyarakat sangat terpengaruh pada jumlah pasangan menikah di tahun yang berkenaan. Kondisi "new normal" pasca pandemi di tahun 2023 juga salah satu penyebab menurunnya pasangan yang melangsungkan pernikahan. Meskipun ada beberapa Kelurahan yang tidak sesuai target tersebut, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi. Karena pemohon fasilitasi nikah gratis masyarakat terfasilitasi semuanya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   Faktor – faktor pendukung tercapainya target pada Program tersebut adalah kebijakan dalam pencairan RT Keren lebih mudah dan transparan serta didukung kemampuan Pendamping RT Keren dalam memahami pencairan dana, sehingga Pencairan dana tersebut tidak tertunda dalam waktu lama.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
   Faktor pendukung keberhasilan capaian Program ini adalah dengan melengkapi semua dokumen-dokumen SAKIP dengan tepat waktu dan target di semua program dan Kegiatan terealisasi sesuai dengan jadwal. Hal tersebut akan mendukung tercapainya target tersusunnya dokumen SAKIP Perangkat Daerah tepat waktu dan mendapatkan nilai A.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   Faktor pendorong keberhasilan Program ini adalah sinergitas yang baik dengan seluruh lini termasuk koordinasi dengan jajaran samping (TNI, POLRI, KUA maupun instansi lainnya) dengan komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut akan mendukung tercapainya sasaran meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Analisis kinerja diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kinerja ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi yang diambil sehingga diketahui capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kami tampilkan tabel tentang pencapaian kinerja Kecamatan Sukorejo berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo

Kota Blitar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024*	2025	
1	2	3	4	6	7	8	3	13	13	19	20	21
I	Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,10)	Baik (89,15)	Baik (89,11)	Baik (90,26)	Baik (89,10)	Baik (89,15)	Target Kinerja pada tahun 2023 telah tercapai dan terealisasi melampaui target
2	Persentase Pelayanan yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan			97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Kelurahan Berdaya			75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo)			A (84,76)	A (84,76)	A (84,80)	A (84,85)	A (85,00)	A (85,16)	A (84,80)	A (84,85)	

*Indikator dalam proses pelaksanaan

Selama Tahun 2023 masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 979 orang. Dari data tersebut semua masyarakat pemohon layanan merasa puas, yaitu sebanyak 979 orang. Dalam Persentase, kualitas pelayanan administrasi kecamatan Sukorejo bernilai 100% yang berarti bahwa kinerja unit pelayanan sangat baik. Apabila kita bandingkan dengan data di Tahun 2022, maka di Tahun 2023 jumlah masyarakat yang melakukan permohonan layanan menurun dibanding Tahun 2022. Dari data seksi pelayanan menunjukkan bahwa di Tahun 2022` terdapat 2.742 orang yang melakukan permohonan layanan di Kecamatan Sukorejo. Salah satu penyebab adanya penurunan jumlah angka masyarakat yang meminta pelayanan di Kecamatan Sukorejo karena beberapa layanan cukup melalui Whatsapp atau cukup hanya di Kelurahan saja dengan aplikasi Silpusitron ataupun dapat langsung ke Dinas Catatan Sipil melalui aplikasi SIPAK. Dengan penerapan SOP Baru pasca Pandemi Covid-19 dan kemudahaan akses layanan melalui aplikasi Whatsapp maupun aplikasi lainnya memudahkan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, SOP disetiap layanan, mulai kepastian persyaratan, kepastian waktu selesainya, kepastian produk layanan dapat diukur dan diketahui oleh penerima layanan juga menjadi indikator kepuasan masyarakat.

Faktor pendukung tercapainya Kinerja Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi semua. Seperti halnya SOP, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2023, Kecamatan Sukorejo memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram,* dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo.
2. Hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan (TNI dan POLRI) dapat terjalin dengan baik. Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan kecamatan, FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan.

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukorejo

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, maka dapat menemukan permasalahan utama sebagai bahan untuk menyusun tujuan, sasaran, program dan kegiatan pemerintah beserta OPD yang melaksanakan.

Begitu sentralnya penentuan masalah dalam suatu proses perencanaan pembangunan, maka dalam penentuan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sukorejo perlu adanya penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal

maupun internal di Kecamatan Sukorejo. Melalui tahapan ini diharapkan dapat memberi prediksi berbagai peluang ataupun prediksi ancaman bagi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukorejo. Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan tepat sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Sukorejo dalam kurun waktu 2025. Isu-isu strategis atau isu-isu penting merupakan kesatuan permasalahan maupun peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat dan peluang yang harus dimanfaatkan sebagai akselerator percepatan pencapaian pembangunan.

Isu-isu strategis Kota Blitar tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan insfrastruktur yang sesuai dengan tata ruang yang berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kelayakhunian
4. Zero kemiskinan ekstrim
5. Percepatan penurunan stunting
6. Penanganan kemiskinan dan Pengangguran
7. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Investasi
8. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
9. Penguatan tata kelola pemerintah berbasis digital
10. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada
11. Memantapkan penerapan *good governance*
12. Memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informatika dan *e government*
13. Memantapkan nilai-nilai sosio religious dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan

Selain arah kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka faktor penentu yang tidak kalah penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukorejo yaitu dengan mengukur capaian kinerja Kecamatan Sukorejo tahun sebelumnya. Melalui capaian kinerja ini maka dapat diukur keberhasilan dan kegagalan target yang telah ditentukan dan perlu diperbaiki di Tahun 2025. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukorejo tahun sebelumnya (2023) sebagaimana tertulis dalam tabel 2.2 diatas yang dapat kita Analisa sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pertama Kecamatan Sukorejo yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Bila kita perhatikan data pada tabel 2.2, maka target yang ditentukan dapat terpenuhi bahkan melampaui target yang artinya masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Sukorejo sangat puas terhadap layanan karyawan karyawatinya. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dimana dalam ketentuan itu terdapat 9 indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat.
2. Indikator kinerja kedua yaitu Persentase Pelayanan yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan telah tercapai 100% melebihi yang telah ditargetkan pada tahun 2023. Berarti menunjukkan bahwa

Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan.

3. Indikator kinerja ketiga yaitu persentase Kelurahan berdaya, yang memenuhi target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah berdaya dan koordinasi dengan berbagai sektor yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo dapat berjalan dengan lancar melalui forum-forum yang dibentuk seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forkopimcam serta forum-forum yang dibentuk dengan melibatkan masyarakat seperti karang taruna, karangwerdha, forum bank sampah dan KWT, kecamatan sehat dan masih banyak lainnya. Forum-forum ini memperlancar komunikasi dan menyampaikan arah kebijakan pemerintah ke masyarakat maupun jajaran samping, namun sampai saat ini belum ada forum yang melibatkan lintas OPD dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayah yang bertujuan untuk antisipasi jangan sampai suatu masalah akan muncul maupun memunculkan kebijakan pemerintah.
4. Indikator kinerja keempat, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo), dimana pada tahun 2023 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah 85,00 yang berarti telah melampaui target ditahun 2023 yaitu di angka 84,76.

Apabila kita perhatikan uraian diatas, maka Kecamatan Sukorejo mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 angka 11, 12 dan 13 yaitu memantapkan penerapan *good governance*, memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informatika dan *e government* dan memantapkan nilai-nilai sosio religious dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan, namun dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan ini terdapat Isu-isu penting yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo, antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Sukorejo, baik yang ada di Kecamatan maupun di Kelurahan. Hal ini dikarenakan ruangan untuk pelayanan di Kecamatan masih belum memadai dikarenakan perlunya pengembangan kantor agar memaksimalkan sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat sedangkan yang di kelurahan terdapat beberapa lokasi kelurahan yang tidak memadai sehingga diperlukan relokasi agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan;
2. Belum optimalnya kualitas kinerja SDM perangkat daerah yang ada di Kecamatan maupun di kelurahan, sehingga perlu ditingkatkan secara periodik melalui kegiatan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas/kualitas SDM di Kecamatan Sukorejo;
3. Belum optimalnya koordinasi pembangunan kewilayahannya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya forum lintas OPD beserta warga yang membahas secara rutin permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah setiap 3 atau 6 bulan sekali. Hal ini penting dilakukan sebagai wadah penyampaian informasi, kontrol pelaksanaan musrenbang tahun sebelumnya, pemecahan masalah di masyarakat dan yang paling utama yaitu antisipasi munculnya suatu masalah di masyarakat. Selain itu, belum adanya system yang terhubung sampai tingkat RT ataupun jajaran samping

maupun OPD lainnya. Bila ini terwujud maka tata kelola manajeman pemerintahan modern dapat terwujud.

Untuk meminimalisir isu-isu penting/hambatan tersebut, maka harus dioptimalkan tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Sukorejo guna mendukung perwujudan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025. Adapun tantangan dan peluang yang harus dimaksimalkan oleh Kecamatan Sukorejo di Tahun 2025 untuk meminimalisir isu-isu penting/hambatan, yaitu :

1. Masyarakat membutuhkan layanan yang nyaman, transparan, dan cepat.
2. Masyarakat semakin kritis dan aktif dalam mengawasi pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan harus disertai dengan perencanaan yang matang;
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan media elektronik, sehingga informasi dapat menyebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak kalangan.
4. Kejadian kriminal dan gangguan kamtibmas semakin bervariasi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan lingkungan.
5. Adanya lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk kerjasama dengan Kecamatan Sukorejo dalam menyusun aplikasi pelayanan ataupun tata kelola pemerintahan modern.

Berdasarkan uraian permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan diatas maka dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo 2025 sebagai berikut :

1. Penyusunan kegiatan Kecamatan Sukorejo 2025 sesuai dengan indikator kinerja, maka difokuskan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan sarana prasarana (pengadaan modal ataupun pemeliharaan) dan peningkatan kualitas SDM
2. Peningkatan kegiatan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam membantu serat mensukseskan pencapaian arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 serta mulai menyusun kegiatan yang sifatnya lintas OPD dengan membahas permasalahan yang ada
3. Kegiatan pendukung (kesekretariatan) diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Kecamatan Sukorejo beserta kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah se- Kota Blitar yang pelaksanaan Program dan kegiatannya berlokasi di wilayah Kecamatan Sukorejo.

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kami sajikan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Sukorejo

Nama PD : KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Kecamatan Sukorejo				17.213.470.368	Kecamatan Sukorejo				17.213.470.368		
	UNSUR KEWILAYAHAN				17.213.470.368	UNSUR KEWILAYAHAN				17.213.470.368		
	KECAMATAN				17.213.470.368	KECAMATAN				17.213.470.368		
197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 Indeks	14.017.316.693	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 Indeks	14.017.316.693		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	6.235.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	6.235.900		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.741.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.741.000	KECAMATAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
							Kel/Desa					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2.494.900		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2.494.900	KECAMATAN SUKOREJO	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	9.802.139.287	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	10.582.139.287		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	9.800.532.087		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10.580.532.087	KECAMATAN SUKOREJO	Penambahan kenaikan Gaji
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	1.607.200		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	1.607.200	KECAMATAN SUKOREJO	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	327.661.254	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	327.661.254		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	46.668.459		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	46.668.459	KECAMATAN SUKOREJO	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	280.992.795		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	280.992.795	KECAMATAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	307.352.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	307.352.200		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.963.200		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.963.200	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50.637.800		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50.637.800	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	25.650.500		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	25.650.500	KECAMATAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.915.500		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.915.500	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.636.700		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.636.700	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.024.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.024.000	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.924.500		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.924.500	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penatausahaan Arsip Dinamis					Penatausahaan Arsip Dinamis						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	pada SKPD					pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.600.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.600.000	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	85.172.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	85.172.100		
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	37.041.700		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	37.041.700	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	48.130.400		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	48.130.400	KECAMATAN SUKOREJO	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	1.178.153.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	1.178.153.152		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60 Laporan	45.952.752		Kota Blitar,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60 Laporan	45.952.752	KECAMATAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Semua Kel/Desa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Sukorejo, Semua Kel/Desa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.132.200.400		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.132.200.400	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	1.530.602.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	1.530.602.800		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	90.780.300		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	90.780.300	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	22.947.500		Kota Blitar,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	22.947.500	KECAMATAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Semua Kel/Desa	yang Dipelihara				Sukorejo, Semua Kel/Desa	yang Dipelihara			SUKOREJO	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.143.960.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.143.960.000	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	262.915.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	262.915.000	KECAMATAN SUKOREJO	
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase pelayanan kecamatan tepat	100 %	399.090.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase pelayanan kecamatan tepat	100 %	399.090.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		waktu			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		waktu				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	399.090.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	399.090.000		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	6.176.400		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	6.176.400	KECAMATAN SUKOREJO	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	392.913.600		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	392.913.600	KECAMATAN SUKOREJO	
199	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.626.983.275	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.626.983.275		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	2.315.413.075	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	2.315.413.075		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	62.102.075		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	62.102.075	KECAMATAN SUKOREJO	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	2.253.311.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	2.253.311.000	KECAMATAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	311.570.200	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	311.570.200		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	272.271.000		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	272.271.000	KECAMATAN SUKOREJO	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	39.299.200		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	39.299.200	KECAMATAN SUKOREJO	
200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	170.080.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	170.080.400		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	170.080.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	170.080.400		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	755 Orang	170.080.400		Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	755 Orang	170.080.400	KECAMATAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Kelurahan Pakunden				2.358.050.828	Kelurahan Pakunden				2.358.050.828		
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.358.050.828	UNSUR KEWILAYAHAN				2.358.050.828		
	KECAMATAN				2.358.050.828	KECAMATAN				2.358.050.828		
201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	170.970.028	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	170.970.028		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.130.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.130.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	520.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	520.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Kinerja SKPD					Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	610.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	610.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	684.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	684.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	684.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	684.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi	100 %	31.200.000	Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi	100 %	31.200.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Perangkat Daerah		kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar			Perangkat Daerah		kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	7.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	7.000.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	24.200.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	24.200.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	40.232.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	40.232.600		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	5.087.000		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.087.000	KELURAHAN PAKUNDEN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			n Bangunan Kantor yang Disediakan				Pakunden	yang Disediakan				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.576.800		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.576.800	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.579.400		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.579.400	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.000.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.148.400		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.148.400	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.840.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.840.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.001.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.001.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	28.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	28.600.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.600.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.600.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	29.758.128	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	29.758.128		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	36 Laporan	29.758.128		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	36 Laporan	29.758.128	KELURAHAN PAKUNDEN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Pakunden	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Pakunden	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	39.365.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	39.365.300		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6.072.300		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6.072.300	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.745.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.745.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	27.548.000		Kota Blitar,	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	27.548.000	KELURAHAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Pakunden	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Sukorejo, Pakunden	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			PAKUNDEN	
202	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	48.797.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	48.797.200		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	48.797.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	48.797.200		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	797.200		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	797.200	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Laporan Fasilitasi	2 Laporan	48.000.000		Kota Blitar,	Jumlah Laporan Fasilitasi	2 Laporan	48.000.000	KELURAHAN PAKUNDEN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Pakunden	Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				Sukorejo, Pakunden	Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
203	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.131.533.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	2.131.533.600		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	2.027.342.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	2.027.342.200		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	19.756.200		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	19.756.200	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Pemberdayaan Masyarakat di					Pemberdayaan Masyarakat di						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Kelurahan					Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.007.586.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.007.586.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	104.191.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	104.191.400		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	91.113.400		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	91.113.400	KELURAHAN PAKUNDEN	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	13.078.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	13.078.000	KELURAHAN PAKUNDEN	
204	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	6.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	6.750.000		
	Penyelenggaraan Urusan		Persentase koordinasi	100 %	6.750.000	Penyelenggaraan Urusan		Persentase koordinasi	100 %	6.750.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart			Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	150 Orang	6.750.000		Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	150 Orang	6.750.000	KELURAHAN PAKUNDEN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Kelurahan Blitar				1.299.721.109	Kelurahan Blitar				1.299.721.109		
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.299.721.109	UNSUR KEWILAYAHAN				1.299.721.109		
	KECAMATAN				1.299.721.109	KECAMATAN				1.299.721.109		
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	108.981.493	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	108.981.493		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.041.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.041.600		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Dokumen Perencanaan	10	1.020.800		Kota Blitar,	Jumlah Dokumen Perencanaan	10	1.020.800	KELURAHAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Blitar	Perangkat Daerah	Dokumen			Sukorejo, Blitar	Perangkat Daerah	Dokumen		BLITAR	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	1.020.800		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	1.020.800	KELURAHAN BLITAR	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	845.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	845.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	845.800		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	845.800	KELURAHAN BLITAR	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	36.018.300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	36.018.300		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	7.200.000		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	7.200.000	KELURAHAN BLITAR	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	28.818.300		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	28.818.300	KELURAHAN BLITAR	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	30.250.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	30.250.300		
	Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.951.000		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.951.000	KELURAHAN BLITAR	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.062.500		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.062.500	KELURAHAN BLITAR	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.800.400		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.800.400	KELURAHAN BLITAR	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.395.000		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.395.000	KELURAHAN BLITAR	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	5.856.600		Kota Blitar,	Jumlah Paket Barang Cetakan	1 Paket	5.856.600	KELURAHAN BLITAR	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Blitar	dan Penggandaan yang Disediakan				Sukorejo, Blitar	dan Penggandaan yang Disediakan				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	KELURAHAN BLITAR	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.484.800		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.484.800	KELURAHAN BLITAR	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	21.370.493	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	21.370.493		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	21.370.493		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	21.370.493	KELURAHAN BLITAR	
	Pemeliharaan Barang Milik		Persentase BMD yang terpelihara	100 %	18.455.000	Pemeliharaan Barang Milik		Persentase BMD yang terpelihara	100 %	18.455.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		sesuai standart			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		sesuai standart				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	7.240.000		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	7.240.000	KELURAHAN BLITAR	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.215.000		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.215.000	KELURAHAN BLITAR	
206	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	22.554.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	22.554.100		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	22.554.100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	22.554.100		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.082.400		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.082.400	KELURAHAN BLITAR	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	21.471.700		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	21.471.700	KELURAHAN BLITAR	
207	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.153.034.016	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	1.153.034.016		
	Kegiatan Pemberdayaan		Persentase koordinasi bidang	100 %	996.506.416	Kegiatan Pemberdayaan		Persentase koordinasi bidang	100 %	996.506.416		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Kelurahan		pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar			Kelurahan		pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	17.758.800		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	17.758.800	KELURAHAN BLITAR	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	978.747.616		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	978.747.616	KELURAHAN BLITAR	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	156.527.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	156.527.600		
	Peningkatan Kapasitas					Peningkatan Kapasitas						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Lembaga Kemasyarakatan					Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	148.358.800		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	148.358.800	KELURAHAN BLITAR	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	8.168.800		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	8.168.800	KELURAHAN BLITAR	
208	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	15.151.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	15.151.500		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	15.151.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	15.151.500		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	15.151.500		Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	15.151.500	KELURAHAN BLITAR	
	Kelurahan Tlumpu				1.251.386.467	Kelurahan Tlumpu				1.251.386.467		
	UNSUR				1.251.386.46	UNSUR				1.251.386.467		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	KEWILAYAHAN				7	KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN				1.251.386.467	KECAMATAN				1.251.386.467		
209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	159.648.501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	159.648.501		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.175.986	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.175.986		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	643.078		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	643.078	KELURAHAN TLUMPU	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	9 Laporan	532.908		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	9 Laporan	532.908	KELURAHAN TLUMPU	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	782.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	782.500		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	4 Laporan	782.500		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	782.500	KELURAHAN TLUMPU	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	70.432.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	70.432.200		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.378.600		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.378.600	KELURAHAN TLUMPU	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	61.053.600		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	61.053.600	KELURAHAN TLUMPU	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	52.926.415	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	52.926.415		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.668.600		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.668.600	KELURAHAN TLUMPU	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.101.500		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.101.500	KELURAHAN TLUMPU	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.055.200		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.055.200	KELURAHAN TLUMPU	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.500.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.500.000	KELURAHAN TLUMPU	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.901.115		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.901.115	KELURAHAN TLUMPU	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TLUMPU	
	Penatausahaan					Penatausahaan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Arsip Dinamis pada SKPD					Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	KELURAHAN TLUMPU	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	16.436.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	16.436.400		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	16.436.400		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	16.436.400	KELURAHAN TLUMPU	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	17.895.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	17.895.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	1.800.000		Kota Blitar,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	1.800.000	KELURAHAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Tlumpu	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Sukorejo, Tlumpu	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			TLUMPU	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	16.095.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	16.095.000	KELURAHAN TLUMPU	
210	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	19.319.704	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	19.319.704		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	19.319.704	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	19.319.704		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	919.704		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	919.704	KELURAHAN TLUMPU	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	18.400.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	18.400.000	KELURAHAN TLUMPU	
211	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	1.061.618.262	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	1.061.618.262		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	999.261.428	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	999.261.428		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyara	18.569.428		Kota Blitar,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyara	18.569.428	KELURAHAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Tlumpu	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	katan			Sukorejo, Tlumpu	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	katan		TLUMPU	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	980.692.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	980.692.000	KELURAHAN TLUMPU	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	62.356.834	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	62.356.834		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyara katan	56.751.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyara katan	56.751.000	KELURAHAN TLUMPU	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	2 Laporan	5.605.834		Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	2 Laporan	5.605.834	KELURAHAN TLUMPU	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Masyarakat					Masyarakat				
212	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	10.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	10.800.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	10.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	10.800.000		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Orang yang Mengikuti	200 Orang	10.800.000		Kota Blitar,	Jumlah Orang yang Mengikuti	200 Orang	10.800.000	KELURAHAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Tlumpu	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Sukorejo, Tlumpu	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			TLUMPU	
	Kelurahan Turi				1.070.852.030	Kelurahan Turi				1.070.852.030		
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.070.852.030	UNSUR KEWILAYAHAN				1.070.852.030		
	KECAMATAN				1.070.852.030	KECAMATAN				1.070.852.030		
213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	104.759.230	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	104.759.230		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	2.870.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	2.870.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Daerah		tepat waktu dan sesuai standar			Daerah		tepat waktu dan sesuai standar				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.230.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.230.000	KELURAHAN TURI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	1.640.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	1.640.000	KELURAHAN TURI	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.640.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.640.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Semesteran SKPD					Semesteran SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.640.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.640.000	KELURAHAN TURI	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	39.035.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	39.035.600		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.200.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.200.000	KELURAHAN TURI	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	31.835.600		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	31.835.600	KELURAHAN TURI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	27.309.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	27.309.700		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	579.700		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	579.700	KELURAHAN TURI	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.255.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.255.000	KELURAHAN TURI	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2.791.800		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2.791.800	KELURAHAN TURI	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.635.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.635.000	KELURAHAN TURI	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.904.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.904.000	KELURAHAN TURI	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000	KELURAHAN TURI	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.444.200		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.444.200	KELURAHAN TURI	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000	KELURAHAN TURI	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	23.443.930	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	23.443.930		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	23.443.930		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	23.443.930	KELURAHAN TURI	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	7.460.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	7.460.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	6 Unit	1.800.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	6 Unit	1.800.000	KELURAHAN TURI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	5.660.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	5.660.000	KELURAHAN TURI	
214	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	33.520.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	33.520.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	33.520.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	33.520.000		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	920.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	920.000	KELURAHAN TURI	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian					Fasilitasi Percepatan Pencapaian						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	32.600.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	32.600.000	KELURAHAN TURI	
215	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	912.567.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	912.567.800		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	809.166.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	809.166.000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.397.800		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.397.800	KELURAHAN TURI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	792.768.200		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	792.768.200	KELURAHAN TURI	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	103.401.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	103.401.800		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	97.452.800		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	97.452.800	KELURAHAN TURI	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	5.949.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	5.949.000	KELURAHAN TURI	
216	PROGRAM PENYELENGGARA		Persentase koordinasi	100 %	20.005.000	PROGRAM PENYELENGGARA		Persentase koordinasi	100 %	20.005.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	20.005.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	20.005.000		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	208 Orang	20.005.000		Kota Blitar, Sukorejo, Turi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	208 Orang	20.005.000	KELURAHAN TURI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Kelurahan Karangsari				1.470.507.654	Kelurahan Karangsari				1.470.507.654		
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.470.507.654	UNSUR KEWILAYAHAN				1.470.507.654		
	KECAMATAN				1.470.507.654	KECAMATAN				1.470.507.654		
217	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	153.905.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 INDEKS	153.905.800		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.936.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.936.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.443.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.443.000	KELURAHAN KARANGSARI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	1.493.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	1.493.000	KELURAHAN KARANGSARI	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.344.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.344.400		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.344.400		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.344.400	KELURAHAN KARANGSARI	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	45.655.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	45.655.400		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.038.800		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.038.800	KELURAHAN KARANGSARI	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37.616.600		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37.616.600	KELURAHAN KARANGSARI	
	Administrasi		Persentase	100 %	71.256.000	Administrasi		Persentase	100 %	71.256.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Umum Perangkat Daerah		ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar			Umum Perangkat Daerah		ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.395.200		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.395.200	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.898.700		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.898.700	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.075.400		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.075.400	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	36.300.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	36.300.000	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.696.500		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.696.500	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.900.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.900.000	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	990.200		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	990.200	KELURAHAN KARANGSARI	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	14.603.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	14.603.200		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14.603.200		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14.603.200	KELURAHAN KARANGSARI	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	18.110.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	18.110.800		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.896.800		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.896.800	KELURAHAN KARANGSARI	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.214.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.214.000	KELURAHAN KARANGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
							i					
218	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	29.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	29.050.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	29.050.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	29.050.000		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.050.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.050.000	KELURAHAN KARANGSARI	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	2 Laporan	28.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	2 Laporan	28.000.000	KELURAHAN KARANGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Minimal di Wilayah Kecamatan					Minimal di Wilayah Kecamatan				
219	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	1.275.101.854	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	1.275.101.854		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	1.167.012.954	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	1.167.012.954		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	20.796.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	20.796.000	KELURAHAN KARANGSARI	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	6 Pokmas / Ormas	1.146.216.954		Kota Blitar,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	6 Pokmas / Ormas	1.146.216.954	KELURAHAN KARANGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Karangsari	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Sukorejo, Karangsari	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	108.088.900	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	108.088.900		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	99.244.300		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	99.244.300	KELURAHAN KARANGSARI	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	8.844.600		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	8.844.600	KELURAHAN KARANGSARI	
220	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	12.450.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	12.450.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,	100 %	12.450.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,	100 %	12.450.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Daerah		ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart			Daerah		ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	395 Orang	12.450.000		Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	395 Orang	12.450.000	KELURAHAN KARANGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Kelurahan Sukorejo				3.427.624.297	Kelurahan Sukorejo				3.427.624.297		
	UNSUR KEWILAYAHAN				3.427.624.297	UNSUR KEWILAYAHAN				3.427.624.297		
	KECAMATAN				3.427.624.297	KECAMATAN				3.427.624.297		
221	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 Indeks	148.458.897	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 Indeks	148.458.897		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.080.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.080.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	540.000		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	540.000	KELURAHAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	540.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	540.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	540.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	540.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Laporan	540.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Laporan	540.000	KELURAHAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			SKPD					SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	42.170.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	42.170.400		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.500.000		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.500.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	34.670.400		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	34.670.400	KELURAHAN SUKOREJO	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	41.683.797	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	41.683.797		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Kantor					Kantor						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.428.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.428.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.006.600		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.006.600	KELURAHAN SUKOREJO	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.754.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.754.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.800.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.800.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Penyediaan Barang Cetakan					Penyediaan Barang Cetakan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	dan Penggandaan					dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.455.197		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.455.197	KELURAHAN SUKOREJO	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.840.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.840.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.400.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.400.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	34.378.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	34.378.200		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	34.378.200		Kota Blitar, Semua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	34.378.200	KELURAHAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Semua Kel/Desa	yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	16.422.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	16.422.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	16.422.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	16.422.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	12.184.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	12.184.500		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	6 Unit	6.188.000		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	6 Unit	6.188.000	KELURAHAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Pajak dan Perizinannya				Kel/Desa	Pajak dan Perizinannya				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5.996.500		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5.996.500	KELURAHAN SUKOREJO	
222	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	55.040.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	55.040.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	55.040.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	55.040.000		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	540.000		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	540.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Fasilitasi Percepatan					Fasilitasi Percepatan						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54.500.000		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54.500.000	KELURAHAN SUKOREJO	
223	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.168.895.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	3.168.895.400		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	3.078.414.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	3.078.414.000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	9 Lembaga Kemasyarakatan	41.500.000		Kota Blitar, Semua Kecamata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	9 Lembaga Kemasyarakatan	41.500.000	KELURAHAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kel/Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				n, Semua Kel/Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	3.036.914.000		Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	3.036.914.000	KELURAHAN SUKOREJO	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	90.481.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	90.481.400		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	76.638.600		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	76.638.600	KELURAHAN SUKOREJO	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	2 Laporan	13.842.800		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	2 Laporan	13.842.800	KELURAHAN SUKOREJO	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kel/Desa	Masyarakat				Kel/Desa	Masyarakat				
224	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	55.230.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	55.230.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	55.230.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	55.230.000		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti	70 Orang	55.230.000		Kota Blitar,	Jumlah Orang yang Mengikuti	70 Orang	55.230.000	KELURAHAN	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			SUKOREJO	
	Kelurahan Tanjungsari				2.650.194.054	Kelurahan Tanjungsari				2.650.194.054		
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.650.194.054	UNSUR KEWILAYAHAN				2.650.194.054		
	KECAMATAN				2.650.194.054	KECAMATAN				2.650.194.054		
225	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 Indeks	121.291.454	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,85 Indeks	121.291.454		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	2.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	2.950.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Daerah		tepat waktu dan sesuai standar			Daerah		tepat waktu dan sesuai standar				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.350.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.350.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	1.600.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	1.600.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	840.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	840.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Triwulanan/ Semesteran SKPD					Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	840.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	840.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	41.563.790	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	41.563.790		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.000.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	12 Orang	35.563.790		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	12 Orang	35.563.790	KELURAHAN TANJUNGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Undangan					Undangan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	46.947.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	46.947.800		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.218.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.218.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.679.200		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.679.200	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1.457.500		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1.457.500	KELURAHAN TANJUNGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.750.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.750.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.944.100		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.944.100	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.900.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.900.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	999.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	999.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	9.898.464	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	9.898.464		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Daerah		daerah sesuai standar			Daerah		daerah sesuai standar				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.898.464		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.898.464	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	19.091.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	19.091.400		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.969.400		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.969.400	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	14.122.000		Kota Blitar,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	14.122.000	KELURAHAN TANJUNGSAR	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Tanjungsari	yang Dipelihara				Sukorejo, Tanjungsari	yang Dipelihara			I	
226	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	40.915.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	40.915.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	40.915.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	40.915.000		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	435.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	435.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan	2 Laporan	40.480.000		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan	2 Laporan	40.480.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				Tanjungsari	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
227	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	2.470.757.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	2.470.757.600		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	2.376.793.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	2.376.793.200		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.818.800		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.818.800	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Kota Blitar, Sukorejo,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	9 Pokmas / Ormas	2.340.974.400		Kota Blitar,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	9 Pokmas / Ormas	2.340.974.400	KELURAHAN TANJUNGSAR	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
		Tanjungsari	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Sukorejo, Tanjungsari	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			I	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	93.964.400	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	93.964.400		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	78.644.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	78.644.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15.320.400		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	15.320.400	KELURAHAN TANJUNGSARI	
228	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	17.230.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	17.230.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,	100 %	17.230.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,	100 %	17.230.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
	Daerah		ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart			Daerah		ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	12 Orang	17.230.000		Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	12 Orang	17.230.000	KELURAHAN TANJUNGSARI	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiata/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8
			Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
					29.961.806.807,00					**30.741.806.807**		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan Pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (*top down*) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (*buttom up*) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2025.

Dalam musrenbang yang dilaksanakan di tahun 2024 ini seperti halnya musrenbang tahun-tahun sebelumnya terdapat 4 (bidang) pengelompokan yaitu bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang infrastruktur. Dari hasil musrenbang tersebut telah disusun daftar skala prioritas masing-masing bidang usulan masyarakat serta menjadi usulan ke tingkat kota yang dananya di masing-masing PD sedangkan dari daftar skala prioritas yang tidak tercakup dalam usulan kota nantinya masuk ke dalam DPA kecamatan dan masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Sukorejo. Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan ini terdapat beberapa usulan yang masuk ke dalam DPA kecamatan dan masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Sukorejo sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kota Blitar

Nama PD: Kecamatan Sukorejo

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
A	POKOK – POKOK PIKIRAN MASYARAKAT					
NIHIL						
B	DAFTAR SKALA PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KECAMATAN				216.000.000	
	Perbaikan Lapangan Kelurahan Tlumpu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Tlumpu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	216.000.000	
C	DAFTAR SKALA PRIORITAS TINGKAT KELURAHAN				1.400.000.000	

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL						

BIDANG PEMERINTAHAN

No	**Usulan**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran/ Volume**	**Catatan**
NIHIL						

BIDANG EKONOMI

No	**Usulan**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran/ Volume**	**Catatan**
1	Pelatihan pengelolaan kampung wisata budaya	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	RW 09 dan RW 10 Kel Sukorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	50.000.000/ 30 Orang	

BIDANG INFRASTRUKTUR

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan drainase perkotaan, drainase belum ada	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jl. Bogowonto RT 1/3 Kelurahan Pakunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	170.000.000/ 200 meter	
2.	Pembinaan/sosialisasi/pelatihan pengelolaan TI	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	KIM Pakunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	30.000.000 / 30 Orang	
3.	Pemeliharaan Jembatan	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jalan Musi Kelurahan Tanjungsari (barat Pasar hewan Dimoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	200.000.000/ 4x4 meter	
4.	Pemeliharaan saluran drainase	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jalan Jati Gang II RW 12 Kelurahan Sukorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	150.000.000	
5.	Pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap (Pagar depan kelurahan baru)	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kelurahan baru (Jl. Klampis) Kelurahan Tlumpu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan	200.000.000	

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6.	Pemeliharaan IPAL	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	RT 04/RW 03 Jalan Joko Kandung Kelurahan Blitar	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	200.000.000 / 1 kegiatan	
7.	Pelebaran dan rehabilitasi jalan	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jl Jambu RT 03 RW 02 Kelurahan Karangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	200.000.000/ 156.000x3,21 m2	
8.	Pembangunan Sport Centre	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Wilayah Kelurahan Turi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	200.000.000 / 1 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUKOREJO

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, prioritas pembangunan Nasional pada Kecamatan termasuk kedalam prioritas pembangunan Nasional yang ketujuh, yaitu: **"Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik".**

Sedangkan pada prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur termasuk kedalam prioritas pembangunan yang kesembilan, yaitu **"Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi".**

Berdasarkan arah kebijakan Nasional dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, memang secara tersurat terdapat prioritas yang langsung berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan, dimana kecamatan sebagai PD yang langsung berhadapan dengan masyarakat memiliki kepentingan sebagai PD pendukung (*supporting*) dalam menyukseskan beberapa kebijakan nasional dan selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur namun hanya sebatas kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan.

Tema Kebijakan Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025, yaitu "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital". Prioritas Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi ;
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital ;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing.

Guna mendukung prioritas tersebut, maka kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Sukorejo untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukorejo

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo.

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Sukorejo adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukorejo dalam mengemban visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan; dan
2. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sukorejo bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				2023			2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Baik (89)	Baik (90,26)	Baik (89,10)	Baik (89,15)	Baik (89,20)
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Indikator yang mengukur tingkat kesesuaian pelayanan kepada masyarakat	97%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				2023			2025	2026
			terhadap kesesuaiannya dengan standart pelayanan					
	- Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Indikator yang mengukur tingkat keberdayaan kelurahan. Bisa dilihat dari keikutsertaan kelurahan dalam program RT Keren	75%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah - Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur nilai SAKIP dari setiap perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh tim APIP yang menyasar keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	A (84,76)	A (85,16)	A (84,80)	A (84,85)	A (84,90)

Sumber: Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026, diolah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025, dilakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo tahun 2025 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025

KODE						Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Keterangan
						Tujuan :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Mendukung Prioritas Daerah kedua, yaitu "Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi "
						Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	Indikator yang mengukur tingkat kesesuaian pelayanan kepada masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan standart pelayanan	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	(Jumlah pelayanan tepat waktu : Jumlah semua pelayanan) x 100%	Mendukung tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan mendukung sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, dan Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah
7	01	02	2.	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang harus disusun	
7	01	02	2.	02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan yang tersusun pada tahun berjalan	
7	01	02	2.	02	0002	Fasilitasi Percepatan pencapaian Standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan pada tahun berjalan	
						Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Indikator yang mengukur tingkat keberdayaan kelurahan. Bisa dilihat dari keikutsertaan kelurahan dalam program RT Keren	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan	(Jumlah hasil koordinasi bidang pemberdayaan	

KODE						Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Keterangan
						DAN KELURAHAN	masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	masyarakat dan pembangunan yang sesuai standar : Jumlah semua koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan) x 100%	
							Persentase RT berdaya		
7	01	03	2.	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	Jumlah Laporan Pokmas/Ormas/Lembaga Kemasyarakatan yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jml Laporan Pokmas/Ormas/Lembaga Kemasyarakatan yang harus dilayani	
7	01	03	2.	02	0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pada tahun berjalan	
7	01	03	2.	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada tahun berjalan	
7	01	03	2.	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	Jumlah Lembaga yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jml Lembaga yang harus dilayani	
7	01	03	2.	03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi pada tahun berjalan	
7	01	03	2.	03	0004	Faslitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	
7	01	05	2.	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart pada tahun berjalan	
7	01	05	2.	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	

KODE						Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Keterangan
						Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun berjalan	
						Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			
						Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur nilai SAKIP dari setiap perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh tim APIP yang menyasar keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan Sukorejo pada tahun berjalan	Mendukung tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah; dan mendukung sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
7	01	01				Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	
7	01	01	2.	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	02		Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- ----- x 100 % Jml administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	
7	01	01	2.	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun	

KODE						Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Keterangan
							an SKPD	berjalan	
7	01	01	2.	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	
7	01	01	2.	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	
7	01	01	2.	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada	

KODE						Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Keterangan
								tahun berjalan	
7	01	01	2.	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
7	01	01	2.	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	
7	01	01	2.	07	0005	Pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	
							jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	
7	01	01	2.	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jumlah jenis BMD yang terpelihara ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	
7	01	01	2.	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	
7	01	01	2.	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	

KODE						Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional	Keterangan
							asi		
7	01	01	2.	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	

Sumber: Perubahan Renstra III Tahun 2021-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOREJO

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, dijabarkan melalui 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Prioritas Daerah 1:

   Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

2. Prioritas Daerah 2:

   Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi

3. Prioritas Daerah 3:

   Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital

4. Prioritas Daerah 4:

   Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

5. Prioritas Daerah 5:

   Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo mendukung prioritas daerah ke-2, yaitu Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi .

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Kecamatan Sukorejo Tahun 2023 pada Renja Tahun 2025 dan langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan Kecamatan Sukorejo untuk menindak lanjuti hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja utama Kecamatan Sukorejo sebagaimana pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Kecamatan Sukorejo Tahun 2023
pada Renja Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan.	Meningkatkan Kualitas layanan baik dari segi sarpras, petugas layanan, SOP layanan dan tindaklanjut pengaduan/kritik layanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah dengan cara meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.	Berkolaborasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan menanggulangi kemiskinan masyarakat Kecamatan Sukorejo dengan pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN • Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM • Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3.	Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2025 adalah 4 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan di atas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kecamatan Sukorejo dan Kelurahan se-Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Kecamatan Sukorejo						17.213.470.368							18.259.866.366,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						17.213.470.368							18.259.866.366,00	
	7	01				KECAMATAN						17.213.470.368							18.259.866.366,00	
197	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 Indeks	84,85 Indeks	14.017.316.693						84,90 Indeks	13.399.842.322,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	6.235.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kecamatan Sukorejo	100 %	7.921.801,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	3.741.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kecamatan Sukorejo	10 Dokumen	5.355.525,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	2.494.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kecamatan Sukorejo	9 Laporan	2.566.276,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	10.582.139.287			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kecamatan Sukorejo	100 %	9.735.274.560,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	316 Orang/bulan	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	10.580.532.087	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kecamatan Sukorejo	78 Orang/bulan	9.733.586.941,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	1.607.200	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kecamatan Sukorejo	9 Laporan	1.687.619,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	327.661.254			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	100 %	223.770.688,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	46.668.459	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	2 Paket	61.157.145,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1200 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	280.992.795	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	300 Orang	162.613.543,00	KECAMATAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
															Publik	Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	307.352.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	100 %	1.271.889.985,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.963.200	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	1 Paket	5.068.665,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	0	0	2	0	Penyediaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
		1	1	.06	002	Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	50.637.800	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	8 Paket	51.930.165,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	25.650.500	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	8 Paket	27.009.675,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.915.500	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	2 Paket	103.853.400,00	KECAMATAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Investasi				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.636.700	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	2 Paket	15.505.455,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	6.024.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	24 Dokumen	6.111.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.924.500	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	12 Laporan	1.060.311.625,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				6	0															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	1 Dokumen	2.100.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	85.172.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	100 %	166.195.890,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	84 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	37.041.700	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	21 Unit	105.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	48.130.400	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	9 Unit	61.195.890,00	KECAMATAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1.178.153.152			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	100 %	1.178.222.850,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	45.952.752	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	60 Laporan	48.246.030,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.132.200.400	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	12 Laporan	1.129.976.820,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	1.530.602.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN dan Karyawan-karyawati	100 %	816.566.548,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				9		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kecamatan Sukorejo			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	90.780.300	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	12 Unit	89.062.785,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	22.947.500	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	28 Unit	23.203.950,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	Kota Blitar, Sukorejo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN dan Karyawan-karyawati	1 Unit	5.250.355,00	KECAMATAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
													Semua Kel/Desa	(PAD)	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kecamatan Sukorejo			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.143.960.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	2 Unit	685.357.458,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	262.915.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kecamatan Sukorejo	4 Unit	13.692.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
198	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	399.090.000						100 %	400.760.220,00	
	7	0	0	2		Penyelenggaraan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	399.090.0			Memperkuat	P8 -	Masyaraka	100 %	400.760.220,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
		1	2	. 02		Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart					00			Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	t Kecamatan Sukorejo			
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.176.400	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	2 Dokumen	6.485.220,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	392.913.600	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	3 Laporan	394.275.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
199	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	2.626.983.275						100 % 100 %	4.000.253.174,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						KELURAHAN	bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti													
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	2.315.413.075			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	100 %	3.668.661.045,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	62.102.075	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	2 Lembaga Kemasyarakatan	76.650.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	2.253.311.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	17 Pokmas / Ormas	3.592.011.045,00	KECAMATAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Investasi				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	311.570.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	100 %	331.592.129,00	
	7	01	03	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	272.271.000	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	8 Lembaga Kemasyarakatan	199.529.534,00	KECAMATAN SUKOREJO
	7	01	03	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	39.299.200	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	3 Laporan	132.062.595,00	KECAMATAN SUKOREJO
200	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	170.080.400						100 %	459.010.650,00	
	7	01	05	2.		Penyelenggaraan Urusan	Persentase koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	170.080.400			Memperkuat Stabilitas	P8 - Penyelenggar	Masyarakat	100 %	459.010.650,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				01		Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	aan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kecamatan Sukorejo			
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	3020 Orang	755 Orang	755 Orang	755 Orang	170.080.400	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	755 Orang	459.010.650,00	KECAMATAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Kelurahan Pakunden						2.358.050.828							2.515.552.494,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.358.050.828							2.515.552.494,00	
	7	01				KECAMATAN						2.358.050.828							2.515.552.494,00	
201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	170.970.028						84,90 Indeks	129.699.969,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1.130.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Pakunden	100 %	1.438.710,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	520.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan	ASN Kelurahan Pakunden	10 Dokumen	646.590,00	KELURAHAN PAKUNDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	610.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Pakunden	9 Laporan	792.120,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	684.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Pakunden	100 %	948.906,00	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	684.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan	ASN Kelurahan Pakunden	4 Laporan	948.906,00	KELURAHAN PAKUNDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	31.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	100 %	26.713.680,00	
	7	01	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	7.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	14 Paket	8.443.680,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	560 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	24.200.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	140 Orang	18.270.000,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	40.232.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN dan Karyawan-karyawati	100 %	46.326.315,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				6			umum perangkat daerah sesuai standar								m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kelurahan Pakunden			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.087.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	1 Paket	6.171.900,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.576.800	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	1 Paket	15.561.000,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.579.400	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih,	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	4 Paket	11.430.615,00	KELURAHAN PAKUNDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
															Pelayanan Publik	Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	9.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	4 Paket	3.520.020,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	3.148.400	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	4 Paket	3.510.780,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	69 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	3.840.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	24 Dokumen	4.032.000,00	KELURAHAN PAKUNDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.001.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	1 Dokumen	2.100.000,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	28.600.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	100 %	9.488.220,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	28.600.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	3 Unit	9.488.220,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	29.758.128			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih,	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	100 %	22.051.008,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							daerah sesuai standar								Pelayanan Publik	Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	29.758.128	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	36 Laporan	22.051.008,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	39.365.300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	100 %	22.733.130,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6.072.300	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	7 Unit	6.603.555,00	KELURAHAN PAKUNDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.745.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	3 Unit	1.849.575,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	27.548.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	2 Unit	14.280.000,00	KELURAHAN PAKUNDEN
202	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	48.797.200						100 %	51.369.360,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	48.797.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Pakunden	100 %	51.369.360,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	797.200	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	1 Dokumen	969.360,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	48.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	2 Laporan	50.400.000,00	KELURAHAN PAKUNDEN
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	2.131.533.600							100 % 100 %	2.232.884.115,00	
	7	01	03	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang	100 %	100 %	100 %	100 %	2.027.342.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	Masyarakat Kelurahan	100 %	2.124.809.085,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				2			pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar								m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pakunden			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48 lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	19.756.200	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	12 Lembaga Kemasyarakatan	23.574.075,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2.007.586.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	12 Pokmas / Ormas	2.101.235.010,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	104.191.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan	Masyarakat Kelurahan Pakunden	100 %	108.075.030,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							sesuai standar									Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	03	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	91.113.400	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	5 Lembaga Kemasyarakatan	94.343.130,00	KELURAHAN PAKUNDEN
	7	01	03	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	13.078.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	3 Laporan	13.731.900,00	KELURAHAN PAKUNDEN
204	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	6.750.000						100 %	101.599.050,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	6.750.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Masyarakat Kelurahan Pakunden	100 %	101.599.050,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Digital dan Investasi				
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	6.750.000	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	150 Orang	101.599.050,00	KELURAHAN PAKUNDEN
						Kelurahan Blitar						1.299.721.109							1.383.256.963,00	
	7					UNSUR						1.299.721							1.383.256.963,0	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						KEWILAYAHAN						.109							0	
	7	01				KECAMATAN						1.299.721.109							1.383.256.963,00	
205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	108.981.493						84,90 Indeks	72.678.217,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	2.041.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Blitar	100 %	2.002.150,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.020.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Blitar	10 Dokumen	1.001.600,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	1.020.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan	ASN Kelurahan Blitar	9 Laporan	1.000.550,00	KELURAHAN BLITAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	845.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Blitar	100 %	987.210,00	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	845.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Blitar	4 Laporan	987.210,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	36.018.300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	100 %	27.493.365,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.200.000	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	12 Paket	6.240.000,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	28.818.300	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	90 Orang	21.253.365,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	30.250.300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	100 %	19.681.820,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.951.000	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	1 Paket	2.620.170,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	8.062.500	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	3 Paket	5.273.400,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4.800.400	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	3 Paket	2.642.700,00	KELURAHAN BLITAR
	7	0	0	2	0	Penyediaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
		1	1	.06	004	Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1.395.000	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	4 Paket	1.044.750,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.856.600	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	1 Paket	3.165.800,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaa	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	12 Dokumen	2.835.000,00	KELURAHAN BLITAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																n Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.484.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	1 Dokumen	2.100.000,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	21.370.493			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	100 %	17.026.267,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	21.370.493	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Pakunden	36 Laporan	17.026.267,00	KELURAHAN BLITAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	18.455.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	100 %	5.487.405,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.240.000	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	4 Unit	2.164.155,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	11.215.000	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Blitar	25 Unit	3.323.250,00	KELURAHAN BLITAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Berbasis Digital dan Investasi				
206	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	22.554.100						100 %	22.154.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	22.554.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	100 %	22.154.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.082.400	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	2 Dokumen	1.154.000,00	KELURAHAN BLITAR
	7	0	0	2	0	Fasilitasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
		1	2	.02	002	Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	21.471.700	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	2 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN BLITAR
207	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	1.153.034.016						100 % 100 %	1.227.773.046,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	996.506.416			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	100 %	1.090.992.796,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	17.758.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.923.000,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	978.747.616	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	4 Pokmas / Ormas	1.074.069.796,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	156.527.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	100 %	136.780.250,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	148.358.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	4 Lembaga Kemasyarakatan	131.020.050,00	KELURAHAN BLITAR
	7	01	03	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.168.800	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	2 Laporan	5.760.200,00	KELURAHAN BLITAR
208	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	15.151.500						100 %	60.651.700,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	15.151.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan DesaPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	100 %	60.651.700,00	
	7	01	05	2.	00	Pembinaan Wawasan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				01	01	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	15.151.500	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Blitar	50 Orang	60.651.700,00	KELURAHAN BLITAR
						Kelurahan Tlumpu						1.251.386.467							1.323.427.716,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.251.386.467							1.323.427.716,00	
	7	01				KECAMATAN						1.251.386.467							1.323.427.716,00	
20	7	0	0			PROGRAM	Indeks Kepuasan	84,90	NA	84,85	84,85	159.648.5						84,90	131.455.413,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
9		1	1			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	Indeks		INDEKS	INDEKS	01						Indeks		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1.175.986			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Tlumpu	100 %	1.234.784,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	643.078	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Tlumpu	10 Dokumen	675.231,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	532.908	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan	ASN Kelurahan Tlumpu	9 Laporan	559.553,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	782.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Tlumpu	100 %	821.625,00	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	782.500	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan DesaPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Tlumpu	4 Laporan	821.625,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.		Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	70.432.200			Memperkuat Stabilitas	P8 - Penyelenggar	ASN dan Karyawan-	100 %	31.547.355,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				05		Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	aan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	karyawati Kelurahan Tlumpu			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.378.600	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	1 Paket	8.443.680,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1600 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	61.053.600	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	40 Orang	23.103.675,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	52.926.415			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan	100 %	61.731.649,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							daerah sesuai standar								Transformasi Pelayanan Publik	yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Tlumpu			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.668.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	1 Paket	4.902.030,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9.101.500	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	3 Paket	14.729.085,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.055.200	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	3 Paket	3.030.195,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
															Publik	Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	28.500.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	5 Paket	28.227.409,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.901.115	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	1 Paket	5.907.930,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	12 Dokumen	2.835.000,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	1 Dokumen	2.100.000,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	16.436.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	100 %	17.251.500,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	16.436.400	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	36 Laporan	17.251.500,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	17.895.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	100 %	18.868.500,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.800.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	5 Unit	1.890.000,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	16.095.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Tlumpu	4 Unit	16.978.500,00	KELURAHAN TLUMPU
210	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR	Persentase pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	19.319.704						100 %	20.285.689,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan tepat waktu													
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	19.319.704			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	100 %	20.285.689,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	919.704	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	2 Dokumen	965.689,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	18.400.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	2 Laporan	19.320.000,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Digital dan Investasi				
211	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	1.061.618.262						100 % 100 %	1.089.127.739,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	999.261.428			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	100 %	1.033.434.499,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.569.428	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	4 Lembaga Kemasyarakatan	19.457.899,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	980.692.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	4 Pokmas / Ormas	1.013.976.600,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
															Publik	Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	62.356.834			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	100 %	55.693.240,00	
	7	01	03	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.751.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.393.296,00	KELURAHAN TLUMPU
	7	01	03	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.605.834	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	2 Laporan	5.299.944,00	KELURAHAN TLUMPU
212	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR	Persentase koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	10.800.000						100 %	82.558.875,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum yang ditindaklanjuti													
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	10.800.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	100 %	82.558.875,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	800 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	10.800.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tlumpu	200 Orang	82.558.875,00	KELURAHAN TLUMPU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Kelurahan Turi						1.070.852.030							1.105.328.631,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.070.852.030							1.105.328.631,00	
	7	01				KECAMATAN						1.070.852.030							1.105.328.631,00	
213	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	104.759.230						84,90 Indeks	114.020.803,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	2.870.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	100 %	3.368.400,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.230.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	7 Dokumen	1.461.600,00	KELURAHAN TURI
	7	0	0	2	0	Koordinasi dan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
		1	1	.01	006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.640.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	8 Laporan	1.906.800,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1.640.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	100 %	1.239.000,00	
	7	01	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.640.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	4 Laporan	1.239.000,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase pelayanan administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	39.035.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN dan Karyawan-karyawati	100 %	33.269.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				5		Daerah	kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar								m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kelurahan Turi			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.200.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	1 Paket	6.825.000,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	31.835.600	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	12 Orang	26.444.250,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	27.309.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	100 %	30.112.320,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	579.700	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	1 Paket	979.230,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	9.255.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	5 Paket	8.099.070,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2.791.800	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	3 Paket	1.413.195,00	KELURAHAN TURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	8.635.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	2 Paket	11.518.500,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.904.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	1 Paket	2.642.325,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	12 Dokumen	2.835.000,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.444.200	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	1 Dokumen	2.625.000,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	100 %	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	1 Unit	10.500.000,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	23.443.930			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	100 %	24.559.833,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Investasi				
	7	01	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	23.443.930	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	36 Laporan	24.559.833,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	7.460.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	100 %	10.972.000,00	
	7	01	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.800.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	6 Unit	2.047.000,00	KELURAHAN TURI
	7	01	01	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				9	6															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	5.660.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Turi	14 Unit	8.925.000,00	KELURAHAN TURI
214	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	33.520.000						100 %	26.258.400,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	33.520.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	100 %	26.258.400,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	920.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong	Masyarakat Kelurahan Turi	2 Dokumen	1.058.400,00	KELURAHAN TURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	32.600.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	2 Laporan	25.200.000,00	KELURAHAN TURI
215	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	912.567.800							100 % 100 %	920.730.628,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	809.166.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Masyarakat Kelurahan Turi	100 %	841.665.313,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.397.800	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	10 Lembaga Kemasyarakatan	14.616.525,00	KELURAHAN TURI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	792.768.200	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	10 Pokmas / Ormas	827.048.788,00	KELURAHAN TURI
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga	100 %	100 %	100 %	100 %	103.401.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih,	Masyarakat Kelurahan Turi	100 %	79.065.315,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar								Pelayanan Publik	Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	28 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	97.452.800	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	7 Lembaga Kemasyarakatan	71.809.815,00	KELURAHAN TURI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.949.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	2 Laporan	7.255.500,00	KELURAHAN TURI
216	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	20.005.000						100 %	44.318.800,00	
	7	01	05	2.		Penyelenggaraan Urusan	Persentase koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	20.005.000			Memperkuat Stabilitas	P8 - Penyelenggar	Masyarakat	100 %	44.318.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				01		Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	aan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kelurahan Turi			
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	832 Orang	208 Orang	208 Orang	208 Orang	20.005.000	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Turi	208 Orang	44.318.800,00	KELURAHAN TURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Kelurahan Karangsari						1.470.507.654							1.459.049.854,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.470.507.654							1.459.049.854,00	
	7	01				KECAMATAN						1.470.507.654							1.459.049.854,00	
217	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 INDEKS	84,85 INDEKS	153.905.800						84,90 Indeks	131.703.539,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	2.936.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Karangsari	100 %	3.763.600,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.443.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Karangsari	10 Dokumen	1.965.300,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.493.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Karangsari	8 Laporan	1.798.300,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1.344.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Karangsari	100 %	1.140.300,00	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.344.400	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Karangsari	4 Laporan	1.140.300,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	45.655.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	100 %	23.086.039,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.038.800	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan DesaPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	1 Paket	8.000.000,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	37.616.600	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	50 Orang	15.086.039,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	71.256.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan	100 %	72.253.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							daerah sesuai standar								Transformasi Pelayanan Publik	yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Karangsari			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.395.200	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	1 Paket	3.389.300,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	14.898.700	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	5 Paket	14.909.300,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.075.400	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	3 Paket	3.079.000,00	KELURAHAN KARANGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
															Publik	Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	36.300.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	15 Paket	37.117.000,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.696.500	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	1 Paket	8.380.100,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000	Kota Blitar, Sukorejo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN dan Karyawan-karyawati	12 Dokumen	3.900.000,00	KELURAHAN KARANGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						Karangsari	(PAD)	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kelurahan Karangsari			
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	990.200	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	1 Dokumen	1.479.000,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	14.603.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	100 %	12.160.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	144 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	14.603.200	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan	36 Laporan	12.160.000,00	KELURAHAN KARANGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							dan Listrik yang Disediakan								Transformasi Pelayanan Publik	dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Karangsari			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	18.110.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	100 %	19.299.900,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.896.800	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaa	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	6 Unit	7.003.900,00	KELURAHAN KARANGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																n Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	11.214.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Karangsari	18 Unit	12.296.000,00	KELURAHAN KARANGSARI
218	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	29.050.000						100 %	32.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	29.050.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	100 %	32.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.050.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	2 Dokumen	0,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	28.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	2 Laporan	32.000.000,00	KELURAHAN KARANGSARI
219	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	1.275.101.854						100 % 100 %	1.236.375.315,00	
	7	01	03	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang	100 %	100 %	100 %	100 %	1.167.012.954			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	Masyarakat Kelurahan	100 %	1.155.529.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				2			pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar								m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Karangsari			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	20.796.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	17 Lembaga Kemasyarakatan	21.156.000,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.146.216.954	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	6 Pokmas / Ormas	1.134.373.200,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	108.088.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan	Masyarakat Kelurahan Karangsari	100 %	80.846.115,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							sesuai standar									Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	99.244.300	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	4 Lembaga Kemasyarakatan	71.253.600,00	KELURAHAN KARANGSARI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.844.600	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	2 Laporan	9.592.515,00	KELURAHAN KARANGSARI
220	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	12.450.000						100 %	58.971.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,	100 %	100 %	100 %	100 %	12.450.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih,	Masyarakat Kelurahan Karangsari	100 %	58.971.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Kepala Daerah	ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart								Pelayanan Publik	Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	1580 Orang	395 Orang	395 Orang	395 Orang	12.450.000	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	395 Orang	58.971.000,00	KELURAHAN KARANGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Kelurahan Sukorejo						3.427.624.297							3.466.883.380,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.427.624.297							3.466.883.380,00	
	7	01				KECAMATAN						3.427.624.297							3.466.883.380,00	
221	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 Indeks	84,85 Indeks	148.458.897						84,90 Indeks	126.171.340,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1.080.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Sukorejo	100 %	1.055.340,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	540.000	Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Sukorejo	10 Dokumen	540.540,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	540.000	Kota Blitar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN Kelurahan Sukorejo	4 Laporan	514.800,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	540.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Sukorejo	100 %	514.800,00	
	7	01	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	540.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Kelurahan Sukorejo	4 Laporan	514.800,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	42.170.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	100 %	31.284.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.500.000	Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	1 Paket	8.041.600,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	34.670.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	200 Orang	23.243.000,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	41.683.797			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	100 %	29.988.900,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
						Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.428.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	1 Paket	1.506.000,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.006.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	1 Paket	12.290.600,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.754.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	1 Paket	3.734.400,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	16.800.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan	2 Paket	2.940.000,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
													, Semua Kel/Desa		Transformasi Pelayanan Publik	yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Sukorejo			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.455.197	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	1 Paket	3.677.900,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	12 Dokumen	3.840.000,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	1 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	34.378.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	100 %	30.110.800,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	34.378.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	6 Unit	30.110.800,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	16.422.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	100 %	16.334.400,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16.422.000	Kota Blitar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	P8 - Penyelenggaraan	ASN dan karyawan-karyawati	4 Laporan	16.334.400,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Kelurahan Sukorejo			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	12.184.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	100 %	16.882.500,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.188.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	6 Unit	10.276.000,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	5.996.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	ASN dan Karyawan-karyawati Kelurahan Sukorejo	11 Unit	6.606.500,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
222	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	55.040.000						100 %	57.140.540,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	55.040.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	100 %	57.140.540,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	540.000	Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	2 Dokumen	540.540,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	54.500.000	Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	2 Laporan	56.600.000,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								Transformasi Pelayanan Publik	yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT BerdayaPersentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %100 %	100 %100 %	100 %100 %	100 %100 %	3.168.895.400						100 %100 %	3.156.023.500,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	3.078.414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	100 %	3.067.598.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	41.500.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	38.141.000,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	03	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				2	3															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	605 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	3.036.914.000	Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	15 Pokmas / Ormas	3.029.457.000,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	90.481.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	100 %	88.425.500,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	76.638.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	8 Lembaga Kemasyarakatan	78.776.300,00	KELURAHAN SUKOREJO
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.842.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	2 Laporan	9.649.200,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
224	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	55.230.000						100 %	127.548.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	55.230.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	100 %	127.548.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	280 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	55.230.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPenin	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	70 Orang	127.548.000,00	KELURAHAN SUKOREJO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										gkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
						Kelurahan Tanjungsari						2.650.194.054							2.826.485.524,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.650.194.054							2.826.485.524,00	
	7	01				KECAMATAN						2.650.194.054							2.826.485.524,00	
225	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,85 Indeks	84,85 Indeks	121.291.454						84,90 Indeks	123.835.752,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	2.950.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	100 %	3.060.750,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.350.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	-	10 Dokumen	1.502.550,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	1.600.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	9 Laporan	1.558.200,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	840.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	100 %	882.000,00	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	840.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	-	4 Laporan	882.000,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	41.563.790			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	100 %	29.432.877,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	1 Paket	5.880.000,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	35.563.790	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	12 Orang	23.552.877,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai	100 %	100 %	100 %	100 %	46.947.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih,	-	100 %	63.433.020,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
							standar								Pelayanan Publik	Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	2.218.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	8 Paket	2.438.730,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	8.679.200	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	5 Paket	9.111.690,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.457.500	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM,	-	3 Paket	3.102.330,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
															Publik	Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	23.750.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	1 Paket	40.096.770,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.944.100	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	1 Paket	5.617.500,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	0	0	2	0	Penyediaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
		1	1	.06	006	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	3.900.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	24 Dokumen	2.016.000,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	999.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	1 Dokumen	1.050.000,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	9.898.464			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	100 %	15.750.000,00	
	7	01	01	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi,														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
				0 8	0 2	Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.898.464	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	12 Laporan	15.750.000,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	0 1	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	19.091.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	100 %	11.277.105,00	
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	4.969.400	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaa	-	6 Unit	7.997.955,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																n Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	14.122.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	4 Unit	3.279.150,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
226	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	40.915.000						100 %	42.546.840,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	40.915.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	100 %	42.546.840,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	435.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	2 Dokumen	458.325,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.480.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	2 Laporan	42.088.515,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Investasi				
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	2.470.757.600						100 %	2.563.424.535,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	2.376.793.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti KorupsiPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	100 %	2.490.009.270,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.818.800	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	9 Lembaga Kemasyarakatan	36.879.150,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.340.974.400	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	9 Pokmas / Ormas	2.453.130.120,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	93.964.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	100 %	73.415.265,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	78.644.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	5 Lembaga Kemasyarakatan	58.205.595,00	KELURAHAN TANJUNGSARI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.320.400	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	1 Laporan	15.209.670,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
																Berbasis Digital dan Investasi				
228	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	17.230.000						100 %	96.678.397,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	100 %	17.230.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	100 %	96.678.397,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	48 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	17.230.000	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	12 Orang	96.678.397,00	KELURAHAN TANJUNGSARI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	16	17
			Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									Berbasis Digital dan Investasi				
	J U M L A H							**30.741.806.807**							**32.339.850.928**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2025 Pagu Anggaran Kecamatan Sukorejo berkurang sehingga terdapat beberapa kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan, namun untuk menyesuaikan pagu anggaran tersebut sehingga pada tahun 2025 kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Walaupun demikian, Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo, baik dalam kerangka regulasi juga mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan maupun sub kegiatan, dalam satu OPD maupun antar OPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Musrenbang di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi terintegrasi.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sukorejo 2021 – 2026 yang mengacu ke dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, oleh karena itu posisi dokumen Renja Kecamatan Sukorejo 2025 menjadi strategis guna pencapaian target-target yang telah ditentukan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo 2021-2026 maupun RPJMD Kota Blitar 2021-2026, terlebih Tahun 2025 merupakan periode terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dan juga masuk kedalam periode keempat atau peridoe terakhir pencapaian target-target dalam RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan diatasnya mulai dari Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026, RKPD Kota Blitar Tahun 2025, RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

2) Seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Sukorejo termasuk didalamnya kelurahan se-Kecamatan Sukorejo beserta seluruh ASN, wajib melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 kedalam dokumen anggaran OPD
3) OPD diluar Kecamatan Sukorejo, pemangku kepentingan yang ada di luar Kecamatan Sukorejo, beserta jajaran samping yang ada diluar Kecamatan Sukorejo yang memiliki tugas pokok fungsi berhimpitan dengan Kecamatan Sukorejo diharapkan dapat menyesuaikan dokumen perencanaannya dengan dokumen Renja Kecamatan Sukorejo 2025 guna pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui proses musrenbang.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dari analisa kinerja dan indikator kinerja utama Kecamatan Sukorejo, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

1) Melaksanakan peningkatan kualitas petugas pelayanan melalui pelaksanaan lomba inovasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;
2) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan; dan
3) Meningkatkan pengelolaan aset yang ada di Kecamatan Sukorejo.

Akhirnya, seluruh harapan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sehingga hasil yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Blitar.

30. RENCANA KERJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja merupakan amanat dari Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana seluruh Perangkat Daerah wajib Menyusun Renja Perangkat Daerah setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Kepanjenkidul adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kepanjenkidul untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Kepanjenkidul dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan dan mengolah data serta informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, serta mengacu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Renja Kecamatan Kepanjenkidul dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kepanjenkidul dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran 2025 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

t. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

u. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

v. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77);

w. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun 2025 yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kepanjenkidul
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

- 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2023 pada Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025
- 4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Adapun fungsi dari Kecamatan Kepanjenkidul berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 adalah :

a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
l. Penyelenggaraan keamanan dan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
o. Pelaksanaan pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Kepanjenkidul, bahwa penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada tahun 2023, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul tercapai Rp. 186.943.050,00 dari target sebesar Rp. 193.425.880,00 atau 96,65 % yang berarti dibawah target. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi hasil sewa BMD yaitu tanah aset yang di bawah target yaitu sebesar Rp. 178.243.050,00 dari target sebesar Rp. 185.725.880,00. Sumber PAD pada Kecamatan Kepanjenkidul berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah aset untuk kegiatan pertanian dan retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar didukung dengan anggaran sebesar Rp. 33.449.944.018,00 yang dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kepanjenkidul dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.079.923.162,00 atau 98,89 %.

Pada tahun 2024 dukungan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebesar Rp. 35.655.521.918,00 yang dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kepanjenkidul. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 186.631.950,00.

Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (81) Nilai		85 Nilai	84.11	98,95	86 Nilai	86	100	Kecamatan Kepanjenkidul
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100	100%	100	100	100%tabel 3	100	100	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8	8.00 Dokumen	8	100	8.00 Dokumen	8	100	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	6.00 Laporan	6	100	6.00 Laporan	6	100	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		85	85.00 Orang/bulan	85	100	85.00 Orang/bulan	85	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5	5.00 Laporan	5	100	5.00 Laporan	5	100	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100	100.00 Orang	100	100	100.00 Orang	100	100	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100	1 dokumen	100	100,00	1 dokumen	100	100,00	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1.00 Paket	1	100	1.00 Paket	1	100	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	3.00 Paket	3	100	3.00 Paket	3	100	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4.00 Paket	4	100	4.00 Paket	4	100	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	2.00 Paket	2	100	2.00 Paket	2	100	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	2.00 Paket	2	100	2.00 Paket	2	100	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36	36.00 Dokumen	36	100	36.00 Dokumen	36	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9	9.00 Laporan	9	100	9.00 Laporan	9	100	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	5.00 Unit	5	100	5.00 Unit	5	100	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1.00 Unit	1	100	1.00 Unit	1	100	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	48.00 Laporan	36	75	48.00 Laporan	36	75	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13	13.00 Laporan	13	100	13.00 Laporan	13	100	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12	12.00 Unit	12	100	12.00 Unit	12	100	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	1.00 Unit	1	100	1.00 Unit	1	100	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9	9.00 Unit	9	100	9.00 Unit	9	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1.00 Unit	1	100	1.00 Unit	1	100	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1.00 Unit	1	100	1.00 Unit	1	100	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	97%	100	97%	100.00	103,09	100%	100.00	100	Kecamatan Kepanjenkidul
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan		1	1.00 dokumen	1	100	1.00 dokumen	1	100	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		7	7.00 Laporan	7	100	7.00 Laporan	7	100	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	75%		100%	100.00	100	100%	100.00	100	Kecamatan Kepanjenkidul
						Persentase RT Berdaya	100%		75%	100.00	133,33	100%	100.00	100	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart		100	100%	100	100	100%	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6	6.00 lembaga	6	100	6.00 lembaga	6	100	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7	7.00 Ormas	7	100	7.00 Ormas	7	100	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		6	6.00 lembaga	6	100	6.00 lembaga	6	100	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3	3.00 Laporan	3	100	3.00 Laporan	3	100	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%		100%	100.00	100	100%	100.00	100	Kecamatan Kepanjenkidul
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		100	100%	100	100	100%	100	100	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan		150	150.00 Orang	150	100	150.00 Orang	150	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Berikut faktor pendorong dan penghambat di dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Kepanjenkidul :

Tabel. 2.2

Analisis SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL			
NO	KEKUATAN (S)	NO	KELEMAHAN (W)
S1	Telah ditetapkannya Peraturan Walikota No 77 Tahun 2017 tentang SOTK Perangkat Daerah Kota Blitar	W1	Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai di Kelurahan dan Kecamatan Kepanjenkidul
S2	Terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi aparatur	W2	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dilakukan dengan dokumen-dokumen perencanaan
S3	Tersedianya sarana dan prasarana yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan	W3	Kurang maksimalnya manajemen pengelolaan aset daerah
S4	Pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien	W4	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL			
NO	PELUANG (O)	NO	TANTANGAN (T)
O1	Terjalinnya koordinasi yang baik dengan OPD lain	T1	Tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin beragam
O2	Adanya kebijakan Kepala Daerah yang memperkuat kapasitas Kecamatan dan Kelurahan sekota Blitar	T2	Tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat
O3	Adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik	T3	Lemahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan-undangan yang berlaku
O4	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas	T4	Perubahan peraturan perundang-undangan yang terlalu sering

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dengan adanya kelemahan dan tantangan yang ada, pencapaian target Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan mampu terpenuhi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	Baik (84)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (94)	Baik (84,22)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (94)	Realisasi capaian nilai IKM pada tahun 2023 telah melampaui target.
2	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	-	-	97 %	97 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	Realisasi capaian persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan pada tahun 2023 telah melampaui target yaitu terealisasi 100% dari target 97%.
3	Persentase kelurahan berdaya	-	-	75 %	75 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	Pada tahun 2023 seluruh kelurahan telah melaksanakan program RT Berdaya/RT Keren sehingga realisasi capaian persentase kelurahan berdaya adalah 100% yang berarti telah melampaui dari target 75%.
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (87)	A (85,09)	A (85,31)	A (86)	A (86,5)	A (87)	Pada tahun 2023 realisasi Nilai SAKIP adalah A (85,31) dari target A (85,5)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kepanjenkidul

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Sumber daya Kecamatan Kepanjenkidul yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya dukungan untuk menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai garda depan pelayanan	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur kelurahan dan kecamatan.	Belum optimalnya peningkatan kapasitas personil Kelurahan dan Kecamatan
2	Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan/ pembangunan di wilayah	Belum optimalnya sinkronisasi tupoksi dan kewenangan antara kelurahan, kecamatan dengan Perangkat Daerah	Regulasi dan strategi terkait pemisahan kewenangan antara kelurahan, kecamatan dengan Perangkat Daerah belum jelas

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari permasalahan diatas, Kecamatan Kepanjenkidul menentukan isu strategis adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan Kepanjenkidul.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota

Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul.

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN KEPANJENKIDUL				15.889.316.883,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL				15.889.316.883,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				15.889.316.883,00	UNSUR KEWILAYAHAN				15.889.316.883,00	
	-				15.889.316.883,00	-				15.889.316.883,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	432.638.232,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	432.638.232,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	432.638.232,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	432.638.232,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	900.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	900.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	7 Laporan	431.738.232,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	7 Laporan	431.738.232,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase rt berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	100 %	3.286.194.264,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase rt berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	100 %	3.286.194.264,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	2.576.945.658,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	2.576.945.658,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan di Kelurahan					*Pembangunan di Kelurahan*			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	7 Pokmas / Ormas	2.501.945.658,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	7 Pokmas / Ormas	2.501.945.658,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	709.248.606,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	709.248.606,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Lembaga Kemasyarakatan	437.334.106,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Lembaga Kemasyarakatan	437.334.106,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	271.914.500,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan*	3 Laporan	271.914.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Usaha Ekonomi Masyarakat			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	346.151.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	346.151.700,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	346.151.700,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	346.151.700,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*0*	150 orang	346.151.700,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*0*	150 orang	346.151.700,00	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	11.824.332.687,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	11.824.332.687,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	190.322.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	190.322.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	71.155.100,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	71.155.100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	36 Dokumen	18.600.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	36 Dokumen	18.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	9 Laporan	100.567.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	9 Laporan	100.567.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	23.248.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	23.248.400,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	23.248.400,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	23.248.400,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	0,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	950.107.888,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	950.107.888,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	33.133.888,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	33.133.888,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	916.974.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 Laporan	916.974.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	337.145.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	337.145.800,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	113.049.300,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	113.049.300,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	24.096.500,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	24.096.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang*	100 %	5.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat*	100 %	5.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tepat waktu dan sesuai standar					*waktu dan sesuai standar*			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	2.000.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	2.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	3.000.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	750.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	750.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	5 Laporan	750.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	5 Laporan	750.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	51.138.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	51.138.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 Paket	21.000.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 Paket	21.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	30.138.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	30.138.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	128.353.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	128.353.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.987.400,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.987.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	23.040.700,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	23.040.700,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	35.173.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	35.173.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	65.152.000,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	65.152.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	10.138.267.399,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	10.138.267.399,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	85 Orang/bulan	10.138.267.399,00		KECAMATAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	85 Orang/bulan	10.138.267.399,00	
	KELURAHAN KEPANJENKIDUL				3.101.000.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL				3.101.000.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				3.101.000.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				3.101.000.000,00	
	-				3.101.000.000,00	-				3.101.000.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	33.100.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	33.100.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	33.100.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	33.100.000,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.100.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.100.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	32.000.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	32.000.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100 %	2.873.370.308,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100 %	2.873.370.308,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	2.782.184.808,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang*	100 %	2.782.184.808,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dilaksanakan sesuai standar			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	9 Lembaga Kemasyarakatan	33.699.800,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	9 Lembaga Kemasyarakatan	33.699.800,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	14 Pokmas / Ormas	2.748.485.008,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	14 Pokmas / Ormas	2.748.485.008,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	91.185.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	91.185.500,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Lembaga Kemasyarakatan	80.216.700,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Lembaga Kemasyarakatan	80.216.700,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	10.968.800,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	10.968.800,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	42.900.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	42.900.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	42.900.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	42.900.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	100 Orang	42.900.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	100 Orang	42.900.000,00	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	151.629.692,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	151.629.692,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang*	100 %	4.353.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan*	100 %	4.353.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tepat waktu dan sesuai standar					*yang tepat waktu dan sesuai standar*			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	2.098.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	2.098.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	2.255.600,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	2.255.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	2.178.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	2.178.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	2.178.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	2.178.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	38.886.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	38.886.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 Paket	11.250.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 Paket	11.250.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	18 Orang	27.636.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	18 Orang	27.636.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	36.005.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	36.005.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	2.905.100,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	2.905.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	15.205.100,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	15.205.100,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	6.381.700,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	6.381.700,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.950.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.950.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	6.563.100,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	6.563.100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	21.475.724,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	21.475.724,00	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	4.550.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	4.550.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	16.925.724,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	16.925.724,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	17.360.868,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	17.360.868,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	17.360.868,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	17.360.868,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	31.370.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	31.370.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	2.832.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	2.832.000,00	
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	1 Unit	3.000.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	1 Unit	3.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	7.158.500,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	7.158.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	12.580.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	12.580.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	5.800.000,00		KELURAHAN KEPANJENKIDUL	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	5.800.000,00	
	KELURAHAN NGADIREJO				1.340.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO				1.340.000.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.340.000.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.340.000.000,00	
	-				1.340.000.000,00	-				1.340.000.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	20.120.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	20.120.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	20.120.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	20.120.000,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	120.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	120.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	7 Laporan	20.000.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	7 Laporan	20.000.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.197.593.950,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	100%	1.197.593.950,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Persentase rt berdaya			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.122.203.250,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.122.203.250,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	10 Lembaga Kemasyarakatan	26.629.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	10 Lembaga Kemasyarakatan	26.629.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	1.095.574.250,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	1.095.574.250,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	75.390.700,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	75.390.700,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	5 Lembaga Kemasyarakatan	63.895.200,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	5 Lembaga Kemasyarakatan	63.895.200,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	4 Laporan	11.495.500,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	4 Laporan	11.495.500,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	28.890.400,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	28.890.400,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	28.890.400,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang*	100 %	28.890.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dilaksanakan sesuai standart			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	150 Orang	28.890.400,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	150 Orang	28.890.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	93.395.650,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	93.395.650,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	200.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	100.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	100.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	5 Laporan	100.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	100.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	5 Laporan	100.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	5 Laporan	100.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	53.114.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	53.114.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 Paket	19.878.600,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 Paket	19.878.600,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	160 Orang	33.236.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	160 Orang	33.236.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	12.039.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	12.039.200,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	714.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	714.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan*	2 Paket	4.486.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan*	2 Paket	4.486.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan					*Kantor yang Disediakan*			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	859.200,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	859.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	3.840.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	3.840.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.140.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.140.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	17.816.850,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	17.816.850,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	17.816.850,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	48 Laporan	17.816.850,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	350.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	350.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	350.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	350.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	9.775.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	9.775.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	18 Unit	9.775.000,00		KELURAHAN NGADIREJO	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	18 Unit	9.775.000,00	
	KELURAHAN SENTUL				2.125.000.000,00	KELURAHAN SENTUL				2.125.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.125.000.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.125.000.000,00	
	-				2.125.000.000,00	-				2.125.000.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	25.603.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	25.603.500,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	25.603.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	25.603.500,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.603.500,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.603.500,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	24.000.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di*	4 Laporan	24.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Wilayah Kecamatan			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.951.585.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.951.585.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.858.643.600,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.858.643.600,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.329.600,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.329.600,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	9 Pokmas / Ormas	1.832.314.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	9 Pokmas / Ormas	1.832.314.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	92.941.900,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	92.941.900,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Lembaga Kemasyarakatan	82.341.900,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Lembaga Kemasyarakatan	82.341.900,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	10.600.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	10.600.000,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	6.100.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	6.100.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	6.100.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	6.100.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	6.100.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	6.100.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	141.711.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	141.711.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	3.965.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	3.965.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	1.500.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	1.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	2.465.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	5 Laporan	2.465.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	1.479.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	1.479.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	5 Laporan	1.479.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	5 Laporan	1.479.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	41.540.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	41.540.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	9.000.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	9.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	12 Orang	32.540.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	12 Orang	32.540.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	49.951.509,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	49.951.509,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	7.732.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	7.732.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	14.959.646,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	14.959.646,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	4.888.088,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	4.888.088,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	16.040.400,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	16.040.400,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	6.331.375,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	6.331.375,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	27.749.891,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	27.749.891,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	27.749.891,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	27.749.891,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	17.025.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN SENTUL	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	17.025.600,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	8.425.600,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	8.425.600,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	32 Unit	8.600.000,00		KELURAHAN SENTUL	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	32 Unit	8.600.000,00	
	KELURAHAN KAUMAN				2.071.500.000,00	KELURAHAN KAUMAN				2.071.500.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.071.500.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.071.500.000,00	
	-				2.071.500.000,00	-				2.071.500.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	25.097.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	25.097.500,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	-	-	25.097.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	-	-	25.097.500,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.097.500,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.097.500,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	24.000.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	24.000.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase rt berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	100%	1.898.692.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase rt berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	100%	1.898.692.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.829.986.300,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.829.986.300,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.218.300,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.218.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan di Kelurahan					*Pembangunan di Kelurahan*			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	13 Pokmas / Ormas	1.799.768.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	13 Pokmas / Ormas	1.799.768.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	68.706.200,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	68.706.200,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	4 Lembaga Kemasyarakatan	59.556.200,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	4 Lembaga Kemasyarakatan	59.556.200,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan*	2 Laporan	9.150.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan*	2 Laporan	9.150.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Usaha Ekonomi Masyarakat					*Usaha Ekonomi Masyarakat*			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	11.650.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	11.650.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	11.650.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	11.650.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal*	300 Orang	11.650.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*	300 Orang	11.650.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					*Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	136.060.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	136.060.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	5.325.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	5.325.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	2.327.200,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	2.327.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	2.998.600,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	2.998.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	835.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	835.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	835.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana*	4 Laporan	835.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								n/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	36.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	36.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	19.500.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	19.500.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	17.000.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	17.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	39.463.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	39.463.800,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	5.189.900,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	5.189.900,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	7 Paket	9.156.800,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	7 Paket	9.156.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	8.205.100,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	8.205.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	9.009.500,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	7 Paket	9.009.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	7.902.500,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	7.902.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	0,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	41.400.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	41.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	41.400.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	41.400.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	12.535.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KAUMAN	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	12.535.400,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	6.745.400,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan*	6 Unit	6.745.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	11 Unit	5.790.000,00		KELURAHAN KAUMAN	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	11 Unit	5.790.000,00	
	KELURAHAN TANGGUNG				2.241.000.000,00	KELURAHAN TANGGUNG				2.241.000.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.241.000.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.241.000.000,00	
	-				2.241.000.000,00	-				2.241.000.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	34.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	34.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	34.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	34.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang Ada di Kecamatan										
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.000.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.000.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	33.000.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	33.000.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	2.074.034.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	2.074.034.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.987.818.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.987.818.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.090.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.090.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	11 Pokmas / Ormas	1.961.728.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	11 Pokmas / Ormas	1.961.728.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	86.216.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	86.216.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Lembaga Kemasyarakatan	77.966.500,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Lembaga Kemasyarakatan	77.966.500,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	8.250.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	8.250.000,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	11.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	11.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	11.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	11.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan*	100 Orang	11.000.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan*	100 Orang	11.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					*Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	121.965.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	121.965.500,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	3.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	3.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	1.500.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	1.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	1.500.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	1.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	2.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	2.000.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	39.894.700,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	39.894.700,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	11.250.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	11.250.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	28.644.700,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	28.644.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	22.834.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	22.834.800,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.450.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.450.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	4.488.700,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	4.488.700,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	3.429.100,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	3.429.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.500.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.500.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	5.967.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	5.967.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	0,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	8.528.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	8.528.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	8.528.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	8.528.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	22.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	22.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	22.000.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	22.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	23.708.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	23.708.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	4.208.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	4.208.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	9.500.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	9.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	10.000.000,00		KELURAHAN TANGGUNG	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	10.000.000,00	
	KELURAHAN BENDO				2.045.600.000,00	KELURAHAN BENDO				2.045.600.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.045.600.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.045.600.000,00	
	-				2.015.000.000,00	-				2.015.000.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	36.663.200,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	36.663.200,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	36.663.200,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	36.663.200,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.276.800,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	1.276.800,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	35.386.400,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	35.386.400,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.807.463.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.807.463.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.746.813.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.746.813.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*	2 Lembaga Kemasyarakatan	24.807.000,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan*	2 Lembaga Kemasyarakatan	24.807.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan di Kelurahan					*Pembangunan di Kelurahan*			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	28 Pokmas / Ormas	1.722.006.000,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	28 Pokmas / Ormas	1.722.006.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	60.650.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	60.650.500,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.971.800,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.971.800,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Laporan	10.678.700,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan*	3 Laporan	10.678.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Usaha Ekonomi Masyarakat			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	33.814.100,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	33.814.100,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	33.814.100,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	33.814.100,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal*	100 Orang	33.814.100,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*	100 Orang	33.814.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					*Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	137.059.200,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	137.059.200,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	2.854.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	2.854.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	1.227.200,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	1.227.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1.627.200,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1.627.200,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	901.400,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	901.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	5 Laporan	901.400,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana*	5 Laporan	901.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								n/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	36.656.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	36.656.600,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 paket	9.000.000,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 paket	9.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	27.656.600,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	27.656.600,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	37.998.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	37.998.300,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.790.600,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.790.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	8.183.500,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	8.183.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	22 Paket	4.598.200,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	22 Paket	4.598.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	12.430.000,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	12.430.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	7.996.000,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	7.996.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	15.841.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	15.841.800,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	15.841.800,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	15.841.800,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	31.899.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	31.899.400,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KELURAHAN BENDO	-	-	31.899.400,00		KELURAHAN BENDO	-	-	31.899.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	10.907.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN BENDO	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	10.907.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	5.178.300,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	5.178.300,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	11 Unit	5.729.000,00		KELURAHAN BENDO	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	11 Unit	5.729.000,00	
	KELURAHAN KEPANJENLOR				1.931.500.000,00	KELURAHAN KEPANJENLOR				1.931.500.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				1.931.500.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.931.500.000,00	
	-				1.931.500.000,00	-				1.931.500.000,00	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	23.033.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	100 %	23.033.500,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	23.033.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	23.033.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang Ada di Kecamatan										
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	3.033.500,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	1 Dokumen	3.033.500,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	20.000.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	20.000.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.766.802.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya*	100%	1.766.802.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.674.377.600,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	1.674.377.600,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	22.280.400,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	22.280.400,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	1.652.097.200,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	1.652.097.200,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	92.424.600,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	100 %	92.424.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	7 Lembaga Kemasyarakatan	75.075.800,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	7 Lembaga Kemasyarakatan	75.075.800,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	17.348.800,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	17.348.800,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	39.609.800,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	100 %	39.609.800,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	39.609.800,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	100 %	39.609.800,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	120 Orang	39.609.800,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	120 Orang	39.609.800,00	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	102.054.500,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	86 Baik	102.054.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	4.295.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	4.295.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1.866.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1.866.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	2.429.900,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	2.429.900,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat*	100 %	2.124.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat*	100 %	2.124.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah sesuai standar					*daerah sesuai standar*			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	2.124.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	4 Laporan	2.124.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	40.290.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100 %	40.290.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	10.500.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Perundang-Undangan*	1 paket	10.500.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	14 Orang	29.790.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	14 Orang	29.790.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	14.217.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	14.217.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	107.500,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	107.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3.813.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3.813.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	759.600,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	759.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	6.540.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	6.540.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.997.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.997.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	36.119.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	36.119.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36.119.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36.119.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	5008500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 %	5008500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	2.480.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	2.480.000,00	
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	2 Unit	360.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	2 Unit	360.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	1.318.500,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	1.318.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	850.000,00		KELURAHAN KEPANJENLOR	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	850.000,00	
					30.714.316.883,00					30.714.316.883,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (*top down*) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (*bottom up*) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2025.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
A	Pokok - Pokok Pikiran Masyarakat					
1	Pagar Depan Kelurahan Kepanjenlor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kepanjenlor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Diakomodir
B	Daftar Skala Prioritas Musrenbang RKPD Kecamatan					
1	Pelatihan pemberdayaan perempuan dan organisasi / Pelatihan Membatik dan Pemasarannya (marketing)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Kelurahan	Jumlah perempuan dan organisasi Membatik yang mendapatkan pelatihan	@ kelurahan 25 orang	Diakomodir
2	Pendampingan Keluarga Anak Stunting	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Kelurahan	Jumlah Keluarga Anak Stunting yang medapat pendampingan	@ kelurahan 10 Orang	Diakomodir
3	Pengaspalan hotmix	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RT 02 dan 3 RW 05 Jalan Ciater (Lat -8.083969 , Long 112.167658)	Jumlah jalan yang mendapatkan pengaspalan hotmix	P. 200 L. 3 M	Diakomodir
4	Penutupan Saluran	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jl Barito RT 3 Rw 8	Jumlah saluran yang di bangun penutupnya	p = 200m l = 80cm	Diakomodir
5	Perbaikan talud makam	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Makam Warga Kelurahan Kepanjenkidul (Karangsari)	Jumlah talud makam yang diperbaiki	20 x 1,5	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6	Pelatihan Wirausaha	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kepanjenkidul	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	20 orang	Diakomodir
7	Budidaya Madu Lanceng sebagai ikon Kelurahan Kepanjenlor dan pendampingan kampung wisata Bongares	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RT 03/ RW 01	Jumlah budidaya Madu Lanceng yang diberikan	1 Paket	Diakomodir
8	Pemeliharaan Penutupan Drainase	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sepanjang Jl. Cipemali sebelah utara	Jumlah Penutupan Drainase yang dipelihara	p=600 l=1 t=80cm	Diakomodir
9	Sosialisasi membentuk kampung wisata edukuasi pendukung wisata relagi	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sentul	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi membentuk kampung wisata edukuasi pendukung wisata relagi	20 Orang	Diakomodir
10	Pelatihan Kapasitas Kewirausahaan untuk UKM	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sentul	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan Kapasitas Kewirausahaan untuk UKM	40 Orang	Diakomodir
11	Pembangunan jalan paving	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jl. Ciliwung utara SMP 3 selatan puskesmas.RW 4	Jumlah jalan paving yang dibangun	150x3 M	Diakomodir
C	Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan					
1			N I H I L			
2						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Visi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN
UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT"

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing,Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Diantara kelima misi diatas Kecamatan Kepanjenkidul mengemban tugas sesuai misi kelima yaitu: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi," Misi tersebut disikapi Kecamatan Kepanjenkidul dengan peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan dan Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul

3.2.1. Tujuan Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah.

3.2.2. Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan ;
2. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah;
3. Meningkatnya kinerja perangkat Daerah.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

Kecamatan Kepanjenkidul

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN 2023		PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2024	TARGET	
				TARGET	REALISASI		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai IKM (kriteria sesuai standart adalah sesuai dengan dokumen IKM)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (94)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	(Jumlah pelayanan yang sesuai standart : Jumlah pelayanan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah kelurahan yang mengikuti program kelurahan berdaya : Jumlah kelurahan)x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	A (85,5)	A (85,31)	A (86)	A (86,5)	A (87)
5	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Kepanjenkidul	Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda	A (85,5)	A (85,31)	A (86)	A (86,5)	A (87)

Untuk mencapai target tujuan sasaran di Tahun 2025, Kecamatan Kepanjenkidul melakukan beberapa strategi :

1. Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan;
3. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah.

Dari strategi tersebut Kecamatan Kepanjenkidul melakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan;
2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan;
3. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan;
4. Peningkatan Fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kelurahan
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja;
6. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada Renja Tahun 2025 dijabarkan dalam Program dan Kegiatan yang dirumuskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Kecamatan Kepanjenkidul	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kecamatan Kepanjenkidul	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Sentul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Kauman	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Tanggung	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Bendo	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Sentul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Kauman	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Tanggung	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Bendo	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kecamatan Kepanjenkidul	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kepanjenkidul	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Sentul	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Kauman	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Tanggung	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Bendo	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung General / Tematik RB dan SAKIP
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Sentul	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Sentul	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Kauman	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Tanggung	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Bendo	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Dinas Operasional atau Lapangan			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
						2. Persentase rt berdaya		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Kepanjenkidul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Ngadirejo	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Sentul	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Kauman	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Tanggung	Mendukung pencapaian Tupoksi
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Bendo	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Keterangan
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Kepanjenlor	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Pada rencana kerja Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2025 terdapat rencana tindak lanjut dari Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2023 dengan rincian sebagimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Tindak lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan	Melakukan pembinaan dan pelatihan kapasitas petugas pelayanan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja perangkat daerah Yang Ada di Kecamatan - Sub kegiatan fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan
2	Mengoptimalkan sistem pelayanan digital dan terintegrasi dengan masing-masing Kelurahan	Melaksanakan update / pengembangan aplikasi Ageman Mas rahmat	- Program Penyelenggaraan Pemrintahan dan pelayanan Publik - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja perangkat daerah Yang Ada di Kecamatan - Sub kegiatan fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3	Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur kewilayahan	Mengakomodir kegiatan RT Keren, DSP musrenbang dan Pokir	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	Mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Melaksanakan kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan memfasilitasi FKUB, FKDM	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5	Meningkatkan fasilitasi perekonomian masyarakat kelurahan	Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan perekonomian melalui kegiatan Festival	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan se-Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KEPANJENKIDUL						16.779.316.883,00							16.783.249.141,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						16.779.316.883,00							16.783.249.141,00	
	7.01	KECAMATAN						16.779.316.883,00							16.783.249.141,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	12.714.332.687,00						88 Baik	12.415.549.321,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	5.250.000,00	KECAMATAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	3.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	7 Dokumen	3.150.000,00	KECAMATAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	2.100.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	11.029.017.399,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	10.645.968.269,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	11.028.267.399,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	82 Orang/bulan	10.645.180.769,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				5 Laporan	750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	787.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									an Berbasis Digital dan Investasi				
	7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	51.138.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	53.694.900,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	21.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket	22.050.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	30.138.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	100 Orang	31.644.900,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	318.675.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	334.608.960,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.987.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket	5.236.770,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	23.040.700,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	3 Paket	24.192.735,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	35.173.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	5 Paket	36.931.650,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	65.152.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	2 Paket	68.409.600,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	71.155.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	2 Paket	74.712.855,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	18.600.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	36 Dokumen	19.530.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	100.567.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	9 Laporan	105.595.350,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	-			100 %	23.248.400,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkata n Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan Kepanjenkidul	100 %	24.410.820,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23.248.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkata n Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan Kepanjenkidul	2 Unit	24.410.820,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	950.107.888,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	997.613.282,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	33.133.888,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	36 Laporan	34.790.582,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	916.974.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	13 Laporan	962.822.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	337.145.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan Kepanjenkidul	100 %	354.003.090,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	113.049.300,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan Kepanjenkidul	14 Unit	118.701.765,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	24.096.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan Kepanjenkidul	5 Unit	25.301.325,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan Kepanjenkidul	1 Unit	210.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan Kecamatan yang tepat waktu*	-			100 %	432.638.232,00						100 %	454.270.144,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	432.638.232,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	100 %	454.270.144,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	900.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	1 Dokumen	945.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	431.738.232,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	7 Laporan	453.325.144,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	3.286.194.264,00						100 %	3.549.970.391,00	
			Persentase rt berdaya				100 %							100 %		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	2.576.945.658,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	100 %	2.805.259.355,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	78.750.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	2.501.945.658,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	7 Pokmas / Ormas	2.726.509.355,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	709.248.606,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	100 %	744.711.036,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	437.334.106,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	459.200.811,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	271.914.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	3 Laporan	285.510.225,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	346.151.700,00						100 %	363.459.285,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	346.151.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	100 %	363.459.285,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	346.151.700,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	150 Orang	363.459.285,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
		KELURAHAN KEPANJENKIDUL						3.101.000.000,00							3.256.049.999,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.101.000.000,00							3.256.049.999,00	
	7.01	KECAMATAN						3.101.000.000,00							3.256.049.999,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	151.629.692,00						-	159.211.176,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	4.353.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	4.571.280,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.098.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.202.900,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.255.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.368.380,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	2.178.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	2.286.900,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5 Laporan	2.178.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.286.900,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	38.886.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	40.830.300,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11.250.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		11.812.500,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	27.636.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		29.017.800,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	36.005.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	37.805.250,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.905.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		3.050.355,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.205.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		15.965.355,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	6.381.700,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.700.785,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.950.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		5.197.500,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.563.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.891.255,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	-			100 %	21.475.724,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	22.549.510,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4.550.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.777.500,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	16.925.724,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		17.772.010,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	17.360.868,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kelurahan	-	18.228.911,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	17.360.868,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kelurahan		18.228.911,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	31.370.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	32.939.025,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	2.832.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.973.600,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	3.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		3.150.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	7.158.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		7.516.425,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12.580.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		13.209.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	5.800.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.090.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	33.100.000,00						-	34.755.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	33.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkata n Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	-	34.755.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.100.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkata n Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		1.155.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	32.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		33.600.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	2.873.370.308,00						-	3.017.038.823,00	
			Persentase rt berdaya				100 %									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	2.782.184.808,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	-	2.921.294.048,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	33.699.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		35.384.790,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	2.748.485.008,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		2.885.909.258,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	91.185.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	-	95.744.775,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	80.216.700,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		84.227.535,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	10.968.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		11.517.240,00	KELURAHAN KEPANJEN KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	42.900.000,00						-	45.045.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	42.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	45.045.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara				100 Orang	42.900.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		45.045.000,00	KELURAHAN KEPANJENKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kesatuan Republik Indonesia													
		KELURAHAN NGADIREJO						1.340.000.000,00							1.409.257.501,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.340.000.000,00							1.409.257.501,00	
	7.01	KECAMATAN						1.340.000.000,00							1.409.257.501,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	93.395.650,00						-	100.322.933,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	210.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												an Berbasis Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	100.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		105.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	100.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		105.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	105.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5 Laporan	100.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		105.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	53.114.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	55.770.330,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	19.878.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		20.872.530,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	33.236.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		34.897.800,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	12.039.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	13.008.660,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	714.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		749.700,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.486.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		5.077.800,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	859.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		902.160,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.840.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.032.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.140.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.247.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	17.816.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	18.707.693,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	17.816.850,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		18.707.693,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	10.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	12.521.250,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	350.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.257.500,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	9.775.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		10.263.750,00	KELURAHAN NGADIREJO
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	20.120.000,00						-	21.126.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	20.120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	-	21.126.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	120.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		126.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	20.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		21.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.197.593.950,00						-	1.257.473.648,00	
			Persentase RT Berdaya													
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	1.122.203.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	-	1.178.313.413,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	26.629.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		27.960.450,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	1.095.574.250,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul		1.150.352.963,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	75.390.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	79.160.235,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	63.895.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		67.089.960,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	11.495.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		12.070.275,00	KELURAHAN NGADIREJO
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	28.890.400,00						-	30.334.920,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	28.890.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	30.334.920,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	28.890.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		30.334.920,00	KELURAHAN NGADIREJO
		KELURAHAN SENTUL						2.125.000.000,00							2.231.250.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.125.000.000,00							2.231.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						2.125.000.000,00							2.231.250.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	141.711.000,00						-	148.796.550,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	3.965.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	4.163.250,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.575.000,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.465.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.588.250,00	KELURAHAN SENTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	1.479.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	1.552.950,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	1.479.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.552.950,00	KELURAHAN SENTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	41.540.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-	-	43.617.000,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	9.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-		9.450.000,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	32.540.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	-		34.167.000,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	49.951.509,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	52.449.084,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.732.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		8.118.600,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14.959.646,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		15.707.628,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4.888.088,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		5.132.492,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.040.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		16.842.420,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.331.375,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.647.944,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	27.749.891,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	29.137.386,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	27.749.891,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		29.137.386,00	KELURAHAN SENTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	17.025.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	17.876.880,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	8.425.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		8.846.880,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	8.600.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		9.030.000,00	KELURAHAN SENTUL
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	25.603.500,00						-	26.883.675,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	25.603.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	26.883.675,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.603.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.683.675,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	24.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		25.200.000,00	KELURAHAN SENTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.951.585.500,00						-	2.049.164.775,00	
			Persentase rt berdaya				100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	1.858.643.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	1.951.575.780,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	26.329.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		27.646.080,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	1.832.314.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.923.929.700,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	92.941.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	97.588.995,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	82.341.900,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		86.458.995,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	10.600.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		11.130.000,00	KELURAHAN SENTUL
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	6.100.000,00						-	6.405.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	6.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	6.405.000,00	KELURAHAN SENTUL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	6.100.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		6.405.000,00	KELURAHAN SENTUL
		KELURAHAN KAUMAN						2.071.500.000,00							2.175.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.071.500.000,00							2.175.075.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.071.500.000,00							2.175.075.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	136.060.000,00						-	142.863.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	5.325.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	5.592.090,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.327.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.443.560,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.998.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		3.148.530,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	876.750,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5 Laporan	835.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		876.750,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	36.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	38.325.000,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	19.500.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		20.475.000,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	17.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		17.850.000,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	39.463.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kelurahan	-	41.436.990,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.189.900,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kelurahan		5.449.395,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.156.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kelurahan		9.614.640,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	8.205.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kelurahan		8.615.355,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.009.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kelurahan		9.459.975,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.902.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kelurahan		8.297.625,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	41.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	43.470.000,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	41.400.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		43.470.000,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	12.535.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	13.162.170,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6.745.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		7.082.670,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	5.790.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.079.500,00	KELURAHAN KAUMAN
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	25.097.500,00						-	26.352.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			-	25.097.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan	-	26.352.375,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.097.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan		1.152.375,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	24.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Masyarakat Kelurahan		25.200.000,00	KELURAHAN KAUMAN
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.898.692.500,00						-	1.993.627.125,00	
			Persentase rt berdaya	-			100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	1.829.986.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	1.921.485.615,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Digital dan Investasi				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	30.218.300,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		31.729.215,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	1.799.768.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.889.756.400,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	68.706.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	72.141.510,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyarakatan	59.556.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		62.534.010,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	9.150.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		9.607.500,00	KELURAHAN KAUMAN
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	11.650.000,00						-	12.232.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	11.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	12.232.500,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	11.650.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		12.232.500,00	KELURAHAN KAUMAN
		KELURAHAN TANGGUNG						2.241.000.000,00							2.353.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.241.000.000,00							2.353.050.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.241.000.000,00							2.353.050.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	121.965.500,00						-	128.063.775,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	3.150.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.575.000,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.575.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	2.100.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	2.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.100.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	39.894.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	41.889.435,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11.250.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		11.812.500,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	28.644.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		30.076.935,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	22.834.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	23.976.540,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.450.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.672.500,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.48 8.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.7 13.135,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3.42 9.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		3.6 00.555,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.725.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.967.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.265.350,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	-			100 %	8.52 8.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	8.9 54.400,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8.52 8.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		8.9 54.400,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	22.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	23.100.000,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	22.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		23.100.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	23.708.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	24.893.400,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	4.208.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.418.400,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	9.500.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		9.975.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		10.500.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	34.000.000,00						-	35.700.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	34.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	35.700.000,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.050.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	33.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		34.650.000,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	2.074.034.500,00						-	2.177.736.225,00	
			Persentase rt berdaya	-			100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	1.987.818.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	2.087.208.900,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	26.090.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		27.394.500,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	1.961.728.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		2.059.814.400,00	KELURAHAN TANGGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	86.216.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	90.527.325,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	77.966.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		81.864.825,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	8.250.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		8.662.500,00	KELURAHAN TANGGUNG
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	11.000.000,00						-	11.550.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	11.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	11.550.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	11.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		11.550.000,00	KELURAHAN TANGGUNG
		KELURAHAN BENDO						2.015.000.000,00							2.115.750.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.015.000.000,00							2.115.750.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.015.000.000,00							2.115.750.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	137.059.200,00						-	152.909.820,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	2.854.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	2.997.120,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1.227.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.288.560,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.627.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.708.560,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	901.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	946.470,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	901.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		946.470,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	36.656.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	47.487.090,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	9.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		18.447.660,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	27.656.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		29.039.430,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	37.998.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	39.898.215,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.790.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		5.030.130,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.18 3.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		8.5 92.675,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	4.59 8.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.8 28.110,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.430.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		13.051.500,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7.996.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		8.395.800,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	-			100 %	15.841.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	16.633.890,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.841.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		16.633.890,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	31.899.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	33.494.370,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	31.899.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		33.494.370,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	10.907.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	11.452.665,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	5.178.300,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		5.437.215,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	5.729.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.015.450,00	KELURAHAN BENDO
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	36.663.200,00						-	38.496.360,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	36.663.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	38.496.360,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.276.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.340.640,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	35.386.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		37.155.720,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.807.463.500,00						-	1.888.839.015,00	
			Persentase rt berdaya				100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	1.746.813.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	1.834.153.650,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	24.807.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		26.047.350,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				28 Pokmas / Ormas	1.722.006.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.808.106.300,00	KELURAHAN BENDO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	60.650.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	54.685.365,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	49.971.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		43.472.730,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	10.678.700,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		11.212.635,00	KELURAHAN BENDO
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	33.814.100,00						-	35.504.805,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	33.814.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	35.504.805,00	KELURAHAN BENDO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	33.814.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		35.504.805,00	KELURAHAN BENDO
		KELURAHAN KEPANJENLOR						1.931.500.000,00							2.028.075.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.931.500.000,00							2.028.075.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.931.500.000,00							2.028.075.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)*	-			87 Baik	102.054.500,00						-	107.157.225,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	-			100 %	4.295.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	4.510.695,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1.866.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.959.300,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.42 9.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.5 51.395,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	2.124.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	2.230.200,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	2.124.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.230.200,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	-			100 %	40.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	42.304.500,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	10.500.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		11.025.000,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	29.790.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		31.279.500,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	-			100 %	14.217.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	14.927.955,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	107.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		112.875,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.813.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.003.650,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	759.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		797.580,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.540.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		6.867.000,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.997.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		3.146.850,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	-			100 %	36.119.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	37.924.950,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36.119.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		37.924.950,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar*	-			100 %	5.008.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan	-	5.258.925,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	2.480.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		2.604.000,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	360.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		378.000,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.318.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.384.425,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	850.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		892.500,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu*	-			100 %	23.033.500,00						-	24.185.175,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	23.033.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	24.185.175,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	3.033.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		3.185.175,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	20.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		21.000.000,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	1.766.802.200,00						-	1.855.142.310,00	
			Persentase rt berdaya				100 %									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	1.674.377.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	1.758.096.480,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	22.280.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		23.394.420,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	1.652.097.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.734.702.060,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar*	-			100 %	92.424.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	97.045.830,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	75.075.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		78.829.590,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	17.348.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		18.216.240,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*	-			100 %	39.609.800,00						-	41.590.290,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart*	-			100 %	39.609.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	-	41.590.290,00	KELURAHAN KEPANJENLOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				120 Orang	39.609.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		41.590.290,00	KELURAHAN KEPANJENLOR
	J U M L A H							31.604.316.883,00							32.351.756.641,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penysuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai hal yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Rangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 dan rencana strategis Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2016 – 2021 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 mengacu pada RKPD Tahun 2025.
b. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul secara Bersama – sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    1. melaksanakan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    2. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2035 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Semoga Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dan dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Kepanjenkidul sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008